QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH

(RPJMA)

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH ACEH
2025

QANUN ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2025 -2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk mencapai tujuan periode pertama yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

d. bahwa..

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Qanun;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.
7. Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Renstra-SKPA adalah Dokumen Perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang berpedoman kepada RPJM Aceh.
14. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten/Kota adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 2029 yang merupakan penjabaran visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2024 dan Tahun 2025.

16. Badan.

16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah perangkat Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
17. Kepala Bappeda Aceh adalah Kepala SKPA yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, serta penelitian dan pengembangan di Aceh.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH

Pasal 2

(1) RPJM Aceh merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh hasil pemilihan pada Tahun 2024.

(2) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Visi:

Aceh Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan.

Misi:

1. Mewujudkan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat secara Kaffah.
2. Mewujudkan Implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai *MoU* Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.
4. Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas.
6. Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan Aceh, membina stabilitas politik dan supremasi hukum.
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.

Pasal 3

Sistematika RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Aceh;

BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Aceh;

BAB IV : Program Perangkat Aceh dan Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintah Aceh;

BAB V : Penutup.

Pasal 4

RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

a. SKPA dalam menyusun Renstra-SKPA dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh dalam melaksanakan kegiatan pembangunan periode 2025-2029;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/Kota periode 2025-2029; dan

c. Pemerintah Aceh dalam penyusunan RKPA setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Aceh dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh Perangkat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Aceh.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 7

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Aceh lingkup Aceh, dan antar Kabupaten/Kota.

(2) Pengendalian.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan pembangunan Aceh; dan

b. pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH

Pasal 8

(1) Perubahan RPJM Aceh dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Aceh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan, apabila sisa masa berlaku RPJM Aceh kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Ketentuan mengenai Perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Aceh.

(5) Perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPA dan perubahan Renstra SKPA.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Aceh ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun Aceh ini.

(2) Qanun ini menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Aceh sampai tahun 2029 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Aceh transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPA Tahun 2030 sebelum ditetapkannya RPJM Aceh Tahun 2030-2034.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 November 2025
13 Jumadil Awal 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 November 2025
13 Jumadil Awal 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG QANUN ACEH (7-201/2025)

Lampiran :
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025
Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
Tahun 2025-2029

SINGKATAN DAN AKRONIM

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
A	
ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
AKB	Angka Kematian Bayi
AKBa	Angka Kematian Balita
AKI	Angka Kematian Ibu
ANC	*Antenatal Care*
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	*Association of South East Asia Nation*
ASFR	*Age Specific Fertility Rate*
ASN	Aparatur Sipil Negara
ATDC	*Aceh Trade and Distribution Center*
ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
B	
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
BADA	Badan Akreditasi Daya Aceh
Bapokting	Bahan Pokok dan Bahan Penting
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BARSELA	Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat - Selatan
BASAJAN	Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho
BAZNAS	Badan Zakat Nasional
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BI	Bank Indonesia
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BLK	Balai Latihan Kerja
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLUD	Balan Layanan Umum Daerah
BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOR	*Bed Occupancy Rate*
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPBJ	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
BPDAS	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

BPPA	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
BPPBM	Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
BPR	Bank Perekonomian Rakyat
BPRS	Bank Perekonomian Rakyat Syariah
BPS	Badan Pusat Statistik
BRA	Badan Reintegrasi Aceh
BTT	Belanja Tidak Terduga
BUMA	Badan Usaha Milik Aceh
BUMD	Badan Usaha Milik Desa
BUMG	Badan Usaha Milik Gampong
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
C	
CAT	Cekungan Air Tanah
CCS	*Carbon Capture and Storage*
CKG	Cek Kesehatan Gratis
CPO	*Crude Palm Oil*
CPP	Cadangan Pangan Pemerintah
CPR	*Contraceptive Prevalence Rate*
CRU	*Conservation Response Unit*
CSO	*Civil Society Organization*
CSR	*Corporate Social Responsibility*
D	
D3TLH	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
DAK	Dana Lokasi Khusus
DALKARHUTLA	Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
DAS	Daerah Aliran Sungai
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DI	Daerah Irigasi
DID	Dana Insentif Daerah
Disbudpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dishub	Dinas Perhubungan
Dispora	Dinas Pemuda dan Olahraga
DLHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DOKA	Dana Otonomi Khusus Aceh
DPA	Destinasi Periwisata Aceh
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPMG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPT	Difteri, Pertusis dan Tetanus
DTGA	Dataran Tinggi Gayo Alas
E	
EBT	Energi Baru Terbarukan
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

F	
FASHARKAN	Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang
FDR	*Financing to Deposit Ratio*
FGD	*Focused Group Discussion*
FOLU	*Forestry and Other Land Use*
G	
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GAP	*Good Agriculture Practice*
GK	Garis Kemiskinan
GKG	Gabah Kering Giling
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non Makanan
H	
Ha	Hektar
HAM	Hak Asasi Manusia
HGU	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*
HL	Hutan Lindung
HLS	Harapan Lama Sekolah
HM	Hak Milik
HPH	Hak Pegusahaan Hutan
I	
iBANGGA	Indeks Pembangunan Keluarga
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IDM	Indeks Desa Membangun
IDSD	Indeks Daya Saing Daerah
IEBI	Indeks Ekonomi Biru Indonesia
IGRK	Inventarisasi Gas Rumah Kaca
IGT	Informasi Geospasial Tematik
IHK	Indeks Harga Konsuman
IID	Indeks Inovasi Daerah
IKA	Indeks Kualitas Air
IKAL	Indeks Kualitas Air Laut
IKD	Indeks Ketahanan Daerah
IKD	Indek Kinerja Daerah
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IKIP	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
IKK	Ibukota Kecamatan
IKL	Indeks Kualitas Lahan
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

IKM	Industri Kecil dan Menengah
IKP	Indeks Ketahanan Pangan
IKPS	Indeks Kinerrja Pengelolaan Sampah
IKS	Indeks Kesejahteraan Sosial
IKU	Indeks Kualitas Udara
IKU	Indikator Kinerja Utama
IKUB	Indeks Kerukunan Umat Beragama
ILEDSA	*Integrated Low Emission Development Strategy for Aceh*
IORA	*Indian Ocean Rip Association*
IPA	Indeks Perlindungan Anak
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPHA	Indeks Pemenuhan Hak Anak
IPHP	Industri Pengolahan Hasil Pertanian
IPK	Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPKA	Indeks Perlindungan Khusu Anak
IPKN	Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional
IPLM	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPP	Indeks Pembangunan Pemuda
IPP	Indeks Profesionalisme Pegawai
IPPKU	Indeks Pelaksnaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
IPS	Indeks Pembangunan Statistik
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRB	Indeks Risiko Bencana
IRI	International Roughness Index
IRMS	*Integrated Road Management System*
ISDA	Indeks Standarisasi Dayah Aceh
ItPt	Indek Terima Peternak
IUKI	Izin Usaha Kawasan Industri
IUU Fishing	*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*
IW	Indeks Williamson
J	
JEP1	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan
JKA	Jaminan Kesehatan Aceh
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JP2	Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih
K	
Kab	Kabupaten
KAMI	Indeks Keamanan Informasi
KARHUTLA	Kebakaran Hutan dan Lahan
KB	Keluarga Berencana
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kg	Kilogram

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

KI	Kawasan Industri
KIA	Kawasan Industri Aceh
KIR	Uji Kelayakan
KK	Kepala Keluarga
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KLA	Kabupaten kota menuju layak anak
KLB	Kondisi Luar Biasa
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kominsa	Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kop UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KPA	Kawasan Pelestarian Alam
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KRT	Konsumsi Rumah Tangga
KSA	Kawasan Strategis Aceh
KSA	Kawasan Suaka Alam
KSN	Kawasan Strategis Nasional
KSP	Kebijakan Satu Peta
KSPA	Kawasan Strategis Pariwisata Aceh
KSPP	Kawasan Sentra Produksi Pangan
KSPPS	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
KTD	Kehamilan Tidak Direncanakan
KUPS	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
L	
LANAL	Pangkalan TNI Angkatan Laut
LANTAMAL	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut
LATIMTA	Langsa-Aceh Timur-Aceh Tamiang
LHK	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Linmas	Perlindungan Masyarakat
LITBANJIRAP	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
M	
MAA	Majelis Adat Aceh
MADA	Majelis Akreditasi Daya Aceh
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MCK	Mandi Cuci Kakus
MCPR	*Modern Contraceptive Prevalence Rate*

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MINERBA	Mineral dan Batubara
MoU	*Memorandum of Understanding*
MPA	Masyarakat Peduli Api
MPKG	Masyarakat Peduli Konflik Gajah
MPU	Majelis Permusyawaratan Ulama
N	
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
NTN	Nilai Tukar Nelayan
NTP	Nilai Tukar Petani
NTPt	Nilai Tukar Peternakan
O	
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	Otonomi Khusus
P	
P3K	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PAA	Pendapatan Asli Aceh
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAMHUT	Pengamanan Hutan
PAP	Pajak Air Minum
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PD3I	Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
PDRB	Product Domestic Regional Bruto
PEMA	PT. Pembangunan Aceh
PEN	Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Perkim	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perpres	Peraturan Presiden
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PES	*Payment for Ecosystem Services*
PETI	Pertambangan Tanpa Izin
PHBS	Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHTC	Program Hasil Terbaik Cepat
PIPPIB	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
PIT	Penangkapa Ikan Terukur
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	Program Keluarga Harapan
PKL	Pusat Kegiatan Lokal
PKO	*Palm Kernel Oil*
PKS	Pabrik Kelapa Sawit
PKSM	Penyuluh kehutanan Swadaya Masyarakat
PKSN	Pusat Kegiatan Strategis Nasional

PKU	Pendidikan Kader Ulama Aceh
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTD	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMTB	Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto
Pol WH	Polisi Wilayatul Hisbah
PON	Pekan Olah Raga Nasional
POSAL	Pos TNI Angkatan Laut
PoU	*Prevalence of Undernourishment*
PP	Peraturan Pemerintah
PPH	Pola Pangan Harapan
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPKT	Pulau-Pulau Kecil Terluar
PPLPD	Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah
PPP	*Public-Private Partnership*
PPS	Pelabuhan Perikanan Samudera
PS	Perhutanan Sosial
PSE	Penyelenggaraan Sistem Elektronik
PSKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSU	Prasarana, Sarana, dan Utilitas
PUPR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RAD	Rencana Aksi Daerah
RAT	Rencana Aksi Tahunan
RCI	*Road Condition Index*

R

Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RKPA	Rencana Kerja Pemerintah Aceh
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RKU	Rencana Kegiatan Usaha
RLH	Rumah Layak Huni
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
ROA	*Return On Asset*
Rp	Rupiah
RPJMA	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSIA	Rumah Sakit Ibu dan Anak
RSJ	Rumah Sakit Jiwa
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUZA	Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin
RT	Rumah Tangga
RTH	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWA	Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
S	
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SDI	Sumber Daya Alam
SDI	*Sport Development Index*
SDM	Sumber Daya Manusia
Setda	Sekretariat Daerah
SIDa	Sistem Inovasi Daerah
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPA	Satuan Kerja Perangkat Aceh
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMAKON	Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SNI	Standar Nasional Indonesia
SPAL	Sistem Pengolahan Air Limbah
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SRAP	Strategi Rencana Aksi Pengelolaan
T	
TBC	Tuberkulosis
TBM	Tanaman Belum Menghasilkan
TFR	*Total Fertility Rate*
TGM	Tingkat Kegemaran Membaca
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TJLSP	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TM	Tanaman Menghasilkan
TNGL	Taman Nasional Gunung Leuser

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
TORA	Tanah Objek Reforma Agraria
TP2DD	Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TR	Tanaman Rusak
TTC	Tuna, Tongkol dan Cakalang
U	
UHH	Usia Harapan Hidup
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNESCO	*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*
UPLM	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD KPH	Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan
USK	Universitas Syiah Kuala
USPPS	Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
UTP	Usaha Pertanian Perorangan
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Pemerintahan Aceh
W	
WBTB	Warisan Budaya Tak Benda Budaya
WHO	*World Health Organization*
WMK	Wilayah Manajemen Kebakaran
WS	Wilayah Sungai
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
Z	
ZISWAF	Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf

DAFTAR ISI

SINGKATAN DAN AKORNIM ---------- i
DAFTAR ISI ---------- xi
DAFTAR TABEL ---------- xix
DAFTAR GAMBAR ---------- xxix

BAB I PENDAHULUAN ---------- 1
1.1. Latar Belakang ---------- 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ---------- 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ---------- 8
1.4. Maksud dan Tujuan ---------- 9
1.5. Sistematika Penulisan ---------- 10

BAB II GAMBARAN UMUM ACEH ---------- 11
2.1. Gambaran Umum Kondisi Aceh ---------- 11
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- 11
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Aceh ---------- 11
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ---------- 12
A. Kondisi Hidrologi ---------- 12
C. Kondisi Klimatologi ---------- 26
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan --- 28
A. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Aceh ---------- 29
B. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh ---------- 29
C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ---------- 31
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan ---------- 96
A. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik ---------- 96
B. Energi dan Sumber Daya Mineral ---------- 99
C. Indikator Ketahanan Pangan ---------- 104
D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ---------- 106
E. Konsumsi Listrik Perkapita ---------- 109
2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas ---------- 110
A. Indek kualitas lingkungan hidup ---------- 110
B. Rumah Tangga dengan sanitasi aman -------- 111
C. Timbulan sampah terolah ---------- 113
D. Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah ---------- 115
2.1.1.6. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim 118
A. Penurunan intensitas Emisi GRK ---------- 118

B. Indeks Risiko Bencana ---------- 119
C. Indeks Ketahanan Daerah ---------- 127
2.1.1.7. Demografi ---------- 128
A. Jumlah Penduduk ---------- 128
B. Distribusi Jumlah Penduduk ---------- 128
C. Struktur Penduduk ---------- 129
D. Laju pertumbuhan penduduk, rasio dan kepadatan penduduk Aceh ---------- 131
E. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan ---------- 133
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- 134
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ---------- 134
A. Pertumbuhan PDRB ---------- 134
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ---------- 141
C. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) ------ 143
D. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional) -- 146
E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) --------- 147
F. Kemiskinan ---------- 148
G. Pengangguran ---------- 152
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua ---------- 154
A. Angka Usia Harapan Hidup ---------- 154
B. Angka Kematian Ibu (AKI) ---------- 154
C. Angka Kematian Bayi (AKB) ---------- 156
D. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) ---------- 156
E. Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) --------- 157
F. Insiden Tuberkolosis ---------- 158
G. Persentase Masyarakat Memiliki Asuransi Kesehatan Aktif ---------- 159
H. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IBL) -------- 160
I. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit -------- 161
J. Persentase Hipertensi dalam Pengendalian -- 161
K. Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup ---------- 162
L. Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis ---------- 163
M. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana ---------- 164
N. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa (KLB) ---------- 165
O. Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang Fungsional ---------- 165
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang merata ---------- 166
A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ---------- 166
B. Angka Harapan Lama Sekolah ---------- 168

C. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah ---------- 169
D. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun ---------- 170
E. Kemampuan Literasi dan Numerasi ---------- 171
F. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK ---------- 172
G. Sarana dan Prasarana Sekolah ---------- 172
H. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ---------- 173
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif ---------- 174
A. Jaminan Sosial Tenaga kerja ---------- 174
B. Indeks Kesejahteraan Sosial ---------- 175
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju --- 182
A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama ------ 182
B. Kebudayaan ---------- 194
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif ---------- 200
A. Indeks Pembangunan Keluarga ---------- 200
B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak --- 201
C. Indeks Perlindungan Anak (IPA) ---------- 202
D. Indeks Pembangunan Gender ---------- 203
E. Indeks Ketimpangan Gender ---------- 204
F. Indeks Pemberdayaan Gender ---------- 204
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ---------- 205
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia ---------- 205
A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) ---------- 205
B. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ---------- 206
C. Kepemudaan dan Olahraga ---------- 209
2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi --------- 213
A. Rasio PDRB Industri Pengolahan ---------- 213
B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum -- 216
C. Capaian IPKN Tingkat Aceh Tahun 2023 (data terakhir 2022) ---------- 218
D. Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020- 2024 ---------- 220
E. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah -------- 221
F. Rasio Kewirausahaan ---------- 225
G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ---------- 226
H. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (menggunakan Proporsi UMKM terhadap Angkatan Kerja sebagai proxy pengganti) ---- 228
I. Riset dan Inovasi Daerah ---------- 229
J. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ---------- 233

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru ---------- 234
A. Pertanian ---------- 234
B. Perkebunan ---------- 240
C. Peternakan ---------- 251
D. Kehutanan---------- 254
E. Kelautan dan Perikanan---------- 268
F. Nilai Tukar Petani ---------- 272
G. Nilai Tukar Peternakan---------- 275
H. Nilai Tukar Nelayan ---------- 278
I. Porsi EBT dalam Bauran Energi ---------- 280
2.1.3.4. Transformasi Digital ---------- 281
A. Persandian ---------- 281
B. Statistik ---------- 281
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ---------- 283
A. Penanaman Modal ---------- 283
B. Ekspor Barang dan Jasa ---------- 284
C. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ---- 286
2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi---------- 286
A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur---------- 286
B. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum. ---------- 290
C. Persentase Desa mandiri ---------- 292
D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur --------- 294
E. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh ---------- 294
F. Penataan Ruang ---------- 295
G. Pengairan ---------- 298
H. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman---------- 304
I. Perhubungan---------- 306
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro---------- 312
A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ---------- 312
B. Rasio Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB ---------- 313
C. Tingkat Inflasi ---------- 314
D. Inklusi Keuangan---------- 318
E. Pendalaman/Intermediasi SektorKeuangan-- 319
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ---------- 323
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif---------- 323
A. Komunikasi dan Informatika ---------- 323
B. Perpustakaan ---------- 325
C. Kearsipan---------- 330
D. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ---------- 332

E. Kepuasan Pelayanan Keuangan ---------- 334
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial ---------- 335
A. Indeks Reformasi Hukum ---------- 335
B. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh -- 335
C. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan MAsyarakat ---------- 336
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan ---------- 338
A. Indeks Daya Saing Daerah ---------- 338
2.1.4.4. Kinerja Pembangunan Masa Lalu ---------- 339
2.2. Gambaran Keuangan Aceh ---------- 358
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ---------- 358
2.2.1.1. Pendapatan Daerah ---------- 365
A. Pendapatan Asli Aceh (PAA) ---------- 365
B. Pendapatan Transfer ---------- 369
C. Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah --------- 374
2.2.1.2. Belanja Aceh ---------- 376
A. Belanja Operasi ---------- 376
B. Belanja Modal ---------- 381
C. Belanja Tidak Terduga ---------- 382
D. Belanja Transfer ---------- 383
2.2.1.3. Pembiayaan Aceh ---------- 383
A. Penerimaan Pembiayaan ---------- 384
B. Pengeluaran Pembiayaan ---------- 385
2.2.2. Neraca Daerah ---------- 386
2.2.2.1. Aset ---------- 389
A. Aset Lancar ---------- 389
B. Aset Tidak Lancar ---------- 390
2.2.2.2. Kewajiban ---------- 390
A. Kewajiban Jangka Pendek ---------- 391
B. Kewajiban Jangka Panjang ---------- 392
2.2.2.3. Ekuitas ---------- 392
2.2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ---------- 392
2.2.3.1. Proporsi Pengunaan Anggaran ---------- 394
2.2.3.2. Analisis Pembiayaan ---------- 394
2.2.4. Kerangka Pendanaan ---------- 395
3.2.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh ---------- 395
A. Pendapatan ---------- 395
B. Belanja ---------- 408
C. Pembiayaan ---------- 411

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Aceh ---------- 416
2.3.1. Permasalahan Pembangunan ---------- 416
2.3.1.1. Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian. ---------- 416
2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif:---------- 418
2.3.1.3. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh: ---------- 421
2.3.1.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah: ----- 425
2.3.1.5. Sumber Daya Manusia masih rendah ---------- 428
2.3.1.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah; ---------- 431
2.3.2. Isu Strategis Pembangunan ---------- 433
2.3.2.1. Isu Strategis Nasional ---------- 433
2.3.2.2. Isu Strategis Aceh ---------- 433
1. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh 433
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting -- 434
3. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat. ---------- 434
4. Penanggulangan Kemiskinan. ---------- 435
5. Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh---------- 436
6. Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Digitalisasi ---------- 436
7. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat.---------- 436
8. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor---------- 437
9. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru ---------- 438
10. Memperkuat Perkotaan dan Pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi-------- 438
11. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas- 438
12. Memperkuat Otonomi Khusus---------- 439
13. Kemandirian dalam Ruang Fiskal---------- 439

14. Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga ---------- 439
15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan ---------- 440
16. Pengurangan Risiko Bencana ---------- 440
17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan ---- 440
18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas---------- 441

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH ---- 443

3.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Aceh Periode I (2025-2029) ---------- 443
3.2. Arah Pembangunan Aceh Periode 2025-2030 ---------- 444
3.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ---------- 445
3.3.1. Visi ---------- 445
3.3.2. Misi ---------- 445
3.3.3. Tujuan dan Sasaran ---------- 446
3.4. Keterkaitan Visi dan Misi ---------- 448
3.5. Penyelarasan dengan Visi dan Misi Aceh dan Nasional ---------- 449
3.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh---------- 450
3.7. Pentahapan Pembangunan Aceh 2026-2030 ---------- 465
3.8. Rumusan Program Prioritas---------- 468
3.9. Rumusan Arah Kebijakan---------- 508
3.10. Prioritas Aceh---------- 513
3.10.1. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah).---------- 513
3.10.2. Penguatan implementasi kekhususan dan keistiwewaan Aceh ---------- 514
3.10.3. Penurunan Angka Kemiskinan---------- 515
3.10.4. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim ---------- 517
3.10.5. Penciptaan lapangan kerja ---------- 518
3.10.6. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas ---------- 519
3.10.7. Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi 521
3.10.8. Transformasi digital yang terintegrasi ---------- 523
3.10.9. Tata Kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah------ 524
3.10.10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup---------- 526
3.11. Pembangunan Kewilayahan Aceh ---------- 526
3.11.1. Kawasan Pertumbuhan ---------- 527
3.11.2. Kawasan Komoditas Unggulan---------- 533
3.11.3. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi ---------- 534
3.11.4. Kawasan Afirmasi ---------- 536
3.11.5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana---------- 536
3.12. Kegiatan Prioritas Utama Aceh ---------- 537

BAB IV PROGRAM PERANGKAT ACEH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH ---------- 543
4.1. Program Perangkat Aceh ---------- 543
4.2. Kinerja Penyelenggara Pemerintah Aceh ---------- 581

BAB V PENUTUP ---------- 625
5.1. Pedoman Transisi ---------- 625
5.2. Kaidah Pelaksanaan ---------- 626

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan ---------- 13
Tabel 2.2. Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai ---------- 15
Tabel 2.3. Potensi Danau Aceh ---------- 18
Tabel 2.4. Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh---------- 20
Tabel 2.5. Kemiringan Lereng Aceh ---------- 23
Tabel 2.6. Data iklim rata-rata di Aceh Tahun 2013-2022. ---------- 27
Tabel 2.7. Penduduk Optimum di Aceh ---------- 34
Tabel 2.8. Selisih Proyeksi Penduduk Tahun 2045 dengan Jumlah Optimum Aceh ---------- 34
Tabel 2.9. Luas Potensi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Tiap Kabupaten/Kota ---------- 36
Tabel 2.10. Luas Potensi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Tiap Kabupaten/Kota ---------- 38
Tabel 2.11. Ekoregion Aceh ---------- 41
Tabel 2.12. Karakteristik Bentang Alam (KBA) dan Luasannya di Aceh---------- 46
Tabel 2.13. Kawasan Vegetasi Alami (KVA) Aceh ---------- 50
Tabel 2.14. Bahaya Banjir di Aceh ---------- 53
Tabel 2.15. Bahaya Banjir Bandang Aceh ---------- 55
Tabel 2.16. Bahaya Tanah Longsor Aceh---------- 57
Tabel 2.17. Bahaya Kekeringan Aceh ---------- 59
Tabel 2.18. Bahaya Likuifaksi Aceh---------- 61
Tabel 2.19. Bahaya Gempa Bumi Aceh ---------- 63
Tabel 2.20. Bahaya Tsunami di Aceh ---------- 65
Tabel 2.21. Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Kabupaten/Kota Aceh 2018-2022 67
Tabel 2.22. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh---------- 69
Tabel 2.23. Nilai IKA, IKU, IKL, dan IKLH Aceh Tahun 2022 ---------- 73
Tabel 2.24. Nilai IKLH Aceh Tahun 2016-2023 ---------- 74
Tabel 2.25. Perubahan Nilai IKLH dan Target dari Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2016 – 2022 ---------- 75
Tabel 2.26. Luas Pertambangan Aceh ---------- 77
Tabel 2.27. Luas HGU berdasarkan Kabupaten dan Kota di Aceh 2023 ---------- 79
Tabel 2.28. Perusahaan Pemegang PBPH dan Luasannya di Aceh 2023 ---------- 80
Tabel 2.29. Pihak Pemegang PPKH berdasarkan Lokasi dan Luasannya di Aceh 2023 ---------- 82
Tabel 2.30. Badan Hukum Pemegang Izin HKM di Aceh 2023 ---------- 83
Tabel 2.31. Badan Hukum Pengelolaan HD dan Luasnya di Aceh 2023---------- 85

Tabel 2.32. Data SIDIK Aceh---------- 86
Tabel 2.33. Luas PIPPIB Periode I Aceh ---------- 88
Tabel 2.34. Luas Tutupan Lahan di Aceh ---------- 89
Tabel 2.35. Folu Net Sink RO1 s/d RO 12 Aceh ---------- 92
Tabel 2.36. Luas Kawasan Hutan di Aceh ---------- 93
Tabel 2.37. Home Range Satwa di Aceh ---------- 95
Tabel 2.38. Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting ---------- 98
Tabel 2.39. Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) ---------- 98
Tabel 2.40. Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2024 ---------- 99
Tabel 2.41. Kejadian Kecelakaan di Lokasi PETI---------- 101
Tabel 2.42. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi di Aceh (per Tahun 2024) ---------- 102
Tabel 2.43. Perkembangan Pertumbuhan Angka PoU Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024---------- 106
Tabel 2.44. Jumlah Penduduk Yang mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 ---------- 108
Tabel 2.45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2020 - 2024 ---------- 110
Tabel 2.46. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Aceh, 2020–2024 ---------- 112
Tabel 2.47. Persentase Capaian Pengelolaan Sampah di Aceh Tahun 2020 - 2024 114
Tabel 2.48. Persentase Jumlah Sampah Terolah di Aceh Tahun 2024---------- 115
Tabel 2.49. Cakupan Area Pelayanan Sampah di Aceh & Nilai IKPS Aceh Tahun 2024 ---------- 117
Tabel 2.50. Data Emisi Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah Aceh (data termutakhir) ---------- 119
Tabel 2.51. Indek Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2020-2024---------- 120
Tabel 2.52. Potensi Bencana di Aceh ---------- 122
Tabel 2.53. Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2024 ---------- 123
Tabel 2.54. Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 127
Tabel 2.55. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2019-2024 ---------- 128
Tabel 2.56. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2024 ---------- 128
Tabel 2.57. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2024---------- 131
Tabel 2.58. Proyeksi Penduduk Aceh 5 (lima) tahun kedepan ---------- 134
Tabel 2.59. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah) ---------- 137

Tabel 2.60. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah) ---------- 138
Tabel 2.61. Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019 – 2024 (Persen) ---------- 139
Tabel 2.62. Laju Pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019-2024 (Persen) ---------- 141
Tabel 2.63. PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah) ---------- 143
Tabel 2.64. Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (Maret) ---------- 145
Tabel 2.65. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh dan Nasional Tahun 2020 - 2024 ---------- 147
Tabel 2.66. Persentase Penduduk Miskin se-Aceh Tahun 2017 – 2024 ---------- 148
Tabel 2.67. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2019-2024 ---------- 152
Tabel 2.68. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2019-2024 ---------- 152
Tabel 2.69. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019-2024---------- 153
Tabel 2.70. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Rumah Sakit Daerah Tahun 2020 – 2024 ---------- 161
Tabel 2.71. Laporan Hipertensi Terkendali Tahun 2024 ---------- 162
Tabel 2.72. Sasaran Cek Kesehatan Gratis (CKG) berdasarkan Kelompok Umur --- 163
Tabel 2.73. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) ---------- 165
Tabel 2.74. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024 ---------- 166
Tabel 2.75. Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2020–2024 ---------- 167
Tabel 2.76. Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2020 – 2024 ---------- 168
Tabel 2.77. Kelompok Kemampuan Literasi Aceh Tahun 2021-2023 ---------- 171
Tabel 2.78. Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2022 ------ 174
Tabel 2.79. Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2024 ---------- 176
Tabel 2.80. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Aceh ---------- 178
Tabel 2.81. Dukungan peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosia oleh Lembaga Non Pemerintah ---------- 178
Tabel 2.82. Data Penanganan Korban Bencana Tahun 2021 sampai dengan 2024 -- 179
Tabel 2.83. Data Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dari Tahun 2020 s.d 2024 - 180
Tabel 2.84. Taman Makam Pahlawan---------- 182

Tabel 2.85. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2019 – 2024 sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ---------- 183
Tabel 2.86. Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2019 – 2024 ---------- 184
Tabel 2.87. Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2024 -- 188
Tabel 2.88. Kegiatan dan Peserta Pembinaan Adat Istiadat dari Tahun 2020-2023 - 189
Tabel 2.89. Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2019 – 2024 --------- 190
Tabel 2.90. Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2019 – 2024--- 191
Tabel 2.91. Realisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat dan Korban Konflik Aceh Tahun 2019 s.d. 2024 (Orang) ---------- 193
Tabel 2.92. Perkembangan Kelompok Sanggar Seni di Aceh, 2020-2024 ---------- 196
Tabel 2.93. Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2024 ---------- 197
Tabel 2.94. Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Tahun 2020 – 2024 (update data th 2024) ---------- 201
Tabel 2.95. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2019-Agustus 2024 ---------- 206
Tabel 2.96. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2019-Agustus 2024 ---------- 207
Tabel 2.97. Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2019 – 2024 ---------- 210
Tabel 2.98. Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2019 – 2024 ---------- 212
Tabel 2.99. Sebaran Sentra IKM Aceh Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota (data termutakhir) ---------- 214
Tabel 2.100. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh, 2019-2022 (Data Termutakhir tahun 2022) ---------- 215
Tabel 2.101. Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020 - 2024 (Ribu Orang) --- 220
Tabel 2.102. Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2020 – 2024 ---------- 221
Tabel 2.103. Jumlah KSPPS dan USPPS di Aceh Tahun 2024 ---------- 222
Tabel 2.104. Perkembangan Jumlah UMKM di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 223
Tabel 2.105. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 --------- 224
Tabel 2.106. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019 - Agustus 2024 ---------- 226
Tabel 2.107. Perkembangan Proporsi UMKM Terhadap Angkatan Kerja Tahun 2020 – 2025) (sebagai proxy Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif) ---------- 228
Tabel 2.108. Capaian Indeks Inovasi Daerah Aceh (2021–2024) ---------- 231
Tabel 2.109. Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Aceh (unit) ---------- 236
Tabel 2.110. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Sumatera 2020-2024 - 239

Tabel 2.111. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani pada Sub sektor Perkebunan Tahun 2023 ---------- 241
Tabel 2.112. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kopi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 243
Tabel 2.113. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 245
Tabel 2.114. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kakao Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 246
Tabel 2.115. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Karet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 247
Tabel 2.116. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 249
Tabel 2.117. Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ---------- 250
Tabel 2.118. Populasi Ternak di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 251
Tabel 2.119. Produksi Daging dan Telur Berdasarkan Kab/Kota di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 252
Tabel 2.120. Sebaran Padang Pengembalaan Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/Kota ---------- 253
Tabel 2.121. Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya ---------- 254
Tabel 2.122. Deforestasi Aceh Tahun 2013-2024 ---------- 255
Tabel 2.123. Hutan Rusak (Deforestasi) Provinsi Aceh Periode Tahun 2022-2023 ---- 256
Tabel 2.124. Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2015 s.d. 2024. ---------- 257
Tabel 2.125. Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2015-2024 ---------- 258
Tabel 2.126. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2024 ---------- 259
Tabel 2.127. Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Tahun 2024 ------- 260
Tabel 2.128. PDRB Aceh dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 262
Tabel 2.129. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 2016-2024 ---------- 263
Tabel 2.130. Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2024 ---------- 264
Tabel 2.131. Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh ---------- 265
Tabel 2.132. Capaian Izin Perhutanan Sosia Aceh Tahun 2017 – 2024 ---------- 266
Tabel 2.133. Produksi Ikan Tuna/Tongkol/Cakalang Menurut Kabupaten/Kota Di Aceh ---------- 270
Tabel 2.134. Jumlah Produksi Ikan Tuna Sirip Kuning di Aceh Tahun 2020 – 2024 --- 271

Tabel 2.135. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Berdasarkan Sub Sektor, Tahun 2020-2024 ---------- 274
Tabel 2.136. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura ---------- 275
Tabel 2.137. Perkembangan NTP Peternakan Tahun 2024 ---------- 277
Tabel 2.138. Perkembangan Indeks Yang Diterima Nelayan dan Indeks Yang Dibayar Nelayan Tahun 2024 ---------- 279
Tabel 2.139. Neraca Perdagangan Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 284
Tabel 2.140. Nilai PMTB dan Perubahan Inventori (ADHB dan ADHK) Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah) ---------- 286
Tabel 2.141. Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2020 – 2024 ---------- 288
Tabel 2.142. Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2020-2024 ---------- 288
Tabel 2.143. Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024 ---------- 289
Tabel 2.144. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024 --------- 291
Tabel 2.145. Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024 ---------- 293
Tabel 2.146. Alokasi Dana Desa Tahun 2019 – 2024 ---------- 293
Tabel 2.147. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024 ---------- 295
Tabel 2.148. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033 ---------- 296
Tabel 2.149. Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2019-2024 ---------- 297
Tabel 2.150. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya ---------- 298
Tabel 2.151. Jenis Irigasi dan Luasannya ---------- 299
Tabel 2.152. Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota ---------- 299
Tabel 2.153. Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan ---------- 300
Tabel 2.154. Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan -------- 301
Tabel 2.155. Hasil Capaian Persentase Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2024 ---------- 301
Tabel 2.156. Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2017-2024 ---------- 302
Tabel 2.157. Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2020 dan 2024 ---------- 305
Tabel 2.158. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024 -------- 309
Tabel 2.159. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 309
Tabel 2.160. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2020-2024 - 310
Tabel 2.161. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 311

Tabel 2.162. Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024---------- 312
Tabel 2.163. Rasio Pajak Asli Aceh (PAA) terhadap PDRB Tahun 2019-2024 (Persen) 312
Tabel 2.164. Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2019-2024 (Persen)---------- 317
Tabel 2.165. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Aceh Tahun 2019-2024---------- 323
Tabel 2.166. Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2019 – 2024---------- 324
Tabel 2.167. Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2019 – 2024 ---------- 324
Tabel 2.168. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2019 – 2024 --------- 325
Tabel 2.169. Rekapan UPLM Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 -------- 328
Tabel 2.170. Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh Tahun 2022-2024 ---------- 329
Tabel 2.171. Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022-2024 ---------- 330
Tabel 2.172. Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019 – 2024---------- 331
Tabel 2.173. Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2019 – 2024---------- 331
Tabel 2.174. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2023-- 335
Tabel 2.175. Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM danYayasan/Perkumpulan yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2019 – 2024---------- 336
Tabel 2.176. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024---------- 339
Tabel 2.177. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2020-2024---------- 348
Tabel 2.178. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2019-2023---------- 359
Tabel 2.179. Penetapan APBA Tahun 2019-2024---------- 360
Tabel 2.180. Anggaran dan Realisasi APBA Tahun 2018-2024 ---------- 361
Tabel 2.181. Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 – 2024 ---------- 362
Tabel 2.182. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2018-2024---------- 365
Tabel 2.183. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2018-2024- 366
Tabel 2.184. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2024 --- 367
Tabel 2.185. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Aceh Tahun 2018-2024 - 367
Tabel 2.186. Deviden Pemerintah dari BUMD Tahun 2019-2023---------- 368
Tabel 2.187. Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018-2023 ---------- 368
Tabel 2.188. Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAA yang Sah Tahun 2018-2024 ------ 369
Tabel 2.189. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018-2024--------- 369
Tabel 2.190. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2018-2024 ---------- 370
Tabel 2.191. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018-2024 -- 371
Tabel 2.192. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018-2024 - 372

Tabel 2.193. Anggaran dan Realisasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2018-2024 ---------- 372
Tabel 2.194. Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2018-2023 ---------- 373
Tabel 2.195. Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2018-2023 -- 374
Tabel 2.196. Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Aceh Yang Sah Tahun 2018-2024 ---------- 374
Tabel 2.197. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2018-2023 ---------- 375
Tabel 2.198. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2018-2024 --------- 375
Tabel 2.199. Anggaran dan Realisasi Belanja Aceh Tahun 2018-2024 ---------- 376
Tabel 2.200. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2024---------- 377
Tabel 2.201. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018-2023---------- 378
Tabel 2.202. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018-2024 ---- 379
Tabel 2.203. Anggaran dan Realisasi Belanja Susidi Tahun 2018-2024---------- 379
Tabel 2.204. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018-2024---------- 380
Tabel 2.205. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018-2024 ------ 381
Tabel 2.206. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2024 ---------- 381
Tabel 2.207. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2024------- 383
Tabel 2.208. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2018-2024---------- 383
Tabel 2.209. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2018-2024 ---------- 384
Tabel 2.210. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018-2024 ---- 385
Tabel 2.211. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018-2024 ---- 385
Tabel 2.212. Rata Rata Pertumbuhan Necara Aceh Tahun 2018 - 2023 ---------- 387
Tabel 2.213. Balance Sheet Ratio Tahun 2012-2017 Pemerintah Aceh ---------- 388
Tabel 2.214. Kontribusi Aset Lancar Tahun 2023---------- 390
Tabel 2.215. Kontribusi Aset Tidak Lancar Tahun 2018 - 2022 ---------- 390
Tabel 2.216. Kontribusi Kewajiban Tahun 2018 - 2022 ---------- 391
Tabel 2.217. Kontribusi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2018 - 2022 ---------- 391
Tabel 2.218. Kontribusi Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 - 2022---------- 392
Tabel 2.219. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2018 - 2024 ----- 394
Tabel 2.220. Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2026-2030---------- 399
Tabel 2.221. Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2026-2030 ---------- 400
Tabel 2.222. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2026-2030---------- 400
Tabel 2.223. Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2026-2030 ---------- 401
Tabel 2.224. Bagian dari Komponen Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2026-2030 ----- 401
Tabel 2.225. Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2026-2030---------- 404
Tabel 2.226. Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2026-2030 ---------- 405
Tabel 2.227. Proyeksi Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025-2029 ---------- 407

Tabel 2.228. Proyeksi Belanja Tahun 2025-2029 ---------- 410
Tabel 2.229. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026-2030 ---------- 412
Tabel 2.230. Proyeksi Kerangka Pendanaan/Struktur APBA Tahun 2026-2030------- 413
Tabel 3.1. Keterkaitan Visi dan Misi Aceh Tahun 2025-2029 ---------- 448
Tabel 3.2. Penyelarasan Visi dan Misi Aceh dan Nasional Tahun 2025-2029 ------ 449
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh, 2025-2030 Berdasarkan Misi ---------- 451
Tabel 3.4. Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2026 - 2030 ---------- 466
Tabel 3.5. Rumusan Program Prioritas RPJMA Tahun 2026-2030 ---------- 469
Tabel 3.6. Rumusan Arah Kebijakan RPJMA Tahun 2025-2029 ---------- 509
Tabel 3.7. Penyelarasan Kegiatan Priorias Utama Aceh ---------- 538
Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030---------- 544
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030---------- 582
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030 ---------- 584

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar DokumenGambar ---------- 9
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh---------- 12
Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh ---------- 13
Gambar 2.3. Peta Batas DAS di Wilayah Aceh ---------- 16
Gambar 2.4. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Aceh ---------- 19
Gambar 2.5. Peta Topografi Aceh ---------- 21
Gambar 2.6. Peta Geologi Aceh ---------- 22
Gambar 2.7. Peta Kemiringan Lereng Aceh ---------- 24
Gambar 2.8. Peta Jenis Tanah Aceh ---------- 25
Gambar 2.9. Peta Curah Hujan Aceh ---------- 28
Gambar 2.10. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Aceh ---------- 32
Gambar 2.11. Persentase D3TLH Air di Aceh---------- 33
Gambar 2.12. Persentase D3TLH Pangan di Aceh---------- 33
Gambar 2.13. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Aceh ---------- 34
Gambar 2.14. Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten/Kota - 37
Gambar 2.15. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Aceh---------- 38
Gambar 2.16. Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten/Kota --- 40
Gambar 2.17. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Aceh ---------- 40
Gambar 2.18. Peta Ekoregion Aceh---------- 45
Gambar 2.19. Peta Karakteristik Bentang Alam (KBA) Aceh ---------- 48
Gambar 2.20. Peta Kawasan Vegetasi Alami (KVA) Aceh ---------- 51
Gambar 2.21. Peta Bahaya Banjir Aceh ---------- 54
Gambar 2.22. Peta Bahaya Banjir Bandang Aceh---------- 56
Gambar 2.23. Peta Bahaya Longsor Aceh ---------- 58
Gambar 2.24. Peta Bahaya Kekeringan Aceh ---------- 60
Gambar 2.25. Bahaya Likuifaksi Aceh---------- 62
Gambar 2.26. Peta Bahaya Gempa Bumi Aceh ---------- 64
Gambar 2.27. Peta Bahaya Tsunami Aceh ---------- 66
Gambar 2.28. Kecenderungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kota Aceh ---------- 68
Gambar 2.29. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh ---------- 70
Gambar 2.30. Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Aceh---------- 71
Gambar 2.31. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Aceh ---------- 72
Gambar 2.32. Peta IKLH Aceh Tahun 2023 ---------- 74
Gambar 2.33. Pertumbuhan (%) Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2017 s.d 2022---------- 77
Gambar 2.34. Peta Sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh ---------- 78
Gambar 2.35. KRP Pola Ruang Aceh ---------- 80
Gambar 2.36. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Aceh ---------- 81
Gambar 2.37. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Aceh---------- 82

Gambar 2.38. Petan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Aceh ---------- 84
Gambar 2.39. Sebaran Hutan Desa (HD) Aceh ---------- 86
Gambar 2.40. Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (SIDIK) Aceh ---------- 87
Gambar 2.41. Peta PIPPIB Aceh ---------- 89
Gambar 2.42. Peta Penutupan Lahan di Aceh ---------- 90
Gambar 2.43. Peta Folu Net Sink Aceh ---------- 93
Gambar 2.44. Peta Kawasan Hutan di Aceh ---------- 94
Gambar 2.45. Peta Home Range Satwa Aceh ---------- 95
Gambar 2.46. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2020-2024 ----- 96
Gambar 2.47. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh---------- 97
Gambar 2.48. Kontribusi Sub Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Tahun Tahun 2020-2024 (ADHK) ---------- 100
Gambar 2.49. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Aceh Tahun 2020-2024---------- 103
Gambar 2.50. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 103
Gambar 2.51. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Aceh, Tahun 2020-2024 ---------- 104
Gambar 2.52. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019 ---------- 105
Gambar 2.53. Pertumbuhan Angka PoU Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 107
Gambar 2.54. Peringkat PoU Berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh---------- 108
Gambar 2.55. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh), Tahun 2020-2024 ---------- 109
Gambar 2.56. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Aceh 2020-2024 ------ 111
Gambar 2.57. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 113
Gambar 2.58. Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah -- 119
Gambar 2.59. Data Bencana Aceh Tahun 2019-2024---------- 121
Gambar 2.60. Peta Rawan Bencana Gempa Aceh ---------- 124
Gambar 2.61. Peta Risiko Bencana Banjir Aceh ---------- 124
Gambar 2.62. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh---------- 126
Gambar 2.63. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2024 (jiwa)---------- 130
Gambar 2.64. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2023 ---------- 132
Gambar 2.65. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2019- 2024 (Persen)---------- 135
Gambar 2.66. Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan non Migas Tahun 2019-2024 ---------- 136
Gambar 2.67. PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah) ---------- 142

Gambar 2.68. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Aceh Periode Maret 2019-Maret 2024 ---------- 144
Gambar 2.69. Gini Rasio Aceh dan Nasional, 2019-2024 ---------- 144
Gambar 2.70. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2019-2024 ---------- 146
Gambar 2.71. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh 2017 dan 2024 ---------- 149
Gambar 2.72. Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan (2017-2024) ---------- 150
Gambar 2.73. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh Tahun 2017 – 2024 ---------- 151
Gambar 2.74. Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ---------- 154
Gambar 2.75. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024 ---------- 155
Gambar 2.76. Persentase Pemeriksaan Kehamilan 6 Kali (ANC K6) Tahun 2022-2024 ---------- 155
Gambar 2.77. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024 ---------- 156
Gambar 2.78. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019 – 2024 ------ 157
Gambar 2.79. Prevalensi Wasting di Aceh Tahun 2020 – 2024 ---------- 158
Gambar 2.80. Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2019-2023--- 159
Gambar 2.81. Capaian jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh Tahun 2019-2023 ---------- 159
Gambar 2.82. Capaian Imunisasi Aceh Tahun 2019-2023 ---------- 160
Gambar 2.83. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2019 – 2024---------- 169
Gambar 2.84. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16-18 Tahun 2019 – 2024 ---------- 170
Gambar 2.85. Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2023 ---------- 173
Gambar 2.86. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020 – 2024 ---------- 177
Gambar 2.87. Data Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan --------- 181
Gambar 2.88. Jumlah Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020-2024 ---------- 185
Gambar 2.89. Komponen Indeks Zakat Nasional, 2025---------- 186
Gambar 2.90. Indeks Zakat Nasional, 2025---------- 187
Gambar 2.91. Perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 (Data termutakhir) ---------- 199
Gambar 2.92. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, 2020 – 2024 ---------- 200
Gambar 2.93. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Yang terlapor pada UPTD PPA Tahun 2020 – 2024 ---------- 201
Gambar 2.94. Indeks Perlindungan Anak Tahun 2019 – 2024 (data termutakhir) --- 202
Gambar 2.95. Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2018– 2022 (data termutakhir)---------- 203

Gambar 2.96. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2020 – 2024 ------- 203
Gambar 2.97. Indeks Ketimpangan Gender Aceh, 2020 – 2024 ---------- 204
Gambar 2.98. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2019 – 2023 (data termutakhir) ---------- 204
Gambar 2.99. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, 2019-2024 ---------- 205
Gambar 2.100. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2019-Agustus 2024 ---------- 209
Gambar 2.101. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Aceh (persen) Tahun 2020-2024---------- 214
Gambar 2.102. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Aceh---------- 216
Gambar 2.103. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Aceh (Persen) Tahun 2020 – 2024 ---------- 217
Gambar 2.104. Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat---------- 218
Gambar 2.105. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 Per Sub Indeks (data terakhir tahun 2022)---------- 219
Gambar 2.106. Rasio Kewirausahaan Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 225
Gambar 2.107. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Aceh dan Nasional, 2019-2024 ---------- 227
Gambar 2.108. Komposisi Bentuk Inovasi Aceh ---------- 232
Gambar 2.109. Komposisi Tahapan Inovasi Aceh---------- 233
Gambar 2.110. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2019-2024---------- 234
Gambar 2.111. PDRB ADHB Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ---------- 235
Gambar 2.112. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor pada Sektor Pertanian di Aceh (rumah tangga), Tahun 2013 dan 2023 ---------- 235
Gambar 2.113. Perkembangan Luas Panen Padi di Aceh (Ribu Hektare), Tahun 2023–2025* ---------- 236
Gambar 2.114. Perkembangan Produksi Padi di Aceh (Ribu Ton-GKG), 2023–2025* ---------- 237
Gambar 2.115. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2020–2024 ---------- 238
Gambar 2.116. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2020–2024 ---------- 239
Gambar 2.117. Proporsi Komoditi paad sub Sektor Perkebunan---------- 240
Gambar 2.118. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta dan Arabika---------- 242
Gambar 2.119. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit---------- 244
Gambar 2.120. Luas deforestasi di Aceh pada periode 1990–2017 ---------- 255
Gambar 2.121. Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh Tahun 2003-2023 ---------- 257

Gambar 2.122. Konflik Satwa Liar di Aceh Tahun 2017-2024 ---------- 261
Gambar 2.123. Capaian Perhutanan Sosial Aceh sd. 2024 ---------- 267
Gambar 2.124. Perkembangan Nilai PDRB ADHK Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2020-2024 (Rp Triliun) ---------- 270
Gambar 2.125. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim 272
Gambar 2.126. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2023-2024--- 273
Gambar 2.127. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh Tahun 2020-2024 ---- 274
Gambar 2.128. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 3 Sub Sektor Tahun 2024 -- 275
Gambar 2.129. Perkembangan Nilai Tukar Peternak (NTPt), 2023–2024---------- 276
Gambar 2.130. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt), 2024 ---------- 277
Gambar 2.131. Perkembangan NTP Nelayan 2020-2024 ---------- 278
Gambar 2.132. Perkembangan NTPi Tahun 2020-2024 ---------- 280
Gambar 2.133. Porsi EBT dalam Bauran Energi Aceh (%)---------- 280
Gambar 2.134. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi di Aceh Tahun 2020-2024 -- 283
Gambar 2.135. Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Aceh Tahun 2020-2024---------- 285
Gambar 2.136. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aceh 2020-2024---------- 291
Gambar 2.137. Status Desa di Aceh Tahun 2019 – 2024---------- 292
Gambar 2.138. Pembagian Wilayah Sungai Aceh ---------- 303
Gambar 2.139. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Persen---------- 304
Gambar 2.140. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025 ---------- 307
Gambar 2.141. Rasio Izin Trayek di Aceh Tahun 2020-2024---------- 307
Gambar 2.142. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2020-2024- 310
Gambar 2.143. Growth Total Aset Keuangan Syariah dan Rasio Terhadap PDRB ---- 314
Gambar 2.144. Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (y-on-y) (Persen) -- 315
Gambar 2.145. Laju Inflasi Aceh dan Nasional (m-to-m) Tahun 2024- Februari 2025 (Persen)---------- 316
Gambar 2.146. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank) ---------- 319
Gambar 2.147. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokPro) ---------- 320
Gambar 2.148. Perkembangan DPK/PDRB dan Pembiayaan/PDRB Aceh Tahun 2022-2024---------- 321
Gambar 2.149. Perkembangan ROA BUMD Aceh Tahun 2021-2024---------- 322
Gambar 2.150. Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018 – 2024---------- 326
Gambar 2.151. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2024* ---------- 327
Gambar 2.152. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2020-2024---------- 327
Gambar 2.153. Jumlah Pengunjung Pada Layanan Arsip/JIKN Pada Tahun 2018-2014---------- 332
Gambar 2.154. Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2020-2024 ---------- 333
Gambar 2.155. Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2024 ---------- 333

Gambar 2.156. Perbandingan Nilai Aspek IDSD Aceh Tahun 2020- 2024 ---------- 338
Gambar 2.157. Kontribusi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 - 2024---------- 377
Gambar 2.158. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi, 2018-2024 ---------- 378
Gambar 2.159. Kontribusi Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 - 2024 ---------- 382
Gambar 2.160. Proyeksi Pendapatan Aceh 2025-2029 (Rupiah)---------- 396
Gambar 2.161. Proyeksi Belanja Aceh Tahun 2025-2029 (Rupiah)---------- 408

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Aceh yang memiliki konteks khusus pasca konflik dan tsunami.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Ketiga peraturan ini memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang dibagi menjadi urusan wajib dan

urusan pilihan. Urusan wajib mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, perdamaian, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mempertimbangkan responsifitas gender.

Petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal ini ditujukan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2025-2029 telah dilantik pada tanggal 12 Februari 2025. Atas dasar ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan peraturan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal sesuai dengan amanat pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Agar pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal, maka RPJMD harus pula memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan spasial yang telah digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025-20229 disusun dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi Nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang dituangkan dalam delapan asta cita pembangunan dengan pedoman teknis penyusunan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

RPJM Aceh 2025-2029 disusun telah mengakomodir dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMA 2025-2029 dengan menerapkan 4 (empat) pilar yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Hukum dan Tata Kelola dan Pilar Lingkungan serta 17 (tujuh belas) *Goals* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

RPJM Aceh 2025-2029 merupakan tahapan pembangunan pertama dari RPJP Aceh 2025-2045. Tahapan ini memfokuskan pada penguatan pondasi transformasi RPJPA, dengan fokus pembangunan dititikberatkan pada pencapaian transformasi sosial, transformasi tata kelola, keamanan yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, pembangunan kewilayahan, ketahanan ekologi dan kesinambungan pembiayaan.

Dokumen RPJM Aceh adalah dokumen publik yang merangkum daftar rencana program pembangunan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penyusunan RPJMD dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan penting yaitu: ***Pertama***, pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan dengan berdasarkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. ***Kedua***, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD. ***Ketiga***, pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. ***Keempat***, pendekatan *bottom up* dan *top down* yang proses perencanaannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Selain menggunakan pendekatan di atas, penyusunan RPJM Aceh dilaksanakan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai suatu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau

permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, sasaran dan kebijakan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan, serta tetap mensinkronkan dengan sasaran, kebijakan dan program strategis nasional.

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPJM Aceh 2025-2029 telah terintegrasi dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMA karena Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang termuat dalam KLHS RPJMA menjadi pertimbangan untuk merumuskan isu-isu strategis dan menetapkan program-program dalam RPJM yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Dengan demikian, KLHS RPJMA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMA sebagai upaya mewujudkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan (*sustainable development*).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025 -2029 yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
38. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).

39. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
40. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
41. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
42. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
43. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
44. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
45. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
46. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
47. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
48. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.01/E/PDLKWS/PLA.5.1/B/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Persetujuan Validasi KLHS RPJM Aceh Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

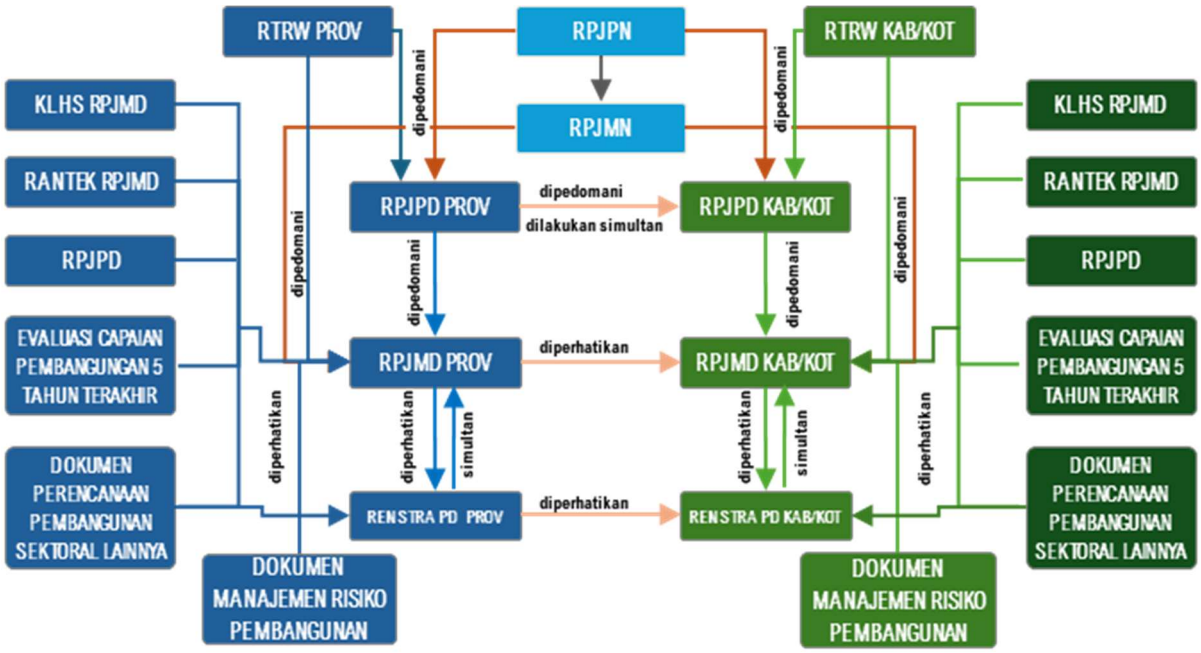
Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Sehingga dalam penyusunan RPJM Aceh harus berpedoman pada RPJP Aceh dan mengacu pada RTRW Aceh serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Aceh ini menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPA;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan (Gambar 1.1).



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Aceh untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), dan perencanaan serta penganggaran.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan prioritas yang terencana.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Aceh Tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini paling sedikit menyajikan Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; maksud dan tujuan; dan sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM ACEH

Pada bab ini paling sedikit berisikan Gambaran umum kondisi daerah; Gambaran umum kondisi keuangan daerah; serta permasalahan dan isu strategis daerah

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Pada bab ini memuat paling sedikit Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB VI PROGRAM PERANGKAT ACEH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

Dalam bab ini memuat paling sedikit Program Perangkat Aceh tahun 2025-2029; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Aceh (IKU dan IKD) tahun 2025-2029;

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM ACEH

Gambaran umum Aceh yang meguraikan secara sistematis kondisi Aceh yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Selain itu, di dalam gambaran umum ini juga dijelaskan tentang kondisi keuangan Aceh, termasuk tentang kinerja kuangan masa lalu, neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Aceh

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi membahas karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

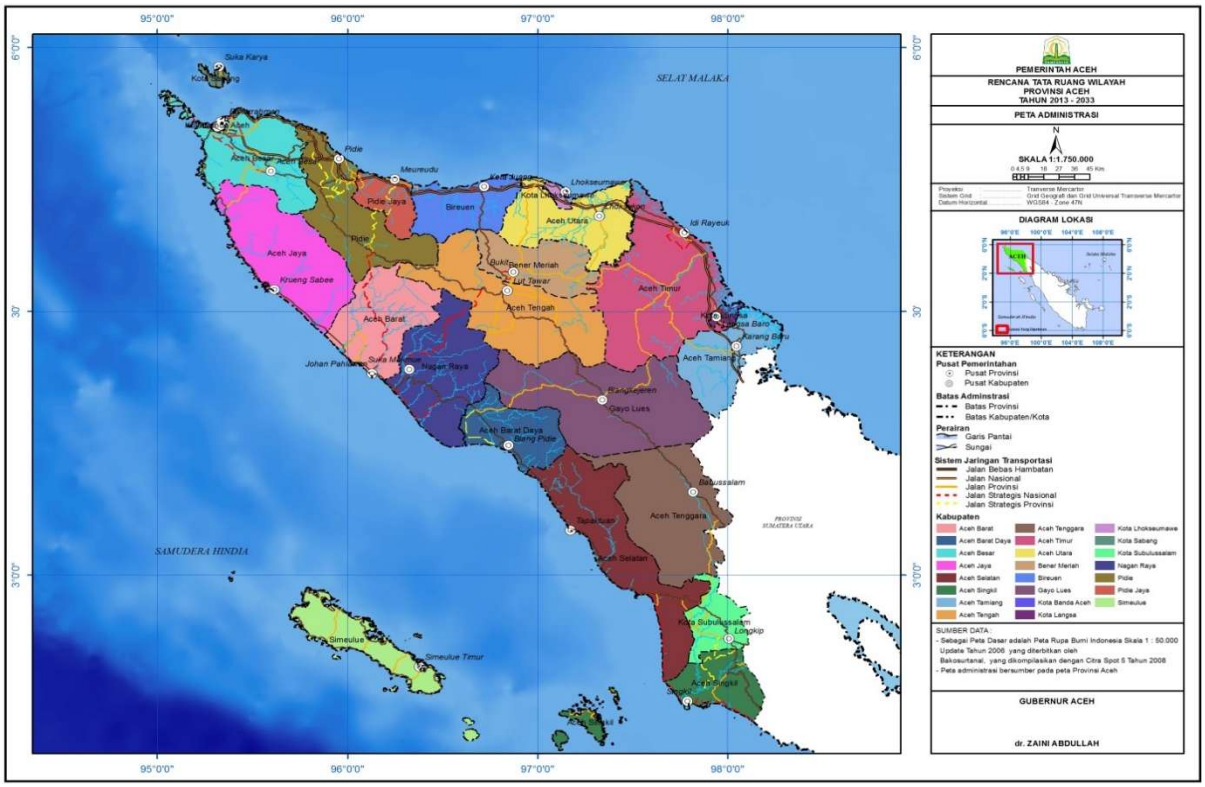
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Aceh

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Selat Malaka dan Samudera Hindia. karena berada di pintu masuk Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting di dunia. jalur ini menjadi penghubung antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, yang menjadi lintasan utama perdagangan antara Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa.

Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01° 58′ 37,2″- 06° 04′ 33,6″ Lintang Utara dan 94° 57′ 57,6″- 98° 17′ 13,2″ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
Sebelah Timur	:	berbatasan dengan Selat Malaka
Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Samudera Hindia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar kabupaten dalam provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan, luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun RZWP3K Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis pantai pada saat pasang terendah ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan). Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 290 Kecamatan, 6.515 Gampong sesuai dengan data BPS Aceh yang dipublikasikan dalam Aceh Dalam Angka Tahun 2023. Secara lebih jelas batas wilayah administrasi Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.1**



Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Kondisi Hidrologi

A1. Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya.

A1.1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai

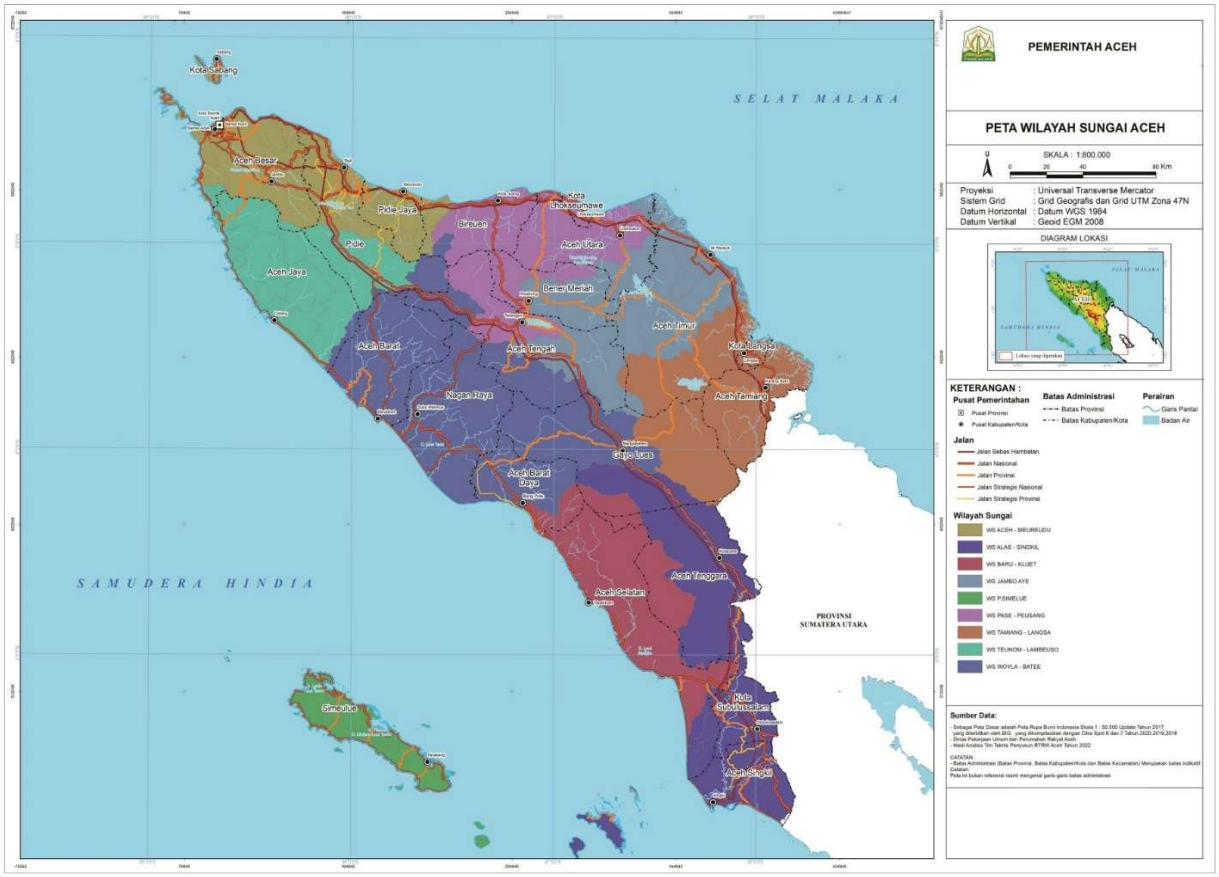
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai (WS), Aceh memiliki 152 Daerah Aliran Sungai (DAS), yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS, yaitu WS. Aceh– Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla–Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi, yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS, yaitu WS. Teunom–Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase–Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru–Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota, yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Berdasarkan gambar diatas, luas Wilayah Sungai dan Jumlah DAS masing – masing Wilayah Sungai, dapat dilihat pada **Tabel 2.1**. dan peta pembagian Wilayah Sungai Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.

Tabel 2.1.
Luas DAS Wilayah Sungai berdasarkan Kewenangan

No.	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km^2)	Jumlah DAS
I	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh – Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla – Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas – Singkil	13.400,31	8
II	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/ Kota	WS 01.03.B	Pase – Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang – Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom – Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru – Kluet	5.311,44	21
III	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/ Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber : Permen PUPR No. 04 Tahun 2015



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

Gambar 2.2. Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Keberadaan sungai dan DAS ini memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan masyarakat Aceh, baik sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, pembangkit tenaga listrik, transportasi, maupun sebagai basis aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan. Sungai-sungai besar seperti Krueng Aceh, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Teunom, Krueng Seunagan, dan Krueng Singkil telah menjadi penopang utama bagi

pengembangan pertanian, perkebunan, serta kegiatan perdagangan di daerah sekitarnya.

Namun demikian, potensi besar ini masih menghadapi tantangan serius, seperti degradasi daerah aliran sungai, sedimentasi di muara sungai, dan pemanfaatan lahan yang tidak terkendali di kawasan hulu. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air, meningkatnya risiko banjir, serta berkurangnya fungsi ekologis sungai.

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir, yaitu:

1. Wilayah Sungai Aceh-Meureudue
   Banjir, banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh) karena penebangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Kr. Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya;
2. Wilayah Sungai Jambo Aye
   DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak). DAS Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas, yaitu sekitar 20.392,99 Ha.
3. Wilayah Sungai Woyla-Bateue
   Terjadinya Banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi (Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa)
4. Wilayah Sungai Alas-Singkil
   Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil).
5. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi
   Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teunom yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teunom.
6. Wilayah Sungai Pase-Peusangan
   terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Peuto, Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen.

7. Wilayah Sungai Baru-Kluet
   Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai, yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Kr.Baru. Kr. Kluet dan Kr. Baru setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Kr. Kluet di Kota Fajar.

8. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa
   Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru, dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur). Dominasi DAS yang terkena genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa seluas 7.617,30 Ha.

Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama, yaitu: sungai - sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat - Selatan dan sungai - sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur - Utara. Potensi air di wilayah Aceh berdasarkan ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2.
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

No.	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m^3/dt	milyar. m^3/thn	m^3/dt	milyar. m^3/thn
KEWENANGAN PUSAT							
1.	WS Aceh – Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2.	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3.	WS Woyla – Batee	13	547,40	638,64	20,14	109,40	3,45
4.	WS Alas – Singkil	8	639,80	890,73	28,09	109,72	3,46
KEWENANGAN PROVINSI							
5.	WS Pase- Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6.	WS Teunom– Lambesoi	14	502,20	604,71	19,07	89,1	2,81
7.	WS Tamiang-Langsa	17	261,30	354,20	11,17	129,38	4,08
8.	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
KEWENANGAN KAB/KOTA							
9.	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
TOTAL		**152**	**3.825,82**	**3.438,93**	**108,45**	**847,92**	**26,74**

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai,

pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km^2 , Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7 – 8 liter/detik/km^2, dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 – 4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17 – 18 liter/detik/km^2. Peta Batas DAS yang menguraikan penyebaran DAS di Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.



Sumber : SK.304/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Gambar 2.3. Peta Batas DAS di Wilayah Aceh

A1.2. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat

menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Embung kewenangan Pemerintah Aceh diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan untuk konservasi pada Wilayah Sungai dan Daerah Irigasi. Embung Kewenangan Pemerintah Aceh yang diklasifikasi berdasarkan pemanfaatan untuk konservasi pada Wilayah Sungai antara lain Embung Teupin Keubu, Embung Paya Punjet dan Embung Lhok Gajah di Kab. Aceh Utara. Sedangkan embung kewenangan Pemerintah Aceh yang diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan untuk Daerah Irigasi, yaitu Embung Paya Seupat, Embung Paya Reuleut, Embung Paya Pie, Embung Jurong Beurangkat, Embung Glee Bruk dan Embung Hutan Pantang di Kab. Pidie Jaya; Embung Paya Laot dan Embung Paya Sikameh di Kab. Bireuen; Embung Meurandeh di Kota Langsa.

Waduk adalah sebuah bendungan besar yang dibangun untuk menampung air dalam jumlah besar. Waduk biasanya dibangun di lembah sungai dan dapat menyimpan air hujan serta aliran sungai untuk berbagai keperluan seperti irigasi, air minum, pembangkit listrik tenaga air, dan pengendalian banjir. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu waduk single purpose dan waduk multi purpose. Dalam rangka mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dimana pada Tahun 2045 pemerintah pusat menargetkan kapasitas tampungan air bisa mencapai 200 m^3/kapita, Aceh mempunyai potensi–potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi–potensi tersebut diantaranya dapat disebutkan adalah, Waduk Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya dengan potensi tampungan mencapai 49 juta m3, Waduk Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang dengan potensi tampungan mencapai 114,63 juta m^3, Waduk Krueng Sabee di Kabupaten Aceh Jaya dengan potensi tampungan mencapai 54,85 juta m3 dan Waduk Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan dengan potensi tampungan mencapai 87,75 juta m^3.

A1.3. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh. Kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya. Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

Adapun Daerah Irigasi Rawa yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi antara lain D.I.R. Keutengga yang merupakan daerah

irigasi rawa lintas kabupaten/kota yang tersebar di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang; D.I.R. Babah Nipah di Kabupaten Aceh Jaya dan D.I.R. Seuneubok Padang Kabupaten Aceh Jaya.

A1.4. Tambak

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak, Tambak adalah kolam air payau yang digunakan untuk budidaya perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut. Jaringan irigasi tambak adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi tambak.

Adapun Daerah Irigasi Tambak yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi antara lain D.I.T. Pasi Sibadeh dan D.I.T. Trumon di Kab. Aceh Selatan; D.I.T. Julok dan D.I.T. Simpang Ulim di Kab. Aceh Timur; D.I.T. Seuneudon di Kab. Aceh Utara; D.I.T. Jeumpa Peusangan di Kab. Bireuen.

A1.5. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Data potensi dari danau – danau tersebut disajikan dalam **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3.
Potensi Danau Aceh

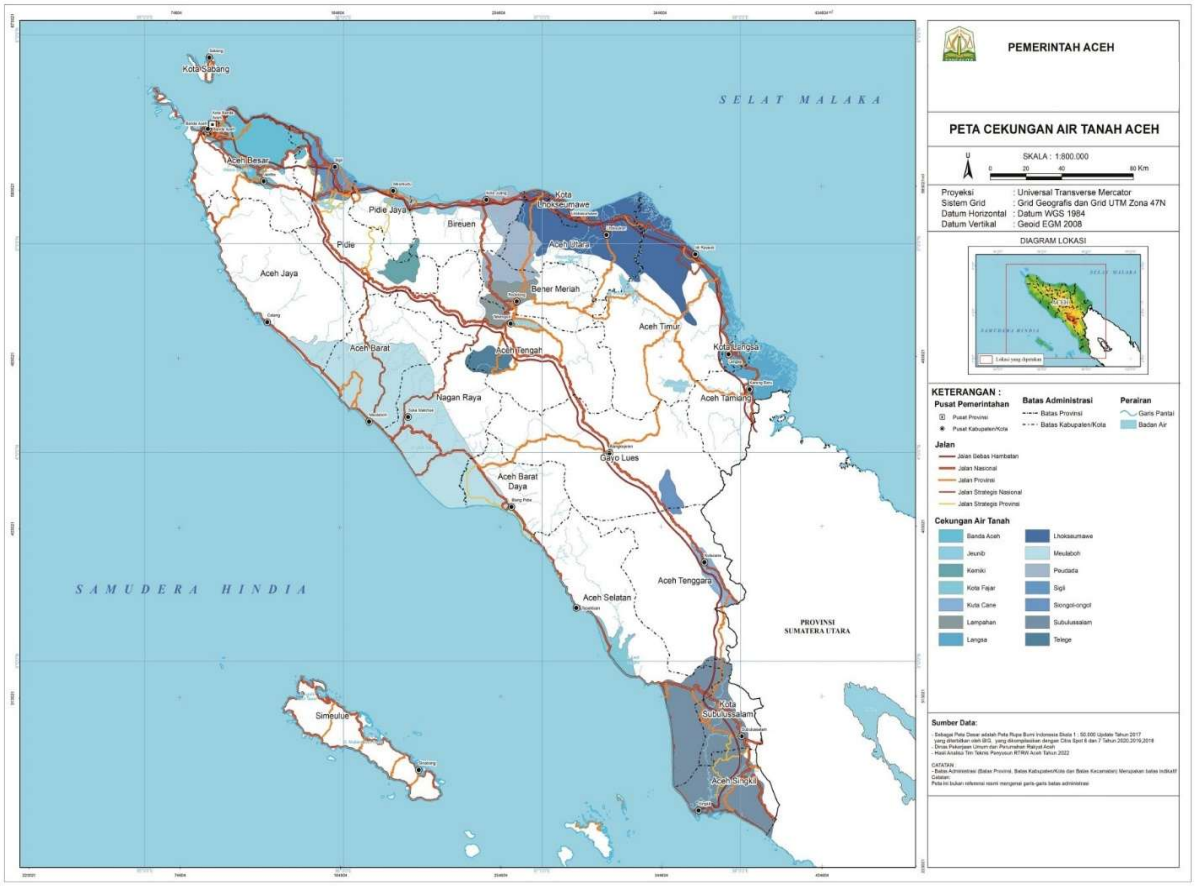
No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m^3)
1.	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2.	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3.	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4.	Danau Laut Bangko	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5.	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6.	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7.	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8.	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9.	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10.	Danau Opupu	Simeulue	138,10	19.334.000
	Total		**6.201,49**	**220.673.015**

Sumber: Dinas Pengairan Aceh

Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal.

A2. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2.4. Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Aceh

Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan, yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Selain itu, kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Aceh.

Pengelolaan air tanah juga perlu didukung oleh kegiatan penyelidikan geologi, yaitu inventarisasi serta evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi dengan data yang bersumber dari peta geologi, peta hidrogeologi, analisa laboratorium, dan peninjauan lapangan. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasikan 14 (empat belas) CAT seperti disajikan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4.
Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

NO	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
JUMLAH			**1,743,681.75**

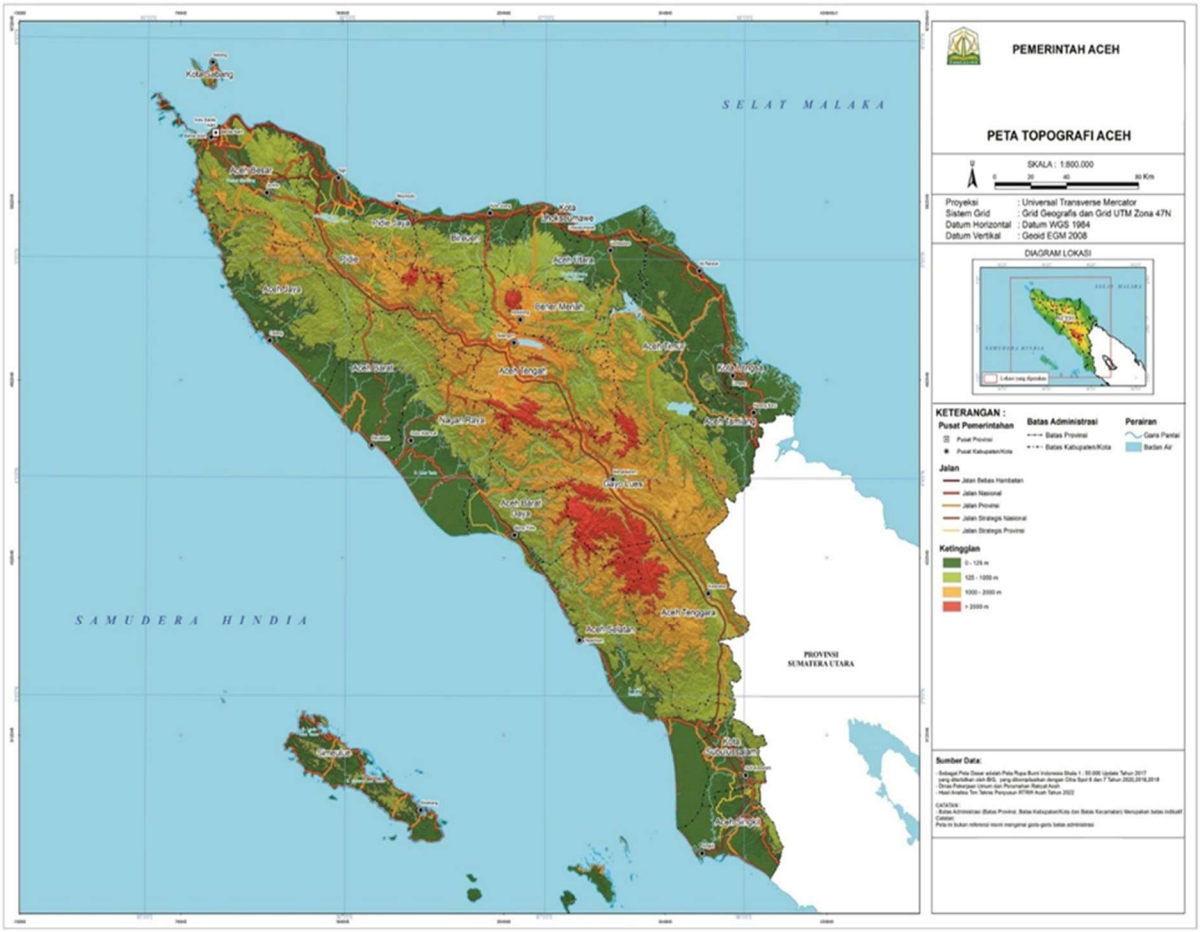
Sumber: Qanun RTRW Aceh 2013-2033

B. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan

bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0 – 8 persen) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara – timur dan pantai barat – selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8 – 15 persen) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah Barat – Selatan dan pantai Utara – Timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16 - 25 persen) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40 persen) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (> 40 persen) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 Tahun 2020, 2019, 2018

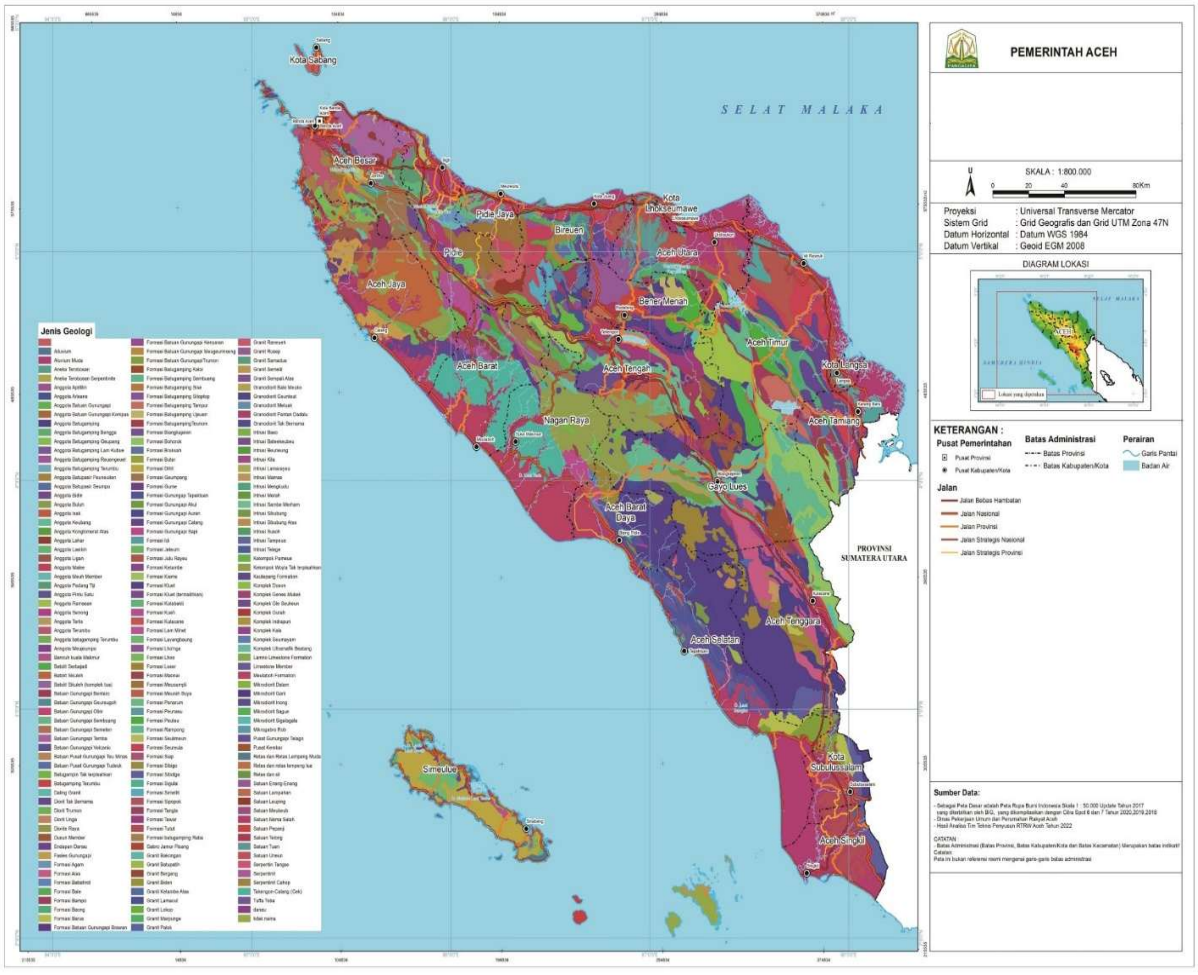
Gambar 2.5. Peta Topografi Aceh

Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 mdpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl, terdapat di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener

Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl, berada di daerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Burni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

B1.1. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 Tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2.6. Peta Geologi Aceh

Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Batuan beku atau malihan (igneous or metamorphic rocks), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggungan; dengan potensi air tanah sangat rendah;

b. Sedimen padu - tak terbedakan (consolidated sediment – undifferentiated), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks

pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;

c. Batu gamping atau dolomit (limestones or dolomites), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;

d. Hasil gunung api – lava, lahar, tufa, dan breksi (volcanic products – lava, lahar, tuff, breccia), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah;

e. Sedimen lepas atau setengah padu – kerikil, pasir, lanau, lempung (loose or semi-consolidated sediment (gravel, sand, silt, clay), terdapat di bagian paling bawah/hilir, yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

B1.2. Kondisi Kemiringan

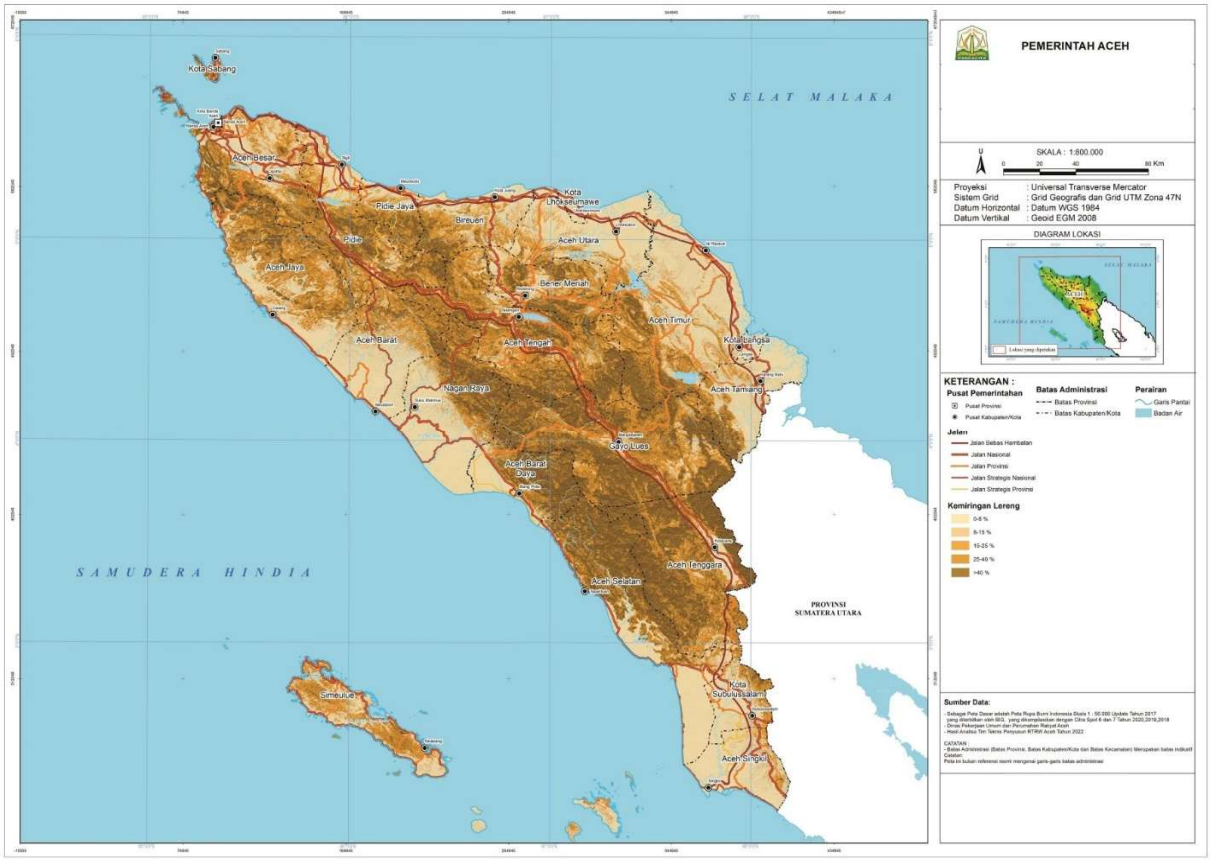
Aceh memiliki berbagai macam variasi kemiringan lereng. Kemiringan lereng di Aceh dibagi menjadi 0% - 8%, 8%-15%,15%-25%, 25%-40%, dan >40%. Kabupaten/kota di Aceh memiliki bermacam-macam kemiringan lereng seperti yang disajikan pada **Tabel 2.5** dan **Gambar 2.7**.

Tabel 2.5.
Kemiringan Lereng Aceh

No	Kabupaten/Kota	Kemiringan Lereng (%)	Luas (ha)
1	Aceh Barat	0 – 8	146.666,90
		8 – 15	31.030,82
		15 – 25	39.793,23
		25 – 40	39.902,49
		>40	24.355,19
2	Aceh Barat Daya	0 – 8	47.140,47
		8 – 15	4.551,77
		15 – 25	10.850,11
		25 – 40	33.396,67
		>40	92.291,98
3	Aceh Besar	0 – 8	96.720,25
		8 – 15	40.851,82
		15 – 25	4.7257,95
		25 – 40	58.345,40
		>40	45.184,95
4	Aceh Jaya	0 – 8	103.997,80
		8 – 15	42.847,65
		15 – 25	80.850,95
		25 – 40	96.327,80
		>40	65.365,46
5	Aceh Selatan	0 – 8	146.755,56
		8 – 15	10.136,57
		15 – 25	23..892,14
		25 – 40	69.451,64
		>40	166.884,39

No	Kabupaten/Kota	Kemiringan Lereng (%)	Luas (ha)
6	Aceh Singkil	0 – 8	149.176,70
		8 – 15	19.805,91
		15 – 25	10.545,95
		25 – 40	3.563,41
		>40	287,28
7	Aceh Tamiang	0 – 8	139.711,55
		8 – 15	14.928,23
		15 – 25	13.823,41
		25 – 40	17.773,44
		>40	23.862,27
8	Aceh Tengah	0 – 8	25.204,65
		8 – 15	36.212,55
		15 – 25	88.961,74
		25 – 40	160.170,39
		>40	141.892,09
9	Aceh Tenggara	0 – 8	26.039,84
		8 – 15	16.902,18
		15 – 25	44.759,28

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 Tahun 2020, 2019, 2018



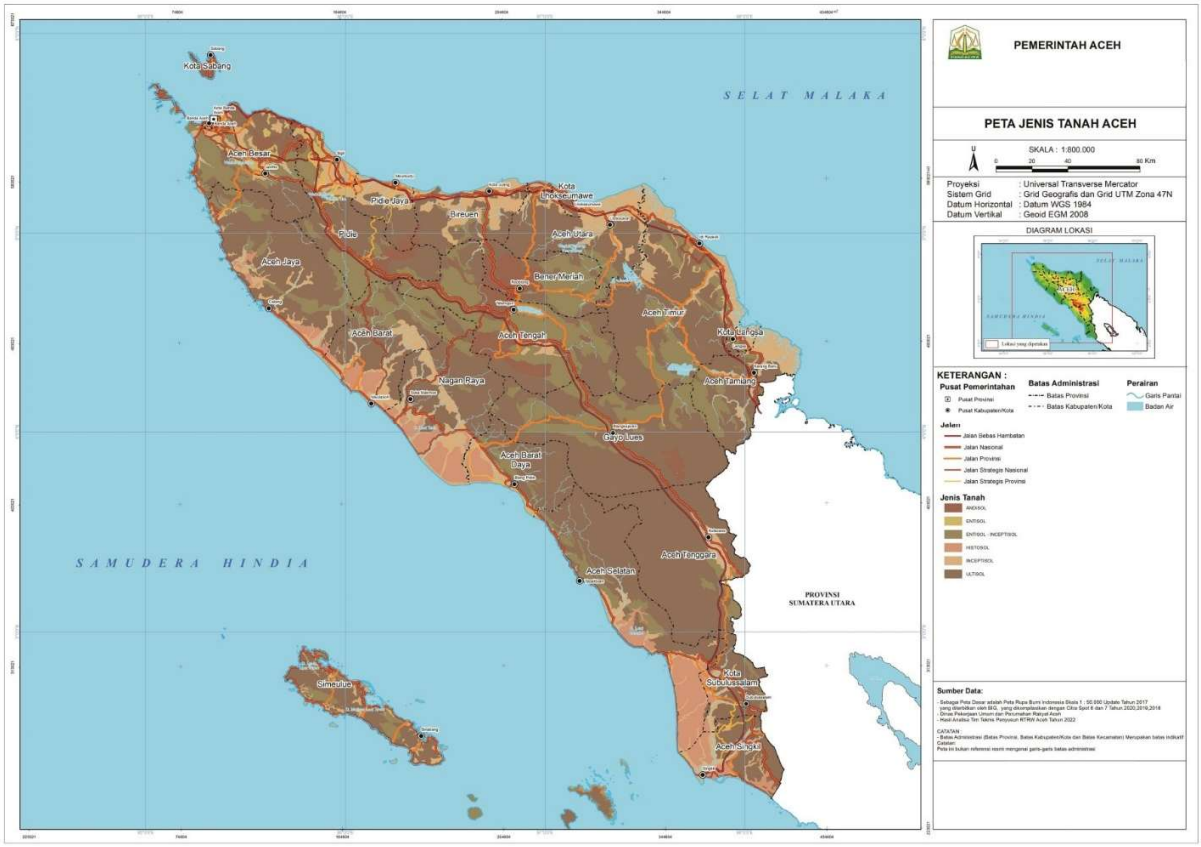
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 Tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2.7. Peta Kemiringan Lereng Aceh

B1.3. Kondisi Jenis Tanah

Aceh memiliki jenis tanah yang bervariasi, seperti andisol, entisol – inceptisol, histosol, ultisol. Tanah andisol merupakan salah satu dari banyak jenis tanah yang tanahnya cukup subur tetapi memiliki tingkat serapan Ph tinggi. Tanah andisol alami yang belum mengalami

proses pengolahan oleh manusia memiliki kandungan akan bahan organik (humus) yang tinggi, hal tersebut membuat tanah andisol memiliki warna hitam hingga coklat tua, tidak begitu plastis, tidak begitu lekat, dan mempunyai kemampuan tinggi dalam menyimpan air. Tanah entisol termasuk kategori tanah yang masih muda, dikarenakan baru dalam tahap permulaan perkembangan tanah. Tanah entisol memiliki kadar lempung serta bahan organik yang rendah, sehingga daya tahan airnya rendah, dengan struktur berbutir, dan sarang, hal inilah yang menyebabkan entisol mudah melewatkan air serta menyebabkan air mudah hilang. Tanah inceptisol merupakan tanah muda yang proses pembentukannya tergolong cepat dari hasil pelapukan bahan induk.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017; Citra Spot 6, dan 7 Tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2.8. Peta Jenis Tanah Aceh

Tanah inceptisol merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kegiatan budidaya pertanian di Aceh. Dengan pengelolaan yang tepat, inceptisol dapat menjadi lahan produktif yang mendukung peningkatan hasil pertanian. Pemanfaatan teknologi budidaya yang sesuai, seperti pengelolaan kesuburan tanah melalui pemupukan berimbang dan pengayaan bahan organik, dapat meningkatkan kualitas lahan serta ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Selain itu, penerapan inovasi pengolahan lahan dan dukungan input pertanian yang tepat akan memperkuat produktivitas lahan inceptisol sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Aceh.

Tanah histosol atau yang sering diketahui sebagai tanah gambut adalah jenis lapisan tanah yang di dalamnya lebih banyak terkandung bahan organik dengan keadaan

kedalaman lebih dari 40 cm dari permukaan tanah, berbeda dengan tanah mineral lainnya. Histosol terbentuk dalam kondisi seperti di lahan basah. Sehingga jenis tanah ini sangat cocok untuk ditanami sayur- sayuran, buah-buahan, dan produksi pertanian. Tanah ultisol adalah tanah yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut dan terdapat timbunan liat di horison bawah. Adanya endapan liat ini menyebabkan tanah ultisol tidak mendapatkan daya resap air yang cukup dan hal ini sebagai tanah dengan kemasaman kurang dari 5 sehingga dianggap tanah yang kurang subur.

C. Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Aceh dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi, yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh; Stasiun Meteorologi Maimun Saleh; Sabang, Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya; Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar selama 20 tahun dari mulai Tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang.

Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7-32,8°c. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5-31,9°c. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3-31,9°c. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,0-86,5 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,5-89,5 persen. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8 persen. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8 persen. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45 persen. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosterik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim. Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu Tahun 2013-2022 disajikan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6.
Data iklim rata-rata di Aceh Tahun 2013-2022.

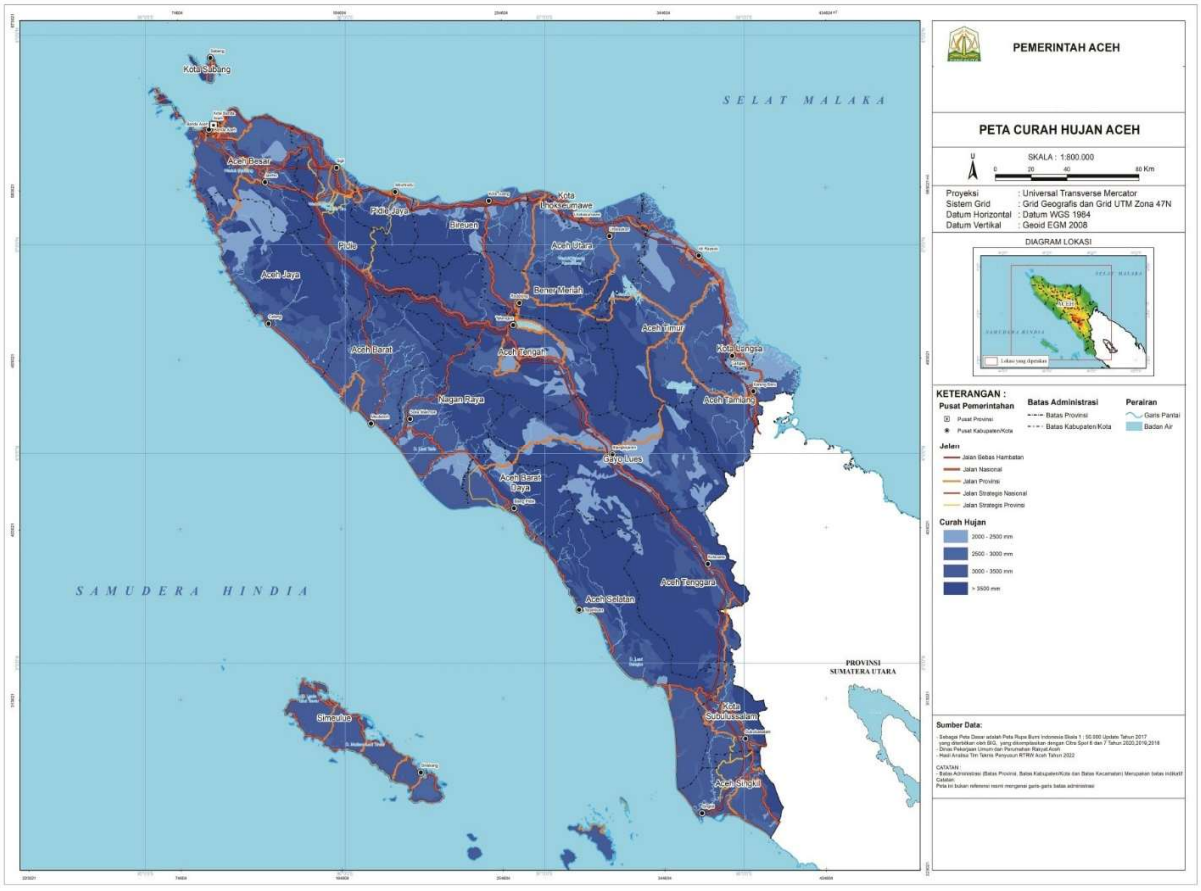
No	Parameter	Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022 (pada stasiun)					Rata-Rata
		Sabang	Banda Aceh	Nagan Raya	Aceh Utara	Aceh Besar	
1	Suhu Udara	27,05	27,02	25,63	26,59	26,74	26,6
2	Suhu Udara Maksimum (°C)	30,85	32,41	31,2	31,27	32,79	31,7
3	Suhu Udara Minimum (°C)	22,31	23,29	22,45	23,14	22,59	22,76
4	Kelembaban Udara (%)	84,14	77,64	84,34	83,24	83,9	82,65
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	57,9	51,35	54,77	60,14	51,5	55,13
6	Kec. Angin Rata-Rata (Knot)	8,87	4,99	4,11	4,09	2,42	4,89
7	Curah Hujan (mm)	2062,15	1989,3	3853,3	1439,42	1772,6	2223,35

Sumber data : Data Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Aceh Tahun 2023

Hasil pengukuran iklim rata-rata di Aceh selama kurun waktu Tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara (°C), suhu udara maksimun (°C), suhu udara minimum (°C), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar 26,60 °C, suhu udara maksimum 32,79 °C dan suhu udara minimun berkisar 22,31 °C. Kelembaban udara di Aceh sebesar 82,65 persen dengan kelembaban udara terendah sebesar 51,35 persen dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84,34 persen. Lama penyinaran matahari rata-rata sebesar 55,13 persen, dengan hasil pengukuran lama

penyinaran matahari yang terendah berada pada stasiun Banda Aceh dan stasiun Aceh Besar, sedangkan yang tertinggi berada pada stasiun Sabang dan stasiun Aceh Utara. Untuk kecepatan angin rata-rata, stasiun Sabang masih menempati rata-rata tertinggi sebesar 8,87 knot. Hasil pengukuran curah hujan di lima stasiun, bahwa pada stasiun Nagan Raya diperoleh curah hujan tertinggi dari semua stasiun dengan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 3.853,30 mm.

Suhu udara selama periode Tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada Tahun 2003 sebesar 26.7°C menjadi 27.1°C pada Tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada Tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada Tahun 2003 sebesar 26,7°C. Hal ini menunjukan peningkatan sebesar 0.4°C atau suhu rata-rata mencapai 27.01°C. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan serta pengendalian Gas Rumah Kaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, 2017;Citra Spot 6, dan 7 Tahun 2020, 2019, 2018

Gambar 2.9. Peta Curah Hujan Aceh

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) meliputi :

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
2. Kawasan Strategis Aceh (KSA).

A. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Aceh

A1. KSN dari sudut kepentingan Pertumbuhan ekonomi

Kawasan Strategis Nasional di Aceh dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Aceh terdiri dari:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2. Kawasan Banda Aceh Darussalam; dan
3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.

A2. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

Kawasan Strategis Nasional di Aceh dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdiri dari:

1. Kawasan Perbatasan Negara di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas;
3. Kawasan perbatasan Kota Sabang;
4. Kawasan pertahanan negara untuk daerah latihan militer di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Besar;
5. Daerah ranjau di Kota Sabang;
6. Daerah pembuangan amunisi di Kota Sabang;
7. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) di Kabupaten Aceh Besar;
8. Kawasan daerah pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) di Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Simeulue;
9. Pos TNI Angkatan Laut (POSAL) terdapat di Lampulo Kota Banda Aceh, Malahayati Aceh Besar, Sigli Kabupaten Pidie, Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara, Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur, Langsa Kota Langsa, Seruway kabupaten Aceh Tamiang, Kuala Peudada Kabupaten Bireuen dan Sukakarya Kota Sabang;
10. Daerah Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang/ FASHARKAN) di Kota Sabang.

A3. KSN Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Kawasan Strategis Nasional Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terdiri dari: 1). Pulau Rondo di Kota Sabang; 2) Pulau Weh di Kota Sabang; 3) Pulau Bateeleblah, di Kabupaten Aceh Besar; 4) Pulau Rusa, di Kabupaten Aceh Besar; 5) Pulau Raya, di Kabupaten Aceh Jaya; 6) Pulau Salaut Besar, di Kabupaten Simeulue; dan 7) Pulau Simeulue Cut, di Kabupaten Simeulue

B. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) menetapkan Kawasan Strategis Aceh (KSA) dari sudut:

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
2. Kepentingan Lingkungan Hidup.

B1. Kawasan Strategis Aceh dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan penetapan KSA dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi adalah untuk menata KSA menjadi kawasan yang menarik bagi investor yang didukung oleh pelayanan dan manajemen yang profesional, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu untuk memanfaatkan peluang globalisasi dan kerja sama ekonomi regional dan internasional secara optimal. Pengembangan KSA di Aceh meliputi:

1) Pengembangan KIA Ladong sebagai pusat ekonomi kreatif Aceh yang berfungsi untuk inovasi kreatif, inkubasi bisnis kreatif, pusat promosi produk lokal, budaya islami, kuliner halal, dan konten digital. Pengembangan Hub Kreatif KIA Ladong dioptimalkan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi lainnya, dengan berperan sebagai pusat inovasi dan ekonomi kreatif yang mengolah produk primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dll) menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi. Selain itu, Ladong dapat menjadi pusat branding, pemasaran digital, dan promosi internasional berbasis Muslim Friendly Industry, sehingga komoditi unggulan Aceh tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada ekonomi kreatif yang berdaya saing global.

2) Pengembangan Kawasan Industri Perikanan yang dipusatkan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kutaraja, Lampulo (Banda Aceh), serta didukung oleh kawasan perikanan yang telah ditetapkan melalui Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) dan kawasan perikanan budidaya di pesisir utara-timur dan barat-selatan Aceh.

3) Pengembangan Kawasan Pusat Distribusi Perdagangan Aceh (ATDC) sebagai penyangga persediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk jaringan distribusi Aceh yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, yang terbagi dalam 3 wilayah meliputi:
   a. Wilayah I: berada di Kabupaten Aceh Besar melayani Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya;
   b. Wilayah II: berada di Kabupaten Aceh Utara melayani Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues; dan
   c. Wilayah III: berada di Kabupaten Aceh Barat melayani Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Simeulue.

4) Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi BASAJAN, yang meliputi: Banda Aceh, Sabang, dan Jantho. BASAJAN diharapkan menjadi kawasan ekonomi regional yang memadukan potensi-potensi unggulan daerah, seperti; pariwisata, seni budaya, perdagangan, perindustrian, pengolahan produk unggulan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan), kerajinan dan ekonomi kreatif.

5) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Barat - Selatan (BARSELA) yang meliputi 8 (delapan) kab/kota di pesisir barat-selatan Aceh, yaitu: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil dan Simeulue. Kawasan ini akan berfokus pada agroindustry dan *industry halal food*.

6) Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi LATIMTA dimasksudkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk wilayah timur Aceh dengan memanfaatkan potensi dan komoditi unggulan daerah serta perdagangan, yang meliputi; Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. LATIMTA memiliki keunggulan dalam agroindustri, industry perikanan tangkap dan budidaya, industri makanan halal dan Perdagangan (kegiatan ekspor-impor).

7) Pengembangan Kawasan Strategis Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang berfokus pada Agrowisata, Ekowisata dan wisata budaya. Secara administrative, DTGA meliputi 4 kabupaten, yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

8) Pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan Reintegrasi Aceh disingkat Kawasan Reintegrasi Aceh. Kawasan Reintegrasi Aceh tersebar di seluruh Aceh kecuali Banda Aceh, dengan arahan pengembangan meliputi kegiatan pertanian dan kegiatan penunjang reintegrasi.

Selain itu juga dilakukan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Aceh (KSPA) di sektor Pariwisata Aceh, meliputi:

1) Pengembangan KSPA Pariwisata Cagar Budaya Banda Aceh dan sekitarnya, KSPA Bahari Sabang dan Pulo Aceh, dan KSPA Petualangan Lhoknga dan sekitarnya yang berada di Destinasi Pariwisata Aceh (DPA) Meukuta Alam.
2) Pengembangan KSPA Pariwisata Sejarah Samudera Pasai yang berada di DPA Pesisir Timur Aceh.
3) Pengembangan KSPA Ekowisata dan Geowisata Danau Lut Tawar dan KSPA Ekowisata Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di DPA Dataran Tinggi Gayo Alas, dan
4) Pengembangan KSPA ekowisata Bahari Simeulue-Pulau Banyak termasuk Pulau Panjang, Pulau Mangki Besar, Mangki Ketek dan Pulau Lipan, yang berada di DPA pesisir Barat-Selatan Aceh.

B2. Kawasan Strategis Aceh dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis ini adalah Kawasan Tahura Pocut Meurah Intan yang bertujuan untuk menata kawasan strategis tersebut menjadi kawasan yang terlindungi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh pengelolaan yang profesional, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang memadai; dan memanfaatkan peluang kerja sama di bidang lingkungan secara global.

C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanahkan tentang penekanan bagaimana upaya untuk memastikan bahwa Tujuan Pembangunan

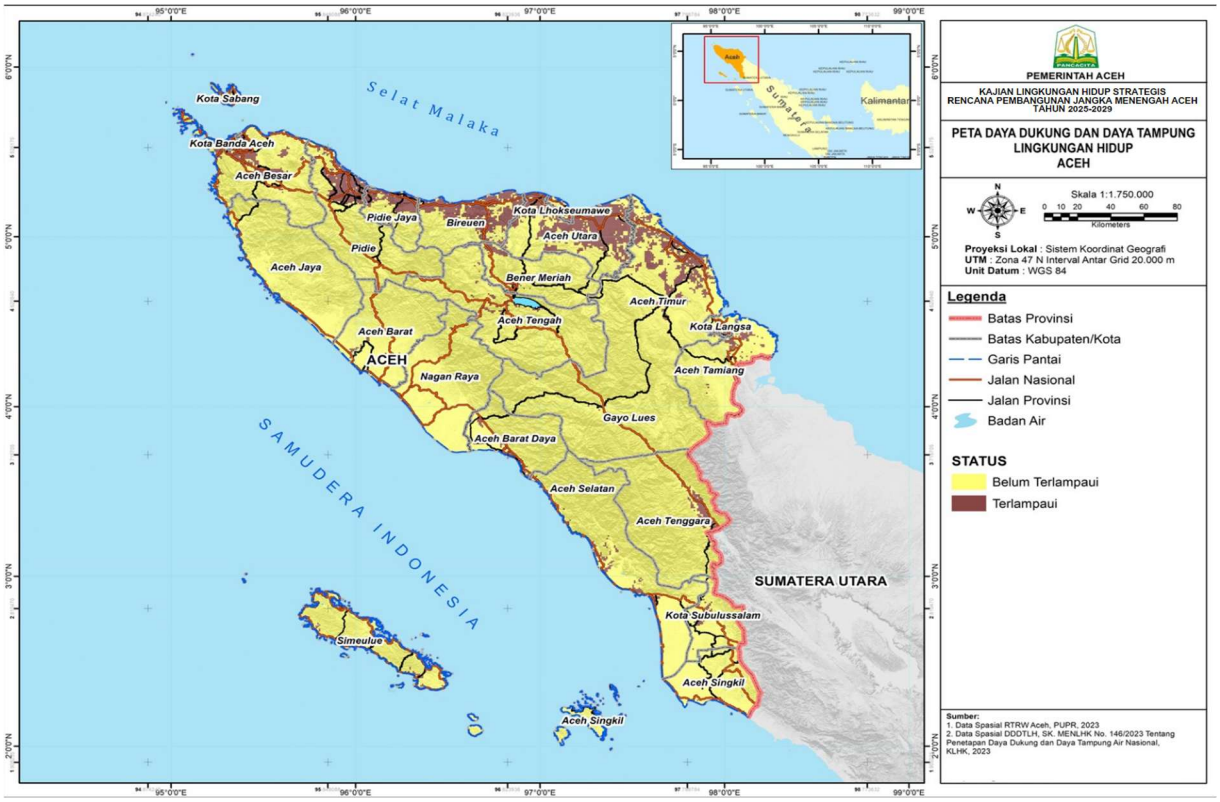
Berkelanjutan (TPB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 dapat diintegrasikan ke dalam RPJP/RPJMD. Meskipun demikian, tetap memberikan peranan penting aspek lingkungan hidup melalui instrument daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

C1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

C1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Aceh

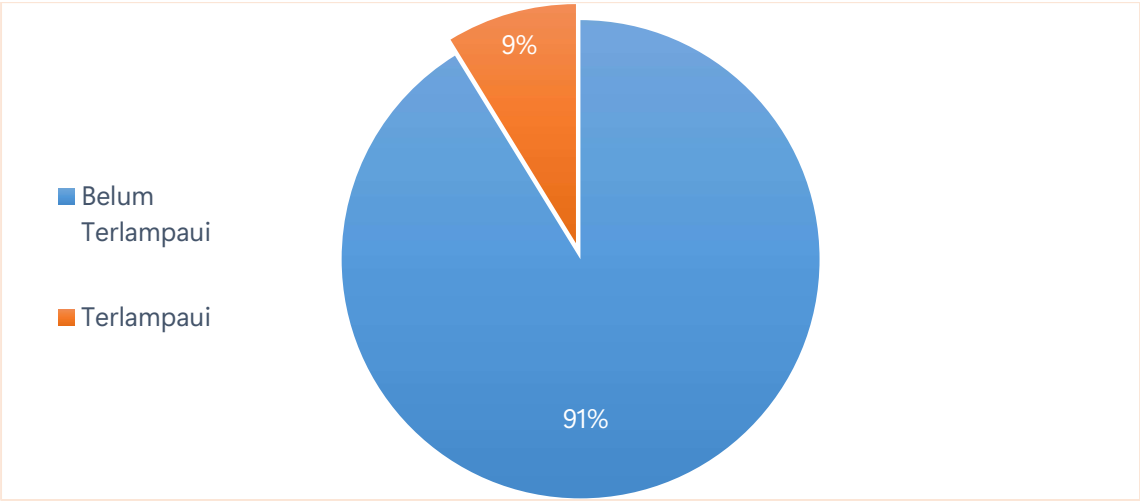
Berdasarkan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan D3T Air Nasional daya dukung dan daya tampung air di berbagai kabupaten/kota di Aceh termasuk kedalam klasifikasi sudah terlampaui dan yang belum terlampaui. Dua kabupaten dengan persentase belum terlampaui yang tertinggi adalah Nagan Raya dan Gayo Lues, dengan persentase masing-masing sebesar 99,90 persen dan 99,78 persen. Sementara itu, Aceh Utara dan Bireuen memiliki persentase yang terlampaui paling tinggi, dengan nilai 48,54 persen dan 44,08 persen secara berurutan.

Secara keseluruhan, luas Aceh adalah 5.683.439,61 hektar. Dari total luas ini, sebagian besar, yaitu 5.183.902,45 hektar atau 91,21 persen, masih berada di bawah batas daya dukung dan daya tampung air, menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten/Kota ini masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan air tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada sumber daya hidrologisnya. Sementara itu, ada sekitar 499.537,16 hektar atau 8,79 persen dari wilayah yang telah melewati kapasitas daya dukung dan daya tampung airnya.



Sumber : SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

Gambar 2.10. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Aceh

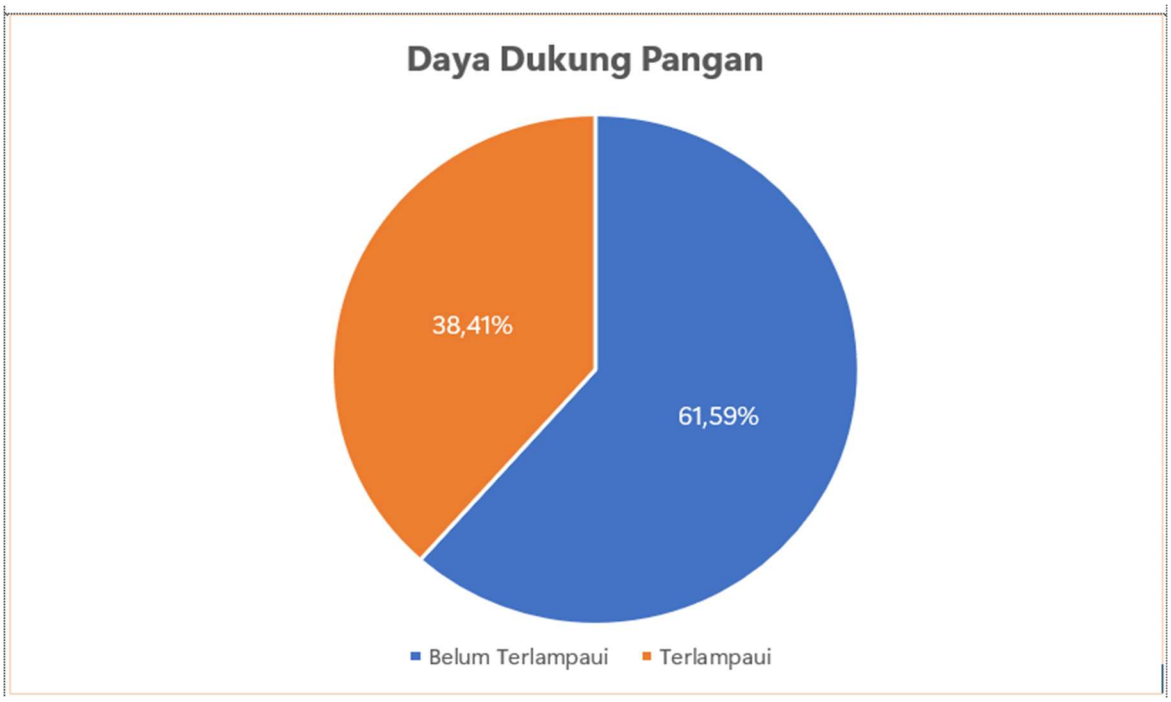


Sumber : Analisis Data D3TLH Air, Tim KLHS RPJM Aceh, 2023

Gambar 2.11. Persentase D3TLH Air di Aceh

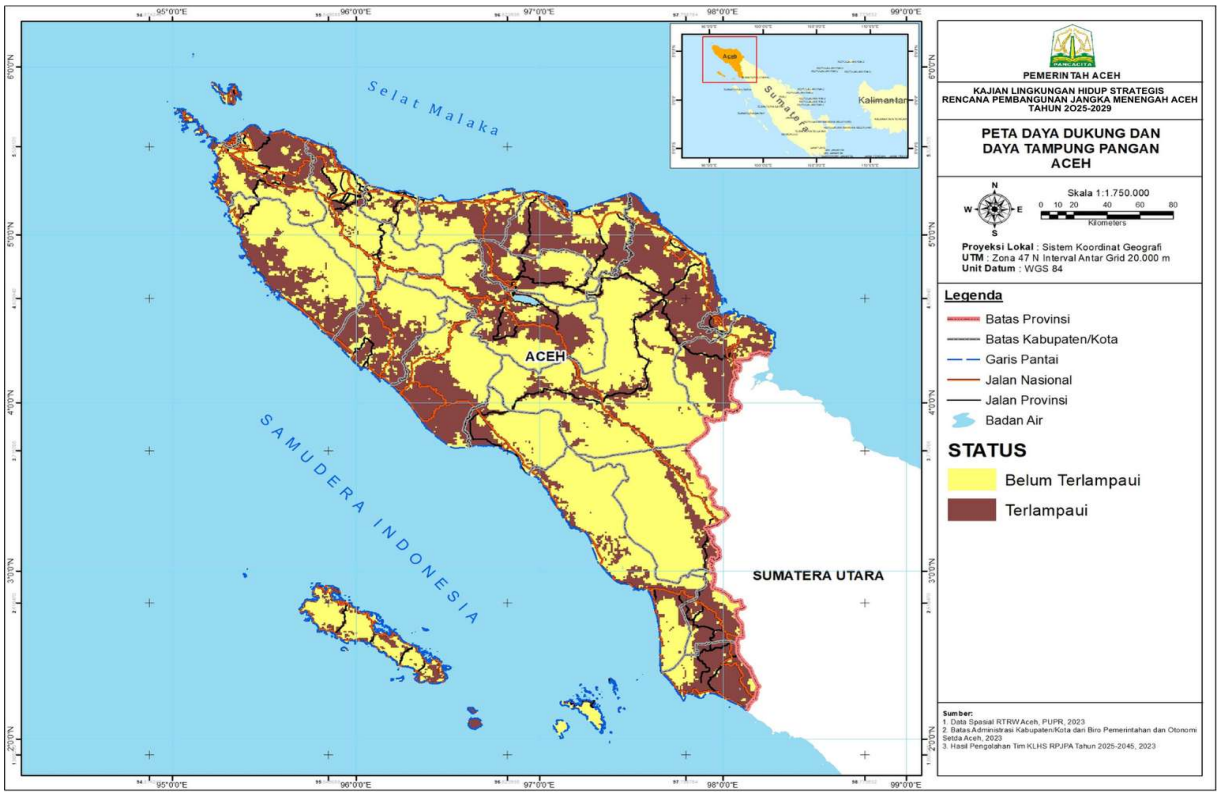
C1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Aceh

Secara keseluruhan, luas daya dukung dan daya tampung pangan yang belum terlampaui di Aceh mencapai 3.500.495,07 Ha, atau 61,59 persen dari total luas daya dukung, sedangkan luas yang terlampaui adalah 2.183.417,00 Ha, yang mencakup 38,41 persen dari total. Beberapa kabupaten seperti Gayo Lues memiliki persentase lahan belum terlampaui yang signifikan (8,09%), sementara Kota Banda Aceh memiliki persentase yang sangat rendah (0,07%). Wilayah dengan persentase total tertinggi adalah Aceh Selatan dengan 7,62 persen dari total luas, sementara wilayah dengan persentase total terendah adalah Kota Sabang dengan 0,05 persen.



Sumber : KLHS RPJP Aceh, 2023

Gambar 2.12. Persentase D3TLH Pangan di Aceh



Sumber : KLHS RPJP Aceh, 2023

Gambar 2.13. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Aceh

C1.3. Penduduk Optimum Aceh

Berdasarkan Materi Teknis D3TLH Aceh, proyeksi ambang batas penduduk Aceh yang dapat ditampung berjumlah 13.288.715 jiwa di Tahun 2045.

Tabel 2.7.
Penduduk Optimum di Aceh

Provinsi Aceh	Jumlah Penduduk Eksisting Tahun 2022 (Jiwa)	D3TLH dikaitkan dengan Jumlah Penduduk		
		Jumlah Penduuk Optimum (Jiwa)	Perbandingan Jumlah Penduduk Eksisting dan Optimum (Jiwa)	Status D3TLH
	5.407.855	13.288.715	7.879.525	Belum Terlampaui

Sumber: Materi Teknis D3TLH Aceh, 2023

Tabel 2.8.
Selisih Proyeksi Penduduk Tahun 2045 dengan Jumlah Optimum Aceh

Aceh	D3TLH dikaitkan dengan Jumlah Penduduk			Status D3TLH
	Penduduk 2045	Optimum	Selisih	
	6.773.380	13.288.715	6.515.335	Belum Terlampaui

Sumber: Materi Teknis D3TLH Aceh, 2023

Dengan jumlah penduduk eksisting sebesar 5.407.855 jiwa, Aceh secara indikatif berada pada status aman dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis penduduk, di mana ambang batas D3TLH masih belum terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan dasar penduduknya sekaligus menopang jumlah penduduk yang diproyeksikan di masa mendatang. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Tahun 2045, jumlah penduduk Aceh diperkirakan mencapai 6.773.380 jiwa. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Aceh tetap terjaga, serta memiliki potensi yang memadai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

C2. Jasa Ekosistem

C2.1. Jasa Ekosistem Penyediaan Air bersih (JP2)

Pembangunan di Aceh dirancang dengan memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai landasan penting untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan jasa ekosistem, khususnya penyediaan air bersih, yang sangat vital bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta menjaga kualitas kesehatan lingkungan. Dengan menjaga kelestarian sumber daya air melalui pengelolaan kawasan hutan, daerah tangkapan air, dan perlindungan ekosistem sungai, Aceh dapat memastikan ketersediaan air bersih yang cukup, aman, dan berkesinambungan.

Pasokan dan cadangan air tanah serta permukaan menentukan ketersediaan air bersih di suatu wilayah. Kemampuan tanah untuk menyerap dan mengalirkan air sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya. Di setiap ekoregion di Aceh, jenis batuan yang ada dapat menunjukkan potensi adanya akuifer atau lapisan yang tidak dapat meresap air. Faktor ini memainkan peran penting dalam penyerapan air hujan ke dalam tanah.

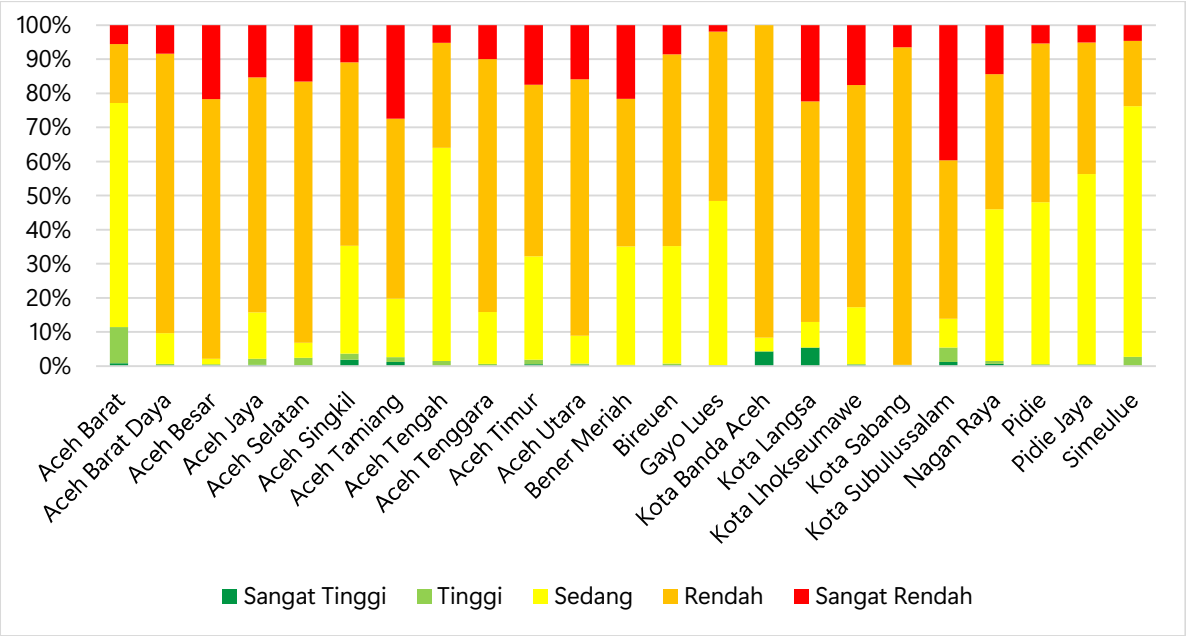
Potensi lahan dalam jasa ekosistem penyediaan air bersih di Aceh lebih dari 53 persen adalah rendah, yaitu 3.044.838,18 ha dari luas wilayahnya. Potensi lahan sangat tinggi hanya mencapai 0,39 persen atau seluas 21.988,56 ha. Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas dan persentase lahan potensi tinggi yang paling besar dibandingkan kabupaten lainnya, yakni seluas 29.874,84 ha atau 33,60 persen. Disusul Kabupaten Aceh Selatan dengan luas lahan mencapai 9,130,57 ha atau 10,27 persen. Kota Subulussalam memiliki lahan potensi sangat rendah terluas di Aceh untuk penyediaan air bersih, yaitu 46.736,20 ha atau hampir 40 persen wilayahnya. Persentase lahan potensi rendah, juga relatif tinggi di daerah kota seperti Kota Sabang, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Perbedaan penggunaan lahan dan ekoregion masing-masing kabupaten menyebabkan potensi untuk penyediaan air yang berbeda pula. Luas potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih tiap Kabupaten/Kota di Aceh disajikan pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9.
Luas Potensi Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Tiap Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih (Ha)					Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Aceh Barat	2.341,49	29.874,84	185.197,18	48.825,35	14.389,93	278.287,30
Aceh Barat Daya	458,42	737,60	17.070,13	154.148,12	16.234,38	188.190,24
Aceh Besar	680,15	936,81	4.549,67	217.989,75	65.671,31	289.147,54
Aceh Jaya	1.547,38	6.677,76	53.264,46	268.020,67	59.272,35	387.235,25
Aceh Selatan	871,06	9.130,57	18.366,12	319.473,57	70.596,85	417.567,12
Aceh Singkil	3.281,98	3.283,56	57.018,28	96.774,11	28.272,41	185.348,36
Aceh Tamiang	2.600,09	9.293,77	42.249,99	116.962,19	50.265,33	218.771,28
Aceh Tengah	0	6.893,60	282.751,20	139.466,97	17.729,98	446.841,74
Aceh Tenggara	0	4.187,66	63.444,56	308.642,44	41.637,66	417.912,32
Aceh Timur	2.785,12	7.593,42	164.308,29	272.365,91	96.632,43	540.900,05
Aceh Utara	1.346,80	698,03	22.079,73	203.583,89	44.163,70	270.525,36
Bener Meriah	0	668,36	67.205,30	83.614,17	39.252,09	190.739,93
Bireuen	510,60	755,68	61.718,61	100.562,86	16.662,09	179.699,24
Gayo Lues	0	1.526,75	266.752,01	275.431,11	10.418,58	554.128,46
Kota Banda Aceh	231,15	0	216,73	4.921,49	538,75	5.676,96
Kota Langsa	1.154,04	0	1.616,21	13.840,13	6.980,37	22.436,71
Kota Lhokseumawe	62,71	14,37	2.245,89	8.746,84	2.290,28	13.297,37
Kota Sabang	0	48,03	0	10.855,51	1.263,57	12.167,10
Kota Subulussalam	1.447,33	23.327,62	9.921,00	54.923,29	30.188,18	118.360,08
Nagan Raya	2.215,69	3.029,45	151.999,47	135.249,37	62.096,59	352.374,88
Pidie	405,68	1.241,04	148.981,17	146.063,91	21.466,72	317.752,84
Pidie Jaya	132,38	375,56	53.199,82	36.808,51	3.517,02	93.900,90
Simeulue	31,12	4.816,92	129.582,28	33.946,63	13.832,77	182.178,59
ACEH	22.103,19	115.111,38	1.803.738,12	3.051.216,78	713.373,33	5.683.439,61

Sumber: DLHK Aceh, 2022

Berdasarkan **Tabel 2.9** disimpulkan bahwa wilayah tengah Aceh merupakan pegunungan/perbukitan struktural yang mempunyai potensi sedang untuk penyediaan air bersih, bahkan beberapa memiliki potensi rendah. Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi lahan sedang lebih tinggi dibandingkan Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara, yaitu seluas 282.751,20 ha 62,48 ha wilayahnya. Kabupaten Gayo Lues memiliki potensi lahan tinggi untuk penyediaan air yang paling rendah di wilayah tengah, yaitu 1526,75 ha atau 0,28 % wilayahnya. Potensi air di wilayah pegunungan/perbukitan hanya terdapat di rekahan bantuan yang jumlahnya sedikit. Jenis penggunaan lahan yang berbeda di pegunungan juga berdampak terhadap tingkat potensi. Pegunungan yang masih berupa hutan primer memiliki potensi sedang, sedangkan hutan sekunder atau semak berpotensi rendah. Hal ini terkait dengan tutupan vegetasi, semakin lebat tutupan vegetasi, maka air yang diserap dan dialirkan oleh tanah relatif lebih banyak. Tingkat kerapatan vegetasi di hutan primer lebih tinggi dibandingkan hutan sekunder (bekas tebangan) atau semak.



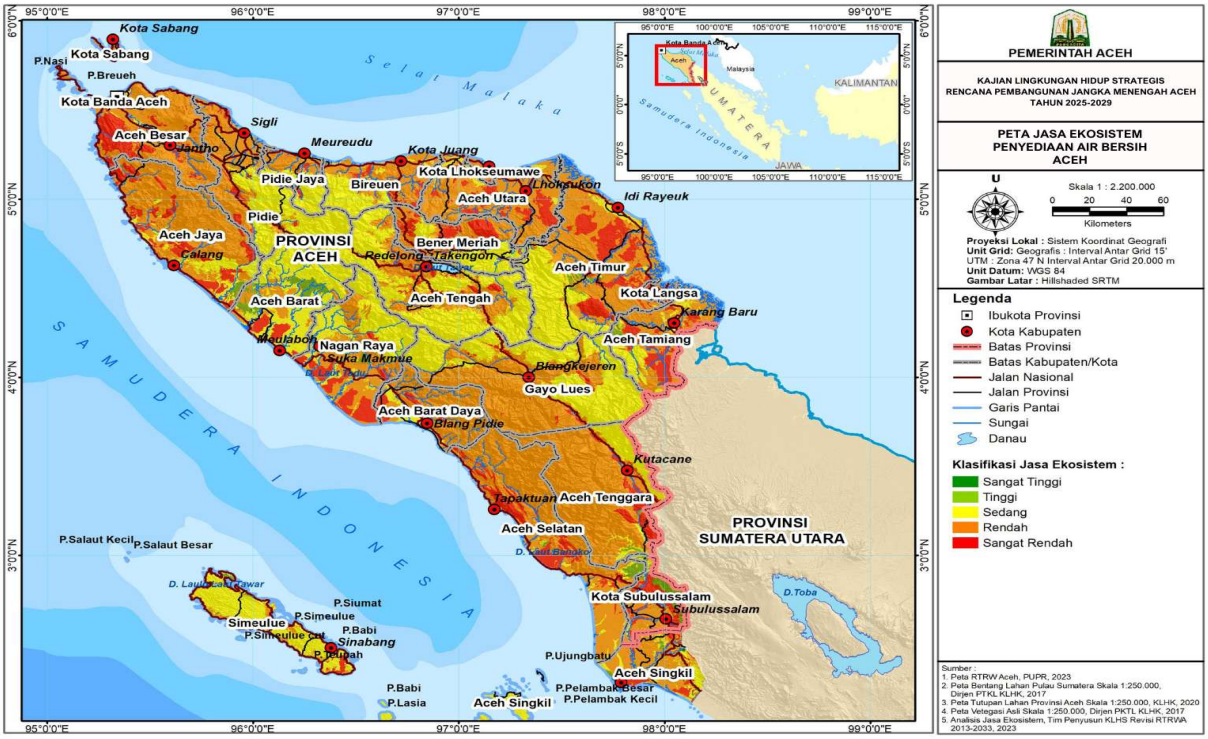
Sumber: DLHK Aceh, 2022

Gambar 2.14. Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten/Kota

Wilayah Aceh terbentuk dari bentang lahan (ekoregion) dominan berupa bentukan asal proses struktural di wilayah tengah, kemudian mengarah ke wilayah barat dan utara timur ditemukan bentang lahan asal proses fluvial dan marin yang dominan. Ekoregion pegunungan/perbukitan struktural memiliki potensi rendah untuk penyediaan air bersih. Karakteristik batuan di bentukan struktural berupa batuan keras yang umumnya bersifat impermeable layer (lapisan yang terdiri dari batuan yang kedap air). Air hujan tidak akan mampu berinfiltrasi ke dalam tanah, melainkan mengalir ke tempat yang lebih rendah dalam bentuk limpasan permukaan (*surface run-off*). Kondisi ini menyebabkan air tanah sulit ditemukan di wilayah pegunungan/perbukitan struktural, kecuali terdapat rekahan batuan dan air hujan merembes melalui rekahan batuan tersebut.

Potensi tinggi untuk penyediaan air berada di kanan kiri sungai terutama di dataran aluvial. Jenis tanah alluvium memiliki tekstur pasir sehingga jarak antar pori relatif besar. Hal tersebut membuat kemampuan untuk menyerap dan mengalirkan air sangat baik. Air hujan akan ditampung dalam pori dan menjadi cadangan untuk air tanah. Jenis penggunaan lahan di pantai sepanjang Aceh dapat berdampak terhadap potensi. Wilayah perkotaan mempunyai potensi rendah karena sebagian besar lahan sudah dibangun. Hal ini membuat air hujan langsung masuk ke sistem sungai sehingga cadangan air tanah berkurang. wilayah yang masih didominasi vegetasi akan lebih baik dalam menyediakan air bersih. Potensi penyediaan air bersih Kepulauan di Aceh relatif sedang dan rendah. Sistem DAS di kepulauan relatif sempit sehingga air hujan langsung menuju ke sungai. Hal tersebut menyebabkan potensi air tanah relatif rendah karena minimnya pasokan air dari proses infiltrasi. Ekoregion di kepulauan didominasi pegunungan/perbukitan struktural yang mempunyai impermeable layer sehingga ketersediaan air bersih di wilayah kepuluan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah daratan utama.

Air permukaan yang berupa sungai, hanya mengalir saat musim penghujan saja dan mengering saat musim kemarau tiba. Jasa ekosistem penyediaan air bersih Kabupaten/Kota dan Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Provinsi Aceh disajikan pada **Gambar 2.15**.



Sumber: DLHK Aceh, 2022

Gambar 2.15. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Aceh

C2.2. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan (JEP1)

Aceh memiliki lahan potensi sangat tinggi dalam menyediakan pangan hanya seluas 35.173,12 ha atau 0,62 pesern dari luas wilayahnya. Sedangkan lahan dengan potensi tinggi seluas 310.486,28 ha atau 5,49 persen. Potensi lahan sangat rendah mendominasi, yaitu mencapai 45,47 persen atau 2,6 juta ha. Lahan dengan potensi rendah untuk penyediaan pangan mencapai 2,2 juta hektar atau 39,42 persen. Kota Langsa memiliki persentase tertinggi lahan potensi sangat tinggi untuk pangan dibandingkan kabupaten/kota lain. Luasannya mencapai 1.189,41 ha atau 5,56 persen dari luas wilayahnya. Persentase lahan potensi pangan sangat rendah tertinggi adalah Kabupaten Aceh Selatan. 83,76 persen wilayahnya atau 349.087,58 ha tidak berpotensi untuk penyediaan pangan. Berikut dibawah ini grafik persentase jasa ekosistem penyediaan pangan Kabupaten/Kota dan Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Aceh. Luas potensi jasa ekosistem penyediaan pangan tiap Kabupaten/Kota di Aceh disajikan pada Tabel **Tabel 2.10**.

Tabel 2.10.
Luas Potensi Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Tiap Kabupaten/Kota

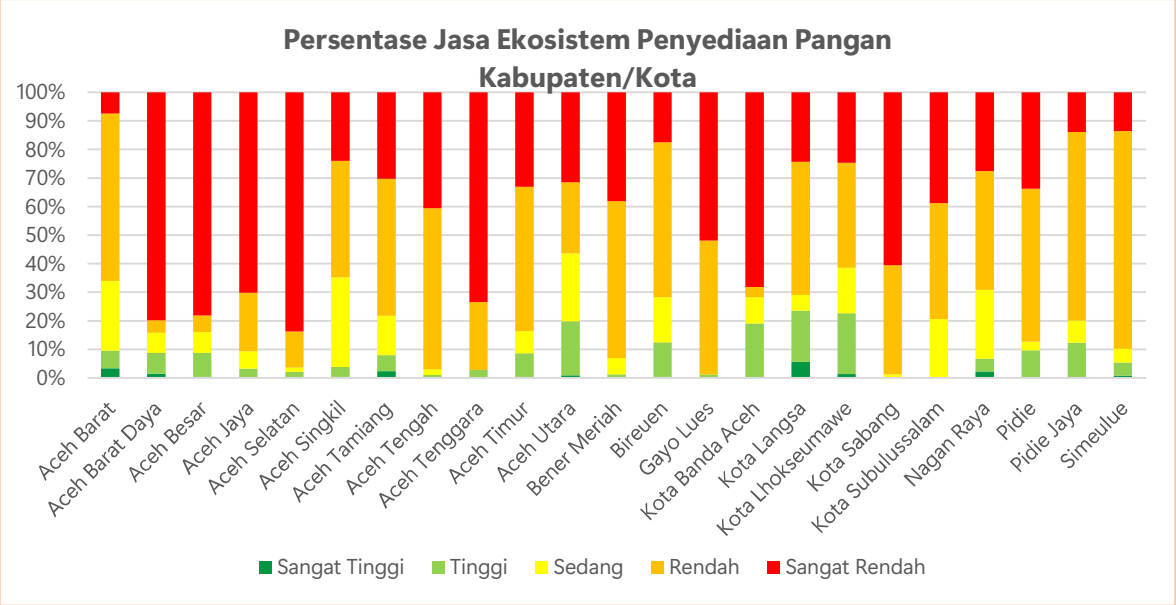
Kabupaten	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan					Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Aceh Barat	9.457,87	17.465,96	68.868,25	165.184,69	20.908,26	281.885,03
Aceh Barat Daya	2.633,83	13.819,28	13.280,35	8.248,77	150.171,16	188.153,38

Kabupaten	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan					Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Aceh Besar	947,13	24.189,08	20.704,11	16.807,41	223.622,78	286.270,52
Aceh Jaya	693,78	12.026,36	23.629,75	79.765,28	272.816,53	388.931,69
Aceh Selatan	269,98	8.365,94	6.515,88	52.533,28	349.087,58	416.772,67
Aceh Singkil	643,20	6.304,85	56.439,58	73.492,87	43.142,69	180.023,19
Aceh Tamiang	4.983,03	11.618,21	29.070,87	100.635,02	63.455,02	209.762,15
Aceh Tengah		4.748,05	8.908,45	255.094,11	183.690,81	452.441,42
Aceh Tenggara		11.761,42	21,52	98.791,21	305.770,71	416.344,86
Aceh Timur	1.729,49	45.299,35	41.934,64	273.757,54	179.299,28	542.020,29
Aceh Utara	2.362,07	51.295,25	64.485,85	67.219,41	85.447,14	270.809,71
Bener Meriah		2.290,80	11.086,39	106.193,25	73.585,62	193.156,06
Bireuen	665,23	21.663,35	28.177,87	97.058,26	31.331,92	178.896,62
Gayo Lues		6.789,24	13,83	259.591,02	287.653,02	554.047,11
Kota Banda Aceh		1.020,72	497,09	193,35	3.658,21	5.369,37
Kota Langsa	1.189,41	3.850,58	1.165,11	9.995,21	5.196,39	21.396,70
Kota Lhokseumawe	183,45	2.855,75	2.140,95	4.930,85	3.320,27	13.431,27
Kota Sabang			146,71	4.448,85	7.066,88	11.662,44
Kota Subulussalam		68,80	24.203,24	47.927,45	45.798,29	117.997,78
Nagan Raya	7.652,00	15.407,50	82.061,37	142.067,54	94.333,68	341.522,08
Pidie	399,99	29.811,39	9.558,97	168.144,07	105.717,82	313.632,24
Pidie Jaya	50,66	11.748,42	7.342,78	62.945,91	13.245,03	95.332,80
Simeulue	1.312,00	8.085,98	8.668,91	134.524,17	23.863,75	176.454,81
ACEH	**35.173,12**	**310.486,28**	**508.922,45**	**2.229.549,50**	**2.572.182,83**	**5.656.314,19**

Sumber: DLHK Aceh, 2022

Lokasi wilayah yang memiliki potensi tinggi untuk penyediaan pangan berada di pesisir barat, timur dan utara. Wilayah tersebut termasuk dalam ekoregion dataran aluvial. Dataran ini sesuai untuk pengembangan pertanian lahan basah karena tanahnya yang relatif subur. Kondisi hidrologi di dataran ini mempunyai akuifer yang baik sehingga ketersediaan air tanah relatif melimpah. Material tanah penyusunnya didominasi oleh komposisi pasir, kerikil dan kerakal sehingga mampu mengalirkan air dengan baik. Karakteristik tanah di dataran aluvial adalah tekstur geluhan, solum tebal dan kandungan haranya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kabupaten yang mempunyai potensi tinggi antara lain Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat dan Nagan Raya. Kabupaten Aceh Utara memiliki pertanian lahan basah paling luas dan produksi padi tertinggi se-Aceh. Pertanian lahan basahnya mencapai luas 62.689,44 ha dengan produksi padi 369.137,53 ton pada Tahun 2021 (BPS, 2022).

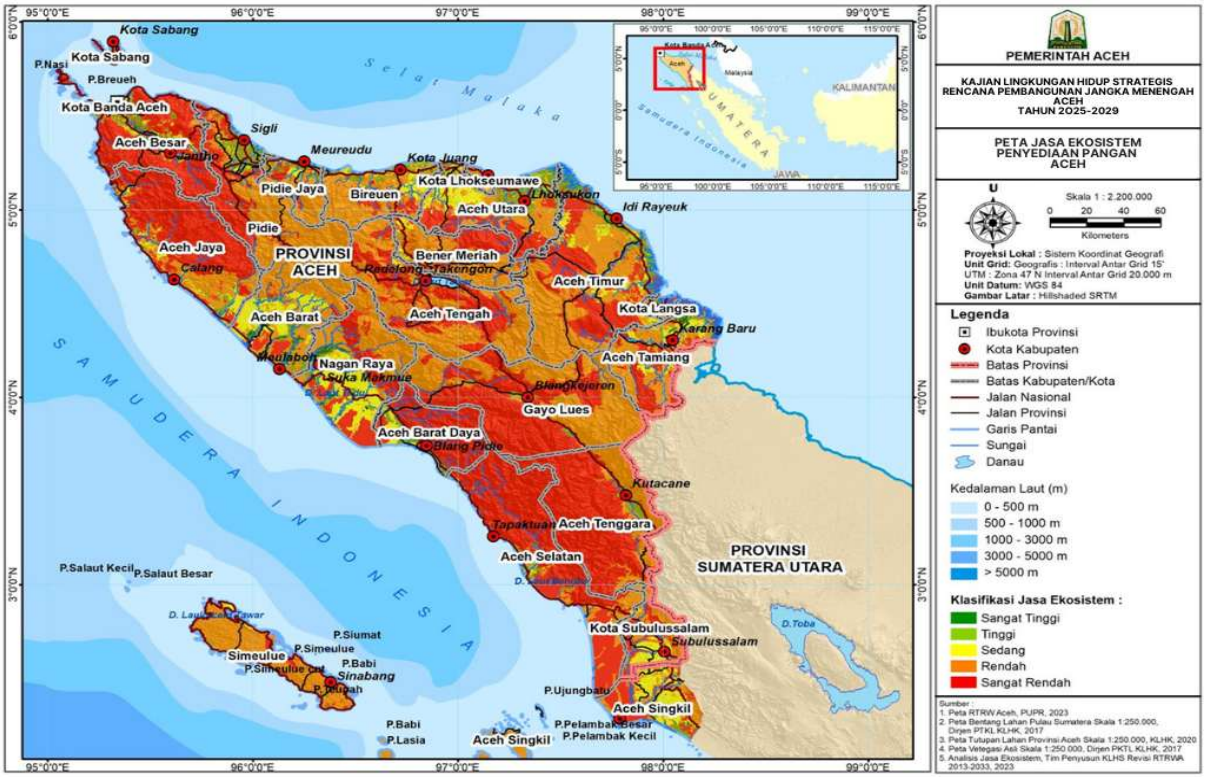
Ekoregion di wilayah tengah adalah perbukitan dan pegunungan struktural. Kondisi geografisnya kurang sesuai untuk dikembangkan pertanian lahan basah. Pegunungan dan perbukitan cocok untuk budidaya tanaman tahunan, bukan semusim, seperti padi. Ekoregion ini membutuhkan tanaman yang berakar kuat untuk menahan tanah sehingga tidak mudah erosi. Komoditas pangan mempunyai akar yang kecil dan kurang kuat. Ketersediaan air di daerah ini relatif minim karena pegunungan/perbukitan struktural mempunyai impermeable layer. Hal tersebut membuat air hujan tidak masuk ke tanah melalui proses infiltrasi melainkan langsung menuju sistem sungai. Sungai di ekoregion struktural bertipe intermitten atau tidak mengalir sepanjang tahun.



Sumber: DLHK Aceh, 2022

Gambar 2.16. Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten/Kota

Kondisi tersebut tidak sesuai untuk pengembangan budidaya tanaman pangan sehingga wilayah tengah berpotensi rendah untuk penyediaan jasa ekosistem pangan di Aceh. Kota Sabang dan Kota Subulussalam mempunyai potensi rendah untuk penyediaan pangan. Sebagian besar wilayah dua kota ini berada dalam klasifikasi rendah dan sangat rendah. Penggunaan lahan yang banyak dikembangkan di Kota Subulussalam adalah perkebunan sawit.



Sumber: DLHK Aceh, 2022

Gambar 2.17 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Aceh

C3. Ekoregion

Wilayah Aceh, memiliki lima jenis ekoregion yang juga terhubung dengan wilayah di sekitarnya. Ekoregion pertama adalah Bentang Pegunungan Bukit Barisan yang merupakan bentang alam yang paling banyak ditemukan di wilayah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, terdapat dua ekoregion lainnya yang juga terdapat di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Dataran Singkil Barus dan Bentang Lhokseumawe-Tebing Tinggi. Ekoregion lainnya adalah Lahan Basah Meulaboh Aceh. Adanya kesamaan dalam ekoregion pada beberapa provinsi tersebut membuat karakteristik fisik wilayah dan flora fauna memiliki kesamaan pula. Semua hal ini sangat penting dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di Aceh.

Tabel 2.11.
Ekoregion Aceh

Ekoregion	Luas (Ha)	Persentase (%)
Danau bervegetasi terna tepian danau	9.937,31	0,17%
Danau bervegetasi terna tepian danau pegunungan	5.915,79	0,10%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan dipterokarpa pamah	18.719,35	0,33%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	28.453,89	0,50%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan pegunungan bawah	4.228,15	0,07%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai	9.425,06	0,17%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai payau	9.169,06	0,16%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar	252.224,54	4,44%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa gambut	8.197,30	0,14%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai	17.325,33	0,30%
Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai payau	283.122,22	4,98%
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium bervegetasi hutan pantai	210,05	0,00%
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove	64.436,98	1,13%
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi nipah	1.086,79	0,02%
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi sagu	1.904,19	0,03%
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	36.727,85	0,65%
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi hutan pantai	128.396,75	2,26%
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi hutan rawa air payau	10.641,65	0,19%
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air payau	26.478,73	0,47%
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa gambut	2.035,61	0,04%
Dataran organik bermaterial gambut bervegetasi hutan gambut	5.537,79	0,10%

Ekoregion	Luas (Ha)	Persentase (%)
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan kerangas pamah	30.883,67	0,54%
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	84.355,98	1,48%
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan pegunungan bawah	173,84	0,00%
Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pegunungan bawah	656,75	0,01%
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	18.540,02	0,33%
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan bawah	3.062,35	0,05%
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan gambut	26.578,99	0,47%
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	71.799,09	1,26%
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah	5.434,94	0,10%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan dipterokarpa pamah	217,08	0,00%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	11.304,28	0,20%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai	1.585,20	0,03%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai payau	414,37	0,01%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air payau	37.260,79	0,66%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar	8.235,41	0,14%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa gambut	22.183,17	0,39%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai	5.890,08	0,10%
Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai payau	72.003,98	1,27%
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	63.880,82	1,12%
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah	4.698,64	0,08%
Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas	7.788,00	0,14%
Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah	1.194,56	0,02%

Ekoregion	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah	23.886,37	0,42%
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	220.487,62	3,88%
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	7.724,67	0,14%
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst	134.238,59	2,36%
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan kerangas pamah	3.276,61	0,06%
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	112.569,76	1,98%
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan atas	9.145,48	0,16%
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan bawah	32.772,37	0,58%
Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	10.175,44	0,18%
Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas	258,12	0,00%
Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah	68.063,55	1,20%
Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	65.052,14	1,14%
Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah	1.430,31	0,03%
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	74.483,83	1,31%
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah	22.349,99	0,39%
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan bawah	379,22	0,01%
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah	14.800,15	0,26%
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	24.534,82	0,43%
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst	254,96	0,00%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan dipterokarpa pamah	413.896,04	7,28%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan pegunungan atas	503,45	0,01%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan pegunungan bawah	541.339,44	9,52%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan pegunungan subalpin	137.374,66	2,42%

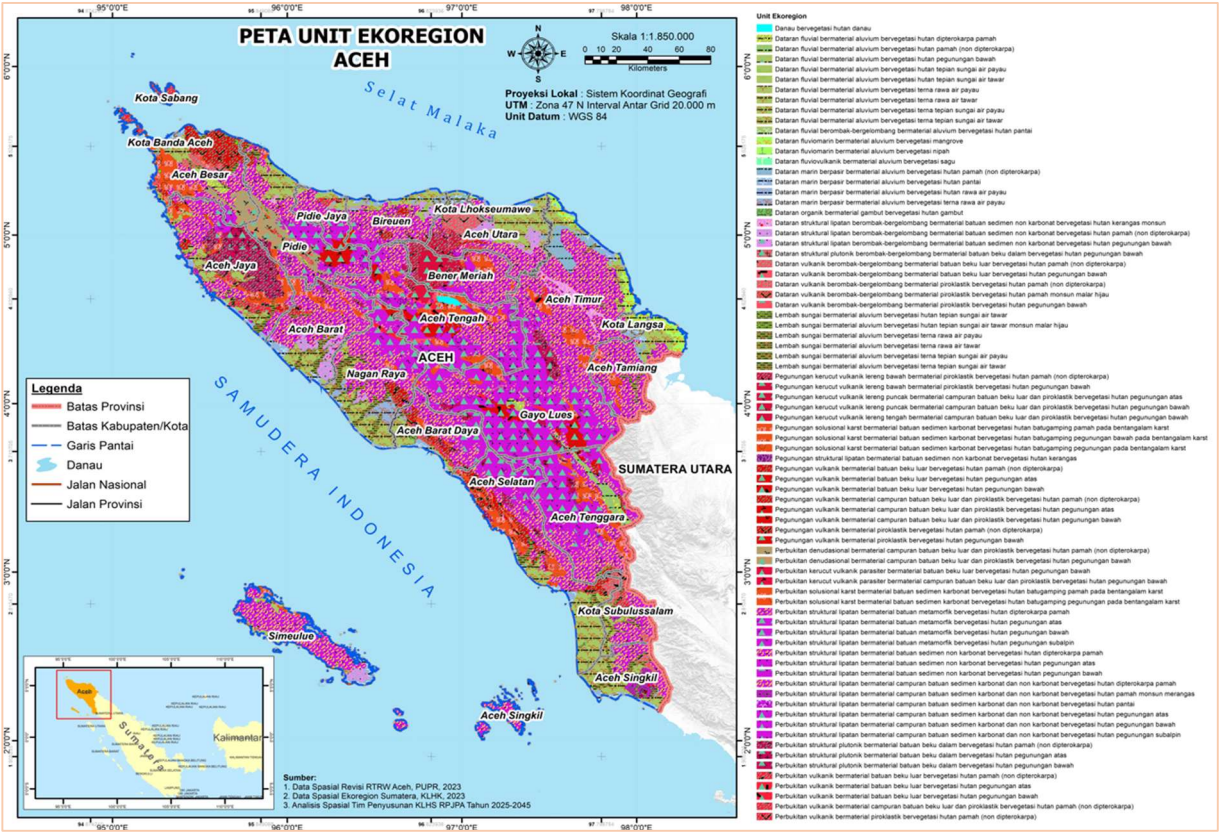
Ekoregion	Luas (Ha)	Persentase (%)
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah	179.268,26	3,15%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan pegunungan atas	1.770,50	0,03%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat bervegetasi hutan pegunungan bawah	32.638,42	0,57%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah	1.366.209,16	24,04%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan kerangas pamah	34.312,98	0,60%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan pantai	4.889,65	0,09%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan pegunungan atas	70.395,85	1,24%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan pegunungan bawah	346.605,64	6,10%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan pegunungan subalpin	3.886,61	0,07%
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	158.588,25	2,79%
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pegunungan atas	2.630,55	0,05%
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pegunungan bawah	60.145,81	1,06%
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	47.116,87	0,83%
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan atas	1.360,39	0,02%
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar bervegetasi hutan pegunungan bawah	20.088,67	0,35%
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	24.767,11	0,44%
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	7.451,00	0,13%
Total Luas (Ha)	**5.683.439,61**	**100,00%**

Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

Berdasarkan **Tabel 2.11**, wilayah Aceh didominasi oleh 3 (tiga) jenis/klasifikasi ekoregion, yaitu:

1. **Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat bervegetasi hutan dipterokarpa pamah,** yaitu ekosistem yang terbentuk akibat aktivitas tektonik sehingga menghasilkan penampakan dataran tinggi dengan kelerengan lebih dari 16%. Ekosistem ini menjadi ekosistem untuk spesies mamalia besar seperti gajah, harimau, tapir dan rusa. Jenis ekoregion ini memiliki luas 1.366.209,16 Ha atau sekitar 24,04% dari total luas wilayah daratan Aceh.

2. **Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan pegunungan bawah,** yaitu bentuk lahan dengan relief perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas batuan metamorf, seperti sekiss, gneiss, phylit atau lainnya. Perbukitan terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi lipatan pada batuan. Pola struktur lipatan ini di antaranya dicirikan oleh antiklin (hogback and cuesta) dan sinklin (subsequent valley). Perbukitan struktural lipatan memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air permukaan (sungai kecil) dan sebagai tempat wisata alam. Jenis ekoregion ini memiliki luas 541.339,44 Ha atau sekitar 9,52% dari total luas wilayah daratan Aceh.
3. **Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik bervegetasi hutan dipterokarpa pamah,** yaitu bentuk lahan dengan relief perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas batuan metamorf, seperti sekiss, gneiss, phylit atau lainnya. Perbukitan terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi lipatan pada batuan. Vegetasi hutan dipterokarpa pamah fungsinya sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada dibawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada keberadaan hutan dipterokarpa. Jenis ekoregion ini memiliki luas 413.896,04 Ha atau sekitar 9,52% dari total luas wilayah daratan Aceh.



Sumber: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia

Gambar 2.18 Peta Ekoregion Aceh

C4. Karakteristik Bentang Alam (KBA)

Wilayah Aceh memiliki beragam bentang alam seperti perbukitan, dataran, dataran bergelombang, pegunungan, lembah sungai, dan danau. Perbukitan merupakan bentuk alam yang paling banyak ditemukan di wilayah daratan Aceh, mencakup 63% dari luas wilayahnya, sementara dataran mencakup 16.06%. Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat dan non karbonat bertipe vegetasi hutan berfungsi sebagai penyedia air tanah, tempat wisata alam, serta habitat fauna kelelawar. Vegetasi hutan juga berfungsi dalam melindungi ekosistem biotik dan abiotik, menyerap air hujan, dan menghambat laju air permukaan.

Karakteristik ekoregion laut di Aceh terdiri dari Selat Malaka dan Samudera Hindia. Pada Selat Malaka terdapat keanekaragaman hayati mangrove, burung-burung air yang bermigrasi, dan lain sebagainya. Selat Malaka berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai jalur pelayaran internasional, pariwisata, dan hasil laut, tetapi juga rawan terkena pencemaran oleh kegiatan domestik, pertanian/perkebunan, dan industri. Sedangkan, Samudera Hindia merupakan habitat bagi hiu mulut lebar, dugong, penyu hijau, dan hewan dilindungi lainnya. Samudera ini memiliki potensi pemanfaatan ikan laut dalam, migas, dan pariwisata, tetapi juga rawan terkena bencana gempa dan tsunami serta dapat terdampak pencemaran dari kegiatan domestik, pelabuhan, pertanian/perkebunan, dan industri.

Tabel 2.12.
Karakteristik Bentang Alam (KBA) dan Luasannya di Aceh

Karakteristik Bentang Alam	Luas (Ha)	Persentase (%)
Danau	15.853,09	0,28%
Dataran fluvial bermaterial aluvium	630.864,89	11,10%
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	210,05	0,00%
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	65.523,77	1,15%
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	1.904,19	0,03%
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	204.280,59	3,59%
Dataran organik bermaterial gambut	5.537,79	0,10%
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	115.413,49	2,03%
Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam	656,75	0,01%
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	21.602,37	0,38%
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	103.813,02	1,83%
Lembah sungai bermaterial aluvium	159.094,35	2,80%
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik	68.579,45	1,21%
Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	8.982,56	0,16%
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	23.886,37	0,42%
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	362.450,87	6,38%
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	3.276,61	0,06%
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	154.487,61	2,72%
Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	78.497,10	1,38%

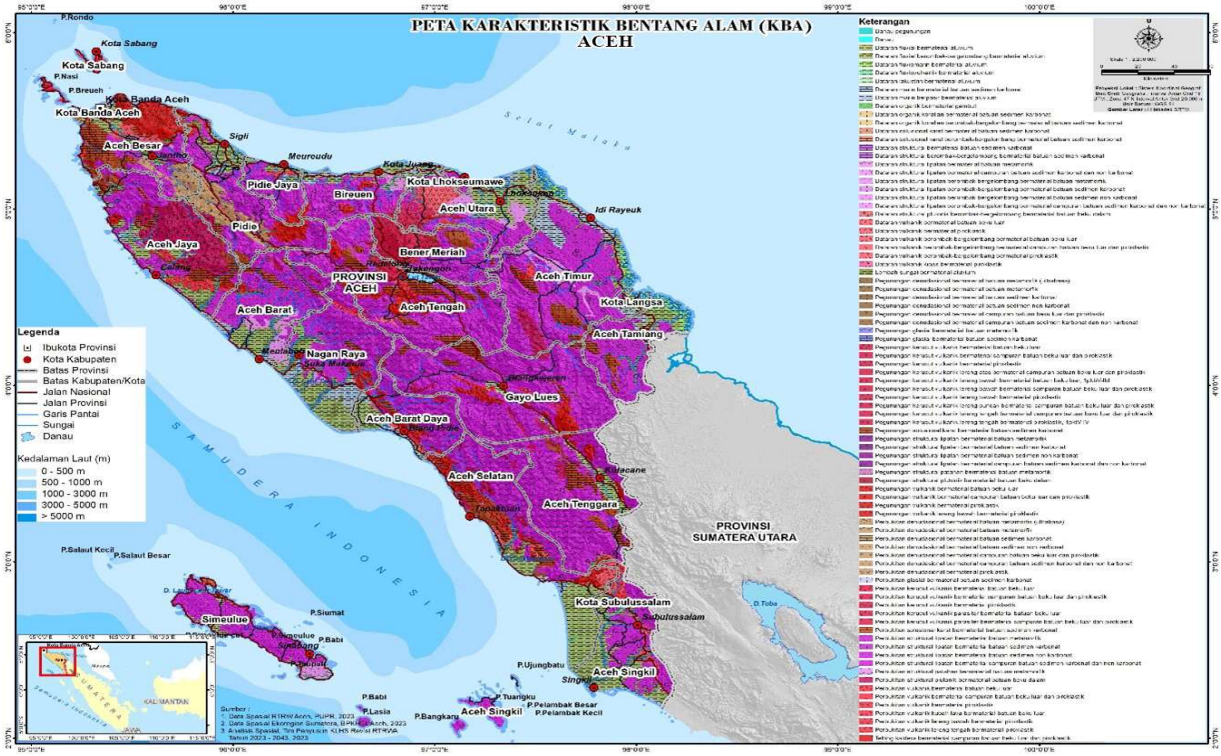
Karakteristik Bentang Alam	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik	66.482,45	1,17%
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	96.833,81	1,70%
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	379,22	0,01%
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	14.800,15	0,26%
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	24.789,77	0,44%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	1.093.113,59	19,23%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	213.677,17	3,76%
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	1.826.299,89	32,13%
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	221.364,61	3,89%
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	68.565,94	1,21%
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	24.767,11	0,44%
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik	7.451,00	0,13%
Total Luas (Ha)	**5.683.439,61**	**100,00%**

Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

Berdasarkan tabel di atas, Aceh didominasi oleh 3 (tiga) karakteristik bentang alam yaitu:

1. **Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat,** yaitu bentuk lahan dengan relief perbukitan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas material campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat, seperti batu gamping (*limestones*), napal (*marls*), batupasir (*sandstones*), batu lempung (*claystones*), breksi (*breccia*), konglomerat (*conglomerate*), atau yang lainnya. Perbukitan terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi lipatan pada batuan. Pola struktur lipatan ini di antaranya dicirikan oleh antiklin (*hogback and cuesta*) dan sinklin (*subsequent valley*).Perbukitan struktural lipatan ini memiliki fungsi lahan sebagai penyedia air permukaan (mata air, sungai kecil), sebagai daerah tangkapan hujan, dan sebagai tempat wisata alam. Jenis bentang alam ini memiliki luas 1.826.299,89 Ha atau sekitar 32,13% dari total luas wilayah daratan Aceh.
2. **Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik,** yaitu bentuk lahan dengan relief pegunungan yang memiliki kemiringan lereng agak miring hingga sangat miring, tersusun atas batuan metamorf, seperti sekiss, gneiss, batu sabak, lit, atau lainnya. Perbukitan ini terbentuk akibat aktivitas tektonik yang menghasilkan struktur geologi patahan/sesar (fault) pada batuan. Pola-pola struktur patahan ini di antaranya dicirikan oleh kelurusan-kelurusan (lineaments) pada punggungan maupun lembahan, tebing patahan/gawir sesar (fault scarp), atau blok patahan (hanging wall/foot wall). Jenis bentang alam ini memiliki luas 1.093.113,59 Ha atau sekitar 19,23% dari total luas wilayah daratan Aceh.
3. **Dataran fluvial bermaterial aluvium,** yaitu bentuk lahan yang mempunyai relief dataran rata (flat) dengan kemiringan lereng datar hingga landai, tersusun atas material aluvium hasil proses deposisi fluvial (aliran permukaan atau sungai). Dataran

ini memiliki fungsi lingkungan sebagai penyedia air bersih di permukaan yang bersumber dari air tanah dan sungai, lahan yang subur untuk dimanfaatkan pertanian dan perkebunan, serta sebagai pembentuk lapisan tanah baru hasil sedimentasi fluvial. Jenis bentang alam ini memiliki luas 630.864,89 Ha atau sekitar 11,10% dari total luas wilayah daratan Aceh.



Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

Gambar 2.19 Peta Karakteristik Bentang Alam (KBA) Aceh

C5. Karakteristik Vegetasi Alami (KVA)

Vegetasi alami diartikan sebagai vegetasi yang terdapat dalam landskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia (Kuchler, 1967). Vegetasi alami beradaptasi dengan lingkungannya dan karena itu harmonis dengan sifat-sifat lain dari landskap. Vegetasi alami bukan hanya merupakan sebuah komponen dari keanekaragaman hayati yang menyediakan sumber daya alam, tetapi juga mempunyai peran penting dalam berbagai proses alam yang menunjang kehidupan manusia seperti hidrologi dan iklim. Di Aceh terdapat empat jenis vegetasi alami yang dominan, yaitu:

1. Vegetasi hutan pegunungan bawah

   Vegetasi hutan pegunungan bawah adalah vegetasi yang terdapat pada wilayah dengan elevasi 750-2500 mdpl. Vegetasi pada habitat ini berupa hutan lebat dengan tajuk yang tidak rata dengan komposisi floristik yang kaya spesies. Umumnya ukuran batang pohonnya sudah mengecil, demikian juga daunnya. Pada batang pohon biasanya tumbuh melimpah berbagai jenis epifit, tumbuhan memanjat dan lumut pada batang pohon maupun substrat tanah dan batuan di lantai dasar hutan. Vegetasi hutan pegunungan bawah berfungsi sebagai penutup permukaan morfologi pegunungan bawah dengan batuan vulkanik. Komunitas vegetasi ini variasi

spesies pohonnya cukup melimpah, berupa tegakan pohon tinggi ramping bertajuk yangmenghasilkan serasah daun cukup banyak dan bersama lumut yang tumbuh pada lantai dasar hutan membentuk komunitas lantai dasar hutan yang lembab. Pada lantai dasar hutan sering ditemukan semai dab merupakan habitat yang baik bagi mikroorganisme dan satwa perombak tanah. Tumpukan serasah di lantai dasar hutan akan terdekomposisi secara alami menjadi humus bersama dengan lumut yang menyerap air. Lumut yang mati akan berubah menjadi tanah yang kaya hara. Pada saat ada hujan, sebagian besar air permukaan akan diserap dan diikat oleh humus sehingga mengurangi laju derasnya aliran permukaan. Air yang diikat oleh humus dan lumut akan dilepas secara bertahap dan melalui lantai dasar hutan yang berupa batuan vulkanik akan akan turun ke bawah masuk dalam sistem hidrologi permukaan dan bawah tanah sebagai cadangan air. Air yang dilepaskan akan menyebabkan proses kartstifikasi berlangsung dan kondisi lingkungan menjadi relatif lebih lembab dan sejuk.

2. Vegetasi hutan dipterokarpa pamah

   Vegetasi hutan dipterokarpa pamah adalah komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–60 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun sedang sampai lebar dan selalu hijau, pada tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah asosiasinya yang beraneka ragam (kompleks) pada elevasi 0 - 1000 m. Tanah Podsolik Merah Kuning adalah tanah yang telah mengalami pelapukan dan pelindian sangat hebat dan banyak mengandung oksida besi dan aluminium dan umumnya kurang subur. Meskipun demikian secara alami keragaman spesies di ekosistem hutan dipterokarpa ini cukup tinggi, namun dominasi spesies pada komunitas hutan ini adalah kelompok Dipterocarpaceae. Vegetasi hutan dipterokarpa pamah fungsinya sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada di bawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung pada keberadaan hutan dipterokarpa. Berbagai unsur hara tanah juga menjadi terjaga kelestariannya oleh hutan dipterokarpa pamah ini. Tajuk dan perawakan yang cukup besar berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Tajuk pohon mampu untuk menarik uap air menghasilkan tetesan kondensasi karena adanya perbedaan suhu. Pohonnya menghasilkan serasah organik yang cukup banyak, dan bersama dengan bahan organik lain yang mati melalui proses dekomposisi oleh organisme tanah membentuk humus.

3. Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)

   Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada berbagai tipe tanah dengan variasi tingkat kesuburannya pada elevasi 0 - 1000 m. Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok Dipterocarpaceae, umumnya banyak ditemukan bebagai spesies pohon penghasil buah-buahan, penghasil getah dan minyak atsiri, dan penghasil komoditas tanaman perkebunan (kopi, kakao, minyak nabati, serat dll.). Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) fungsinya sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada di bawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung oleh keberadaan hutan pamah (non dipterokarpa) .

Berbagai unsur hara tanah juga menjadi terjaga kelestariannya oleh vegetasi hutan pamah ini. Keragaman spesies hutan pamah dengan tajuk yang beragam bentuknya berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Tajuk pohon yang sangat beragam mampu untuk menarik uap air menghasilkan tetesan kondensasi karena adanya perbedaan suhu. Pohonnya menghasilkan serasah organik yang cukup banyak, dan bersama dengan bahan organik lain yang mati melalui proses dekomposisi oleh organisme tanah membentuk humus.

4. Vegetasi terna tepian sungai payau

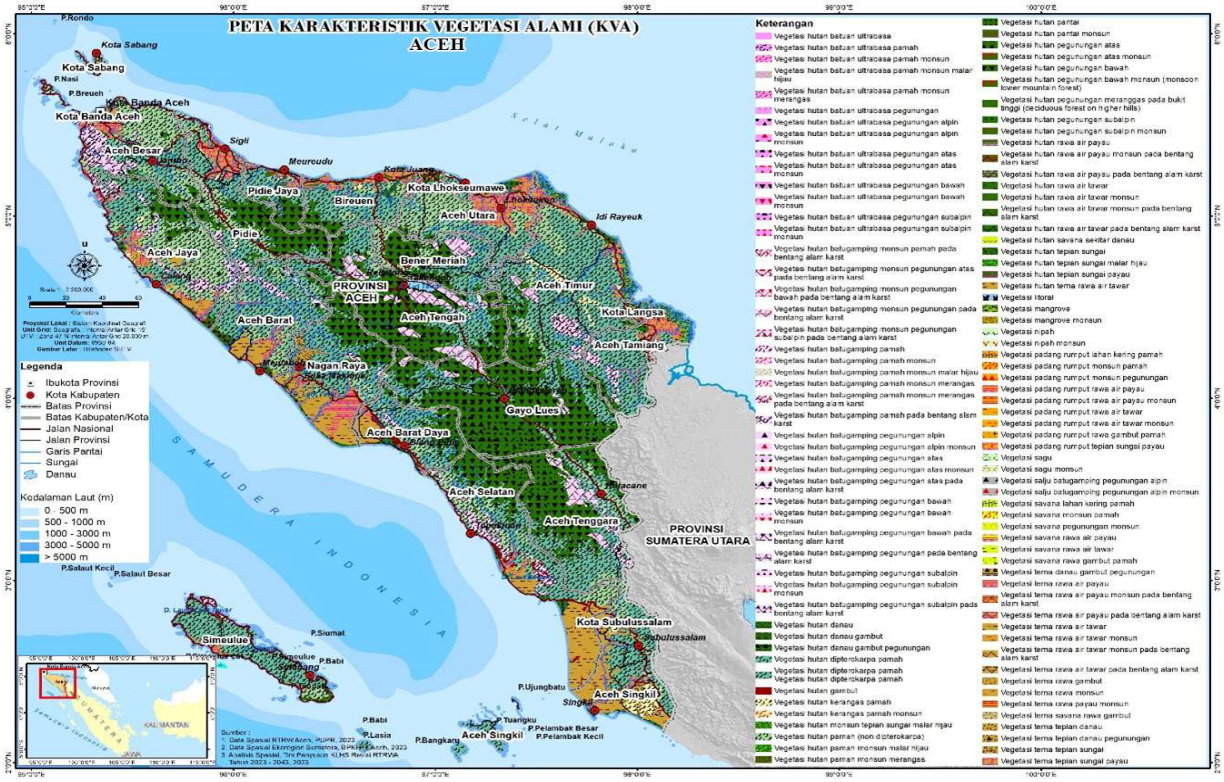
   Vegetasi terna tepian sungai payau definisi operasionalnya adalah kelompok komunitas tumbuhan terna yang tumbuh dan berkembang pada wilayah lahan basah yang terdapat di bantaran sungai atau wilayah di sekitar aliran sungai sehingga sering tergenang, terkena arus pasang surut air laut. Vegetasi terna tepian sungai payau fungsinya sebagai penangkap sedimentasi berupa lumpur, pasir, batu maupun bahan lain yang diakibatkan oleh aliran air permukaan yang dari perbukitan di atasnya maupun yang mengalir pada badan air sungai yang terpengaruh oleh pasang surut laut. Dengan proses ini maka air yang menuju ke hulu sungai sudah tersaring material batuannya sehingga proses sedimentasi pada pinggiran sungai, pendangkalan sungai maupun muara sungai tidak terjadi. Sedimen yang terbawa ini umumnya membawa unsur hara dari bagian hulu, dan membentuk lahan relatif kering yang tidak digenangi air secara permanen membentuk bantaran sungai yang subur. Pada bagian ini umumnya banyak ditumbuhi oleh vegetasi berupa terna dan juga pohon yang selalu hijau di sepanjang tahun. Kombinasi terna dan vegetasi pepohonan yang ukurannya tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang kuat membentuk rajutan akar ini akan memperkuat struktur pinggiran yang berupa tebing sungai menjadi lebih kuat menahan longsornya tanah, terutama saat musim hujan tiba.

Tabel 2.13.
Kawasan Vegetasi Alami (KVA) Aceh

Karakteristik Vegetasi Alami	Luas (Ha)	Persentase
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	245.022,43	4.31
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst	7.724,67	0.14
Vegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst	134.493,55	2.37
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	1.978.309,88	34.81
Vegetasi hutan gambut	32.116,79	0.57
Vegetasi hutan kerangas pamah	68.473,26	1.20
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	815.266,29	14.34
Vegetasi hutan pantai	133.496,46	2.35
Vegetasi hutan pegunungan atas	93.852,34	1.65
Vegetasi hutan pegunungan bawah	1.183.949,16	20.83
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	141.261,27	2.49
Vegetasi hutan rawa air payau	10.641,65	0.19
Vegetasi hutan tepian sungai	11.010,26	0.19
Vegetasi hutan tepian sungai payau	9.583,43	0.17

Karakteristik Vegetasi Alami	Luas (Ha)	Persentase
Vegetasi mangrove	64.436,98	1.13
Vegetasi nipah	1.086,79	0.02
Vegetasi sagu	1.904,19	0.03
Vegetasi terna rawa air payau	63.739,51	1.12
Vegetasi terna rawa air tawar	260.459,95	4.58
Vegetasi terna rawa gambut	32.416,08	0.57
Vegetasi terna tepian danau	9.937,31	0.17
Vegetasi terna tepian danau pegunungan	5.915,79	0.10
Vegetasi terna tepian sungai	23.215,41	0.41
Vegetasi terna tepian sungai payau	355.126,20	6.25
Total Luas (Ha)	**5.683.439,61**	4.31

Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021



Sumber: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

Gambar 2.20 Peta Kawasan Vegetasi Alami (KVA) Aceh

C6. Risiko Dampak

C6.1. Kerawanan Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang perlu diwaspadai karena kerugian yang ditimbulkannya dapat mengganggu perekonomian rakyat secara langsung. Berdasarkan kajian Master Plan Banjir di Aceh Tahun 2022, beberapa wilayah Sungai menunjukkan kerentanan terhadap banjir dan genangan air di setiap wilayah sungai, antara lain:

a. Wilayah Sungai Aceh-Meureudue: Banjir dan banjir bandang di Kecamatan Padang Tiji dan Tangse (DAS Aceh) terjadi akibat deforestasi ilegal yang mengubah hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir, terutama di Kr. Aceh. Genangan air dari meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) mempengaruhi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Beberapa sungai lainnya yang berpotensi banjir adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, serta Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya.
b. Wilayah Sungai Jambo Aye: DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak) menunjukkan potensi risiko banjir dalam WS Jambo Aye.
c. Wilayah Sungai Woyla-Bateue: Banjir seringkali terjadi disebabkan oleh curah hujan tinggi, aliran tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan liar sehingga kapasitas penyerapan air berkurang.
d. Wilayah Sungai Alas-Singkil: Daerah-daerah seperti hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil) sering kali mengalami bencana banjir.
e. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi: Banjir sering kali terjadi pada daerah pertanian dan permukiman akibat curah hujan tinggi serta ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit air yang lewat.
f. Wilayah Sungai Pase-Peusangan : Terdapat beberapa sungai seperti Krueng Keureuto,Krueng Peuto,Krueng Buloh, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krung Peudada, dan Krueng Pase dimana sering kali meluap atau mengalami genagan air.
g. Wilayah Sunga Baru-Kluet : Sering kali terjadi bencana banjor di daerah ini baik itu disebabkan oleh kerusakan DAS maupun tersumbatnya aliran anak-anak sunga akibat adanya pasang surut air laut.
h. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa : Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan kecamatan Peureulak Timur).

Analisis bahaya banjir di Aceh memperlihatkan bahwa risiko banjir berbeda di setiap kabupaten dan kota, dengan dampak yang bisa sangat signifikan terhadap tempat tinggal, infrastruktur, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kabupaten Aceh Barat, memiliki luas daerah dengan risiko banjir rendah sebesar 65.267 hektar (23,45% dari total wilayah), sedang 40.217 hektar (14,45%), dan tinggi 17.625 hektar (6,33%), dengan sebagian besar wilayahnya 155.178 hektar (55,77%) tidak terdampak oleh banjir. Ini mengindikasikan bahwa meski ada area yang berisiko, Aceh Barat memiliki wilayah luas yang aman dari bahaya banjir. Sementara itu, Aceh Barat Daya memiliki area berisiko banjir rendah dengan luas 8.087 hektar (4,29% dari total wilayah), sedang sebesar 9.302 hektar (4,94%), dan tinggi 8.431 hektar (4,48%), namun sebagian besar wilayahnya 162.370 hektar (86,29%) tidak terdampak banjir. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada potensi risiko, masih banyak lahan yang tergolong aman.

Di Kabupaten Aceh Besar, terdapat 34.728 hektar (12,01% dari total wilayah) dengan risiko banjir rendah, sedang 19.305 hektar (6,67%), dan tinggi 5.850 hektar (2,02%), sedangkan wilayah yang tak terdampak adalah 229.265 hektar (79,30%). Ini memperlihatkan bahwa Aceh Besar memiliki area yang cukup signifikan yang aman dari bahaya banjir. Khusus untuk Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, yang berada di wilayah tengah, risiko banjirnya tergolong lebih kecil dibandingkan kabupaten lain. Aceh Tengah memiliki 10.074 hektar (2,25% dari total wilayah) dengan risiko rendah, sedang 5.691 hektar (1,27%), dan tinggi 6.817 hektar (1,53%), sementara sebagian besar wilayahnya 424.260 hektar (95,95%) tidak terdampak. Aceh Tenggara memiliki 20.198 hektar (4,83%) dengan risiko rendah, sedang 10.584 hektar (2,53%), dan tinggi 3.562 hektar (0,85%), dengan area tak terdampak mencapai 383.568 hektar (91,79%).

Dalam konteks kota, Kota Banda Aceh memiliki area dengan risiko banjir rendah sebesar 663 hektar (11,68% dari total wilayah), sedang 2.056 hektar (36,23%), dan tinggi 2.400 hektar (42,27%), tetapi area yang tak terdampak hanya 558 hektar (9,82%). Sementara Kota Langsa memiliki risiko banjir rendah pada 5.018 hektar (22,36%), sedang 4.512 hektar (20,11%), dan tinggi 4.935 hektar (22,00%), dengan wilayah tak terdampak sebesar 7.972 hektar (35,53%). Lebih rinci dapat merujuk pada **Tabel 2.14**.

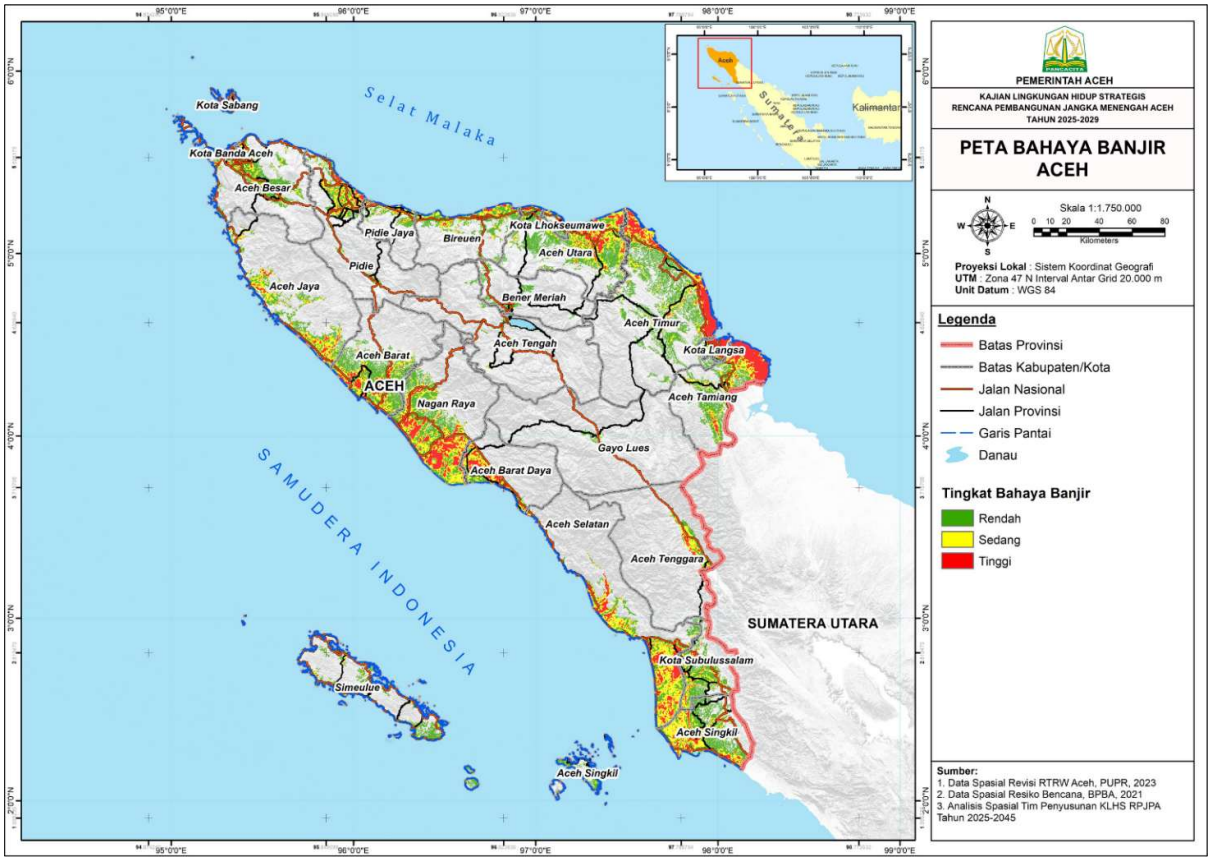
Tabel 2.14.
Bahaya Banjir di Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Banjir				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
A	**Kabupaten**					
1	Aceh Barat	65.267,00	40.217,00	17.625,00	155.178,30	278.287,30
2	Aceh Barat Daya	8.087,00	9.302,00	8.431,00	162.370,24	188.190,24
3	Aceh Besar	34.728,00	19.305,00	5.850,00	229.264,54	289.147,54
4	Aceh Jaya	40.612,00	28.324,00	12.669,00	305.630,25	387.235,25
5	Aceh Selatan	52.085,00	44.315,00	23.439,00	297.728,12	417.567,12
6	Aceh Singkil	48.952,00	30.652,00	18.020,00	87.724,36	185.348,36
7	Aceh Tamiang	44.213,00	28.497,00	27.777,00	118.284,28	218.771,28
8	Aceh Tengah	10.074,00	5.691,00	6.817,00	424.259,74	446.841,74
9	Aceh Tenggara	20.198,00	10.584,00	3.562,00	383.568,32	417.912,32
10	Aceh Timur	64.336,00	46.679,00	38.107,00	391.778,05	540.900,05
11	Aceh Utara	52.941,00	47.735,00	32.267,00	137.582,36	270.525,36
12	Bener Meriah	11.260,00	6.828,00	4.601,00	168.050,93	190.739,93
13	Bireuen	18.123,00	13.272,00	5.379,00	142.925,24	179.699,24
14	Gayo Lues	9.110,00	4.142,00	1.827,00	539.049,46	554.128,46
15	Nagan Raya	67.242,00	46.437,00	30.881,00	207.814,88	352.374,88
16	Pidie	21.213,00	18.940,00	10.985,00	266.614,84	317.752,84
17	Pidie Jaya	9.083,00	7.702,00	4.030,00	73.085,90	93.900,90
18	Simeulue	31.140,00	17.794,00	5.921,00	127.323,59	182.178,59
B	**Kota**					
1	Kota Banda Aceh	663,00	2.056,00	2.400,00	557,96	5.676,96
2	Kota Langsa	5.018,00	4.512,00	4.935,00	7.971,71	22.436,71
3	Kota Lhokseumawe	7.097,00	3.402,00	1.784,00	1.014,37	13.297,37

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Banjir				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
4	Kota Sabang	6.470,00	2.753,00	736,00	2.208,10	12.167,10
5	Kota Subulussalam	31.147,00	13.310,00	2.623,00	71.280,08	118.360,08
Aceh		**659.059,00**	**452.449,00**	**270.666,00**	**4.301.265,61**	**5.683.439,61**

Sumber: BPBA, 2021

Secara keseluruhan, Wilayah Aceh memiliki total 659.059 hektar (11,60% dari total wilayah) dengan risiko banjir rendah, 452.449 hektar (7,96%) dengan risiko sedang, dan 270.666 hektar (4,76%) dengan risiko tinggi. Sebagian besar wilayah Aceh, yaitu 4.301.266 hektar (75,68%), tidak terdampak oleh banjir. Peta rawan banjir di Aceh dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.21 Peta Bahaya Banjir Aceh

Data ini penting untuk perencanaan pengembangan wilayah dan mitigasi bencana. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan area dengan risiko banjir yang tinggi dalam pengembangan infrastruktur dan permukiman serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons bencana untuk mengurangi dampak banjir. Di sisi lain, wilayah yang tidak terdampak banjir dapat dijadikan sebagai area prioritas untuk pengembangan lebih lanjut, tentunya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

C6.2. Banjir Bandang

Analisis ancaman banjir bandang di Aceh memperlihatkan variasi geospasial yang mencerminkan tingkat kerentanan yang berbeda antar kabupaten dan kota. Banjir bandang, yang diakibatkan oleh aliran air dengan volume besar dan kecepatan tinggi yang terjadi secara tiba-tiba, biasanya terjadi di wilayah dengan gradien topografi yang curam dan kondisi hidrologis yang memungkinkan akumulasi cepat aliran permukaan.

Kabupaten Aceh Barat, memiliki area dengan ancaman banjir bandang rendah seluas 572 hektar (0,21% dari total wilayah), sedang seluas 1.838 hektar (0,66%), dan tinggi seluas 13.246 hektar (4,76%). Namun, sebagian besar wilayahnya, yaitu 262.631 hektar (94,37%), dinyatakan tidak terdampak oleh banjir bandang, menandakan adanya wilayah yang lebih resisten terhadap jenis bencana ini. Aceh Barat Daya menonjol dengan tidak adanya catatan wilayah yang terpengaruh oleh ancaman banjir bandang, dengan seluruh 188.190 hektarnya dikategorikan sebagai tidak terdampak. Hal ini menunjukkan karakteristik wilayah yang lebih stabil dan kurang rentan terhadap banjir bandang. Aceh Besar menghadapi ancaman banjir bandang yang tinggi di wilayah seluas 40.714 hektar (14,08% dari total wilayah), yang menandakan perlunya perhatian khusus untuk mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penguatan infrastruktur penahan banjir dan pencegahan erosi.

Kabupaten seperti Aceh Tengah dan Aceh Timur memiliki luasan yang cukup signifikan dalam kategori ancaman tinggi, dengan Aceh Tengah mencatat 23.455 hektar (5,25%) dan Aceh Timur dengan 25.615 hektar (4,74%). Kedua kabupaten ini membutuhkan implementasi kebijakan pengelolaan lahan dan air yang efektif untuk mengurangi kerentanan terhadap banjir bandang. Di wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh dan Kota Langsa juga tercatat memiliki wilayah dengan ancaman tinggi, yaitu 2.824 hektar (49,77%) dan 3.460 hektar (15,42%), menunjukkan pentingnya perbaikan sistem drainase perkotaan dan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan ancaman banjir bandang. Untuk rincinya dapat merujuk pada **Tabel 2.15**.

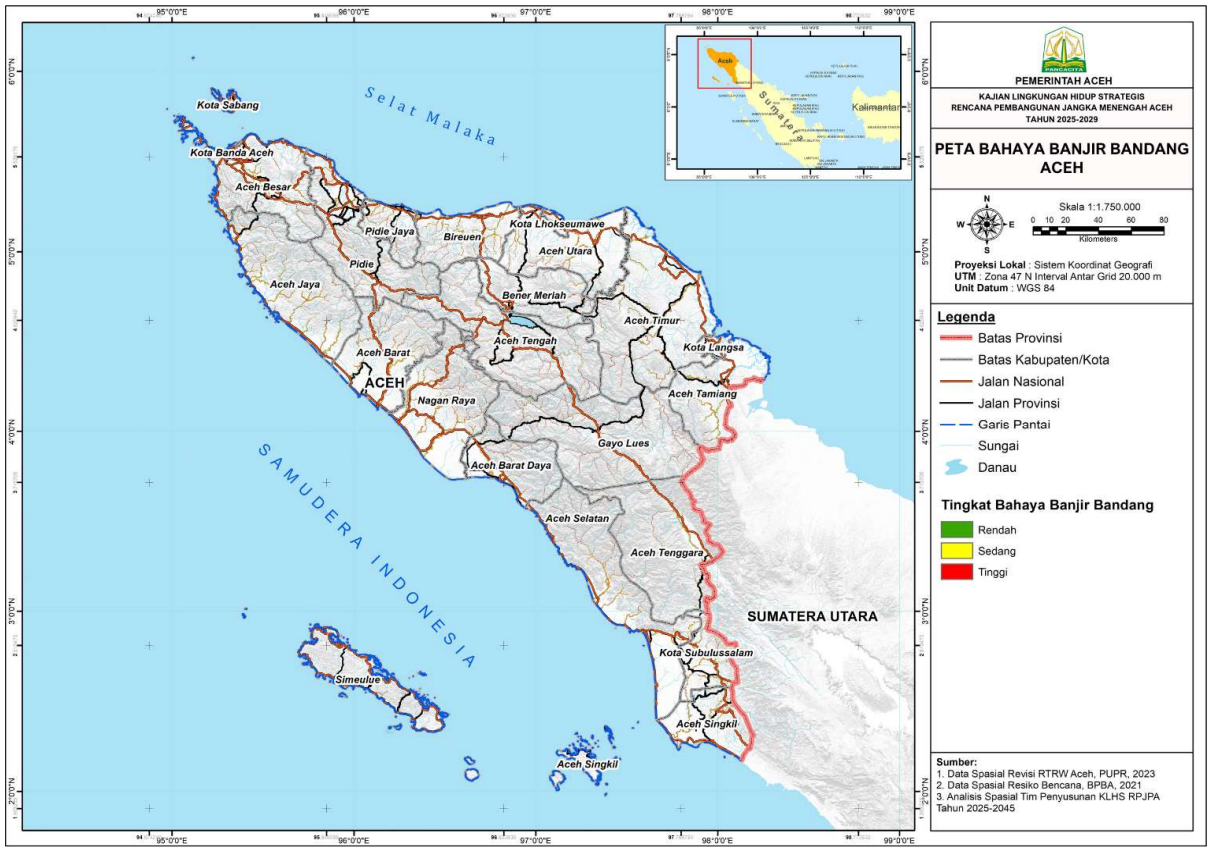
Tabel 2.15.
Bahaya Banjir Bandang Aceh

No	Kabupaten/Kota	Bahaya Banjir Bandang				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
A	Kabupaten					
1	Aceh Barat	572,00	1.838,00	13.246,00	262.631,30	278.287,30
2	Aceh Barat Daya	-	-	-	188.190,24	188.190,24
3	Aceh Besar	1.023,00	4.468,00	40.714,00	242.942,54	289.147,54
4	Aceh Jaya	384,00	1.419,00	8.796,00	376.636,25	387.235,25
5	Aceh Selatan	422,00	1.596,00	11.051,00	404.498,12	417.567,12
6	Aceh Singkil	92,00	236,00	909,00	184.111,36	185.348,36
7	Aceh Tamiang	254,00	903,00	5.431,00	212.183,28	218.771,28
8	Aceh Tengah	216,00	989,00	23.455,00	422.181,74	446.841,74
9	Aceh Tenggara	160,00	600,00	3.065,00	414.087,32	417.912,32
10	Aceh Timur	874,00	3.558,00	25.615,00	510.853,05	540.900,05
11	Aceh Utara	545,00	1.830,00	8.808,00	259.342,36	270.525,36
12	Bener Meriah	123,00	683,00	9.716,00	180.217,93	190.739,93
13	Bireuen	353,00	1.475,00	30.667,00	147.204,24	179.699,24

No	Kabupaten/Kota	Bahaya Banjir Bandang				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
14	Gayo Lues	9,00	82,00	3.965,00	550.072,46	554.128,46
15	Nagan Raya	256,00	867,00	2.736,00	348.515,88	352.374,88
16	Pidie	654,00	2.825,00	28.560,00	285.713,84	317.752,84
17	Pidie Jaya	2,00	19,00	74,00	93.805,90	93.900,90
18	Simeulue	89,00	556,00	7.004,00	174.529,59	182.178,59
B	**Kota**					
1	Kota Banda Aceh	785,00	860,00	2.824,00	1.207,96	5.676,96
2	Kota Langsa	297,00	719,00	3.460,00	17.960,71	22.436,71
3	Kota Lhokseumawe	-	-	-	13.297,37	13.297,37
4	Kota Sabang	-	-	-	12.167,10	12.167,10
5	Kota Subulussalam	-	-	-	118.360,08	118.360,08
Aceh		**7.110,00**	**25.523,00**	**230.096,00**	**5.420.710,61**	**5.683.439,61**

Sumber: BPBA, 2021

Keseluruhan data mencatat bahwa wilayah Aceh memiliki total 7.110 hektar (0,13%) dengan ancaman rendah, 25.523 hektar (0,45%) dengan ancaman sedang, dan 230.096 hektar (4,05%) dengan ancaman tinggi, sementara 5.420.711 hektar (95,38%) tidak terdampak. Pendekatan terintegrasi antara perencanaan ruang, manajemen sumber daya alam, dan penguatan komunitas diperlukan untuk menghadapi ancaman banjir bandang. Langkah-langkah seperti konstruksi bendungan penahan (check dam), konservasi vegetasi riparian, dan pengembangan sistem peringatan dini penting untuk dikembangkan guna mengurangi dampak bencana banjir bandang di Aceh.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.22 Peta Bahaya Banjir Bandang Aceh

C6.3. Longsor

Analisis ancaman tanah longsor di Aceh memiliki kerentanan yang beragam terhadap fenomena ini, yang sering kali dikaitkan dengan curah hujan yang tinggi, topografi, serta kondisi geologis dan vegetasi yang mempengaruhi stabilitas lereng. Dalam konteks kerentanan terhadap tanah longsor, Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang paling terpengaruh dengan 270.134 hektar (60,45% dari total wilayah) berada pada ancaman sedang dan 105.661 hektar (23,64%) pada ancaman tinggi, menyisakan hanya 65.506 hektar (14,66%) yang tidak terdampak. Ini menegaskan pentingnya intervensi konservasi tanah dan pengelolaan lereng yang efektif dalam perencanaan tata ruang daerah. Aceh Tenggara juga mencatat ancaman yang signifikan dengan 202.198 hektar (48,38% dari total wilayah) pada ancaman sedang dan 145.290 hektar (34,77%) pada ancaman tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap tanah longsor.

Di sisi lain, Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki luasan yang luas yang tercatat dalam kategori ancaman tinggi dengan 64.231 hektar (34,13% dari total wilayah), sementara 66.866 hektar (35,55%) berada pada ancaman sedang, menandakan bahwa topografi dan kondisi geologis daerah tersebut menyebabkan kerentanan yang lebih besar terhadap tanah longsor. Kabupaten Gayo Lues mencatat luasan terbesar dalam kategori ancaman tinggi dengan 292.359 hektar (52,74% dari total wilayah) dan 190.016 hektar (34,28%) pada ancaman sedang, yang mengindikasikan bahwa daerah ini membutuhkan pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang sangat hati-hati untuk mencegah kerusakan akibat tanah longsor.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Subulussalam mencatat 13.235 hektar (11,18% dari total wilayah) pada ancaman sedang dan 2.808 hektar (2,37%) pada ancaman tinggi, sementara Kota Sabang memiliki 3.392 hektar (27,87%) pada ancaman sedang dan 1.295 hektar (10,64%) pada ancaman tinggi. Data ini menunjukkan bahwa bahkan area perkotaan tidak terlepas dari ancaman tanah longsor, memerlukan upaya pengurangan risiko yang termasuk dalam perencanaan perkotaan.

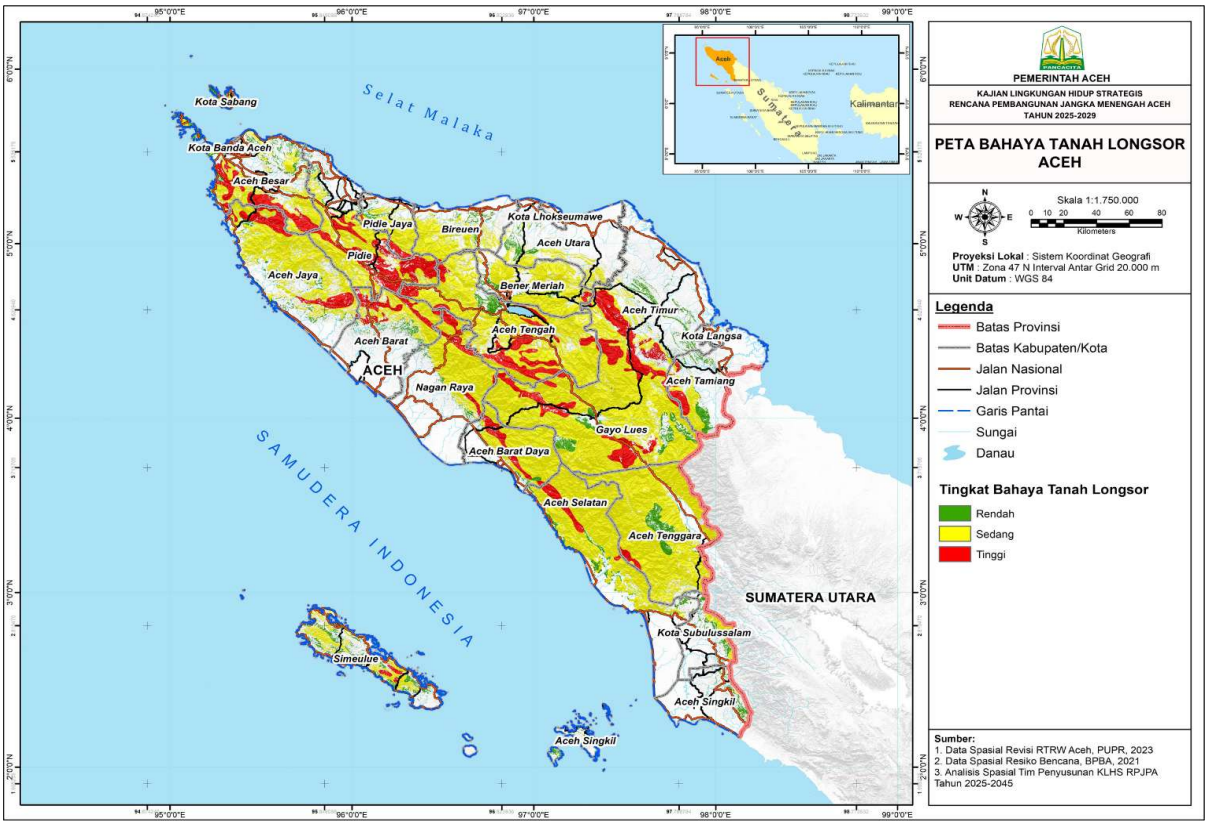
Tabel 2.16.
Bahaya Tanah Longsor Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Tanah Longsor				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
A	Kabupaten					
1	Aceh Barat	4.592,00	69.242,00	13.198,00	191.255,30	278.287,30
2	Aceh Barat Daya	3.061,00	66.866,00	64.231,00	54.032,24	188.190,24
3	Aceh Besar	12.076,00	99.800,00	35.149,00	142.122,54	289.147,54
4	Aceh Jaya	4.777,00	165.451,00	44.841,00	172.166,25	387.235,25
5	Aceh Selatan	11.632,00	130.170,00	116.576,00	159.189,12	417.567,12
6	Aceh Singkil	7.475,00	2.536,00	258,00	175.079,36	185.348,36
7	Aceh Tamiang	9.101,00	26.670,00	17.656,00	165.344,28	218.771,28
8	Aceh Tengah	5.541,00	270.134,00	105.661,00	65.505,74	446.841,74
9	Aceh Tenggara	20.079,00	202.198,00	145.290,00	50.345,32	417.912,32
10	Aceh Timur	11.997,00	112.927,00	54.012,00	361.964,05	540.900,05
11	Aceh Utara	8.146,00	30.070,00	1.667,00	230.642,36	270.525,36

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Tanah Longsor				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
12	Bener Meriah	11.100,00	81.043,00	39.233,00	59.363,93	190.739,93
13	Bireuen	3.152,00	54.977,00	13.518,00	108.052,24	179.699,24
14	Gayo Lues	24.614,00	292.359,00	190.016,00	47.139,46	554.128,46
15	Nagan Raya	3.559,00	91.818,00	43.513,00	213.484,88	352.374,88
16	Pidie	3.416,00	157.204,00	38.835,00	118.297,84	317.752,84
17	Pidie Jaya	3.319,00	43.360,00	13.265,00	33.956,90	93.900,90
18	Simeulue	18.831,00	37.355,00	777,00	125.215,59	182.178,59
B	**Kota**					
1	Kota Banda Aceh	-	-	-	5.676,96	5.676,96
2	Kota Langsa	51,00	-	-	22.385,71	22.436,71
3	Kota Lhokseumawe	5,00	81,00	-	13.211,37	13.297,37
4	Kota Sabang	2.628,00	3.392,00	1.295,00	4.852,10	12.167,10
5	Kota Subulussalam	7.693,00	13.235,00	2.808,00	94.624,08	118.360,08
Aceh		**176.845,00**	**1.950.888,00**	**941.799,00**	**2.613.907,61**	**5.683.439,61**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021

Data ini menunjukkan pentingnya upaya penguatan mitigasi dan adaptasi dalam pengelolaan risiko bencana tanah longsor. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal, pengembangan sistem peringatan dini, serta pengelolaan lahan dan vegetasi menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dengan tata kelola lingkungan hidup. Upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana, menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem, serta melindungi masyarakat dan infrastruktur dari risiko kerentanan lingkungan.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.23 Peta Bahaya Longsor Aceh

C6.4. Kekeringan

Analisis distribusi ancaman kekeringan di Aceh memperlihatkan variasi kondisi antarwilayah, yang mencerminkan keragaman karakteristik hidrologis dan geografis daerah. Kabupaten Aceh Besar, misalnya, memiliki proporsi terbesar wilayah pada kategori ancaman rendah dengan luas 180.296 hektar (62,32% dari total wilayah), diikuti dengan ancaman sedang sebesar 107.662 hektar (37,22%) dan ancaman tinggi hanya 997 hektar (0,34%). Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Aceh Besar memiliki kondisi yang relatif mendukung dalam ketersediaan air.

Kabupaten Aceh Jaya memiliki luasan wilayah dengan ancaman rendah sebesar 192.563 hektar (49,73%) dan ancaman sedang 163.087 hektar (42,09%), yang mencerminkan dominasi kategori rendah dan sedang dalam distribusi wilayahnya. Sementara itu, Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan luasan signifikan pada kategori ancaman tinggi, yaitu 303.773 hektar (72,68%), menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat potensi terdampak kekeringan yang luas. Kabupaten Aceh Timur juga memiliki luasan besar pada kategori ancaman tinggi dengan 264.794 hektar (48,97%).

Di wilayah perkotaan, Kota Subulussalam didominasi oleh ancaman rendah seluas 70.685 hektar (59,74%) dan ancaman sedang 35.640 hektar (30,12%), menggambarkan keseimbangan distribusi wilayah dengan risiko rendah hingga sedang.

Secara keseluruhan, wilayah Aceh memiliki distribusi ancaman kekeringan dengan kategori rendah seluas 2.212.319 hektar (38,92%), kategori sedang 1.806.104 hektar (31,76%), dan kategori tinggi 1.663.157 hektar (29,26%). Adapun wilayah yang tidak terdampak kekeringan tercatat seluas 1.860 hektar (0,03%). Data ini menggambarkan peta spasial yang komprehensif mengenai kondisi kekeringan di Aceh, sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap potensi variasi ketersediaan sumber daya air antarwilayah. Rincinya silahkan merujuk pada **Tabel 2.17**.

Tabel 2.17.
Bahaya Kekeringan Aceh

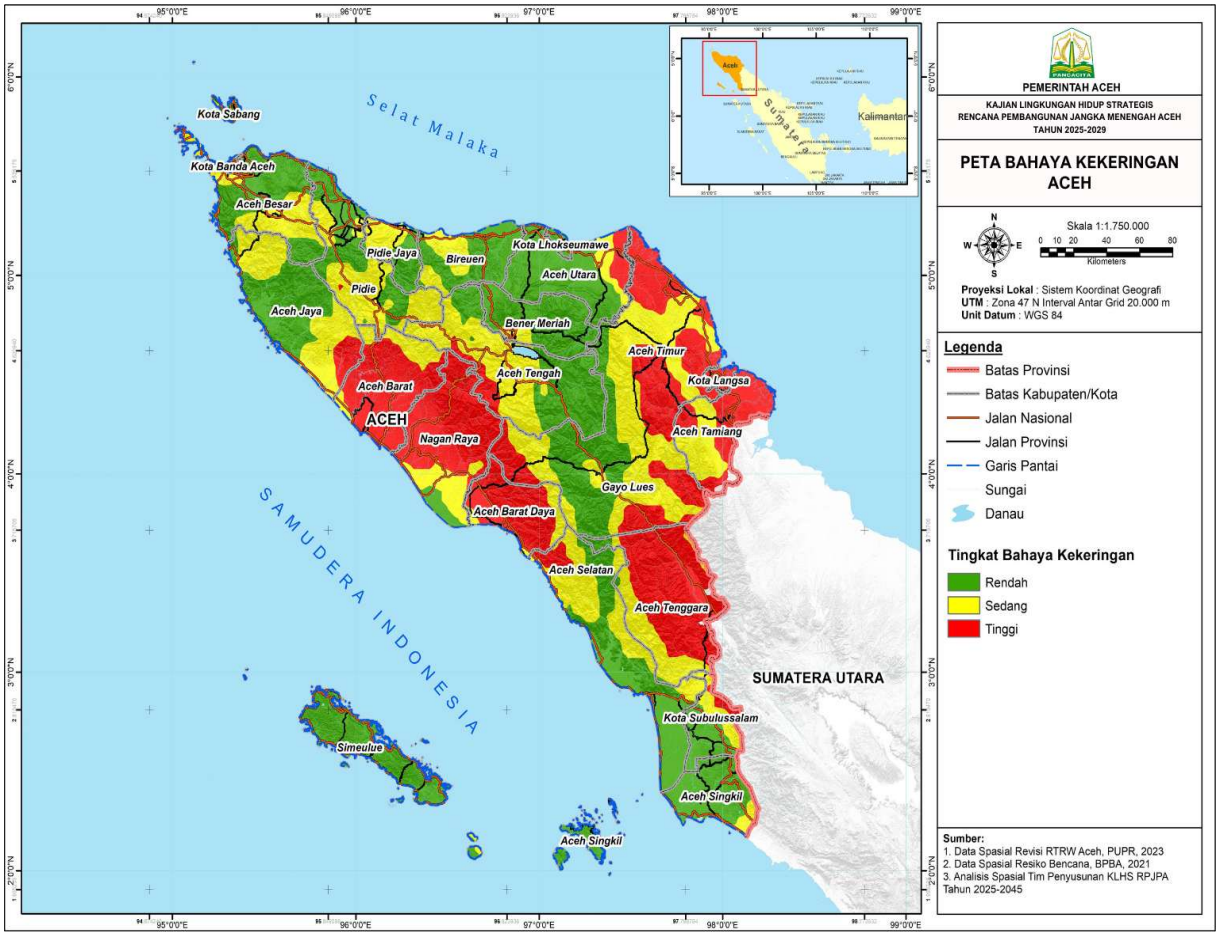
No	Kabupaten/Kota	Bahaya Kekeringan Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
A	Kabupaten					
1	Aceh Barat	-	54.061,92	224.005,27	220,12	278.287,30
2	Aceh Barat Daya	104,20	28.778,11	159.149,80	158,13	188.190,24
3	Aceh Besar	180.296,06	107.661,63	997,31	192,54	289.147,54
4	Aceh Jaya	192.562,55	163.086,78	31.328,90	257,02	387.235,25
5	Aceh Selatan	234.741,92	158.351,39	24.458,26	15,54	417.567,12
6	Aceh Singkil	170.008,88	15.202,33	-	137,15	185.348,36
7	Aceh Tamiang	-	78.599,88	140.066,52	104,88	218.771,28
8	Aceh Tengah	192.340,11	218.152,46	36.294,73	54,44	446.841,74
9	Aceh Tenggara	14.539,38	99.485,42	303.772,69	114,83	417.912,32
10	Aceh Timur	47.395,91	228.592,60	264.794,30	117,24	540.900,05
11	Aceh Utara	207.596,05	30.350,22	32.372,08	207,01	270.525,36
12	Bener Meriah	173.261,53	17.457,02	-	21,38	190.739,93

No	Kabupaten/Kota	Bahaya Kekeringan				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
13	Bireuen	122.701,29	56.945,72	-	52,23	179.699,24
14	Gayo Lues	195.233,83	213.273,45	145.592,89	28,29	554.128,46
15	Nagan Raya	22.863,16	64.474,27	265.000,26	37,19	352.374,88
16	Pidie	135.560,87	181.296,11	885,30	10,55	317.752,84
17	Pidie Jaya	47.719,76	46.130,23	-	50,90	93.900,90
18	Simeulue	179.553,93	2.608,85	-	15,81	182.178,59
B	**Kota**					
1	Banda Aceh	669,65	5.007,31	-	-	5.676,96
2	Langsa	-	-	22.425,88	10,83	22.436,71
3	Lhokseumawe	13.297,37	-	-	-	13.297,37
4	Sabang	11.187,68	948,63	30,79	-	12.167,10
5	Subulussalam	70.684,53	35.640,03	11.982,06	53,46	118.360,08
Aceh		**2.212.318,65**	**1.806.104,38**	**1.663.157,04**	**1.859,54**	**5.683.439,61**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021

Isu kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya. Untuk jelasnya dapat dilihat *Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021*

Gambar 2.24.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.24 Peta Bahaya Kekeringan Aceh

C6.5. Likuifaksi

Analisis bahaya likuifaksi di Aceh memberikan gambaran spasial mengenai potensi kerentanan wilayah terhadap fenomena geologi yang dapat terjadi akibat guncangan gempa bumi pada tanah jenuh air. Kabupaten Aceh Tamiang misalnya, memiliki distribusi wilayah pada kategori ancaman rendah seluas 26.921 hektar (12,31% dari total wilayah) dan kategori ancaman sedang 41.964 hektar (19,21%), sementara tidak terdapat luasan pada kategori ancaman tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya relatif stabil dalam konteks kerentanan likuifaksi.

Kabupaten Aceh Utara memiliki luasan signifikan pada kategori ancaman sedang seluas 101.633 hektar (37,57%) serta kategori ancaman tinggi 1.095 hektar (0,40%). Kabupaten Aceh Timur memperlihatkan luasan pada kategori ancaman rendah sebesar 15.587 hektar (2,88%), kategori sedang 65.392 hektar (12,09%), dan kategori tinggi 1.677 hektar (0,31%), sementara sebagian besar wilayahnya, yaitu 458.244 hektar (84,72%), tidak terdampak. Di wilayah perkotaan, Kota Langsa memiliki area dengan ancaman rendah 9.352 hektar (41,68%) dan ancaman sedang 4.839 hektar (21,57%). Adapun Kota Lhokseumawe mencatat dominasi ancaman sedang seluas 12.342 hektar (92,82%) dan ancaman tinggi 545 hektar (4,10%).

Secara agregat, Aceh memiliki wilayah berpotensi likuifaksi pada kategori rendah seluas 51.860 hektar (0,91%), kategori sedang 836.105 hektar (14,71%), dan kategori tinggi 41.555 hektar (0,73%), sementara wilayah yang tidak terdampak tercatat mencapai 4.753.920 hektar (83,65%). Sebaran kawasan rawan likuifaksi mencakup berbagai kabupaten/kota di Aceh, antara lain Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.

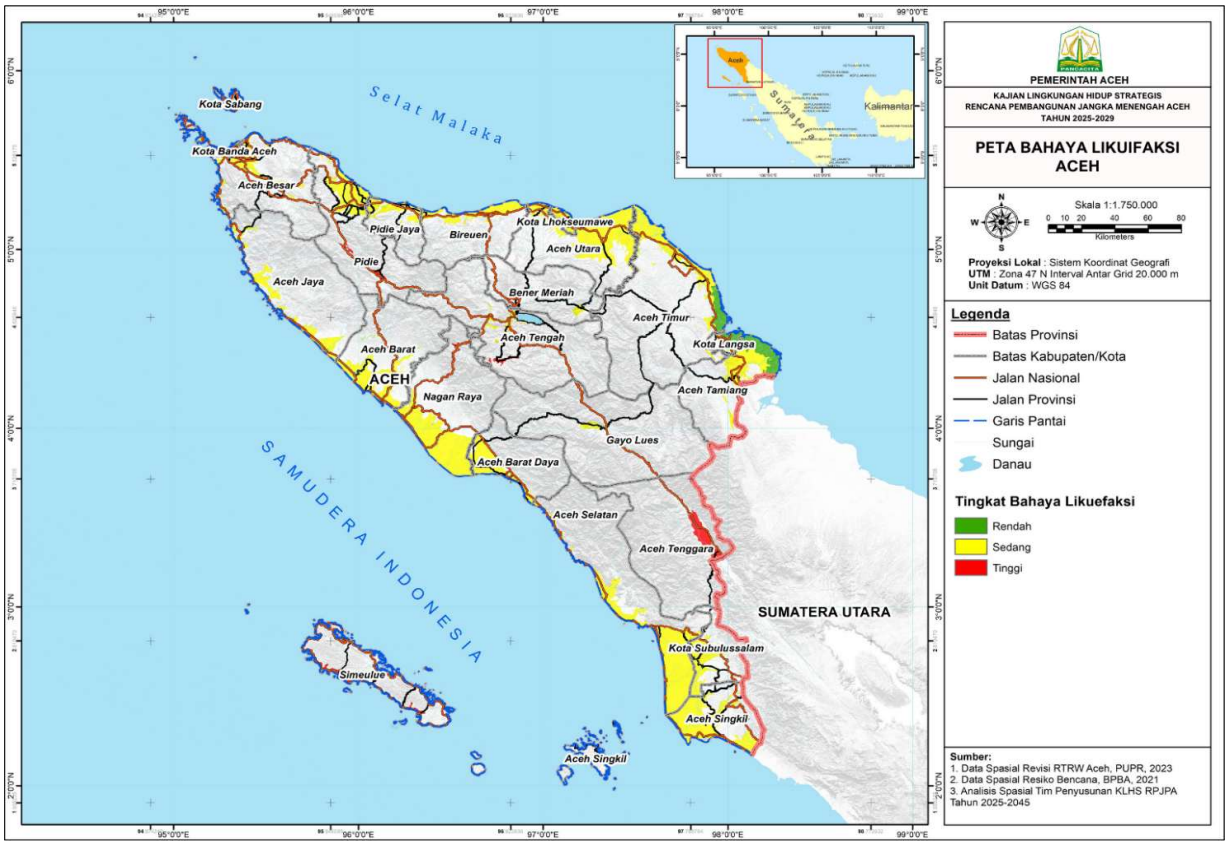
Informasi spasial ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, pengelolaan tata ruang, serta penguatan sistem mitigasi bencana berbasis kawasan, sehingga pembangunan yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keselamatan masyarakat **Tabel 2.18**.

Tabel 2.18.
Bahaya Likuifaksi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Likuefaksi				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
A	**Kabupaten**					
1	Aceh Barat	-	52.537,00	938,00	224.812,30	278.287,30
2	Aceh Barat Daya	-	39.481,00	748,00	147.961,24	188.190,24

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Likuefaksi				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
3	Aceh Besar	-	32.006,00	1.501,00	255.640,54	289.147,54
4	Aceh Jaya	-	38.494,00	1.662,00	347.079,25	387.235,25
5	Aceh Selatan	-	115.045,00	2.414,00	300.108,12	417.567,12
6	Aceh Singkil	-	70.921,00	1.103,00	113.324,36	185.348,36
7	Aceh Tamiang	26.921,00	41.964,00	-	149.886,28	218.771,28
8	Aceh Tengah	-	10.774,00	2.671,00	433.396,74	446.841,74
9	Aceh Tenggara	-	-	18.270,00	399.642,32	417.912,32
10	Aceh Timur	15.587,00	65.392,00	1.677,00	458.244,05	540.900,05
11	Aceh Utara	-	101.633,00	1.095,00	167.797,36	270.525,36
12	Bener Meriah	-	3.605,00	-	187.134,93	190.739,93
13	Bireuen	-	30.995,00	1.281,00	147.423,24	179.699,24
14	Gayo Lues	-	4.745,00	-	549.383,46	554.128,46
15	Nagan Raya	-	94.707,00	1.380,00	256.287,88	352.374,88
16	Pidie	-	45.836,00	5.028,00	266.888,84	317.752,84
17	Pidie Jaya	-	22.462,00	517,00	70.921,90	93.900,90
18	Simeulue	-	9.599,00	496,00	172.083,59	182.178,59
B	**Kota**					
1	Banda Aceh	-	5.259,00	229,00	188,96	5.676,96
2	Langsa	9.352,00	4.839,00	-	8.245,71	22.436,71
3	Lhokseumawe	-	12.342,00	545,00	410,37	13.297,37
4	Sabang	-	-	-	12.167,10	12.167,10
5	Subulussalam	-	33.469,00	-	84.891,08	118.360,08
Aceh		**51.860,00**	**836.105,00**	**41.555,00**	**4.753.919,61**	**5.683.439,61**

Sumber : Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021



Sumber: Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.25 Bahaya Likuifaksi Aceh

C6.6. Gempa bumi

Isu kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII - XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh. Sedangkan kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kata Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya.

Dalam evaluasi risiko seismik di Aceh, kita memahami bahwa wilayah ini termasuk salah satu daerah dengan aktivitas tektonik yang tinggi di Indonesia, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik dan bisa menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur serta membahayakan kehidupan masyarakat.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luasan yang besar dalam kategori risiko rendah untuk gempa bumi sebesar 328.749 hektar (73,59% dari total wilayah). Meskipun demikian, terdapat juga wilayah dengan risiko sedang dan tinggi yang luasnya masing-masing adalah 100.788 hektar (22,55%) dan 17.305 hektar (3,87%), menandakan bahwa struktur bangunan dan infrastruktur di wilayah ini perlu didesain untuk tahan gempa. Aceh Timur mencatat luasan risiko rendah yang sangat besar, yaitu 507.690 hektar (93,86%), dengan wilayah risiko sedang yang lebih kecil, sebesar 32.976 hektar (6,10%).

Hal ini memberikan indikasi bahwa meski wilayah ini memiliki risiko rendah, masih ada perlunya perhatian terhadap risiko sedang dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.

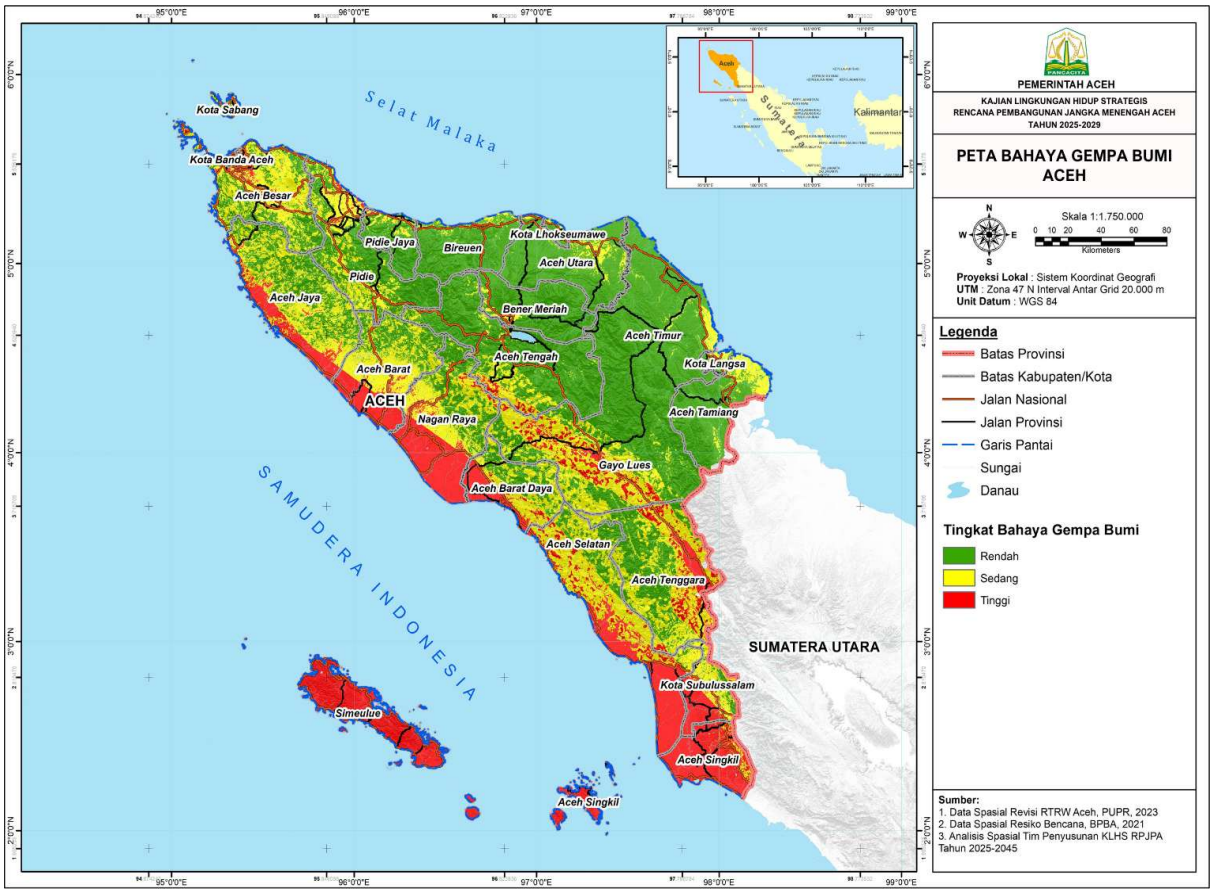
Pada sisi lain, Aceh Selatan mencatat luasan yang signifikan dalam kategori risiko tinggi sebesar 187.207 hektar (44,83%), yang mengharuskan adanya perencanaan yang matang dalam pengurangan risiko bencana serta sistem peringatan dini yang efektif untuk menghadapi potensi gempa bumi. Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan keunikan dengan hampir seluruh wilayahnya, yaitu 176.985 hektar (95,48%), tercatat berada pada risiko tinggi. Ini mengindikasikan bahwa Aceh Singkil berada pada zona yang sangat berisiko dan membutuhkan perhatian khusus dalam aspek keselamatan dan kesiapsiagaan bencana.

Di wilayah perkotaan, Kota Subulussalam juga memiliki area risiko tinggi yang luas, sebesar 55.803 hektar (47,15%), yang menuntut adanya langkah-langkah khusus dalam perencanaan urban untuk memitigasi dampak potensial dari gempa bumi.

Tabel 2.19.
Bahaya Gempa Bumi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Gempa Bumi				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
A	**Kabupaten**					
1	Aceh Barat	39.246,01	157.901,88	81.139,41	-	278.287,30
2	Aceh Barat Daya	36.601,99	92.571,50	59.016,75	-	188.190,24
3	Aceh Besar	47.430,24	208.548,31	33.168,99	-	289.147,54
4	Aceh Jaya	65.355,43	240.409,97	81.469,85	-	387.235,25
5	Aceh Selatan	37.159,40	193.169,42	187.207,23	31,07	417.567,12
6	Aceh Singkil	209,11	7.880,00	176.984,94	274,30	185.348,36
7	Aceh Tamiang	157.150,46	61.411,06	-	209,76	218.771,28
8	Aceh Tengah	328.748,99	100.788,14	17.304,62	-	446.841,74
9	Aceh Tenggara	109.169,06	220.088,03	88.425,58	229,65	417.912,32
10	Aceh Timur	507.689,55	32.976,02	-	234,48	540.900,05
11	Aceh Utara	212.433,99	58.091,37	-	-	270.525,36
12	Bener Meriah	173.023,17	17.707,82	8,94	-	190.739,93
13	Bireuen	155.273,66	24.425,58	-	-	179.699,24
14	Gayo Lues	229.212,18	247.020,20	77.896,07		554.128,46
15	Nagan Raya	61.409,37	145.534,23	145.431,28		352.374,88
16	Pidie	142.052,17	164.579,59	11.121,08		317.752,84
17	Pidie Jaya	68.237,01	24.295,43	1.368,47		93.900,90
18	Simeulue	-	-	182.178,59		182.178,59
B	**Kota**					
1	Banda Aceh	-	205,48	5.471,48	-	5.676,96
2	Langsa	9.877,27	12.548,61	-	10,83	22.436,71
3	Lhokseumawe	8.699,01	4.598,36	-	-	13.297,37
4	Sabang	694,78	11.187,83	284,49	-	12.167,10
5	Subulussalam	8.344,78	54.158,89	55.802,94	53,47	118.360,08
Aceh		**2.398.017,61**	**2.080.097,72**	**1.204.280,73**	**1.043,55**	**5.683.439,61**

Sumber : Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021



Sumber: *Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021*

Gambar 2.26. Peta Bahaya Gempa Bumi Aceh

Dengan total luasan wilayah 2.398.018 hektar (42,19%) yang berada pada kategori risiko rendah, 2.080.098 hektar (36,58%) pada kategori risiko sedang, serta 1.204.281 hektar (21,19%) pada kategori risiko tinggi, dan 1.044 hektar (0,02%) yang tidak terdampak, kondisi ini menggambarkan pentingnya penataan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Upaya yang dilakukan diarahkan pada peningkatan standar pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berketahanan gempa, penguatan kapasitas komunitas lokal melalui edukasi dan kesiapsiagaan, serta integrasi sistem peringatan dini sebagai bagian dari tata kelola risiko bencana yang adaptif. Pendekatan ini menjadi landasan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh sekaligus memastikan keselamatan jiwa dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di masa depan.

C6.7. Tsunami

Analisis ancaman tsunami di Aceh menunjukkan variasi tingkat risiko di sejumlah wilayah pesisir, yang menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Kabupaten Aceh Barat memiliki area dengan tingkat ancaman rendah seluas 1.210 hektar (0,43%), sedang seluas 856 hektar (0,31%), dan tinggi seluas 4.673 hektar (1,68%), sementara sebagian besar wilayahnya, yaitu 271.548 hektar (97,58%), berada pada kondisi terlindungi. Demikian pula Kabupaten Aceh Besar, yang memiliki garis

pantai panjang, mencatat luasan ancaman rendah sebesar 802 hektar (0,28%), ancaman sedang 649 hektar (0,22%), dan ancaman tinggi 8.564 hektar (2,96%), dengan mayoritas wilayah mencapai 279.133 hektar (96,54%) berada di luar zona risiko tsunami.

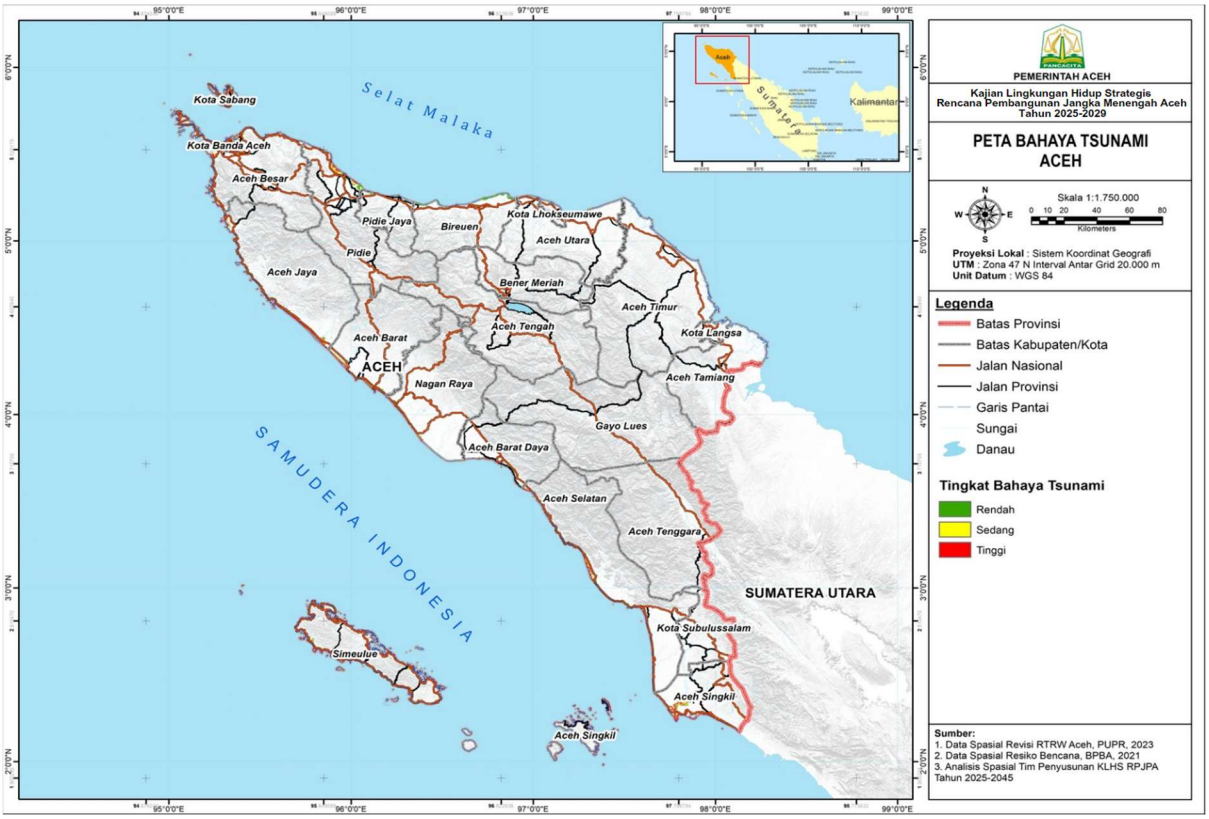
Kota Banda Aceh menunjukkan distribusi yang lebih beragam, dengan area ancaman rendah seluas 330 hektar (5,81%), ancaman sedang 198 hektar (3,49%), dan ancaman tinggi 1.879 hektar (33,09%), sementara wilayah yang tidak terdampak mencapai 3.270 hektar (57,61%). Di sisi lain, Kabupaten Simeulue, yang terletak dekat dengan zona subduksi, mencatat area dengan tingkat ancaman tinggi seluas 20.767 hektar (11,39%).

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pembangunan di Aceh dapat diarahkan dengan mempertimbangkan variasi tingkat risiko tsunami, melalui integrasi strategi tata ruang, penguatan infrastruktur pesisir, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan di Aceh, sekaligus mendukung visi pembangunan yang tangguh dan inklusif di wilayah pesisir maupun kepulauan.Untuk jelasnya dapat merujuk pada **Tabel 2.20**.

Tabel 2.20.
Bahaya Tsunami di Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Tsunami				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
A	**Kabupaten**					
1	Aceh Barat	1.210,00	856,00	4.673,00	271.548,30	278.287,30
2	Aceh Barat Daya	1.256,00	557,00	1.603,00	184.774,24	188.190,24
3	Aceh Besar	802,00	649,00	8.564,00	279.132,54	289.147,54
4	Aceh Jaya	2.000,00	1.258,00	7.667,00	376.310,25	387.235,25
5	Aceh Selatan	1.666,00	1.383,00	4.727,00	409.791,12	417.567,12
6	Aceh Singkil	2.021,00	1.443,00	9.347,00	172.537,36	185.348,36
7	Aceh Tamiang	-	-	-	218.771,28	218.771,28
8	Aceh Tengah	-	-	-	446.841,74	446.841,74
9	Aceh Tenggara	-	-	-	417.912,32	417.912,32
10	Aceh Timur	1,00	-	-	540.899,05	540.900,05
11	Aceh Utara	343,00	-	-	270.182,36	270.525,36
12	Bener Meriah	-	-	-	190.739,93	190.739,93
13	Bireuen	2.105,00	-	-	177.594,24	179.699,24
14	Gayo Lues	-	-	-	554.128,46	554.128,46
15	Nagan Raya	1.140,00	716,00	1.684,00	348.834,88	352.374,88
16	Pidie	1.452,00	980,00	2.937,00	312.383,84	317.752,84
17	Pidie Jaya	416,00	3,00	3,00	93.478,90	93.900,90
18	Simeulue	1.956,00	1.373,00	20.767,00	158.082,59	182.178,59
B	**Kota**					
1	Kota Banda Aceh	330,00	198,00	1.879,00	3.269,96	5.676,96
2	Kota Langsa	-	-	-	22.436,71	22.436,71
3	Kota Lhokseumawe	221,00	-	-	13.076,37	13.297,37
4	Kota Sabang	1,00	9,00	649,00	11.508,10	12.167,10
5	Kota Subulussalam	-	-	-	118.360,08	118.360,08
Aceh		**16.920,00**	**9.425,00**	**64.500,00**	**5.592.594,61**	**5.683.439,61**

Sumber : Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021



Sumber : Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.27 Peta Bahaya Tsunami Aceh

Secara keseluruhan, Aceh memiliki area dengan ancaman rendah seluas 16.920 hektar (0,30%), ancaman sedang seluas 9.425 hektar (0,17%), dan ancaman tinggi seluas 64.500 hektar (1,13%), sedangkan wilayah yang tidak terdampak oleh tsunami sangat luas, mencapai 5.592.595 hektar (98,40%). Data ini menggarisbawahi perlunya pengelolaan risiko bencana yang komprehensif, termasuk pembangunan infrastruktur pencegahan bencana, perencanaan tata ruang yang memperhitungkan ancaman tsunami, serta pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas adaptasi terhadap bencana tsunami.

C6.8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan di Aceh mencerminkan risiko yang bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti kondisi vegetasi, tingkat aksesibilitas, dan praktik pengelolaan lahan. Kebakaran hutan dan lahan bisa dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk aktivitas manusia, kondisi kekeringan, serta dampak perubahan iklim, yang semuanya memiliki pengaruh terhadap frekuensi dan keparahan kebakaran.

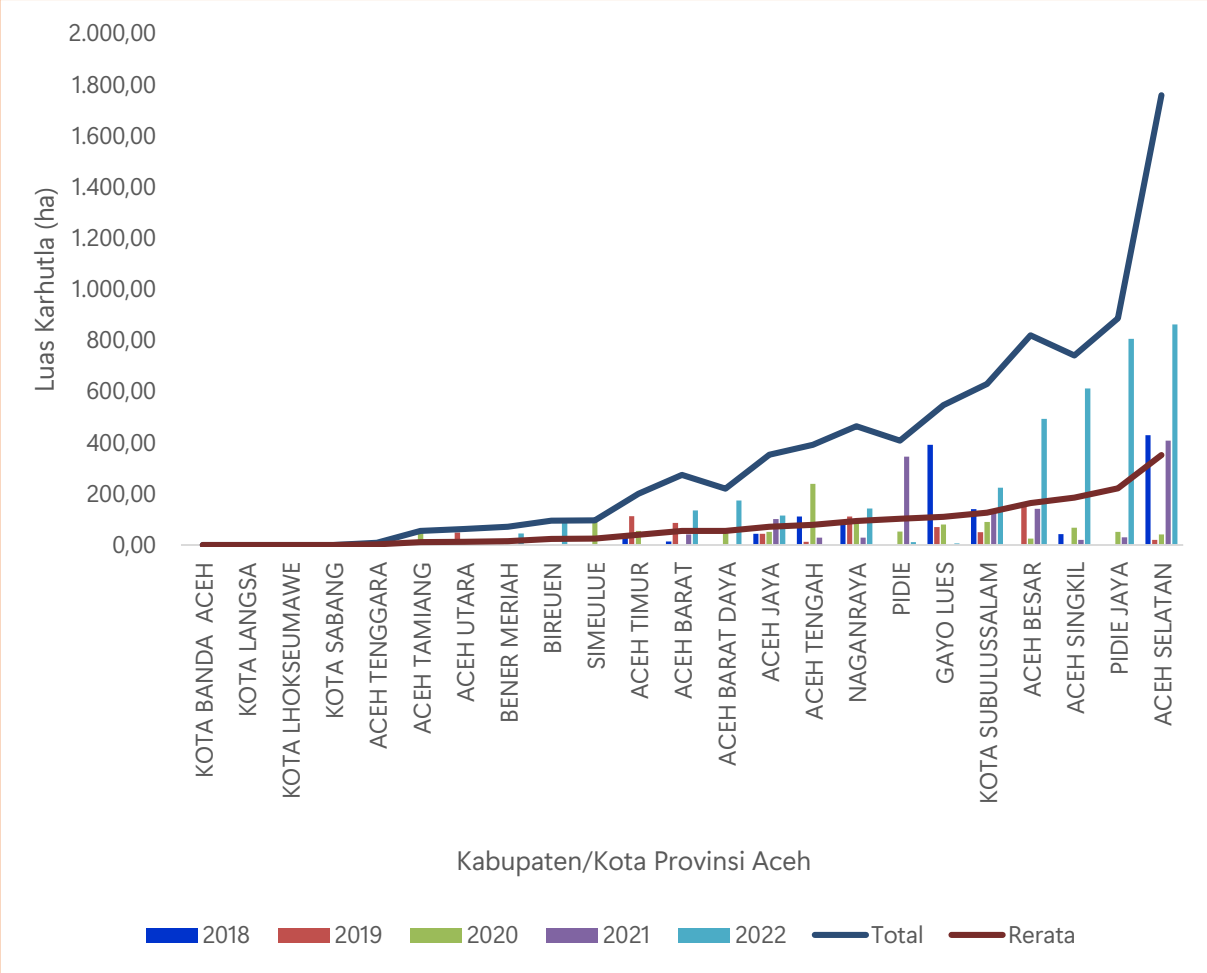
Tabel 2.21.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Kabupaten/Kota Aceh 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)					Total	Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Aceh Barat	13,00	86,00	0,00	41,00	134,00	274,00	54,80

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)					Total	Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022		
2	Aceh Barat Daya	0,00	0,00	47,00	0,00	173,00	220,00	55,00
3	Aceh Besar	0,00	161,00	24,00	141,00	493,00	819,00	163,80
4	Aceh Jaya	43,00	43,00	51,00	101,00	115,00	353,00	70,60
5	Aceh Selatan	429,00	20,00	41,00	407,00	862,00	1.759,00	351,80
6	Aceh Singkil	42,00	0,00	67,00	20,00	612,00	741,00	185,25
7	Aceh Tamiang	0,00	7,00	47,00	0,00	0,00	54,00	10,80
8	Aceh Tengah	111,00	12,00	239,00	28,00	1,00	391,00	78,20
9	Aceh Tenggara	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	2,00
10	Aceh Timur	33,00	112,00	55,00	0,00	0,00	200,00	40,00
11	Aceh Utara	0,00	48,00	14,00	0,00	0,00	62,00	12,40
12	Bener Meriah	0,00	11,00	16,00	0,00	44,00	71,00	14,20
13	Bireuen	0,00	0,00	1,00	0,00	94,00	95,00	23,75
14	Gayo Lues	391,00	69,00	80,00	0,00	6,00	546,00	109,20
15	Banda Aceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Langsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Lhokseumawe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kota Sabang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Subulussalam	140,00	50,00	89,00	126,00	224,00	629,00	125,80
20	Naganraya	83,00	111,00	100,00	28,00	142,00	464,00	92,80
21	Pidie	0,00	0,00	52,00	345,00	10,00	407,00	101,75
22	Pidie Jaya	0,00	0,00	51,00	30,00	805,00	886,00	221,50
23	Simeulue	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	24,00
Total		**1.285,00**	**730,00**	**1.078,00**	**1.267,00**	**3.715,00**	**8.075,00**	**1.615,00**

Sumber: https://sipongi.menlhk.go.id/, 2023

Selama lima tahun terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Aceh telah menunjukkan kecenderungan tertentu. Lima kabupaten atau kota yang secara berturut-turut mengalami kejadian kebakaran dengan luas total terbesar adalah Kabupaten Aceh Selatan (1.759 ha), Kota Subulussalam (629 ha), Nagan Raya (464 ha), Aceh Tengah (391 ha), dan Aceh Jaya (353 ha). Namun, jika melihat luas total kejadian kebakaran selama periode waktu tersebut, lima wilayah dengan kejadian terluas berturut-turut adalah Kabupaten Aceh Selatan (1.759 ha), Pidie Jaya (1.759 ha), Aceh Besar (819 ha), Aceh Singkil (741 ha), Kota Subulussalam (629 ha), dan Gayo Lues (546 ha). Terlebih lagi, kecenderungan kebakaran hutan dan lahan rata-rata tahunan juga menunjukkan bahwa lima kabupaten ini merupakan yang terluas.



Sumber: https://sipongi.menlhk.go.id/, 2023

Gambar 2.28 Kecenderungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kota Aceh

Kabupaten Aceh Tenggara menonjol dengan luas area yang memiliki risiko tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan, yang mencapai 337.712 hektar (80,81% dari total wilayahnya), dan merupakan daerah yang tidak terdampak. Ini menandakan potensi besar untuk kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap ekosistem, habitat, dan kehidupan masyarakat setempat. Di Aceh Selatan, area dengan risiko rendah sangat luas, mencapai 243.014 hektar (58,19%), dan risiko sedang sebesar 96.013 hektar (22,99%), menunjukkan perlunya pengelolaan dan pencegahan kebakaran yang efektif. Kabupaten Aceh Barat, yang memiliki luas area berisiko rendah sebesar 57.130 hektar (20,52%) dan risiko sedang sebesar 143.525 hektar (51,57%), menghadapi potensi kebakaran yang signifikan, membutuhkan sistem peringatan dini dan respons cepat dalam manajemen kebakaran. Gayo Lues memiliki area berisiko tinggi sebesar 24.135 hektar (4,35%), yang, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan area berisiko rendah dan sedang, tetap memerlukan perhatian khusus karena potensi dampaknya terhadap konservasi biodiversitas dan penghidupan masyarakat.

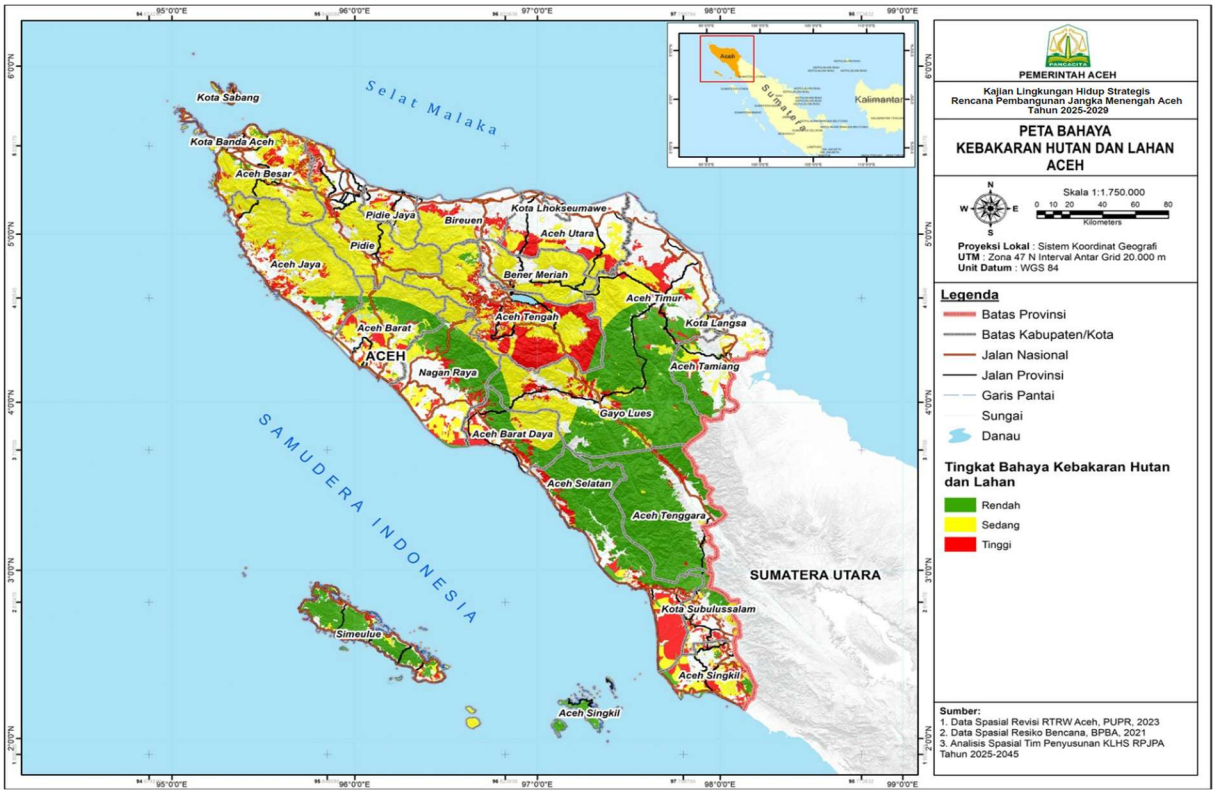
Kota Subulussalam mencatat area dengan risiko tinggi sebesar 11.815 hektar (9,98%), menunjukkan bahwa bahkan area perkotaan tidak terlepas dari risiko kebakaran

hutan dan lahan, menekankan pentingnya integrasi antara pengelolaan lahan perkotaan dengan mitigasi risiko kebakaran.Secara keseluruhan, Aceh memiliki area dengan risiko rendah seluas 1.553.429 hektar (27,33%), risiko sedang seluas 2.029.617 hektar (35,71%), dan risiko tinggi seluas 478.716 hektar (8,42%), dengan sebagian besar wilayahnya, yaitu 1.621.678 hektar (28,54%), tidak terdampak oleh kebakaran hutan dan lahan. Data ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan manajemen kebakaran yang melibatkan komunitas, serta koordinasi antar lembaga untuk mengurangi insiden dan dampak kebakaran hutan dan lahan di Aceh.

Tabel 2.22.
Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan				
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Tak Terdampak	Total
A	**Kabupaten**					
1	Aceh Barat	57.130,26	143.524,82	9.092,00	68.540,21	278.287,30
2	Aceh Barat Daya	64.262,52	82.431,23	15.125,02	26.371,47	188.190,24
3	Aceh Besar	-	99.637,94	107.024,58	82.485,01	289.147,54
4	Aceh Jaya	17.918,65	231.286,46	38.792,18	99.237,95	387.235,25
5	Aceh Selatan	43.014,11	96.013,34	11.977,97	66.561,69	417.567,12
6	Aceh Singkil	2.229,37	74.286,83	11.859,60	66.972,56	185.348,36
7	Aceh Tamiang	5.519,26	41.777,32	-	121.474,70	218.771,28
8	Aceh Tengah	12.128,42	300.059,31	87.816,01	46.838,00	446.841,74
9	Aceh Tenggara	337.712,26	11.424,78	-	68.775,29	417.912,32
10	Aceh Timur	164.799,16	126.549,71	31.277,00	218.274,17	540.900,05
11	Aceh Utara	-	88.497,29	16.344,70	165.683,37	270.525,36
12	Bener Meriah	-	104.869,50	31.031,14	54.839,30	190.739,93
13	Bireuen	-	70.082,43	22.742,48	86.874,34	179.699,24
14	Gayo Lues	329.138,24	140.273,94	24.135,32	60.580,96	554.128,46
15	Nagan Raya	14.969,61	116.802,37	9.270,75	111.332,14	352.374,88
16	Pidie	-	190.623,50	41.958,63	85.170,71	317.752,84
17	Pidie Jaya	-	52.710,25	7.641,56	33.549,09	93.900,90
18	Simeulue	100.740,62	21.009,42	-	60.428,55	182.178,59
B	**Kota**					
1	Banda Aceh	-	-	-	5.676,96	5.676,96
2	Langsa	-	4.102,63	-	18.334,07	22.436,71
3	Lhokseumawe	-	-	-	13.297,37	13.297,37
4	Kota Sabang	-	2.994,63	811,93	8.360,55	12.167,10
5	Subulussalam	23.866,12	30.659,44	11.815,25	52.019,27	118.360,08
Aceh		**1.553.428,61**	**2.029.617,14**	**478.716,12**	**1.621.677,74**	**5.683.439,61**

Sumber : Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021



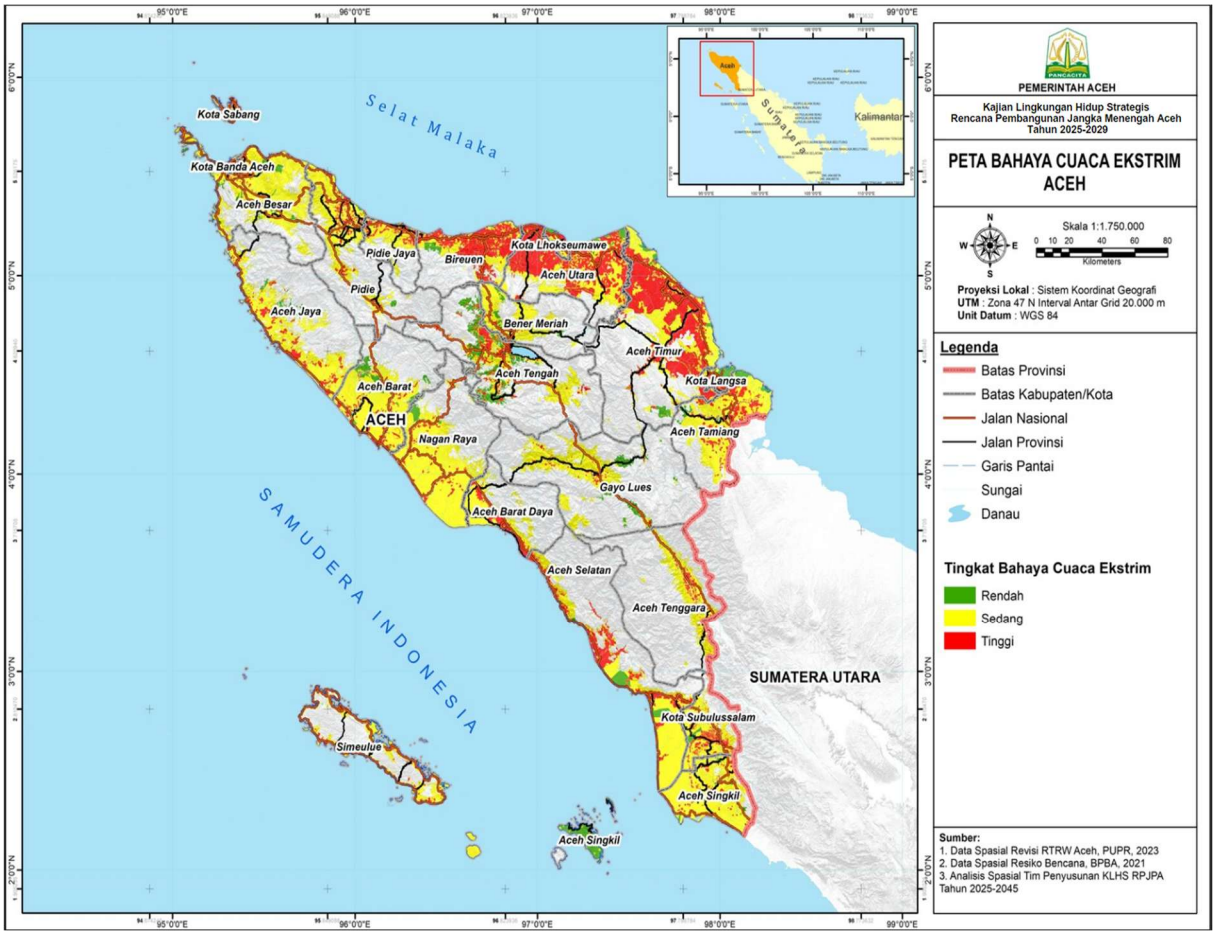
Sumber : Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.29. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh

C6.9. Rawan Cuaca Ekstrim

Total luas bahaya cuaca ekstrim di Aceh secara keseluruhan mencapai 1.432.696,00 Ha dan tergolong dalam kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 860,00 Ha, sedangkan luas dengan kelas sedang mencapai 1.116.294,00 Ha. Daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi mencakup luas seluas 315.542,00 Ha.

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah adalah Kabupaten Aceh Timur dengan luas 793,00 Ha. Luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang, yaitu 218.290,00 Ha, terdapat di Kabupaten Aceh Timur, sementara wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat, dengan luas 73.304,00 Ha. Isu kawasan rawan angin badai ditetapkan berdasarkan identifikasi wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir utara-timur, pesisir barat-selatan, Pulau Simeulue, Pulau Weh, dan pulau-pulau kecil terluar lainnya



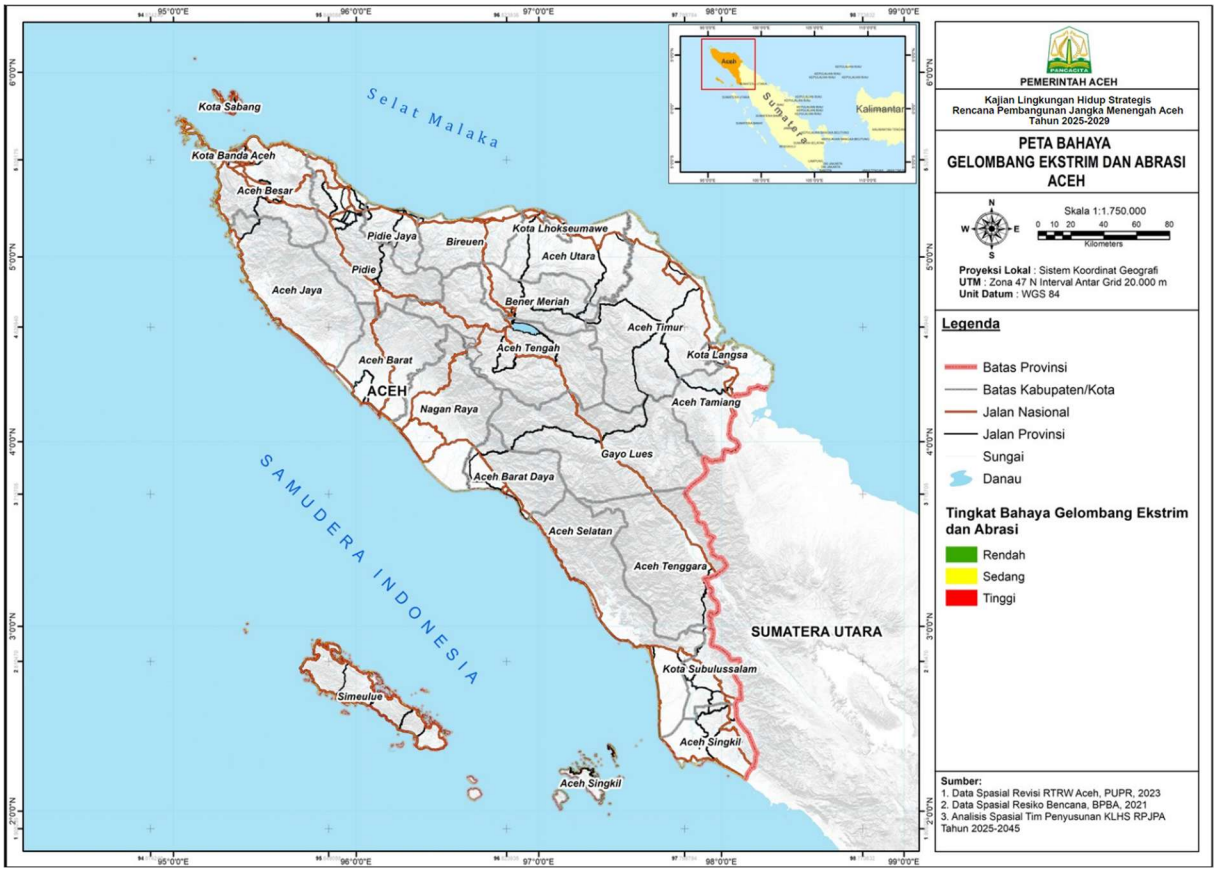
Sumber: Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.30. Peta Bahaya Cuaca Ekstrim di Aceh

C6.10. Rawan Gelombang ekstrim dan Abrasi

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Aceh mencapai 42.319,00 Ha dan tergolong dalam kelas Tinggi. Secara rinci, luas bahaya dengan kelas rendah adalah 20.447,00 Ha, kelas sedang seluas 3.038,00 Ha, dan kelas tinggi seluas 18.834,00 Ha. Berdasarkan gambar yang tersedia, sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat di masing-masing kabupaten/kota, di mana Kabupaten Simeulue memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 10.729,00 Ha. Kabupaten Nagan Raya memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang, dengan luas 721,00 Ha, sedangkan Kabupaten Aceh Besar memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi, yaitu 4.102,00 Ha.

Kawasan gelombang pasang tersebar di sepanjang pantai Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Sabang. Sementara kawasan rawan abrasi meliputi sepanjang pesisir wilayah Aceh, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil, dan pulau-pulau terluar lainnya



Sumber: Badan Penganggulanan Bencana Aceh, 2021

Gambar 2.31. Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Aceh

C6.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Salah satu informasi yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah indeks kualitas lingkungan (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dari upaya untuk pemulihan kualitas lingkungan dan mengurangi laju kerusakan lingkungan. Sebagai indeks komposit, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggabungkan data dari berbagai indikator keberlanjutan seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), menjadi satu nilai yang mudah dipahami dan dapat dikategorikan sebagai kondisi "Sangat Baik", "Baik", "Sedang", "Kurang", atau "Sangat Kurang" (sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021).

Informasi yang diberikan oleh nilai IKLH memberikan gambaran sejauh mana target kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan, baik pada tingkat regional maupun nasional, telah tercapai. Selain itu, IKLH dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan target, melacak tren, memahami hasil, dan mengidentifikasi praktik kebijakan lingkungan terbaik. Analisis berdasarkan data dan fakta ini dapat membantu pejabat pemerintah dalam tingkat regional maupun nasional untuk memperbaiki agenda kebijakan mereka, memfasilitasi komunikasi dengan para pemangku kepentingan utama, dan memaksimalkan manfaat dari investasi lingkungan yang telah dilakukan. Dengan demikian,

IKLH menyediakan alat kebijakan yang berguna dalam menginformasikan dan membimbing pengambilan keputusan terkait lingkungan.

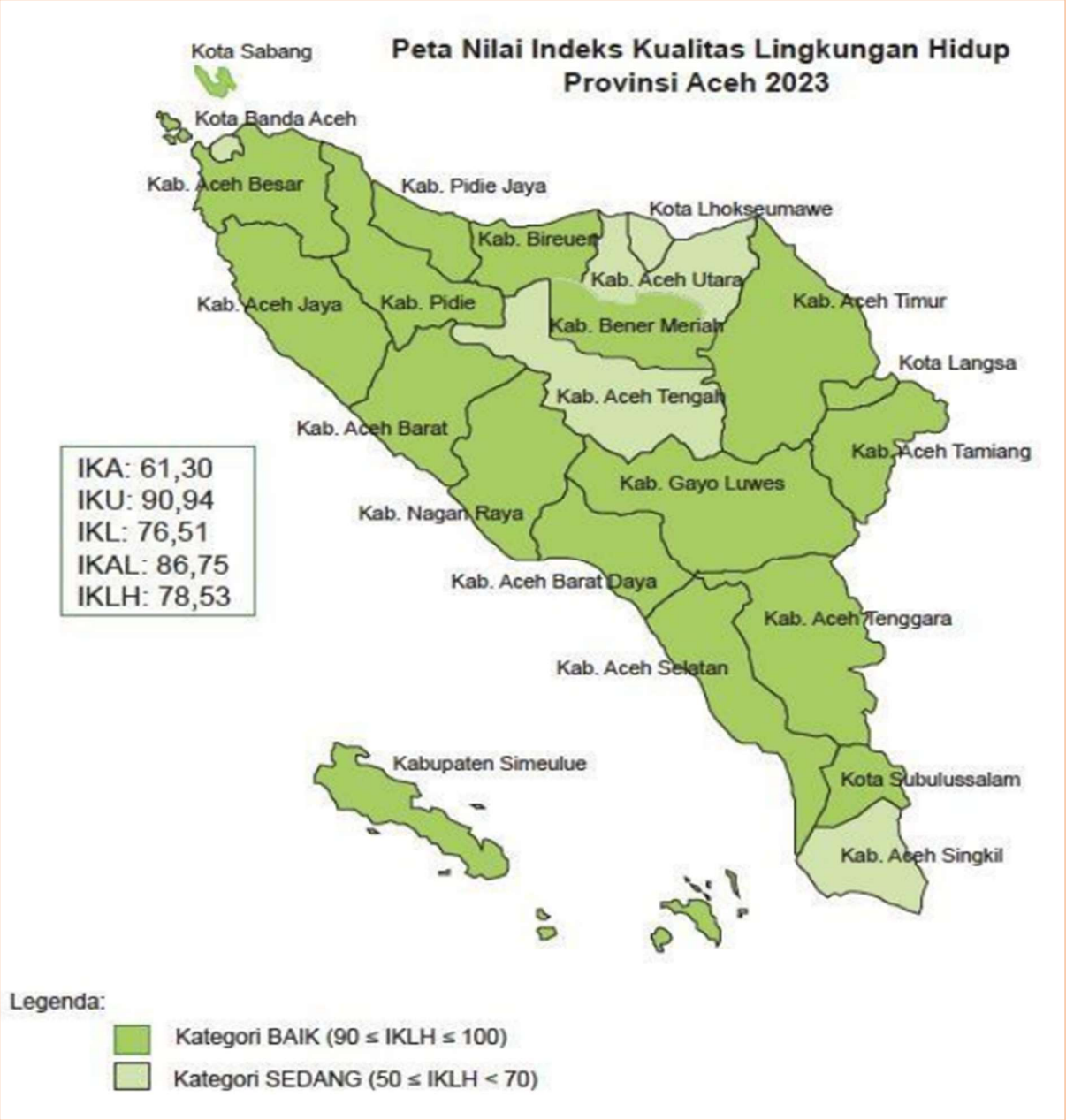
Sebagai alat pendukung kebijakan, indeks memiliki peran penting dalam menentukan prioritas tindakan yang harus diambil sesuai dengan tingkat masalah lingkungan yang tercermin dalam angka indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup juga dapat membantu mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup juga erat kaitannya dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/RPJM), dengan tujuan menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJP/RPJM).

Tabel 2.23.
Nilai IKA, IKU, IKL, dan IKLH Aceh Tahun 2022

No.	Kode Kota	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH	Status
1	1101	Simeulue	63,33	91,12	81,51	-	77,77	Baik
2	1102	Aceh Singkil	-	94,65	54,79	-	69,01	Sedang
3	1103	Aceh Selatan	63,33	93,96	93,50	-	83,53	Baik
4	1104	Aceh Tenggara	66,67	85,62	98,76	-	80,31	Baik
5	1105	Aceh Timur	60,00	89,73	67,03	-	73,95	Baik
6	1106	Aceh Tengah	-	89,15	93,74	-	82,92	Sedang
7	1107	Aceh Barat	62,50	90,66	63,58	-	72,41	Baik
8	1108	Aceh Besar	55,88	90,76	63,58	-	69,32	Baik
9	1109	Pidie	61,54	92,30	82,91	-	76,95	Baik
10	1110	Bireuen	67,50	88,48	56,34	-	69,84	Baik
11	1111	Aceh Utara	41,67	87,81	37,02	-	55,92	Sedang
12	1112	Aceh Barat Daya	57,50	88,61	84,40	-	74,28	Baik
13	1113	Gayo Lues	60,91	93,87	100	-	84,32	Baik
14	1114	Aceh Tamiang	61,52	91,50	50,12	-	71,16	Baik
15	1115	Nagan Raya	66,67	95,30	65,49	-	78,20	Baik
16	1116	Aceh Jaya	66,67	95,54	83,21	-	80,56	Baik
17	1117	Bener Meriah	60,00	90,58	77,02	-	76,54	Baik
18	1118	Pidie Jaya	63,33	92,15	75,40	-	71,32	Baik
19	1171	Kota Banda Aceh	56,67	81,69	25,59	-	59,39	Sedang
20	1172	Kota Sabang	70,00	93,50	54,95	-	76,64	Baik
21	1173	Kota Langsa	70,00	91,98	30,73	-	69,83	Baik
22	1174	Kota Lhokseumawe	58,57	89,96	22,48	-	62,54	Sedang
23	1175	Kota Subulussalam	65,00	92,66	50,27	-	73,88	Baik
Indeks Provinsi Aceh			**61,30**	**90,94**	**76,51**	**86,75***	**78,53**	**Baik**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2023

Berdasarkan klasifikasi kriteria Tahun 2023, maka IKLH Aceh termasuk kelompok "BAIK" dengan skor 78,53. Peta IKLH Aceh disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2023

Gambar 2.32. Peta IKLH Aceh Tahun 2023

Tabel 2.24.
Nilai IKLH Aceh Tahun 2016-2023

No	Kode Kota	Kabupaten/ Kota	Tahun								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2023
1	1101	Simeulue	25.15	21.09	27.65	57.56	51.38	-	77,77	78,82	77,79
2	1102	Aceh Singkil	41.78	-	17.69	48.75	48.53	71,18	69,01	50,03	73,69
3	1103	Aceh Selatan	56.99	62.03	59.98	63.48	86.10	83,36	85,53	82,46	81,16
4	1104	Aceh Tenggara	58.03	38.08	35.97	61.05	55.56	-	80,31	81,21	80,83
5	1105	Aceh Timur	41.16	70.18	74.45	76.86	79.27	71,11	73,95	73,37	75,41
6	1106	Aceh Tengah	76.75	79.08	82.18	84.64	84.26	82,08	82,92	56,81	82,57
7	1107	Aceh Barat	63.41	67.50	72.15	76.36	78.98	70,77	72,41	73,93	73,75
8	1108	Aceh Besar	60.37	77.67	68.24	76.29	77.82	71,58	69,32	71,58	75,70

No	Kode Kota	Kabupaten/ Kota	Tahun								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2023
9	1109	Pidie	45.18	80.10	75.78	82.71	83.22	77,04	76,95	78,75	78,89
10	1110	Bireuen	62.94	64.43	67.51	75.50	75.61	69,39	69,84	73,47	72,05
11	1111	Aceh Utara	54.64	30.75	32.84	68.84	73.88	68,39	55,92	59,16	70,09
12	1112	Aceh Barat Daya	64.63	65.90	76.24	85.79	84.55	72,01	74,28	76,01	77,15
13	1113	Gayo Luwes	60.78	37.21	34.96	62.61	57.51	77,91	84,32	82,82	82,69
14	1114	Aceh Tamiang	61.69	69.82	63.44	52.13	69.85	70,56	72,16	71,55	71,53
15	1115	Nagan Raya	49.66	50.21	70.48	79.91	81.85	73,96	78,20	77,84	75,67
16	1116	Aceh Jaya	71.37	77.24	76.61	84.02	84.70	79,11	80,56	82,16	79,59
17	1117	Bener Meriah	58.85	63.25	53.83	61.67	52.20	-	76,54	76,12	77,50
18	1118	Pidie Jaya	50.04	51.19	53.76	55.03	51.32	-	71,32	77,92	77,30
19	1171	Banda Aceh	28.69	32.49	48.75	63.01	67.01	57,29	59,39	61,75	57,77
20	1172	Sabang	31.21	50.73	35.12	71.95	77.99	72,80	76,64	77,78	70,77

Tabel 2.25.
Perubahan Nilai IKLH dan Target dari Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2016 – 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2022
1	Simeulue	25,15	21,09	27,65	57,56	51,38		77,77	77,53
2	Aceh Singkil	41,78		17,69	48,75	48,53	71,18	69,01	73,24
3	Aceh Selatan	56,99	62,03	59,98	63,48	86,10	83,36	83,53	80,98
4	Aceh Tenggara	58,03	38,08	35,97	61,05	55,56		80,31	80,67
5	Aceh Timur	41,16	70,18	74,45	76,86	79,27	71,11	73,95	75,04
6	Aceh Tengah	76,75	79,08	82,18	84,64	84,26	82,08	82,92	81,55
7	Aceh Barat	63,41	67,50	72,15	76,36	78,98	70,77	72,41	73,32
8	Aceh Besar	60,37	77,67	68,24	76,29	77,82	71,58	69,32	75,39
9	Pidie	45,18	80, 10	75,78	82,71	83,22	77,04	76,95	78,68
10	Bireuen	62,94	64,43	67,51	75,50	75,61	69,39	69,84	71,66
11	Aceh Utara	54,64	30,75	32,84	68,84	73,88	68,39	55,92	69,59
12	Aceh Barat Daya	64,63	65,90	76,24	85,79	84,55	72,01	74,28	57,33
13	Gayo Luwes	60,78	37,21	34,96	62,61	57,51	77,91	84,32	79,49
14	Aceh Tamiang	61,69	69,82	63,44	52,13	69,85	70,56	72,16	70,41
15	Nagan Raya	49,66	50,21	70,48	79,91	81,85	73,96	78,20	75,24
16	Aceh Jaya	71,37	77,24	76,61	84,02	84,70	79,11	80,56	79,31
17	Bener Meriah	58,85	63,25	53,83	61,67	52,20		76,54	77,17
18	Pidie Jaya	50,04	51,19	53,76	55,03	51,32		71,32	77,02
19	Banda Aceh	28,69	32,49	48,75	63,01	67,01	57,29	59,39	57,33
20	Sabang	31,21	50,73	35,12	71,95	77,99	72,80	76,64	72,86
21	Langsa	38,07	43,75	40,42	46,20	44,44	61,17	69,83	66,28
22	Lhokseumawe	31,27	33,19	30,80	41,23	41,34	63,70	62,54	64,90
23	Subulussalam	43,80	43,01	42,20	45,17	45,45	71,54	73,88	74,23
Indeks Provinsi Aceh		**65,08**	**73,38**	**69,14**	**77,72**	**78,99**	**74,71**	**73,55**	**73,44**

Ket : Hijau melampaui target Tahun 2022
Kuning menurun dari tahun sebelumnya

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2023

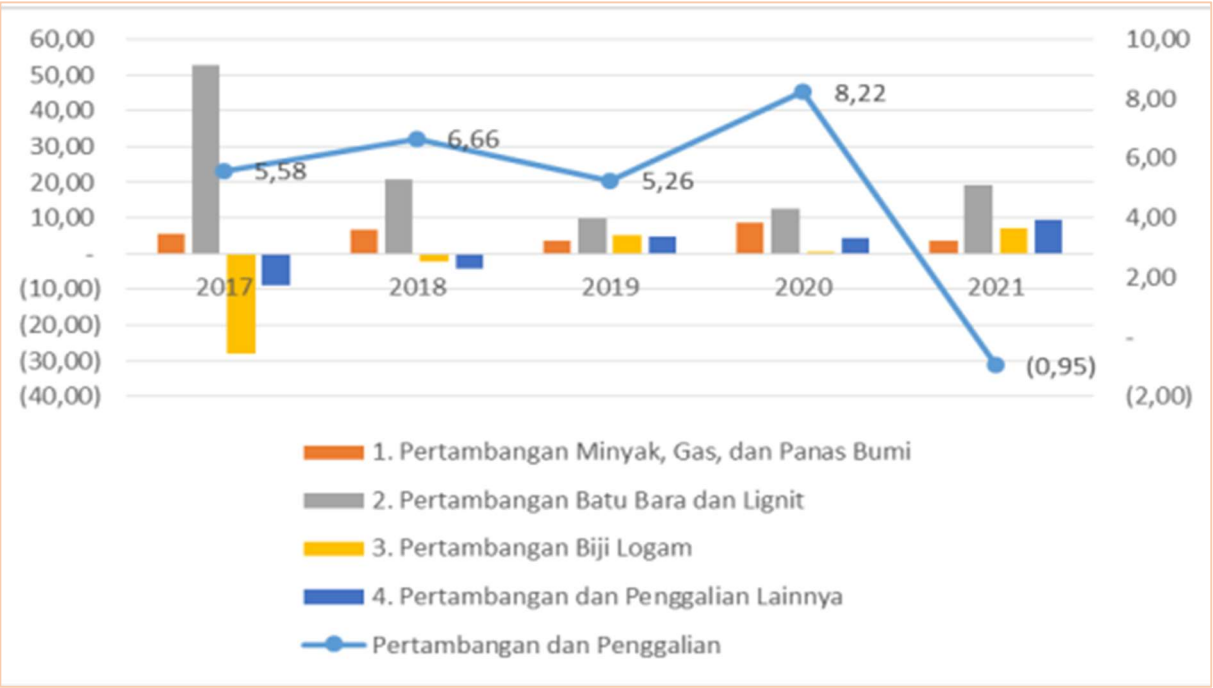
Peningkatan nilai IKLH menjadi dasar untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional dan RPJM Aceh 2026. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sejumlah saran strategis diperlukan dalam perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Beberapa saran yang dapat diimplementasikan meliputi:

1. Menguatkan program perlindungan lingkungan, terutama di kabupaten/kota dengan nilai IKLH di bawah target, dengan fokus pada pengawasan dan penegakan hukum.
2. Meningkatkan praktik penggunaan lahan berkelanjutan, khususnya di daerah yang mengalami penurunan nilai IKLH, dengan mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan dan lindung.
3. Mendorong program penanaman kembali dan reboisasi di daerah dengan penurunan nilai IKLH untuk meningkatkan kualitas lahan dan fungsi ekosistem.
4. Melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya pelestarian alam.
5. Meningkatkan pengelolaan limbah secara efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program perlindungan lingkungan yang diimplementasikan.
7. Menggalang kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung inisiatif perlindungan lingkungan.
8. Mendorong penelitian dan inovasi untuk mengidentifikasi solusi berbasis ilmiah dalam meningkatkan kualitas lingkungan.

C7. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Sebaran Perizinan)

C7.1. Pertambangan

Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan dan penggalian yang tersedia dalam jumlah besar dan tersebar di beberapa kabupaten. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Mineral dan Batu bara (Minerba) Tahun 2014, yang menghentikan ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah, terjadi penurunan yang signifikan dalam sektor pertambangan. Dibandingkan dengan Tahun 2015, penurunan pada Tahun 2018 tidak sebesar sebelumnya, hanya mencapai 2,33 persen dibandingkan dengan penurunan sebelumnya yang mencapai 28,03 persen. Pertambangan bijih dan logam hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,49 persen pada Tahun 2020, sementara pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 14,99 persen. Sedangkan sub-sektor terakhir yang mengalami kenaikan dalam pertambangan dan penggalian lainnya sebesar 4,22 persen pada Tahun 2020, setelah mengalami kontraksi sebesar 4,57 persen pada tahun-tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas penggalian pasir secara ilegal yang berkaitan dengan permintaan bahan bangunan yang meningkat, meskipun izin belum dicabut. Pertumbuhan sub-sektor pertambangan dan penggalian dari Tahun 2017 hingga 2021 tergambar dalam **Gambar 2.33**.



Sumber : Dinas Energi dan Simber Daya Mineral Aceh, 2023

Gambar 2.33 Pertumbuhan (%) Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2017 - 2022

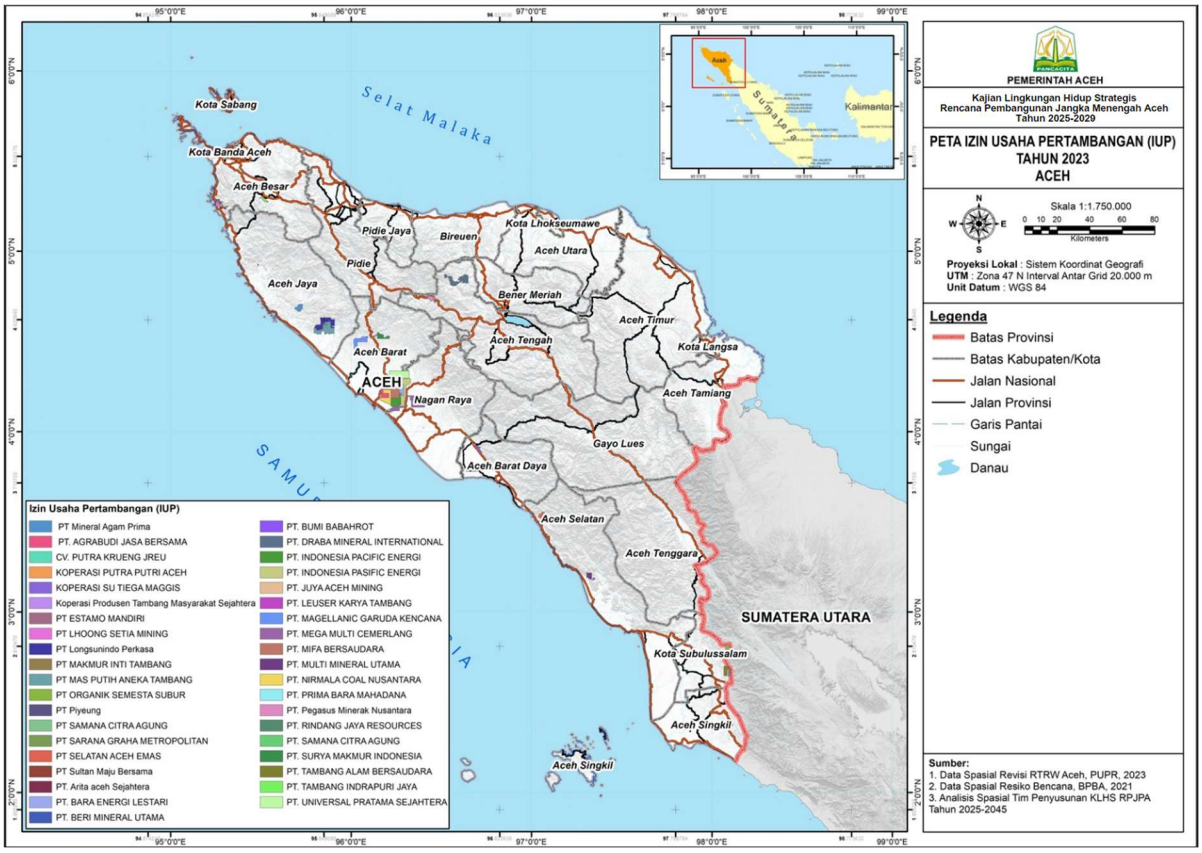
Selama Tahun 2017, peran sektor pertambangan dan penggalian meningkat, terutama dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi oleh PT. Perta Arun Gas yang telah memulai produksi sejak Tahun 2017. Ini terlihat dari kontribusi tertinggi dari minyak, gas, dan panas bumi yang mencapai 8,55 persen, sedangkan kontribusi terendah dimiliki oleh sub-sektor pertambangan biji logam sebesar 0,49 persen pada Tahun 2020. Luas pertambangan di Aceh dapat dilihat dalam **Tabel 2.26**.

Tabel 2.26.
Luas Pertambangan Aceh

Nama	Komoditas	Kabupaten	Tahapan	Keterangan	Luas (Ha)
CV. Putra Krueng Jreu	Magnesit	Aceh Besar	-	Eks 2022	1,49
Koperasi Produsen Tambang Masyarakat Sejahtera	Emas	Gayo Lues	-	-	18,56
Koperasi Su Tiega Maggis	Bijih Besi	Aceh Selatan	Iup Op	-	199,31
Koperasi Putra Putri Aceh	Emas (Placer)	Aceh Barat	Iup Op	-	206,33
PT. Agrabudi Jasa Bersama	Batubara	Aceh Barat	Iup Op	-	5.019,98
PT. Arita Aceh Sejahtera	Galena	Aceh Jaya	-	-	45,86
PT. Bara Energi Lestari	Batubara	Nagan Raya	Iup Op	-	1.492,09
PT. Beri Mineral Utama	Bijih Besi	Aceh Selatan	Iup Op	-	1.060,52
PT. Bumi Babahrot	Bijih Besi	Aceh Barat Daya	Iup Op	-	548,41
PT. Draba Mineral International	Emas	Aceh Tengah	-	-	4.572,42
PT Estamo Mandiri	Bijih Besi	Kota Subulussalam	-	-	588,42
PT. Indonesia Pacific Energi	Batubara	Aceh Barat	-	-	3.260,63
PT. Indonesia Pasific Energi	Batubara	Nagan Raya	Iup Op	-	5.096,81
PT. Juya Aceh Mining	Bijih Besi	Aceh Barat Daya	Iup Op	-	100,07
PT. Leuser Karya Tambang	Bijih Besi	Aceh Barat Daya	Iup Op	-	99,74
PT Lhoong Setia Mining	Pasir Besi	Aceh Besar	Iup Op	-	499,96
PT Longsunindo Perkasa	Batubara	Aceh Jaya	-	-	4.660,74
PT. Magellanic Garuda Kencana	Emas (Placer)	Aceh Barat	Iup Op	-	3.241,72

Nama	Komoditas	Kabupaten	Tahapan	Keterangan	Luas (Ha)
PT Makmur Inti Tambang	Pasir Besi	Aceh Besar	Iup Eks -Aktif	-	179,57
PT Mas Putih Aneka Tambang	Batubara	Aceh Jaya	-	-	4.953,24
PT. Mega Multi Cemerlang	Batubara	Nagan Raya	Iup Op	-	7.949,97
PT. Mifa Bersaudara	Batubara	Aceh Barat	Iup Op	-	3.126,79
PT Mineral Agam Prima	Bijih Besi	Aceh Jaya	-	Eks Agustus 2022	1.391,67
PT. Multi Mineral Utama	Emas	Aceh Selatan	Iup Op	-	1.060,52
PT. Nirmala Coal Nusantara	Batubara	Aceh Barat	Iup Op	-	3.192,06
PT Organik Semesta Subur	Bijih Besi	Kota Subulussalam	-	-	982,64
PT. Pegasus Minerak Nusantara	Emas	Aceh Tengah	-	Eksplorasi Februari 2022	1.009,25
PT. Prima Bara Mahadana	Batubara	Aceh Barat	Iup Op	-	2.026,45
PT. Rindang Jaya Resources	Bijih Besi	Gayo Lues	-	Eks 2022	85,23
PT. Samana Citra Agung	Pasir Besi	Aceh Besar	Iup Op	-	120,51
PT Samana Citra Agung	Pasir Besi	Pidie	Iup Op	-	158,77
PT Sarana Graha Metropolitan	Batubara	Aceh Jaya	-	-	197,25
PT Selatan Aceh Emas	Emas	Aceh Selatan	-	-	1.650,05
PT. Surya Makmur Indonesia	Batubara	Aceh Barat	Iup Op	PT. Bara Adipratama	1.598,91
PT. Tambang Alam Bersaudara	Bijih Besi	Kota Subulussalam	-	Eksplorasi	1.356,10
PT. Tambang Indrapuri Jaya	Bijih Besi	Aceh Besar	Iup Op	-	526,8
PT. Universal Pratama Sejahtera	Batubara	Nagan Raya	-	Eksplorasi 2021	4.974,57
PT. Sultan Maju Bersama	Tembaga	Aceh Besar	-	-	999,7
PT. Piyeung		Aceh Besar	-	-	197,96
Total Luas (Ha)					**68451,07**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2023

Gambar 2.34. Peta Sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh

C7.2. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Aceh meliputi kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao. Potensi perkebunan ini tersebar di 15 kabupaten/kota di Aceh. Menurut data BPS Tahun 2016, luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Aceh mencapai 228.230 hektar dengan produksi sebanyak 399.618 ton. Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar, luasnya mencapai 201.728 hektar dengan produksi sebanyak 362.831 ton. Luas perkebunan kelapa rakyat mencapai 106.251 hektar dengan produksi 62.752 ton. Perkebunan kopi rakyat memiliki luas 123.443 hektar dengan produksi 65.231 ton. Sementara untuk perkebunan kakao rakyat pada Tahun 2016 memiliki luas mencapai 103.316 hektar dengan produksi sebanyak 42.889 ton. Pada Tahun 2014, luas perkebunan kakao skala besar mencapai 581 hektar dengan jumlah produksi yang tidak diketahui (BPS Aceh, 2017).

Berdasarkan data luas pemanfaatan lahan untuk Hak Guna Usaha (HGU) saat ini di Aceh mencapai 437.468,49 hektar yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Kabupaten dengan luasan HGU terbesar adalah Aceh Timur dengan 109.412,49 hektar, diikuti oleh Nagan Raya dengan 72.466,45 hektar, dan Aceh Singkil dengan 63.316,38 hektar. Ketiga daerah tersebut menjadi pusat konsentrasi HGU di Aceh, terutama untuk perkebunan skala besar yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah.

Selain itu, beberapa daerah juga mencatat luasan HGU yang signifikan, antara lain Aceh Tamiang (45.857,82 hektar), Aceh Barat (39.436,74 hektar), serta Kota Subulussalam (33.054,29 hektar). Sementara itu, kabupaten/kota lainnya memiliki luasan HGU yang relatif lebih kecil, seperti Aceh Besar dengan 512,11 hektar, Aceh Tengah dengan 688,46 hektar, Pidie Jaya dengan 715,23 hektar, Gayo Lues dengan 0,55 hektar, hingga Aceh Tenggara yang hanya tercatat 0,01 hektar. Sebaran HGU dapat dilihat pada peta KRP pola ruang berdampak pada sebaran HGU Aceh **Tabel 2.27**.

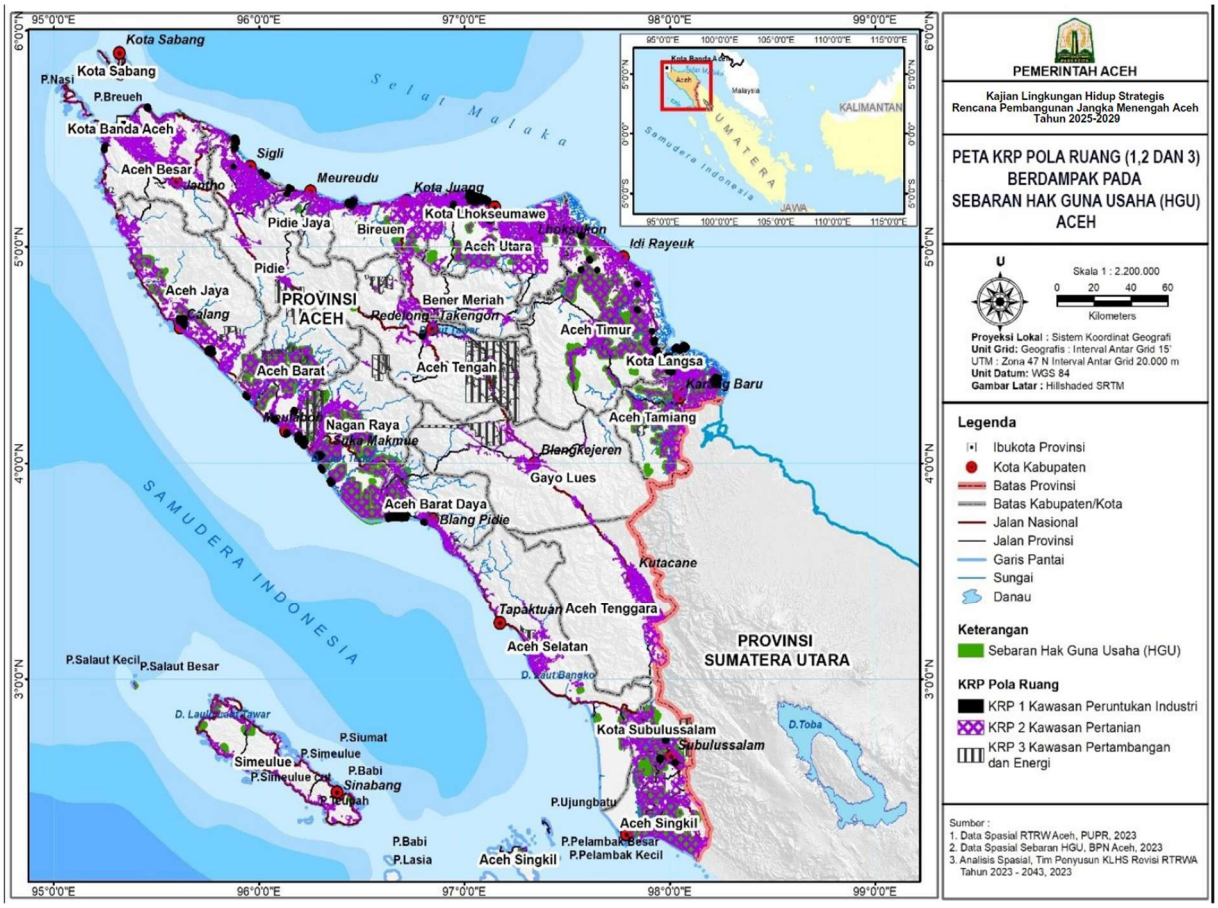
Tabel 2.27.
Luas HGU berdasarkan Kabupaten dan Kota di Aceh 2023

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Aceh Barat	39.436,74
2	Aceh Barat Daya	13.170,67
3	Aceh Besar	512,11
4	Aceh Jaya	7.866,06
5	Aceh Selatan	9.810,38
6	Aceh Singkil	63.316,38
7	Aceh Tamiang	45.857,82
8	Aceh Tengah	688,46
9	Aceh Tenggara	0,01
10	Aceh Timur	109.412,49
11	Aceh Utara	23.469,75
12	Bireuen	8.141,92
13	Gayo Lues	0,55
14	Kota Langsa	5.769,14
15	Kota Lhokseumawe	289,37
16	Kota Subulussalam	33.054,29
17	Nagan Raya	72.466,45
18	Pidie Jaya	715,23
19	Simeulue	3.490,66
	Total	**437.468,49**

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Aceh, 2023

Secara keseluruhan, distribusi HGU di Aceh memperlihatkan konsentrasi yang dominan di wilayah pantai timur dan barat selatan, sedangkan wilayah tengah dan

pegunungan cenderung memiliki luasan HGU yang sangat terbatas. Sebaran HGU dapat dilihat pada peta KRP pola ruang berdampak pada sebaran HGU Aceh sebagai berikut.



Sumber: Badan Pertanahan Nasional Aceh, 2023

Gambar 2.35. KRP Pola Ruang Aceh

C7.3. Kehutanan

Kebijakan pengelolaan hutan melibatkan proses perizinan yang dikenal sebagai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. PBPH adalah bentuk perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan.

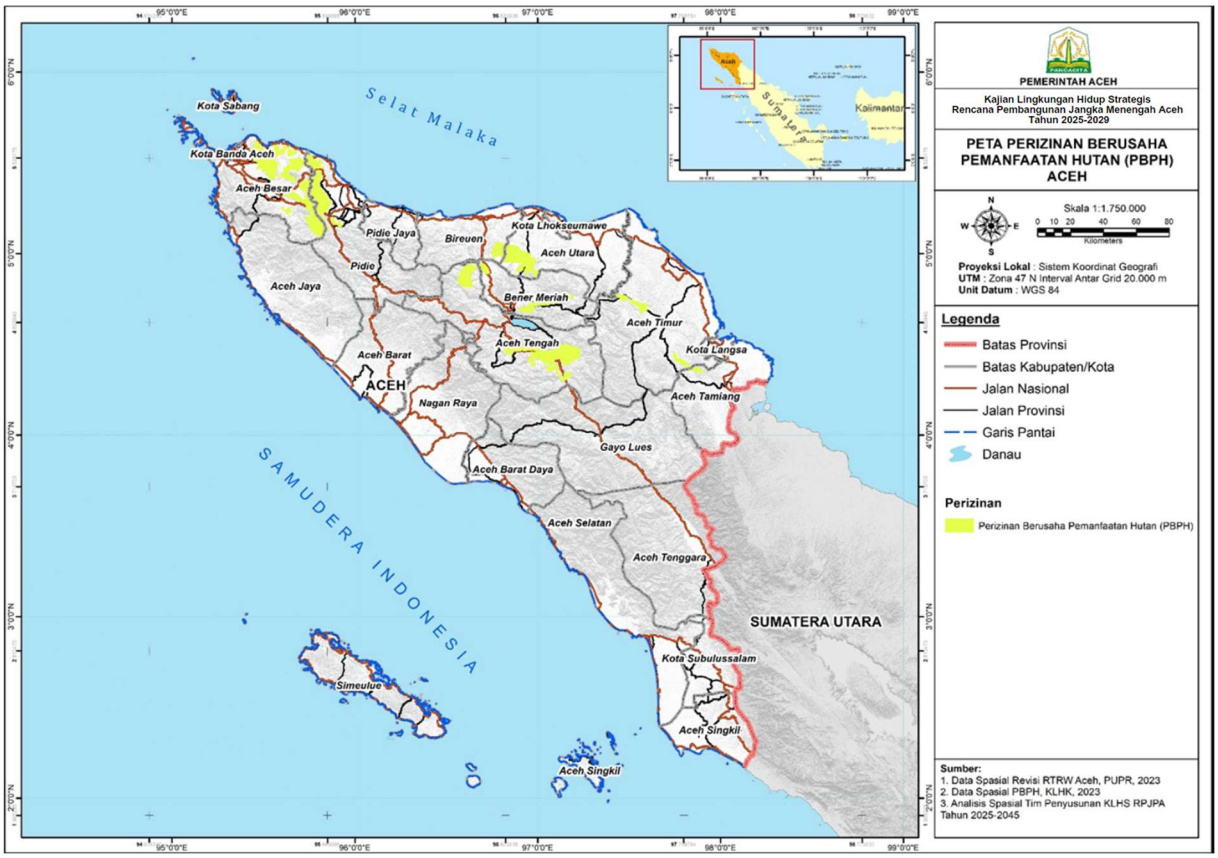
Tabel 2.28.
Perusahaan Pemegang PBPH dan Luasannya di Aceh 2023

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)
1	PT Multi Sibolga Timber	279,03
2	PT Gunung Raya Timber Utama	30,43
3	PT Rimba Wawasan Permai	6.169,67
4	PT Rimba Timur Sentosa	6.670,94
5	PT Tusam Hutani Lestari	12.393,16
6	PT Rencong Pulp & Paper Industry	8.977,10

No.	Nama Perusahaan	Luas (Ha)
7	PT Aceh Nusa Indrapuri	98.015,62
8	PD Pembangunan Tanoh Gayo	3.188,02
Total		**135.723,98**

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, 2023

Kedelapan izin yang sedang berlaku saat ini diberikan pada tahun-tahun yang berbeda. Mayoritas izin diterbitkan pada Tahun 2021, kecuali 2 di antaranya, yaitu milik PT. Tusam Hutani Lestari dan PD. Pembangunan Tanoh Gayo, yang diberikan pada Tahun 2014. Dari 8 perusahaan tersebut, 7 di antaranya saat ini memegang izin untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (PHHK_HP), sementara satu lainnya, yaitu PD. Pembangunan Tanoh Gayo, melakukan kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi (PHHBK_HP). Di bawah ini adalah peta dengan lokasi-lokasi perusahaan yang memegang izin tersebut di Aceh.



Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, 2023

Gambar 2.36. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Aceh

a. Pinjam Pakai Kawasan Hutan

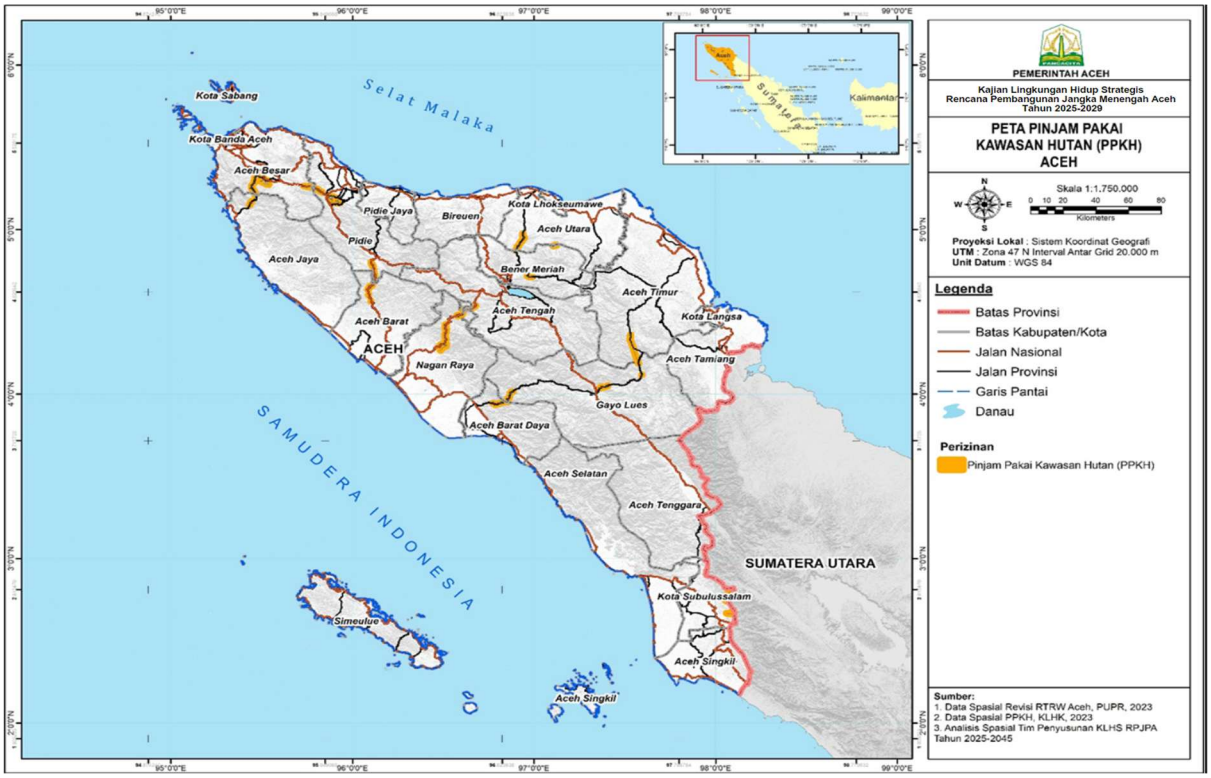
Dalam pengelolaan hutan, salah satu aspeknya adalah perizinan terkait dengan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH), yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Panduan Pinjam Pakai Kawasan Hutan. PPKH merupakan izin yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk tujuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan tujuan kawasan hutan tersebut.

Tabel 2.29.
Pihak Pemegang PPKH berdasarkan Lokasi dan Luasannya di Aceh 2023

No.	Nama PPKH	Kab/Kota	Jenis PPKH	Luas PPKH (Ha)
1	Pemerintah Aceh	Bener Meriah	Non Tambang	28,9
2	Tambang Indrapuri Jaya, PT	Aceh Besar	Tambang	344
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pidie	Non Tambang	362,1
4	PLN (Persero), PT	Aceh Barat dan Pidie	Non Tambang	62
5	Pemerintah Kabupaten Pidie	Pidie	Non Tambang	12
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Aceh Utara	Non Tambang	39,14
7	Senagan Energi, PT	Nagan Raya	Non Tambang	19,02
8	Estamo Mandiri, PT	Subulussalam	Tambang	100,42
9	Gubernur Aceh	Prov. Aceh	Non Tambang	841,93
10	Organik Semesta Subur, PT	Kota Subulussalam	Tambang	335,71
Total				**2.145,22**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Saat ini, terdapat sepuluh pihak yang memiliki perizinan dan masih berlaku dengan masa berlaku yang bervariasi. Salah satunya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami pengaktifan kembali izin pada Tahun 2017, sementara PT. Senagan Energi mengalami perubahan dari izin tambang menjadi non-tambang. Penguasaan izin yang paling luas saat ini dimiliki oleh Gubernur Aceh, yang beroperasi di sektor non-tambang, dengan luas sekitar 842 hektar.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Gambar 2.37. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Aceh

b. Perhutanan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 juga terdapat jenis pengelolaan hutan jugu terdapat upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Tujuannya adalah agar hutan juga dapat berperan dalam pembangunan, yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengganggguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial.

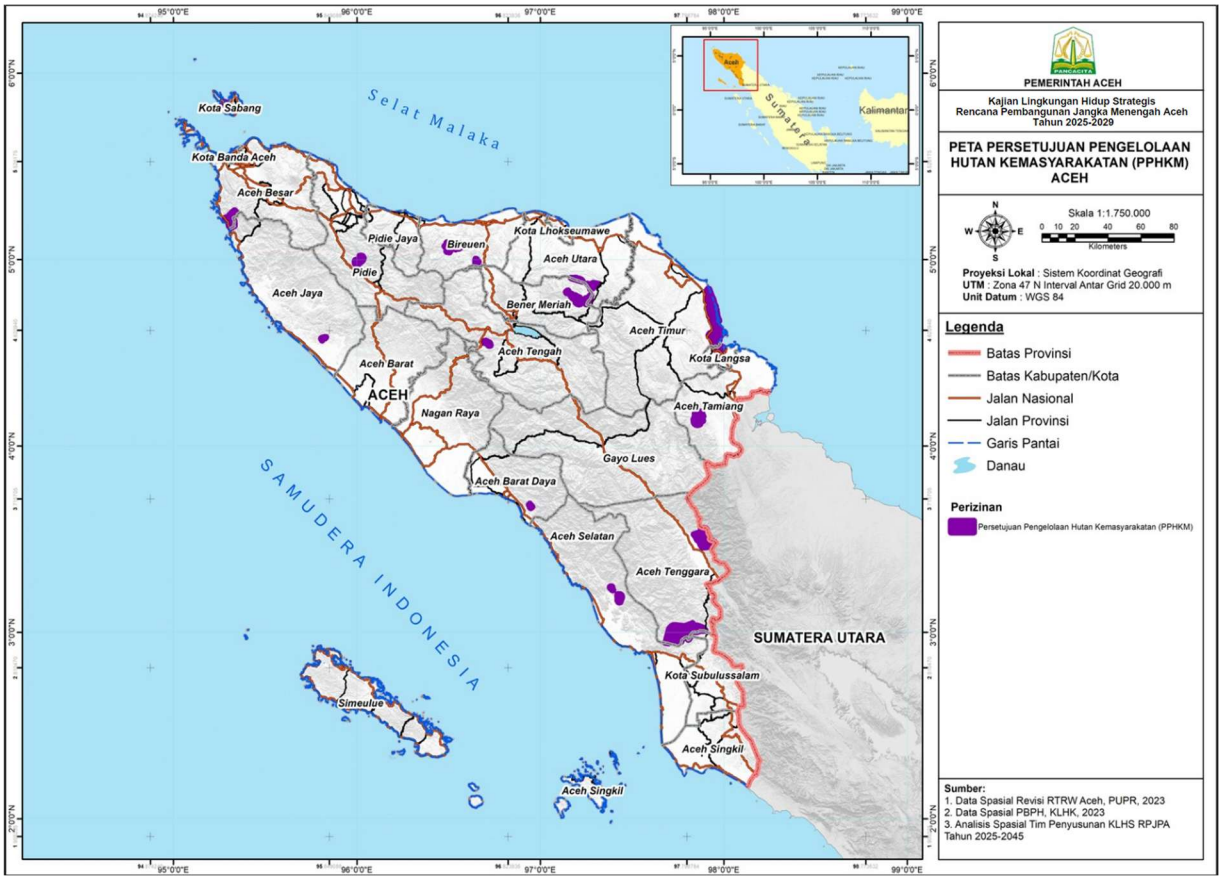
c. Hutan Kemasyarakatan (HKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 lebih lanjut mengatur tentang Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat dengan HKM, yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Pengelolaannya dapat dajukan permohonan oleh ketua kelompok masyarakat; b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau c. ketua koperasi. Izinnya sendiri diberikan pada: a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan c. wilayah tertentu dalam KPH. Saat ini di Aceh terdapat lebih dari 54 ribu hektar lahan dengan status sebagai HKM, yang tersebar di sejumlah wilayah kabupaten dan kota. Terdapat sedikitnya 25 badan hukum yang memiliki izin pengelolaan HKM.

Tabel 2.30.
Badan Hukum Pemegang Izin HKM di Aceh 2023

No.	Nama	Luas (Ha)
1	KLP Tangse Lestari	1.484,31
2	KOP Pertanian Majumi	424,65
3	KTH Ujung Delong Kedie	104,86
4	KTH Rumah Rungko	104,10
5	Gapoktan Lawe Tanebok	973,21
6	KSU Putera Selatan Kluet	6.089,76
7	KTH Jambur Latong	2.466,17
8	Gapoktan Muara Lawe Bengkung	8.768,90
9	KTH Rencong	1.880,65
10	KTH Tuah Sejati	1.704,76
11	Gapoktan Bekhu Dihe	5.436,81
12	KTH Alue Simantok	765,93
13	KTH Bandar Islamic Centre	3.967,21
14	Koperasi Bina Lestari	3.349,87
15	KTH Aneuk Glee	1.083,63
16	Gapoktan Peteri Ijo	93,43
17	Beringin Jaya	195,59
18	KTH Darul Atiq Putra	497,12
19	KTH Kulam Keuh	331,24
20	Goh Dara	605,27
21	Jaya Lestari Lamsujen	641,31
22	Lestari Kamp Liemong	250,92
23	Bangka Ban Timoh	332,21
24	KSU Flora Potensi	6.167,77
25	KSU Bina Meufakat	5.968,24
	Total	**53.687,96**

Tabel 2.30 terlihat banwa pengelola HKM terluas di Aceh adalah Gapoktan Muara Lawe Bengkung, yaitu dengan luas lahan sebesar hampir 9 ribu hektar, berikutnya adalah KSU Plora Potensi seluas lebih dari 6 ribu hektar, berikut kampir sama adalah oleh KSU Putera Selatan Kluet, kemudian KSU Bina Mufakat seluas hampir 6 ribu hektar. Peta hutan kemasyarakatan sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.38**.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Gambar 2.38. Petan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Aceh

d. Hutan Desa (HD)

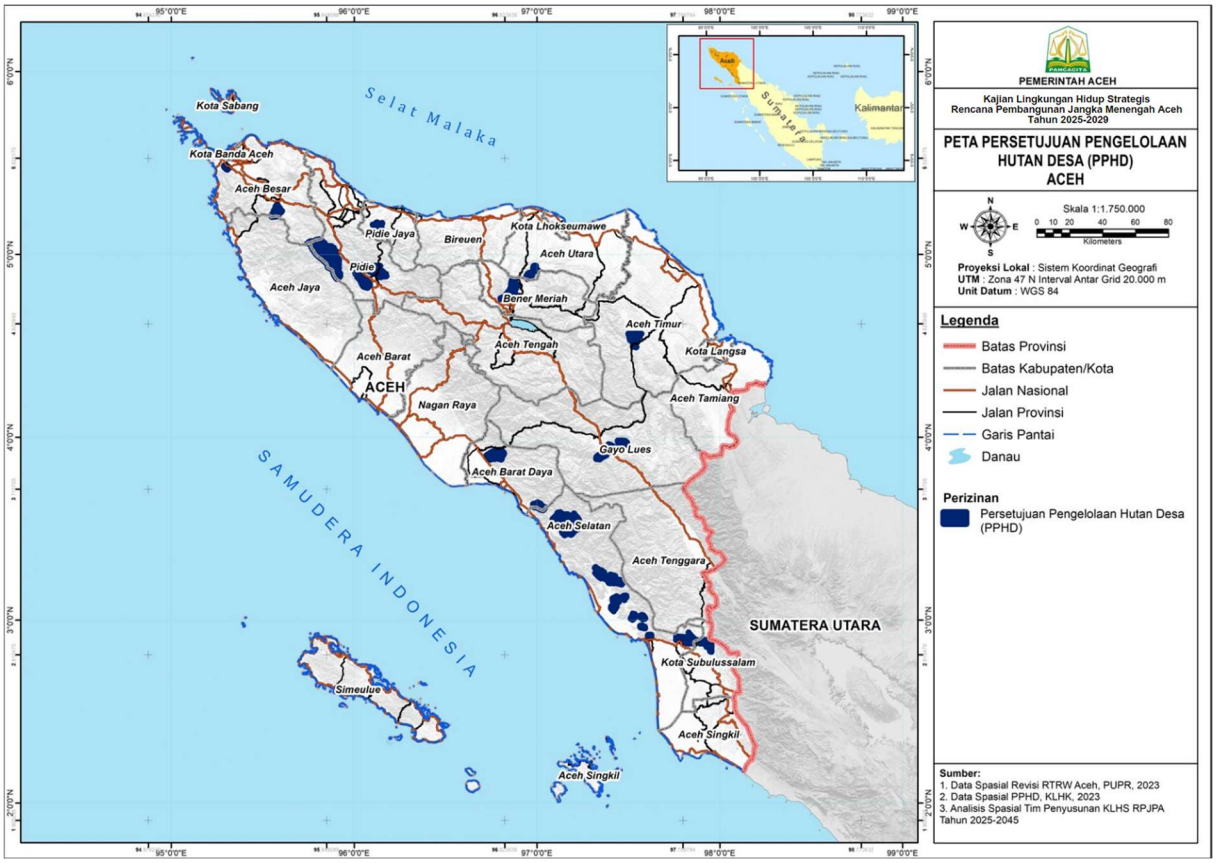
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-II/2014 lebih lanjut mengatur tentang Hutan Desa mengatur tentang HD, yaitu hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, yaitu yang diberikan pada: a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan/atau c. wilayah tertentu dalam KPH. Permintaan untuk mengelola hutan desa bisa diajukan oleh koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Aturan ini juga mengatur cara pengelolaannya, dengan menyatakan bahwa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), yang disingkat sebagai HPHD, adalah hak untuk mengelola kawasan hutan lindung atau produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Peraturan ini juga menetapkan bahwa Lembaga Pengelola Hutan Desa (Lembaga Desa) adalah lembaga di desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Hutan Desa.

Tabel 2.31.
Badan Hukum Pengelolaan HD dan Luasnya di Aceh 2023

No.	Nama Lembaga Desa	Kabupaten/Kota	Luas PPHD (Ha)
1	LPHD PINTO RIMBA	Pidie Jaya	1.139
2	LPHD LEMBAH BIRU	Pidie Jaya	1.088
3	LPHD NAMUEK PANGMALEM BLANG RAWEU	Pidie	1.048
4	LPHD PUTRO IJO	Pidie	2.271
5	LPHD/K BALE PURNAMA	Bener Meriah	1.168
6	LPHD/K BENER PEPANYI	Bener Meriah	701
7	LPHD/K GEMBULO BERKAH	Gayo Lues	1.276
8	LPHD/K KEPIES	Bener Meriah	88
9	LPHD/K WAQ PONDOK SAYUR	Bener Meriah	813
10	LPHD/K BALE REDELONG	Bener Meriah	828
11	LPHD/K PALOK SEPAKAT	Gayo Lues	320
12	LPHD GAMPONG KAYE ACEH	Aceh Barat Daya	1.631
13	LPHD/G PULO MEURIA	Aceh Utara	1.428
14	LPHD/G GUNONG KAYEE PEUT SAGOE	Pidie	7.944
15	LPHD/G SINGGAHMATA	Pidie	6.992
16	LPHD/G KAPA SEUSAK	Aceh Selatan	1.809
17	LPHD/K BLANG TEMUNG	Gayo Lues	1.331
18	LPHD LEMBAH PUNCAK TUDOENG	Pidie	4.315
19	LPHD JANTHO LEMBAH GAHARU	Aceh Besar	2.344
20	LPHD/G JAMBOPAPEUN	Aceh Selatan	13.594
21	LPHD ALUE JEUREUJAK	Aceh Barat Daya	4.239
22	LPHD DURIAN KAWAN	Aceh Selatan	699
23	LPHD/K PASIR BELO	Kota Subulussalam	1.123
24	LPHD/K DAMARAN BARU	Bener Meriah	251
25	LPHD/G BUNIN	Aceh Timur	2.698
26	LPHD RIMUENG TUHAN	Aceh Besar	206
27	LPHD PUCUK LEMBANG	Aceh Selatan	1.826
28	LPHD GUNONG TGK DI MANE	Pidie	4.620
29	LPHD KOTO INDARUNG	Aceh Selatan	1.207
30	LPHD/G SIURAI URAI	Aceh Selatan	1.078
31	LPHD/G KAMPUNG SAWAH	Aceh Selatan	1.330
32	LPHD/G JAMBO DALEM	Aceh Selatan	1.930
33	LPHD KAMPONG TEUNGOH	Aceh Selatan	400
34	LPHD LATONG BERSAMA GAMPONG ALURDUAMAS	Aceh Selatan	782
35	LPHD/G KAMPUNG PADANG	Aceh Selatan	1.071
36	LPHD/G LADANG BARO KEURANJI BLANDEH	Aceh Selatan	590
Total			**76.178**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Sebanyak 12 desa (48 persen) yang memiliki izin pengelolaan HD saat ini berada pada sejumlah desa di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu dengan luas sekitar 26 ribu hektar. Namun HD yang paling luas saat ini adalah di Kabupaten Pidie, yaitu sebesar 27 ribu hektar yang berada di 6 desa (11,5 persen), sebagaimana dapat disajikan pada **Tabel 2.31** dan sebaran hutan desa pada **Gambar 2.39**.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Gambar 2.39. Sebaran Hutan Desa (HD) Aceh

C8. Perubahan Iklim

C8.1. Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

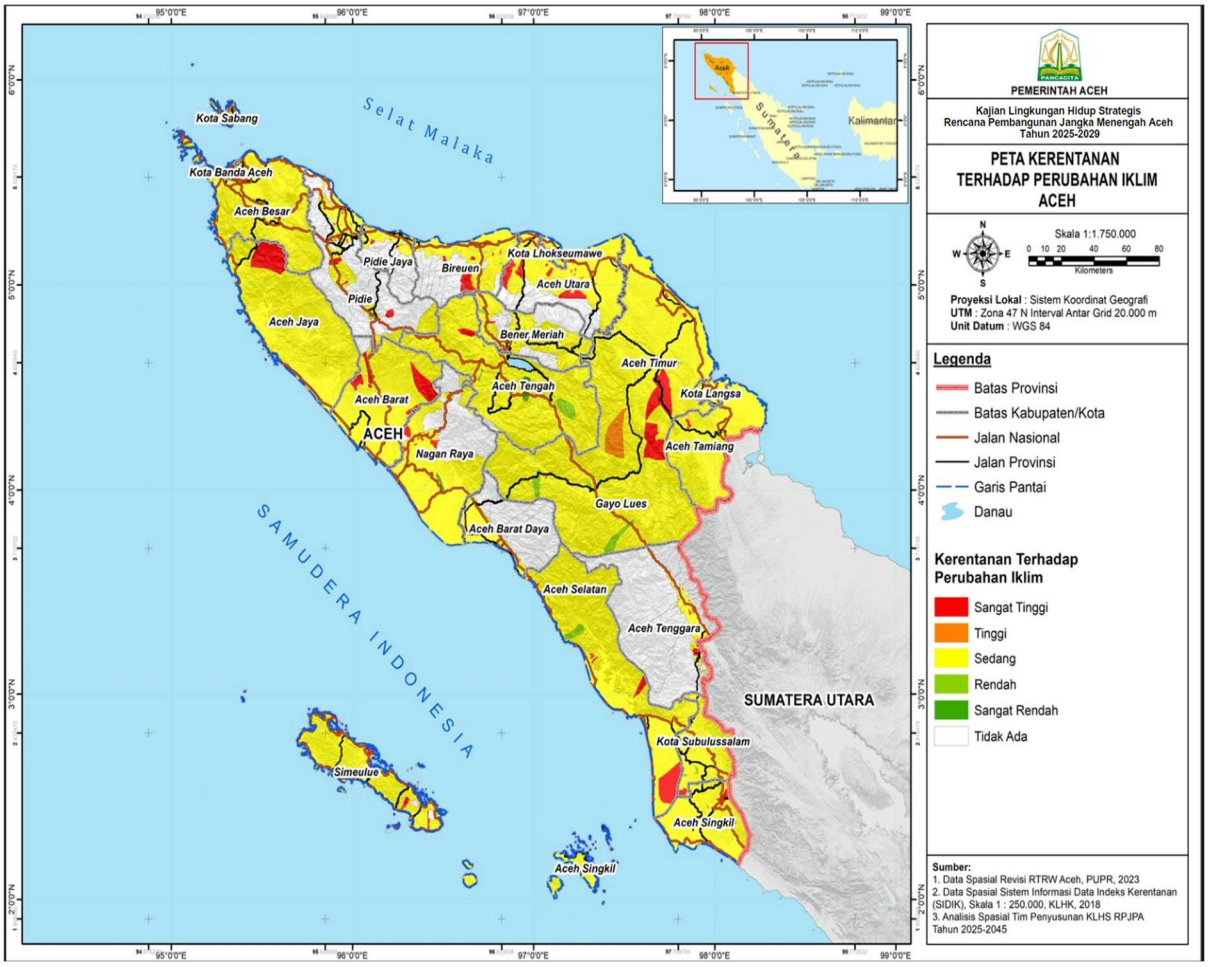
SIDIK merupakan suatu indeks yang memperlihatkan hubungan antara Indek Keterpaparan dan Sensitifitas (IKS) dan Indek Kapasitas Adaptif (IKA). Untuk wilayah Provinsi Aceh, kerentanan iklim berdasarkan SIDIK didominasi berada pada kerentanan sedang dengan luasan 4,279,555.30 ha atau sekitar 75.30 persen dari total luasan wilayah Provinsi Aceh, sekitar 20 persen (1,140,135.41 ha) wilayah Aceh berada dalam kondisi tidak rentan, dan sekitar 3.40 persen (193,371.18 ha) berada dalam kondisi kerentanan iklim sangat tinggi. Untuk kategori kerentanan iklim sangat tinggi ini, Kabupaten Aceh Timur memiliki luasan tertinggi dengan 33,355.63 ha (17.25%), diikuti Kabupaten Aceh Jaya sebesar 28,736.60 ha (14.86%) dan Kabupaten Aceh Selatan sebesar 26,438.89 ha (13.67%).

Tabel 2.32.
Data SIDIK Aceh

Kabupaten/ Kota	Kerentanan Iklim (Data SIDIK)						Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Rentan	
Aceh Barat	-	-	249.497,09	-	26.427,06	2.363,15	278.287,30
Aceh Barat Daya	-	539,65	50.182,60	-	644,50	136.823,49	188.190,24
Aceh Besar	48,07	-	286.924,37	96,02	931,40	1.147,68	289.147,54
Aceh Jaya	138,22	7,93	356.044,21	-	28.736,60	2.308,29	387.235,25

Kabupaten/ Kota	Kerentanan Iklim (Data SIDIK)						Luas (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Rentan	
Aceh Selatan	0	6.458,09	383.990,03	-	26.438,89	680,10	417.567,12
Aceh Singkil	-	-	179.666,04	-	5.682,33	-	185.348,36
Aceh Tamiang	-	-	217.349,78	340,82	1.080,67	-	218.771,28
Aceh Tengah	5.475,15	10.614,76	417.661,33	-	3.466,36	9.624,15	446.841,74
Aceh Tenggara	-	530,18	33.995,50	-	3.027,41	380.359,24	417.912,32
Aceh Timur	-		485.335,70	22.164,61	33.355,63	44,10	540.900,05
Aceh Utara	-	33,53	187.757,03	-	20.377,35	62.357,44	270.525,36
Bener Meriah	-	2.437,57	123.435,51	-	1.593,51	63.273,34	190.739,93
Bireuen	21,74	495,55	94.556,84	-	9.467,94	75.157,17	179.699,24
Gayo Lues	-	14.226,93	525.246,87	123,23	11.099,05	3.432,38	554.128,46
Banda Aceh	45,46	-	5.623,60	-	7,91	-	5.676,96
Langsa	53,92	-	22.382,79	-	-	-	22.436,71
Lhokseumawe	-	-	12.450,65	-	0,40	846,32	13.297,37
Sabang	-	869,11	11.259,42	-	-	38,57	12.167,10
Subulussalam	-	1.169,14	115.094,98	-	2.050,86	45,11	118.360,08
Nagan Raya	1.536,51	38,67	230.821,26	-	5.452,54	114.525,90	352.374,88
Pidie	-	1.527,30	94.196,06	-	6.979,87	215.049,61	317.752,84
Pidie Jaya	-	146,22	24.169,85	-	800,51	68.784,31	93.900,90
Simeulue	-	1.239,34	171.913,79	-	5.750,41	3.275,05	182.178,59
Total Luas (Ha)	**7.319,06**	**40.333,97**	**4.279.555,30**	**22.724,68**	**193.371,18**	**1.140.135,41**	**5.683.439,61**

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, 2023



Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, 2023

Gambar 2.40. Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim (SIDIK) Aceh

C8.2. PIPPIB

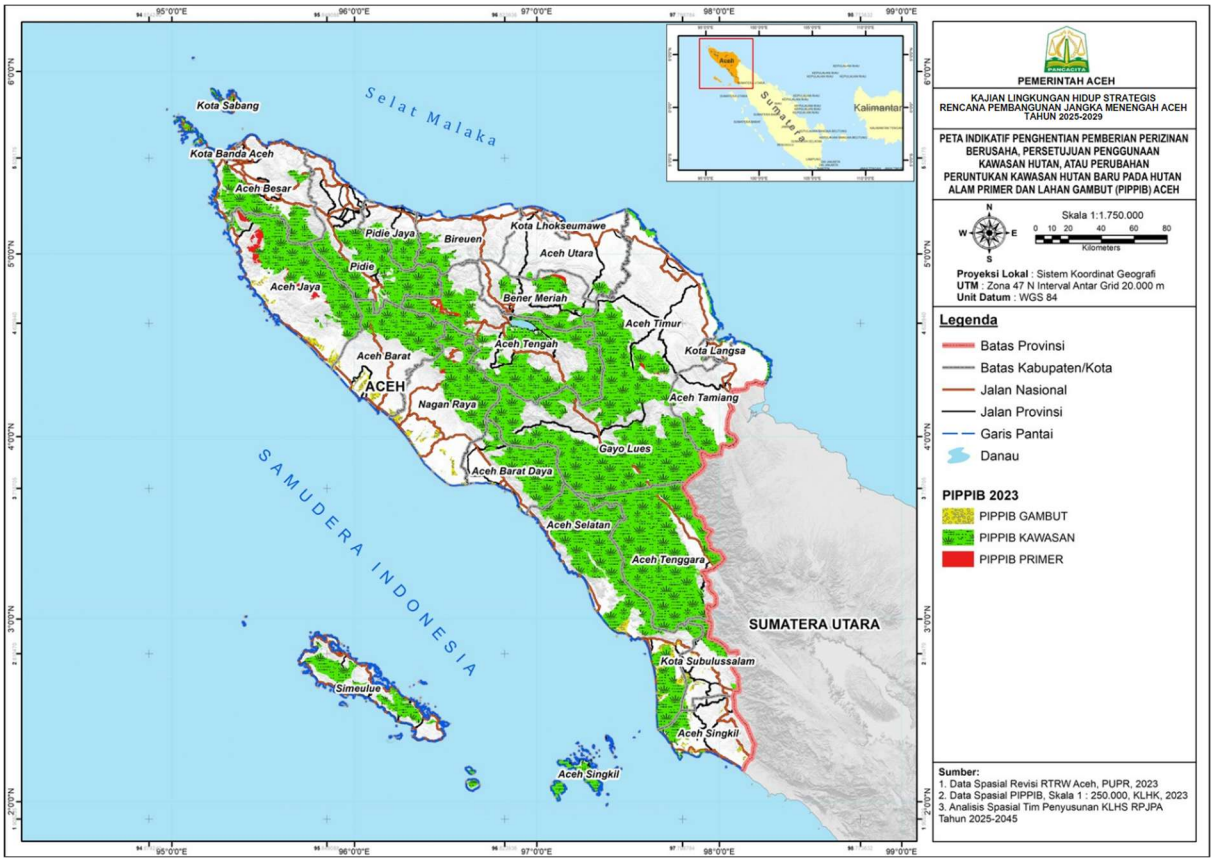
PIPPIB adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang menghentikan pemberian izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan ini terdiri dari tiga kategori utama, yaitu PIPPIB Kawasan, PIPPIB Gambut, dan PIPPIB Primer. Tujuan dari PIPPIB adalah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam tata kelola hutan dan lahan gambut, serta menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. PIPPIB merupakan langkah berkelanjutan untuk melindungi hutan alam primer dan lahan gambut, serta terus mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.

Berdasarkan **Tabel 2.33** dapat diketahui bahwa PIPBIB kawasan seluas 2.637.788,58 Ha atau sebesar 96,92 persen dari luas total PIPPIB Aceh 2.721.560,92 Ha, berikutnya PIPPIB Gambut seluas 61.080,24 Ha (2,24 %), dan PIPPIB Primer seluas 22.692,10 Ha (0,83). Berdasarkan kabupaten/kota di Aceh, PIPPIB Gambut terluas terdapat di Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Selanjutnya, PIPPIB Primer terluas terdapat di Aceh Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Nagan Raya. Sementara PIPPIB Kawasan tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh kecuali Banda Aceh dan Lhokseumawe.

Tabel 2.33.
Luas PIPPIB Periode I Aceh

Kabupaten/ Kota	Kategori PIPPIB			Luas Total PIPPIB (Ha)
	PIPPIB Gambut	PIPPIB Kawasan	PIPPIB Primer	
Aceh Barat	12.800,85	105.101,37	-	117.902,22
Aceh Barat Daya	2.346,62	112.214,75	18,30	114.579,67
Aceh Besar	-	95.517,98	0,52	95.518,51
Aceh Jaya	10.676,23	169.620,47	14.286,34	194.583,05
Aceh Selatan	14.794,58	288.728,97	5,78	303.529,34
Aceh Singkil	4.073,21	47.839,92	4,06	51.917,19
Aceh Tamiang	-	51.483,33	36,95	51.520,28
Aceh Tengah	-	270.720,56	3.268,80	273.989,35
Aceh Tenggara	-	367.024,38	4,63	367.029,01
Aceh Timur	-	172.111,97	1.022,96	173.134,93
Aceh Utara	-	7.936,68	-	7.936,68
Bener Meriah	-	67.710,25	2.196,77	69.907,02
Bireuen	-	31.008,36	234,63	31.243,00
Gayo Lues	-	421.987,87	228,99	422.216,86
Kota Langsa	-	1.213,74	-	1.213,74
Kota Sabang	-	4.466,41	-	4.466,41
Kota Subulussalam	4.802,16	23.757,79	-	28.559,95
Nagan Raya	11.586,59	121.403,48	1.287,14	134.277,21
Pidie	-	170.733,15	96,22	170.829,38
Pidie Jaya	-	48.577,77	-	48.577,77
Simeulue	-	58.629,35	-	58.629,35
Total Luas (Ha)	**61.080,24**	**2.637.788,58**	**22.692,10**	**2.721.560,92**

Sumber: SK.3554/MENLHK-PKTL/PLA.13/2023



Sumber: SK.3554/MENLHK-PKTL/PLA.13/2023

Gambar 2.41. Peta PIPPIB Aceh

C8.3. Tutupan Lahan

Luas tutupan lahan di Aceh Tahun 2022 sebesar 5.683.439,61 Ha. Hutan lahan kering primer seluas 2.054.541,38 Ha atau 36,15 % dari luas total tutupan lahan Aceh sebesar 5.683.439,61 Ha. Tutupan lahan kering primer ini menjadi jenis tutupan lahan terluas dibandingkan jenis tutupan lahan lainnya. Selanjutnya, secara berturut-turut jenis tutupan lahan perkebunan seluas 954.668,43 Ha (16,80 %), hutan lahan kering sekunder seluas 826.393,37 Ha (14,54 %), belukar seluas 490.055,67 Ha (8,62 %), dan pertanian lahan kering campuran seluas 394.377, 24 Ha (6,94 %).

Tabel 2.34.
Luas Tutupan Lahan di Aceh

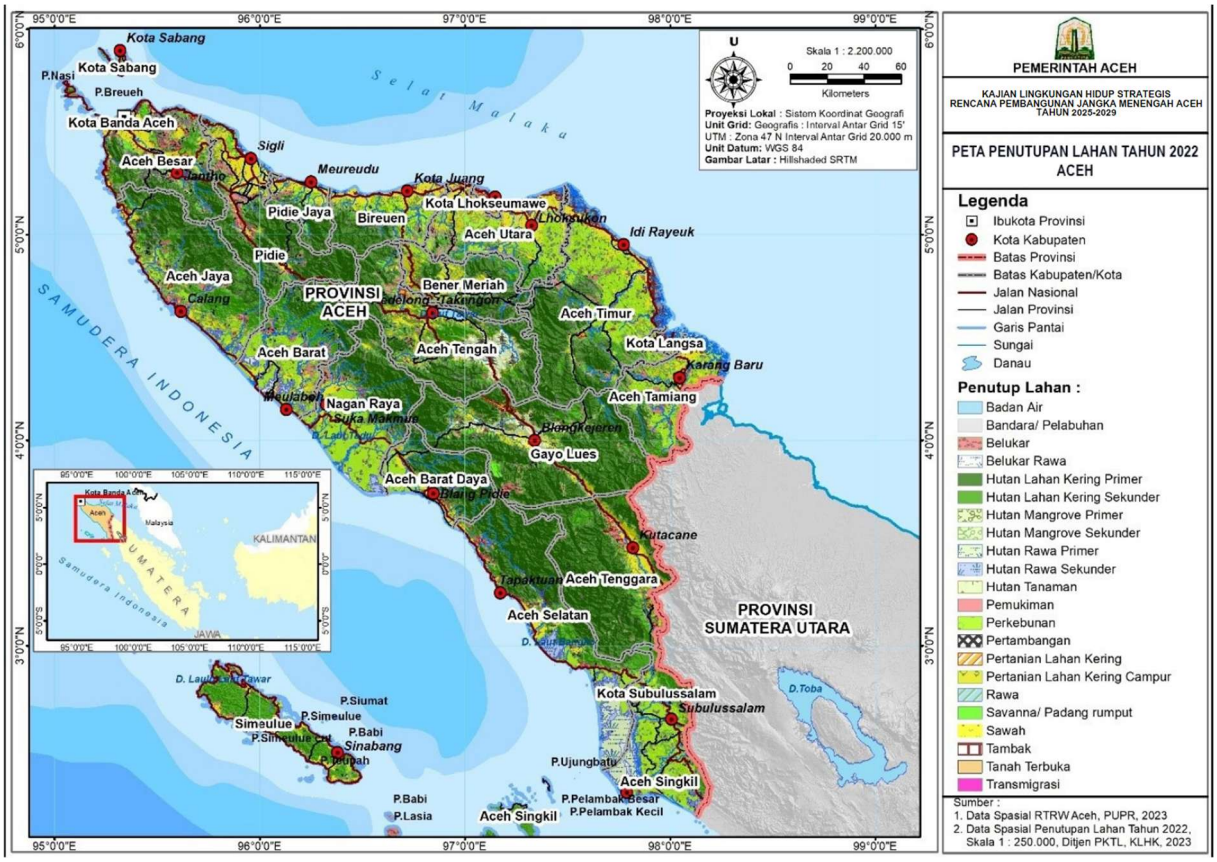
Penutup Lahan 2022	Luas (Ha)
Badan Air	36.429,85
Bandara / Pelabuhan	939,11
Belukar	490.055,67
Belukar Rawa	47.767,83
Hutan Lahan Kering Primer	2.054.541,38
Hutan Lahan Kering Sekunder	826.393,37
Hutan Mangrove Primer	271,55

Penutup Lahan 2022	Luas (Ha)
Pemukiman	153.644,71
Perkebunan	954.668,43
Pertambangan	2.022,30
Pertanian Lahan Kering	74.697,43
Pertanian Lahan Kering Campur	394.377,24
Rawa	2.092,39
Savanna/ Padang rumput	70.621,04

Penutup Lahan 2022	Luas (Ha)
Hutan Mangrove Sekunder	22.497,02
Hutan Rawa Primer	65.813,43
Hutan Rawa Sekunder	35.843,31
Hutan Tanaman	128.053,38

Penutup Lahan 2022	Luas (Ha)
Sawah	209.046,39
Tambak	71.763,10
Tanah Terbuka	39.644,87
Transmigrasi	2.255,84
Total Luas (Ha)	**5.683.439,61**

Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, KLHK 2023



Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, KLHK 2023

Gambar 2.42. Peta Penutupan Lahan di Aceh

C8.4. *Forestry and Other Land Use* (FOLU) NET SINK 2030

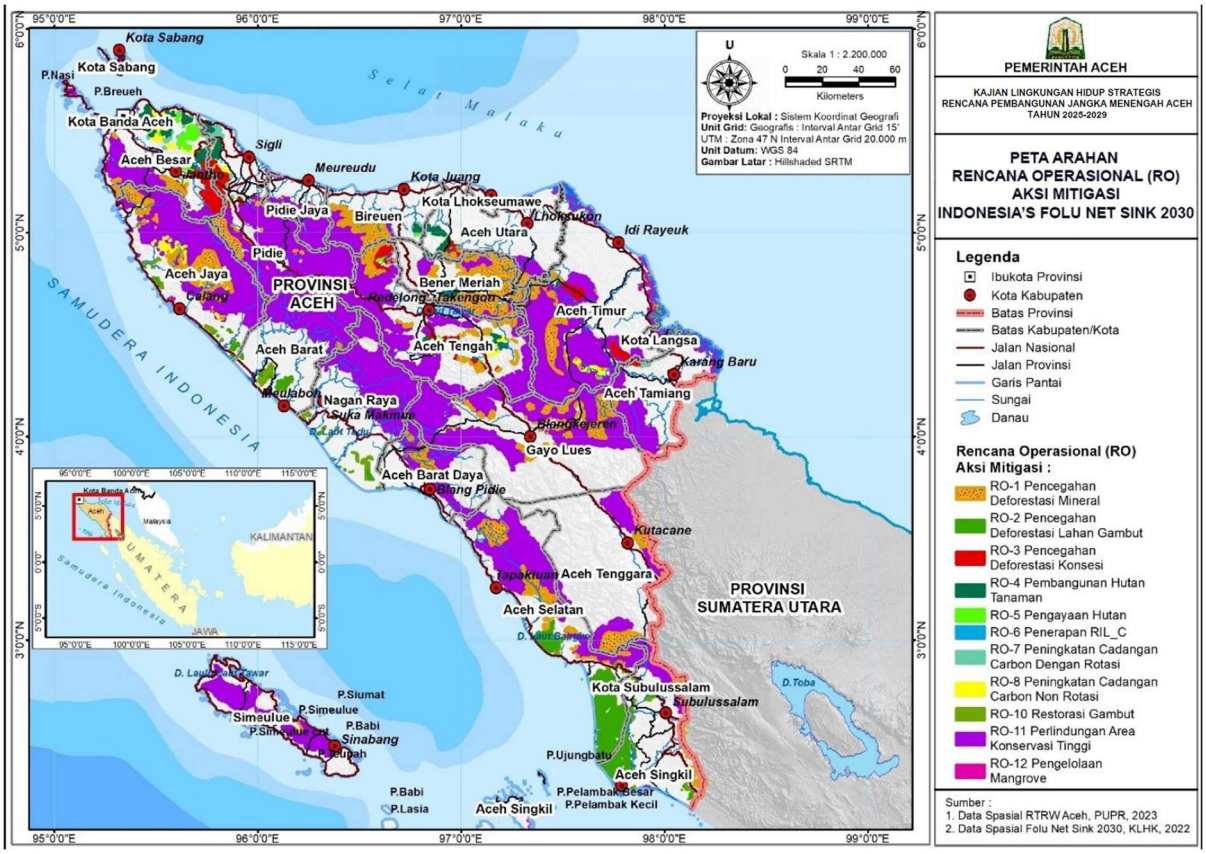
Konteks perubahan iklim dan kebijakan lingkungan, istilah "FOLU Net Sink" merujuk pada situasi di mana karbon dioksida yang diserap oleh hutan dan penggunaan lahan lainnya melebihi jumlah yang dilepaskan ke atmosfer. Targetnya adalah mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya secara netto berfungsi sebagai penyerap karbon pada Tahun 2030. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca dan memerangi pemanasan global di Aceh. Upaya untuk mencapai status "FOLU Net Sink" dapat meliputi penanaman kembali hutan, restorasi ekosistem yang rusak, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan praktik pertanian yang mendukung penyerapan karbon. Langkah-langkah ini sering menjadi bagian dari komitmen negara-negara dalam kontribusi mereka terhadap perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.

FOLU NET SINK 2030 adalah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dengan tingkat serapan karbon lebih tinggi dari emisi pada Tahun 2030. Dalam konteks Provinsi Aceh, Rencana Operasional (RO) yang terkait dengan Perlindungan Area Konservasi Tinggi memiliki peran utama dalam aksi mitigasi ini, dengan luas wilayah yang signifikan. Misalnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki luas terbesar di antara lainnya. Selain itu, Aceh juga didominasi oleh RO lainnya seperti Pencegahan Deforestasi Mineral dan Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut, yang juga memiliki luas wilayah yang cukup besar."

Tabel 2.35.
Folu Net Sink RO1 s/d RO 12 Aceh

Kabupaten/Kota	RO-1 Pencegahan Deforestasi Mineral	RO-2 Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut	RO-3 Pencegahan Deforestasi Konsesi	RO-4 Pembangunan Hutan Tanaman	RO-5 Pengayaan Hutan	RO-6 Penerapan RIL-C	RO-7 Peningkatan Cadangan Carbon Dengan Rotasi	RO-8 Peningkatan Cadangan Carbon Non Rotasi	RO-10 Restorasi Gambut	RO-11 Perlindungan Area Konservasi Tinggi	RO-12 Pengelolaan Mangrove
Aceh Barat	456,76	1.477,65	-	-	-	-	-	-	4.282,70	106.840,09	364,35
Aceh Barat Daya	10.399,78	77,98	-	-	-	-	-	-	112,90	46.155,66	-
Aceh Besar	5.792,95	0	17.094,91	5.491,59	7.332,83	7.240,13	1.817,36	18.735,46	-	-	-
Aceh Jaya	28.571,38	566,71	-	-	-	-	-	10.407,23	2.033,00	199.537,17	209,25
Aceh Selatan	28.283,44	64.231,59	-	-	-	-	-		4.439,30	130.531,35	-
Aceh Singkil	3.468,94	18.208,03	-	-	-	-	-	33,01	1.430,11		1.261,80
Aceh Tamiang	1.089,57	-	584,00	2,09	6,15		295,74	1.272,17	-	45.040,95	11.319,78
Aceh Tengah	18.534,75	-	8.638,49	1.266,87	1.448,46	639,50	250,04	7.097,57	-	151.025,03	-
Aceh Tenggara	22.210,59	-	-	-	-	-	-	-	-	51.326,86	-
Aceh Timur	20.687,08	-	5.968,23	20,64	594,41		152,00	3.104,51	-	200.011,88	6.368,41
Aceh Utara	7.935,42	-	2.837,53	2.823,17	1.628,86	418,25	778,38	1.917,49	-	12.299,27	92,75
Bener Meriah	61.368,88	-	2.361,24	4.054,81	18,65	11,34	3.466,76	1.141,50	-	31.445,12	-
Bireuen	27.431,90	-		901,82	219,12	219,12	1.048,27	241,92	-	32.505,26	-
Gayo Lues	25.421,80	-	-	-	-	-	-	-	-	210.304,70	-
Kota Banda Aceh		-	-	-	-	-	-	-	-	0	48,86
Kota Langsa	100,55	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4.699,25
Kota Lhokseumawe		-	-	-	-	-	-	-	-	0	15,59
Kota Sabang	733,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433,42	9,61
Kota Subulussalam	2.905,34	2.943,21	-	-	-	-	-	-	473,63	22.120,23	-
Nagan Raya	5,07	875,72	-	-	-	-	-	-	2.785,75	132.788,77	-
Pidie	13.287,83		8.283,19	3.884,59	360,75	171,91	3.842,71	3.178,53		154.820,16	55,34
Pidie Jaya	836,56	-	-	-	-	-	-	-	-	49.107,84	92,77
Simeulue	82,38	-	-	-	-	-	-	-	-	52.481,30	1.405,81
Total Luas (Ha)	**279.604,75**	**88.380,88**	**45.767,59**	**18.445,58**	**11.609,23**	**8.700,25**	**11.651,26**	**47.129,37**	**15.557,38**	**1.678.587,95**	**25.987,93**

Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, 2023



Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, 2023

Gambar 2.43. Peta *Folu Net Sink* Aceh

C9. Biodiversitas

C9.1. Kawasan Hutan

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan berdasarkan SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 menyatakan bahwa Aceh memiliki Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan seluas ± 3.550.344,54 Ha. Kawasan Hutan/Klasifikasi Fungsi Hutan Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.36**.

Tabel 2.36.
Luas Kawasan Hutan di Aceh

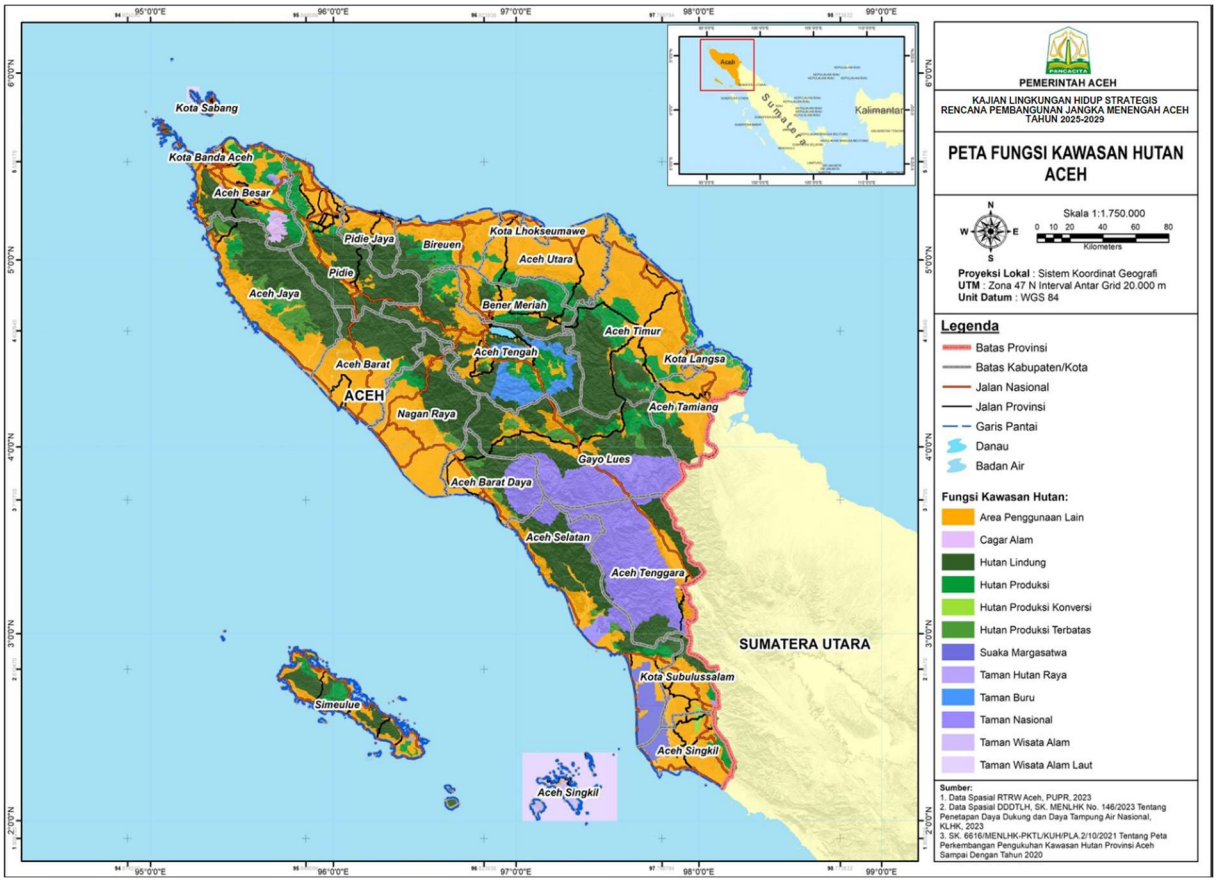
Kawasan Fungsi Hutan	Luas (Ha)
Cagar Alam	15.626,83
Hutan Lindung	1.784.072,82
Hutan Produksi	550.176,33
Hutan Produksi Konversi	15.337,47
Hutan Produksi Terbatas	141.730,05
Suaka Margasatwa	81.832,84

Kawasan Fungsi Hutan	Luas (Ha)
Taman Buru	86.324,13
Taman Hutan Raya	8.624,43
Taman Nasional	625.224,73
Taman Wisata Alam	30.188,46
Taman Wisata Alam Laut	211.206,45
Total Luas (Ha)	**3.550.344,54**

Sumber : SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Menurut data yang tertera dalam tabel, dapat diketahui bahwa luas total kawasan hutan di Aceh mencapai 3.550.344,54 hektar, yang setara dengan 58,8 persen luas wilayah daratan Aceh. Dari kawasan hutan tersebut, kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Aceh terdiri dari Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) dengan total

luas mencapai 2.527.633 hektar. Secara fungsional, mayoritas kawasan hutan di Aceh merupakan Hutan Lindung, mencapai sekitar ±1.784.072,82 hektar (atau sekitar 50,18 persen). Selain itu terdapat kawasan konservasi Tahura Pocut Meurah Intan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie seluas 6.200 hektar, Tahura Lae Kombih terletak di Kota Subulussalam seluas 1.483 hektar, dan Tahura Simeulu terletak di Kabupaten Simeulue seluas 918 hektar.

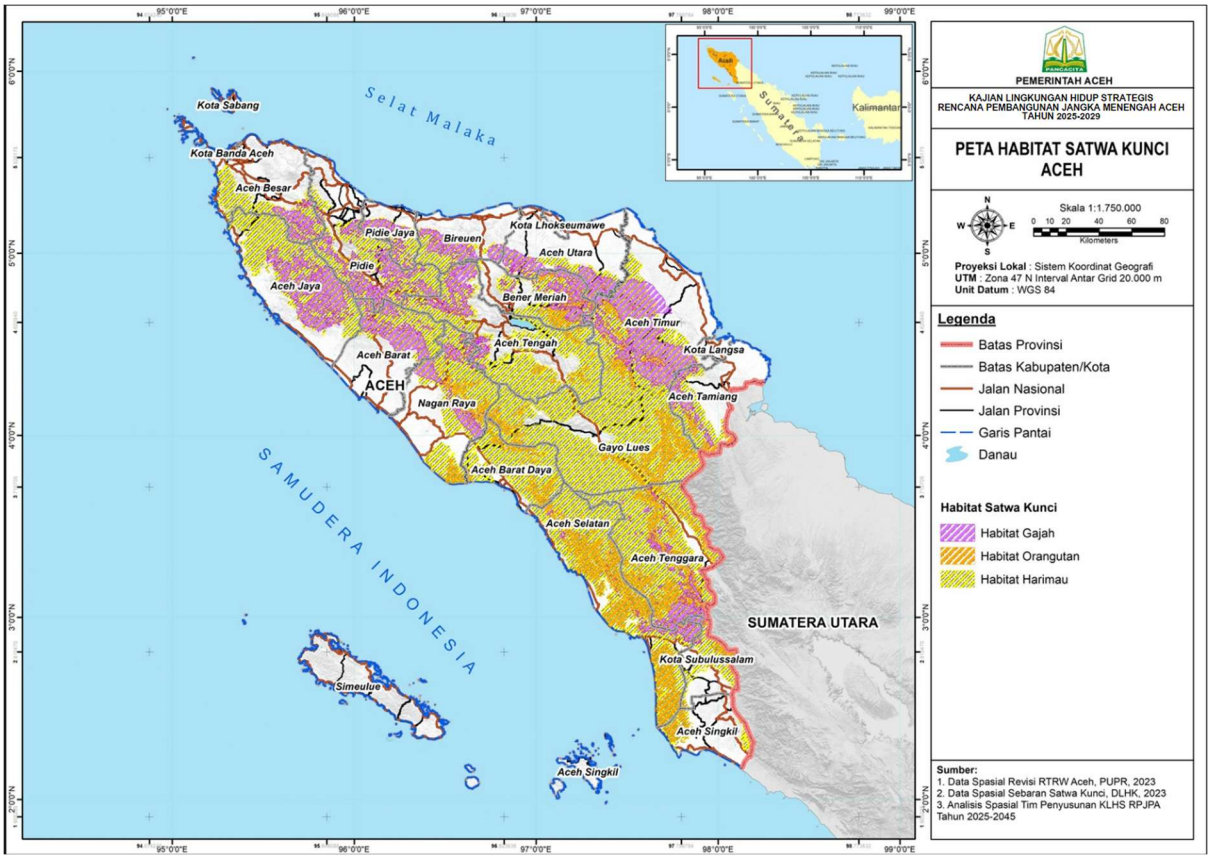


Sumber : SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Gambar 2.44. Peta Kawasan Hutan di Aceh

C9.2. *Home Range* Satwa (Koridor Satwa)

Wilayah bergerak (home range) di Aceh terdiri atas wilayah bergerak berupa satwa seperti orangutan, harimau, dan gajah. Orangutan memiliki wilayah gerak di 17 kabupaten/kota, dengan wilayah terluas terletak di Kabupaten Aceh Timur mencapai 175.651,91 hektar (Ha), dan yang terkecil di Kabupaten Gayo Lues hanya 8,42 Ha. Sementara itu, wilayah bergerak harimau terdapat di 18 kabupaten/kota, dengan luas terbesar di Kabupaten Gayo Lues mencapai 508.709,16 Ha, dan yang terkecil di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 33.879,12 Ha. Terakhir, wilayah bergerak gajah tersebar di 12 kabupaten/kota, dengan wilayah terluas berada di Kabupaten Aceh Selatan mencapai 163.571,53 Ha, dan yang terkecil di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 11.288,37 Ha. Informasi tentang luas dan distribusi sebaran wilayah bergerak satwa kunci di Aceh tercantum dalam **Gambar 2.45** dan **Tabel 2.37**.



Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2023

Gambar 2.45. Peta Home Range Satwa Aceh

Tabel 2.37.
Home Range Satwa di Aceh

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)		
	Habitat Orang Utan	Habitat Harimau	Habitat Gajah
Aceh Barat	-	124.352,73	53.882,23
Aceh Barat Daya	27.060,48	164.400,75	30,09
Aceh Besar	-	100.800,92	22.732,15
Aceh Jaya	-	270.293,56	96.876,68
Aceh Selatan	163.441,65	373.287,07	18.463,18
Aceh Singkil	17.576,38	33.879,12	-
Aceh Tamiang	12.918,70	82.377,55	-
Aceh Tengah	12.142,53	326.318,95	45.017,71
Aceh Tenggara	123.529,76	390.432,71	42.860,01
Aceh Timur	37.274,55	327.587,79	175.342,98
Aceh Utara	10.974,48	74.815,73	48.306,43
Bener Meriah	37.229,12	128.406,12	42.701,37
Bireuen	-	71.727,11	38.199,31
Gayo Lues	-	508.709,16	8,43
Kota Banda Aceh	-	-	-
Kota Langsa	-	-	-
Kota Lhokseumawe	-	-	-
Kota Sabang	-	-	-
Kota Subulussalam	14.062,03	67.597,17	5.875,17
Nagan Raya	35.551,42	216.254,31	42.515,18

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)		
	Habitat Orang Utan	Habitat Harimau	Habitat Gajah
Pidie	0	198.330,17	64.827,51
Pidie Jaya	0	61.147,60	17.892,97
Simeulue	0	0	0
Total Luas (Ha)	**568.033,22**	**3.520.718,51**	**735.784,59**

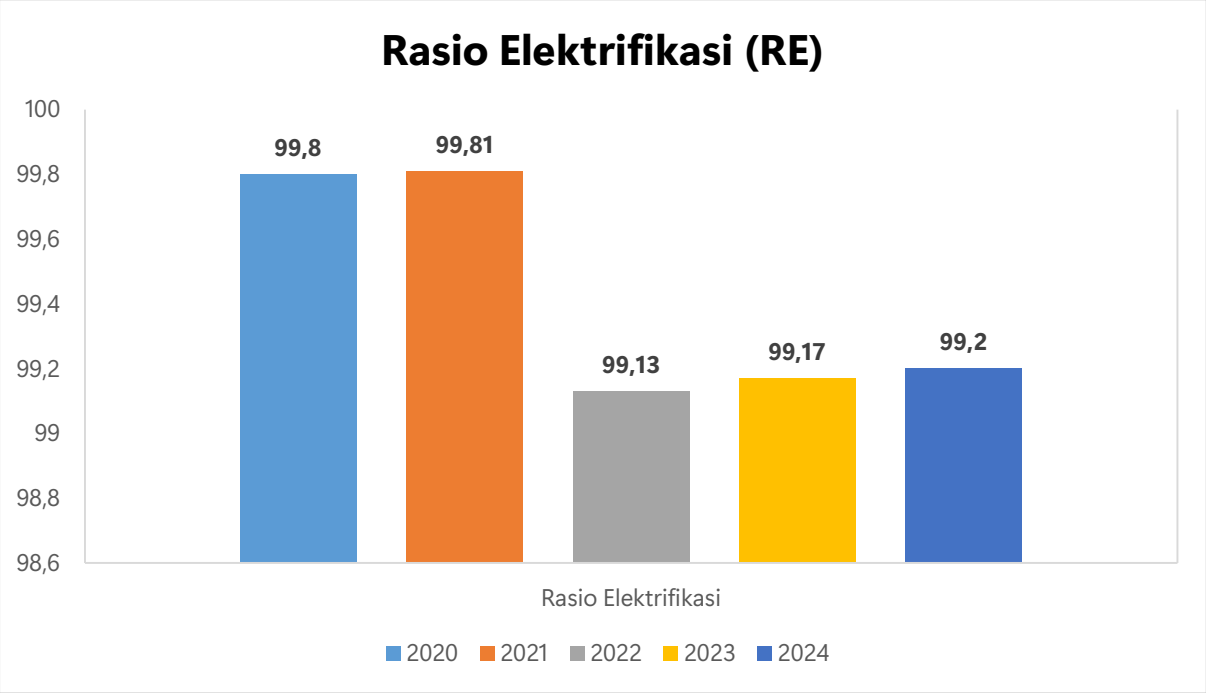
Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2023

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan memuat seperti:

A. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Perkembangan elektrifikasi di Aceh menunjukkan tren yang positif dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah menikmati akses listrik. Sejak Tahun 2020 hingga 2024, rasio elektrifikasi (RE) berada pada kisaran di atas 99 persen, mencerminkan tingkat akses energi listrik yang sudah sangat luas di seluruh wilayah. Pada Tahun 2020 rasio elektrifikasi tercatat sebesar 99,8 persen, meningkat tipis pada 2021 menjadi 99,81 persen. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi pada 2022 sebesar 99,13 persen, capaian kembali menguat pada 2023 sebesar 99,17 persen dan mencapai 99,2 persen pada 2024. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh dapat di lihat pada **Gambar 2.46**.



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, 2025

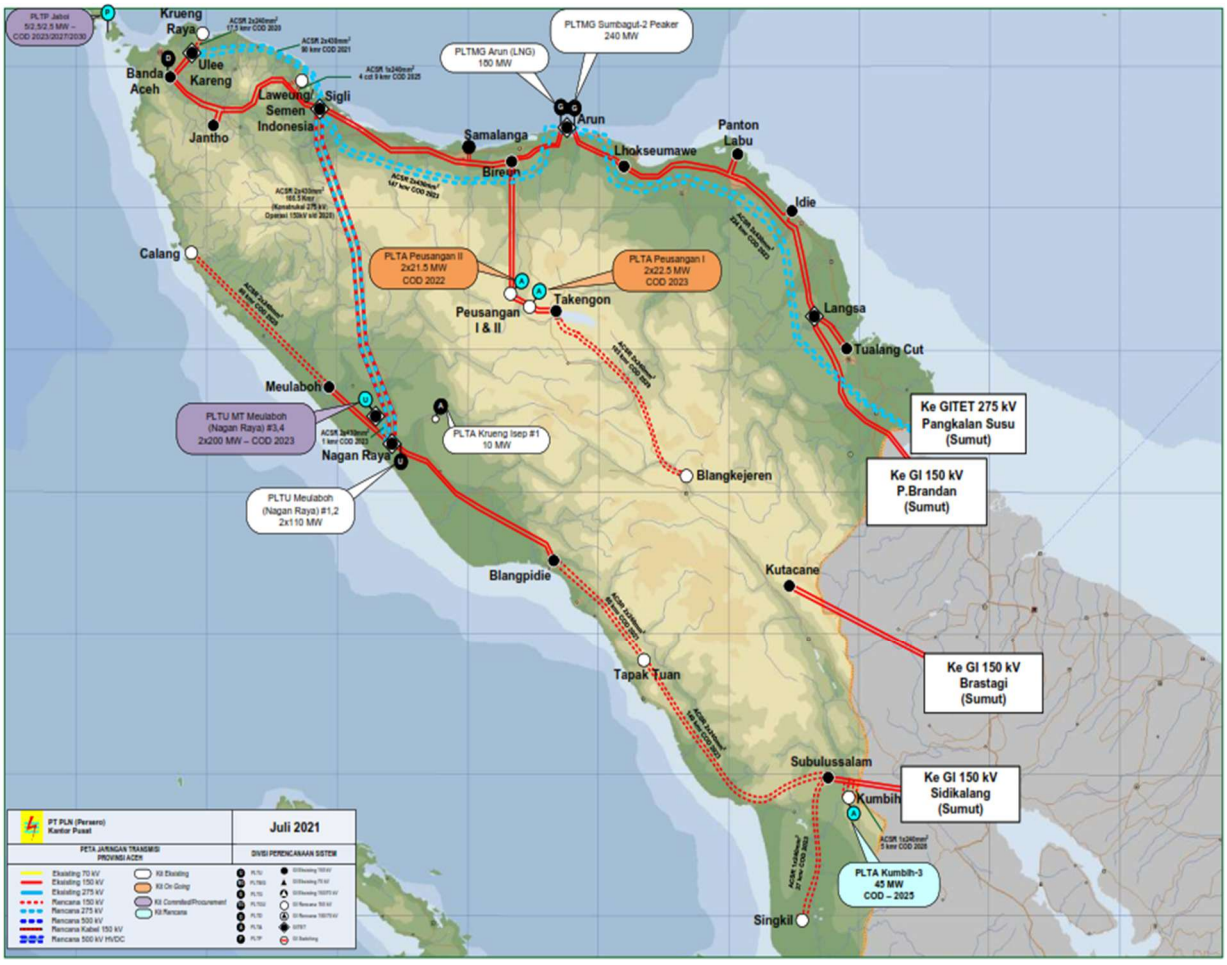
Gambar 2.46. Persentase Rumah tangga Berlistrik di Aceh Tahun 2020-2024

Hingga Tahun 2024, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Aceh tercatat sebanyak 1.534.855 rumah tangga. Capaian ini memperlihatkan bahwa energi listrik telah menjadi layanan dasar yang hampir sepenuhnya menjangkau masyarakat

Aceh. Keberhasilan ini juga didukung oleh pemanfaatan berbagai sumber energi, termasuk potensi energi terbarukan, serta program penyambungan listrik yang terus diperluas untuk memperkuat ketahanan dan ketersediaan energi. Dengan demikian, perkembangan elektrifikasi di Aceh menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

A1. Kapasitas Terpasang dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumbagut dan sistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumatera dan sebagian kecil masih berada di daerah isolated terutama untuk lokasi-lokasi di pulau terpisah. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi meliputi seluruh lokasi di Aceh (daratan), baik melalui jaringan 150kV ataupun 20kV. Beban puncak tertinggi Aceh Tahun 2020 bulan Oktober sebesar 542 MW. Peta sistem tenaga listrik Provinsi Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.47**.



Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Gambar 2.47. Peta Sistem Tenaga Listrik Provinsi Aceh

Pada sistem isolated 20 kV yang meliputi Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Sistem Blangkejeren (Gayo Lues), Sistem Takengon (Aceh Tengah) terdapat sewa genset untuk mensuplai sistem tersebut. Sistem Isolated di luar pulau Sumatera adalah Kota Sabang,

Sistem Sinabang (Simeulue) dan sistem kecil lainnya. Kapasitas pembangkit tenaga listrik eksisting, gardu induk dan Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada **Tabel 2.38** dan **Tabel 2.39**.

Tabel 2.38.
Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terkahir
PLN					
PLTU	Sumatera	2	220	140	136
PLTMG	Sumatera	32	424	401,5	407,2
	Sumatera	18	64,2	42,3	36,5
	Sinabang	18	13,8	9,1	9,1
PLTD	Sabang	15	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		72	735,8	601,6	597,5
IPP					
PLTD	Sumatera	2	23	15,7	7
PLTM	Sumatera	2	11	11,6	11,4
Jumlah IPP		4	34	27,3	18,4
Jumlah		76	769,8	628,9	615,9

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Kondisi sistem isolated 20 kV yang tersisa adalah sistem isolated di kepulauan seperti Sistem Sabang, Sistem Sinabang (Simeulue) dan system kecil lainnya juga masih dipasok oleh PLTD.

Tabel 2.39.
Realisasi Kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA)

No.	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unitt)	Total Kapasitas (MVA)
1	Alue Dua/ Langsa	150/20	2	90
2	Tualang Cut	150/20	3	110
3	Alue Batee/ Idi	150/20	2	50
4	Lhokseumawe	150/20	2	120
5	Bireuen	150/20	2	120
6	Sigli	150/20	2	90
7	Banda Aceh I / Lambaroe	150/20	3	180
8	Jantho	150/20	1	30
9	Pantonlabu	150/20	2	60
10	PLTU Nagan Raya	150/20	1	30
11	Arun	150/20	1	60
12	Meulaboh	150/20	2	90
13	Blang Pidie	150/20	1	30
14	Kutacane	150/20	1	30
15	Subulussalam	150/20	1	30
16	Takengon	150/20	1	30
17	Samalanga	150/20	1	30

No.	Nama GI	Tegangan (kV)	Jumlah Trafo (Unitt)	Total Kapasitas (MVA)
18	Ulee Kareeng	150/20	1	30
19	Krueng Raya	150/20	1	30
TOTAL			30	1240

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

A2. Persentase Daya Tersambung Per Sektor Pelanggan

Pada Tahun 2024 jumlah Pelanggan listrik sebanyak 1.791.668 pelanggan. Mengalami peningkatan sebanyak 67.308 pelanggan dibanding Tahun 2023 atau terjadi peningkatan sebesar 3,76% (persen). Adapun daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh Tahun 2023 sebesar 2.173.863MVA. Jumlah kelompok pelanggan PLN di Aceh terbesar adalah pelanggan kelompok rumah tangga dengan persentase 85.67 persen dengan jumlah pelanggan 1.534.855. Sedangkan Kelompok pelanggan paling rendah di sektor industri yaitu 0.26 persen dengan jumlah pelanggan 4.626 pelanggan. Seperti yang tersaji pada **Tabel 2.40**.

Tabel 2.40.
Jumlah Konsumen per Sektor Pelanggan Tahun 2024

Kelompok Pelanggan	Jumlah	Persentase
Rumah Tangga	1.534.855	85,67
Sosial	58.081	3,24
Bisnis	177.598	9,91
Industri	4.626	0,26
Pemerintah	16.192	0,90
Lain-lain	316	0,02
Jumlah	**1.724.360**	**100**

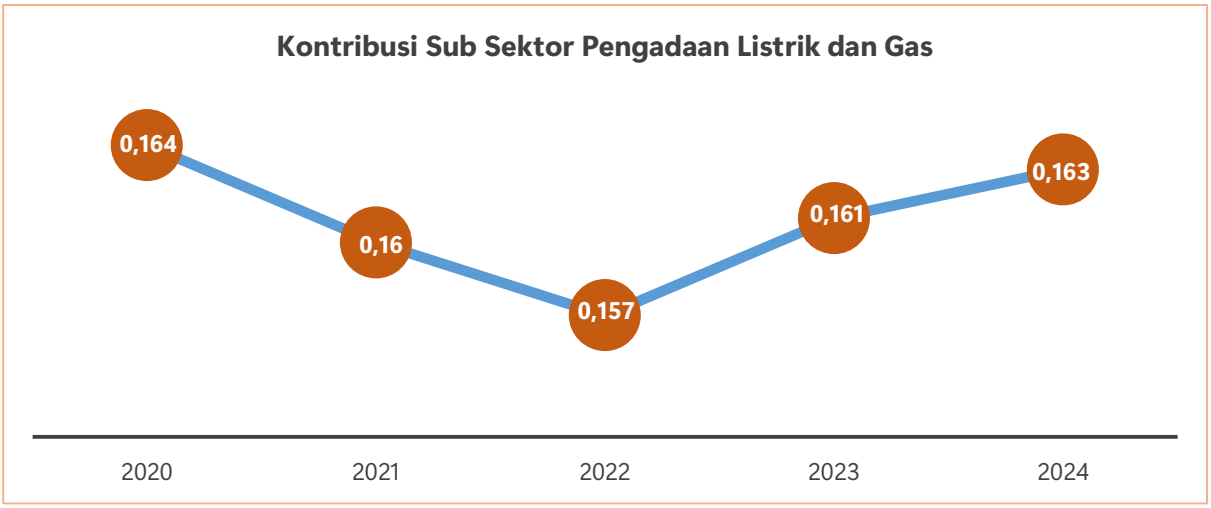
Sumber : PT.PLN(Persero) Wilayah Aceh, 2025

Adapun perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non PLN dengan jumlah rumah tangga total di Aceh menunjukkan nilai rasio ketersediaan daya listrik sebesar 99,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1.534.855 pelanggan rumah tangga, hanya terdapat 130 yang non PLN. Total daya terpasang pembangkit seluruh Aceh adalah sebesar 1.105 MW.

B. Energi dan Sumber Daya Mineral

B1. Kontribusi Sub Sektor Listrik dan Gas

Kontribusi subsektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Aceh pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, kontribusi subsektor ini tercatat sebesar 0,164 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,160 persen pada Tahun 2021, dan kembali menurun hingga 0,157 persen pada Tahun 2022. Meskipun demikian, sejak Tahun 2023 kontribusinya mulai meningkat menjadi 0,161 persen dan berlanjut naik menjadi 0,163 persen pada Tahun 2024 Sebagaimana tersaji pada **Gambar 2.48**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh. 2025

Gambar 2.48. Kontribusi Sub Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Tahun Tahun 2020-2024 (ADHK)

Pergerakan ini menggambarkan bahwa subsektor listrik dan gas tetap memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Aceh meskipun porsinya relatif kecil dibandingkan sektor lain. Stabilitas kontribusi subsektor ini mencerminkan terjaganya penyediaan energi bagi rumah tangga dan kegiatan ekonomi, yang secara tidak langsung mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya. Dengan demikian, subsektor listrik dan gas berperan strategis sebagai penopang utama bagi keberlangsungan aktivitas pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

B2. Pertambangan tanpa izin

Aceh memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara yang melimpah, khususnya komoditas emas, yang dapat menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas pertambangan emas di Aceh telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak Tahun 1930-an, dimulai dari aktivitas pendulangan emas di aliran sungai Krueng Kila dan Krueng Cut di Kabupaten Nagan Raya serta Krueng Woyla di Kabupaten Aceh Barat. Seiring waktu, kegiatan pertambangan ini semakin meluas dan berkembang di berbagai kabupaten lain di Aceh, terutama pada daerah yang memiliki kandungan emas potensial.

Sejumlah daerah di Aceh memiliki lokasi pertambangan emas yang cukup dikenal, antara lain di Kabupaten Aceh Barat pada aliran Sungai Emas, di Kabupaten Nagan Raya di sepanjang Krueng Kila dan Beutong, di Kabupaten Aceh Jaya di kawasan Gunung Ujeuen, di Kabupaten Pidie pada Kecamatan Geumpang dan Mane, di Kabupaten Aceh Selatan pada kawasan Manggamat, serta di Kabupaten Aceh Tengah pada Kecamatan Lumut.

Pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan secara tradisional terkosentrasi pada Kabupaten Pidie, Aceh Jaya dan Aceh selatan tersebar di berbagai areal kawasan, baik di areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat maupun di kawasan hutan produksi dan dan hutan

lindung, serta sebagian berada pada wilayah yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Berikut ini adalah table kejadian kecelakaan yang berada pada lokasi PETI

Tabel 2.41
Kejadian Kecelakaan di Lokasi PETI

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Uraian Kejadian	Jumlah Korban
1.	20-Jan-14	Desa Pulo Loh Lam Jeu, Kec. Geumpang Kab. Pidie	Kekurangan oksigen dalam lubang tambang pada kedalaman 17 meter	3 (tiga) orang meninggal dunia
2.	03-Sep-18	Desa Pulo Loh Kec. Geumpang	Kekurangan oksigen dalam lubang tambang pada kedalaman 17 meter	3 (tiga) orang meninggal dunia
3.	21-Apr-19	Desa Alue Baro Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan	Terhimpit batu di lubang penembangan pada kedalaman 100 meter	1 (satu) orang meninggal dunia
4.	14-Mar-21	Desa Simpang Dua Kec. Kluet Tengah Kemukiman Manggamat Kabupaten Aceh Selatan	Tertimbun oleh longsoran dalam lubang tambang	2 (dua) orang meninggal dunia
5.	10-Jul-21	Kec. Geumpang Desa Bangkeh Kab. Pidie	Tertimbun longsor batuan	4 (empat) orang meninggal dunia

Sumber : Dinas ESDM Aceh,2025

Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota telah berupaya mengarahkan aktivitas pertambangan agar semakin tertata melalui berbagai kebijakan dan pendekatan kelembagaan. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Bupati Aceh Jaya di kawasan Gunung Ujeuen, yang menjadi bentuk legalisasi dan pengelolaan formal bagi aktivitas pertambangan masyarakat. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mekanisme pengelolaan pertambangan rakyat diarahkan agar dapat dilakukan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang memenuhi aspek legal dan teknis, serta mengacu pada prinsip *good mining practices*.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota telah mengusulkan beberapa lokasi Wilayah Pertambangan (WP) kepada Pemerintah Pusat untuk dapat segera ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pengembangan kegiatan pertambangan rakyat di Aceh, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung kontribusi terhadap pendapatan daerah. Melalui pengelolaan yang baik, keberadaan sumber daya mineral dan batubara di Aceh dapat menjadi modal penting bagi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat.

B3. Pertambangan Mineral dan Batubara

Aceh memiliki kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Diantaranya batubara, emas, bijih besi, Batu Gamping, Batu

Lempung, Tras, Marmer, Andesit dan mineral lainnya. Potensi sektor mineral dan batubara di Aceh ini membuka peluang investasi berupa usaha pertambangan dan industri lainnya di sekitar tambang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan usaha pertambangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha. Pada Tahun 2024, tercatat 291 Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan batubara yang tersebar di kabupaten/kota di Aceh. Diantaranya terdapat 210 IUP Operasi Produksi dan 81 IUP Eksplorasi (**Tabel 2.42**).

Tabel 2.42.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi di Aceh
(per Tahun 2024)

Jenis Komoditas	Jumlah IUP		
	Eksplorasi	Operasi Produksi	Total
Batubara	5	8	13
Mineral Logam	9	11	20
Mineral Bukan Logam	4	7	11
Batuan	63	184	247
Jumlah	**81**	**210**	**291**

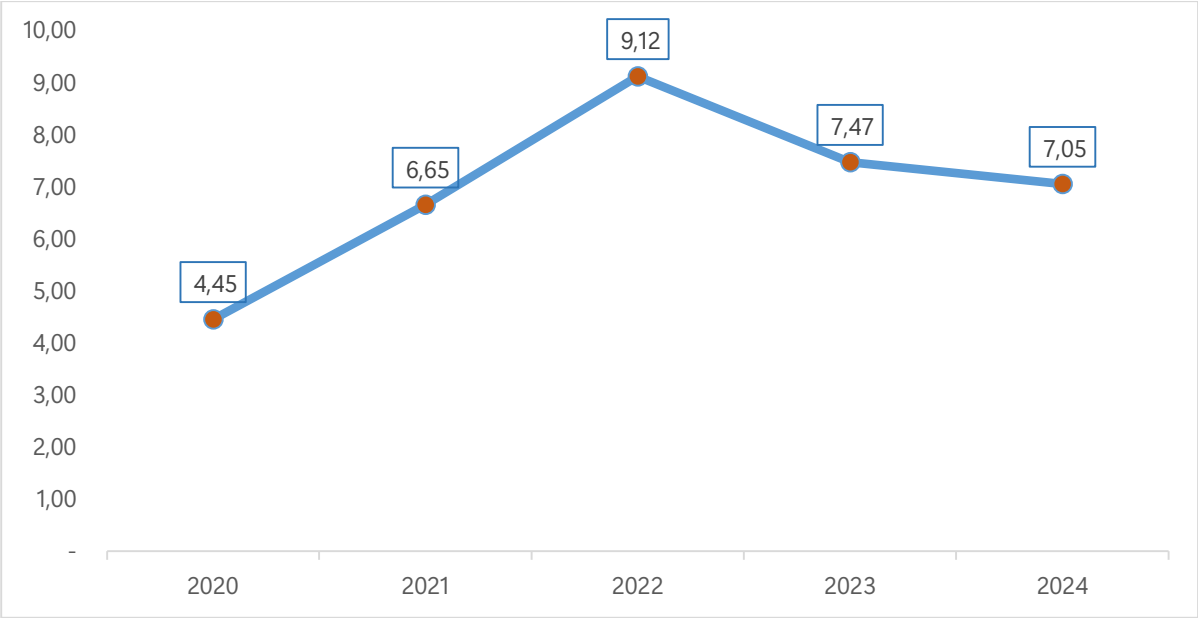
Sumber: Data Izin Usaha Pertambangan Dinas ESDM Aceh (2025)

Usaha pertambangan yang telah berjalan di Aceh, tidak hanya memberikan dampak terhadap penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh, namun juga dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat sekitar seperti penyerapan tenaga kerja, pembangunan/Pengembangan Masyarakat dan Wilayah, dan kemandirian ekonomi masyarakat Aceh. Dengan demikian, agar pemanfaatan sumber daya cadangan mineral dan batubara diperoleh secara maksimal semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan tata kelola pertambangan yang profesional, menerapkan kaidah pertambangan yang baik serta berdampak positif bagi masyarakat Aceh

B4. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada Tahun 2024 masih didominasi oleh besarnya kontribusi migas (subsektor pertambangan migas dan industri pengolahan migas). Sub sektor tertinggi berkontribusi yaitu sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi (3,68% atau Rp.8,94 Trilyun), diikuti sub sektor pertambangan batu bara dan lignit (1,76% atau Rp.4,27 Trilyun), sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya (1,38% atau Rp.3,35 Trilyun)serta pertambangan biji logam (0,24% atau Rp.577 Milyar). Adapun perkembangannya dapat dilihat pada **Gambar 2.49**.

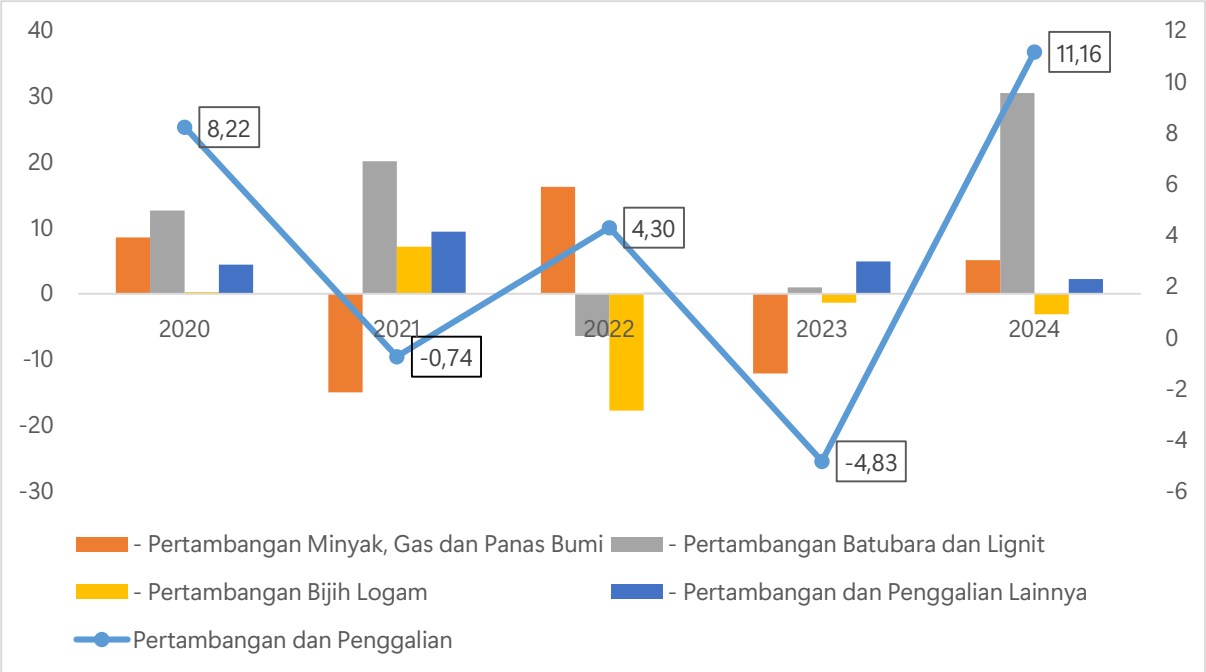
Secara umum kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama Tahun 2019-2024 menunjukkan peningkatan, tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 9,12 persen kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2023-2024 masing-masing sebesar 7,47 persen dan 7,05 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Gambar 2.49. Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Aceh Tahun 2020-2024

Selama 5 (lima) tahun terakhir, peranan sektor pertambangan dan penggalian naik dari 4,45 persen pada Tahun 2020 menjadi 7,05 persen pada Tahun 2024. Selama lima tahun terakhir dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 peranan kategori pertambangan dan penggalian cenderung fluktuatif.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)

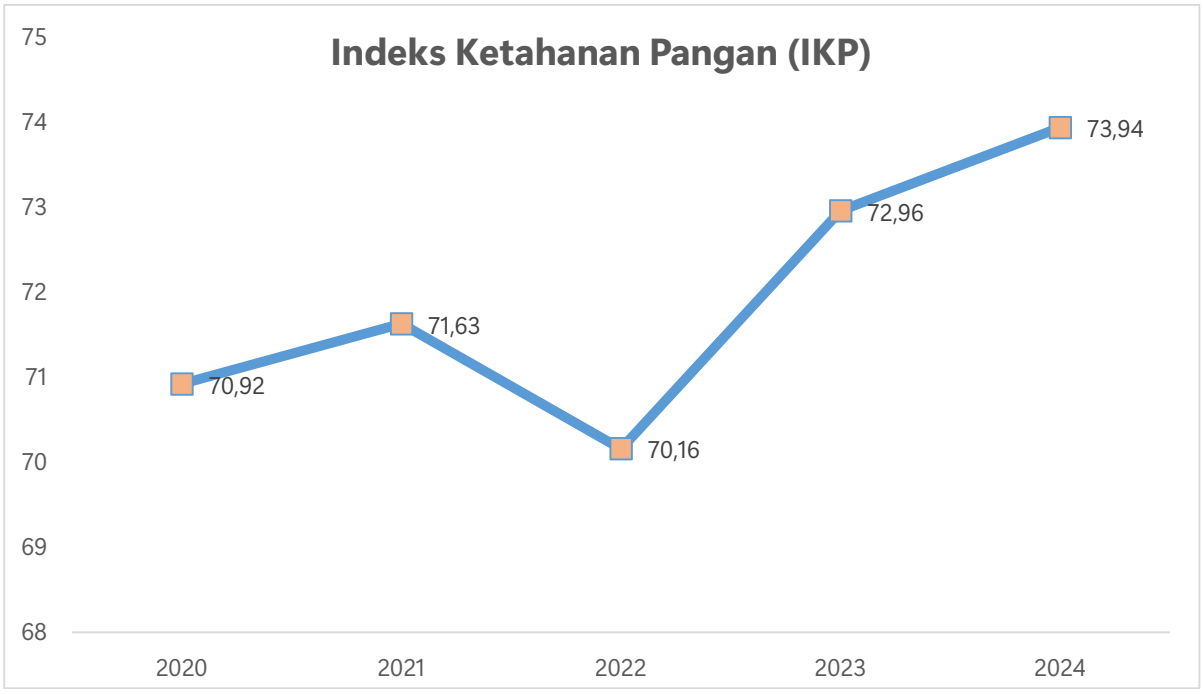
Gambar 2.50. Pertumbuhan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Aceh Tahun 2020-2024

Tabel **Gambar 2.50**, menjelaskan bahwa dari laju pertumbuhannya di Tahun 2024, kategori pertambangan dan penggalian mengalami laju pertumbuhan yang signifikan sebesar 11,16 persen. Peningkatan ini didominasi oleh subkategori pertambangan batubara dan lignit yang tumbuh 30,45 persen, serta pertambangan minyak, gas, dan panas bumi yang tumbuh 5,10 persen.

C. Indikator Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu akan menjadi isu krusial dan strategis baik di tingkat daerah, nasional, maupun dunia. Ketahanan pangan sangat penting bagi suatu daerah karena berbagai alasan, diantaranya: (1) menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduk, (2) menjaga kesehatan dan produktivitas, dan (3) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kesemua alasan tersebut akan berimplikasi positif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

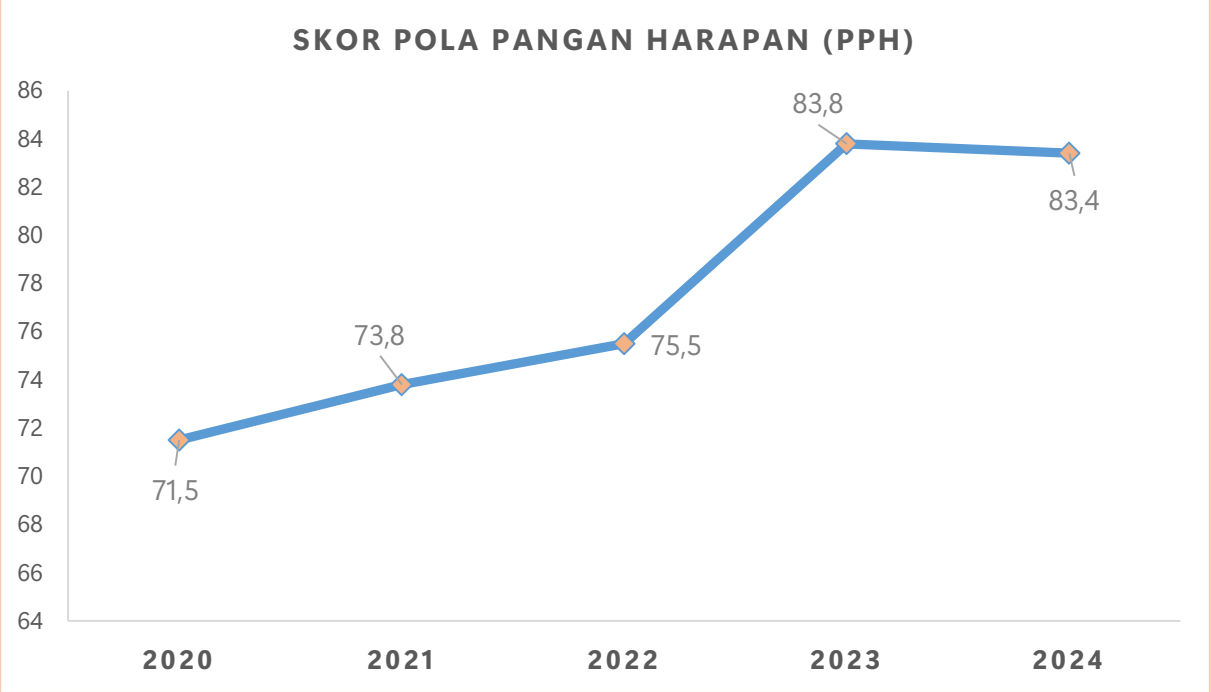
Ketahanan pangan suatu daerahj diukur dari capaian indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian ketahanan pangan, kinerja daerah, dan membantu menentukan prioritas pembangunan dan intervensi program. IKP Aceh dari 2020 - 2024 menunjukkan kondisi yang cenderung meningkat, kecuali pada Tahun 2022 yang sempat menurun akibat covid-19. Jika dilihat dari perkembangannya nilai, IKP Aceh mengalami kenaikan dari 70,92 pada Tahun 2020 menjadi 73,94 pada Tahun 2024. Capaian IKP Aceh Tahun 2024 belum sesuai dengan target sebesar 75,59 , namun demikian kondisi ini telah mencerminkan kinerja pemerintahan yang cukup baik. Perkembangan IKP Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Gambar 2.51**.



Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2025 (diolah)

Gambar 2.51. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Aceh, Tahun 2020-2024

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya diperhatikan dari sisi kuantitas saja, namun juga harus mengedepankan kualitas pangan yang tercermin dari keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah baik Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.



Sumber: Dinas Pangan Aceh, 2025 (diolah)

Gambar 2.52. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Aceh, Tahun 2015-2019

Gambar 2.52 menyajikan perkembangan kondisi konsumsi pangan masyarakat Aceh selama 5 tahun terakhir. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Berdasarkan hasil analisis konsumsi Tahun 2023 PPH konsumsi Aceh belum mencapai nilai optimal, masih berada dibawah nilai PPH Ideal yaitu sebesar 100. PPH Konsumsi Tahun 2023 baru mencapai 83,8 atau masih kurang 16,2 skor dari PPH Konsumsi ideal. Sedangkan untuk Tahun 2024 ini nilai PPH Konsumsi Aceh 83,4 (berdasarkan angka AKE 2.100 Kkal/Kap/Hari).

Dalam mencapai beberapa indikator pangan tersebut tidak terlepas dari beberapa peran prasarana dan sarana pangan berupa lumbung pangan di beberapa

kabupaten/kota yang saat ini belum mampu dioptimalkan. Selain itu juga meskipun banyak daerah yang notabenenya merupakan daerah lumbung pangan namun beberapa desa yang mencakup di dalamnya masih dikategorikan sebagai kecamatan dan desa rawan pangan. Ini tercatat dari jumlah kecamatan-kecamatan rawan pangan di wilayah Provinsi Aceh yang masih mencapai 33 kecamatan pada Tahun 2024, yaitu: sebanyak 2 kecamatan Prioritas 1, sebanyak 11 kecamatan prioritas 2, dan sisanya 20 kecamatan prioritas 3.

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan Kawasan Lumbung Pangan di wilayah pesisir Utara-Timur dan Barat-Selatan Aceh. Lumbung Pangan pesisir Utara-Timur meliputi: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Sementara Kawasan Lumbung Pangan pesisir Barat-Selatan meliputi: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya

D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/ PoU) adalah proporsi penduduk dalam suatu wilayah yang mengonsumsi energi dari makanan di bawah tingkat energi minimum yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan di suatu daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan selama kurun waktu, pertumbuhan angka PoU tingkat kabupaten/kota di Aceh secara umum mengalami peningkatan. Table di bawah ini menunjukkan perkembangan Pertumbuhan Angka PoU menurut kabupaten/kota di Aceh Tahun 2020-2024.

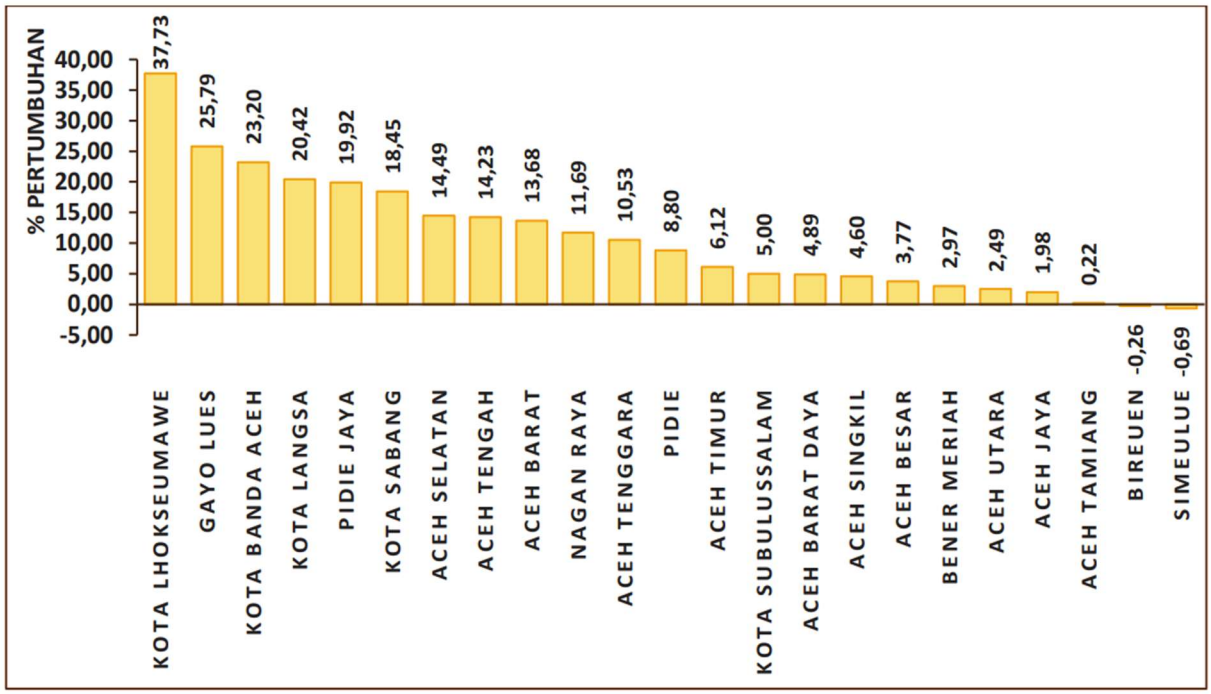
Tabel 2.43.
Perkembangan Pertumbuhan Angka PoU Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	PoU (%)					Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kota Lhokseumawe	7,08	4,05	12,84	6,09	7,86	37,73
2	Gayo Lues	6,97	3,18	8,27	9,18	7,97	25,79
3	Kota Banda Aceh	5,00	2,75	6,29	5,47	6, 69	23,20
4	Kota Langsa	7,35	4,93	11,87	9,89	8,96	20,42
5	Pidie Jaya	5,10	4,82	7,78	9,47	9,67	19,92
6	Kota Saban	5,15	4,26	8,40	9,01	7,81	18,45
7	Aceh Selatan	8,57	7,81	16,02	13,70	10,44	14,49
8	Aceh Tengah	6,47	5,46	10,00	8,61	8,90	14,23
9	Aceh Barat	6,40	4,09	6,55	6,16	8,41	13,68
10	Nagan Raya	7,64	4,75	5,95	3,43	6,91	11,69
11	Aceh Tenggara	9,42	6,75	13,69	12,97	9,44	10,53
12	Pidie	7,80	6,16	11,00	9,12	8,63	8,80
13	Aceh Timur	7,03	7,20	9,05	8,61	8,71	6,12
14	Kota Subulussalam	7,70	6,76	10,19	7,30	8,02	5,00
15	Aceh Barat Da a	8,63	7,99	12,82	9,64	8,81	4,89

No.	Kabupaten/Kota	PoU (%)					Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
16	Aceh Singkil	7,19	6,37	9,80	7,31	7,41	4,60
17	Aceh Besar	9,63	5,91	10,46	8,58	8,13	3,77
18	Bener Meriah	6,98	7,01	9,27	7,22	7,31	2,97
19	Aceh Utara	11,25	11,71	17,02	14,24	10,94	2,49
20	Aceh Jaya	8,97	6,38	9,33	9,44	8,43	1,98
21	Aceh Tamiang	12,29	9,29	15,13	12,05	9,98	0,22
22	Bireuen	10,04	6,56	6,78	7,62	8,98	-0,26
23	Simeulue	11,44	12,43	15,80	10,91	10,08	-0,69

Sumber: Badan Pangan nasional (2025)

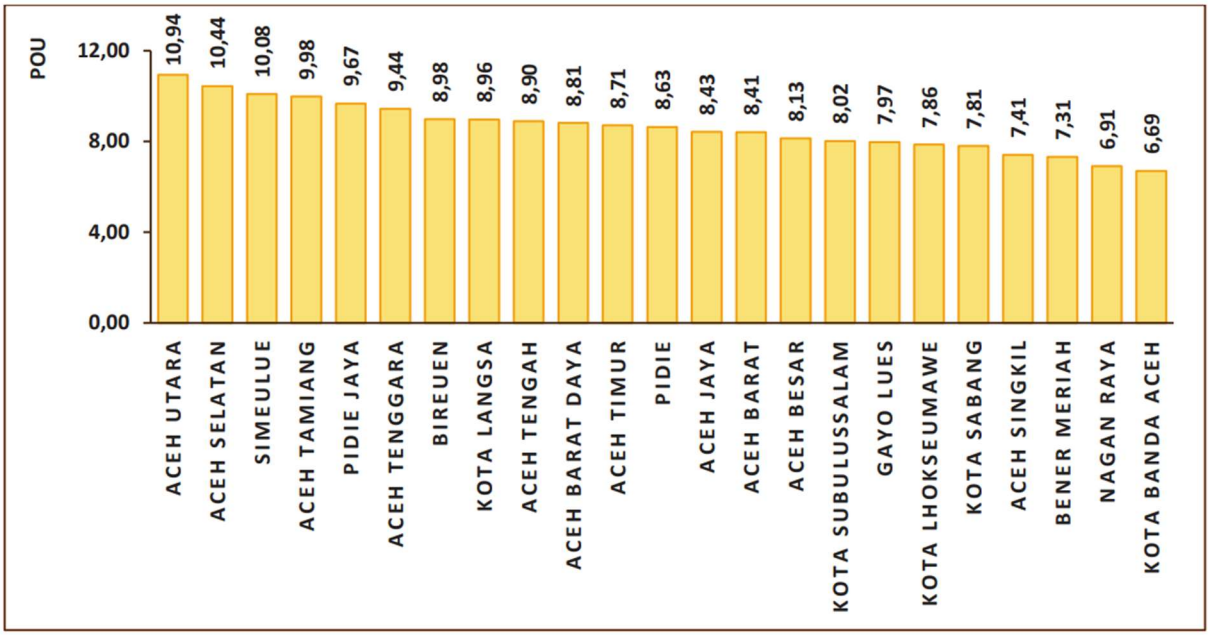
Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan pertumbuhan angka PoU, diantaranya adalah kota Lhokseumawe, Kabupaten Gayo Lues, dan kota Banda Aceh. Sedangkan 2 (dua) kabupaten, yaitu Bireuen dan Simeulue, mengalami penurunan Pertumbuhan Angka PoU. Grafik akumulasi peningkatan pertumbuhan PoU dapat dilihat pada **Gambar 2.53**.



Sumber: Badan Pangan nasional (2025)

Gambar 2.53. Pertumbuhan Angka PoU Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2020-2024

Pada Tahun 2024, kabupaten Aceh utara merupakan daerah dengan angka PoU terbesar (10,94 persen), diikuti oleh kabupaten Aceh Selatan (10,44 persen) dan kabupaten Simeulue (10,04 persen). Besarnya Angka PoU dapat dilihat pada **Gambar 2.54**.. Kota Banda Aceh dan Nagan Raya merupakan daerah dengan angka PoU terkecil, yaitu 6,69 persen (Banda Aceh) dan 6,91 persen (Nagan Raya). Ini menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pangan di kedua daerah ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Aceh.



Sumber: Badan Pangan nasional (2025)

Gambar 2.54. Peringkat PoU Berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang harus ditangani, maka nilai angka PoU dikalikan dengan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Berdasarkan perhitungan, maka Aceh Utara memiliki angka PoU tertinggi dan juga jumlah penduduk terbanyak yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan.

Tabel 2.44.
Jumlah Penduduk Yang mengalami Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

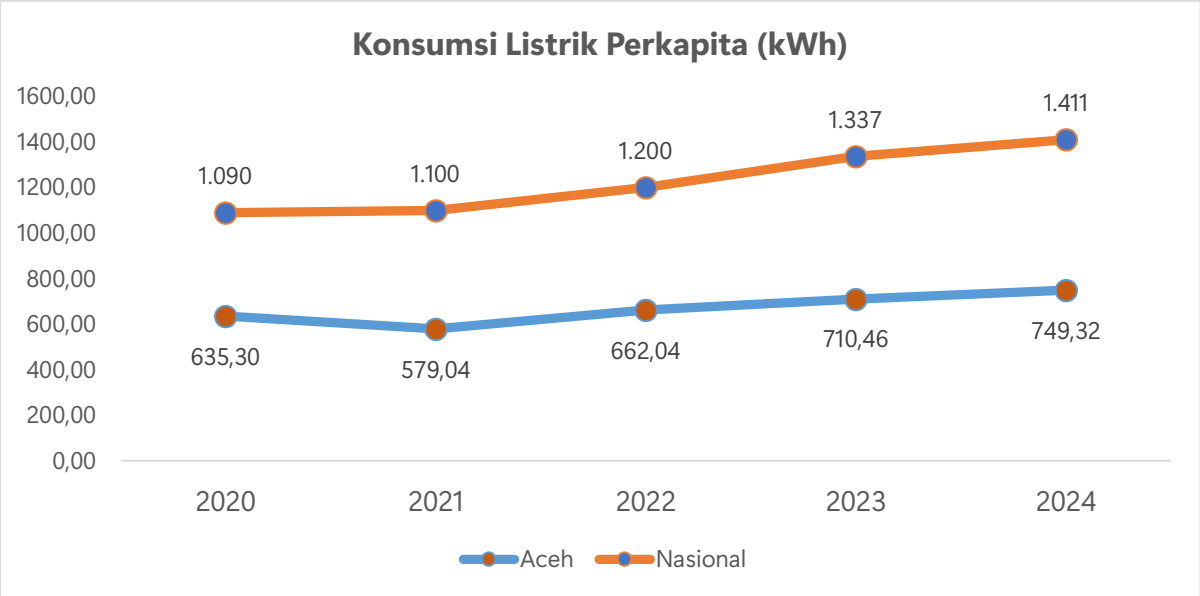
No.	Kabupaten/Kota	PoU (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Undernourished Jiwa
1	Aceh Utara	10,94	648.511	70.946
2	Bireuen	8,98	495.113	44.482
3	Pidie	8,63	467.276	40.338
4	Aceh Timur	8,71	458.974	39.970
5	Ace Besar	8,13	446.424	36.313
6	Aceh Tamian	9,98	310.171	30.952
7	Aceh Selatan	10,44	253.955	26.509
8	Aceh Ten ara	9,44	227.500	21.475
9	Aceh Ten ah	8,90	223.163	19.861
10	Kota Banda Aceh	6,69	287.217	19.228
11	Ace Barat	8,41	220.313	18.538
12	Kota Lhokseumawe	7,86	218.190	17.155
13	Kota Lan sa	8,96	187.458	16.799
14	Pidie Ja a	9,67	169.321	16.374
15	Aceh Barat Da a	8,81	159.547	14.059
16	Nagan Raya	6,91	174.713	12.078
17	Bener Meria	7,31	156.023	11.412
18	Simeulue	10,08	99.426	10.026

No.	Kabupaten/Kota	PoU (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Undernourished Jiwa
19	Aceh Sin kil	7,41	130.276	9.656
20	Aceh Ja a	8,43	99.921	8.424
21	Ga o Lues	7,97	97.994	7.806
22	Kota Subulussalam	8,02	85.156	6.828
23	Kota Sabang	7,81	35.478	2.771

Situasi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Aceh bervariasi antar kabupaten/kota. Angka ini menunjukkan tingkat kerawanan pangan dan gizi di Aceh, di mana masyarakat masih mengonsumsi makanan yang tidak cukup untuk kebutuhan energi harian mereka. Ketidakcukupan konsumsi pangan berkaitan erat dengan kemiskinan. Penduduk miskinan memiliki keterbatasan daya beli sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan. Keterbatasan daya beli memaksa rumah tangga untuk mengurangi konsumsi makanan, sehingga mereka mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk hidup sehat dan aktif, meskipun telah mengonsumsi makanan.

E. Konsumsi Listrik Perkapita

Energi Listrik merupakan salah satu sumber energi yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik untuk kegiatan industri, komersial, pemerintah maupun rumah tangga. Dengan adanya Listrik maka segala proses yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan cepat, efektif dann efisien. Konsumsi listrik perkapita merupakan perbandingan total jumlah energi listrik yang digunakan, dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Adapun perkembangan konsumsi listrik perkapita Aceh dan Nasional selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Gambar 2.55**.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.55. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh), Tahun 2020-2024

Konsumsi listrik per kapita di Aceh menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan pengecualian pada Tahun 2021 yang mengalami perlambatan seiring dampak pandemi covid-19 terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Listrik merupakan salah satu sektor penggerak utama pembangunan yang berperan dalam meningkatkan produktivitas, memperluas aktivitas ekonomi, serta mendukung kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah penduduk, intensitas aktivitas ekonomi, kebutuhan energi rumah tangga, serta keberadaan industri yang memerlukan pasokan energi dalam jumlah besar. Pertumbuhan konsumsi listrik yang positif ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah, meskipun pada Tahun 2024 terlihat adanya perlambatan sejalan dengan kondisi ekonomi global dan perubahan pola konsumsi energi masyarakat. Secara umum, perkembangan konsumsi listrik per kapita Aceh menunjukkan arah yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga perlu terus dioptimalkan melalui kebijakan peningkatan rasio elektrifikasi, diversifikasi sumber energi, serta penerapan prinsip efisiensi energi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di sektor ketenagalistrikan.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indek kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu indeks untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. Di Indonesia, perhitungan IKLH mengalami beberapa kali revisi sejak dua dekade belakangan ini, untuk Tahun 2021 perhitungan semua komponen IKLH meliputi nilai Indeks Kualitas Air (IKA), nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Perhitungan ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut, kontribusi IKA, IKU, IKL, dan IKA masing-masing sebesar 34 persen, 42,8 persen, 13,3 persen, dan 9,9 persen. Untuk tingkat kabupaten/ kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9) tanpa kontribusi IKAL.

Tabel 2.45.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL) Tahun 2020-2024

Indeks	Tahun					KET
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKA	78,66	57,14	60,41	61,30	67,57	
IKU	89,48	89,63	90,62	90,94	91,93	
IKL	60,59	76,52	76,24	76,51	60,29	
IKAL	59,41	76,51	89,2	86,75	92,15	
IKLH	**78,99**	**75,54**	**78,29**	**78,53**	**79,46**	

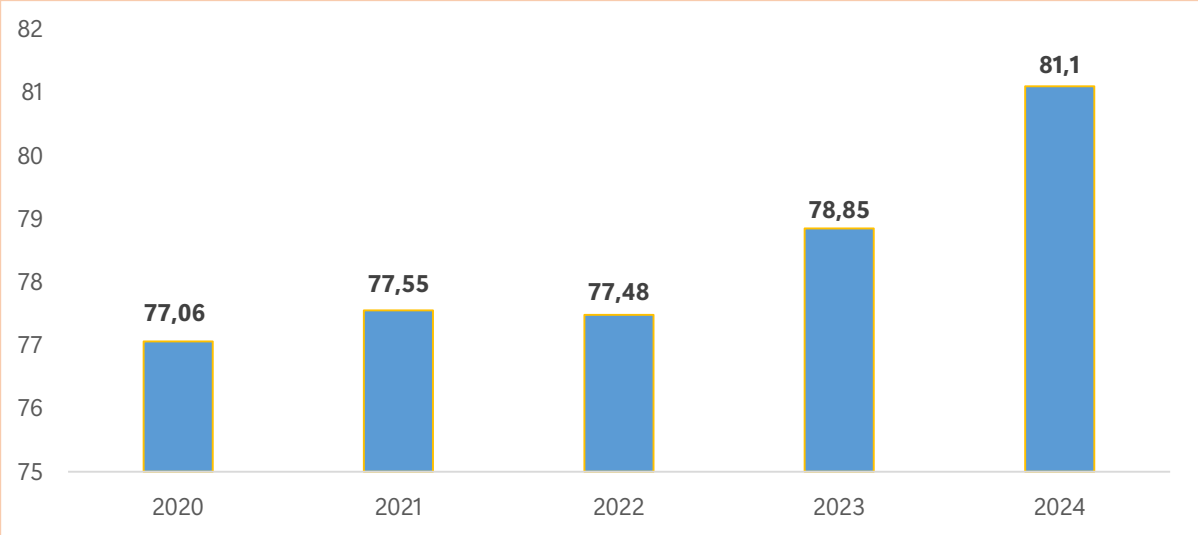
Sumber : DLHK Aceh, Tahun 2025 (90 ≤ IKLH ≤ 100 : sangat baik; 70 ≤ IKLH < 90 : Baik; 50 ≤ IKLH < 70: Sedang; 25 ≤ IKLH < 50 ; kurang; 0 ≤ IKLH < 25 ; sangat kurang)

Nilai IKLH Aceh Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai pada Tahun 2023 sebesar 0,93 poin, kenaikan ini sangat signifikan dan salah satunya disebabkan adanya peningkatan nilai indeks dari kabupatan/kota khususnya nilai IKA, IKU dan IKAL. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKA mengalami kenaikan sebesar 6,27 poin, nilai IKU 0,99 poin, nilai IKAL 5,40 poin.

B. Rumah Tangga dengan sanitasi aman

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Sanitasi merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal). Kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian akses sanitasi layak dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,04 persen seperti pada **Gambar 2.56**. Sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2025

Gambar 2.56. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Aceh 2020-2024

Persentase Rumah Tangga terhadap akses sanitasi layak menurut Kabupaten/Kota sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024, Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap sanitasi layak tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Aceh, 2020–2024 disajikan pada **Tabel 2.46**.

Tabel 2.46.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Aceh, 2020–2024

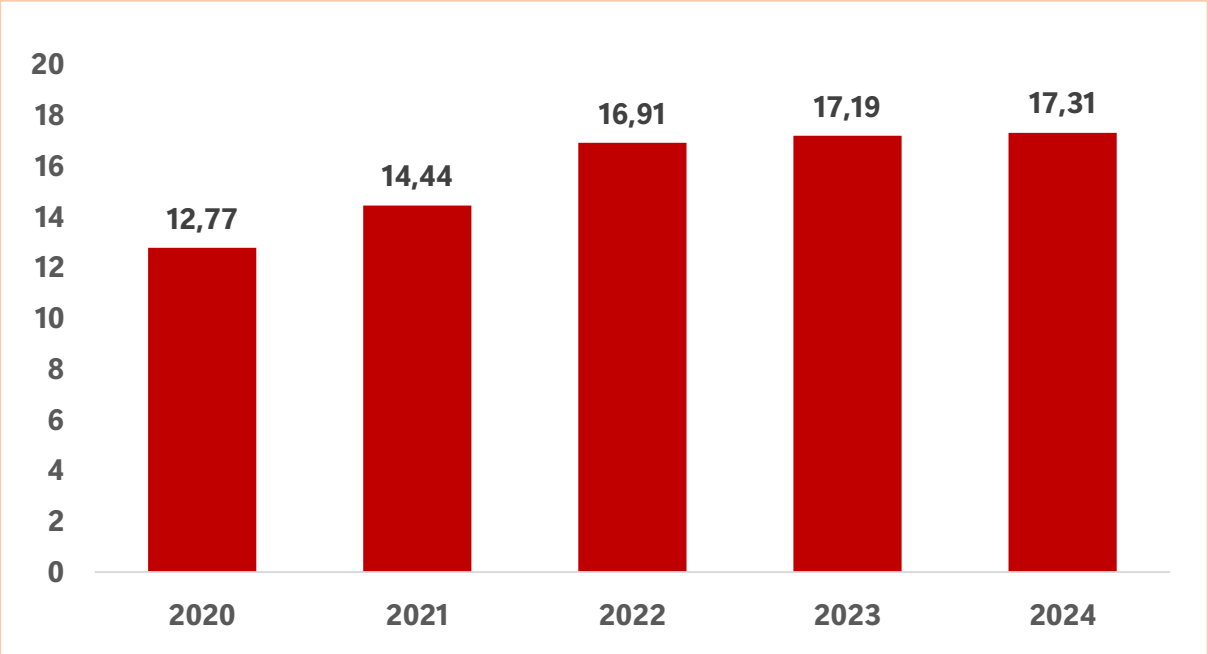
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	66,51	71,56	70,21	72,67	76,51
Aceh Singkil	64,22	69,56	78,92	67,93	63,22
Aceh Selatan	68,78	62,55	70,83	74,54	77,96
Aceh Tenggara	54,04	62,71	62,88	65,08	64,01
Aceh Timur	74,65	66,75	69,06	70,01	73,59
Aceh Tengah	81,26	90,58	89,69	92,61	86,34
Aceh Barat	83,45	89,60	88,39	90,16	91,09
Aceh Besar	87,51	87,40	83,49	89,07	90,30
Pidie	63,54	54,10	54,68	60,36	63,88
Bireuen	84,16	81,89	85,39	84,96	88,26
Aceh Utara	75,83	79,97	78,92	77,95	80,63
Aceh Barat Daya	50,27	65,71	65,94	64,69	69,39
Gayo Lues	43,32	47,63	46,33	46,05	49,79
Aceh Tamiang	84,61	87,45	82,74	78,61	85,93
Nagan raya	80,35	74,86	79,97	82,72	87,32
Aceh Jaya	83,27	81,60	78,05	78,83	82,31
Bener Meriah	84,12	86,69	81,56	87,04	88,05
Pidie Jaya	66,39	74,30	73,49	78,07	80,82
Banda Aceh	99,41	99,88	96,88	99,91	99,39
Sabang	89,20	92,25	89,52	93,96	95,90
Langsa	91,57	91,81	91,92	92,92	94,30
Lhokseumawe	88,07	93,10	90,27	90,36	93,71
Subulussalam	73,54	69,71	72,46	63,40	61,57
Aceh	**77,06**	**77,55**	**77,48**	**78,85**	**81,10**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Sanitasi aman adalah sistem dan praktik pembuangan limbah manusia yang mencegah penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat. Sanitasi aman mencakup fasilitas yang memadai seperti jamban yang terhubung ke septic tank yang disedot secara berkala dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau sistem perpipaan yang terhubung ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Akses Sanitasi Aman adalah Fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses Sanitasi yang masuk kategori aman ini, umumnya

disedot rutin satu kali selama 3-5 Tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman sejak Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses sanitasi aman juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk akses sanitasi aman dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,54 persen. Data selengkapnya sebagaimana tersaji pada **Gambar 2.57**



Sumber: Badan Pusat Statistik, SUSENAS Desember 2024

Gambar 2.57. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Aceh Tahun 2020-2024

C. Timbulan sampah terolah

Pengelolaan sampah di Aceh menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan daerah. Jumlah timbulan sampah yang semakin besar dengan jenis yang beragam menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas dua pendekatan utama, yaitu pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, serta pemanfaatan kembali, dan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

Hingga Tahun 2024, tingkat sampah terkelola di Aceh baru mencapai 36,49 persen, belum termasuk kontribusi dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping sebesar 19,6 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang tidak lagi memasukkan volume open dumping ke dalam perhitungan sampah terkelola sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sampah dari pola konvensional kumpul–angkut–buang menuju sistem yang lebih berorientasi pada

pengurangan sampah sejak sumber, optimalisasi daur ulang, dan pemanfaatan kembali, sehingga mampu mendukung target pembangunan berkelanjutan di Aceh. Data capaian pengelolaan sampah di Aceh dari Tahun 2021-2024 tersaji pada **Tabel 2.47**.

Tabel 2.47.
Persentase Capaian Pengelolaan Sampah di Aceh Tahun 2020 - 2024

No	Kabupaten/ Kota	2020 (Ton/Tahun)		2021 (Ton/Tahun)		2022 (Ton/Tahun)		2023 (Ton/Tahun)		2024 (Ton/Tahun)		
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	Open Dumping (OD)
1	Sabang	8.064	5.621	8.226	6.123	8.390	6.308,37	8.558	5.999,14	8.729	4.657,40	-
2	Banda Aceh	67.408	86.870	67.913	80.256	68.423	90.190,75	68.936	91.955,35	69.453	91.977,54	-
3	Aceh Besar	77.248	9.198	78.793	20.486	80.369	26.811,22	81.976	36.056,65	83.616	37.944,94	-
4	Pidie	66.551	3.430	67.723	22.740	68.914	23.800	70.127	25.151,29	71.362	22.239,89	-
5	Pidie jaya	27.957	5.132	28.488	6.583	29.029	7.131,73	29.581	5.475,00	30.143	OD	6.022,50
6	Bireuen	24.012	17.885	24.456	18.178	24.909	18.685,26	25.370	32.743,35	25.839	10.113,35	27.615,90
7	Aceh Utara	-	46.138	109.966	49.176	112.165	45.553	114.409	18.262,78	116.697	20.422,89	-
8	Lhokseumawe	33.729	32.485	34.403	25.459	35.091	31.436,79	35.793	31.136,78	36.509	1.660,75	28.470,00
9	Aceh Timur	49.350	30.114	50.337	27.250	51.344	21.160,82	52.371	23.792,35	53.419	29.692,49	-
10	Langsa	36.349	34.624	37.076	27.436	37.818	34.470,24	38.574	30.191,04	39.345	28.981,67	-
11	Aceh Tamiang	-	4.825	37.050	17.285	37.791	20.075	38.547	19.698,70	39.318	12.144,22	-
12	Bener Meriah	23.312	17.520	23.358	16.884	23.405	9.411,47	23.452	10.605,22	23.499	14.618,61	-
13	Aceh Tengah	36.145	31.770	36.330	20.523	36.515	27.588,53	36.701	23.723,18	36.888	1.095,00	22.995,00
14	Gayo Lues	13.983	12.012	14.221	13.324	14.462	9.684,09	14.708	9.179,74	14.958	OD	10.950,00
15	Aceh Tenggara	31.155	7.227	31.519	13.066	31.888	10.406,88	32.261	7.252,55	32.638	390,55	8.048,25
16	Aceh Jaya	17.311	10.782	17.657	19.068	18.010	17.231,29	18.370	12.900,40	18.738	322,60	11.639,85
17	Aceh Barat	38.462	34.310	39.281	28.141	40.118	32.017,49	40.972	33.825,52	41.845	25.384,77	-
18	Nagan Raya	24.034	325	24.514	20.861	25.005	11.845,16	25.505	16.758,68	26.015	17.422,27	-
19	Aceh Barat Daya	-	5.475	28.191	6.957	28.533	8.558,48	28.910	6.961,82	29.286	2.188,92	6.570,00
20	Aceh Selatan	35.714	22.754	36.428	12.957	37.156	12.820,35	37.900	12.888,25	38.658	7,66	12.775,00
21	Subulussalam	-	12.775	13.623	10.081	13.868	13.529,97	14.117	14.654,75	14.371	91,25	10.950,00
22	Aceh Singkil	-	2.920	18.884	1.974	19.261	1.866,61	19.647	3.392,68	20.039	1.248,20	4.197,50
23	Simeulue	13.715	13.505	13.989	8.352	14.269	7.132,65	14.555	6.808,45	14.846	767,70	6.577,30
Jumlah		624.499	447.697	842.426	473.160	856.733	487.716,15	871.340	479.413,67	886.211	323.372,67	156.811,30
Persentase Sampah Terkelola (%)		**71,69**		**56,17**		**56,93**		**55,02**		**36,49**		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025

Pengolahan sampah adalah serangkaian tindakan yang sistematis dan menyeluruh dalam bentuk merubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Jumlah sampah terolah di Aceh berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2024 Periode 2 sebesar 6.648,54 ton/tahun dari total timbulan sampah Aceh Tahun 2024 sebesar 931.689,37 ton/tahun. Adapun data sampah terolah di Bank Sampah, TPS3R dan Rumah Kompos yang berada dalam wilayah Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.48**.

Tabel 2.48.
Persentase Jumlah Sampah Terolah di Aceh Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Terolah tahun 2024 (Ton/Tahun)			
		BSU	BSI	TPS3R	Rumah Kompos
1	Kota Sabang				
2	Kota Banda Aceh	49,81	1.731,98	53,19	737,33
3	Kabupaten Aceh Besar	10,92		35,99	
4	Kabupaten Pidie				
5	Kabupaten Pidie jaya				
6	Kabupaten Bireuen		146,00	74,83	
7	Kabupaten Aceh Utara				
8	Kota Lhokseumawe		1.460,00		
9	Kabupaten Aceh Timur				
10	Kota Langsa	6,48	23,73	24,82	332,15
11	Kabupaten Aceh Tamiang		2.438,20		
12	Kabupaten Bener Meriah		730,00		
13	Kabupaten Aceh Tengah				
14	Kabupaten Gayo Lues				
15	Kabupaten Aceh Tenggara				
16	Kabupaten Aceh Jaya				
17	Kabupaten Aceh Barat				
18	Kabupaten Nagan Raya		9,13	40,15	
19	Kabupaten Aceh Barat Daya				
20	Kabupaten Aceh Selatan				
21	Kota Subulussalam				
22	Kabupaten Aceh Singkil	7,20	109,50		109,50
23	Kabupaten Simeulue	4,14			
umlah		**78,55**	**6.648,54**	**228,98**	**1.178,98**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025

D. Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Aceh pada Tahun 2024 masih menunjukkan variasi antar kabupaten/kota. Beberapa daerah, seperti Kota Banda Aceh dan Kota Sabang, telah menjangkau hampir seluruh rumah tangga dengan tingkat cakupan layanan masing-masing mencapai 100 persen dan 88,89 persen. Kondisi ini menandakan adanya tata kelola layanan persampahan yang relatif mapan serta dukungan kelembagaan yang kuat di wilayah perkotaan.

Sebaliknya, sebagian besar wilayah kabupaten menunjukkan cakupan layanan yang masih rendah. Misalnya, Kabupaten Pidie baru menjangkau 9,45 persen rumah tangga, Pidie Jaya sebesar 29,28 persen, dan Aceh Tamiang sebesar 26,76 persen. Hal

ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah tersebut belum mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, sehingga masih bergantung pada pola penanganan mandiri maupun pembuangan terbuka.

Secara keseluruhan, capaian cakupan layanan sampah Aceh pada Tahun 2024 baru mencapai 27,52 persen dengan rata-rata Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 40,80. Cakupan area pelayanan sampah di Aceh dan nilai IKPS Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.49**.

Tabel 2.49.
Cakupan Area Pelayanan Sampah di Aceh & Nilai IKPS Aceh Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Potensi Timbulan Sampah (Ton/Thn)	Realisasi Timbulan Sampah (Ton/Thn)	Cakupan Area Pelayanan Sampah					Pengurangan Sampah		Penanganan Sampah		TOTAL SAMPAH TERKELOLA (TON/THN)	TPA OPEN DUMPING (TON/THN)	TERBUANG KE LINGKUNGAN (TON/THN)	NILAI IKPS
				Jlh Kec	Jlh Kec. Terlayani	Jlh Desa	Jlh Desa Terlayani	%	Ton/Thn	%	Ton/Thn	(%)				
1	Banda Aceh	98.076	94.679,61	9	9	90	90	100,00	15.501,03	16,37	76.476,51	80,77	91.977,54	-	2.702,07	60,50
2	Sabang	8.729	6.354,94	3	3	18	16	88,89	-	0,00	4.657,40	73,29	4.657,40	-	1.697,54	39,10
3	Lhokseumawe	36.509	36.571,41	4	4	68	45	66,18	1.660,7500	4,54	-	0,00	1.660,75	28.470,00	6.440,66	43,00
4	Langsa	39.345	35.538,23	5	5	66	22	33,33	3.210,12	9,03	25.771,55	72,52	28.981,67	-	6.556,56	54,60
5	Subulussalam	14.371	17.843,03	5	2	82	12	14,63	91,25	0,51	-	0,00	91,25	10.950,00	6.801,78	23,20
6	Aceh Besar	63.524	54.434,93	23	23	604	217	35,93	1.343,47	2,47	36.601,47	67,24	37.944,94	-	16.489,99	46,80
7	Pidie	71.362	66.071,86	23	13	730	69	9,45	7.806,88	11,82	14.433,01	21,84	22.239,89	-	43.831,97	33,20
8	Pidie Jaya	30.716	30.143,46	8	8	222	65	29,28	-	0,00	-	0,00	-	6.022,50	24.120,96	29,20
9	Bireuen	25.839	59.046,49	17	15	609	67	11,00	10.113,35	17,13	-	0,00	10.113,35	27.615,90	21.317,24	56,20
10	Aceh Utara	116.697	112.171,80	27	25	852	105	12,32	2.355,39	2,10	18.067,50	16,11	20.422,89	-	92.848,91	36,00
11	Aceh Timur	53.419	67.363,09	24	24	513	448	87,33	1.066,27	1,58	28.626,22	42,50	29.692,49	-	37.670,60	51,40
12	Aceh Tamiang	39.318	45.127,58	12	11	213	57	26,76	2.526,47	5,60	9.617,75	21,31	12.144,22	-	32.983,37	20,70
13	Bener Meriah	23.499	23.371,68	10	4	232	33	14,22	18,61	0,08	14.600,00	62,47	14.618,61	-	8.753,08	59,50
14	Aceh Tengah	36.888	41.273,39	14	5	295	84	28,47	1.095,00	2,65	-	0,00	1.095,00	22.995,00	17.183,39	30,40
15	Gayo Lues	14.958	15.308,98	11	9	136	55	40,44	-	0,00	-	0,00	-	10.950,00	4.358,98	34,20
16	Aceh Tenggara	32.638	54.634,66	16	14	385	134	34,81	25,55	0,05	365,00	0,67	390,55	8.048,25	46.195,86	32,10
17	Aceh Jaya	18.738	18.373,01	9	5	172	30	17,44	322,60	1,76	-	0,00	322,60	11.639,85	6.410,50	35,20
18	Aceh Barat	41.845	37.432,21	12	8	321	105	32,71	1.656,12	4,42	23.728,65	63,39	25.384,77	-	12.047,44	40,90
19	Nagan Raya	26.015	25.763,31	10	8	222	56	25,23	4.479,37	17,39	12.942,90	50,24	17.422,27	-	8.341,04	64,00
20	Aceh Barat Daya	29.286	29.210,59	9	8	152	34	22,37	2.188,92	7,49	-	0,00	2.188,92	6.570,00	20.451,68	45,10
21	Aceh Selatan	38.658	34.963,35	18	4	260	15	5,77	7,66	0,02	-	0,00	7,66	12.775,00	22.180,69	36,60
22	Aceh Singkil	20.039	20.039,08	11	5	116	11	9,48	1.248,20	6,23	-	0,00	1.248,20	4.197,50	14.593,38	24,30
23	Simeulue	14.846	16.673,93	10	4	138	18	13,04	767,70	4,60	-	0,00	767,70	6.577,30	9.328,93	42,30
Total Cakupan Area Pelayanan Sampah						**6.496**	**1.788**	**27,52**							**Nilai IKPS Aceh**	**40,80**

2.1.1.6. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim

A. Penurunan intensitas Emisi GRK

Aceh, sebagaimana wilayah lain di Indonesia, berada dalam dinamika perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu, serta perubahan pola curah hujan. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup, perekonomian, dan masyarakat, sehingga menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh. Salah satu instrumen utama yang mendukung upaya tersebut adalah penilaian dan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK), yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Informasi mengenai capaian penurunan emisi GRK di tingkat daerah diperoleh melalui kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK). Kebijakan pelaksanaan inventarisasi GRK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 73 Tahun 2017, yang menegaskan peran penting pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam penyusunan inventarisasi nasional. IGRK tingkat provinsi menjadi kegiatan strategis yang wajib dilaksanakan Pemerintah Aceh untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status, serta kecenderungan emisi dan serapan GRK, termasuk simpanan karbon, dengan dukungan data kolaboratif lintas sektor dan kabupaten/kota.

Data emisi karbon dioksida (CO_2) Tahun 2023 dari lima sektor di Aceh menunjukkan gambaran yang beragam dalam kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dari data ini, sektor Energi memiliki emisi terbesar dengan total 14.150 Gg CO_2 eq, yang menunjukkan penggunaan energi sebagai sumber utama emisi di wilayah tersebut. Diikuti oleh sektor Pertanian dan Industri Proses dan Penggunaan Produk (IPPU) masing-masing dengan emisi 2.535 Gg CO_2 eq dan 1.581 Gg CO_2 eq. sektor limbah menyumbang 1.208 Gg CO_2e. Sektor kehutanan di Aceh justru berperan sebagai penyerap karbon dengan nilai -9.504 Gg CO_2e, yang menunjukkan bahwa kawasan hutan di wilayah ini mampu menyerap lebih banyak karbon dibandingkan yang dilepaskan.

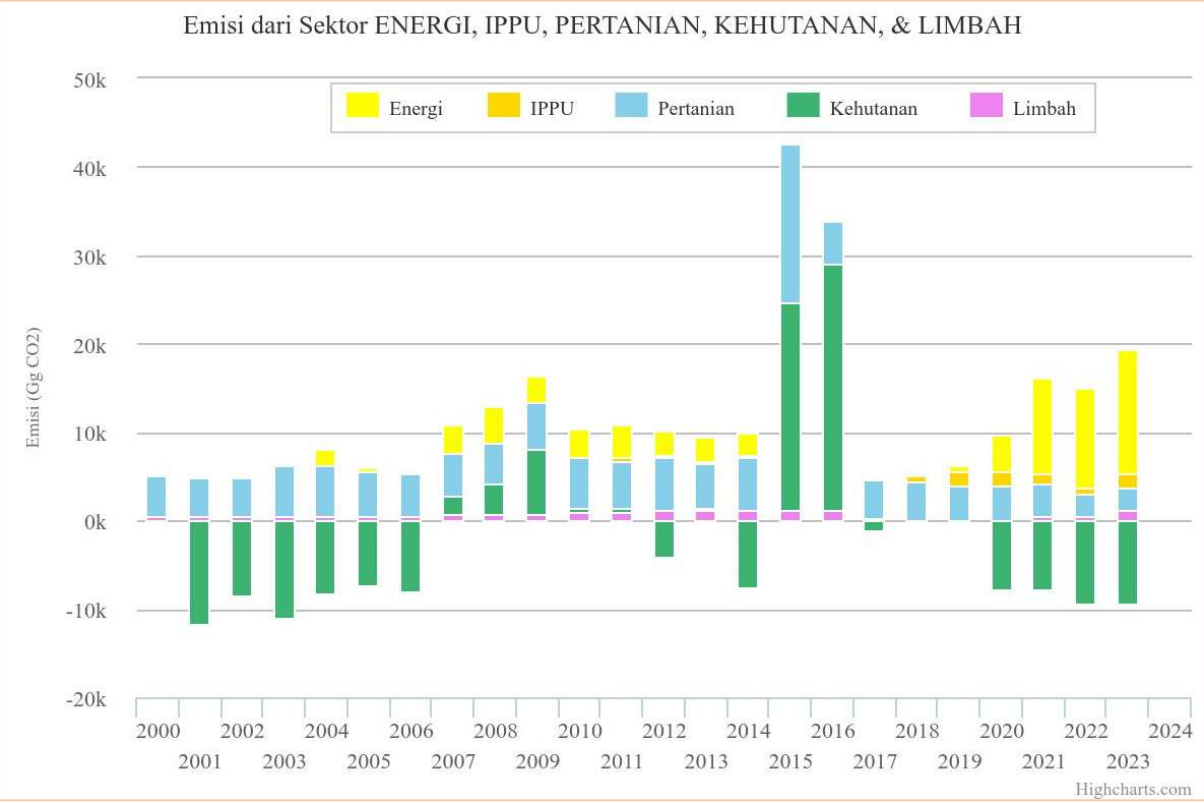
Pada sektor energi, yang menyumbang emisi tertinggi berasal dari kegiatan pembakaran bahan bakar, khususnya pada subsektor permukiman dan perkantoran, yang menyumbang emisi CO_2 sebesar 8.216,61 Gg dengan total emisi setara CO_2 mencapai 8.245,32 Gg. Pada sektor IPPU, kategori industri mineral merupakan penyumbang emisi terbesar dengan total emisi sebesar 1,304 Gg CO_2. Pada sektor kehutanan, subkategori Forest Remaining Forest berkontribusi signifikan terhadap penyerapan karbon, dengan jumlah penyerapan sebesar -18.387,87 Gg CO_2. Sumber emisi terbesar dalam sektor pertanian berasal dari budidaya padi, khususnya emisi CH4 tahunan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut dengan jumlah 973,14 Gg CO_2 eq. Sumber emisi terbesar dari sektor limbah adalah limbah domestik, khususnya dari

pengolahan air limbah domestik yang menghasilkan 403,48 Gg CO_2 eq. Data Emisi Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah Aceh disajikan pada **Tabel 2.50**.

Tabel 2.50.
Data Emisi Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah Aceh (data termutakhir)

No	Item	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Energi	750	4.034	10.855	11.197	14.140
2	IPPU	1.494	1.717	1.069	842	1.581
3	Pertanian	3.922	3.852	3.584	2.380	2.535
4	Kehutanan	29	-7.870	7.828	-9.454	-9.504
5	Limbah	64	49	582	571	1.208
	Total Emisi	6.259	1.782	8.262	5.535	9.959

Sumber : SIGN SMART KLHK RI, 2025



Sumber: DLHK, 2025

Gambar 2.58. Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah

B. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kategori risiko bencana di Indonesia, yaitu: kategori rendah (<36), sedang (36-144) dan tinggi (>144). Data Tahun 2024, menunjukkan IRB Provinsi Aceh Tahun 2024 memiliki tingkat risiko bencana tinggi mencapai 144,29. Sebaran IRB di Aceh disajikan dalam **Tabel 2.51**.

Tabel 2.51.
Indek Risiko Bencana Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Indek Risiko Bencana (IRB)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
2	Aceh Singkil	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
3	Aceh Selatan	171,20	171,20	171,20	171,20	171,20
4	Aceh Tenggara	127,23	120,03	121,43	118,31	112,89
5	Aceh Timur	176,05	166,74	173,00	164,56	155,31
6	Aceh Tengah	124,80	124,80	121,46	118,95	116,18
7	Aceh Barat	189,04	179,15	179,15	185,57	173,76
8	Aceh Besar	211,20	209,78	207,78	202,01	195,61
9	Pidie	163,20	163,20	163,15	159,02	151,00
10	Bireuen	168,00	168,00	165,83	163,23	155,99
11	Aceh Utara	175,20	175,20	170,46	165,86	166,20
12	Aceh Barat Daya	183,20	183,20	183,20	183,20	183,20
13	Gayo Lues	101,41	97,59	97,59	94,63	98,40
14	Aceh Tamiang	146,52	139,20	133,66	129,56	125,06
15	Nagan Raya	203,20	200,08	200,08	197,60	192,31
16	Aceh Jaya	178,80	165,00	166,43	166,09	175,54
17	Bener Meriah	123,20	119,36	115,98	112,63	108,97
18	Pidie Jaya	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60
19	Banda Aceh	127,31	117,02	109,29	102,93	105,80
20	Sabang	116,62	108,65	113,73	113,73	113,73
21	Langsa	143,20	138,73	130,44	124,22	115,04
22	Lhokseumawe	130,11	130,11	132,70	134,83	136,99
23	Subulussalam	95,20	95,20	95,20	92,88	87,87
IRB Provinsi Aceh		**153,58**	**149,99**	**149,10**	**146,90**	**146,90**
IRB Nasional		**141,85**	**138,81**	**135,56**	**132,25**	**132,25**

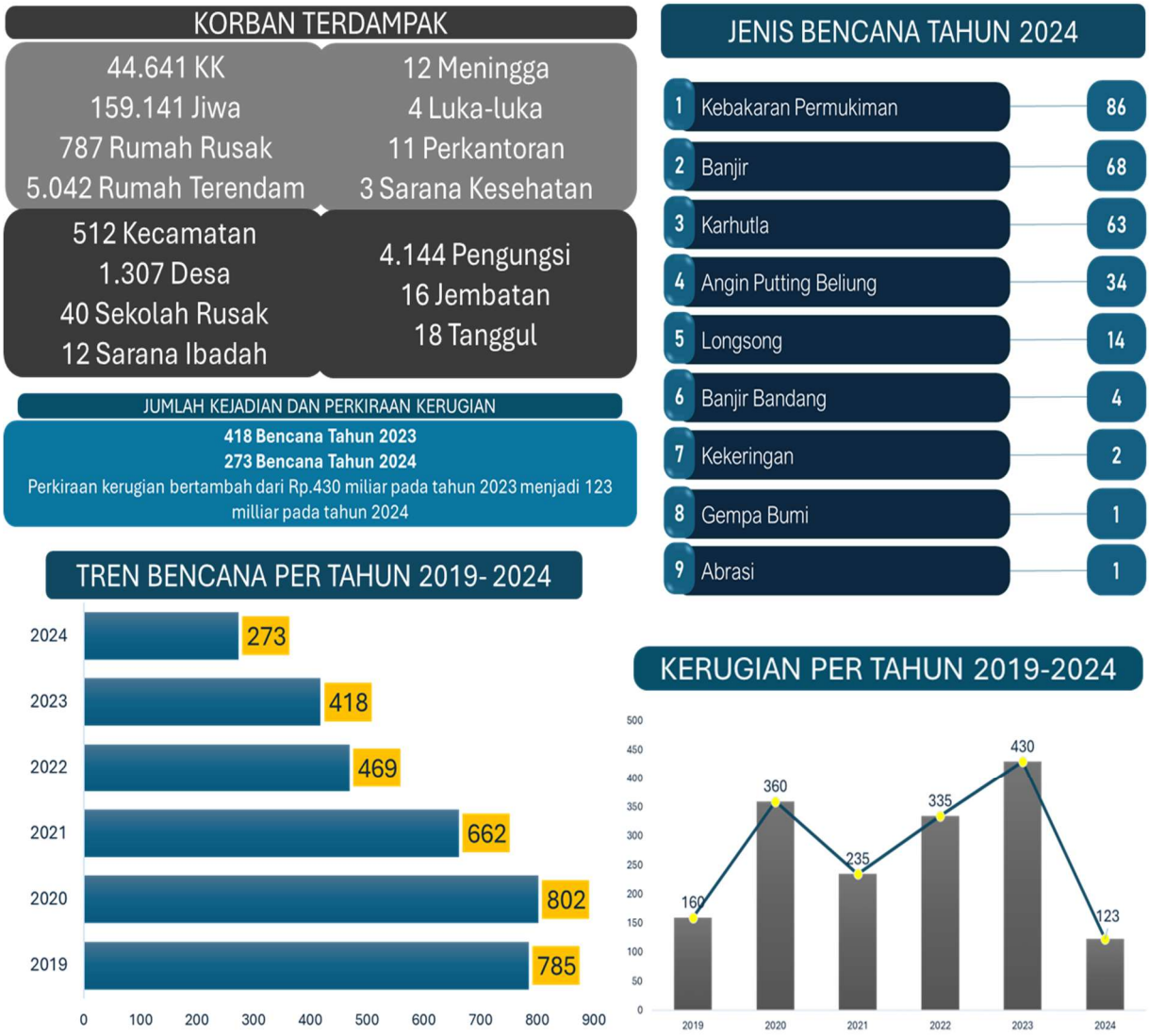
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Potensi ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah Aceh yang meliputi geografi, kependudukan, perekonomian dan sebagainya menentukan tingkat kerentanan wilayah jika terjadi suatu bencana. Potensi risiko bencana akan meningkat dan memberikan dampak yang besar apabila kapasitas wilayahnya rendah. Aceh memiliki riwayat terjadinya bencana di masa lalu, yang tentu harus diantisipasi kemungkinan berulangnya kejadian bencana tersebut dalam skala yang lebih besar.

Kerawanan bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Potensi bencana alam di Aceh adalah

bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, likuefaksi dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi serta cuaca ekstrem).

Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Potensi bencana non alam di Aceh antara lain yaitu epidemi dan wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Pandemi covid- 19 yang terjadi di Indonesia Tahun 2020 lalu merupakan salah satu jenis bencana non-alam. Jenis bencana yang terakhir adalah bencana sosial yang merupakan bencana akibat serangkaian peristiwa oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2024

Gambar 2.59. Data Bencana Aceh Tahun 2019-2024

Dari **Gambar 2.59** dapat dilihat bahwa Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Aceh dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024) mengalami kecendrungan penurunan kejadian bencana setiap tahunnya. Jumlah kejadian bencana dari Tahun 2019 hingga Tahun 2024 dilaporkan sebanyak 3.409 kejadian bencana atau rata-rata 568 kejadian bencana per tahun. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 15 jenis sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.52**.

Tabel 2.52.
Potensi Bencana di Aceh

No.	Jenis Bencana	No.	Jenis Bencana
1	Gempa Bumi	9	Kebakaran Hutan dan Lahan
2	Gunung Api	10	Angin Puting Beliung
3	Tsunami	11	Gelombang Pasang atau Badai
4	Tanah Longsor	12	Abrasi
5	Banjir	13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)
6	Banjir Bandang	14	Likuifaksi
7	Kekeringan	15	Ledakan Sumur Minyak Masyarakat
8	Kebakaran		

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh 2020-2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 6 ayat (1) sampai ayat (7) bahwa pemerintah daerah diwajibkan Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana dengan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan. Penyusunan dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan kebencanaan di daerah, mulai dari pengumpulan data, cek lapangan, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok subtansi, diskusi publik, paparan draft RPB hingga finalisasi penyusunan dokumen RPB.

Penyusunan dokumen RPB Aceh menyikapi tingginya potensi bencana yang terjadi di Aceh. secara historis, di Aceh telah mengalami beberapa jenis bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari Tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada Tahun 2021 hingga 2024. Jumlah kejadian bencana dari Tahun 2017 hingga Tahun 2024 dilaporkan sebanyak 3.955 kejadian bencana atau rata-rata 494 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu Tahun 2017 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.53**.

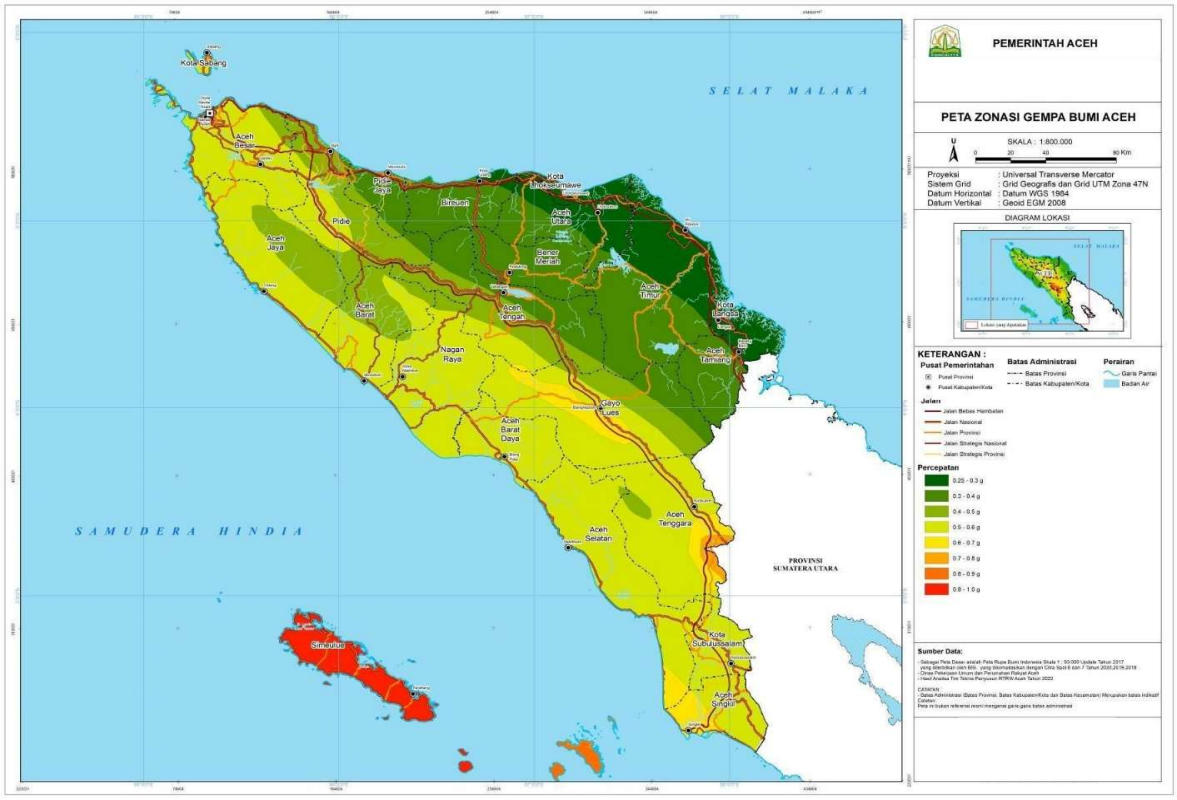
Tabel 2.53.
Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2024

No	Jenis Bencana	Tahun (Jumlah Kejadian)								Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Gempa Bumi	1	6	14	21	1	2	2	1	48
2	Letusan Gunung Api	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanah Longsor	18	27	46	57	42	35	27	14	266
5	Banjir	61	80	102	108	112	120	105	68	756
6	Banjir Bandang	5	7	8	5	6	4	3	4	42
7	Kekeringan	-	-	-	2	-	-	1	2	5
8	Kebakaran	71	97	285	289	269	153	149	86	1399
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	66	220	205	133	79	85	63	860
10	Angin Puting Beliung	17	71	102	100	89	71	44	34	528
11	Gelombang Pasang	2	0	2	3	5	1	0	0	13
12	Abrasi	1	7	6	12	5	4	2	1	38
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Likuifaksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**185**	**361**	**785**	**802**	**662**	**469**	**418**	**273**	**3.955**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2025

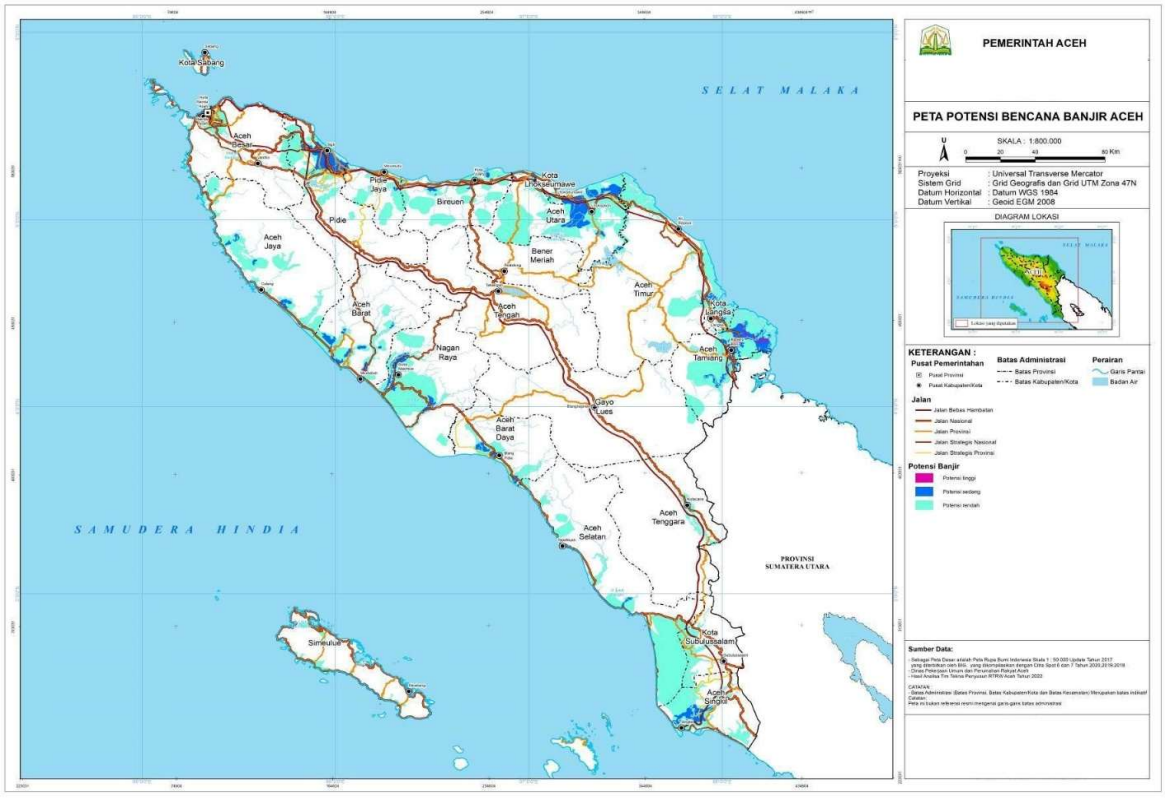
Dari 14 jenis bencana tersebut diatas, masih terdapat 1 bencana tambahan berupa bencana ledakan sumur minyak masyarakat yang kerap terjadi di kabupaten Aceh Timur. Melihat jumlah dan jenis bencana tersebut diatas, sehingga dibutuhkan RPB Aceh yang komprehensif, terpadu dan optimal. Optimalisasi perencanaan penanggulangan bencana tersebut dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana serta pengintegrasian RPB Aceh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). RPB Aceh memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh.

Gambar 2.60 memberikan informasi bahwa Kabupaten Bener Meriah, Nagan Raya dan Gayo Lues yang memiliki indeks rawan bencana gempa bumi moderat. Selebihnya termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian bencana banjir bandang diketahui melanda beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pidie (Krueng Tangse), Kabupaten Aceh Tenggara (Sungai Lawe Sigala-gala), dan Kabupaten Gayo Lues. Banjir bandang telah menimbulkan kerugian harta benda dan merenggut korban jiwa akibat dari rusaknya lingkungan. Demikian juga dengan banjir genangan yang secara rutin dan berkala terjadi di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Aceh Singkil. Bencana tanah longsor terjadi pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, lintasan perbatasan Aceh Besar dan Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Aceh Tengah. Peta sebaran risiko bencana banjir di Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.61**.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2023

Gambar 2.60. Peta Rawan Bencana Gempa Aceh



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh, 2023

Gambar 2.61. Peta Risiko Bencana Banjir Aceh

Bahaya bencana banjir di Aceh berdampak terhadap 5.205 desa di setiap kabupaten kota dengan dominasi risiko paparan sedang. Wilayah dengan risiko paparan bencana banjir tertinggi ditunjukkan kepada Aceh Besar dengan sebaran 706 desa yang terpapar risiko bencana banjir dominasi sedang. Adapun wilayah Kota Sabang berada pada tingkat risiko terkecil dengan 5 desa yang berisiko terpapar bencana banjir dominasi rendah.

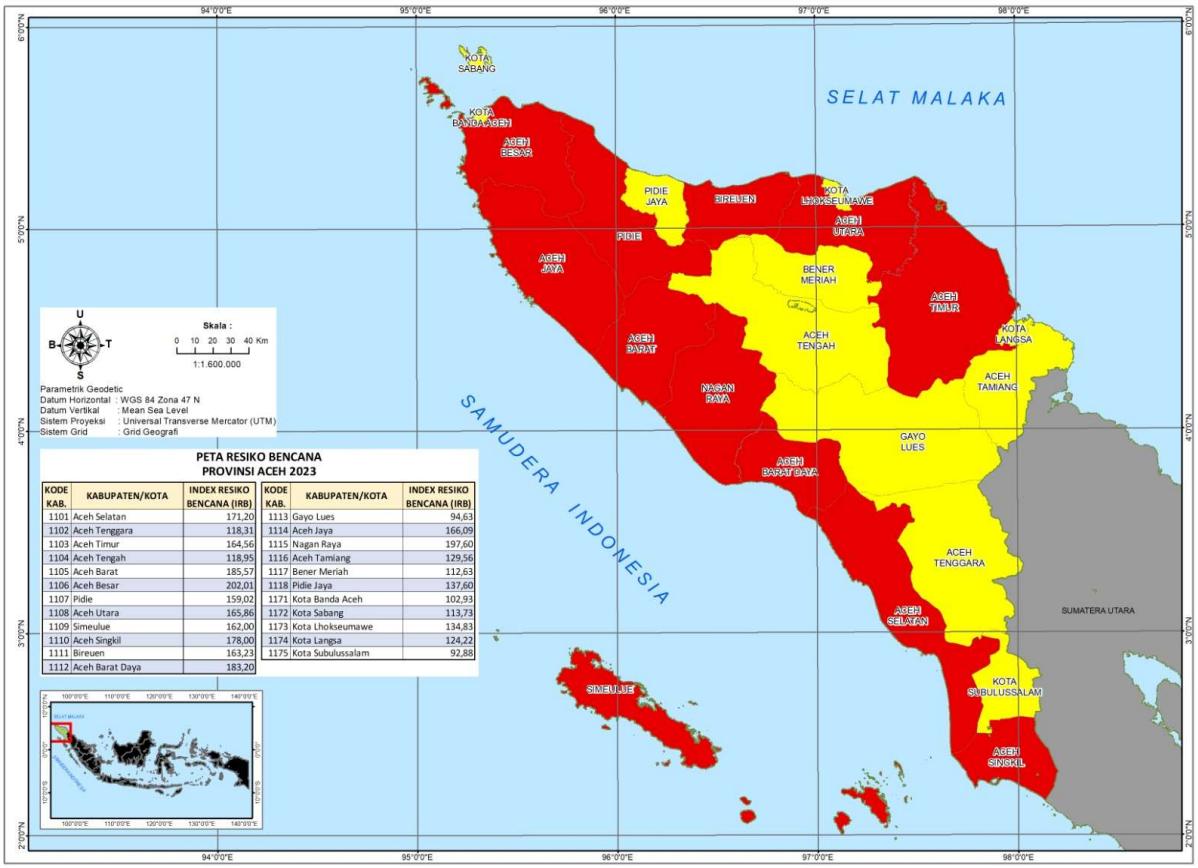
Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA pada Tahun 2022 per bulan Agustus menunjukkan bahwa bencana banjir sudah terjadi sebanyak 42 kali yang berdampak pada 171 rumah masyarakat terendam. Berdasarkan data kebencanaan Aceh dapat dibagi dalam beberapa kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Sabang;
2. Kawasan rawan banjir, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir, yang tersebar pada beberapa kawasan yaitu pada Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya;
3. Kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Nagan Raya;
4. Kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir utara-timur, pesisir barat-selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terluar lainnya;
5. Kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputi seluruh wilayah Aceh;
6. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya;
7. Kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Hindia di sebelah Barat, perairan Laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
8. Kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya;
9. Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;

10. Kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang;
11. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Kawasan rawan bencana Likuefaksi meliputi wilayah Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.

Data Tahun 2023 menunjukkan bahwa Aceh memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 146,9 dengan kategori tinggi. Pada Tahun 2024, nilai IRB Aceh mengalami koreksi menjadi 144,29 namun tetap berada dalam kategori tinggi. Capaian ini mencerminkan adanya upaya konsisten dalam pengelolaan risiko bencana serta menjadi dasar penting dalam penguatan arah kebijakan pembangunan yang tangguh bencana. Peta sebaran Indeks Rawan Bencana Aceh disajikan pada **Gambar 2.62**.



PETA RESIKO BENCANA
PROVINSI ACEH 2023

KODE KAB.	KABUPATEN/KOTA	INDEX RESIKO BENCANA (IRB)	KODE KAB.	KABUPATEN/KOTA	INDEX RESIKO BENCANA (IRB)
1101	Aceh Selatan	171,20	1113	Gayo Lues	94,63
1102	Aceh Tenggara	118,31	1114	Aceh Jaya	166,09
1103	Aceh Timur	164,56	1115	Nagan Raya	197,60
1104	Aceh Tengah	118,95	1116	Aceh Tamiang	129,56
1105	Aceh Barat	185,57	1117	Bener Meriah	112,63
1106	Aceh Besar	202,01	1118	Pidie Jaya	137,60
1107	Pidie	159,02	1171	Kota Banda Aceh	102,93
1108	Aceh Utara	165,86	1172	Kota Sabang	113,73
1109	Simeulue	162,00	1173	Kota Lhokseumawe	134,83
1110	Aceh Singkil	178,00	1174	Kota Langsa	124,22
1111	Bireuen	163,23	1175	Kota Subulussalam	92,88
1112	Aceh Barat Daya	183,20			

Sumber: Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2024

Gambar 2.62. Peta Indeks Rawan Bencana Aceh

Berdasarkan peta risiko bencana Aceh Tahun 2023, sebagian besar wilayah kabupaten/kota berada pada kategori risiko tinggi, ditandai dengan warna merah, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya berada pada kategori risiko sedang, yang ditunjukkan dengan warna kuning. Secara spasial, wilayah pesisir timur dan barat Aceh

cenderung memiliki tingkat risiko bencana yang lebih tinggi karena kerentanan terhadap banjir, tsunami, dan abrasi pantai. Sementara itu, wilayah tengah yang didominasi daerah pegunungan seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah berada dalam kategori sedang, dengan karakteristik risiko yang lebih terkait pada potensi tanah longsor dan gempa bumi.

Kondisi ini menggambarkan distribusi kerentanan wilayah yang beragam di seluruh Aceh. Dengan demikian, arah pembangunan daerah diarahkan pada penguatan strategi mitigasi, adaptasi, serta ketangguhan wilayah secara terintegrasi, sehingga upaya penurunan IRB dapat dilakukan secara berkelanjutan menuju tingkat risiko yang lebih rendah.

C. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan . Semakin tinggi nilai IKD, semakin baik kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan merespons tantangan-tantangan yang mungkin timbul. IKD tertinggi diraih oleh Kota Langsa dengan indeks sebesar 0,49, menyusul Kabupaten/Kota Banda Aceh, Aceh Timur Aceh Barat, dan Aceh Tamiang dengan angka IKD masing-masing sebesar 0,48, 0,46, 0,45, dan 0,44 Selanjutnya daerah yang memiliki nilai IKD terendah sebesar 0,25 adalah Kabupaten Gayo Lues. Nilai IKD setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada **Tabel 2.54**.

Tabel 2.54.
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Aceh Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue		0,29	0,29	0,29	0,30
2	Aceh Singkil		0,23	0,23	0,29	0,29
3	Aceh Selatan		0,22	0,22	0,30	0,29
4	Aceh Tenggara	0,36	0,41	0,34	0,38	0,42
5	Aceh Timur	0,42	0,42	0,42	0,42	0,46
6	Aceh Tengah		0,20	0,35	0,36	0,37
7	Aceh Barat	0,42	0,42	0,42	0,42	0,45
8	Aceh Besar	0,30	0,33	0,34	0,36	0,38
9	Pidie	0,27	0,29	0,32	0,35	0,40
10	Bireuen		0,21	0,34	0,34	0,39
11	Aceh Utara		0,29	0,35	0,36	0,34
12	Aceh Barat Daya	0,23	0,25		0,30	0,31
13	Gayo Lues	0,39	0,39		0,39	0,25
14	Aceh Tamiang	0,40	0,41	0,41	0,42	0,44
15	Nagan Raya	0,30	0,34		0,34	0,36
16	Aceh Jaya	0,47	0,48	0,38	0,39	0,29
17	Bener Meriah		0,36	0,37	0,38	0,40
18	Pidie Jaya		0,28	0,27	0,29	0,29
19	Banda Aceh	0,64	0,58	0,59	0,61	0,48
20	Sabang	0,42	0,45	0,30	0,30	0,29
21	Langsa	0,32	0,36	0,42	0,42	0,40
22	Lhokseumawe			0,41	0,40	0,49

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
23	Subulussalam	0,26	0,26	0,31	0,35	0,40
	Aceh				**0,37**	

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

2.1.1.7. Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk Aceh mencapai 5.623.479 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 97,03 orang per kilometer persegi. Angka ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2023 yang tercatat sebanyak 5.515.839 jiwa. Berikut ini, adalah Gambar 2.8 tentang jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan kepadatan penduduk per kilometer di Aceh selama 5 terakhir.

Tabel 2.55.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Kepadatan Penduduk per Km
2019	5.247.257	0,42	90,54
2020	5.269.809	0,78	92,84
2021	5.311.320	0,68	93,58
2022	5.432.312	0,60	92,27
2023	5,515,839	1,54	95,71
2024	5,623,479	1,91	97,03

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2025 (Diolah)

B. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi dan pertumbuhan penduduk di Aceh antara Tahun 2020 hingga 2024 tersebar di 18 kabupaten dan 5 kota, namun belum merata. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.56**.

Tabel 2.56.
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2024

Kabupaten/ Kota	Tahun											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk
Aceh Selatan	236.359	0,67	237.326	0,41	236.487	-0,35	234.339	-0.99	236.933	1.11	239,629	1.13
Aceh Tenggara	226.162	0,45	227.174	0,45	227.456	0,12	228.175	0.20	231.331	1,38	235,589	1.81
Aceh Timur	423.638	-1,26	426.398	0,65	429.094	0,63	441.719	1.34	449.796	1,83	461,391	2.51
Aceh Tengah	214.828	0,82	216.072	0,58	219.098	0,58	222.558	0.29	227.168	2,07	232,606	2.34
Aceh Barat	195.955	0,63	196.834	0,45	198.411	0,8	200.123	0.22	204.475	2,17	209,220	2.27
Aceh Besar	393.903	0,98	403.711	2,43	416.532	3,13	429.143	1.35	435.298	1,43	442,987	1.74
Pidie	442.45	0,50	444.149	0,38	435.797	-1,9	439.298	0.23	444.898	1,27	451,076	1.37

Kabupaten/ Kota	Tahun											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk	Jmlh Pddk	Pertumbuhan Pddk
Aceh Utara	586.851	0,59	590.536	0,62	600.163	1,62	619.506	1.57	627.543	1,30	641,007	2.10
Simeulue	93.724	0,79	94.146	0,45	94.368	0,24	95.047	0.20	96.031	1,04	96,812	0.81
Aceh Singkil	126.996	0,17	127.711	0,56	129.333	1,26	131.423	0.26	135.435	3,05	140,461	3.58
Bireuen	440.35	0,39	444.149	0,59	444.383	0,32	451.952	0.25	458.978	1,55	468,696	2.07
Aceh Barat Daya	152.248	0,50	152.949	0,46	153.213	0,17	153.829	0.20	154.800	0,63	156,128	0.85
Gayo Lues	101.045	1,09	101.54	0,49	101.754	0,21	102.314	0.20	104.856	2,48	107,506	2.46
Aceh Jaya	92.109	1,61	92.781	0,72	94.761	2,11	97.124	1.34	99.717	2,67	101,407	1.67
Nagan Raya	171.55	0,78	172.257	0,41	172.484	0,13	173.316	0.20	176.461	1,81	181,103	2.56
Aceh Tamiang	297.429	1,03	299.487	0,69	300.831	0,45	303.471	0.32	308.102	1,53	312,061	1.27
Bener Meriah	160.634	0,62	161.627	0,61	166.448	2,94	171.400	1.20	175.781	2,56	181,376	3.08
Pidie Jaya	161.43	0,81	162.174	0,46	159.941	-1,39	160.828	0.21	163.591	1,72	166,517	1.76
Banda Aceh	245.779	0,44	248.892	1,25	253.198	1,72	255.409	0.33	259.538	1,62	265,310	2.18
Sabang	42.191	0,41	42.457	0,63	42.696	0,56	43.176	0.40	43.527	0,81	42,793	-1.72
Lhokseumawe	189.505	-2,05	190.479	0,51	191.034	0,29	192.860	0.34	196.067	1,66	198,705	1.33
Langsa	187.388	0.51	188.244	0,45	185.836	-1,29	186.211	0.13	182.469	-2,01	183,914	0.79
Subulussalam	87.285	1,78	91.423	4,53	94.571	3,39	99.091	1.79	103.044	3,99	107,185	3.86
Aceh	**5.247.257**	**0,42**	**5.269.809**	**0,78**	**5.311.320**	**0,68**	**5.432.312**	**0.60**	**5,515,839**	**1,54**	**5,623,479**	**1.91**

Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Tahun 2025 (Diolah)

Data diatas, menunjukkan bahwa pada periode 2019 hingga 2024, jumlah penduduk di Aceh terus meningkat meskipun ada fluktuasi di beberapa daerah. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Aceh meningkat dari 5.247.257 jiwa pada 2019 menjadi 5.623.479 jiwa pada 2024, dengan angka pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata sebesar 1,91 persen pada 2024.

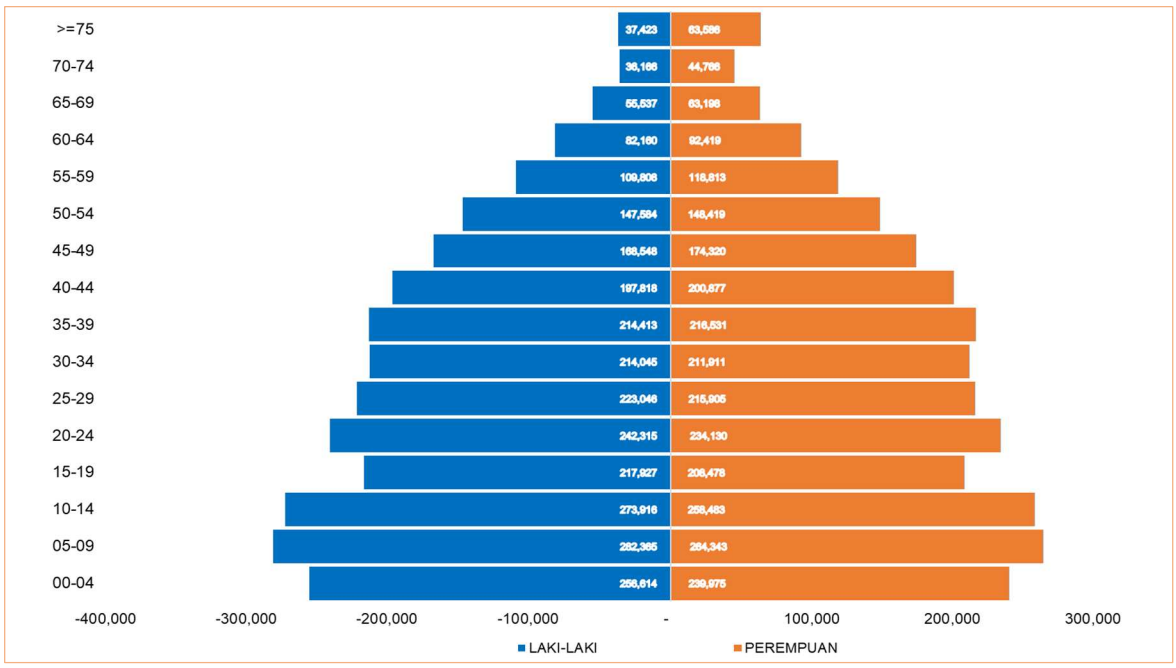
Kabupaten/kota di Aceh yang menunjukkan pertumbuhan pesat, adalah Aceh Singkil mengalami peningkatan yang sangat tinggi dengan angka pertumbuhan mencapai 3,58 persen pada 2024; Bener Meriah juga mencatatkan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 3,08 persen pada 2024; Subulussalam mengalami pertumbuhan yang sangat baik, dengan angka 3,86 persen pada 2024, sedangkan daerah yang menunjukkan penurunan angka pertumbuhan, yaitu Sabang mengalami penurunan signifikan pada 2024, dengan angka pertumbuhan sebesar -1,72 persen; Langsa juga mencatatkan angka pertumbuhan negatif pada 2023 yaitu -2,01 persen, meskipun sedikit meningkat pada 2024 menjadi 0,79 persen.

C. Struktur Penduduk

Pengelompokan penduduk berdasarkan struktur umur penduduk dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu penduduk usia muda (0-14) tahun penduduk usia produktif (15-59) tahun dan penduduk usia lanjut (>60). Struktur penduduk Aceh memiliki pola struktur yang relatif serupa dengan struktur penduduk nasional yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) Piramida penduduk muda. Struktur ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Struktur penduduk ini menunjukkan jumlah angka kelahiran lebih besar dari jumlah kematian; 2) Piramida stationer. Struktur ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran relatif tidak tinggi; 3) Piramida penduduk tua.

Struktur ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang relatif kecil.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur tertinggi pada Tahun 2024 berada pada kelompok umur antara (20-24) tahun, yaitu 476,445 jiwa (8.64%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 242,315 jiwa (8.78%) dan perempuan sebesar 234,130 jiwa (8.49%). Jumlah penduduk menurut kelompok umur terendah adalah pada kelompok umur non produktif antara (70-74) tahun, yakni sebesar 80,932 jiwa (1,47%). Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 3,639,467.00 jiwa (65,98%). Jika di lihat berdasarkan pengelompokkan umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (≥65 tahun), yaitu sebesar 300,676.00 jiwa (5,45%).



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (Diolah)

Gambar 2.63. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2024 (jiwa)

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan semakin mengurangi beban ekonomi penduduk usia produktif.

Beban Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Aceh akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Aceh akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan

pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat dan keuntungan Bonus Demografi ini, diantaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai keahlian dan memiliki daya saing; dan meningkatan peluang kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

D. Laju pertumbuhan penduduk, rasio dan kepadatan penduduk Aceh

Berdasarkan data Tahun 2024, jumlah penduduk Aceh tercatat sebesar 5.570.453 jiwa, yang terdiri dari 2.788.055 jiwa penduduk laki-laki dan 2.782.398 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini mencerminkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,98 persen, yang menunjukkan dinamika demografi yang relatif stabil pada tingkat . Namun demikian, laju pertumbuhan tersebut bervariasi antar kabupaten/kota. Beberapa daerah mencatat angka pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Aceh Singkil sebesar 2,42 persen, Kota Subulussalam sebesar 2,38 persen, dan Kabupaten Bener Meriah sebesar 1,80 persen, yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk lebih cepat pada daerah-daerah dengan daya tarik ekonomi maupun keterbukaan wilayah. Di sisi lain, terdapat kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan sangat rendah seperti Kota Langsa (0,08 persen) dan Kabupaten Aceh Barat Daya (0,13 persen), bahkan Kota Sabang mencatat angka pertumbuhan negatif (-1,90 persen) yang menandakan terjadinya penurunan jumlah penduduk.

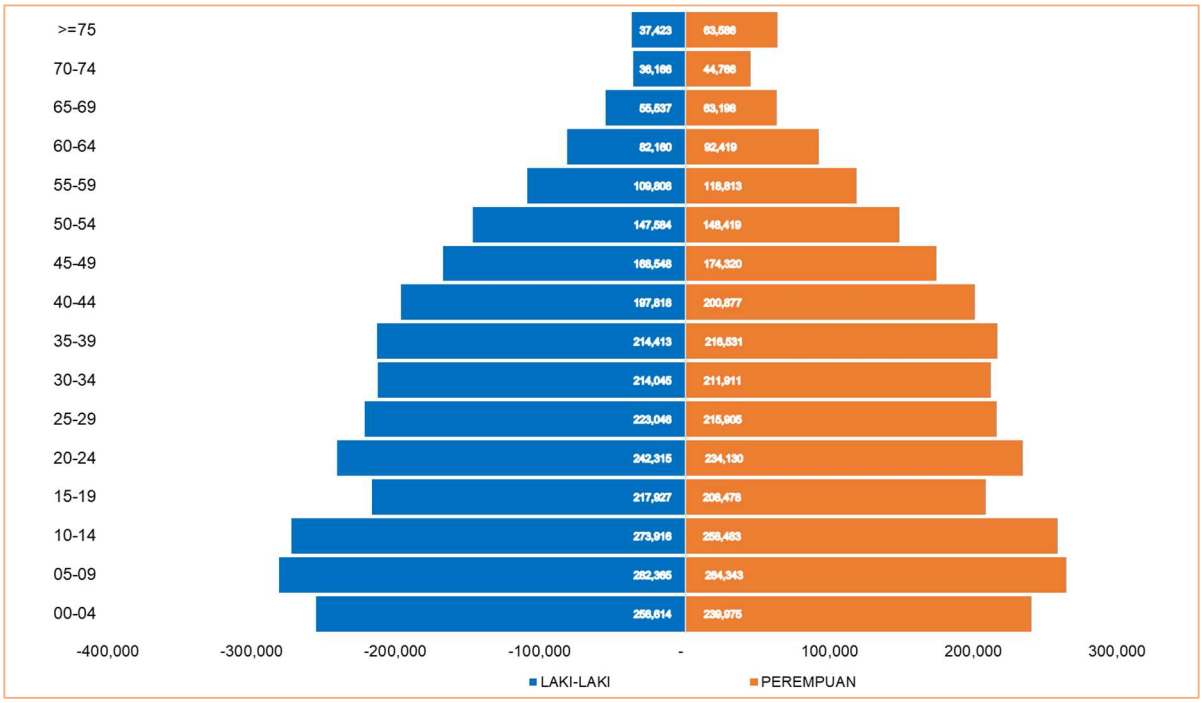
Tabel 2.57.
Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Aceh Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Data Penduduk (Jiwa)			Angka Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (km^2)	Rasio Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
		Lk	Pr	Jlh			
1	Aceh Selatan	119.185	118.836	238.021	0,46	4.175,375	57,006
2	Aceh Tenggara	117.132	116.495	233.627	0,98	4.179,123	55,903
3	Aceh Timur	228.968	225.755	454.723	1,08	5.409,406	84,062
4	Aceh Tengah	116.553	114.218	230.771	1,56	4.468,417	51,645
5	Aceh Barat	104.626	103.064	207.690	1,55	2.782,873	74,632
6	Aceh Besar	220.028	219.020	439.048	0,85	2.891,477	151,842
7	Pidie	220.673	227.458	448.131	0,72	3.177,485	141,033
8	Aceh Utara	315.500	318.133	633.633	0,96	2.705,255	234,223
9	Simeulue	49.412	47.098	96.510	0,50	1.821,747	52,977
10	Aceh Singkil	70.085	68.707	138.792	2,42	1.852,823	74,908
11	Bireuen	227.973	234.863	462.836	0,83	1.796,992	257,562
12	Aceh Barat Daya	78.086	76.911	154.997	0,13	1.882,277	82,345
13	Gayo Lues	53.360	52.776	106.136	1,21	5.541,285	19,154
14	Aceh Jaya	51.030	49.644	100.674	0,95	3.872,352	25,998
15	Nagan Raya	90.325	88.783	179.108	1,48	3.524,164	50,823
16	Aceh Tamiang	156.927	153.556	310.483	0,77	2.187,657	141,925
17	Bener Meriah	90.648	88.358	179.006	1,80	1.907,399	93,848
18	Pidie Jaya	81.788	83.292	165.080	0,90	939,004	175,803
19	Banda Aceh	131.107	131.855	262.962	1,30	56,770	4632,059

No	Kabupaten/ Kota	Data Penduduk (Jiwa)			Angka Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (km^2)	Rasio Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
		Lk	Pr	Jlh			
20	Sabang	21.461	21.256	42.717	-1,90	122,063	349,959
21	Lhokseumawe	97.982	99.357	197.339	0,64	132,966	1484,131
22	Langsa	91.551	91.065	182.616	0,08	224,235	814,396
23	Subulussalam	53.655	51.898	105.553	2,38	1.183,601	89,180
Aceh		**2.788.055**	**2.782.398**	**5.570.453**	**0,98**	**56.834,75**	**98,011**

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (diolah)

Rasio kepadatan penduduk Aceh pada Tahun 2024 mencapai rata-rata 98,01 jiwa per kilometer persegi**,** dengan distribusi yang tidak merata antar kabupaten/kota. Kota Banda Aceh merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 4.632,06 jiwa/km^2**,** disusul oleh Kota Lhokseumawe dengan 1.484,13 jiwa/km^2 serta Kota Langsa dengan 814,40 jiwa/km^2**.** Kepadatan tinggi di wilayah perkotaan mencerminkan tingkat urbanisasi yang cukup pesat, sekaligus menandakan adanya konsentrasi aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik di pusat-pusat kota. Sementara itu, terdapat wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, seperti Kabupaten Gayo Lues (19,15 jiwa/km^2), Aceh Jaya (25,99 jiwa/km^2)**,** dan Nagan Raya (50,82 jiwa/km^2), yang menggambarkan karakteristik wilayah dengan bentang alam luas, pemanfaatan ruang yang belum optimal, serta penyebaran penduduk yang cenderung jarang.



Sumber : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2025 (Diolah)

Gambar 2.64. Struktur Penduduk Aceh Tahun 2023

Pola pertumbuhan dan kepadatan penduduk ini memberikan gambaran tentang dinamika demografi Aceh yang beragam. Daerah perkotaan cenderung mengalami konsentrasi penduduk yang tinggi, sementara wilayah pedalaman dan perbatasan memiliki kepadatan relatif rendah. Pola ini tidak hanya menggambarkan variasi dalam distribusi penduduk, tetapi juga berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur dasar,

aksesibilitas layanan, kesempatan kerja, serta potensi daya tarik wilayah dalam mendorong pergerakan penduduk.

E. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan

Perencanaan pembangunan membutuhkan data kependudukan yang akurat, termasuk proyeksi jumlah penduduk di masa mendatang. Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Provinsi Aceh diperkirakan terus meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Pada Tahun 2025, jumlah penduduk Aceh diproyeksikan sebesar 5.625.960 jiwa, dan akan meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 5.898.194 jiwa pada Tahun 2029. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,2% per tahun.

Perencanaan pembangunan di Aceh membutuhkan dukungan data kependudukan yang akurat, termasuk proyeksi jumlah penduduk pada periode mendatang. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Aceh diperkirakan terus meningkat dalam lima tahun ke depan. Pada Tahun 2025 jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 5.625.960 jiwa dan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 5.898.194 jiwa pada Tahun 2029. Pertumbuhan ini menunjukkan konsistensi dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,2 persen per tahun, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan arah pembangunan jangka menengah Aceh.

Jika dilihat pada **Tabel 2.58**, Kabupaten Aceh Utara diproyeksikan menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu dari 638.957 jiwa pada Tahun 2025 menjadi 665.399 jiwa pada Tahun 2029. Disusul oleh Kabupaten Bireuen dengan jumlah penduduk sebesar 486.206 jiwa dan Kabupaten Pidie dengan jumlah penduduk 473.687 jiwa pada Tahun 2029. Di sisi lain, Kota Sabang tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terkecil, yakni sekitar 44.042 jiwa pada Tahun 2025 yang diproyeksikan meningkat menjadi 46.293 jiwa pada Tahun 2029.

Selain itu, beberapa wilayah lainnya juga menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten. Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi diproyeksikan tumbuh dari 267.962 jiwa pada Tahun 2025 menjadi 278.719 jiwa pada Tahun 2029. Kabupaten Aceh Besar mengalami pertumbuhan stabil dari 434.042 jiwa menjadi 456.503 jiwa pada periode yang sama. Sementara itu, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa juga memperlihatkan peningkatan jumlah penduduk secara bertahap dari tahun ke tahun, mencerminkan peran pentingnya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan.

Secara keseluruhan, proyeksi penduduk lima tahun ke depan memperlihatkan dinamika yang bervariasi antarwilayah di Aceh. Pertumbuhan penduduk di sejumlah daerah membuka peluang strategis untuk memperkuat pengembangan sarana dan prasarana publik sekaligus mendorong optimalisasi potensi wilayah. Sementara itu, wilayah dengan laju pertumbuhan yang relatif lebih lambat, seperti Gayo Lues, Simeulue, dan Aceh Jaya, tetap memiliki peranan penting melalui pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas lokal.

Dengan demikian, proyeksi penduduk ini menjadi instrumen yang signifikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kependudukan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan, sehingga setiap wilayah dapat berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing dalam periode lima tahun mendatang.

Tabel 2.58.
Proyeksi Penduduk Aceh 5 (lima) Tahun kedepan

Provinsi & Kab/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Simeulue	100 136	101 604	103 071	104 511	105 943
Aceh Singkil	138 070	140 432	142 762	145 078	147 357
Aceh Selatan	244 472	246 901	249 282	251 570	253 781
Aceh Tenggara	237 910	241 328	244 706	248 015	251 237
Aceh Timur	449 080	454 431	459 719	464 911	470 032
Aceh Tengah	229 608	232 425	235 210	237 939	240 630
Aceh Barat	208 812	210 738	212 583	214 370	216 080
Aceh Besar	434 042	439 753	445 392	450 977	456 503
Pidie	456 942	461 254	465 480	469 630	473 687
Bireuen	464 776	470 358	475 793	481 077	486 206
Aceh Utara	638 957	645 802	652 493	659 029	665 399
Aceh Barat Daya	161 341	163 464	165 536	167 566	169 558
Gayo Lues	108 672	110 542	112 395	114 203	115 999
Aceh Tamiang	312 820	316 534	320 196	323 780	327 289
Nagan Rsaya	178 460	180 440	182 372	184 245	186 070
Aceh Jaya	100 738	102 242	103 739	105 217	106 686
Bener Meriah	174 824	177 600	180 342	183 064	185 763
Pidie Jaya	168 546	170 580	172 577	174 534	176 442
Banda Aceh	267 962	270 795	273 523	276 171	278 719
Sabang	44 042	44 610	45 170	45 732	46 293
Langsa	201 058	204 203	207 309	210 387	213 418
Lhokseumawe	203 410	206 394	209 323	212 219	215 045
Subulussalam	101 282	103 499	105 703	107 889	110 057
Aceh	**5 625 960**	**5 695 929**	**5 764 676**	**5 832 114**	**5 898 194**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

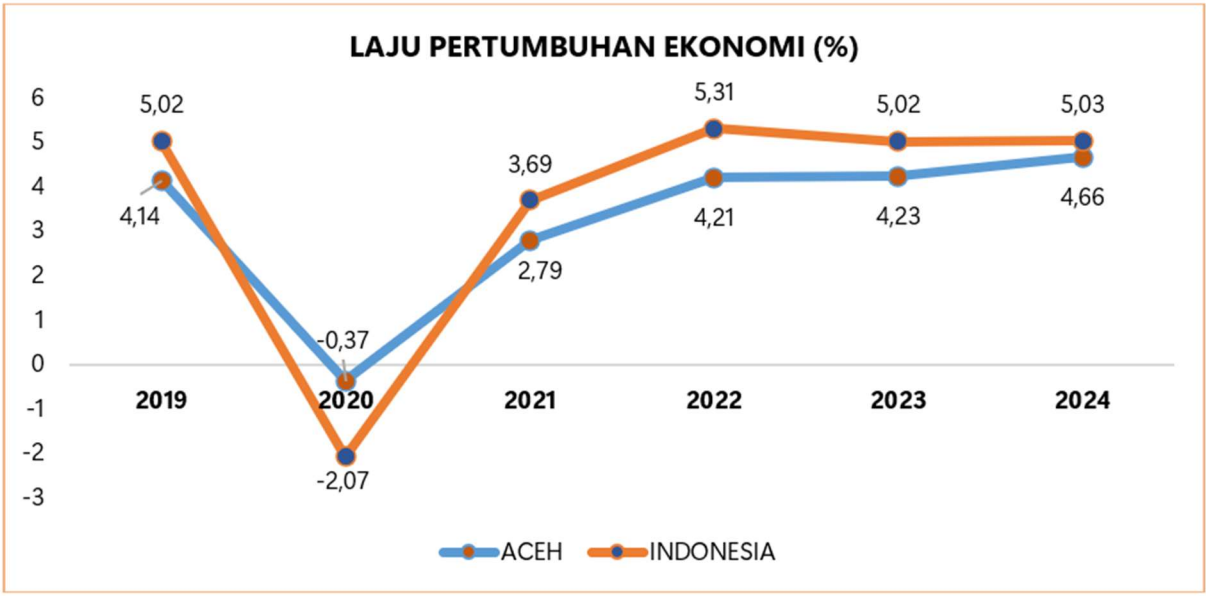
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) merupakan gambaran dari kinerja perekonomian Aceh. Selama periode 2019–2024, laju pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan pola yang sejalan terhadap capaian nasional. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat sebesar 4,14 persen, sedikit lebih rendah dibanding

capaian nasional yang tumbuh 5,02 persen. Memasuki Tahun 2020, perekonomian Aceh mengalami kontraksi sebesar -0,37 persen, sejalan dengan perekonomian nasional yang terkontraksi lebih dalam hingga -2,07 persen sebagai dampak pandemi covid-19 dan perlambatan aktivitas ekonomi global.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional , 2025

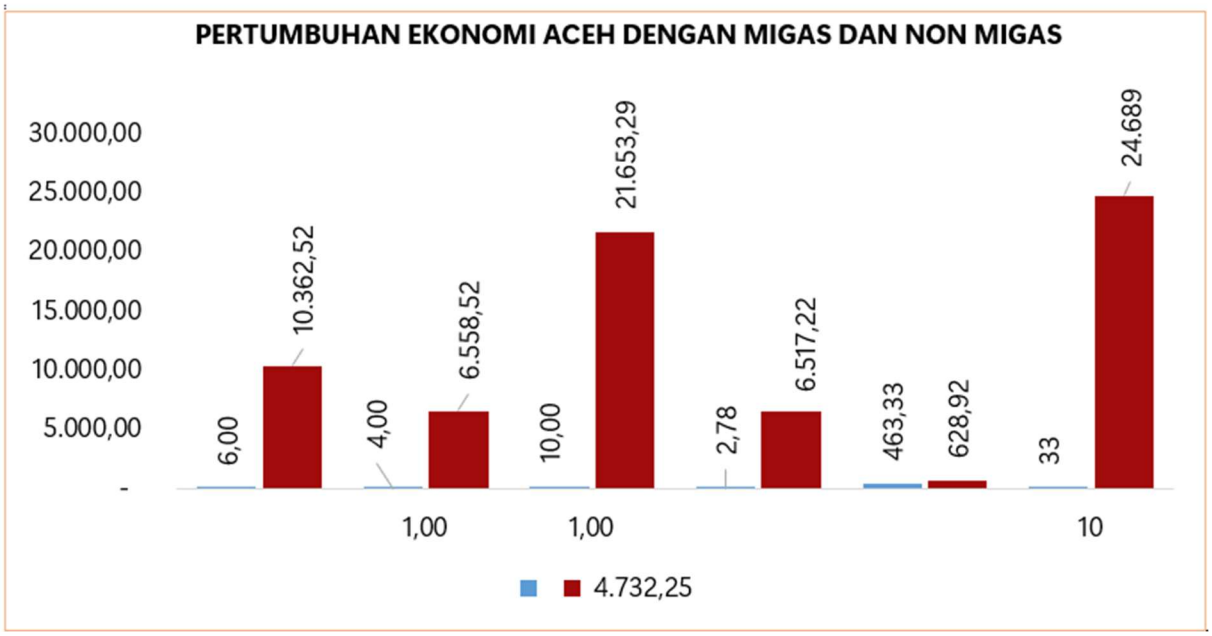
Gambar 2.65. Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh, dan Nasional, Tahun 2019- 2024 (Persen)

Seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, perekonomian Aceh mulai menunjukkan perbaikan. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 2,79 persen, meskipun masih berada di bawah pertumbuhan nasional sebesar 3,69 persen. Pemulihan berlanjut pada Tahun 2022, di mana Aceh tumbuh sebesar 4,21 persen, sementara nasional mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 5,31 persen. Tren positif tetap terjaga pada Tahun 2023 dan 2024, dengan pertumbuhan ekonomi Aceh masing-masing sebesar 4,23 persen dan 4,66 persen, sementara nasional relatif stabil pada tingkat 5,02 persen dan 5,03 persen. (**Gambar 2.65**).

Secara keseluruhan, dinamika pertumbuhan ekonomi Aceh pada periode 2019–2024 menunjukkan pola pergerakan yang konsisten dengan tren nasional, meskipun rata-rata capaian Aceh masih berada pada level yang lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur perekonomian Aceh telah beradaptasi dengan tekanan global dan domestik, serta menunjukkan prospek yang semakin stabil pada periode berikutnya. Peningkatan pertumbuhan yang terjadi pada Tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan adanya penguatan fundamental perekonomian Aceh yang sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional.

Bila ditinjau berdasarkan komposisi penyumbang, pertumbuhan ekonomi Aceh dengan migas dan nonmigas selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Secara umum, kinerja perekonomian Aceh nonmigas tumbuh lebih stabil dan signifikan dibandingkan sektor migas. Pada Tahun 2023, perekonomian dengan migas tumbuh sebesar 4,23 persen dan meningkat

menjadi 4,66 persen pada Tahun 2024. Sementara itu, laju pertumbuhan tanpa migas mencapai 4,91 persen pada Tahun 2023, meskipun sedikit melambat menjadi 4,69 persen pada Tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran struktur perekonomian Aceh dari dominasi sektor migas menuju sektor nonmigas, sehingga tingkat ketergantungan terhadap sektor migas mulai berkurang dan perekonomian daerah semakin ditopang oleh sektor nonmigas yang relatif lebih stabil.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2.66. Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan non Migas Tahun 2019-2024

Struktur perekonomian Aceh pada periode 2019–2024 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata lebih dari 30 persen. Pada posisi berikutnya, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati peringkat kedua, disusul oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib pada urutan ketiga. Komposisi ini menegaskan bahwa meskipun sektor migas masih memberikan kontribusi penting, perekonomian Aceh semakin bergeser menuju basis nonmigas yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Pada **Tabel 2.59**, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, seiring dengan perbaikan struktur ekonomi daerah. Nilai PDRB Aceh pada Tahun 2019 tercatat sebesar Rp164,17 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp166,37 triliun pada Tahun 2020, meskipun dalam kondisi perlambatan ekonomi global. Selanjutnya, pada Tahun 2021, PDRB meningkat menjadi Rp184,98 triliun, kemudian terus tumbuh menjadi Rp209,70 triliun pada Tahun 2022, Rp227,02 triliun pada Tahun 2023, dan mencapai Rp243,20 triliun pada Tahun 2024. Jika dilihat dari sisi nonmigas, PDRB Aceh juga menunjukkan peningkatan stabil dari Rp158,51 triliun pada 2019 menjadi Rp216,72 triliun pada 2023, yang mencerminkan kontribusi penting sektor-sektor nonmigas dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.59.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	48,44	51,55	55,61	62,3	69,76	75,32
B.	Pertambangan & Penggalian	7,9	7,41	12,31	19,12	16,95	17,15
B1.	Pertambangan Minyak & Gas Bumi	4,17	3,59	6,3	10,89	8,56	8,94
B2.	Pertambangan dan Penggalian Nonmigas	3,73	3,82	6,01	8,24	8,37	8,02
C.	Industri Pengolahan	7,78	7,59	9,31	10,87	10,98	11,46
C1.	Industri Batubara & Pengilangan Migas	1,48	1,48	1,54	1,71	1,71	1,63
C2.	Industri Nonmigas	6,3	6,11	5,87	9,17	9,27	9,83
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,23	0,23	0,23	0,24	0,26	0,28
E.	Pengadaan Air	0,08	0,08	0,09	0,09	0,1	0,16
F.	Konstruksi	15,79	17,76	18,31	19,05	20,32	21,39
G.	Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	25,47	24,6	26,46	29,36	34,43	36,46
H.	Transportasi & Pergudangan	10,59	7,65	9,49	11,5	14,3	16,91
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,78	2,65	2,53	3,57	4,01	4,17
J.	Informasi & Komunikasi	4,67	5,19	5,57	6,2	6,59	6,69
K.	Jasa Keuangan	3,51	3,51	3,53	3,62	3,28	4,06
L.	Real Estate	7,16	7,17	7,53	8,13	8,56	8,58
M.N	Jasa Perusahaan	1,07	1,06	1,1	1,34	1,38	1,44
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	16,83	17,08	19,05	18,75	19,87	22,08
P.	Jasa pendidikan	4,9	5,24	5,51	5,78	5,95	6,42
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,62	5,14	5,8	6,8	6,99	7,3
R, S, T, U	Jasa Lainnya	2,36	2,47	2,57	2,95	3,28	3,38
	PDRB	**164,17**	**166,37**	**184,98**	**209,698**	**227,018**	**243,202**
	PDRB NON MIGAS	**158,51**	**161,3**	**177,14**	**197,11**	**216,72**	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan lapangan usaha, struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang tumbuh signifikan dari Rp48,44 triliun pada Tahun 2019 menjadi Rp75,32 triliun pada Tahun 2024, dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap total PDRB. Sektor berikutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang meningkat dari Rp25,47 triliun pada 2019 menjadi Rp36,46 triliun pada 2024, menunjukkan penguatan konsumsi domestik dan aktivitas distribusi barang. Di sisi lain, sektor Konstruksi juga mencatat pertumbuhan yang stabil, dari Rp15,79 triliun pada 2019 menjadi Rp21,39 triliun pada 2024, memperlihatkan peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

Sektor-sektor lain yang turut memperkuat perekonomian Aceh antara lain Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat dari Rp16,83 triliun pada 2019 menjadi Rp22,08 triliun pada 2024, serta sektor Industri Pengolahan nonmigas yang tumbuh dari Rp6,30 triliun pada 2019 menjadi Rp9,83 triliun pada 2024. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan

Komunikasi, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan digitalisasi, dan penguatan layanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.60**.

Tabel 2.60
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh, 2019-2024 (Triliun Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	36,63	37,9	37,77	39,01	41,63	42,121
B.	Pertambangan & Penggalian	9,69	10,49	10,41	10,86	10,33	11,48
B1.	Pertambangan Minyak & Gas Bumi	4,99	5,42	4,61	5,35	4,7	4,94
B2.	Pertambangan dan Penggalian Nonmigas	4,7	5,07	5,8	5,5	5,63	3,16
C.	Industri Pengolahan	6,34	6,06	6,21	6,47	6,37	6,56
C1.	Industri Batubara & Pengilangan Migas	1,18	1,19	1,18	1,21	1,23	1,22
C2.	Industri Nonmigas	5,16	4,87	5,03	5,26	5,15	5,33
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,21	0,22	0,22	0,22	0,24	0,25
E.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	12,57	13,9	13,84	13,52	14,02	14,63
G.	Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	20,32	19,24	20,05	21,33	23,26	23,85
H.	Transportasi & Pergudangan	9,85	7,06	8,43	9,04	9,72	11,35
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,79	1,65	1,55	2,05	2,22	2,28
J.	Informasi & Komunikasi	4,63	5,19	5,58	6,21	6,51	6,63
K.	Jasa Keuangan	2,34	2,36	2,24	2,1	1,87	2,29
L.	Real Estate	5,51	5,45	5,67	5,89	6,11	6,32
M.N	Jasa Perusahaan	0,87	0,84	0,84	0,94	0,93	0,97
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	11,85	11,46	12,19	12,18	12,41	13,33
P.	Jasa pendidikan	3,53	3,65	3,7	3,84	3,908	4,079
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,99	4,17	4,58	5,02	5	5,11
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,89	1,91	1,96	2,22	2,35	2,45
	PDRB	**132,07**	**131,58**	**135,27**	**140,97**	**146,93**	**153,78**
	PDRB NON MIGAS	**125,91**	**124,97**	**129,48**	**134,41**	**141**	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun dasar 2010 selama periode 2019–2024 memperlihatkan struktur perekonomian yang relatif stabil dengan dominasi sektor-sektor utama yang konsisten memberikan kontribusi terbesar. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat sebagai kontributor utama, dengan peran yang terus meningkat dari 29,51 persen pada Tahun 2019 menjadi 30,97 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan peran strategis sektor primer dalam menopang perekonomian daerah.

Di sisi lain, sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi rata-rata di atas 6 persen dengan tren yang dinamis, yakni dari 4,82 persen pada Tahun 2019 menjadi 7,05 persen pada Tahun 2024, di mana subsektor minyak dan gas bumi berperan dominan. Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan kontribusi stabil di kisaran 4–5

persen, dengan industri nonmigas yang tumbuh lebih konsisten dibanding subsektor batubara dan pengilangan migas.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi di atas 14 persen, meningkat dari 14,79 persen pada Tahun 2020 menjadi 14,99 persen pada Tahun 2024, yang mencerminkan penguatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas distribusi barang. Sementara itu, sektor Konstruksi memberikan kontribusi rata-rata sekitar 9 persen, menunjukkan peran penting pembangunan infrastruktur dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, beberapa sektor jasa juga mencatat peran yang signifikan. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi rata-rata sekitar 9–10 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan meningkat dari 4,60 persen pada 2020 menjadi 6,95 persen pada 2024, serta sektor Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang masing-masing berkontribusi sekitar 2–3 persen dengan tren yang konsisten. Sektor Informasi dan Komunikasi juga tetap memberikan sumbangan stabil sekitar 2,75–3,12 persen dalam periode lima tahun terakhir. Untuk lebih jelasdapat dilihat pada **Tabel 2.61.**

Tabel 2.61
Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019 – 2024 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	29,51	30,98	30,06	29,71	30,73	30,97
B.	Pertambangan & Penggalian	4,82	4,45	6,65	9,12	7,5	7,05
B1.	Pertambangan Minyak & Gas Bumi	2,54	2,16	3,4	5,19	3,78	3,68
B2.	Pertambangan dan Penggalian Nonmigas	2,27	2,29	3,25	3,93	3,69	3,38
C.	Industri Pengolahan	4,47	4,56	5,04	5,19	4,84	4,71
C1.	Industri Batubara & Pengilangan Migas	0,9	0,89	0,83	0,82	0,75	0,67
C2.	Industri Nonmigas	3,84	3,67	4,2	4,37	4,07	4,05
D.	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11
E.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
F.	Konstruksi	9,62	10,67	9,9	9,09	8,95	8,80
G.	Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	15,51	14,79	14,3	14	15,17	14,99
H.	Transportasi & Pergudangan	6,45	4,60	5,13	5,48	6,30	6,95
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,69	1,59	1,37	1,7	1,77	1,72

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
J.	Informasi & Komunikasi	2,85	3,12	3,01	2,96	2,9	2,75
K.	Jasa Keuangan	2,14	2,11	1,91	1,73	1,45	1,67
L.	Real Estate	4,36	4,31	4,07	3,88	3,77	3,52
M.N	Jasa Perusahaan	0,65	0,64	0,59	0,64	0,61	0,59
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	10,25	10,26	10,3	8,94	8,75	9,04
P.	Jasa pendidikan	2,98	3,15	2,98	2,75	2,62	2,64
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,81	3,09	3,13	3,24	3,08	3,00
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,44	1,49	1,39	1,41	1,45	1,39
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	PDRB NON MIGAS	**95,56**	**96,95**	**95,76**	**93,67**	**95,43**	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Aceh pada periode 2019–2024 sebagaimana tergambar pada **Tabel 2.62** memperlihatkan dinamika yang beragam dengan tren peningkatan secara bertahap. Secara agregat, laju pertumbuhan ekonomi Aceh tumbuh rata-rata sebesar 4,12 persen pada Tahun 2019 dan mencapai 4,66 persen pada Tahun 2024, dengan pola yang relatif sejalan dengan capaian nasional.

Beberapa kabupaten/kota memperlihatkan pertumbuhan yang cukup tinggi sepanjang periode tersebut. Kabupaten Nagan Raya mencatat capaian tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 6,77 persen, serta tetap konsisten pada kisaran 4–6 persen hingga Tahun 2024. Kabupaten Aceh Barat juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 7,50 persen pada Tahun 2024, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota pada periode tersebut. Sementara itu, wilayah perkotaan seperti Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe memperlihatkan penguatan signifikan, di mana Banda Aceh tumbuh hingga 6,08 persen pada Tahun 2024, sedangkan Lhokseumawe mencapai 4,46 persen pada periode yang sama.

Pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten lain juga memperlihatkan stabilitas yang cukup baik. Kabupaten Bireuen secara konsisten tumbuh di atas 4 persen sejak 2021 hingga 2024, dengan capaian 4,52 persen pada 2024. Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup kuat, tumbuh dari 3,51 persen pada 2019 menjadi 4,98 persen pada 2024. Sementara itu, Kabupaten Pidie Jaya, meskipun sempat mencatat fluktuasi, mampu mencapai pertumbuhan 4,55 persen pada 2024.

Kota-kota lain seperti Langsa dan Subulussalam juga memperlihatkan tren pertumbuhan yang stabil dengan capaian masing-masing 4,43 persen dan 4,12 persen pada 2024, mencerminkan kontribusi positif dari aktivitas perdagangan, jasa, serta transportasi. Kabupaten-kabupaten lain seperti Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Tamiang juga memperlihatkan pertumbuhan yang solid dengan rata-rata mendekati 4–5 persen menjelang Tahun 2024.

Tabel 2.62.
Laju Pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019-2024 (Persen)

Wilayah	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	4,6	0,12	3,14	4,2	4,63	4,43
Aceh Singkil	3,99	-1,01	3,9	3,61	3,52	3,46
Aceh Selatan	4,43	-0,05	2,46	3,11	3,53	3,21
Aceh Tenggara	4,23	-0,17	1,57	2,69	3,04	3,59
Aceh Timur	4,42	1,54	1,94	3,73	2,09	4,63
Aceh Tengah	3,51	-1,18	3,3	4,93	5,6	4,98
Aceh Barat	4,99	1,88	5,84	3,28	4,08	7,5
Aceh Besar		0,39	2,44	3,87	4,37	4,95
Pidie	4,43	-0,12	2,63	3,98	3,95	4,15
Bireuen	5	-1,02	4,09	4,35	4,38	4,52
Aceh Utara	3,48	0,98	-0,54	4,69	0,51	3,56
Aceh Barat Daya	4,75	-0,65	2,88	3,87	3,92	4,24
Gayo Lues	1,26	0,88	2,32	3,51	3,98	3,26
Aceh Tamiang	4,55	0,42	0,88	3,27	2,25	4,25
Nagan Raya	6,77	3,36	4,26	3,06	6,83	4,38
Aceh Jaya	3,75	-0,62	2,59	3,68	4,15	3,83
Bener Meriah	4,32	0,09	3,42	3,42	5,22	3,27
Pidie Jaya		-0,79	2,03	3,57	4,24	4,55
Banda Aceh	4,13	-3,39	5,5	5,23	5,06	6,08
Sabang	5,82	-1,29	2,67	2,57	2,96	4,16
Langsa	4,39	-1,12	3,92	4,78	4,22	4,43
Lhokseumawe	3,98	-1,8	3,84	4,01	4,21	4,46
Subulussalam	4,42	1,97	3,87	4,12	4,06	4,12
Aceh	**4,12**	**-0,37**	**2,81**	**4,21**	**4,23**	**4,66**
Nasional	**5,02**	**-2,07**	**3,69**	**5,31**	**5,05**	**5,03**

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh dan Nasional, 2025

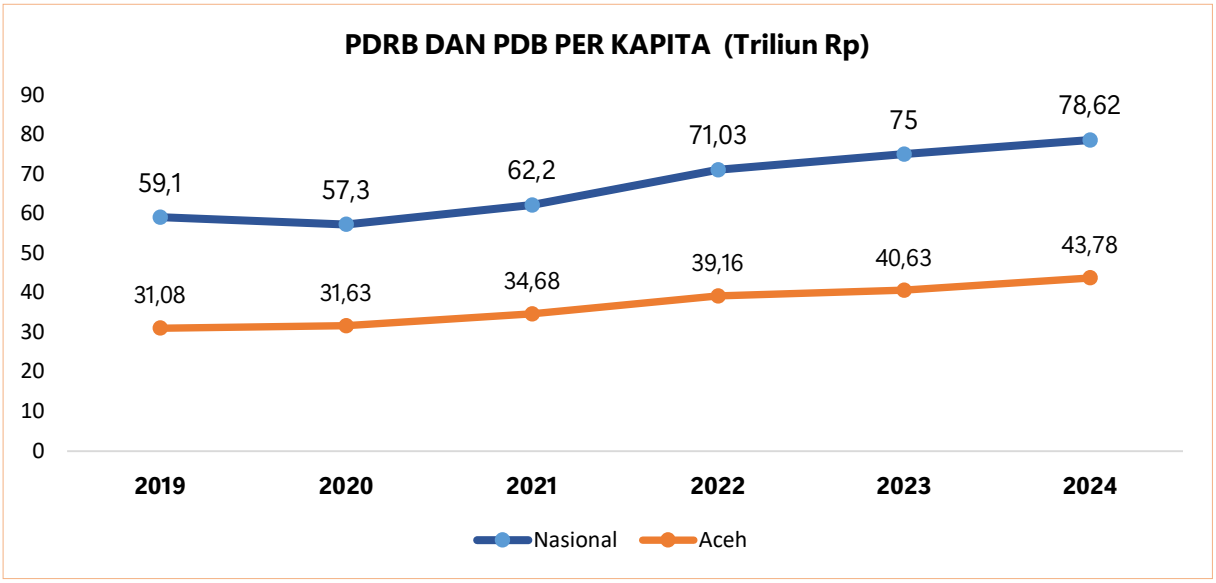
Secara keseluruhan, laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Aceh selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang konsisten dengan pergerakan ekonomi provinsi dan nasional. Dengan capaian 4,66 persen pada Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Aceh mencerminkan peran strategis sektor unggulan daerah, baik di sektor pertanian, jasa, perdagangan, maupun industri, dalam menopang penguatan struktur perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita Aceh 2019-2024 secara konsisten mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019, PDB Perkapita Aceh sebesar 31,08 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2023 menjadi 40,63 juta rupiah.

Jika dibandingkan dengan nasional, PDB Per Kapita Aceh jauh berada di bawah rata-rata nasional. PDRB perkapita Aceh pada Tahun 2024 sebesar Rp. 43,78 juta Rupiah lebih kecil bila dibandingkan dengan PDB per kapita pada Tahun 2019 sebesar Rp. 59.1 Juta. PDRB Per Kapita Nasional pada Tahun 2019 sebesar 59,10 ribu rupiah, dan terus mengalami peningkatan tajam menjadi Rp. 78,62 Juta pada Tahun 2024. Sementara trend kenaikan PDB Per Kapita Aceh terlihat melemah dan semakin menjauh dari rerata PDB nasional.

Untuk melihat persebaran tingkat kesejahteraan penduduk kabupaten/kota di Aceh, dapat memperhatikan PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2024 sebagaimana ditunjukkan dalam table di bawah ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa selama periode 2019-2024, PDRB per kapita Kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional kecuali Kota Banda Aceh (98.20 juta Rupiah) yang berada di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Sedangkan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2.67. PDRB Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)

Selanjutnya terdapat beberapa kabupaten/kota dengan PDRB perkapita berada di atas rata-rata Aceh, namun masih di bawah Nasional yaitu, Kabupaten Aceh Tengah (47.28 Juta Rupiah), Kabupaten Aceh Barat (67.98 Juta Rupiah), Nagan Raya (70.46 Juta), Aceh Utara, (47.60 Juta Rupiah) Kota Sabang (44.61 Juta Rupiah) dan Lhokseumawe (59.12 Juta Rupiah). Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang yang pada Tahun 2019-2020 berada di atas-rata-rata Aceh, kemudian pada Tahun 2021-2023 mengalami penurunan hingga berada di bawah rata-rata Aceh. Kondisi ini mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi sektoral di kabupaten/kota tersebut dan terjadinya percepatan perekonomian di beberapa kabupaten/kota lainnya. Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah), sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.63**.

Tabel 2.63.
PDRB Kabupaten/Kota, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB
Tahun 2019-2024 (Juta Rupiah)

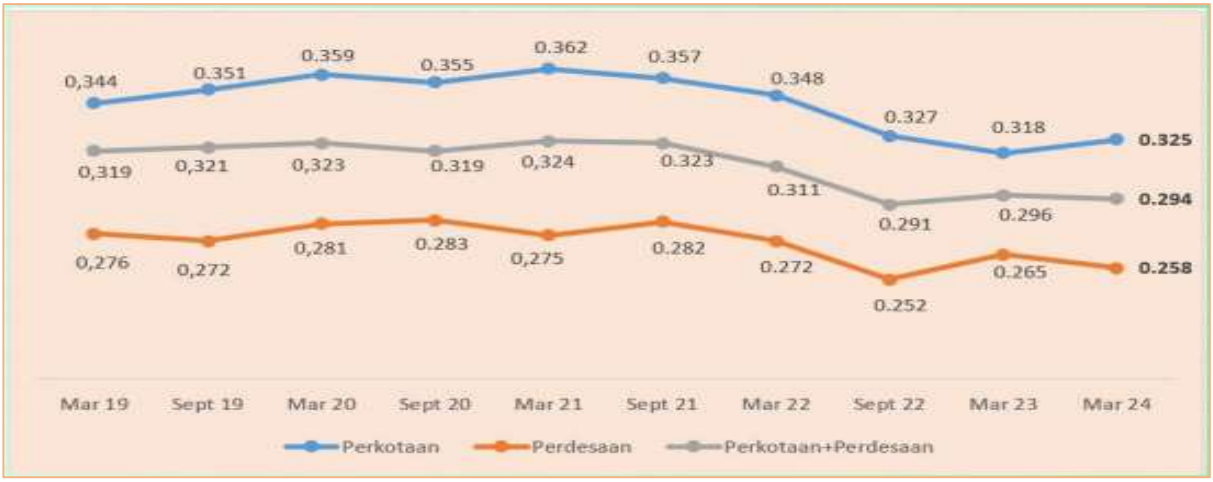
Kab/Kota, Aceh dan Nasional	PDRB/Kapita/Tahun (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	23.49	24.55	26.15	28.12	30.22	31.94
Aceh Singkil	19.62	19.23	21.13	22.96	24.03	25.36
Aceh Selatan	22.93	23.85	25.47	27.21	29.37	30.85
Aceh Tenggara	23.01	23.00	24.24	25.64	27.10	28.74
Aceh Timur	23.91	25.18	27.40	30.29	31.50	33.67
Aceh Tengah	35.73	34.41	36.86	40.17	43.97	47.28
Aceh Barat	38.56	40.90	49.80	62.82	66.28	67.98
Aceh Besar	31.64	32.95	34.24	37.12	40.20	42.99
Pidie	23.84	24.78	25.84	27.98	30.11	32.15
Bireuen	27.78	30.03	31.91	34.58	37.57	40.03
Aceh Utara	31.96	32.76	38.08	45.83	45.56	47.60
Aceh Barat Daya	25.74	26.07	27.13	29.38	31.63	33.72
Gayo Lues	28.10	27.18	28.32	29.88	31.81	33.55
Aceh Tamiang	25.13	25.59	29.83	34.62	35.15	37.34
Nagan Raya	45.02	45.63	53.43	61.75	68.54	70.46
Aceh Jaya	27.72	28.29	30.28	32.50	34.55	36.36
Bener Meriah	30.29	28.23	30.62	32.92	35.55	37.90
Pidie Jaya	21.75	22.17	22.99	24.54	26.46	28.38
Banda Aceh	69.25	73.31	78.06	83.31	90.76	98.20
Sabang	44.61	37.41	38.42	38.85	40.73	42.81
Langsa	29.70	28.49	30.61	32.70	35.19	37.00
Lhokseumawe	43.56	47.05	49.34	52.91	56.60	59.12
Subulussalam	21.59	20.00	22.83	24.99	26.43	27.88
Aceh	**30.88**	**31.63**	**34.67**	**38.90**	**41.42**	**43.78**
Nasional	**59.10**	**57.30**	**62.20**	**71.03**	**75.00**	**78.62**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

C. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

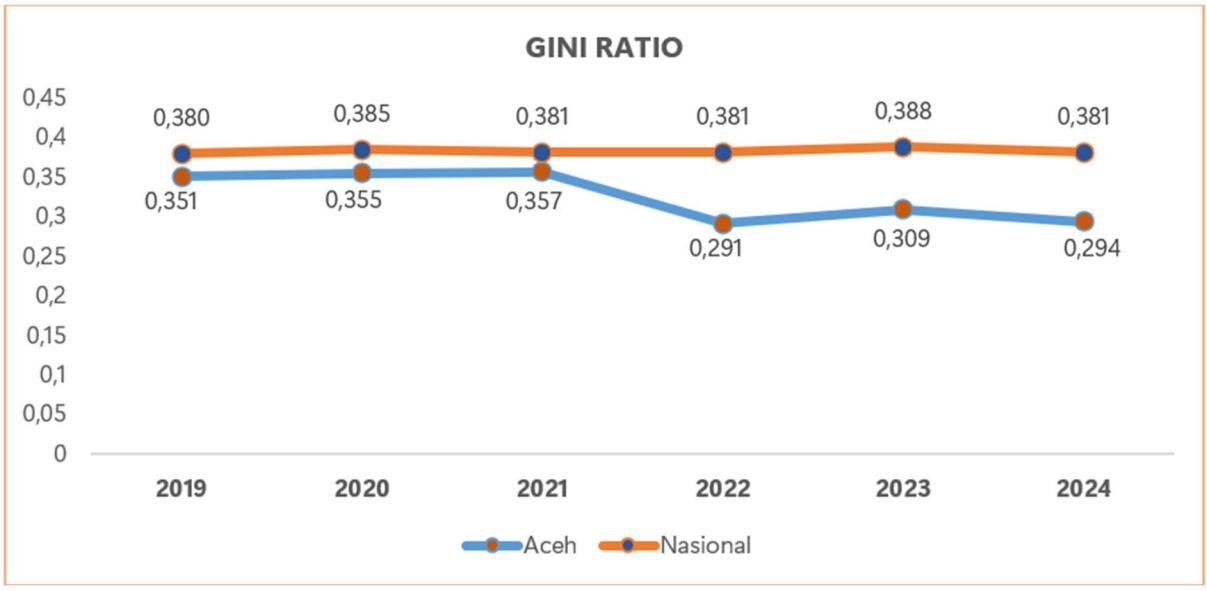
Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (disparitas) pendapatan agregat, yaitu suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Semakin besar nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan pendapatan (pengeluaran) masyarakat yang semakin lebar. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Koefesien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0.50-0.70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0.36-0.49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah antara 0.20-0.35.

Gini Rasio membantu Pemerintah Aceh dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat Aceh. Perkembangan Gini Rasio Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Gambar 2.69**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2025

Gambar 2.68. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Aceh Periode Maret 2019-Maret 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional 2025

Gambar 2.69. Gini Rasio Aceh dan Nasional, 2019-2024

Gambar 2.69 menunjukkan bahwa dalam kurun periode September 2019-2022 dan Maret 2023-2024, Rasio Gini Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata nasional. Indek Gini Aceh dan Nasional mengalami pola pergerakan fluktuasi yang sama. Pada September Tahun 2019 Indek Gini Aceh sebesar 0.321 dan mengalami penurunan hingga menjadi 0.296 pada Maret Tahun 2023. Sedangkan Nasional mengalami peningkatan dari 0,380 pada September Tahun 2019 menjadi 0,388 pada Maret 2023. Koefisien gini Aceh terendah terjadi pada September Tahun 2022 sebesar 0.291 dan tertinggi pada September Tahun 2021 sebesar 0.323. Pada Tahun 2024 gini rasio Aceh dan nasional memiliki kecenderungan yang sama dengan penurunan

masing-masing menjadi 0,294 dan 0,381. Secara umum Rasio Gini Aceh ini masih dikategorikan sebagai ketimpangan sedang karena berada di bawah 0,40. Bila dibandingkan dengan nasional, maka ketimpangan Aceh relatif lebih baik atau berada di bawah rata-rata Nasional.

Tabel 2.64.
Gini Rasio Kabupaten/Kota, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (Maret)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	0,34	0,296	0,31	0,279	0,297	0,259
Aceh Singkil	0,282	0,287	0,336	0,296	0,270	0,26
Aceh Selatan	0,273	0,313	0,295	0,257	0,258	0,274
Aceh Tenggara	0,278	0,315	0,247	0,274	0,277	0,233
Aceh Timur	0,249	0,282	0,271	0,283	0,224	0,221
Aceh Tengah	0,256	0,331	0,29	0,27	0,248	0,258
Aceh Barat	0,33	0,304	0,295	0,265	0,237	0,249
Aceh Besar	0,288	0,352	0,296	0,293	0,299	0,262
Pidie	0,249	0,249	0,22	0,223	0,213	0,209
Bireuen	0,295	0,304	0,296	0,275	0,258	0,258
Aceh Utara	0,308	0,261	0,283	0,275	0,294	0,267
Aceh Barat Daya	0,301	0,273	0,282	0,24	0,250	0,226
Gayo Lues	0,29	0,28	0,263	0,254	0,241	0,241
Aceh Tamiang	0,289	0,264	0,276	0,305	0,277	0,256
Nagan Raya	0,252	0,275	0,257	0,236	0,207	0,159
Aceh Jaya	0,253	0,252	0,312	0,299	0,267	0,254
Bener Meriah	0,267	0,259	0,255	0,257	0,226	0,23
Pidie Jaya	0,236	0,227	0,236	0,231	0,221	0,214
Banda Aceh	0,289	0,303	0,347	0,391	0,330	0,339
Sabang	0,281	0,271	0,293	0,298	0,306	0,295
Langsa	0,363	0,356	0,34	0,368	0,330	0,305
Lhokseumawe	0,306	0,307	0,296	0,348	0,293	0,326
Subulussalam	0,342	0,344	0,303	0,33	0,296	0,276
Aceh	**0,319**	**0,323**	**0,324**	**0,311**	**0,296**	**0,294**
Nasional	**0,382**	**0,381**	**0,384**	**0,384**	**0,388**	**0,379**

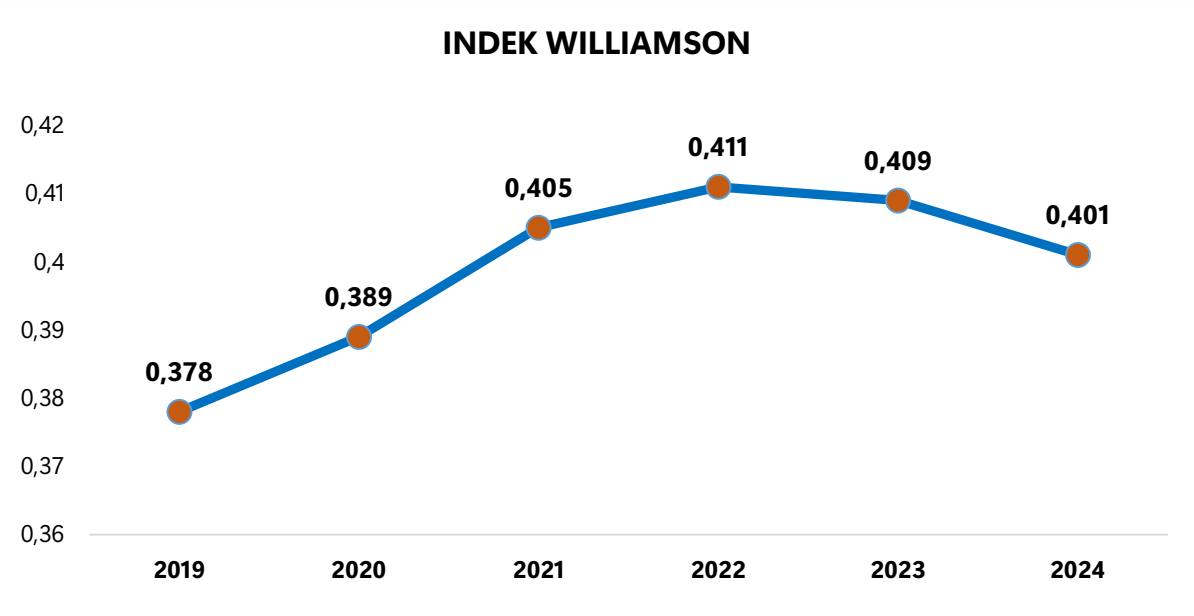
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional , 2025

Persebaran Indek Gini Kabupaten/Kota di Aceh menggambarkan suatau kondisi yang relative berada pada kisaran ketidakmerataan sedang dan rendah (0.20-0.49) dan masih berada di bawah rata-rata Nasional. Indek Gini kabupaten terkecil terdapat di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2019 sebesar 0.236 dan yang tertinggi di Kota Langsa sebesar 0.363. Selanjutnya Indek Gini kategori terkecil pada Tahun 2024 yaitu Kabupaten Nagan Raya yaitu 0.159 dan yang tertinggi terdapat di dua kota yaitu kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe dengan Indek Gini masing-masing sebesar 0.339 dan 0.326. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapan masyarakat di Aceh relative merata, namun perlu intervensi melalui program dan kegiatan pada sektor prioritas yang relatif memberi peluang dan kesempatan kerja.

Produktivitas dan kreativitas masyarakat terutama kaum melinial dapat memberikan keseimbangan pendapatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

D. Indeks Williamson (Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah (*regional disparity*) merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis suatu wilayah, serta adanya wilayah yang sudah maju dan wilayah yang masih terbelakang. Ukuran ketimpangan antar wilayah (regional) cerminan dari kemajuan pembangunan di suatu wilayah dengan menggunakan Indek Williamson. Indek Williamson merupakan persebaran (*coeffesien of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Walaupun indek ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan ketimpangan namun alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (data diolah)

Gambar 2.70. Perkembangan Nilai Indeks Williamson Tahun 2019-2024

Gambar 2.70 menunjukkan perkembangan ketimpangan ekonomi di Aceh berdasarkan Indeks Williamson pada periode 2019–2024 yang berada pada kategori sedang menuju rendah. Pada Tahun 2019, nilai indeks tercatat sebesar 0,378, kemudian meningkat hingga mencapai 0,411 pada Tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,00 persen per tahun. Selanjutnya, pada Tahun 2023 dan 2024, nilai indeks kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian masing-masing 0,409 dan 0,401. Perubahan nilai indeks ini mencerminkan adanya dinamika pemerataan pembangunan antarwilayah di Aceh, di mana pertumbuhan ekonomi daerah semakin dipengaruhi oleh penguatan sektor-sektor nonmigas, seperti perkebunan dan pertambangan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa

distribusi pembangunan antarwilayah semakin baik seiring dengan meningkatnya kinerja sektor unggulan di berbagai kabupaten/kota.

Indeks Williamson sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pembangunan wilayah dengan interval nilai antara 0–1. Nilai indeks yang mendekati 0 mencerminkan tingkat pemerataan yang semakin merata, sementara nilai yang mendekati 1 menunjukkan kondisi pembangunan yang semakin tidak merata. Dengan demikian, perkembangan Indeks Williamson di Aceh pada periode 2019–2024 menggambarkan adanya arah positif menuju distribusi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan pembangunan provinsi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berimbang antarwilayah.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2024 IPM Aceh sedikit lebih tinggi dari IPM Nasional. IPM Aceh berada pada angka 75,36 sementara nasional 75,02. Meskipun demikian, masih terdapat disparitas IPM di kabupaten/kota seperti yang terlihat pada **Tabel 2.65**.

Tabel 2.65.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh dan Nasional Tahun 2020 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Simeulue	66.03	66.41	67.27	69.98	70,95
2	Aceh singkil	68.94	69.22	69.62	71.14	71,76
3	Aceh Selatan	67.12	67.44	67.87	71.14	71,82
4	Aceh Tenggara	69.37	69.44	70.32	72.93	73,59
5	Aceh Timur	67.63	67.83	68.72	70.73	71,29
6	Aceh Tengah	73.24	73.37	73.95	76.45	77,27
7	Aceh Barat	71.38	71.67	72.34	74.62	75,45
8	Aceh Besar	73.56	73.58	74.00	75.98	76,57
9	Pidie	70.63	70.70	71.20	72.95	73,60
10	Bireuen	72.28	72.33	73.16	74.56	75,39
11	Aceh Utara	69.33	69.46	70.22	72.50	73,35
12	Aceh Barat Daya	66.75	66.99	67.41	70.47	71,16
13	Gayo Lues	67.22	67.56	68.25	70.82	71,75
14	Aceh Tamiang	69.24	69.48	70.43	73.02	74,00
15	Nagan Raya	69.18	69.31	70.10	72.15	73,10
16	Aceh Jaya	69.75	69.84	70.36	72.44	73,40
17	Bener Meriah	72.98	73.27	73.90	76.06	76,58
18	Pidie Jaya	73.20	73.60	74.34	76.04	76,39
19	Banda Aceh	85.41	85.71	86.28	88.32	88,85
20	Sabang	75.78	76.11	76.85	78.70	79,50
21	Langsa	77.17	77.44	77.82	80.50	80,96
22	Lhokseumawe	77.31	77.57	78.04	80.26	80,89
23	Subulussalam	64.93	65.27	66.20	69.66	70,64
ACEH		**73,29**	**73,48**	**74,11**	**74,70**	**75,36**
NASIONAL		**71.92**	**71.94**	**72.29**	**72.91**	**75,02**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan data pada **Tabel 2.65**, terlihat bahwa tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, IPM Aceh berada di angka 73,29, kemudian naik menjadi 73,48 pada 2021, dan terus meningkat hingga mencapai 75,36 pada Tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Aceh sejak Tahun 2020 konsisten berada di atas angka nasional, meskipun selisihnya semakin mengecil. Pada Tahun 2020, IPM nasional tercatat 71,92, sementara Aceh berada di angka 73,29. Namun pada Tahun 2024, IPM nasional melonjak ke 75,02, mendekati capaian Aceh yang mencapai 75,36. Kota dengan IPM tertinggi di Aceh adalah Kota Banda Aceh, yang mencatat angka 85,41 pada Tahun 2020 dan meningkat menjadi 88,85 di Tahun 2024. Angka ini jauh melampaui rata-rata provinsi maupun nasional. Disusul oleh Kota Langsa dengan IPM 80,96 dan Kota Lhokseumawe 80,89 pada Tahun 2024.

Sebaliknya, daerah dengan IPM terendah adalah Kota Subulussalam, yang meskipun menunjukkan peningkatan dari 64,93 (2020) menjadi 70,64 (2024), tetap menjadi yang terendah di Aceh. Kabupaten Simeulue dan Aceh Barat Daya juga mencatat IPM yang relatif rendah, walaupun keduanya menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dalam lima tahun terakhir, beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan IPM yang cukup pesat. Di antaranya adalah Kabupaten Aceh Selatan, yang meningkat dari 67,12 (2020) menjadi 71,82 (2024), Simeulue dari 66,03 menjadi 70,95, dan Subulussalam dari 64,93 ke 70,64. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia yang signifikan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki tingkat IPM yang rendah.

F. Kemiskinan

Kinerja penurunan angka kemiskinan di Aceh dalam kurun waktu 2017–2024 menunjukkan tren yang konsisten berada pada jalurnya. Seluruh kabupaten/kota memperlihatkan arah penurunan yang sejalan, meskipun sempat terjadi peningkatan pada Tahun 2021 sebagai dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi covid-19. Kota Banda Aceh merupakan daerah yang paling terimbas dengan kenaikan dari 6,9 persen menjadi 7,61 persen. Pasca pandemi, tren penurunan kemiskinan kembali berlanjut di hampir seluruh wilayah, mencerminkan efektivitas langkah pemulihan ekonomi yang ditempuh. Perkembangan capaian kemiskinan kabupaten/kota di Aceh selama periode 2017–2024 dapat dilihat pada **Table 2.64** dan **Gambar 2.71**.

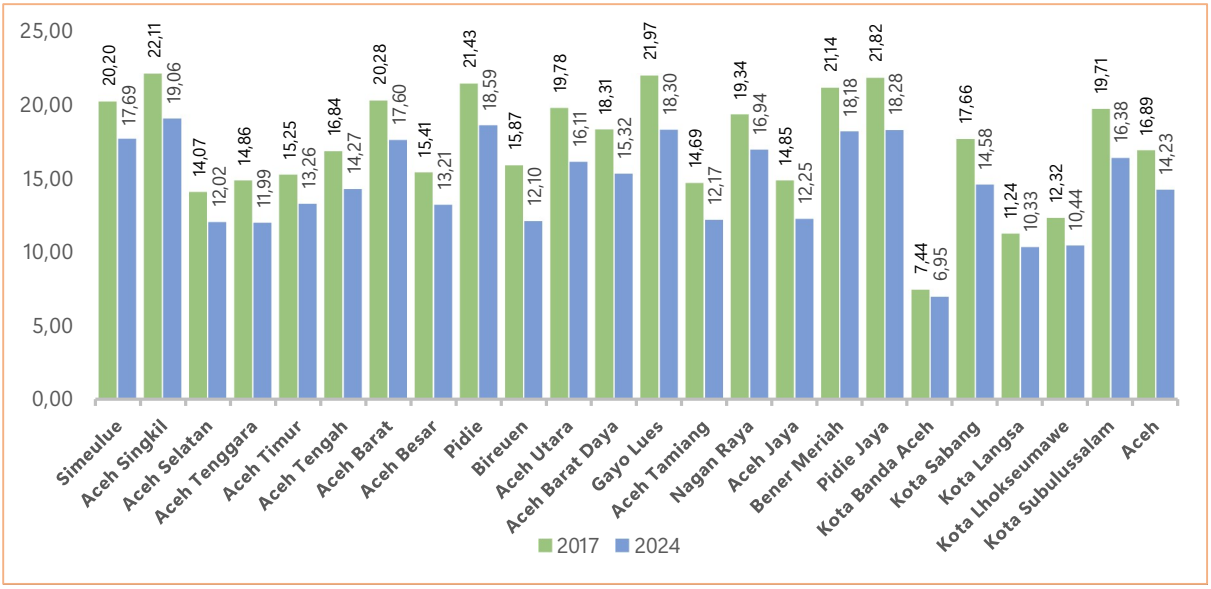
Tabel 2.66.
Persentase Penduduk Miskin se-Aceh Tahun 2017 – 2024

Kab/Kota, Aceh	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	20,2	19,78	18,99	18,49	18,98	18,37	17,92	17,69
Aceh Singkil	22,11	21,25	20,78	20,2	20,36	19,18	19,15	19,06
Aceh Selatan	14,07	14,01	13,09	12,87	13,18	12,43	12,1	12,02
Aceh Tenggara	14,86	14,29	13,43	13,21	13,41	12,83	12,45	11,99
Aceh Timur	15,25	14,49	14,47	14,08	14,45	13,91	13,39	13,26

Kab/Kota, Aceh	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh Tengah	16,84	15,58	15,5	15,08	15,26	14,5	14,38	14,27
Aceh Barat	20,28	19,31	18,79	18,34	18,81	17,93	17,86	17,6
Aceh Besar	15,41	14,47	13,92	13,84	14,05	13,38	13,38	13,21
Pidie	21,43	20,47	19,46	19,23	19,59	18,79	18,78	18,59
Bireuen	15,87	14,31	13,56	13,06	13,25	12,51	12,12	12,1
Aceh Utara	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43	16,86	16,64	16,11
Aceh Barat Daya	18,31	17,1	16,26	15,93	16,34	15,44	15,43	15,32
Gayo Lues	21,97	20,7	19,87	19,32	19,64	18,87	18,82	18,3
Aceh Tamiang	14,69	14,21	13,38	13,08	13,34	12,61	12,51	12,17
Nagan Raya	19,34	18,97	17,97	17,7	18,23	17,38	17,25	16,94
Aceh Jaya	14,85	14,16	13,36	12,87	13,23	12,51	12,42	12,25
Bener Meriah	21,14	20,13	19,3	18,89	19,16	18,39	18,31	18,18
Pidie Jaya	21,82	20,17	19,31	19,19	19,55	18,45	18,4	18,28
Banda Aceh	7,44	7,25	7,22	6,9	7,61	7,13	7,04	6,95
Sabang	17,66	16,31	15,6	14,94	15,32	14,66	14,59	14,58
Langsa	11,24	10,79	10,57	10,44	10,96	10,62	14,59	10,33
Lhokseumawe	12,32	11,81	11,18	10,8	11,16	10,84	10,73	10,44
Subulussalam	19,71	18,51	17,95	17,6	17,65	16,94	16,41	16,38
Aceh	**16,89**	**15,97**	**15,01**	**14,99**	**15,53**	**14,64**	**14,45**	**14,23**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Pidie, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bener Meriah merupakan wilayah sebaran kemiskinan tertinggi di Aceh dengan poin rata-rata diatas 18 persen dan menjadi fokus penurunan angka kemiskinan Aceh. Enam wilayah lainnya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Utara, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh barat Daya berada pada rang 15 hingga dibawah 18 persen. Banda Aceh menjadi satu satunya wilayah di Aceh yang memiliki persentase kemiskinan di bawah 10 persen.

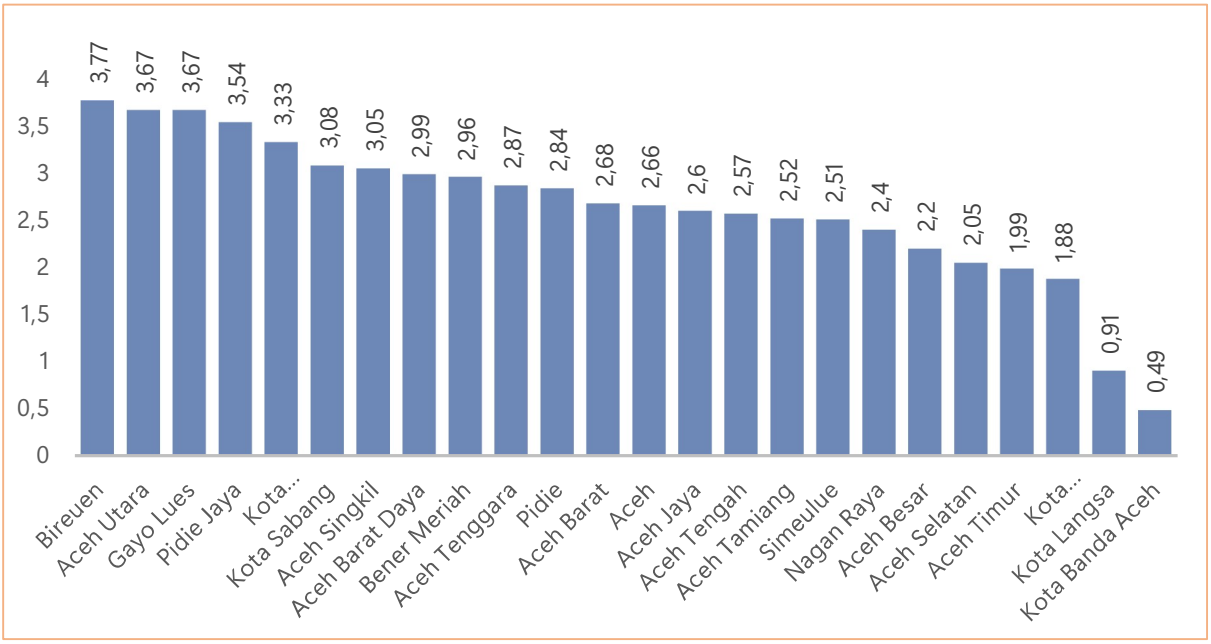


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2025), data diolah

Gambar 2.71. Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh 2017 dan 2024

Dalam hal kinerja penurunan angka kemiskinan dalam 2017 – 2024, Aceh mengalami penurunan sebesar 2.66 poin atau setara dengan 0.38 poin pertahun. Untuk Kab. Bireuen menjadi daerah paling perform dalam kurun waktu delapan tahun terakhir dengan kinerja penurunan sebesar 3.77 poin. Wilayah lain yang memiliki kinerja penurunan angka kemiskinan diatas 3 persen adalah Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Subulussalam, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Singkil.

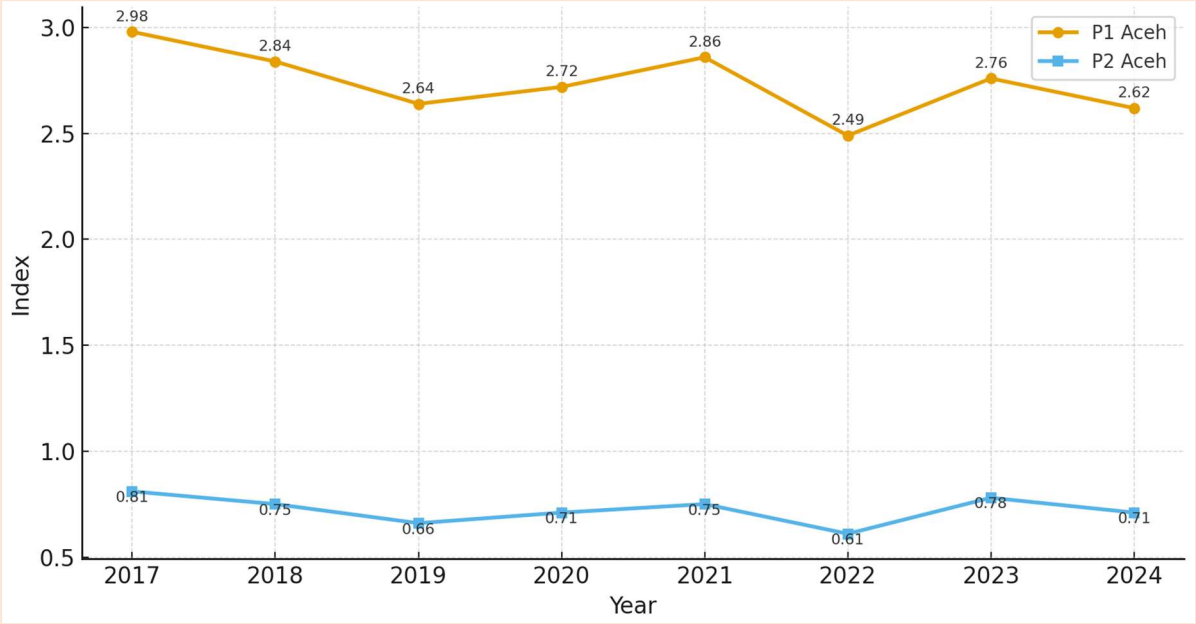
Dalam hal kinerja **Gambar 2.72** menunjukkan kinerja penurunan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Aceh selama periode 2017–2024. Terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antarwilayah dalam hal besarnya penurunan tingkat kemiskinan. Kabupaten Bireuen menempati posisi tertinggi dengan penurunan mencapai 3,77 poin persentase, disusul Aceh Utara dan Gayo Lues yang masing-masing mencatat penurunan sebesar 3,67 poin. Sejumlah daerah lainnya seperti Pidie Jaya, Kota Sabang, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara juga menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan penurunan di atas tiga poin persentase. Sebaliknya, beberapa daerah menunjukkan penurunan yang lebih moderat di kisaran 2,5–3 poin persentase, antara lain Aceh Barat, Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Simeulue. Di sisi lain, masih terdapat kabupaten/kota yang penurunan kemiskinannya relatif rendah seperti Kota Langsa dengan 0,91 poin dan Kota Banda Aceh hanya 0,49 poin. Variasi capaian ini mencerminkan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan belum merata di seluruh Aceh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih kontekstual agar daerah-daerah dengan penurunan yang lambat dapat mempercepat pencapaian target pengurangan kemiskinan, sehingga kinerja keseluruhan provinsi menjadi lebih merata dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2025), data diolah

Gambar 2.72. Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan (2017-2024)

Selain angka kemiskinan, terdapat indikator lain dalam memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), dan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) Aceh dan Nasional, periode 2017-2024 mengalami pergerakan pola penurunan dan kenaikan yang sama. Secara umum, P1 Aceh menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun dari 2,98 pada Tahun 2017 menjadi 2,62 pada Tahun 2024. Angka ini sempat mencapai titik terendah pada 2022 di 2,49 sebelum kembali naik ke 2,76 di 2023 dan turun lagi ke 2,62 pada 2024. Penurunan P1 ini mengindikasikan adanya perbaikan pada kedalaman kemiskinan meskipun belum konsisten setiap tahun. Sementara itu, P2 Aceh yang menggambarkan tingkat keparahan kemiskinan juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan turun dari 0,81 pada 2017 menjadi 0,71 pada 2024. Angka terendah terjadi pada 2019 (0,66) dan 2022 (0,61), yang berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil, meskipun sempat naik kembali ke 0,78 pada 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2025), data diolah

Gambar 2.73. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Aceh Tahun 2017 – 2024

Faktor lain yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penurunan angka kemiskinan adalah garis kemiskinan itu sendiri. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-

kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan bervariasi antar daerah, hal ini mengindikasikan bahwa standar kemiskinan itu berbeda antar daerah. Kota Banda Aceh merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp. 862.944,-, sementara Kab. Aceh Utara mempunyai garis kemiskinan yang terendah Rp. 473.719,-.

G. Pengangguran

Secara umum perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Aceh menunjukkan tren yang positif terutama pada indikator pengangguran. Meskipun terjadi peningkatan secara jumlah di Tahun 2020 akibat covid-19 yang didominasi oleh pekerja formal, namun jumlah tersebut terus menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan **Tabel 2.67** menggambarkan bahwa Tahun 2020 jumlah pengangguran sebanyak 167 ribu jiwa dan terus menurun menjadi 153 ribu jiwa di Tahun 2024. Trend penurunan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dapat dilihat pada **Tabel 2.67**.

Tabel 2.67.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Tahun 2019-2024

Karakteristik		Tahun (Ribu Orang)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja		3.809	3.881	3.951	4.020	4.021	4.087
a.	Angkatan Kerja	2.405	2.527	2.520	2.553	2.604	2.661
	- Bekerja	2.257	2.360	2.361	2.395	2.447	2.508
	- Pengangguran	148	167	159	158	157	153
b.	Bukan Angkatan Kerja	1.404	1.354	1.431	1.467	1.417	1.426

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Bila dilihat dari distribusi pengangguran berdasarkan kelompok pendidikan, sebagian besar pengangguran didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMTA kejuruan, dengan persentase mencapai 10,59 persen. Bila dilihat dari perkembangannya persentase tersebut masih berfluktuasi meskipun kecenderungannya masih cukup tinggi di atas 10 persen. Sedangkan TPT untuk tingkat pendidikan SMA umum cenderung berkurang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Tingkat pengangguran penduduk berpendidikan tinggi juga cukup memberi perhatian bagi Aceh secara umum karena masih berada di atas TPT Aceh secara umum. Distribusi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 2.68**.

Tabel 2.68.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Tahun 2019-2024

Pendidikan	Tahun								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
≤ SD	3,07	2,32	3,22	2,9	2,57	2,88	2,46	1,8	2,72
SMPT	3,01	4,53	3,42	5,04	4,9	4,76	5,79	3,4	3,96

Pendidikan	Tahun								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SMTA Umum	12,96	10,74	9,83	8,5	9,39	8,88	10,1	9,77	7,92
SMTA Kejuruan	14,85	10,95	10,72	10,76	10,87	10,55	7,45	9,56	10,59
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	5,79	8,2	5,92	7,45	6,67	7,27	4,3	6,74	5,7
DIPLOMA IV/S1/S2/S3	10,77	8,06	9,3	7,04	8,42	6,53	4,91	6,76	6,22
TPT	**7,57**	**6,57**	**6,36**	**6,2**	**6,59**	**6,3**	**6,17**	**6,03**	**5,75**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Distribusi pengangguran pada Tahun 2019-2024 menurut kabupaten/kota menunjukkan keadaan yang sama dengan provinsi yang cenderung mengalami penurunan. Lhokseumawe merupakan daerah dengan TPT tertinggi di Aceh dengan persentase sebesar 8,47 persen di Tahun 2024. Sedangkan Bener Meriah merupakan daerah dengan TPT terendah yang mencapai 2,2 persen di tahun yang sama. Perkembangan distribusi TPT di kabupaten/kota Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.69**.

Tabel 2.69.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2019-2024

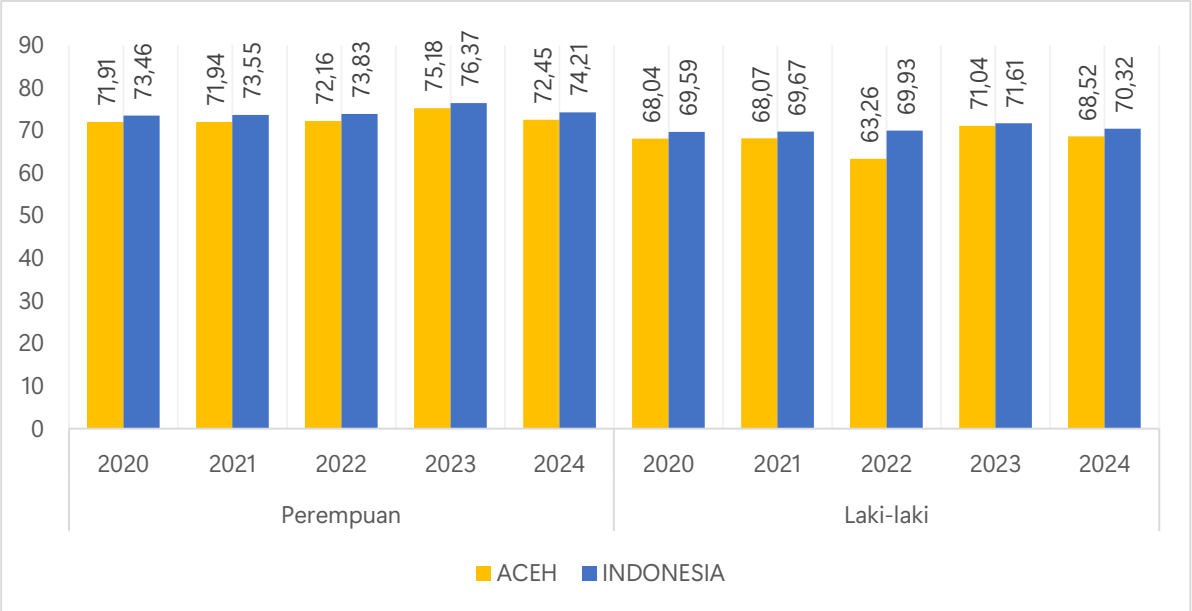
Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	5,82	5,47	5,71	6	5,85	5,5
Aceh Singkil	8,58	8,24	8,36	6,88	6,84	6,44
Aceh Selatan	6,54	6,54	6,54	4,82	4,73	4,56
Aceh Tenggara	3,45	5,72	6,43	5,09	5	4,79
Aceh Timur	7,61	7,26	7,13	8,07	8,03	7,75
Aceh Tengah	2,65	3,05	2,61	4,44	4,42	4,21
Aceh Barat	7,41	7,3	7,09	6,09	6,07	5,58
Aceh Besar	7,67	7,62	7,7	8,28	8,17	7,93
Pidie	6,83	6,45	7,28	5,94	5,92	5,74
Bireuen	3,83	4,12	4,32	4,2	4,14	3,93
Aceh Utara	8,65	8,56	8,31	7,08	7,07	6,88
Aceh Barat Daya	4,29	3,93	4,04	4,12	4,08	3,83
Gayo Lues	1,74	2,01	1,84	2,7	2,65	2,4
Aceh Tamiang	6,04	7,97	5,87	7,38	7,21	6,95
Nagan Raya	5,35	5,11	4,99	5,84	5,74	5,22
Aceh Jaya	4,18	4,08	3,47	3,12	2,88	2,75
Bener Meriah	1,03	1,35	1,24	2,61	2,45	2,2
Pidie Jaya	4,34	6,58	3,57	4,4	4,34	3,82
Banda Aceh	6,89	9,54	8,94	8,62	8,03	7,55
Sabang	4,6	4,81	3,56	4,01	3,92	2,95
Langsa	7,69	9,75	7,21	7,85	7,73	7,34
Lhokseumawe	11,01	11,99	11,16	9,15	8,78	8,47
Subulussalam	7,25	6,93	6,26	5,75	5,69	5,12
Aceh	**6,17**	**6,59**	**6,3**	**6,17**	**6,03**	**5,75**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Aceh, 2025,

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

A. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat lahir yang diwakili dimensi angka panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Aceh. Secara umum umur harapan hidup penduduk Aceh meningkat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebesar 73,20 dibandingkan dengan Nasional sebesar 74,15. Namun demikian, umur harapan hidup Aceh masih berada dibawah angka nasional. Hal ini dapat dilihat dari **Gambar 2.74**.



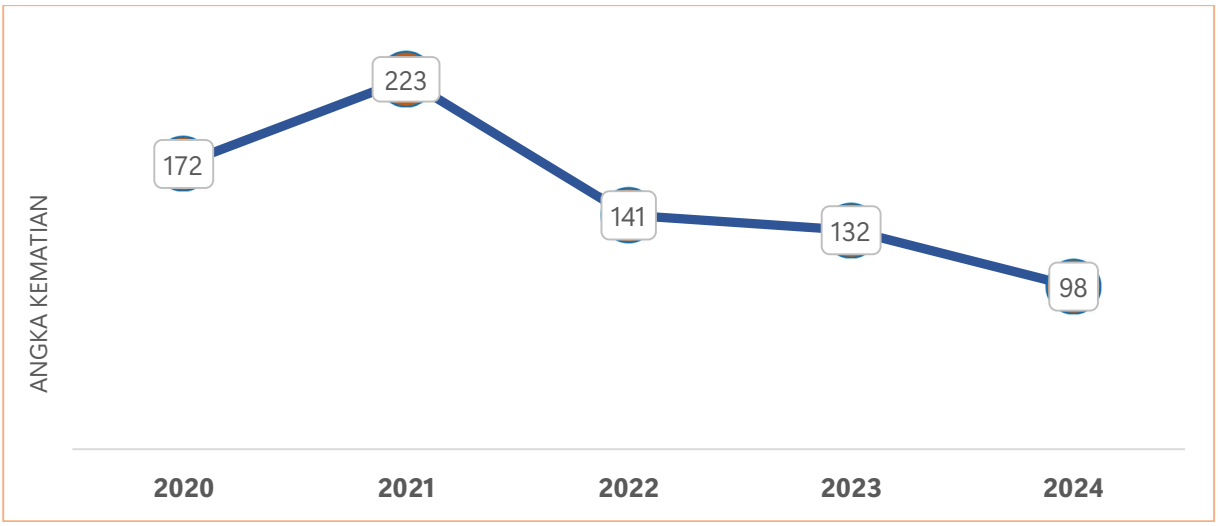
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2.74. Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator kesehatan ibu, sebagai nilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksebilitas maupun kualitas. Aki juga menggambarkan kesehatan ibu, status gizi, kesehatan lingkungan, tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, tingkat pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

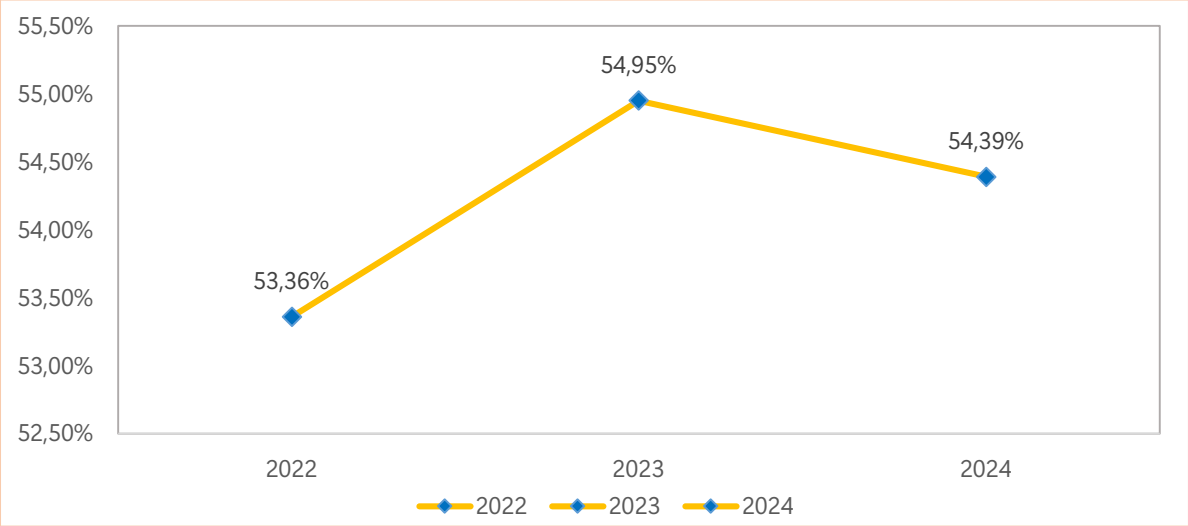
Angka kematian Ibu di Aceh mengalami penurunan dari 223/100.000 kelahiran hidup di Tahun 2021, menjadi 98/100.000 kelahiran hidup di Tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan ibu, status gizi dan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat.



Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025

Gambar 2.75. Angka Kematian Ibu (AKI) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024

Salah satu pelayanan kesehatan ibu yang mempengaruhi AKI adalah pemeriksaan kehamilan atau *Antenatal Care* (ANC) yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan fisik dan mental ibu hamil, hingga siap menghadapi masa persalinan, masa nifas, pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi secara alami dan bertahap. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, ibu hamil diharapkan mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar (12T) paling sedikit 6 (enam) kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama (K1) oleh dokter, 2 (dua) kali pada trimester kedua dan 3 (tiga) kali pada trimester ketiga, dan (K5) dilakukan oleh dokter.



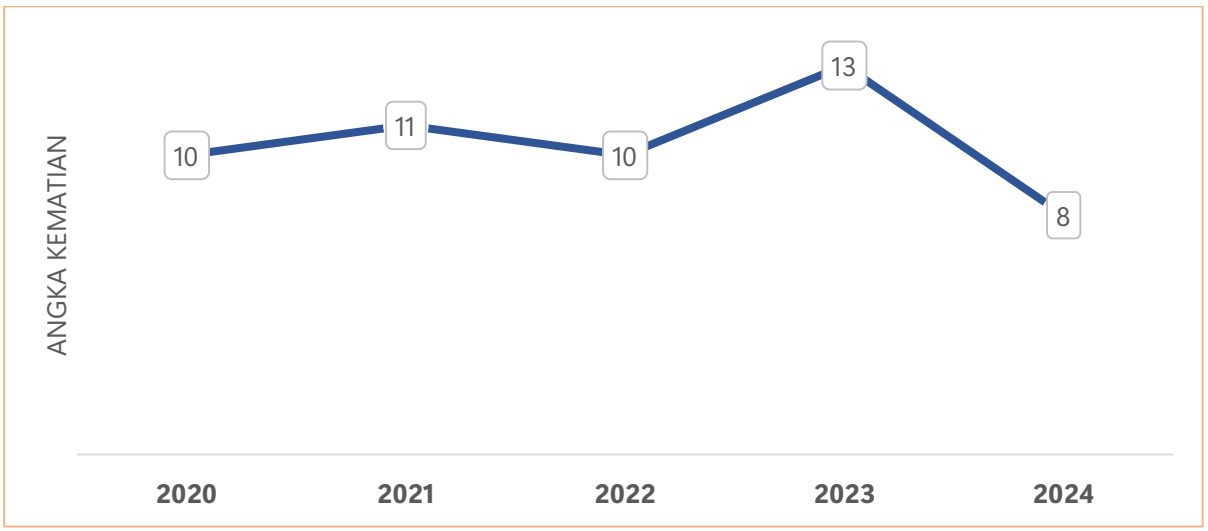
Sumber : Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat Kesmas), 2025

Gambar 2.76. Persentase Pemeriksaan Kehamilan 6 Kali (ANC K6) Tahun 2022-2024

Gambar di atas menunjukkan Persentase ANC K6 di Tahun 2022 di angka 53,36% terjadi peningkatan di Tahun 2023 menjadi 54,95%, di tahun selanjutnya mengalami sedikit penurunan 54,39%, dikarenakan sasaran ibu hamil yang ditentukan jauh lebih besar dibandingkan dengan data riil di beberapa kabupaten/kota.

C. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 -11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan AKB diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil.



Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025

Gambar 2.77. Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020 – 2024

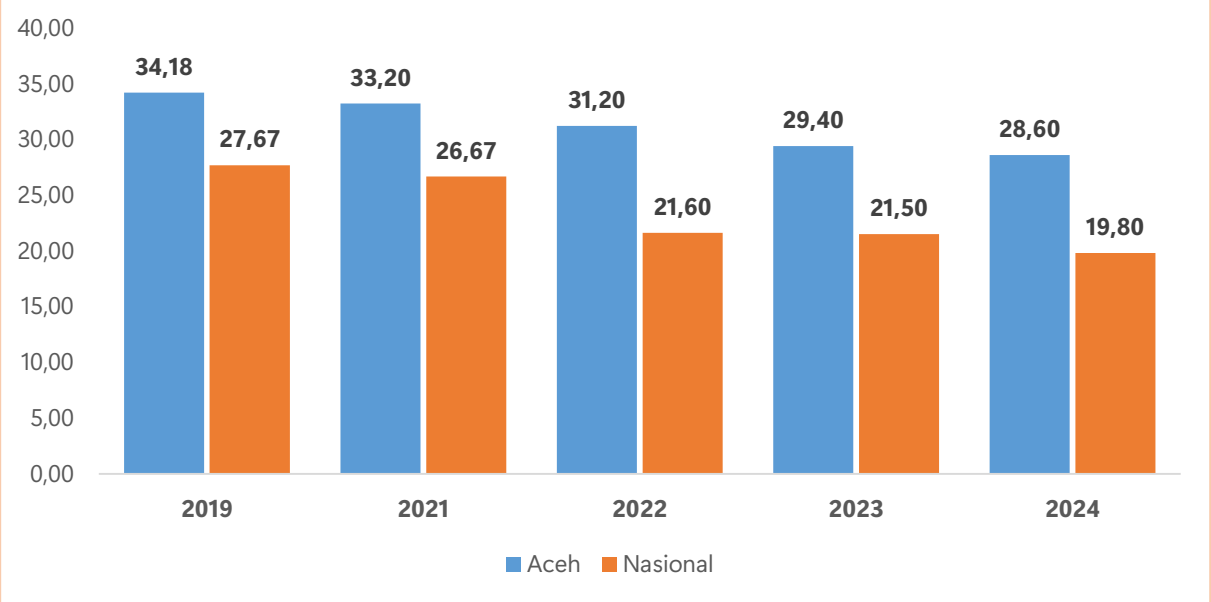
AKB sangat berkaitan erat dengan kualitas perawatan bayi baru lahir, serta dipengaruhi oleh perbaikan pelaporan melalui Aplikasi *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN), sehingga laporan yang diterima lebih konkrit guna mengkaji dan mencegah penyebab kematian serupa di kemudian hari.

Tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup. AKB Tahun 2023 menjadi yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

D. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Secara umum status gizi balita di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO maka status gizi balita di Aceh untuk semua kategori yaitu; kurus, gizi kurang dan pendek tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Persentase balita stunting di Aceh sampai dengan Tahun 2024 masih

berada di 5 (lima) besar provinsi dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia (Aceh 28,60) (Nasional 19,80) sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.78**. Data yang disajikan Tahun 2021, 2022, dan 2024 merupakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Tahun 2023 merupakan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).



Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Tahun 2024

Gambar 2.78. Prevalensi Balita dengan Stunting di Aceh Tahun 2019 – 2024

Penurunan angka stunting di Aceh belum optimal sehingga diperlukan penguatan di beberapa faktor antara lain koordinasi lintas sektor, sinergitas pengelolaan program, kualitas pendataan, akses layanan gizi dan kesehatan serta kualitas air bersih dan sanitasi. Selain itu, faktor sosial yang perlu diperkuat adalah perubahan perilaku mencakup pola asuh (termasuk di dalamnya Pemberian Makan Bayi dan Anak, yakni ASI dan MPASI serta pemantauan di posyandu) dan peningkatan pola hidup bersih dan sehat.

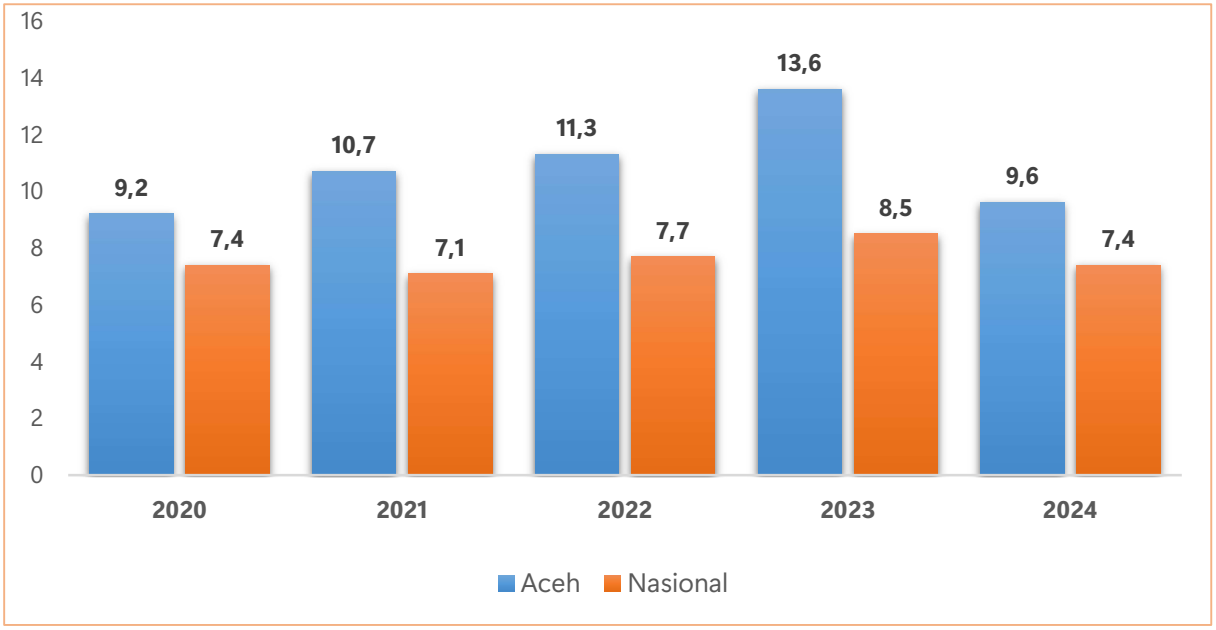
E. *Wasting* (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)

Prevalensi *wasting* di Aceh masih berada jauh diatas Nasional (Aceh 9,6%) (Nasional 7,4%). Pada Tahun 2024 Nasional menargetkan penurunkan prevalensi wasting sebesar 7 persen dengan realisasi sebesar 7,4 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), sedangkan Aceh menargetkan penurunkan prevalensi wasting sebesar 11,5 persen dengan realisasi sebesar 9,6 persen pada Tahun 2024. Namun demikian, saat ini 1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang anak di Aceh masih menderita gizi kurang atau gizi buruk. Kondisi prevalensi wasting di Aceh masih tinggi dibandingkan dengan kondisi nasional.

Tahun 2024 kabupaten/kota dengan prevalensi wasting tertinggi adalah Bireuen (14,7%), Aceh Timur (14,5%) dan Lhokseumawe (13,6%), namun jumlah balita terbanyak

tetap terdapat di kabupaten dengan luas wilayah besar dan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie dan Bireuen.

Balita dengan wasting memiliki resiko kematian yang besar, mulai dari 3,5 kali (bagi gizi kurang) dan 12 kali (bagi gizi buruk) lebih tinggi, dibanding balita yang normal. Situasi gizi terkait wasting ini disebabkan oleh belum tersedianya anggaran bagi logistik obat gizi serta masih kurangnya kapasitas tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan. Aceh saat ini perlu investasi lebih untuk mempersiapkan tim asuhan yang baik sehingga dapat menyelamatkan nyawa balita gizi buruk. Gambaran prevalensi wasting Aceh dan Nasional disajikan pada **Gambar 2.79**. Data yang disajikan Tahun 2021, 2022, dan 2024 merupakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Tahun 2023 merupakan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

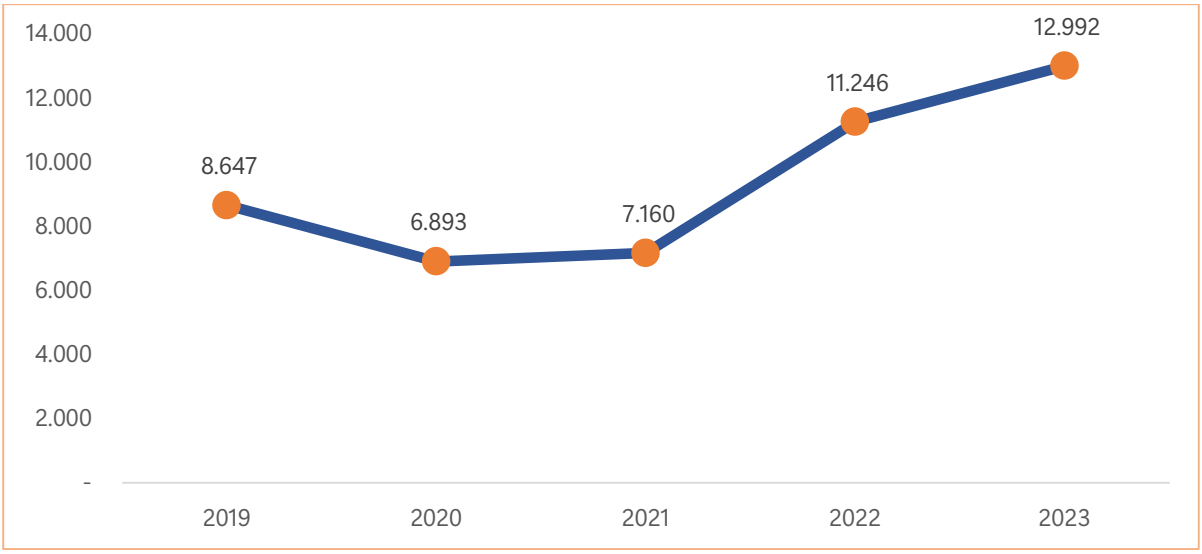


Sumber : Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 (Data Termutakhir)

Gambar 2.79. Prevalensi Wasting di Aceh Tahun 2020 – 2024

F. Insiden Tuberkolosis

Penyakit Tuberkulosis (TB) di Indonesia secara gobal menempati peringkat kedua setelah India dengan jumlah kasus 969 ribu dan kematian 144 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Berdasarkan Global TB Report Tahun 2022 jumlah kasus TB terbanyak pada kelompok usia produktif terutama pada usia 25 sampai 34 tahun. Di Indonesia jumlah kasus TB terbanyak yaitu pada kelompok usia produktif terutama pada usia 45 sampai 54 tahun. Sementara Aceh sebagai provinsi paling barat menempati peringkat kesebelas tertinggi kasus TB di Indonesia dengan jumlah insiden kasus sebanyak 21.289 kasus Tahun 2023. Meningkatnya kasus TB di Aceh menunjukan masih tingginya penularan TB yang terjadi di masyarakat. Dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri, investigasi kontak kasus aktif, pengobatan lengkap, serta perbaikan pencatatan dan pelaporan TB, diharapkan dapat memutus penularan TB di masyarakat. Data Tuberkolosis disajikan pada **Gambar 2.80.**

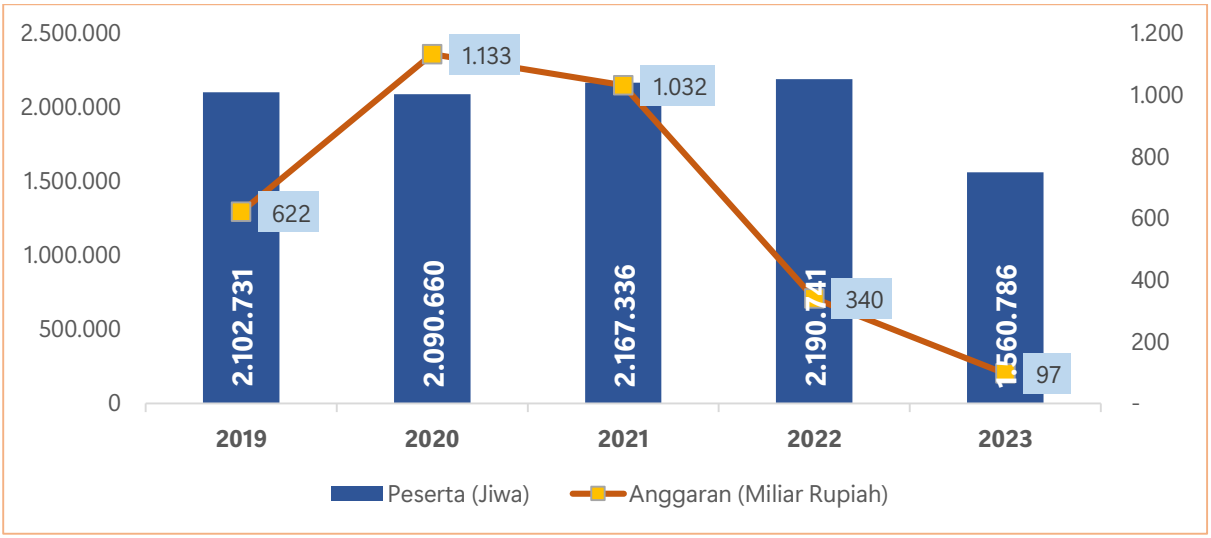


Sumber : Dinas Kesehatan Aceh,2024

Gambar 2.80. Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2019-2023

G. Persentase Masyarakat Memiliki Asuransi Kesehatan Aktif

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan jaminan tersebut merupakan upaya dalam penuntasan kemiskinan yang terjadi dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin. Salah satu program Jaminan Sosial Pemerintah Aceh dalam rangka pemenuhan hak masyarakat adalah Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Persentase proporsi kepesertaan JKA mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan dari Tahun 2019 hingga 2020 dengan capaian berturut-turut sebesar 99,5 persen dan 98,14 persen. Namun sebaliknya pada Tahun 2021 persentasenya meningkat tajam menjadi sebesar 105,13 persen. Perkembangan persentase kepesertaan JKA Tahun 2018 - 2021 dapat dilihat pada **Gambar 2.81**.

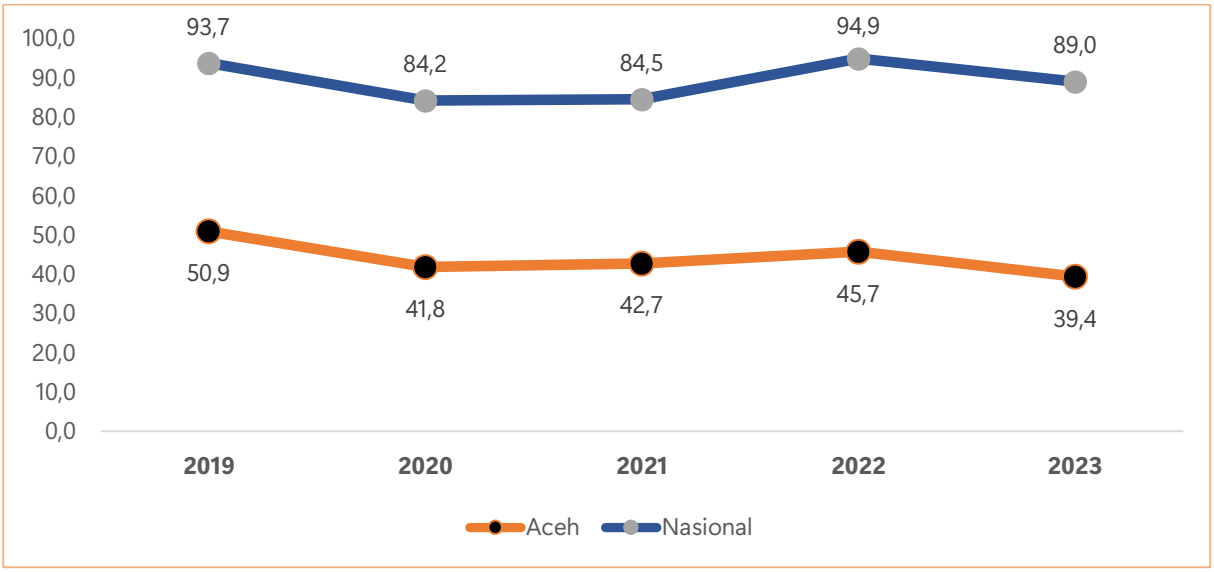


Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2023

Gambar 2.81. Capaian jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh Tahun 2019-2023

H. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IBL)

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga menurunkan risiko penularan dan komplikasi penyakit menjadi berat. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperi Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Tuberkulosis, Polio (lumpuh layu), Campak, Rubela, Meningitis, dan Pneumonia sangat mudah menular dan dapat mengakibatkan kecacatan permanen bahkan kematian. Cakupan imunisasi yang rendah tidak dapat menghasilkan kekebalan kelompok yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa atau wabah penyakit secara luas di masyarakat. Selain itu, penyakit infeksi berulang meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak.



Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2023

Gambar 2.82. Capaian Imunisasi Aceh Tahun 2019-2023

Dalam lima tahun terakhir, Aceh menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dengan capaian imunisasi terendah, baik Imunisasi Bayi Lengkap (IBL) untuk bayi di bawah satu tahun, maupun Imunisasi Lanjutan untuk anak di bawah dua tahun dan anak usia Sekolah Dasar/sederajat (Bulan Imunisasi Anak Sekolah/BIAS). Secara akumulatif dari Tahun 2020-2024 sebanyak 260.949 bayi belum mendapatkan imunisasi sama sekali, atau *Zero-Dose Children* dan merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Satu dari dua bayi di Aceh tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, cakupan IBL di Aceh pada tahun 2024 36,7 persen, jauh dari target nasional sebesar 100 persen. Berikut adalah capaian IBL di Aceh dan di Indonesia dari tahun 2020-2024.

Aceh mempunyai masalah keengganan vaksin *(vaccine hesitancy)* yang cukup besar, yang dipengaruhi berbagai isu negatif dan hoaks mengenai imunisasi termasuk juga pengaruh kultur dan kepercayaan. Tantangan imunisasi di Aceh tidak hanya dari aspek masyarakat, namun juga dari aspek penyedia layanan yang belum optimal (kompetensi, kemampuan komunikasi) dan komitmen serta dukungan dari sektor terkait di luar sektor kesehatan, termasuk dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media. Semua aspek tantangan tersebut, perlu direspon dan ditanggulangi untuk

meningkatkan cakupan imunisasi dalam upaya pencegahan wabah PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi).

I. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja rumah sakit adalah Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit. Indeks ini untuk mengukur tingkat layanan rumah sakit dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pasien serta keluarga mereka. Indeks ini menjadi alat penting dalam manajemen mutu dan peningkatan pelayanan kesehatan. Data *Bed Occupancy Rate* (BOR) pada rumah sakit di Aceh untuk periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.70.**

Tabel 2.70.
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Rumah Sakit Daerah
Tahun 2020 – 2024

Layanan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA)	91,77	96,40	80,63	81,10	83,82
Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	81,89	85,10	85,53	78,13	86,10
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)	83,00	81,40	84,00	84,07	82,25

Sumber : RSUZA, RSJ, RSIA, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.70** di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) untuk periode 2020-2021 mengalami peningkatan sedangkan pada Tahun 2022 indeks tersebut menurun. Namun Tahun 2023-2024 IKM pada RSUZA kembali mengalami peningkatan. IKM pada RSJ mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat Tahun 2024 IKM pada RSJ mengalami peningkatan sebesar 86,10. Sama halnya dengan RSJ IKM pada RSIA juga mengalami fluktuasi, Tahun 2024 IKM pada RSIA turun menjadi 82,25.

J. Persentase Hipertensi dalam Pengendalian

Hipertensi atau tekanan darah tinggi, adalah salah satu faktor resiko utama penyakit jantung, stroke dan gagal ginjal. Banyak penderita hipertensi yangtidak menyadari kondisinya, karena sering kali tidak menimbulkan gejala yang khas. Karena itu deteksi dan penangganan yang tepat menjadi sangat penting.

Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018, angka prevalensi hipertensi di Aceh sebesar 26,45 persen, dimana daerah dengan angka prevalensi tertingi adalah Kabupaten Bener Meriah dengan 36,75 persen sementara yang terendah di Kabupaten Simeulue yaitu 18,47 persen. Selanjutnya untuk data sasaran kasus hipertensi berdasarkan diagnosa Tahun 2025 di Aceh yang harus dikendalikan sebanyak 228.689 orang. Dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat diharapkan dapat memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan tatalaksana hipertensi dengan tekanan darah terkontrol <140/90 mmHg, sehingga penyandang hipertensi di Aceh tekanan darahnya dapat dikendalikan/terkontrol.

Terkait dengan pelaksanaan dan capaian hipertensi terkendali di Aceh masih menjadi kendala dan tantangan, dimana faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya hipertensi perlu dikendalikan masih sangat kurang. Disamping itu kompetensi, komunikasi dan edukasi petugas kesehatan kepada masyarakat juga perlu dioptimalkan. Berikut data capaian hipertensi terkendali Tahun 2024 di Aceh sesuai dengan **Tabel 2.71**.

Tabel 2.71.
Laporan Hipertensi Terkendali Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Diagnosis Hipertensi	Penyandang Hipertensi Terkendali	% Capaian
1	Bireuen	1.967	86	4,4
2	Aceh Barat Daya	10.416	431	4,1
3	Aceh Utara	3.958	148	3,7
4	Banda Aceh	1.559	55	3,5
5	Lhokseumawe	1.283	45	3,5
6	Pidie	6.317	135	2,1
7	Langsa	2.744	45	1,6
8	Sabang	557	9	1,6
9	Aceh Timur	2.745	44	1,6
10	Bener Meriah	1.324	19	1,4
11	Aceh Besar	11.406	139	1,2
12	Simeulue	3.396	41	1,2
13	Nagan Raya	10.573	47	0,4
14	Aceh Barat	1.810	8	0,4
15	Aceh Tengah	325	1	0,3
16	Aceh Singkil	781	2	0,3
17	Aceh Tamiang	5.807	6	0,1
18	Aceh Jaya	1.238	1	0,1
19	Aceh Selatan	409	0	0,0
20	Subulussalam	795	0	0,0
21	Pidie Jaya	149	0	0,0
22	Gayo Lues	114	0	0,0
23	Aceh Tenggara	120	0	0,0
ACEH		**69.793**	**1.262**	**1,8**

Sumber : Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), 2025

K. Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup

Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup merupakan persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (≥150 menit) selama jangka waktu tertentu, 5 hari dalam 1 minggu (durasi 30 menit/hari) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama. Aktivitas fisik mencakup kegiatan aktivitas fisik berat dan sedang pada kegiatan sehari-hari (gabungan saat bekerja atau di rumah, waktu senggang dan transportasi). Indikator ini ditetapkan sebagai wujud pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat yang diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus.

Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup saat ini di Aceh berada pada kategori cukup 52,5 persen dan kurang 47,5 persen masih dibawah capaian Nasional yaitu 62,6 persen. Beberapa alasan terkait dengan masih kurangnya capaian aktivitas fisik yang cukup di Aceh adalah Tidak Ada Waktu 44,0 persen, Malas 32,4 persen, Sudah Lansia 19,2 persen, dan Tidak Ada Rekan 12,8 persen. Oleh karena itu, upaya promotif preventif penting dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat.

L. Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Delapan Misi Asta Cita Kepemimpinan Presiden terpilih Tahun 2024-2029, yang mencakup berbagai aspek pembangunan Dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan nasional memuat misi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditujukan untuk mencipatakan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing di tingkat global . Kemenkes R.I memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tersebut, salah satunya Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) . Bentuk awal pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun yang menggunakan momentum ulang tahun untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pengembangan selanjutnya Cek Kesehatan Gratis saat ini sudah melaksanakan CKG komunitas dan juga sudah melaksanakan CKG untuk anak sekolah dimulai saat awal masuk tahun ajaran baru.

CKG dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pendekatan ini difokuskan pada upaya promotif dan preventif yang bersifat holistik, terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran (*people centered*). CKG ditujukan untuk mendeteksi faktor resiko Kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup Masyarakat Indonesia. Pelayanan ini didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, oleh peyelenggaran Sistem Elektronik (PSE) baik sektor pemerintah maupun swasta.

Adapun sasaran Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Aceh pada awal pelaksanaan saat *launching* 10 Februari 2025 dapat dilihat pada **Tabel 2.72.**

Tabel 2.72.
Sasaran Cek Kesehatan Gratis (CKG) berdasarkan Kelompok Umur

No	Kab/Kota	Sasaran Berdasarkan Kelompok Umur								Bumil	Bulin
		Bayi	1-6 Tahun * (balita & Prasekolah)	Kelas 1-6 SD/MI	Kelas 7-9 SMP/MI	Kelas 10-11 SMA/MA	7-17 Tahun (usia sekolah & remaja)	>18 Tahun	≥ 60 tahun		
1	A.Selatan	3.311	16.553	23.141	11.150	6.827	24.003	179.271	28.707	4.798	4.771
2	A.Tenggara	5.159	25.935	24.845	13.383	13.009	46.771	137.250	19.315	5.143	5.129
3	A.Timur	2.974	33.135	35.761	15.051	10.558	61.370	302.502	38.307	8.837	8.754
4	A.Tengah	2.370	16.863	27.333	7.367	9.672	44.067	153.226	19.188	4.483	4.470
5	A.Barat	3.825	14.577	21.104	10.553	8.985	18.450	120.420	20.770	3.990	3.975
6	A.Besar	6.071	29.152	46.871	22.206	19.420	41.626	317.060	44.093	6.678	6.374

No	Kab/Kota	Sasaran Berdasarkan Kelompok Umur								Bumil	Bulin
		Bayi	1-6 Tahun * (balita & Prasekolah)	Kelas 1-6 SD/MI	Kelas 7-9 SMP/MI	Kelas 10-11 SMA/MA	7-17 Tahun (usia sekolah & remaja)	>18 Tahun	≥ 60 tahun		
7	Pidie	5.720	31.000	47.491	21.287	17.771	80.755	330.269	61.313	8.698	8.683
8	A.Utara	3.343	45.527	74.794	31.307	15.957	122.058	438.969	63.130	12.235	12.192
9	Simeulu	3.233	7.450	3.513	2.494	2.249	4.743	66.379	8.395	2.188	2.184
10	Singkil	4.118	11.759	22.990	6.626	3.679	34.687	81.189	8.246	3.468	3.448
11	Bireuen	765	34.047	47.832	23.314	93.971	86.370	351.244	56.657	9.017	8.986
12	A. Barat Daya	2.285	11.405	16.030	7.649	1.903	25.582	96.278	11.478	2.456	2.285
13	Gayo Lues	1.573	8.923	10.947	4.213	1.836	16.431	64.673	5.018	1.926	1.583
14	Aceh Jaya	2.553	7.760	8.980	13.540	4.560	13.540	71.983	9.672	2.123	2.112
15	Nagan Raya	2.685	12.088	21.823	8.681	5.253	13.934	125.290	6.873	3.163	2.699
16	A.Tamiang	5.720	21.935	33.373	15.492	9.693	62.976	211.369	26.007	6.004	5.964
17	Bener Meriah	2.433	13.185	14.111	6.924	4.842	25.887	107.745	7.214	3.751	2.747
18	Pidie Jaya	3.233	12.032	21.446	10.435	7.274	39.155	120.027	22.741	3.356	3.348
19	Banda Aceh	4.118	18.374	29.734	14.125	14.581	53.754	217.192	19.213	4.368	4.346
20	Sabang	746	3.109	5.164	2.102	1.910	9.176	25.360	3.724	805	768
21	Langsa	3.843	14.446	23.051	11.215	7.177	41.443	129.414	14.171	3.921	4.082
22	Lhokseumawe	3.602	13.631	20.502	10.373	10.598	38.038	149.991	15.281	4.133	3.897
23	Subulussalam	2.553	9.055	13.349	4.292	3.490	16.720	50.600	4.733	2.621	2.615
	Jumlah	76.233	411.941	594.185	273.779	275.215	921.536	3.847.701	514.246	108.162	105.412

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025

M. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana pada kurun waktu terjadinya bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan pada masa darurat bencana. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan dan saat tanggap darurat krisis kesehatan.

Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia Kesehatan, dan petunjuk teknis atau tata cara

pemenuhan standar. Penghitungan pencapaian SPM Kesehatan terdampak krisis sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia) dan pencapaian penerima layanan dasar.

N. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa (KLB)

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah meningkatnya kejadian kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dimana setiap penduduk yang terdampak KLB dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB pada kurun waktu tertentu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan pemerintah daerah provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak/berpotensi KLB. Dalam mencapai indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) KLB ada 2 (dua) Aspek yang di nilai yaitu Persentase Penerima Layanan Dasar dan Persentase Pencapaian Mutu Minimal.

Tabel 2.73.
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Tahun	Jumlah Penduduk Terdampak	Jumlah Penduduk yang Terlayani	Capaian (%)
2024	11.046	9.335	85

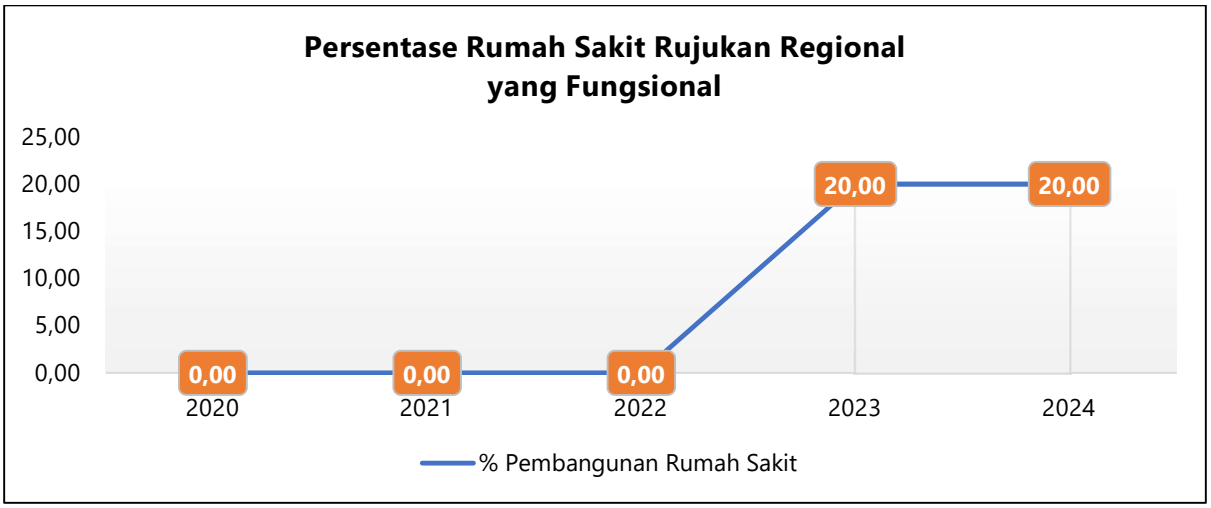
Sumber : Data Rutin KLB Dinas Kesehatan Aceh, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.35.** diatas dimana pada Tahun 2024 Jumlah Penduduk terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB adalah 11.046 jiwa sedangkan Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan sebanyak 9.335 jiwa dengan persentase sebesar 85%, kondisi ini belum sesuai denga terget di sudah dibuat dimana Target untuk pelayan kesehatan bagi penduduk yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yaitu 100%.

O. Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang Fungsional

Pemerintah Aceh sejak Tahun 2016 telah memulai proses pembangunan 5 (lima) Rumah Sakit Rujukan Regional dalam rangka pengembangan sistem Rujukan Regional di 5 (lima) RSUD Kabupaten/Kota sebagai upaya penguatan penerapan sistem rujukan berjenjang melalui mekanisme regionalisasi. Rumah sakit rujukan regional tersebut berada di 3 (tiga) wilayah Aceh yaitu wilayah Barat–Selatan dipusatkan pada Rumah Sakit Cut Nyak Dhien di Meulaboh dan Rumah Sakit dr. Yulidin Away di Tapaktuan, wilayah pesisir Utara–Timur dipusatkan di Rumah Sakit dr. Fauziah Bireuen dan Rumah Sakit Langsa, sementara untuk wilayah Tengah–Tenggara dipusatkan di Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah. Pembangunan kelima RS rujukan regional ini telah memakan waktu selama 9 (sembilan) tahun anggaran. Dari kelima RS rujukan regional tersebut hanya RSUD dr.

Yulidin Away di Tapaktuan yang telah fungsional, sedangkan 4 (empat) RS rujukan regional lainnya sampai saat ini belum dapat difungsionalkan, sesuai dengan **Gambar 2.44.**



Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, 2025

Gambar 2.82. Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang Fungsional Tahun 2020-2024

Dalam rangka penyelesaian pembangunan dan operasional 4 (empat) Rumah Sakit Rujukan Regional lainnya perlu dilakukan alternatif pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana Pemerintah Aceh selaku pemrakarsa, dengan bentuk pengembalian investasi atas ketersediaan layanan *availability payment*.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang merata

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang dijalani. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, perkembangan RLS di Aceh relatif merata seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 2.74**.

Tabel 2.74.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	9,34	9,48	9,73	9,81	9,89
Aceh Singkil	8,53	8,68	8,69	8,70	8,72
Aceh Selatan	8,87	8,88	8,89	8,91	8,92
Aceh Tenggara	9,66	9,67	9,92	10,09	10,1
Aceh Timur	8,15	8,21	8,32	8,47	8,48
Aceh Tengah	9,85	9,86	9,87	9,89	10,03
Aceh Barat	9,37	9,55	9,87	9,89	9,99
Aceh Besar	10,32	10,33	10,35	10,36	10,37
Pidie	8,99	9,00	9,02	9,03	9,04

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bireuen	9,28	9,29	9,31	9,32	9,59
Aceh Utara	8,63	8,64	8,73	8,85	9,11
Aceh Barat Daya	8,66	8,67	8,68	8,77	8,78
Gayo Lues	8,20	8,40	8,41	8,42	8,44
Aceh Tamiang	8,90	8,91	9,04	9,24	9,3
Nagan Raya	8,68	8,69	8,95	8,96	9,25
Aceh Jaya	8,70	8,71	8,72	8,74	9,02
Bener Meriah	9,79	10,00	10,01	10,12	10,13
Pidie Jaya	9,33	9,34	9,53	9,58	9,59
Banda Aceh	12,65	12,83	13,03	13,04	13,1
Sabang	11,14	11,18	11,19	11,20	11,22
Langsa	11,11	11,12	11,14	11,27	11,28
Lhokseumawe	10,91	11,11	11,12	11,27	11,31
Subulussalam	7,84	8,03	8,22	8,32	8,43
Aceh	**9,33**	**9,37**	**9,44**	**9,55**	**9,64**
Nasional	**8,48**	**8,54**	**8,69**	**8,77**	**8,85**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Aceh Tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif dan lebih baik dibandingkan dengan nasional. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Aceh Tahun 2024 adalah 9,64 tahun menunjukkan bahwa secara umum penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam tingkat pendidikan hingga kelas XII (SMP kelas III) hingga pendidikan tinggi. Kota Banda Aceh memiliki angka RLS paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan Kota Subulussalam, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah yang terendah capaian angka Rata-rata Lama Sekolah bahkan masih dibawah angka Nasional. Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah pada Kabupaten/Kota tersebut diantaranya adalah sulitnya akses menuju sekolah. Pemerintah Aceh berupaya melakukan pemerataan dan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.75.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-rata Sumatera Tahun 2020–2024

Tahun	Aceh	Sumatera Utara	Rata-Rata Sumatera	Nasional
2020	9,33	9,54	8,89	8,48
2021	9,37	9,58	8.93	8,54
2022	9.44	9,71	9.02	8.69
2023	9.55	9,82	9.02	8.77
2024	9.64	10.18	9.54	8.85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah, Aceh berada diatas rata-rata Sumatera, namun masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara, seperti ditunjukkan pada **Tabel 2.75.** Pada Tahun 2020, rata-rata lama sekolah Aceh di awal periode tercatat 9,33 tahun, angka ini di atas rerata nasional dan

Sumatera, namun masih lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara dengan angka 9,54. Pada periode akhir, yaitu Tahun 2024, angka rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 9,64 tahun dan berada di atas rerata nasional dan Sumatera. Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, angka tersebut masih relatif lebih rendah dimana Sumatera Utara berada pada angka 10,18 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah harus terus ditingkatkan mengingat angka lama sekolah yang berada pada rata-rata 9 tahun mencerminkan bahwa lama sekolah di Aceh masih pada tingkat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama. Pemerintah Aceh berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang pendidikan.

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah Aceh mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,63 tahun menjadi 14,39 tahun pada Tahun 2024, namun demikian HLS Aceh Tahun 2024 masih berada diatas nasional 13,21 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,39 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam **Tabel 2.76**.

Tabel 2.76.
Angka Harapan Lama Sekolah Aceh Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	13,76	13,9	14,08	14,28	14,53
Aceh Singkil	14,31	14,32	14,34	14,35	14,36
Aceh Selatan	14,42	14,6	14,69	14,7	14,71
Aceh Tenggara	14	14,01	14,26	14,27	14,47
Aceh Timur	13,03	13,04	13,06	13,07	13,08
Aceh Tengah	14,27	14,28	14,61	14,85	15,03
Aceh Barat	14,6	14,61	14,63	14,64	14,93
Aceh Besar	14,72	14,73	14,75	14,76	14,77
Pidie	14,46	14,47	14,49	14,5	14,52
Bireuen	14,83	14,84	14,86	14,87	14,88
Aceh Utara	14,7	14,71	14,73	14,74	14,75
Aceh Barat Daya	13,58	13,65	13,66	13,67	13,69
Gayo Lues	13,77	13,78	14,08	14,34	14,59
Aceh Tamiang	13,59	13,76	13,96	14,23	14,51
Nagan Raya	14,13	14,14	14,16	14,17	14,18
Aceh Jaya	13,98	13,99	14,01	14,02	14,06
Bener Meriah	13,46	13,47	13,71	13,72	13,73

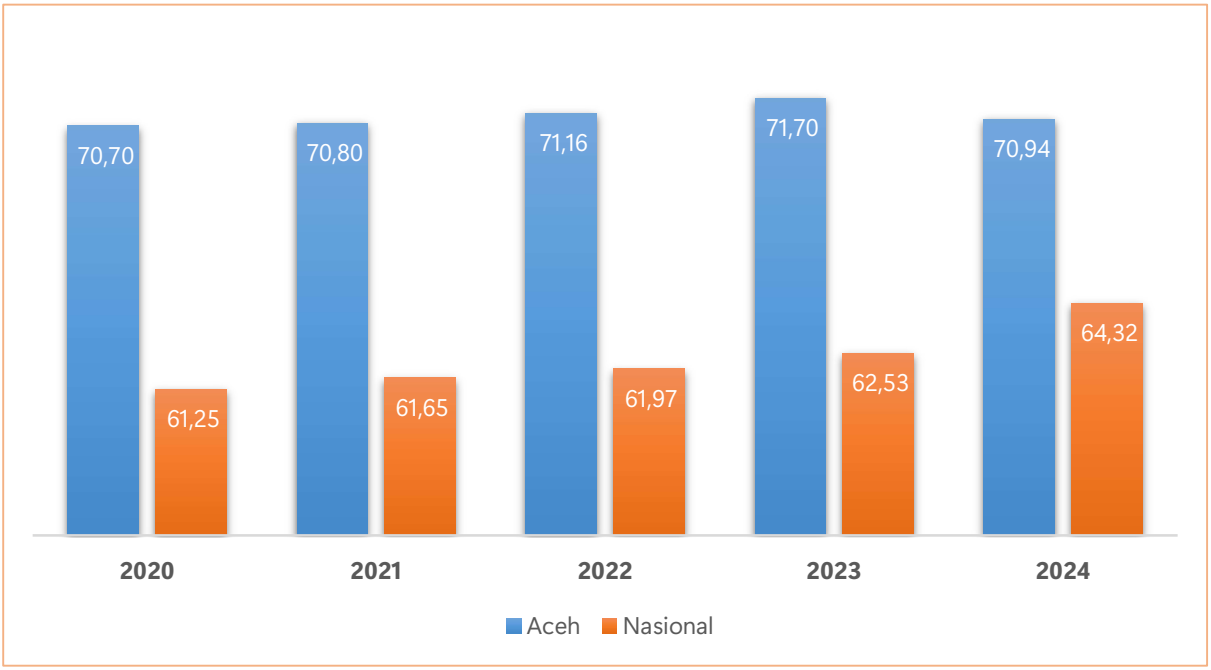
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pidie Jaya	14,82	14,97	14,98	14,99	15,01
Banda Aceh	17,79	17,8	17,81	17,93	17,94
Sabang	13,95	14,13	14,4	14,68	14,97
Langsa	15,35	15,63	15,64	15,7	15,71
Lhokseumawe	15,2	15,21	15,27	15,54	15,55
Subulussalam	14,61	14,62	14,81	15,06	15,31
Aceh	**14,31**	**14,63**	**14,37**	**14,38**	**14,39**
Nasional	**12,98**	**13,08**	**13,1**	**13,15**	**13,21**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)

Dalam rangka meningkatkan HLS dilakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A, Paket B, Paket C dan Keaksaraan Fungsional pada masyarakat serta membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

C. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).



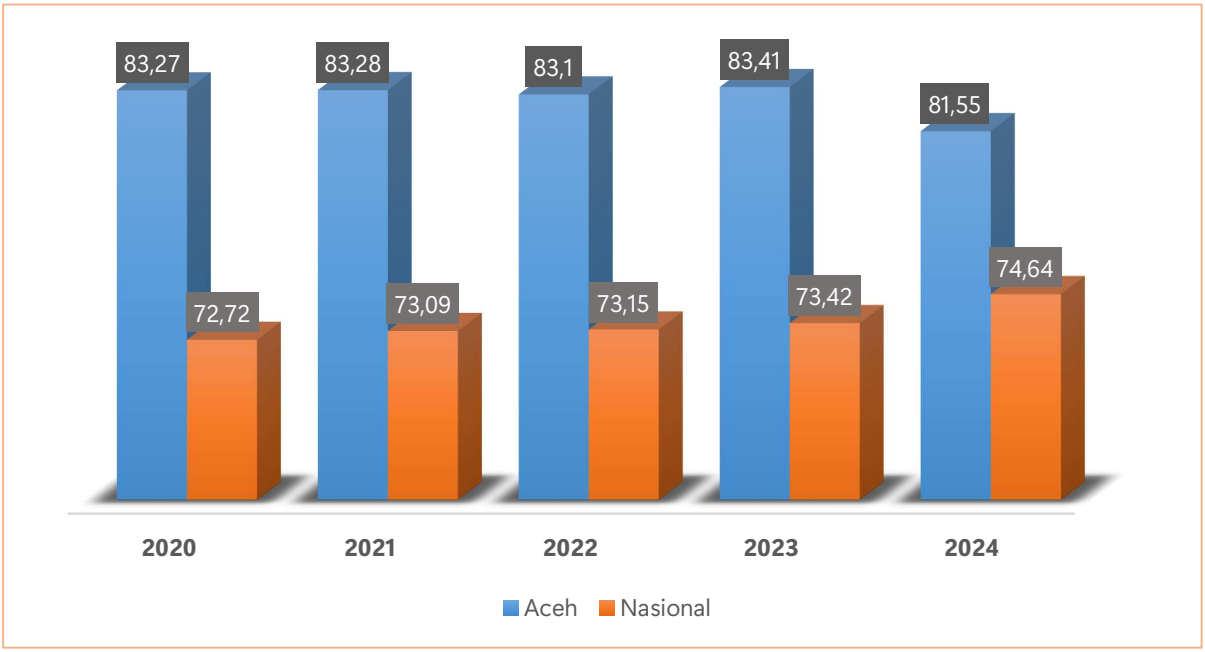
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)

Gambar 2.83. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2019 – 2024

Gambar 2.83 dapat dilihat bahwa APM Aceh untuk tingkat pendidikan menengah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga di Tahun 2023 tercatat sebesar 71,70 persen. Tetapi di tahun berikutnya telah mengalami penurunan walaupun tidak besar menjadi 70,94 persen dan masih berada di atas angka capaian nasional yang hanya 64,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan menengah masih tinggi walaupun ada hal-hal yang masih harus terus diperbaiki dan dilakukan usaha yang maksimal sehingga di tahun berikutnya tidak mengalami penurunan lagi tetapi meningkat menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2020-2024, dapat dilihat bahwa capaian APM Aceh selalu lebih tinggi dari rata-rata capaian APM secara nasional.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

Angka partisipasi sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (Data diolah)

Gambar 2.84. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16-18 Tahun 2019 – 2024

Perkembangan APS Provinsi Aceh dan nasional usia 16 – 18 tahun terlihat pada **Gambar 2.84**. APS provinsi Aceh dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 terus berfluktuasi. Tahun 2020 APS Provinsi Aceh adalah sebesar 83,27 persen, mengalami kenaikan di Tahun 2021 sebesar 83,28 persen tetapi mengalami penurunan di Tahun 2022 menjadi 83,1 persen, sedangkan pada Tahun 2023 meningkat kembali dengan capaian APS sebesar 83,41 persen, dan di Tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 81,55 persen, ini

berarti masih terdapat 18,45 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak aktif bersekolah pada tingkat SMA/sederajat atau tidak bersekolah lagi. Jika dibandingkan secara nasional, dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024, Provinsi Aceh masih berada di atas rata-rata nasional yang berada dikisaran 74 persen.

E. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Pentingnya pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan ini untuk memenuhi hak warga negara dalam hal ini anak usia sekolah. Pada level provinsi terdapat sebanyak 29 indikator yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu:

a. Angka Partisipasi Sekolah, dengan target 100% pertahun;
b. Kemampuan literasi dan numerasi;
c. Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
d. Iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas.

Untuk kelompok Kemampuan Literasi dan Numerasi terdapat sebanyak 10 (sepuluh) indikator secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.77**.

Tabel 2.77.
Kelompok Kemampuan Literasi Aceh Tahun 2021-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,28	56,03	64,96
2	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	48,06	48,94	65,25
3	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,28	53,27	59,06
4	Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,17	47,09	57,89
5	Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,95	58,96	65,09
6	Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	41,55	44,51	57,24
7	Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,14	59,6	68,62
8	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,77	53,29	59,93
9	Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58,05	57,27	63,21
10	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,78	52,41	57,46

Sumber : Indikator Rapor Pendidikan, 2024

Kemampuan Literasi yaitu persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi merupakan

persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Berdasarkan tabel capaian kompetensi literasi dan numerasi di Aceh berdasarkan hasil Asesmen Nasional diatas menunjukkan perkembangan yang positif pada berbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang SMA, rerata kompetensi literasi meningkat dari 57,28 pada Tahun 2021 menjadi 64,96 pada Tahun 2023, sedangkan rerata kompetensi numerasi meningkat signifikan dari 48,06 pada Tahun 2021 menjadi 65,25 pada Tahun 2023. Perkembangan serupa juga terlihat pada jenjang SMK, di mana kompetensi literasi meningkat dari 55,28 pada Tahun 2021 menjadi 59,06 pada Tahun 2023, sementara kompetensi numerasi bertambah dari 47,17 pada Tahun 2021 menjadi 57,89 pada Tahun 2023.

Pada jenjang pendidikan khusus, capaian juga menunjukkan arah yang positif. Di SDLB, kompetensi literasi meningkat dari 58,95 pada Tahun 2021 menjadi 65,09 pada Tahun 2023, sementara numerasi bertumbuh dari 41,55 pada Tahun 2021 menjadi 57,24 pada Tahun 2023. Di jenjang SMPLB, capaian literasi bertambah dari 62,14 pada Tahun 2021 menjadi 68,62 pada Tahun 2023, dan numerasi meningkat dari 53,77 pada Tahun 2021 menjadi 59,93 pada Tahun 2023.

Selanjutnya, pada jenjang SMALB, rerata kompetensi literasi yang semula 58,05 pada Tahun 2021 naik menjadi 63,21 pada Tahun 2023, sedangkan numerasi meningkat dari 54,78 pada Tahun 2021 menjadi 57,46 pada Tahun 2023. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang ditunjukkan melalui kompetensi literasi dan numerasi di seluruh jenjang pendidikan, baik pendidikan reguler maupun pendidikan khusus, yang semakin memperkuat upaya peningkatan mutu pendidikan di Aceh

F. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

Tingkat Penyerapan Lulusan SMK menunjukkan keberhasilan sekolah dalam mempersiapkan murid untuk melanjutkan Pendidikan, berkarya di dunia kerja, dan berwirausaha. Penyerapan lulusan SMK dari Tahun 2022 sebesar 29,5 persen meningkat menjadi 80,69 persen. Upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Aceh yaitu dengan memberikan pemagangan di perusahaan-perusahaan dan guru yang berkopentensi dalam melatih siswa SMK

G. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang menunjang proses pembelajaran. Sarana merupakan semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Kondisi ruang kelas sekolah negeri/ swasta Tahun 2023 dalam Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada

masing-masing jenjang pendidikan. Hal ini terlihat pada kondisi ruang kelas sekolah yang terus dilakukan perbaikan demi kenyamanan proses belajar-mengajar. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, fokus provinsi pada pembagian urusan bidang pendidikan adalah pada manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Implementasi dari peraturan tersebut adalah diletakkannya kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa berada pada pemerintah provinsi (Aceh). Persentase kondisi ruang kelas jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2023 dapat dilihat pada **Gambar 2.85**.



	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang + Berat
	Kondisi Ruang Kelas (%)		
3 SLB	3.016	142	-
2 SMK	6.700	252	11
1 SMA	767	60	-

Gambar 2.85. Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kondisi ruang kelas dengan kondisi rusak sedang/berat dan rusak ringan. Pada Tahun 2023, ruang kelas jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB berjumlah 10.948 ruang, dengan kondisi baik sebanyak 10.483 ruang kelas (95,75%) sedangkan kondisi rusak ringan dan rusak sedang/berat hanya sebesar 4,25 persen atau 465 ruang kelas. Dalam ruang lingkup Aceh, tren kondisi ruang kelas baik terus meningkat, artinya progres peningkatan kualitas ruang kelas berjalan dengan baik di Aceh.

H. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi kepribadian; 3) Kompetensi profesional; dan 4) Kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/ SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan guru pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Jadi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik dapat diartikan bahwa guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas sehingga guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun outputnya. Untuk menguji kompetensi pendidik berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada data sertifikasi guru Tahun 2023 disajikan pada **Tabel 2.78**.

Tabel 2.78.
Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	SMA		SMK		SLB	
	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
Simeulue	23,69	76,31	26,69	73,31	15,38	84,62
Aceh Singkil	42,64	57,36	30,65	69,35	20,00	80,00
Aceh Selatan	31,17	68,83	32,92	67,08	2,70	97,30
Aceh Tenggara	34,19	65,81	27,06	72,94	37,78	62,22
Aceh Timur	36,06	63,94	29,57	70,43	23,08	76,92
Aceh Tengah	43,45	56,55	43,97	56,03	18,31	81,69
Aceh Barat	38,03	61,97	40,51	59,49	28,00	72,00
Aceh Besar	45,01	54,99	35,60	64,40	24,42	75,58
Pidie	40,72	59,28	29,68	70,32	45,07	54,93
Bireuen	36,71	63,29	41,08	58,92	25,64	74,36
Aceh Utara	34,16	65,84	24,19	75,81	17,65	82,35
Aceh Barat Daya	42,10	57,90	48,44	51,56	38,46	61,54
Gayo Lues	34,82	65,18	29,59	70,41	13,89	86,11
Aceh Tamiang	35,83	64,17	38,30	61,70	31,08	68,92
Nagan Raya	39,25	60,75	28,57	71,43	22,58	77,42
Aceh Jaya	39,33	60,67	38,46	61,54	11,11	88,89
Bener Meriah	40,24	59,76	39,77	60,23	30,69	69,31
Pidie Jaya	33,83	66,17	25,90	74,10	24,19	75,81
Banda Aceh	51,40	48,60	40,82	59,18	23,29	76,71
Sabang	47,37	52,63	55,74	44,26	38,46	61,54
Langsa	42,01	57,99	45,94	54,06	31,17	68,83
Lhokseumawe	45,90	54,10	40,51	59,49	21,18	78,82
Subulussalam	30,00	70,00	35,93	64,07	15,38	84,62
Aceh	**38**	**62**	**35**	**65**	**25**	**75**

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa persentase sertifikasi guru pada jenjang pendidikan SLB yang memiliki guru sudah bersertifikasi paling kecil sebesar 25 persen dan yang belum bersertifikasi sebanyak 75 persen.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Jaminan Sosial Tenaga kerja

Perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu isu krusial yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Aceh sebagaimana amanat Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan dan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut harus ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mendukung langkah pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial terutama bagi pekerja rentan yang saat ini masih cukup rendah. Berdasarkan data Tahun 2024 tercatat bahwa jumlah pekerja yang sudah terlindungi sebanyak 414.660 pekerja atau baru mencapai 23,6 persen. Sehingga masih terdapat sejumlah 1.342.069 pekerja yang belum terlindungi. Jumlah tersebut mencover hampir dari seluruh tenaga kerja informal di Aceh yang saat ini mencapai 63,19 persen.

Dalam upaya memperkuat perlindungan sosial, Pemerintah Aceh telah mendorong pemanfaatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk mendukung pekerja rentan yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Intervensi ini diarahkan agar pengelolaan dana perlindungan sosial dapat lebih optimal dengan peruntukan yang tepat dan jelas bagi penerima manfaat, melalui pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan lembaga atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemanfaatan data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) digunakan sebagai basis dalam melakukan pemetaan, sehingga dapat teridentifikasi kelompok pekerja yang berhak menerima perlindungan sesuai dengan tingkat kerentanan mereka. Dengan demikian, jaminan sosial bagi pekerja perkebunan sawit dapat diwujudkan dan terdistribusi secara tepat sasaran, sekaligus memperkuat keberlanjutan perlindungan sosial bagi masyarakat Aceh..

B. Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari berbagai dimensi sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, keamanan, dan partisipasi sosial. IKS bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup masyarakat, di luar aspek ekonomi semata, Dengan demikian, Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) bukan hanya menjadi angka statistik, tetapi juga cerminan keberpihakan terhadap pembangunan manusia yang adil dan inklusif.

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Bidang Sosial merupakan indikator penting yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial. Indeks ini disusun berdasarkan sejumlah indikator yang mencakup akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta partisipasi sosial masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kualitas hidup sosial mereka terjamin. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemerataan pelayanan sosial di wilayah terpencil, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan data terpadu untuk menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat, secara keseluruhan, capaian Indeks Kesejahteraan Sosial menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B.1. Sarana Sosial Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rehabilitasi Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti membutuhkan peningkatan sarana seiring dengan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial. Ketersediaan sarana prasarana sosial guna optimalisasi pelayanan sosial yang menjamin pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat di dalam panti. Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 6 (enam) unit dalam kondisi baik 1 (satu) unit dalam kondisi kurang baik. Panti pelayanan sosial merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar secara langsung kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Daftar panti pelayanan sosial milik Pemerintah Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.79**.

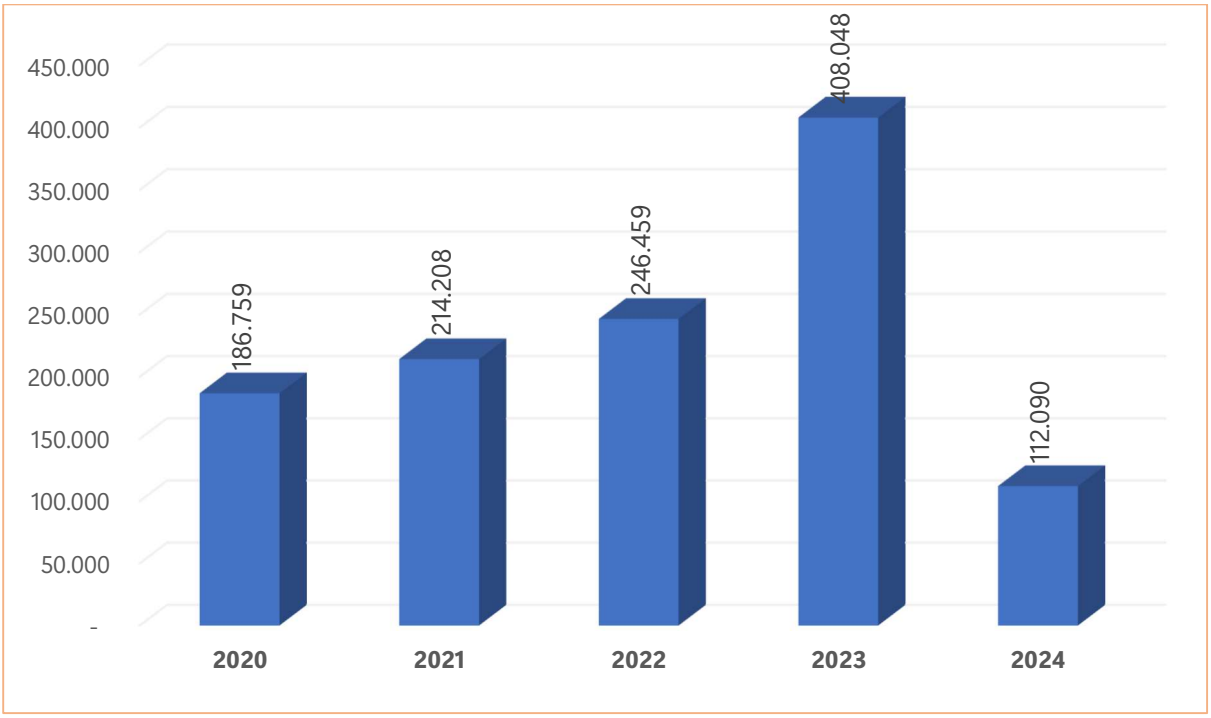
Tabel 2.79.
Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Aceh Tahun 2024

No.	Nama Panti	Jenis PPKS yang dilayani	Daya Tampung	Jumlah Tertampung	Jenis Pelayanan PPKS	Tempat Kedudukan
1.	Panti Sosial Anak Jroh Naguna	Anak Putus Sekolah	50 Orang	50 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Lampineung – Kota Banda Aceh
2.	Panti Sosial Lanjut Usia Geunaseh Sayang	Lanjut Usia Terlantar	70 Orang	65 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Ulee Kareng – Kota Banda Aceh
3.	Panti Sosial Disabilitas Meujroh Meukarya	Disabilitas	60 Orang	50 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Ladong - Kab. Aceh Besar
4.	Panti Sosial Anak Terlantar Aneuk Nanggroe	Anak Terlantar	70 Orang	50 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Geu Gajah – Kab. Aceh Besar
5.	Panti Sosial Tuna Sosial	Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	30 Orang	- Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Desa Ladong - Kab. Aceh Besar
6.	Panti Sosial Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	30 Orang	– Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar	Lampineung – Kota Banda Aceh

Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Aceh berdasarkan **Gambar 2.86**, pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Berdasarkan Gambar 2.83, jumlah PPKS tercatat sebanyak 186.759 jiwa pada Tahun 2020, meningkat menjadi 214.208 jiwa pada Tahun 2021, dan kembali bertambah menjadi 246.459 jiwa pada Tahun 2022. Puncak capaian terjadi pada Tahun 2023 dengan jumlah 408.048 jiwa, sementara pada Tahun 2024 tercatat

sebesar 112.090 jiwa. Secara kumulatif, jumlah PPKS yang ditangani selama periode lima Tahun terakhir mencapai 1.167.564 jiwa



Sumber : Dinas Sosial Aceh, 2025

Gambar 2.86. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang menjadi Indikator Kinerja Kunci, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial telah mengoptimalkan fungsi Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, serta penanganan korban bencana alam maupun bencana sosial pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana. Upaya tersebut diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan sosial. Dengan langkah ini, pelayanan kesejahteraan sosial di Aceh diharapkan semakin optimal, komprehensif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B.2. Pemberdayaan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial. Peningkatan kompetensi PSKS merupakan upaya mendorong percepatan secara kongkrit dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disekitarnya. Berikut jumlah PSKS di Aceh periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 seperti terlihat pada **Tabel 2.80**.

Tabel 2.80.
Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Aceh

No.	Jenis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karang Taruna (Lembaga)	1.376	1.413	1.462	1.542	1542
2	Organisasi Sosia (Lembaga)	57	60	60	65	65
3	LKS Panti (Lembaga)	166	164	158	143	143
4	PSM (Orang)	1.252	1.295	1.302	1.349	1.349
5	TKSK (Orang)	289	289	289	290	274
6	LK3 (Lembaga)	27	27	27	26	26
7	Dunia Usaha (Lembaga)	13	13	15	18	18
8	Tagana (Orang)	772	759	873	757	768
9	Kader Perempuan (Orang)	23	23	23	23	23
10	Pendamping Sosial (PKH & Rehsos) (Orang)	1.246	1.246	1.248	1.251	1.148
11	Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) (Lembaga)	364	371	385	453	441
	Jumlah	**5.562**	**5.637**	**5.819**	**5.894**	**4.649**

Pemerintah Aceh menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi serta lembaga nonpemerintah, baik nasional maupun internasional, dalam rangka memperkuat potensi dan peran Penyuluh Sosial dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Aceh. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan kapasitas, peningkatan kompetensi, serta penguatan peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Dukungan tersebut diarahkan pada penggalian dan pemanfaatan potensi lokal yang meliputi sumber daya manusia, kearifan lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kesejahteraan sosial. Dengan penguatan ini, PSKS di Aceh diharapkan semakin berdaya, inovatif, dan adaptif dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Berikut adalah Tabel **Tabel 2.81** menyajikan dukungan peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah dilakukan oleh kerjasama Lembaga Non Pemerintah serta permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi dan sumber yang ada.

Tabel 2.81.
Dukungan peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosia oleh Lembaga Non Pemerintah

Unsur	Bentuk Dukungan	Permasalahan yang Dihadapi
Pemerintah	- Regulasi - Bantuan operasional - Pembinaan	- Minimnya anggaran - Belum semua Kab/kota menjangkau PSKS secara merata
Lembaga Non. Pemerintah	- Advokasi kebijakan - Pendampingan komunitas	- Ketergantungan pada donatur

Unsur	Bentuk Dukungan	Permasalahan yang Dihadapi
	- Bantuan sosial langsung	- SDM tidak merata di tiap Kab/kota
Perguruan Tinggi	Kerjasama peningkatan SDM Kessos	Belum terkoordinasi dengan baik dalam penetapan SDM Kesos
Dunia Usaha (CSR)	Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	- Kurangnya monitoring & evaluasi - Program tidak berkelanjutan
Masyarakat dan Usaha Kesejahteraan Sosial lainnya	- Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial - Donasi dan gotong royong	- Kurangnya pelatihan - Masih sektoral, belum terkoordinasi dengan baik

Selain penguatan kapasitas PSKS, Pemerintah Aceh juga melakukan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial merupakan bagian integral dari pembangunan kartakter bangsa. Sebagai bentuk penghormatan dan pembelajaran sejarah bagi generasi mendatang Pemerintah Aceh secara aktif mengusulkan tokoh-tokoh yang telah berjasa kepada bangsa untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

B.3. Penanganan Bencana

Penanganan Korban Bencana merupakan salah satu dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang menjadi tugas Dinas Sosial Aceh. Tentunya Dinas Sosial Aceh yang diberikan mandat dan tanggung jawab menangani pelayanan dasar dan urusan wajib pemerintah daerah, mempunyai kewajiban yang memfokuskan pada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Sosial terutama di sektor penanganan urusan kebencanaan. Skema mitigasi bencana dan kesiapsiagaan penangananan bencana pada saat terjadi bencana dan pasca bencana, terkhusus penyediaan buffrerstok pangan dan sandang menjadi sebuah keharusan dan skala prioritas, baik pada aspek perencanan dan aspek implementasi program dan kegiatan.

Tabel 2.82.
Data Penanganan Korban Bencana Tahun 2021 sampai dengan 2024

No	Kab/Kota	2021		2022		2023		2024	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Sabang	85	123	140	235	48	56	68	78
2	Banda Aceh	166	158	388	364	18	29	92	81
3	Aceh Besar	286	434	574	690	126	135	158	479
4	Pidie	1.415	1.940	108	119	222	208	3.915	5.494
5	Pidie Jaya	1.769	1.074	6.093	6.005	9	10	5.206	6.207
6	Bireuen	1.750	1.194	2.070	2.056	485	515	5.697	7.012
7	Lhoksumawe	198	292	46	49	6.332	6.660	216	168
8	Aceh Utara	33.223	33.020	55.731	55.456	40.824	40.641	3.115	2.964
9	Aceh Timur	1.291	1.181	44	46	3.503	3.228	326	271
10	Langsa	979	949	40	37	2.776	2.704	122	108

No	Kab/Kota	2021		2022		2023		2024	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
11	Aceh Tamiang	31.517	30.075	83.773	78.656	6.226	6.978	4.553	4.592
12	Bener Meriah	390	407	1.046	1.081	41	44	85	97
13	Aceh Tengah	346	359	693	713	138	139	207	226
14	Gayo Lues	144	148	194	221	64	63	176	160
15	Aceh Tenggara	3.630	3.793	973	915	5.106	5.217	4.813	5.249
16	Aceh Jaya	1.469	1.920	2.859	2.892	3.452	3.246	1.098	1.124
17	Aceh Barat	370	420	260	293	46.160	46.319	492	550
18	Nagan Raya	998	1.004	2.819	2.804	3.025	3.579	3.752	2.931
19	Aceh Barat Daya	5.027	5.099	14.598	14.826	409	393	76	79
20	Aceh Selatan	2.945	3.950	6.024	6.074	22.894	18.966	12.919	10.812
21	Subulussalam	1.505	1.606	9.460	9.613	4.447	4.553	5.609	5.653
22	Aceh Singkil	2.545	3.442	5.260	5.130	14.260	14.156	115	41
23	Simeulue	123	240	337	367	493	533	140	122
JUMLAH		**92.171**	**92.828**	**193.530**	**188.642**	**161.058**	**158.372**	**52.950**	**54.498**

B.4. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkeadilan dan inklusif, Pemerintah Aceh melaksanakan program Perlindungan dan jaminan sosial dengan mengembangkan skema perlindungan yang adaptif dan responsif bagi kelompok rentan. Perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak-hak dasar kelompok masyarakat yang berisiko mengalami disfungsi sosial dan ekonomi , seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, perempuan kepala keluarga, serta korban bencana dan kemiskinan ekstrem. Jaminan Sosial melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta skema jaminan sosial yang terintegrasi, pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial berkomitmen menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan guna menciptakan rasa aman, mendorong kemandirian, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Seluruh upaya ini ditujukan untuk memastikan perlindungan dan jaminan sosial berjalan secara efektif, akuntabel, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

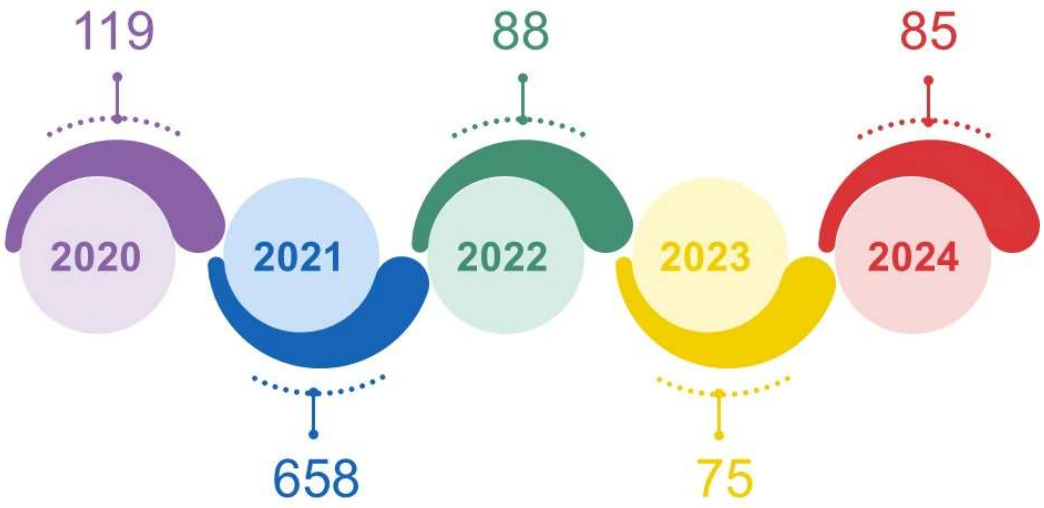
Tabel 2.83.
Data Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dari Tahun 2020 - 2024

No	Kab/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Aceh Barat	-	-	6	99	68	338	24	45	-	-
2	Aceh Barat Daya	-	-	24	170	-	13	-	-	-	-
3	Aceh Besar	-	15	199	130	46	103	69	38	4	13
4	Aceh Jaya	-	-	1	9	106	120	-	20	-	-
5	Aceh Selatan	-	-	8	63	-	129	-	43	-	-
6	Aceh Singkil	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-
7	Aceh Tamiang	-	-	-	-	25	43	-	6	2	33
8	Aceh Tengah	-	-	49	165	-	-	8	13	-	-
9	Aceh Tenggara	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
10	Aceh Timur	-	-	2	78	106	267	-	60	-	-
11	Aceh Utara	-	-	30	115	386	548	51	99	-	-
12	Bener Meriah	-	-	-	-	-	-	1	-	10	20
13	Bireuen	-	-	54	69	36	350	2	21	6	35
14	Gayo Lues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

No	Kab/Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
15	Nagan Raya	-	-	15	-	23	177	5	15	-	-
16	Pidie	-	76	-	22	13	1	32	38	-	1
17	Pidie Jaya	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-
18	Simeulue	-	-	23	60		100	-	-	-	-
19	Banda Aceh	-	27	88	75	13	37	17	57	3	3
20	Kota Langsa	169	239	-	-	25	43	1	23	9	26
21	Lhokseumawe	-	-	1	13	4	52	2	-	-	-
22	Kota Sabang	-	-	3	11	-	13	-	3	-	-
23	Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**169**	**357**	**507**	**1.111**	**851**	**2.334**	**213**	**481**	**34**	**151**

B.5. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh mengupayakan memberikan perlindungan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan yang mengalami permasalahan diluar negeri dan dalam negeri melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang adaptif dan responsif untuk dipulangkan ke daerah asal kabupaten/kota dari titik Debarkasi di daerah Provinsi. Berikut data pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan



Gambar 2.87. Data Pemulangan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan

B.6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemerintah Aceh untuk memulikan jasa pahlawan, merawat bukti sejarah perjuangan bangsa serta menjaga Taman Makam Pahlawan dan makam pahlawan nasional dilakukan secara komprahensif. Seluruh upaya ini dilakukan Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan program pengelolaan taman makam pahlawan dengan merawat dan rehabilitasi sarana dan prasarana. Aceh memiliki Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.84**.

Tabel 2.84.
Taman Makam Pahlawan

No.	Kab/Kota	Nama TMP	Lokasi	Luas TMP/MPN	Jumalh Makam		Alamat
1	Kota Banda Aceh	TMP. Kampung Ateuk	Banda Aceh	10.000 M^2	450	Makam Pahlawan Nasional	Jl. Taman Makam Pahlawan Kel. Kp. Ateuk Kec. Peuniti Kota Banda Aceh

No.	Nama Pahlawan Nasional	Kelahiran		Wafat	Alamat Makam	SK Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional
		Tempat	Tanggal Lahir			
1.	Sultan Iskandar Muda	Bandar Aceh Darusslam	1593	27 Desember 1636 (Umur 43 Tahun) di Bandar Aceh Darussalam.	Komplek Kandang Meuh, Kelurahan Peniti, Kec, Baiturrahman, Kota Banda Aceh.	077/TK/Tahun 1993 Tanggal 14 September 1993.
2.	Laksamana Malahayati	Aceh Besar, Kesultanan Aceh	1 Januari 1550	30 Juni 1615 (umur 65 Tahun) di Aceh Besar.	Desa Lamreh, Kec. Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.	115/TK/Tahun 2017 Tanggal 6 November 2017.
3.	Teuku Chik Ditiro	Tiro, Pidie, Kesultanan Aceh Darussalam	1 Januari 1836	31 Januari 1891 (Umur 55 Tahun) di Aneuk Galong.	Jl. Makam Pahlawan Nasional Tgk. Chik Ditiro Mureu lamglumpang Kec. Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.	087/TK/Tahun 1973 Tanggal 6 November 1973.
4.	Cut Nyak Dhien	Lampadang, Kesultanan Aceh	12 Mei 1848	06 November 1908 (Umur 60 Tahun) di Sumedang.	Jalan Gunung Puyuh No. 1 Desa Sukajaya, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Jawa Barat.	106/TK/Tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964.
5.	Teuku Umar	Meulaboh, Kesultanan Aceh Darussalam	1854	11 Februari 1899 (Umur 44-45 tahun) di Meulaboh.	Gle Raya Tameh Uteun Mugo, Gampong, Mugo Rayeuk, Kec. Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat.	087/TK/1973 tanggal 6 November 1973.
6.	Cut Nyak Mutia	Keureutoe, Pirak, Aceh Utara	15 Februari 1870	24 Oktober 1910 (Umur 40 Tahun) di Alue Kurieng.	Makam ini terletak di Hutan, Kec. Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara.	107/TK/1964 Tanggal 2 Mei 1964.
7.	Teuku Nyak Arif	Ulee Lheue, Banda Aceh	17 Juli 1899	04 Mei 1946 (Umur 46 Tahun) di Takengon Kabupaten Aceh Tengah.	Makam Bak Trieng, Kec. Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.	071/TK/1974.
8.	Teuku Muhammad Hasan	Sigli	04 April 1906	21 September 1997 (Umur 91 Tahun) di Jakarta.	Jl. Raya Kalibata No.14, RT.14/RW.1, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta.	085/TK/2006 tertanggal 3 November 2006.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A1. Syariat Islam

Penguatan penerapan syariat Islam secara holistik merupakan salah satu misi dari Gubernur Aceh Tahun 2025-2029. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Syariat Islam di Aceh merupakan salah satu keistimewaan provinsi ini dan diatur oleh berbagai qanun (peraturan daerah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan Syariat Islam di Aceh mencakup beberapa aspek penting kehidupan masyarakat, antara lain:

1. Bidang Hukum: Penerapan hukum pidana dan perdata yang berbasis syariat, seperti hukum jinayat yang mengatur tindak pidana dalam perspektif Islam. Contoh hukuman yang diterapkan termasuk cambuk untuk pelanggaran tertentu.

2. Bidang Ekonomi: Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk keberadaan lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Zakat, infaq, dan wakaf juga merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah di Aceh.
3. Bidang Sosial dan Budaya: Promosi dan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan busana Muslim, pemisahan tempat duduk pria dan wanita di tempat umum, serta pengaturan waktu operasional tempat hiburan sesuai dengan waktu ibadah.
4. Pendidikan Islam: Penekanan pada pendidikan berbasis Islam di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang digunakan juga mencakup pendidikan agama yang mendalam.
5. Layanan Keagamaan: Fasilitas dan program yang mendukung pelaksanaan ibadah dan pengembangan spiritual, seperti pembangunan masjid, pelaksanaan haji dan umrah, serta kegiatan keagamaan lainnya.
6. Pengawasan dan Penegakan Syariat: Pemerintah Aceh memiliki lembaga pengawas dan penegak syariat, seperti Wilayatul Hisbah (polisi syariah) yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam di masyarakat.

Penerapan Syariat Islam di Aceh bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih taat beragama, menjaga nilai-nilai keislaman, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga.

Dari Tahun 2020–2024, secara umum kondisi jarimah (kejahatan) meningkat. Pada Tahun 2023 jumlah jarimah sebanyak 409 kasus, sedangkan pada Tahun 2024 sebanyak 516 kasus. Namun, kalau dilihat kasus per kasus terdapat sejumlah jarimah yang menurun, tetapi tidak dapat dipungkiri juga ada yang meningkat. Seperti Khamar, Ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan dan liwath mengalami pengurangan, sedangkan Maisir dan Khalwat mengalami peningkatan. Bahkan kasus Maisir meningkat signifikan, di mana pada Tahun 2023 dari 153 kasus Maisir menjadi meningkat sebanyak 247 kasus di Tahun 2024, adapun kasus Khalwat dari 4 kasus bertambah menjadi 8 kasus pada Tahun 2024.

Jumlah kasus pelanggaran syariat islam yang dilakukan masyarakat periode Tahun 2019-2024 disajikan dalam **Tabel 2.85**.

Tabel 2.85.
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2019 – 2024 sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun					
	(Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Khamar	11	18	18	13	23	17
2	Maisir	83	65	194	153	95	247
3	Khalwat	9	7	10	7	4	8
4	Ikhtilath	84	39	46	25	22	15

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun					
	(Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Zina	32	49	51	28	38	21
6	Pelecehan Seksual	16	41	36	55	48	42
7	Pemerkosaan	21	49	115	136	177	165
8	Liwath	-	1	2	2	2	0
Jumlah Kasus		312	269	472	419	409	516

Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2025

Selain masih banyaknya jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam, kerawanan terhadap pemahaman syariat islam di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih dijumpai. Dalam rangka meningkatkan pemahaman syariat islam di daerah tersebut, Pemerintah Aceh menempatkan Da'i Perbatasan di 6 (enam) Kabupaten/Kota. Jumlah Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil di Tahun 2020 sampai dengan 2021 berjumlah 200 orang dan mulai berkurang menjadi 189 orang pada Tahun 2022 orang dan 179 orang pada Tahun 2023 selanjutnya mengalami penurunan kembali pada Tahun 2024 sehingga menjadi 170 orang. Secara keseluruhan terjadi pengurangan Da'i sebanyak 30 orang, umumnya disebabkan karena sebagian Da'i telah mencapai batas umur maksimal tenaga kontrak, mengundurkan diri karena telah lulus seleksi PPPK, menjadi Calon anggota DPR Kabupaten/Kota dan menjadi Calon Anggota DPR Aceh pada Pemilu Tahun 2024. Berikut jumlah Da'i perbatasan di Aceh. Berikut jumlah Da'i perbatasan di Aceh. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.86**.

Tabel 2.86.
Jumlah Da'i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2019 – 2024

Kabupaten/ Kota	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Pbts	Tpcl	Tpcl	Pbts	Tpcl	Pbts	Tpcl
Aceh Singkil	26	16	26	17	26	21	17	17	26	17	21	17
Subulussalam	8	18	8	18	8	8	18	18	8	18	8	18
Aceh Selatan	0	18	0	18	0	0	14	18	0	13	0	13
Aceh Tamiang	15	24	24	15	24	24	13	15	24	13	24	12
Aceh Tenggara	40	3	38	5	38	36	5	5	38	5	32	5
Simeulue	0	32	0	31	0	0	23	31	0	27	0	21
Jumlah	89	111	96	104	96	89	90	104	96	93	84	86
Total	**200**		**200**		**200**		**189**		**179**		**170**	

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, Tahun 2025 (Ket : Pbts : Perbatasan; Tpcl : Terpencil

A2. Pengelolaan Harta Agama

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syri'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan

asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

A2.1. Pengelolaan Zakat dan Infak

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum singkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak. Secara umum pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) di Aceh belum optimal.



Sumber: Baitul Mal Aceh, 2025

Gambar 2.88. Jumlah Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infak Tahun 2020-2024

Pendapatan zakat dan infak selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir berkisar antara 40M hingga 100M. Adapun pada Tahun 2019-2020 pertumbuhan pendapatan

zakat dan infak mengalami perlambatan dipengaruhi oleh kondisi covid-19 yang juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat Aceh. Namun demikian di Tahun 2021-2022 pendapatan zakat dan infak sudah mulai meningkat kembali seiring dengan adanya pemulihan perekonomian diberbagai sektor. Akan tetapi pada Tahun 2023 dan 2024 pendapatan zakat dan infak sedikit mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan kebijakan penganggaran, yang berpengaruh terhadap besaran anggaran belanja pembangunan fisik, dimana setiap anggaran belanja pembangunan fisik yang bersumber dari APBA akan dipotong sebesar 0.5% untuk pendapatan infak.

Sementara dari sisi penyaluran zakat dan infak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, selain potensi pendapatan juga ditambahkan dengan silpa dari tahun sebelumnya. Selanjutnya dari sisi peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Pengumpulan dan penyaluran zakat belum optimal. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta mengoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat se-Indonesia. Perkembangan Pengumpulan Zakat Nasional mengalami Pertumbuhan Konsisten kisaran 30 persen, peningkatan nilai absolut selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kondisi ini diperlukan sinergi lintas sektoral, optimalisasi potensi muzaki badan, serta strategi pemetaan potensi zakat nasional. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan pada digunakan satu konsep yang sama secara nasional yaitu dengan menggunakan indeks zakat nasional indikator berbasis data, dan menjadi referensi standar kemajuan sekaligus refleksi kinerja perzakatan di Indonesia, yang penerapannya dapat dilakukan secara periodik di setiap level (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Alat ukur ini berperan sebagai measurement standard untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perzakatan nasional, dengan mencakup penilaian kuantitatif sekaligus kualitatif.

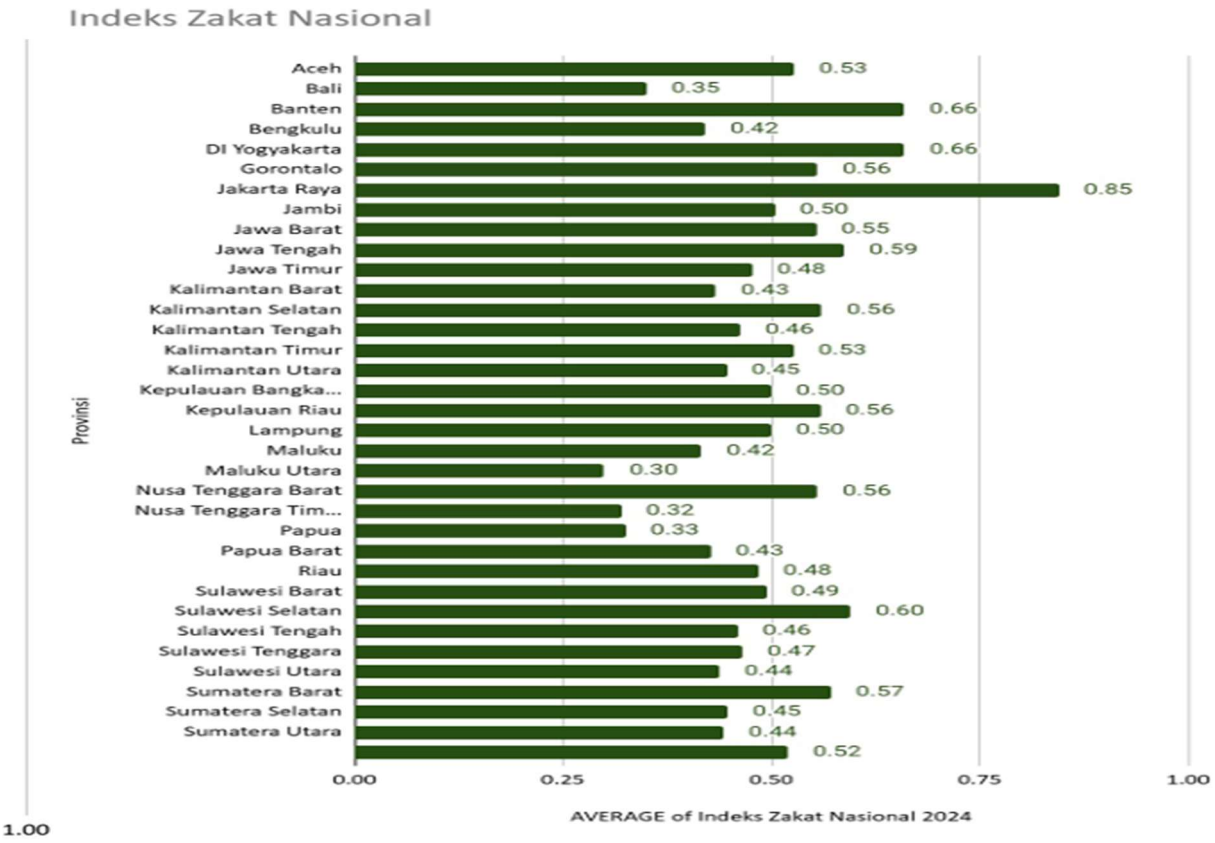
Komponen IZN Versi 3.0

Dimensi	Indikator	Variabel
Makro (X1)	Regulasi (X11)	**Regulasi Nasional/Daerah (X111)** **Pelaksanaan Regulasi (X112)**
	Dukungan APBN/APBD (X12)	**Dukungan APBN/APBD untuk Operasional (X121)** **Keberlanjutan APBN/APBD (X122)** **Alokasi APBN/APBD untuk Hak Keuangan Pimpinan (X123)**
	Database Lembaga Zakat (X13)	Lembaga Zakat (X131) Muzaki (X132) Mustahik (X133)
	Penguatan Jaringan (X14)	**Koordinasi Eksternal (X141)** Koordinasi Internal (X142)
	Literasi dan Dakwah Zakat (X15)	**Literasi (X151)** Dakwah (X152) Pelayanan sosialisasi zakat (langsung dan tidak langsung) (X153)
Mikro (X2)	Tata Kelola (X21)	**Perencanaan dan Pengembangan (X211)** **Pengendalian dan Ketaatan Regulasi (3 Aman) (X212)** Pengumpulan (X213) Operasi (X214) **Pendistribusian dan Pendayagunaan (X215)** Kesehatan Lembaga Zakat (X216) Pelaporan (X217) Teknologi (X218)
	Dampak Zakat (X22)	Mustahik Menjadi Muzaki (X221) Mustahik Dientaskan dari Kemiskinan (X222) Perubahan Budaya Produktif (X223) Indeks Kesejahteraan CIBEST (X224) Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (X225)

Sumber: Baznas, 2025

Gambar 2.89. Komponen Indeks Zakat Nasional, 2025

Berdasarkan perhitungan BAZNAS ditahun 2024, kondisi Indeks Zakat Nasional di seluruh provinsi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Baznas, 2025

Gambar 2.90. Indeks Zakat Nasional, 2025

Aceh di Tahun 2024 memperoleh indeks zakat nasional sebesar 0,53 yang berarti bahwa cukup baik dan dalam kondisi stabil. Pengumpulan dan penyaluran zakat di Aceh mengalami pertumbuhan, namun masih memiliki potensi untuk optimalisasi.

A2.2. Pengelolaan Wakaf

Sepanjang sejarah, institusi wakaf memiliki rekam jejak yang gemilang, pada masa era keemasan Aceh, Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan sosio ekonomi masayarakat Islam.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung sektor pendidikan, sosial, dan keagamaan, terutama dalam penyediaan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, serta pusat kesehatan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat dengan mengalokasikan harta yang tidak boleh diperjualbelikan tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran mengenai peranan wakaf dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran ini telah mendorong para pemangku kepentingan menjalankan berbagai agenda untuk memamjukan wakaf. Bahwa setelah sempat lama menajdi raksasa tidur, kini revitalisasi wakaf kembali menjadi agenda utama. Kehadiran wakaf adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh komunitas masayarakat di suatu tempat, khususnya di Aceh.

A3. Pelaksanaan Ibadah

Dalam upaya meningkatkan persentase mesjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan riayah sesuai klasifikasi maka Dinas Syariat Islam menjadikan indikator kinerja dan Dinas Syariat Islam telah melaksanakan beberapa pendekatan antara lain melakukan koordinasi dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota dan pembinaan takmir masjid melalui para takmir masjid di kabupaten/kota serta melibatkan Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) se-Aceh. Data masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan riayah sesuai klasifikasinya yang disajikan oleh laporan berbasis aplikasi Sistem Informasi Masjid Aceh (SIMASA) yang telah dilakukan pengembangannya mulai Tahun 2018 bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian Aceh. Adapun rincian data masjid berdasarkan tipologi sampai Desember 2024 sebagai berikut. Kondisi jumlah masjid di Aceh sampai dengan Tahun 2024 dan yang melaksanakan shalat Jum'at dapat dilihat pada **Tabel 2.87**.

Tabel 2.87.
Data Mesjid Se-Aceh yang Melaksanakan Shalat Jum'at Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Raya	Mesjid Agung	Mesjid Kecamatan	Mesjid Mukim	Mesjid Gampong	Total
1	Aceh Selatan		1	18	50	260	329
2	Aceh Tenggara		1	16	51	385	453
3	Aceh Timur		1	24	66	513	604
4	Aceh Tengah		1	14	20	295	330
5	Aceh Barat		1	12	36	322	371
6	Aceh Besar		1	23	68	604	696
7	Pidie		1	23	97	730	851
8	Aceh Utara		1	27	76	852	956
9	Simeulue		1	10	29	138	178
10	Aceh Singkil		1	11	16	116	144
11	Bireuen		1	17	75	609	702
12	Aceh Barat Daya		1	9	20	152	182
13	Gayo Lues		1	11	25	136	173
14	Aceh Jaya		1	9	21	172	203
15	Nagan Raya		1	10	30	222	263
16	Aceh Tamiang		1	12	31	213	257
17	Bener Meriah		1	10	27	232	270
18	Pidie Jaya		1	8	34	222	265
19	Banda Aceh	1	1	9	17	90	117
20	Sabang		1	3	7	18	29
21	Lhokseumawe		1	4	9	68	82

No.	Kabupaten/Kota	Mesjid Raya	Mesjid Agung	Mesjid Kecamatan	Mesjid Mukim	Mesjid Gampong	Total
22	Langsa		1	5	6	66	78
23	Subulussalam		1	5	8	82	96
	Jumlah	**1**	**23**	**290**	**819**	**6497**	**7,629**

Sumber : Dinas Syariat Islam, Tahun 2025

Berdasarkan **Tabel 2.87** diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah masjid se-Aceh yang melaksanakan shalat Jumat pada Tahun 2025 bervariasi di setiap kabupaten/kota, dengan beberapa kategori masjid seperti Mesjid Raya, Mesjid Agung, Mesjid Kecamatan, Mesjid Mukim, dan Mesjid Gampong. Hal ini mencerminkan pentingnya peran masjid dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh, serta menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap takmir masjid di seluruh wilayah untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik.

A4. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Untuk mempertahankan adat istiadat dilakukan berbagai kegiatan diantaranya melalui sosialisasi dan pelatihan. Dari Tahun 2019-2023 Sekretariat Majelis Adat Aceh telah melakukan pembinaan kepada tokoh-tokoh adat di kabupaten/kota sebanyak 845 orang. Dengan dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan pembinaan adat istiadat di beberapa kabupaten/kota diharapkan penyelenggaran kehidupan adat istiadat di masyarakat terus membaik. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020-2023 disajikan pada **Tabel 2.88**.

Tabel 2.88.
Kegiatan dan Peserta Pembinaan Adat Istiadat dari Tahun 2020-2023

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja dan Meunasib	orang	30	0	30	50
2	Sosialisasi Adat Istiadat	orang	0	60	268	0
3	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	orang	30	0	30	0
4	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	orang	46	0	46	0
Total		**845**	**255**	**106**	**60**	**374**

Sumber : Sekretariat MAA, 2024

Selain melaksanakan pembinaan adat istiadat, Pemerintah Aceh juga mengembangkan hukum adat yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa secara adat meliputi berbagai kasus seperti perselisihan rumah tangga, perselisihan antarwarga, sengketa keluarga yang berkaitan dengan faraidh, khalwat, hingga pencurian ringan. Sepanjang Tahun 2022, telah diselesaikan 509 perkara melalui jalur adat, dan pada Tahun 2023 sebanyak 250 perkara, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Data ini menunjukkan peran hukum adat yang terus berjalan dan berkontribusi dalam memperkuat harmoni sosial, menjaga ketertiban, serta melestarikan kearifan lokal masyarakat Aceh.

A5. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang.

Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Aceh melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh memiliki lembaga pendidikan baru, namun masyarakat Aceh tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam yang ditujukan sesuai dengan **Tabel 2.89**.

Tabel 2.89.
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Tahun 2019 – 2024

Tahun	Jumlah Tipe Dayah						Jumlah Dayah Tipe & Non Tipe Tipe B	Jumlah Guru Dayah
	Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D	Non Tipe		
2019	23	94	168	338	-	513	1.136	22.951
2020	23	94	168	338	-	513	1.136	22.951
2021	23	94	168	338	-	513	1.136	22.951
2022	23	110	230	499	-	626	1.488	23.551
2023	29	151	361	547	-	569	1.657	24.710
2024	29	158	362	554	-	582	1.685	24.710

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 2025 (Diolah)

Berdasarkan **Tabel 2.89**, terlihat bahwa jumlah dayah baik tipe maupun non tipe terus mengalami peningkatan. Sejak Tahun 2018, Pemerintah Aceh melalui proses verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) dayah dengan kategori Tipe A+. Pada Tahun 2019 jumlah tersebut tercatat menjadi 23 (dua puluh tiga) dayah, seiring dengan penyesuaian hasil verifikasi ulang yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, termasuk jumlah santri dan guru yang aktif dalam proses pembelajaran.

Mulai Tahun 2019, klasifikasi dayah Tipe D tidak lagi digunakan, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Dengan demikian, kategori dayah yang berlaku terdiri dari Tipe A+, Tipe A, Tipe B, Tipe C, dan Non Tipe. Pada Tahun 2020, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah melakukan persiapan pelaksanaan akreditasi sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh, termasuk pembentukan Badan

Akreditasi Dayah Aceh (BADA) yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana akreditasi dayah di Aceh.

Pada Tahun 2021, pendataan ulang dayah dilakukan sebagai bagian dari persiapan akreditasi yang lebih sistematis, sehingga database dayah Aceh dapat dijadikan dasar perencanaan dan penganggaran dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan dayah. Hasil dari proses akreditasi tersebut mulai terlihat pada Tahun 2022, dengan peningkatan jumlah dayah terakreditasi menjadi 1.488 dayah.

Selanjutnya, pada Tahun 2023 jumlah dayah terakreditasi kembali meningkat menjadi 1.685 dayah, dengan penambahan sebanyak 197 dayah baru yang masuk dalam database. Selain itu, sejumlah dayah mengalami peningkatan tipologi setelah melalui proses re-akreditasi oleh Tim BADA, berdasarkan penilaian kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan mutu dan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh.

Memasuki Tahun 2024, proses akreditasi dilanjutkan dengan penyesuaian kelembagaan melalui Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA), yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan akreditasi secara reguler. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kemandirian dayah, meningkatkan mutu pendidikan, serta menyetarakan standar pendidikan dayah dengan pendidikan formal. Selain itu, peningkatan kapasitas guru dayah terus didorong melalui program pengembangan keilmuan dan pendataan yang lebih terstruktur, sehingga rasio antara santri dan guru sesuai bidang keilmuan dapat terpenuhi secara proporsional.

A6. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Peran dan fungsi ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) banyak berpengaruh dalam menetapkan fatwa dalam taushiyah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh dan Masyarakat. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) telah mengeluarkan fatwa dan taushiyah serta menetapkan kehalalan suatu produk baik berupa pangan, obat-obatan dan kosmetika melalui penerbitan sertifikat halal. Disamping itu, MPU juga melaksanakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) untuk melahirkan para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Aceh.

Tabel 2.90.
Peran Ulama dalam Pembangunan/Fatwa Ulama Tahun 2019 – 2024

Uraian		Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fatwa dan Taushiah yang ditetapkan	Dokumen	7	13	12	12	20	20

Uraian		Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	72	0	24	48	48	24
3	Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	Sertifikat	184	150	213	148	220	192

Sumber : Sekrt. MPU Aceh, Tahun 2025

Berdasarkan data **Tabel 2.90**, indikator kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menunjukkan peningkatan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Hal ini ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah fatwa dan taushiyah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Pada Tahun 2020 jumlah dokumen yang ditetapkan sebanyak 13, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 20 dokumen pada Tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini mencerminkan tingginya kebutuhan dan perhatian terhadap penguatan regulasi keagamaan yang bersumber dari Syariat Islam dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan itu, penerbitan sertifikat produk halal juga menunjukkan tren yang positif sepanjang periode 2020–2024. Jumlah sertifikat yang diterbitkan meningkat dari 150 sertifikat pada Tahun 2020, menjadi 220 sertifikat pada Tahun 2023, dan selanjutnya mencapai 192 sertifikat pada Tahun 2024. Capaian ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah Aceh dalam mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal melalui sosialisasi, kebijakan penggunaan produk UMKM lokal yang bersertifikat halal, serta penguatan pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar di Aceh.

A7. Perdamaian

Kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan merupakan isu yang sangat penting pascakonflik di Aceh. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat, Pemerintah melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan institusi terkait dalam melaksanakan penguatan perdamaian Aceh yang meliputi pengarusutamaan perdamaian dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan atau perbaikan ekonomi dan sosial budaya serta memediasi lahan pertanian dan lapangan pekerjaan bagi mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak konflik. Berbagai program di bidang ekonomi akan diarahkan pada pembangunan ekonomi produktif masyarakat dan nilai tambah produk unggulan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, rendahnya pendapatan per kapita dan pengangguran. Program pengembangan ekonomi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran BRA yang mengarah pada kegiatan produktif sesuai dengan prinsip ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*), sehingga setiap program ekonomi lebih efektif mencapai tujuan yang diharapkan.

Keberlangsungan penguatan perdamaian pascakonflik perlu dilakukan secara optimal melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial sehingga menciptakan perdamaian secara berkelanjutan (*sustainable peace*). Dari 62.069 orang target sasaran program Reintegrasi Aceh, terdapat 4.535 orang atau 7,31 persen yang telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan terbantu dalam rehabilitasi dan perlindungan sosial. Dengan demikian, masih terdapat 55.202 orang yang perlu diintervensi Pemerintah, dimana sebanyak 24.114 orang yang akan menjadi target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 -. 2029. Hal Ini, menjadi capaian kinerja pemerintah Aceh dalam melaksanakan isi MoU Helsinki, yang berbunyi: "Pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk memberikan bantuan kepada korban konflik, termasuk bantuan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Adapun realisasi pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial masyarakat dan Korban Konflik Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.91**.

Tabel 2.91.
Realisasi Pemberdayaan Ekonomi dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat dan Korban Konflik Aceh Tahun 2019 - 2024 (Orang)

No.	Kegiatan	Tahun						Jmlh
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik	737	-	418	2.200	-	-	3.355
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik	195	-	247	283	455	-	1.180
	Jumlah	932	-	665	2.483	455	-	4.535

Sumber : Badan Reintegrasi Aceh, 2025

Selanjutnya berdasarkan data Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Tahun 2023 bahwa korban konflik juga terinci berdasarkan korban pelanggaran HAM masa lalu di 17 Kabupaten Kota. Secara keseluruhan sebanyak 8.029 orang telah menjadi korban tindak kejahatan hak asasi manusia utama. Para korban ini terdiri dari 848 orang perempuan dan 7.181 orang laki-laki, dengan rincian: 1). 1776 orang laki-laki dan 144 perempuan menjadi korban kejahatan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, 2).1085 laki-laki dan 38 perempuan menjadi pembunuhan tidak sah dan bertentangan dengan hukum, 3). 3021 laki- laki dan 327 perempuan menjadi korban tindak penyiksaan, 4). 87 laki-laki dan 78 perempuan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual dan perkosaan, 5). 359 laki-laki dan 10 perempuan menjadi korban penghilangan paksa, 6). 863 laki-laki dan 251 perempuan menjadi korban perusakan dan perampasan harta benda (*sumber: Buku Peulara Damee*). Kondisi ini membutuhkan program dan intervensi berbeda, baik dari segi pemulihan maupun dukungannya lainnya, serta perbedaan pendekatan bagi laki-laki dan perempuan.

Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban menyediakan lahan pertanian untuk Tanah Reintegrasi Aceh. Ketentuan mengenai penyediaan lahan pertanian untuk Tanah Reintegrasi Aceh di dalam Rencana Tata Ruang Aceh diatur dalam indikasi program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam rangka menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh, Pemerintah Aceh berupaya melakukan suatu terobosan pembangunan dengan mempercepat

terimplementasinya ketentuan yang sudah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk mempercepat terbentuknya suatu kawasan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan Reintegrasi Aceh. Kawasan ini termasuk salah satu dari Kawasan Strategis Aceh (KSA) dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. Adapun tujuan penetapan KSA dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Menata KSA menjadi kawasan yang menarik bagi investor yang didukung oleh pelayanan dan manajemen yang profesional, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang memadai; dan
b. Memanfaatkan peluang globalisasi dan kerja sama ekonomi regional dan internasional secara optimal.

B. Kebudayaan

Aceh memiliki berbagai warisan budaya yang berharga, baik berupa warisan budaya benda atau Cagar Budaya maupun Warisan Budaya Tak Benda Budaya (WBTB). Nilai-nilai budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue.

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan nusantara, memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh kemudian baru menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Jejak sejarah dan peradaban inilah yang kemudian mewariskan tradisi, seni dan budaya yang masih ada hingga saat ini dan perlu dijaga kelestariannya untuk generasi yang akan datang. Pelestarian kebudayaan berupa warisan budaya benda dan tak benda, baik berupa cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan Aceh memerlukan perhatian dan penanganan khusus, sehingga dokumen lain seperti Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dapat menjadi rujukan dalam penanganan pelestarian kebudayaan.

B1. Seni dan Budaya

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama rencana pembangunan Aceh, kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan, ciri khas dan kebudayaan yang sudah hampir punah atau sudah jarang diketahui masyarakat luas. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu

(cultural heritage). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami. Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda *(tangible)* seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya yang keseluruhannya berjumlah 1.138 cagar budaya yang tersebar di seluruh Aceh.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya *(culture tourism)*. Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Registrasi cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Registrasi Nasional). Untuk pemeliharaannya, terdapat 91 (sembilan puluh satu) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga ke depan perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Selain itu, Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda *(intangible)* yang menarik lainnya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku, yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue dan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah, yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi daya tarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak Tahun 2011.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman sanggar-sanggar kesenian yang tersebar di seluruh Aceh yang jumlahnya telah mencapai kurang lebih 1.280 sanggar kesenian. Sanggar-sanggar kesenian diupayakan mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.92**.

Tabel 2.92.
Perkembangan Kelompok Sanggar Seni di Aceh, 2020-2024

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Group Kesenian	1.279	1.236	1.266	1.254	1.280

Sumber : Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Aceh, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kelompok kesenian atau sanggar seni di Aceh mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, tercatat sebanyak 1.279 kelompok kesenian yang aktif. Namun, jumlah ini mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun dibanding Tahun 2019. Penurunan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas sosial dan budaya, termasuk kegiatan seni dan pertunjukan. Tren penurunan berlanjut hingga Tahun 2021, dengan jumlah kelompok kesenian tercatat sebanyak 1.236. Meski begitu, pada Tahun 2022, terjadi sedikit peningkatan menjadi 1.266 kelompok, yang menandakan mulai pulihnya kegiatan seni di tengah masyarakat.

Namun, pada Tahun 2023, jumlah kelompok kesenian kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 1.254. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa pemulihan sektor seni dan budaya masih memerlukan dukungan yang lebih intensif, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan pada Tahun 2024, jumlah kelompok seni meningkat menjadi 1.280 kelompok. Selain itu Aceh juga memiliki Gedung kesenian yang diperuntukkan untuk mewadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk menyelenggarakan pameran. Saat ini baru 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki gedung kesenian, yaitu; Sabang, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil.

Ketersediaan gedung kesenian di Aceh masih sangat minim, demikian juga dari sisi pemerataan juga belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Aceh mendorong Kabupaten/Kota untuk memperioritaskan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan revitalisasi gedung kesenian diseluruh Kabupaten/Kota secara bertahap. Pemerintah Aceh juga telah menyusun dokumen Pokok-Pokok Pikiran Daerah (PPKD) Aceh Tahun 2019 lalu, dokumen ini dapat menjadi rujukan dan acuan dalam pemajuan kebudayaan Aceh

B2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pengembangan cagar budaya merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya. Bentuk kegiatannya berupa konservasi, penerbitan buku, dokumentasi digital, workshop, penataan, dan lain sebagainya. Aceh memiliki sejumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdiri dari: naskah kuno, koin emas, peralatan emas, makam, mesjid, tugu, rumah tradisional, monumen, benteng, perpustakaan, bangunan/gedung, tempat bersejarah, arca, gua, dan lain-lain yang belum dilestarikan. Sampai dengan Tahun 2024 telah dilakukan

pelestarian terhadap berbagai cagar budaya, naskah kuno, keping koin emas peralatan emas dan berbagai benda lainnya. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, digitalisasi naskah kuno, workshop dan pembiayaan juru pelihara situs dan konservasi yang dilakukan di Museum Aceh. Pada akhir Tahun 2024 jumlah benda dan situs kawasan cagar budaya mencapai 1.262 buah.

Peninggalan budaya masa prasejarah dapat dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan manusia prasejarah di kawasan Gua Kampung Mendale, Takengon. Pada masa periode klasik, Aceh memiliki tiga situs sejarah seperti situs Indrapurwa, Indrapuri, dan Indrapatra. Selanjutnya, pada masa Islam dan kolonial, situs/cagar budaya banyak ditemukan di seluruh Aceh. Gambaran penyebaran situs/cagar budaya di Aceh, secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel 2.93**.

Tabel 2.93.
Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Makam	Masjid	Tugu	Rumah Tradisional	Monumen	Benteng	Perpustakaan	Bangunan/Gedung	Struktur	Tempat Bersejarah	Arca	Gua	Prasejarah	Benda	Jumlah
1.	Aceh Selatan	26	1	5	2	-	2	-	5	-	-	-	-	-	10	51
2.	Aceh Tenggara	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
3.	Aceh Timur	35	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	39
4.	Aceh Tengah	4	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	12
5.	Aceh Barat	14	5	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	25
6.	Aceh Besar	227	21	3	6	-	31	1	9	-	-	-	14	-	10	322
7.	Pidie	34	10	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	53
8.	Aceh Utara	75	1	2	1	2	-	-	4	2	-	-	-	-	-	87
9.	Simeulue	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10.	Aceh Singkil	17	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	5	28
11.	Bireuen	38	5	3	-	1	-	-	8	-	2	-	-	-	6	63
12.	Aceh Barat Daya	27	2	1	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	36
13.	Gayo Lues	20	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	26
14.	Aceh Jaya	50	1	-	-	4	3	-	4	-	3	-	1	-	8	74
15.	Nagan Raya	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
16.	Aceh Tamiang	36	-	1	3	-	-	-	10	-	2	-	-	2	-	54
17.	Bener Meriah	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
18.	Pidie Jaya	78	9	-	-	1	5	-	5	-	-	-	3	-	16	117
19.	Banda Aceh	50	6	6	1	6	-	-	13	-	4	-	-	-	9	95
20.	Sabang	3	2	1	-	-	14	-	82	-	2	-	-	-	-	104
21.	Lhokseumawe	15	1	4	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	25
22.	Langsa	1	-	-	1	1	1	-	13	-	-	-	-	-	-	17
23.	Subulussalam	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
Jumlah		**768**	**73**	**31**	**26**	**15**	**66**	**1**	**166**	**5**	**15**	**0**	**20**	**4**	**72**	**1.262**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata, Tahun 2025

Berdasarkan **Tabel 2.93** menunjukkan bahwa situs/cagar budaya terbanyak berada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu sebanyak 322 situs, Pidie Jaya sebanyak 117 situs dan Kota Sabang sebanyak 104 Situs. Sedangkan situs/cagar budaya paling sedikit

terdapat di Kabupaten Simeulue, yaitu sebanyak 3 situs. Dari jumlah situs/cagar budaya yang diuraikan di atas, terdapat 33 buah situs/cagar budaya yang telah memiliki SK Menteri atau Register Nasional diantaranya : Komplek Makam Kandang Meuh, Komplek Taman Sari Gunongan, Benteng Indrapatra, Benteng dan Masjid Indrapuri, Pendopo Gubernur, Gedung Bapperis, Gedung Menara (Sentral Telepon Militer Belanda) dan Gedung Bank Indonesia, Komplek Makam Poteu Meureuhom Daya, dan lain-lain seterusnya.

Kondisi situs/cagar budaya di beberapa daerah ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangat memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana tsunami seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Cagar Budaya yang mengalami kerusakan antara lain situs Kampung Pande di Kota Banda Aceh, sebelumnya juga nisan-nisan di situs ini belum satupun yang tertata dan masih berserakan di rawa-rawa. Hasil penelitian Edwar Mc. Canon Tahun 2007 memberikan informasi bahwa terdapat tulang-tulang manusia di lokasi Cot Makam Kampung Pande, namun pada saat ini tulang-tulang tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada situs Makam Syiah Kuala, situs Lamreh dan situs Ujung Pancu. Selayaknya dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan, maka situs/cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus.

Dari jumlah total 1.262 situs/cagar budaya yang ada di Aceh masih banyak yang belum memiliki juru pelihara. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2024 baru 91 (sembilan puluh satu) situs dibiayai oleh Pemerintah. Demikian juga situs/cagar budaya yang termasuk naskah-naskah kuno yang belum teregistrasi perlu dilakukan pengkajian, pencatatan dan penetapan, sehingga pelestarian situs/cagar budaya dapat dilaksanakan sesuai kaidah pelestarian.

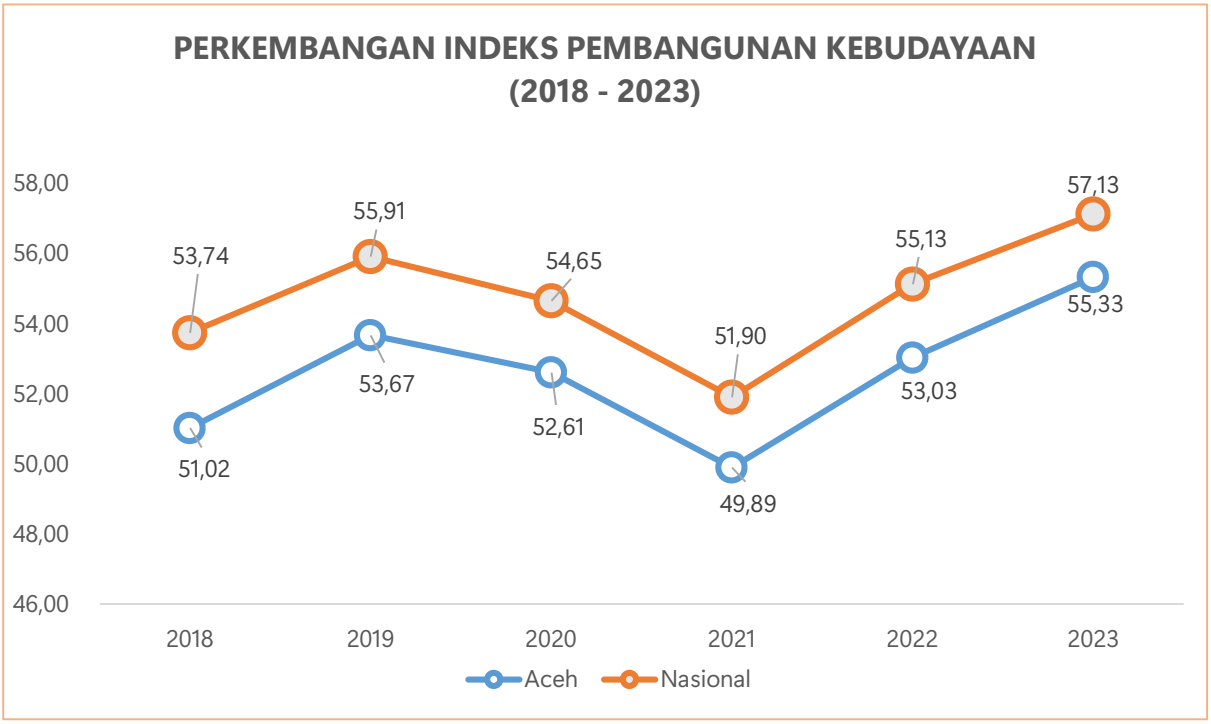
Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Aceh juga memiliki Budaya Tak Benda (intangible) yang beragam seperti Tarian, Adat-Istiadat, dan kegiatan Spiritual. Berbagai jenis budaya tak benda tersebut tersebar diseluruh kabupaten/kota dengan ciri khas tersendiri, seperi: rapai, rapai debus, rapai geleng, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana, qasidah gambus, pantun, syair, hikayat, seumapa dan seni lukis (kaligrafi) dalail khairat, meurukon, adat perkawinan, peutreun aneuk, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, kegiatan semeulung dan semeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Kekayaan budaya yang dimiliki Aceh menjadi dayatarik dunia, dan keunikannya telah diakui dengan ditetapkannya Tari Saman sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO sejak Tahun 2011.

B3. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu indikator yang lebih komprehensif yang dapat digunakan untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.91** dan kinerja pembangunan kebudayaan yang terdiri dari 7 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi budaya
2. Dimensi Pendidikan
3. Dimensi Ketahanan Sosial
4. Dimensi Warisan Budaya
5. Dimensi Ekspresi Budaya
6. Dimensi Budaya Literasi
7. Dimensi Gender

Pembangunan kebudayaan Aceh cukup baik, namun dengan potensi yang ada, pembangunan kebudayaan di Aceh dapat dikatakan belum optimal dan masih berada sedikit dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2019, hal ini juga terjadi secara nasional akibat dari dampak pembatasan pada pandemi covid-19. Seiring dengan pelonggaran pembatasan dan pemulihan ekonomi nasional dan daerah, indeks pembangunan kebudayaan Aceh kembali meningakat mencapai angka 53,03 pada Tahun 2022 dan terus mengalami tren positif pada 2023 menjadi 55,33, sedikit dibawah capaian nasional pada angka 57,13.



Sumber : Kemendikbud, 2024
Kemendikdasmen, 2025 (diolah)

Gambar 2.91. Perkembangan indeks pembangunan kebudayaan Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 (Data termutakhir)

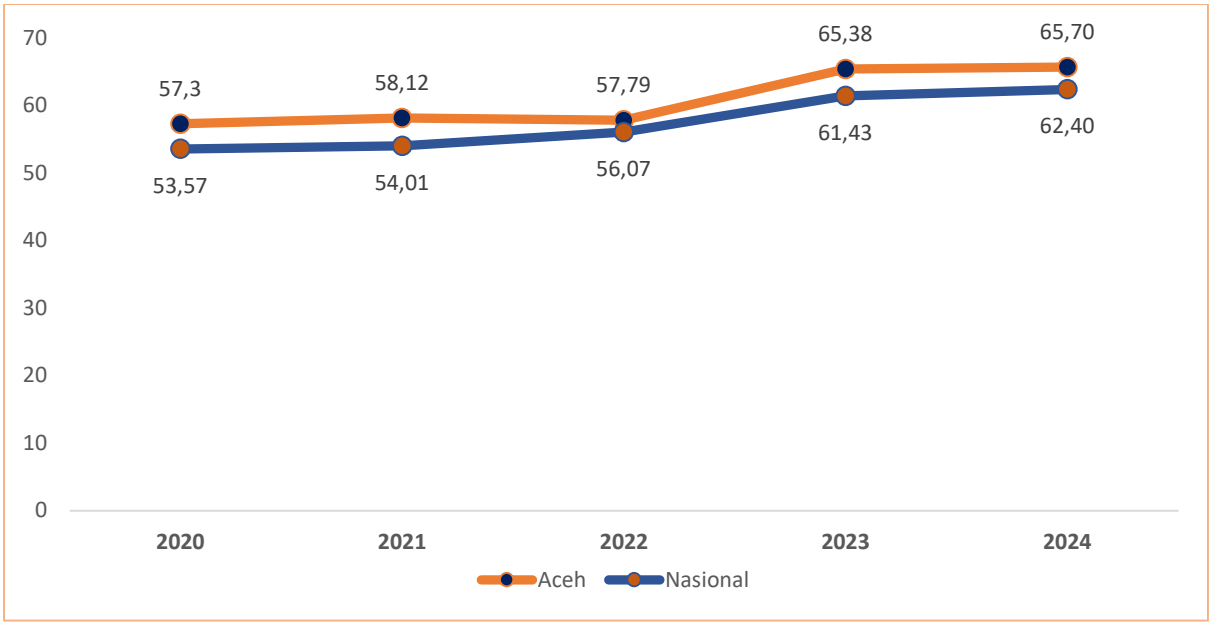
Capaian Pembangunan Kebudayaan Aceh paling tinggi dipengaruhi oleh dimensi pendidikan dengan capaian 80,90, kemudian dimensi budaya literasi, ketahanan sosial budaya, gender, warisan budaya, ekspresi budaya dan terakhir yang paling rendah pada dimensi ekonomi budaya dengan capaian 11,79.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Perkembangan iBangga Aceh meningkat sangat baik berkat terintegrasinya program lintas sektor dalam mewujudkan keluarga berkualitas, sehingga peran dan fungsi keluarga berjalan baik mendukung capaian indikator dimensi ketentraman, kebahagiaan dan kemandirian.

Indeks Pembangunan Keluarga Aceh pada periode 2022 turun sebesar 0,33 poin dari Tahun 2023. iBangga Aceh kembali meningkat Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025. Perkembangan iBangga Aceh selama Tahun 5 (lima) tahun terakhir lebih baik dibandingkan dengan iBangga Nasional. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, 2020 – 2024 dapat dilihat pada **Gambar 2.92**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2.92. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, 2020 – 2024

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial, ekonomi dan kependudukan. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi).

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Aceh selama periode 2020-2024 terus menunjukkan fluktuasi, yaitu dari 1,56 pada Tahun 2020 menjadi 1,39 pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Aceh masih terkendali. *Total Fertility Rate* (TFR) Aceh selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan, Tahun 2020 TFR Aceh sebesar 2,68 persen meningkat menjadi 2,34 persen pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024 TFR Aceh mengalami penurunan menjadi 2,32 persen. Cakupan

peserta KB Aktif Tahun 2020 sebanyak 519.709 orang, pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024 terjadi peningkatan. Sedangkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 407.537 orang. Tetapi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 dimana cakupan peserta KB Aktif kembali mengalami peningkatan menjadi 525.096 orang menjadi 929.916, seperti yang tersaji dalam **Tabel 2.94.**

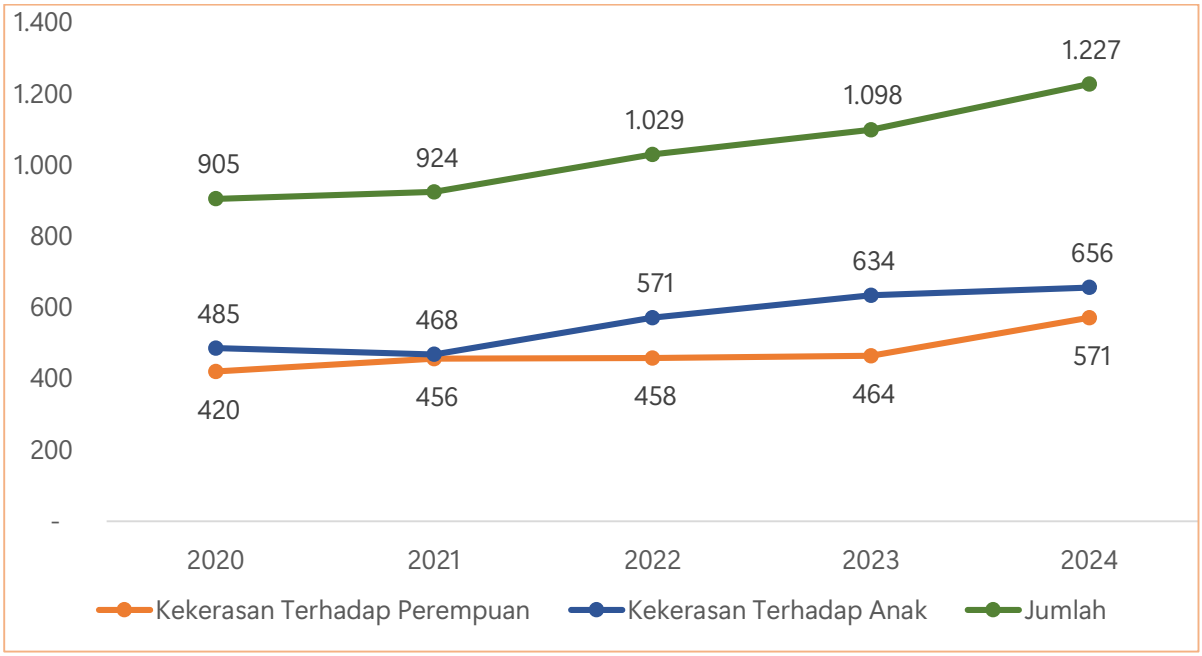
Tabel 2.94
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Tahun 2020 – 2024 (update data th 2024)

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,56	1,49	1,43	1,41	1,39
Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,68	2,68	2,42	2,34	2.32
Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	519.709	557.901	407.537	525.096	529.916

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak terus meningkat pada kondisi Tahun 2020 sebanyak 905 kasus sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 1.227 kasus. Pada Tahun 2020 tercatat ada 420 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 485 kasus kekerasan terhadap anak, kemudian di Tahun 2024, tercatat kasus meningkat menjadi 571 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 656 kasus kekerasan terhadap anak. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.93**.

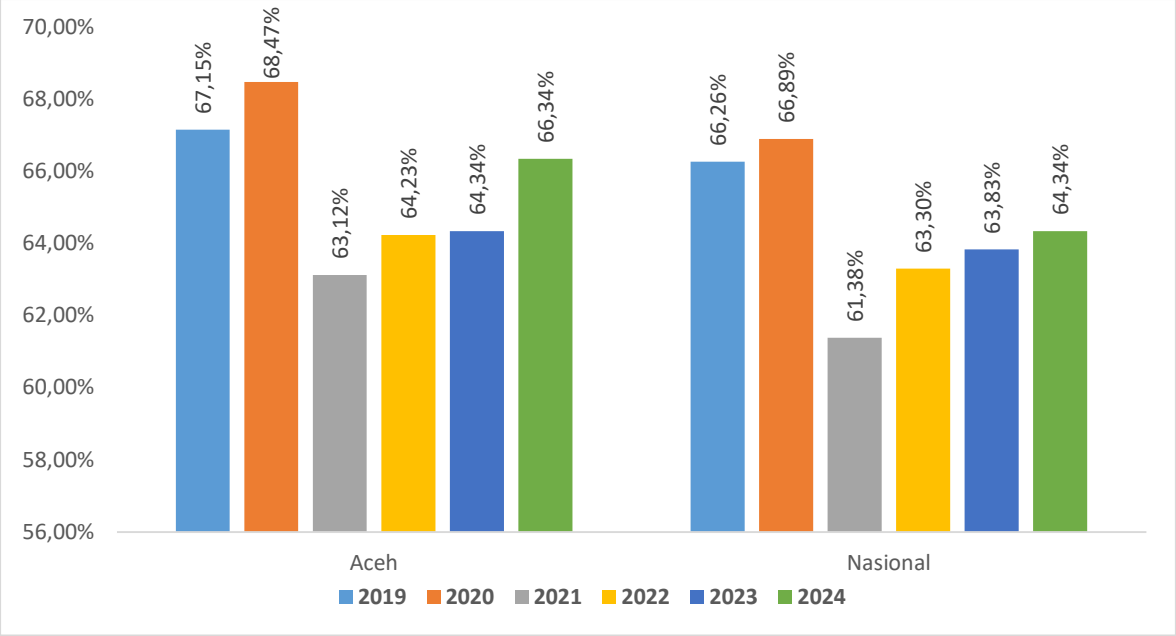


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2024

Gambar 2.93. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Yang terlapor pada UPTD PPA Tahun 2020 – 2024

C. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan capaian perlindungan anak yang terdiri dari 5 (lima) kluster konvensi hak anak, yaitu 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta 5) Perlindungan Khusus. Capaian IPA Aceh mengalami penurunan dari Tahun 2020 sebesar 68,47 menjadi 63,12 di Tahun 2021, sedangkan pada Tahun 2023 naik kembali sebesar 64,34 dan di Tahun 2024 juga terjadi kenaikan kembali dari Tahun sebelumnya, yaitu 66,34. Namun demikian IPA Aceh di atas IPA Nasional sebesar 63,83 di Tahun 2023, perlu perhatian untuk ditingkatkan pada beberapa indikator IPA Aceh. Sebagaimana yang tersajikan pada **Gambar 2.94**.

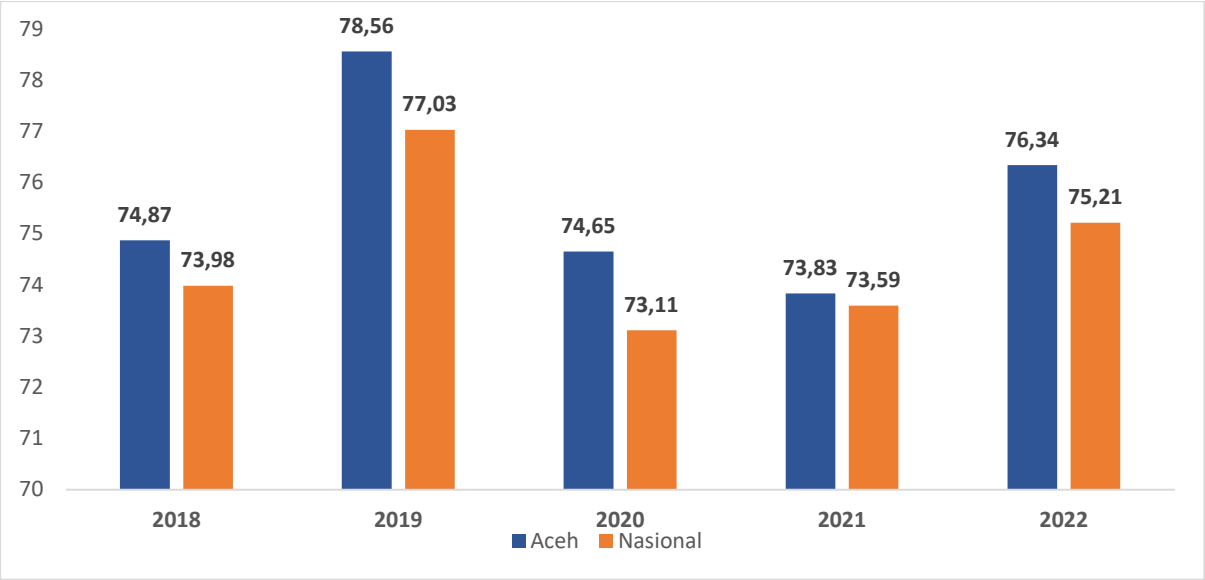


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2025

Gambar 2.94. Indeks Perlindungan Anak Tahun 2019 – 2024 (data termutakhir)

Pada Tahun 2020, target IPKA adalah 73,11 persen, dan realisasinya mencapai 73,59 persen. Pada Tahun 2021, target IPKA adalah 73,59 persen, dan realisasinya mencapai 73,83 persen. Pada Tahun 2022, target IPKA adalah 75,21 persen, dan realisasinya mencapai 76,33 persen. Namun, pada Tahun 2023, target IPKA adalah 75,72 persen, tetapi realisasinya hanya mencapai 74,36, realisasi IPKA pada Tahun 2023 menurun sebesar 1,97 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Selain itu, realisasi IPKA pada Tahun 2023 juga tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan selisih sebesar 1,36 persen.

Upaya yang perlu ditingkatkan dalam pemenuhan hak anak antara lain penguatan kebijakan dan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, serta perlindungan dan pencegahan perkawinan anak. Di samping itu, perlu mengoptimalkan pengasuhan berbasis hak anak dan menciptakan lingkungan yang ramah anak dan inklusif. Perlindungan khusus anak termasuk di dalamnya penyandang disabilitas, kelompok marjinal.

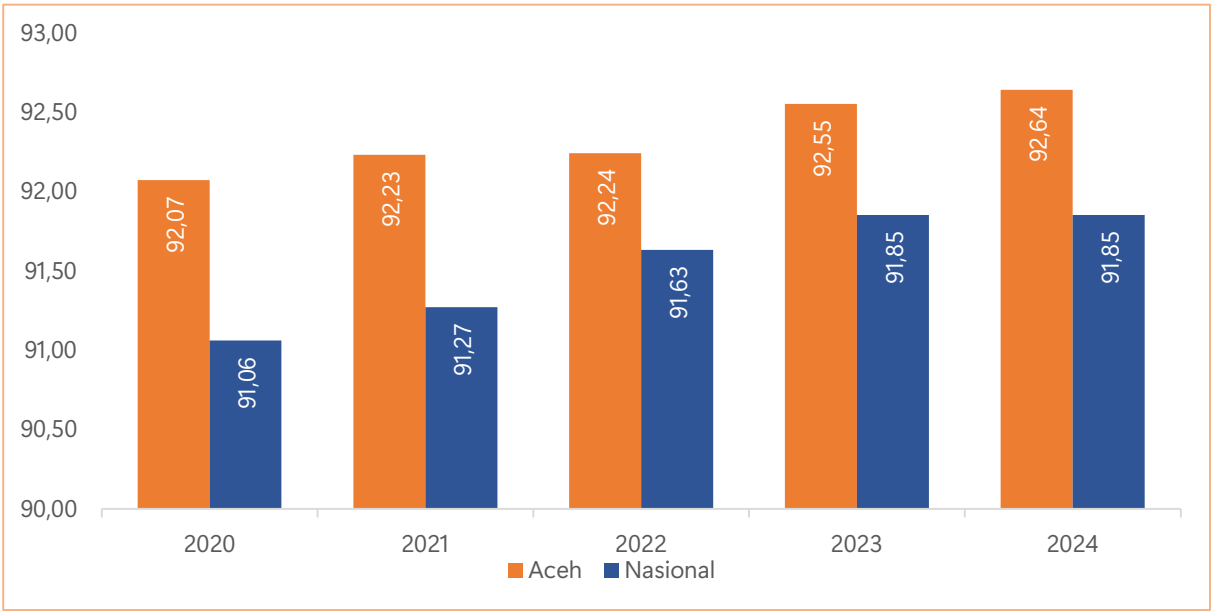


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2025

Gambar 2.95. Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2018– 2022 (data termutakhir)

D. Indeks Pembangunan Gender

Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 Indeks Pembangunan Gender Aceh lebih baik dibandingkan dengan Nasional. Capaian IPG Nasional pada Tahun 2024 sebesar 91,85 dan IPG Aceh sebesar 92,64. Capaian IPG Aceh pada Tahun 2024 sebesar 92,64 naik 0,09 poin dari Tahun 2023 yang capaiannya sebesar 92,55. Namun meskipun berada di atas rata-rata nasional tetapi masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan Aceh masih lebih lambat dari laki-laki terutama di sektor ekonomi. Perkembangan dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2020-2024 sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada **Gambar 2.96**.

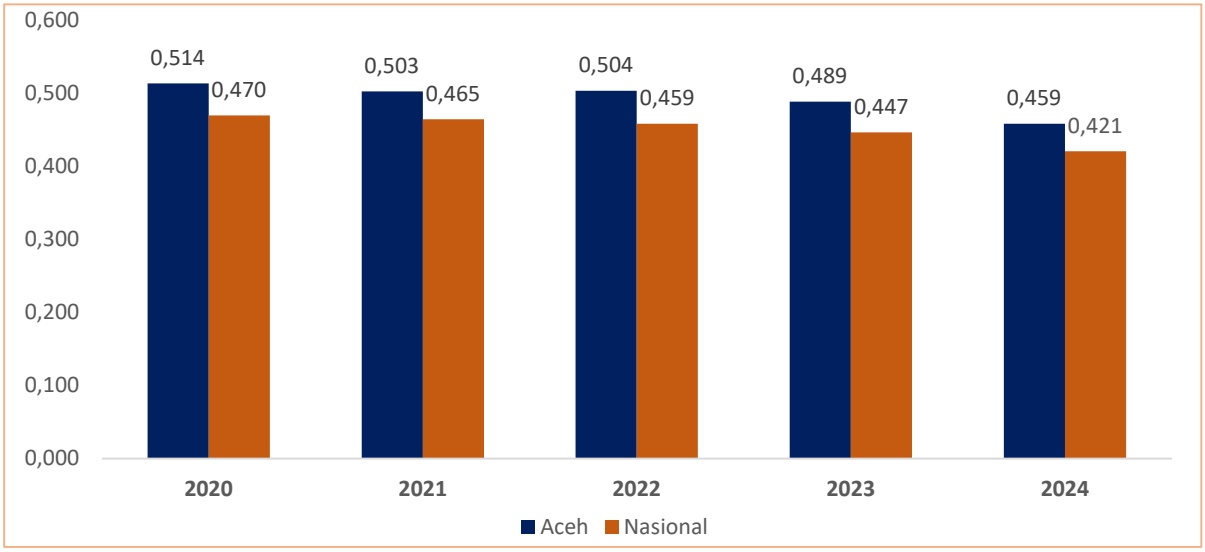


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2.96. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh Tahun 2020 – 2024

E. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator pendukung pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada isu gender. Komponen IKG Aceh semakin mengecil menandakan kesetaraan gender mulai membaik didukung peningkatan TPAK dan Pendidikan, terdapat 8 kab/kota angka IKG di atas 0,500 IKG Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,789. **Gambar 2.97** menggambarkan IKG Aceh mengalami penurunan, yang berarti ketimpangan gender semakin mengecil, dan kesetaraan gender semakin membaik.

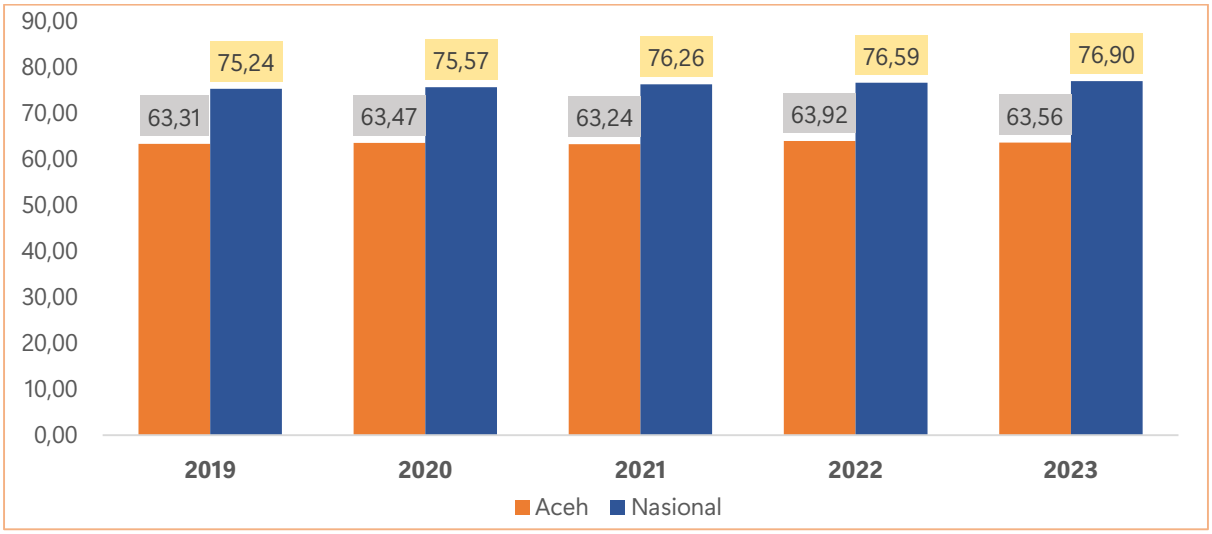


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2.97. Indeks Ketimpangan Gender Aceh, 2020 – 2024

F. Indeks Pemberdayaan Gender

Berdasarkan trend, setiap angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh mengalami penurunan dan peningkatan seperti pada **Gambar 2.98**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.98. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh Tahun 2019 – 2023 (data termutakhir)

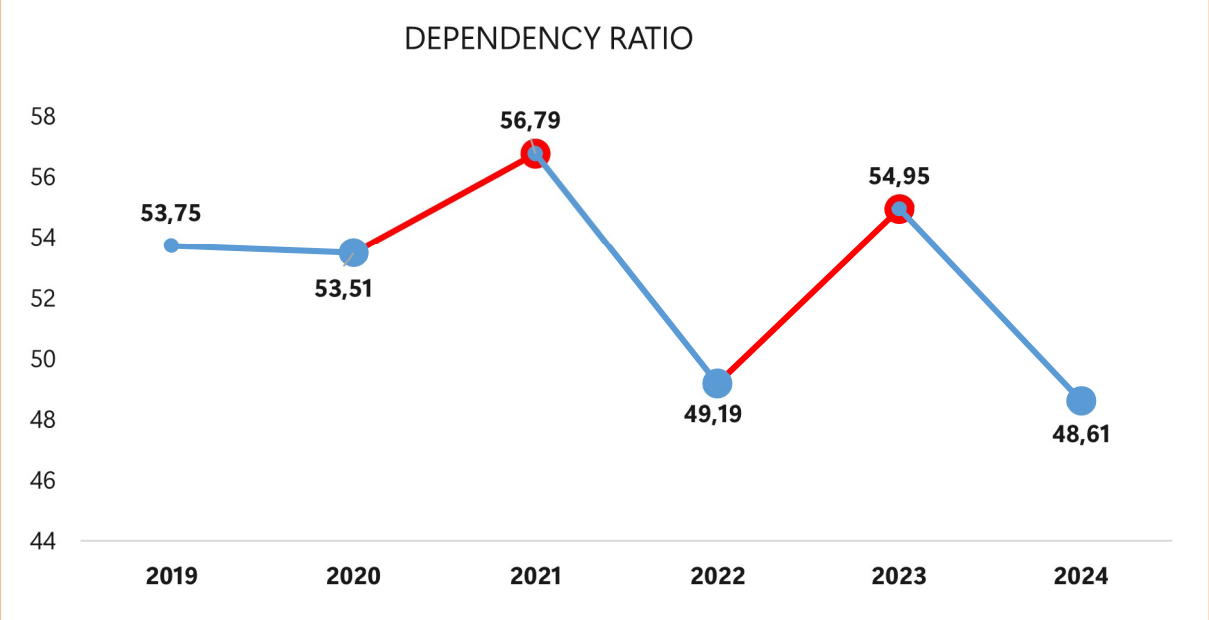
Capaian IDG nasional pada Tahun 2022 mengalami kenaikan 0,33 poin dari Tahun 2021, yaitu sebesar 76,59, sedangkan capaian Tahun sebelumnya sebesar 76,26 dan di Tahun 2023 meningkat 0,31 poin menjadi 76,90. Aceh juga mengalami peningkatan sebesar 0,68 poin, yaitu dari capaian 63,24 Tahun 2021 menjadi 63,92 pada Tahun 2022 dan di Tahun 2023 mengalami penurunan 0,36 poin menjadi 63,56.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (diolah)

Gambar 2.99. Perkembangan Tingkat Ketergantungan Aceh, 2019-2024

Perkembangan tingkat ketergantungan masyarakat Aceh dari Tahun 2019 hingga 2024 terdapat pada **Gambar 2.99**. Pada Tahun 2020 angka rasio ketergantungan hidup di Aceh mencapai 53,51 persen menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 54-55 penduduk usia tidak produktif. Kecenderungan rasio ketergantungan di Aceh adalah menurun dimana diprediksikan pada Tahun 2025 angka rasio ketergantungan Aceh adalah sebesar 50,8. Rasio ketergantungan ini dapat mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dengan melihat perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya.

B. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dari **Tabel 2.95** dibawah, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Aceh bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu mencapai 38,70 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan besar, Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor (14,65 persen) dan sektor industri pengolahan (7,19 persen). Sektor pekerjaan yang digeluti oleh tenaga kerja Aceh sedikit banyak tidak lepas dari tingkat pendidikan yang mereka tamatkan. Maka wajarlah jika sektor yang digeluti oleh tenaga kerja Aceh lebih didominasi oleh sektor yang berproduktifitas rendah seperti pertanian, walaupun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah yang bekerja di sektor pertanian menurun, kemungkinan dikarenakan adanya peralihan ke sektor industri dan perdagangan yang meningkat sejalan dengan membaiknya pandemi covid-19.

Meski demikian banyak juga pekerja yang berpendidikan SMA. Diperkirakan mereka inilah yang menggeluti sektor industri dan sektor perdagangan. Sektor lain yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa (keuangan dan asuransi, perusahaan, pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, lainya) sektor ini menyerap tenaga kerja mencapai 15,4 persen. Sedangkan sektor lainnya (pertambangan dan penggalian; konstruksi; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menyerap sekitar 22,84 persen Cukup tingginya sektor jasa yang digeluti oleh pekerja Aceh diperkirakan berasal dari pekerjaan jasa yang berproduktifitas rendah, seperti tukang parkir, agen penjualan dan sebagainya, serta bukan sektor jasa yang dilakukan oleh profesional seperti dokter, peneliti, akuntan dan sejenisnya. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pekerja di Aceh yang berpendidikan Diploma/Universitas.

Tabel 2.95.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2019-Agustus 2024

Lapangan Pekerjaan	Ketenegakerjaan Agustus (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	39.29	36.71	36.16	40.50	38.65	38.70
B. Pertambangan & Penggalian	0.80	0.70	0.58	0.90	0.56	1.00
C. Industri Pengolahan	8.20	8.21	8.36	7.32	7.15	7.19
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin	0.28	0.22	0.29	0.24	0.20	0.20
E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan	0.25	0.20	0.19	0.15	0.22	0.22
F. Konstruksi	7.57	6.46	5.96	6.63	7.30	7.30
G. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	14.18	15.17	16.24	13.37	14.25	14.65
H. Pengangkutan & Pergudangan	3.71	3.38	3.47	3.14	3.45	3.45
I. Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	4.52	7.42	5.18	4.94	5.58	5.58

Lapangan Pekerjaan	Ketenegakerjaan Agustus (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
J. Informasi & Komunikasi	0.52	0.54	0.52	0.39	0.56	0.38
K. Aktivitas Keuangan & Asuransi	0.76	0.63	0.48	0.45	0.51	0.51
L. Real Estat	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06
M,N. Jasa Profesional & Perusahaan	0.64	0.75	0.80	1.12	1.01	1.01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	6.69	7.48	7.65	6.64	6.54	6.54
P. Pendidikan	6.75	7.51	7.76	7.38	7.12	7.12
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	2.72	2.91	2.88	2.77	2.58	2.58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3.48	3.35	3.48	4.03	3.56	3.56
Total Penduduk 15+ Bekerja (ribu jiwa)	**2,219.70**	**2,359.917**	**2,361.30**	**2,394.99**	**2,447.35**	**2,508.35**

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebesar 38,68 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,65 persen; dan Konstruksi sebesar 7,30 persen.

Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini berbeda dengan bulan Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar minus 1,82 persen poin), sektor jasa lainnya (minus 0,48 persen poin); dan sektor Pendidikan (minus 0,26 Persen Poin). Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan dalam menyerap tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (1,28 persen poin).

B1. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,52 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, yaitu sebesar 4,22 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,38 persen poin dan 0,08 persen poin.

Tabel 2.96.
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2019-Agustus 2024

Status Pekerjaan Utama	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha sendiri	478.94	509.80	542.497	604.272	626.676	645.318
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	328.09	339.30	297.32	318.339	323.177	325.122
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	90.07	90.45	88.407	80.333	103.392	104.835

Status Pekerjaan Utama	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Buruh/Karyawan/Pegawai	866.71	809.10	839.815	842.954	879.044	894.197
Pekerja bebas	193.17	270.40	278.343	248.932	231.667	259.618
Pekerja keluarga/tak dibayar	262.73	340.80	314.918	300.164	283.389	279.264
Jumlah	**2.219.698**	**2,359,905**	**2.361.300**	**2.394.994**	**2.447.345**	**2.508.354**

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 59,86 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 40,14 persen. Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen poin.

B2. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada Agustus 2023, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,52 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, yaitu sebesar 4,22 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,38 persen poin dan 0,08 persen poin.

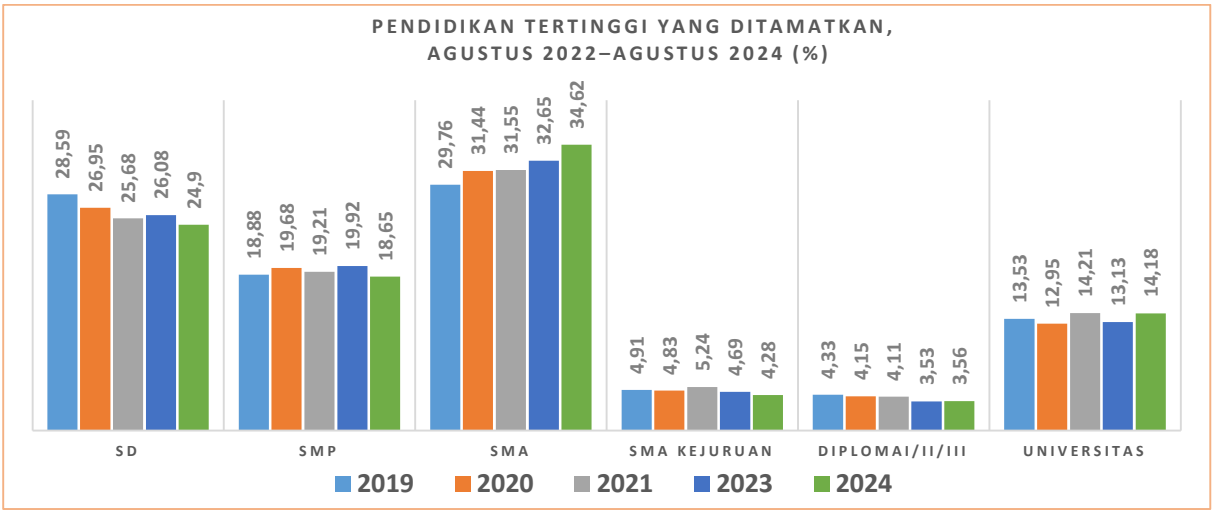
Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 59,86 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 40,14 persen. Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen poin.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selama Agustus 2021-2023, Lapangan Pekerjaan Utama yang menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja berjumlah 946.64 9 orang pada Agustus 2023 dengan didominasi Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 294.545 orang. Sedangkan pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SMA, yaitu sebesar 31,07 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar

15,39 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021.

Dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 3,52 persen poin dan 0,72 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Universitas mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada pendidikan Universitas, yakni sebesar 2,15 persen poin.



Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Keterangan: [1)]Diploma mencakup Diploma I/II/III, [3)] Universitas mencakup Diploma IV, S1, S2, S3

Gambar 2.100. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2019-Agustus 2024

C. Kepemudaan dan Olahraga

C1. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun pendidikan.

Menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa menghadapi era revolusi industri 4.0, peranan pemuda Indonesia dan Aceh khususnya terlihat nyata melalui berbagai usaha-usaha kreatif yang dilakukan dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi bangsa melalui bisnis-bisnis startup. Kehadiran wirausaha muda melalui bisnis startup telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak hanya itu, keberadaaan pemuda dengan berbagai prestasi juga telah ikut mengharumkan nama bangsa di berbagai kancah internasional baik dalam skala ASEAN, ASIA, maupun global.

Pada Tahun 2024 jumlah organisasi kepemudaan berjumlah 68 (OKP) sama dengan Tahun 2022. Keseluruhan organisasi kepemudaan Aceh yang tergabung dalam Komite

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keberadaan KNPI Aceh sejatinya merupakan partner pemerintah Aceh dalam merespon permasalahan aktual kepemudaan dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempersiapkan kader-kader penerus kepemimpinan bangsa. Adapun data rinci mengenai jumlah pemuda, pemuda prestasi dan jumlah organisasi kepemudaan Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2.97.**

Tabel 2.97.
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2019 – 2024

Organisasi Kepemudaan	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemuda	Orang	1.343.768	1.343.768	1.319.818	1.344.984	1.349.801	1.349.801
Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	61	2	80	32	36	20
Jumlah Organisasi Kepemudaan Politik (OKP)	Unit	70	71	66	68	68	68

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2025

Peningkatan kualitas pemuda Aceh merupakan salah satu prioritas strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Pemuda Aceh memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang, baik wirausaha, sosial, politik, akademik, hukum, maupun agama. Jumlah pemuda Aceh pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.404.738 orang atau meningkat sebesar 4,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 orang pemuda Aceh berhasil meraih prestasi pada Tahun 2024, yang mencerminkan adanya potensi besar untuk terus dikembangkan melalui pembinaan yang berkesinambungan.

Dari sisi pendidikan, kualitas pemuda Aceh menunjukkan capaian yang cukup baik dengan skor 76,67 dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada dimensi pendidikan, yang menempatkan Aceh pada peringkat kedua nasional. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing generasi muda Aceh agar mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional

Dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan, pemuda Aceh mencatat skor indeks sebesar 65,00 pada Tahun 2024. Selain itu, berdasarkan data Survei Demografi Indonesia (SDI) 2024, indeks kesehatan pemuda Aceh berada pada angka 0,433. Capaian ini menunjukkan adanya konsistensi pembangunan kesehatan pemuda sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup generasi muda yang sehat, sejahtera, dan produktif.

Upaya penguatan kualitas pemuda juga tercermin dari menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Aceh. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kategori setahun terakhir pakai menurun dari 1,95 persen menjadi 1,73 persen, sementara pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47 persen menjadi 2,20 persen. Penurunan ini merupakan

hasil dari berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh melalui penyadaran, sosialisasi bahaya narkoba, serta penguatan kegiatan positif pemuda.

Dengan capaian tersebut, pembangunan kepemudaan Aceh diarahkan untuk semakin memperkuat peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam mendukung pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta pembinaan prestasi pemuda akan menjadi prioritas agar pemuda Aceh mampu tampil sebagai generasi unggul yang Islami, maju, dan bermartabat.

C2. Keolahragaan

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh hasil pengukuran *Sport Development Index* (SDI) Tahun 2024, dimana:

(1) Kondisi dan ketersediaan ruang terbuka olahraga Aceh juga berada pada kategori tinggi dengan skor indeks 1,000, hal ini menunjukkan bahwa indeks ruang terbuka olahraga Aceh berada pada kategori tinggi.
(2) Indeks literasi fisik yang mulai membaik pada skor 0,637 dengan kategori menengah, hal ini menunjukkan bahwa mulai meratanya pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggungjawab masyarakat Aceh dalam melakukan aktivitas fisik untuk kehidupan yang berkualitas.
(3) Mulai tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Aceh dalam melakukan kegiatan olahraga meskipun berada dalam kategori rendah namun skor sudah mencapai 0,382.
(4) Indeks kesehatan fisik dan kesejahteraan psikis yang mulai membaik meskipun masih berada pada kategori rendah dengan indeks 0,433.

Dengan demikian mulai adanya hasil dari program dan kegiatan pembudayaan dan pembinaan olahraga baik olahraga pendidikan, olahraga olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pembinaan dan pengembangan pada ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Organisasi olahraga merupakan wadah penting dalam pembinaan atlet dan pengembangan prestasi olahraga di Aceh. Saat ini terdapat 66 cabang olahraga yang terdaftar dan terhimpun dalam wadah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh. Keberadaan organisasi olahraga ini menjadi ruang bagi para atlet untuk mengembangkan potensi serta berkompetisi secara sehat dan profesional. Cabang olahraga yang

terhimpun di dalam KONI Aceh meliputi berbagai bidang yang diminati masyarakat, antara lain sepak bola, bulutangkis, tenis meja, futsal, bola voli, tinju, panjat tebing, atletik, senam, dan cabang olahraga lainnya. Beragamnya cabang olahraga yang berkembang di Aceh mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap dunia olahraga sekaligus menjadi potensi besar untuk terus ditingkatkan melalui pembinaan yang berkesinambungan.

Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian terhadap penguatan kapasitas organisasi olahraga, peningkatan kualitas atlet, pelatih, dan wasit, serta penyediaan sarana pendukung olahraga. Upaya ini diarahkan untuk melahirkan atlet-atlet unggul yang mampu berkompetisi tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional dan internasional. Adapun cabang olahraga, sumber daya manusia keolahragaan dan infrasruktur olahraga Aceh disajikan pada **Tabel 2.98**.

Tabel 2.98.
Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh Tahun 2019 – 2024

No.	Keolahragaan	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cabang Olahraga Binaan	Cabor	20	24	29	14	19	27
2	Atlit Olahraga Binaan	Orang	454	456	309	309	219	172
3	Atlit Berprestasi	Orang	42	3	84	75	90	43
4	Pelatih Berprestasi	Orang	13	13	55	15	8	...
5	Pelatih Olahraga Binaan	Orang	84	84	56	35	35	35
6	Prestasi Olahraga	Cabor	15	1	30	12	16	9
7	Gedung Pemuda	Unit	1	1	1	1	1	1
8	Lapangan Olahraga	Unit	122	19	19	19	8	1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Tahun 2025

Dari **Tabel 2.98** di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 terdapat 23 cabang olahraga binaan yang terbagi dalam 4 kegiatan binaan, yaitu 1) Binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)/Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKON) 15 jenis cabor, 2) Binaan PPLP 4 jenis cabor, 3) Binaan atlet prioritas peparpenas 2024 4 jenis cabor, 4) Binaan atlet prioritas peparpenas 8 jenis cabor cabang. Total ada 172 atlet binaan yang diharapkan bisa menghasilkan bibit-bibit unggul. Beberapa cabang olahraga yang dibina antara lain: Atletik, Angkat Besi, Panahan, Pencak Silat, Karate, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo, Bola Voli, Tinju, Bulutangkis, dan lainnya.

Adapun 27 cabang olahraga binaan pada Tahun 2024 diantaranya, yaitu: a) Binaan PPLP, yaitu: 1) Atletik; 2) Angkat Besi; 3) Panahan; 4) Pencak Silat, b) Binaan PPLPD/ SMAKON, yaitu : 1) Karate; 2) Tarung Derajat; 3) Sepakbola; 4) Sepak Takraw; 5) Taekwondo, 6) Bola Voly; 7) Kempo; 8) Tinju; 9) Anggar, 10) Bulutangkis; 11) Dayung, 12) Atletik, 13) Angkat Besi, 14)Panjat Tebing, 15) Wushu, c) Binaan Atlet Prioritas Peparpenas, yaitu: 1) Menembak, 2) Atletik, 3) Tenis Meja, 4) Catur, 5) Angkat Berat, 6) Bulutangkis, 7) Anggar, 8) Bocica.

Dari 27 cabang olahraga yang dibina, ada 9 cabang yang berhasil menyumbangkan medali, seperti Panahan, Karate, Taekwondo, Anggar, Dayung, Atletik, Tenis Meja, Catur, dan Angkat Besi. Selain itu, ada juga beberapa cabang olahraga yang menyumbang medali meski bukan binaan, seperti Catur Kilat Perseorangan, Olah Vocal, dan Dum Domino.

Pada Tahun 2024, ada 8 pelatih yang berhasil mengukir prestasi. Kehadiran pelatih berkualitas diharapkan bisa meningkatkan prestasi olahraga Aceh ke depan. Selain itu, pada tahun ini, dibangun 1 unit lapangan olahraga baru. Aceh juga sukses menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2023 dengan pelaksanaan yang sangat baik. Berbagai kontingen dari provinsi lain mengakui keberhasilan Aceh dalam melaksanakan event ini, mulai dari penerimaan kontingen yang ramah hingga keamanan yang terjamin. Dalam hal prestasi, Aceh berhasil meraih posisi ke-5 nasional dengan total 192 medali: 65 emas, 48 perak, dan 79 perunggu.

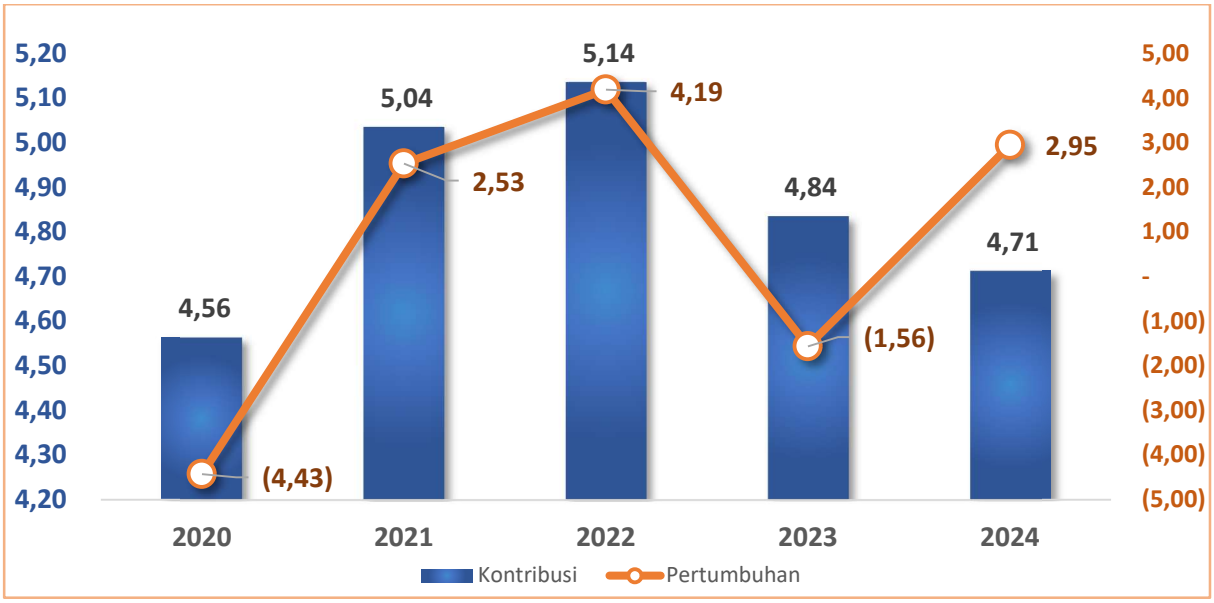
2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu disangsikan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Perkembangan sektor industri di Aceh dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana dalam periode waktu tersebut sektor industri di Aceh mengalami pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2022, yaitu sebesar 4,19 persen dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 5,14 persen. Namun pertumbuhan dan kontribusi tersebut masih belum optimal dibanding dengan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor yang dibergerak di hulu.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Aceh sempat mengalami lonjakan pertumbuhan pada masa pemulihan ekonomi pasca covid-19, yaitu pada Tahun 2021 tumbuh signifikan sebesar 2,53 persen setelah terkontraksi sebesar 4,43 persen pada Tahun 2020, tren positif berlanjut pada Tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Namun pada Tahun 2023 sektor industri kembali mengalami tekanan dan berkontraksi sebesar 1,56 persen, terjadinya kontraksi pada Tahun 2023 salah satunya diakibatkan karena terjadinya penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar global. Pada Tahun 2024 sektor industri tumbuh kembali sebesar 2,95 persen. Penyebab pertumbuhan ini paling dominan terjadi pada sub sektor industri makanan dan minuman yang dipicu oleh peningkatan harga CPO, sehingga mendorong pelaku industri terkait baik dihulu maupun dihilir meningkatkan produksinya. Adapun laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.101**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (diolah)

Gambar 2.101. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Aceh (persen) Tahun 2020-2024

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Aceh menunjukkan dinamika yang positif meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor industri tercatat sebesar 4,56 persen pada Tahun 2020, kemudian meningkat hingga mencapai 5,14 persen pada Tahun 2022 sebagai capaian tertinggi, dan berada pada angka 4,48 persen pada Tahun 2023. Selanjutnya, meskipun pada Tahun 2024 pertumbuhan sektor industri tercatat positif sebesar 2,95 persen, kontribusinya berada pada angka 4,71 persen, lebih rendah dibanding capaian Tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, perkembangan industri di Aceh masih berjalan seiring dengan pergerakan sektor hulu, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki kontribusi rata-rata tertinggi pada kisaran 29,43–30,98 persen selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri Aceh memiliki keterkaitan erat dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, khususnya dalam mendorong hilirisasi produk pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Tabel 2.99.
Sebaran Sentra IKM Aceh Tahun 2023 Menurut Kabupaten/Kota (data termutakhir)

No.	Kabupaten/ Kota	Sentra			Ket
		Jlh. Sentra	Unit Usaha	Tenaga Kerja	
1	Sabang	1	20	71	
2	Banda Aceh	5	58	77	
3	Aceh Besar	11	241	927	
4	Pidie	24	590	1.890	
5	Pidie Jaya	18	662	1.839	
6	Bireuen	19	578	1.735	
7	Aceh Utara	12	741	1.859	
8	Lhokseumawe	2	90	263	

No.	Kabupaten/ Kota	Sentra			Ket
		Jlh. Sentra	Unit Usaha	Tenaga Kerja	
9	Aceh Timur	15	181	1.479	
10	Langsa	6	81	231	
11	Aceh Tamiang	7	125	318	
12	Gayo Lues	1	1	7	
13	Aceh Tenggara	15	226	226	
14	Aceh Tengah	2	107	531	
15	Bener Meriah	3	60	103	
16	Aceh Selatan	4	151	341	
17	Nagan Raya	-	-	-	
18	Aceh Barat Daya	13	89	388	
19	Aceh Barat	9	143	377	
20	Aceh Jaya	7	77	184	
21	Singkil	15	1.116	2.564	
22	Subulussalam	-	-	-	
23	Simeulue	-	-	-	
Jumlah		**189**	**5.337**	**15.410**	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, 2025

Perkembangan jumlah dan peran Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai salah satu pendorong pertumbuhan industri di Aceh seperti yang disajikan pada **Tabel 2.99**. Potensi dan arah kebijakan pembangunan Aceh, sektor industri terus diarahkan untuk tumbuh menuju pengembangan industri halal yang sesuai dengan karakteristik Aceh sebagai daerah yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas pasar domestik maupun global, serta memperkokoh struktur ekonomi daerah. Selanjutnya, sentra IKM di Aceh sebanyak 189 sentra dengan unit usaha sebanyak 5.337 unit mampu menyerap 15.410 orang tenaga kerja. Sebaran Sentra IKM terbanyak berada di Kabupaten Pidie sebanyak 24 sentra, kemudian Bireuen 19 sentra, dan Pidie Jaya 18 Sentra. Sedangkan kabupaten Nagan Raya, Subulussalam dan Simeulue masih belum memiliki Sentra IKM.

Tabel 2.100.
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Aceh, 2019-2022
(Data Termutakhir tahun 2022)

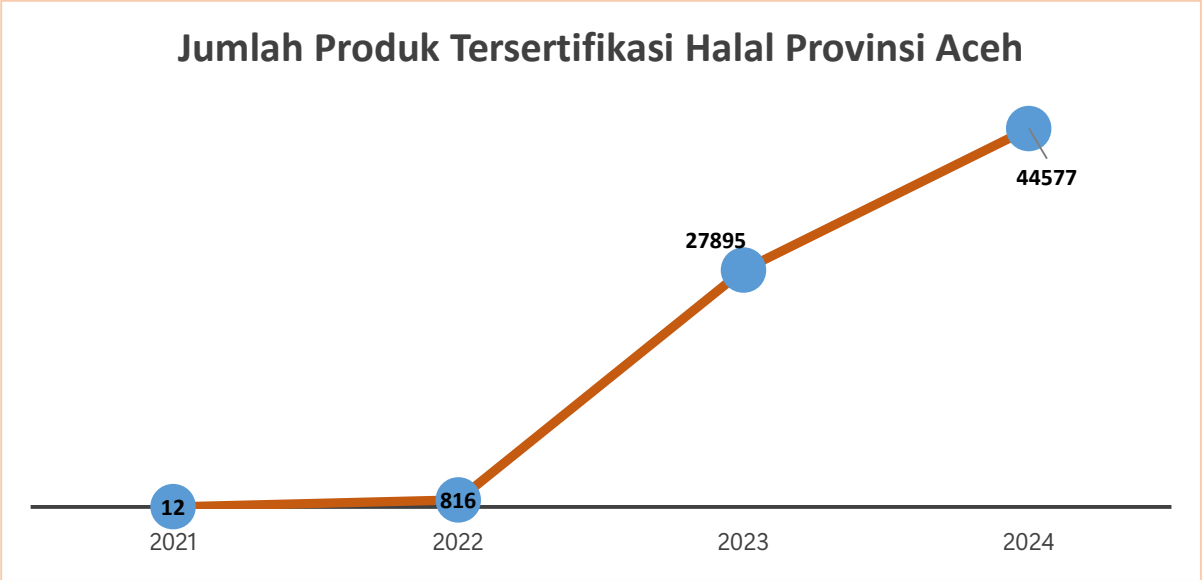
IKM	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	N/A	2.606	1.411	504
Total Industri	N/A	103.254	113.354	108.580
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	**-**	**2,52**	**1,24**	**0,46**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024 (diolah)

Sedangkan jumlah IKM di Aceh mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 2.606 IKM, turun menjadi 1.411 IKM dan turun kembali pada Tahun 2022 menjadi 504 IKM. Hal ini diduga akibat tekanan kondisi perekonomian global dan nasional yang dimulai sejak pandemi covid-19, belum sepenuhnya pulih pada sektor IKM sampai dengan data Tahun 2022. Sedangkan pada Tahun 2024 BPS belum merilis data terbaru untuk Tahun 2023.

Jumlah Industri Kecil dan industri Menengah yang berkurang berbanding terbalik dengan jumlah industri mikro yang bertambah pada Tahun 2022 sebanyak 108.050 dibanding Tahun 2020 sebanyak 100.625. Hal ini menyebabkan turunnya proporsi jumlah industri kecil dan industri menengah sebanyak 0,46 persen dari 2,52 persen pada Tahun 2020.

Penguatan Industri Halal, UMKM Halal, Ekspor Halal dan Ekosistem Halal merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri halal dengan produk halal didalamnya. Adapun perkembangan produk tersertifikasi halal secara total di Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti pada **Gambar 2.102**.



Gambar 2.102. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Aceh

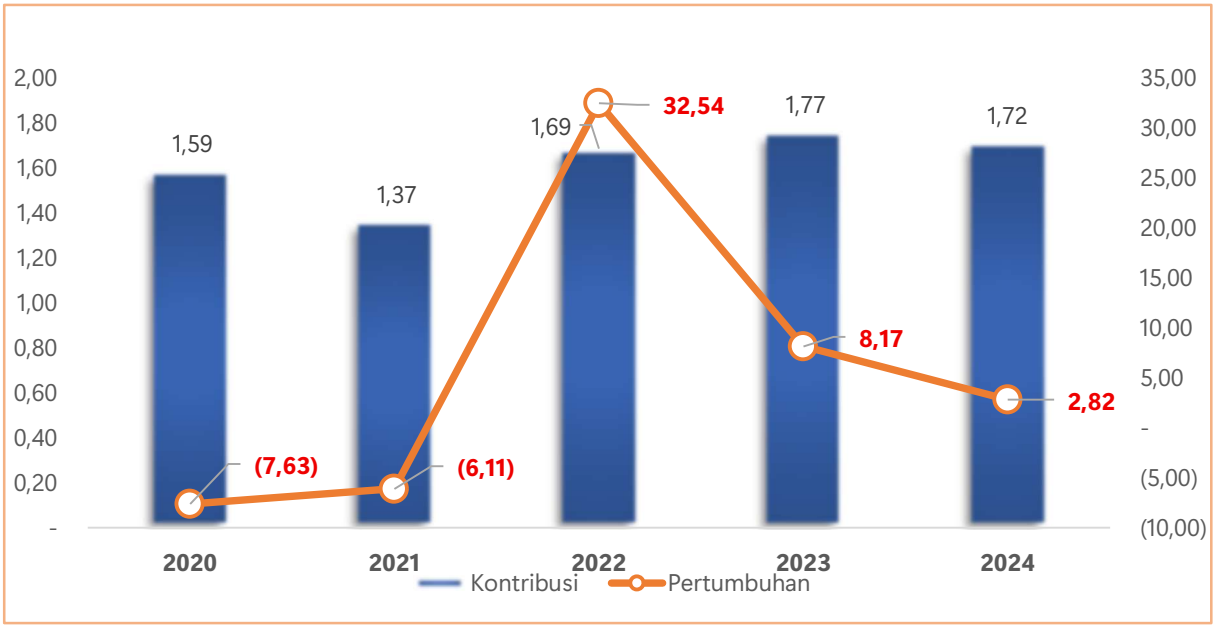
Produk tersertifikasi halal di Aceh menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkkan telah adanya keseriusan dan pemahaman dari masyarakat pelaku usaha, baik mikro, kecil dan besar, terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung perluasan pasar dalam Ekosistem halal.

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun di Aceh. Peningkatan sektor pariwisata dapat menggerakkan berbagai sektor lain dalam perkonomian seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor industri, perdagangan, transportasi, pertanian dan lain sebagainnya. Secara umum, sektor pariwisata dapat memberikan efek ganda *(multiplier effect)* bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata dan merupakan kategori penanda sektor pariwista dalam struktur PDRB.

Pariwisata di Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum

secara khusus. tapi juga mampu memberikan dampak positif bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Pertumbuhan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh dapat dilihat pada. **Gambar 2.103**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025 (diolah)

Gambar 2.103. Perkembangan Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Aceh (Persen) Tahun 2020 – 2024

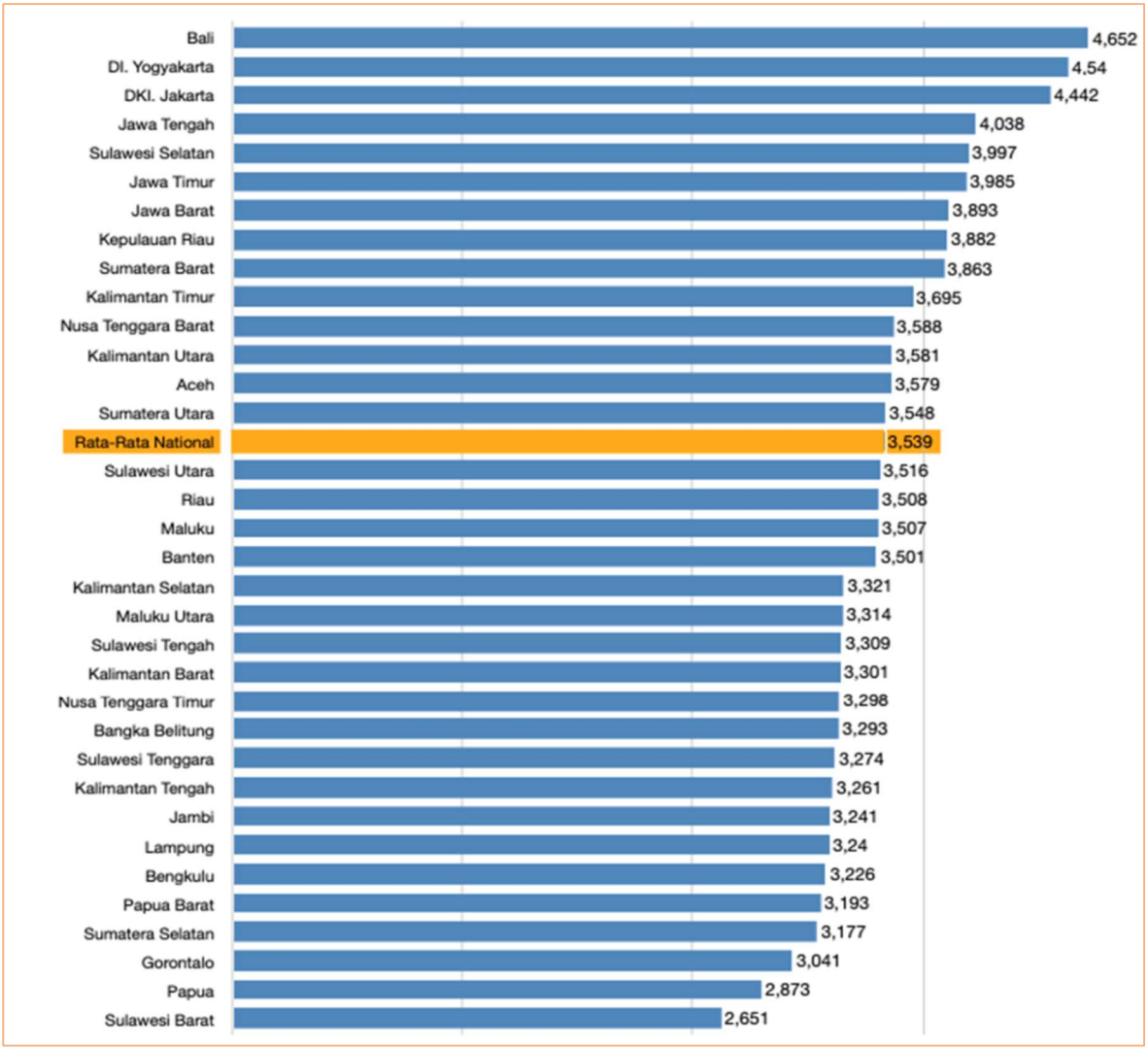
Dalam kurun waktu 2020-2024 pertumbuhan sektor pariwisata di Aceh menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Dari grafik diatas dapat dilihat pertumbuhan sektor pariwisata mengalami kontraksi sebesar 7,63 persen pada Tahun 2020. Sektor ini mengalami tekanan paling besar akibat pembatasan sosial pada masa pandemi covid-19 sehingga mengalami kontraksi sebesar 7,63 persen pada 2020 dan 6,11 persen pada Tahun 2021. Namun sektor pariwisata kembali tumbuh dengan sangat signifikan dan mengalami rebounce pada Tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 32,54 persen akibat dari dampak positif pemulihan perekonomian nasional dan daerah. Pada Tahun 2023 sektor pariwisata merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor perdagangan besar dan eceran, dengan pertumbuhan sebesar 8,17 persen. Pada Tahun 2024 sektor ini terus mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,82 persen, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan gambaran level aktivitas kepariwisataan yang berangsur normal dan secara kuantitatif hilangnya pengaruh efek *rebounce* pada Tahun 2022.

Sedangkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh relatif masih kecil, yaitu pada range 1,37 persen pada Tahun 2021 yang merupakan kontribusi terkecil menjadi 1,77 persen pada Tahun 2023 yang merupakan kontribusi terbesar selama 5 tahun sejak tahun terakhir sejak 2019. Sedangkan pada Tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,72 persen merupakan sektor dengan kontribusi terkecil ke-6 dari 17 sektor pembentuk PDRB. Sektor lain dengan kontribusi lebih kecil dari pariwisata adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa lainnya, sektor jasa perusahaan,

sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor pengadaan listrik dan gas

C. Capaian IPKN Tingkat Aceh Tahun 2023 (data terakhir 2022)

Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno pada Tahun 2022. Indikator ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran nasional pentingnya pembangunan ekosistem kepariwisataan di Indonesia dan mengukur besaran peran Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kepariwisataan nasional. Aceh mampu bersaing secara nasional dengan meraih peringkat ke-13 dalam capaian indeks tersebut, dengan nilai indeks sebesar 3,58. Sedangkan pada peringkat pertama diperoleh oleh Provinsi Bali dengan nilai sebesar 4,65 dan paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar 2,65, sedangkan capaian pada Tahun 2023 dan 2024 belum dirilis **Gambar 2.104**.



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2025

Gambar 2.104. Capaian Pembangunan Kepariwisataan Tingkat

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Aceh menduduki peringkat ke-13 dari 35 provinsi yang ada di Indonesia. Terdapat 5 Sub Indeks Penilaian IPKN, yaitu *Enabling Enivornment, Travel and Tourism Policy and Conditions, Infrastructure, Travel and Tourism Demand Drivers, dan T&T Sustainability*, sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.105**.



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2025

Gambar 2.105. Capaian IPKN Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2023 Per Sub Indeks (data terakhir Tahun 2022)

Dari data yang dirilis Kemenparekraf dapat dijelaskan nilai dari grafik diatas per sub indeks sebagai berikut:

1) *Enabling Enivrontment* : Aceh mencapai skor 4,05;
2) *Travel & Tourism Policy and Conditions*, : Aceh mencapai skor 3.55;
3) *Infrastructure* : Aceh mencapai skor 2.23;
4) *Travel & Tourism Demand Drivers*, : Aceh mencapai skor 3.86;
5) *Travel & Tourism Environmental Sustainability*, Aceh mencapai skor 3.89.

Nilai Provinsi Aceh paling tinggi terdapat pada sub indeks *Enabling Environtment*, hal ini menunjukkan kondisi pemungkin di Aceh yang mendukung perkembangan pariwisata cukup baik, terutama pada indikator kesehatan dan higenitas, lingkungan bisnis, keselamatan dan keamanan. Pada Sub Indeks T&T *Demand Drivers* Aceh bahkan meraih peringkat 5 besar dengan skor 3,86, hal ini menunjukkan daya saing Aceh sangat unggul secara nasional terutama pada sumber daya alam dan sumber daya budayanya. Namun Aceh masih sangat lemah pada sub indikator infrastruktur, baik infrastruktur pelayanan pada objek wisata maupun infrastruktur pendukung seperti transportasi udara dan transportasi laut.

Pembangunan pariwisata Aceh merupakan upaya yang signifikan dalam meningkatkan sektor pariwisata, Aceh memiliki potensi alam yang kaya, budaya yang unik, dan sejarah yang menarik, menjadi perhatian bagi wisatawan yang ingin berkunjung di Aceh. Dari ketiga Indikator tersebut pembangunan pariwisata dihitung untuk memperoleh ranking dari seluruh provinsi se-Indonesia, Tahun 2022 Provinsi Aceh berada di peringkat ke-13.

Salah satu tujuan utama dalam pembangunan pariwisata di Aceh adalah memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat setempat, dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, diharapkan akan terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan masyarakat dan penguatan kearifan lokal sosial ekonomi di Aceh.

D. Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020- 2024

Secara umum kondisi kepariwisataan Aceh dapat dikatakan mulai membaik, hal ini dapat dilihat dari mulai meningkatnya jumlah kunjungan wisata, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh yang terus mengalami pemulihan kembali pasca terdampak covid-19 pada Tahun 2020-2021, sebagaimana data disajikan pada **Tabel 2.101**.

Tabel 2.101.
Jumlah Kunjungan Wisata ke Aceh Tahun 2020 - 2024 (Ribu Orang)

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Wisatawan Nusantara	4.142	5.534	6.955	7.270	12.925
2	Wisatawan Mancanegara	2,49	0,12	0,88	7,30	12,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan kondisi kunjungan wisata ke Aceh terus mengalami peningkatan, baik kunjungan wisatawan mancanegara maupun kunjungan wisatawan nusantara. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh pada Tahun 2020 sebanyak 2.490 orang, turun drastis dari kondisi sebelum Aceh terdampak covid-19, dimana pada Tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 9.210 orang dan semakin menurun pada Tahun 2021 dimana hanya terdapat 120 kunjungan mancanegara akibat pembatasan sosial pandemi covid-19. Tren kunjungan wisatawan mancanegara

mulai membaik pada Tahun 2022 sejalan dengan pembukaan pembatasan sosial dimana jumlah kunjungan meningkat menjadi 880 kunjungan. Pada Tahun 2023 kunjungan meningkat menjadi 7.300 orang dan berlanjut pada Tahun 2024 sebanyak 12.600 kunjungan, hal ini menandakan minat kunjungan terhadap Aceh mulai pulih dan terjadi peningkatan minat. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan, Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia (BPS RI) mencatat jumlah wisatawan nusantara dengan provinsi tujuan Aceh sebanyak 8.943.786 perjalanan pada Tahun 2023, meningkat menjadi 12.924.997 perjalanan pada Tahun 2024.

Selain pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pada destinasi maupun objek wisata, penguatan kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM) pariwisata menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Aceh. Peran SDM pariwisata, khususnya pemandu wisata, diarahkan untuk terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Selain itu, peningkatan pengetahuan kepariwisataan bagi masyarakat juga menjadi fokus dalam mendorong terciptanya ekosistem pariwisata yang partisipatif dan berdaya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Aceh juga terus memperkuat upaya promosi dan pemasaran pariwisata dengan mengusung brand *"The Light of Aceh"* atau "Cahaya Aceh". Identitas pariwisata ini menjadi ikon yang memperlihatkan keunikan dan keunggulan budaya, sejarah, dan alam Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Optimalisasi promosi dilakukan secara terintegrasi, baik melalui media digital, event pariwisata, maupun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

E. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

E.1. Koperasi

Perkembangan koperasi di Aceh cukup fluktuatif, jumlah koperasi yang tumbuh terus bertambah namun begitu juga dengan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi tidak aktif. Secara rinci, perkembangan koperasi di Aceh Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2.102**.

Tabel 2.102.
Perkembangan Koperasi di Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Total Koperasi	Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Tidak Aktif	Persentase Koperasi Tidak Aktif
		(unit)	(unit)	(%)	(unit)	(%)
1	2020	6.602	3.777	57,21	2.825	42,79
2	2021	6.767	3.910	57,80	2.857	42,20
3	2022	6.931	3.951	57,00	2.980	43,00
4	2023	7.772	4.037	51,94	3.735	48,06
5	2024	8.177	3.942	48,21	4.235	51,79

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2025
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (diolah)

Berdasarkan data koperasi di Aceh, jumlah koperasi yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah koperasi ini mencerminkan semakin besarnya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis kelembagaan ekonomi rakyat.

Sejalan dengan itu, kperasi aktif dan tidak aktif mengalami dinamika yang relative seimbang. Pada Tahun 2024, koperasi aktif tercatat sebesar 48,21 persen, sementara koperasi tidak aktif berada pada angka 51,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi di Aceh terus berkembang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan komposisi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) sebagaimana **Tabel 2.103**.

Tabel 2.103.
Jumlah KSPPS dan USPPS di Aceh Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jenis Koperasi				Total	Jumlah			Ket
		KSP	USP	KSPPS	USPPS		Anggota	Aktif	Tdk. Aktif	
1	Banda Aceh	4	358	4	78	444	41.261	346	98	
2	Aceh Besar	18	423	29	10	480	29.119	318	162	
3	Pidie	9	122	-	7	138	13.033	126	10	
4	Pidie Jaya	-	9	9	2	20	4.293	20	-	
5	Bireuen	8	93	-	-	101	7.592	88	13	
6	Lhokseumawe	-	316	7	12	335	9.617	131	204	
7	Aceh Utara	13	80	3	9	105	11.854	53	54	
8	Aceh Timur	2	48	-	-	50	3.542	11	39	
9	Langsa	7	150	1	9	167	974	30	137	
10	Aceh Tamiang	1	37	7	2	47	4.124	30	17	
11	Aceh Tenggara	18	161	5	-	184	3.456	51	133	
12	Gayo Lues	2	96	-	1	99	5.519	6	93	
13	Aceh Tengah	6	252	6	1	265	22.698	34	225	
14	Bener Meriah	4	5	10	-	19	2.351	17	2	
15	Aceh Jaya	2	17	-	-	19	871	18	1	
16	Aceh Barat	70	5	12	-	87	2.215	32	55	
17	Nagan Raya	4	56	4	3	67	5.392	43	24	
18	Aceh Barat Daya	-	204	2	7	213	19.793	67	146	
19	Aceh Selatan	6	401	10	-	417	24.918	303	114	
20	Subulussalam	7	8	-	3	18	992	15	3	
21	Aceh Singkil	5	113	-	-	118	6.022	62	56	
22	Sabang	1	34	4	6	45	3.440	21	24	
23	Simeulue	1	105	-	10	116	3.299	27	89	
24	Provinsi	3	4	3	12	22	39.970	17	5	
Jumlah		**191**	**3.097**	**116**	**172**	**3.576**	**266.345**	**1.866**	**1.704**	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, 2025

Dari data **Tabel 2.103**, dapat dilihat bahwa persentase Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)

di Aceh masih relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan entitas koperasi dan usaha simpan pinjam. Hingga Tahun 2024, jumlah KSPPS dan USPPS tercatat sebanyak 288 unit atau sebesar 8,05 persen dari total koperasi dan usaha simpan pinjam.

Perkembangan KSPPS dan USPPS di Aceh mencerminkan adanya peluang besar untuk memperluas penerapan prinsip syariah dalam sinstem kelembagaan ekonomi masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, maka arah penguatan kelembagaan koperasi kedepan diarahkan pada optimalisasi peran KSPPS dan USPPS, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kualitas sumberdaya manusia koperasi.

Pemerintah Aceh secara konsisten mendorong transformasi koperasi menuju koperasi berbasis syariah melalui penguatan kelembagaan, pendampingan, dan fasilitasi agar koperasi semakin berdaya saing, adatif terhadap perkembangan teknologi, serta dipercaya masyarakat sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi daera

E.2. UMKM

Pertumbuhan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor riil di Aceh, salah satunya sektor UMKM yang merupakan sektor yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jumlah UMKM di Aceh terus mengalami pertumbuhan, fasilitasi untuk menumbuhkembangkan UMKM terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada skala ekonomi. Perkembangan jumlah UMKM dapat dilihat pada **Tabel 2.104**.

Tabel 2.104.
Perkembangan Jumlah UMKM di Aceh Tahun 2020-2024

No	Skala UMKM	Tahun				
		2020*	2021*	2022**	2023	2024
1	Mikro	226.290	226.290	224.523	423.178	622.394
2	Kecil	30.780	30.780	61	1.470	1.839
3	Menengah	2.679	2.679	26	202	288
Total		**259.749**	**259.749**	**224.610**	**424.850**	**624.521**

Sumber : Kemenkopukm, 2024
Diskopukm, 2025
KemenUMKM,2025

* Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya

** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten - *2024 Data KemenUMKM merupakan sandingan SIDT dan Regsosek*

Dari **Tabel 2.104** dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Aceh mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2020-2024, dimana pada Tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 259.749 tumbuh menjadi 624.521 pada Tahun 2024. Proporsi pertumbuhan terbesar terjadi pada kelompok mikro, dimana tumbuh sebanyak 199.216 usaha atau tumbuh sebesar 47,08 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi di masyarakat untuk menjadi wirausahawan dan peluang berusaha di Aceh yang masih terbuka.

Sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021, Kemenkopukm tidak melakukan sensus, sehingga data yang disajikan mengunakan data Tahun 2019.

Pada Tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM hanya melakukan sensus di 7 Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Tamiang, dan Kota Banda Aceh. Sedangkan berkurangnya jumlah usaha kecil dan usaha menengah pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2019 diakibatkan karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kembali kriteria kelas usaha, dimana sebelumnya sebuah usaha dikelompokkan mikro jika memiliki aset maksimal Rp. 50 juta atau omzet maksimal Rp. 300 juta menjadi maksimal modal Rp. 1 Milyar atau memiliki omzet maksimal Rp. 2 Milyar, begitu juga dengan kelas kecil dan menengah mengalami kenaikan tingkat kriteria. Sehingga banyak unit usaha yang sebelumnya berada dipengelompokan kecil dan menengah menjadi berada pada kelompok mikro. Hal tersebut juga mangakibatkan rasio proporsi jumlah usaha kecil dan menengah di Aceh menjadi berubah secara signifikan, sebagaimana pada **Tabel 2.105**.

Tabel 2.105.
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020*	2021*	2022**	2023	2024
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	12,88	12,88	0,04	0,39	0,34

Sumber : *Kemenkopukm, 2024 (diolah)*
Diskopukm, 2025 (diolah)
KemenUMKM, 2025 (diolah)
* Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya (2019)
** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten

Dari data diatas dapat dilihat terjadinya penurunan signifikan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pada Tahun 2022, yang merupakan dampak dari perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kembali kriteria kelas usaha. Perubahan kriteria usaha tersebut mengakibatkan banyak usaha yang berada pada kelompok kecil dan menengah turun menjadi kelas mikro.

Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah menjadi 0,39 persen dari 0,04 persen dari Tahun 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan volume usaha pada usaha mikro yang dapat meningkatkan aset maupun omzet usahanya. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan geliat ekonomi secara umum, selain peningkatan kapasitas usaha itu sendiri. Sedangkan pada Tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 0,34 persen. Melihat secara jumlah, baik total UMKM, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, semuanya mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan pada kelompok mikro jauh lebih dominan dibandingkan pada kelompok kecil dan menengah, hal ini mengakibatkan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah ini sedikit mengalami penurunan.

Proporsi usaha kecil dan mengengah di Aceh masih memberikan ruang besar untuk ditingkatkan agar semakin berdaya saing dan berkontribusi optimal terhadap

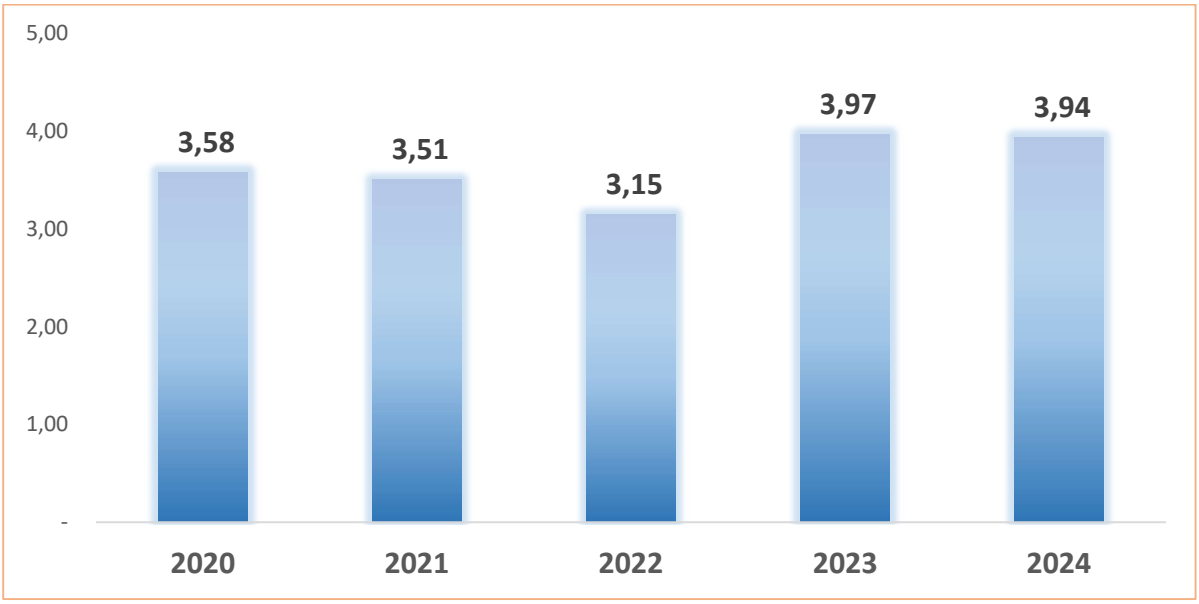
pembangunan ekonomi daerah. Upaya penguatan dilakukan melalui peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain, pemenuhan bahan baku secara berkelanjutan, serta penyediaan sarana, prasarana, informasi dan akses pasar yang lebih luas.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha menjadi focus utama melalui penguatan kompetensi kewirausahaan, pendampingan usaha, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif. Pemerintah Aceh juga mendorong agar UMKM memiliki sertifikat produk sebagai bagian dari peningkatan mutu dan jaminan kualitas, terutama melalui percepatan sertifikasi produk halal yang sejalan dengan visi Aceh Islami, Maju, Bermatabak, dan Berkelanjutan.

Lebih lanjut penguatan pendataan, monitoring, dan evaluasi terhadap UMKM dilakukan secara sistematis untuk memastikan arah kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah dapat berjalan tepat sasaran , terukur, dan berkesinambungan, dengan demikian, UMKM Aceh diharapkan mampu tumbuh sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan.

F. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan Aceh dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Tahun 2021 dan 2022, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 3,15 persen, mencerminkan kondisi perekonomian yang terus beradaptasi dengan dinamika pembangunan. Selanjutnya , pada Tahun 2023 capaian ini meningkat signifikan menjadi 3,79 persen, yang menggambarkan tumbuhnya semangat dan keyakinan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Pada Tahun 2024, rasio kewiarusahaan Aceh berada pada angka 3,94 persen. Perkembangan rasio kewirausahaan dapat dilihat pada **Gambar 2.106**.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 2.106. Rasio Kewirausahaan Aceh Tahun 2020-2024

Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat sebesar 3,35 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kewirausahaan di Aceh terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak utama dalam memperkuat perekonomian daerah.

Selain itu sektor ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru baik bagi laki-laki maupun perempuan. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, maka akan semakin besar peluang terbuka untuk berwirausaha, selanjutnya juga membangun status sosial yang baik di tengah masyarakat. Hal ini menunjukan iklim dunia usaha mulai membaik, sehingga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. Meningkatnya rasio kewirausahaan menunjukan meningkatnya peluang penciptaan lapangan kerja baru, dan diharapkan dapat memberi efek ganda dalam perekonomian di Aceh.

G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 63,50 persen, turun 0,28 persen poin dibanding Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 81,06 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 46,15 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,21 persen poin.

Tabel 2.106.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019 - Agustus 2024

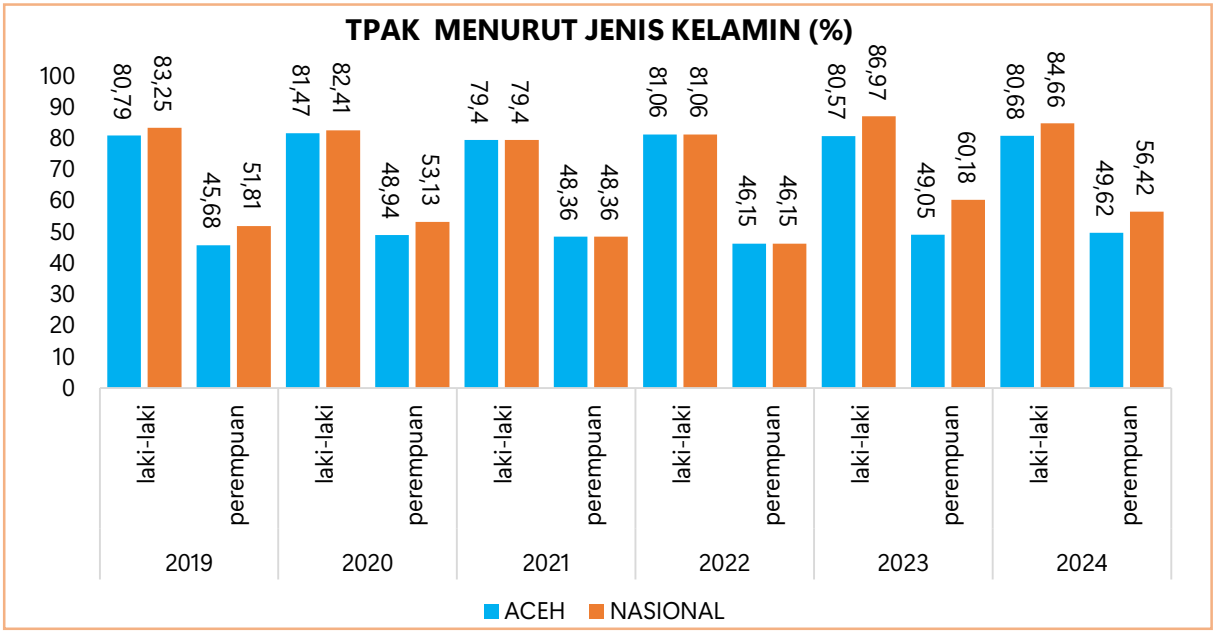
Karakteristik	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	**3.734.614**	**3.881.102**	**3.951.368**	**4.019.977**	**4.021.068**	**4.087.000**
a. Angkatan Kerja	2.366.320	2.526.505	2.520.157	2.552.562	2.604.452	2.661.000
- Bekerja	2.219.698	2.359.905	2.361.300	2.394.994	2.447.354	2.508.000
- Pengangguran	146.622	166.600	158.857	157.568	157.107	153.000
b. Bukan Angkatan Kerja	1.368.294	1.354.597	1.431.211	1.467.415	1.416.616	1.426.000
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**63,13**	**65,10**	**65,14**	**64,15**	**64,77**	**65,11**
Laki-laki	80,79	81,47	79,4	81,06	80,57	80,68
Perempuan	45,68	48,94	48,36	46,15	49,05	49,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari berdasarkan tahun perhitungan yang dilakukan. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil pula nilai TPAK yang diperoleh. **Tabel 2.106** mendeskripsikan tentang perkembangan kondisi TPAK dari 2019 hingga 2024. Secara umum perkembangan TPAK Aceh dari Tahun 2019 hingga 2024 berfluktuatif dan pada

Tahun 2024 kembali meningkat bila dibandingkan pada Tahun 2022 dan 2023. TPAK tertinggi terjadi pada Tahun 2021 dengan capaian sebesar 65,14 persen dan terendah di Tahun 2019 sebesar 63,19 persen.

Bila di tinjau dari TPAK laki-laki dan perempuan juga berfluktuasi, pada Tahun 2020 TPAK Laki-laki dan Perempuan terjadi peningkatan yang signifikan masing-masing sebesar 81.47 persen dan 48.94 persen. Meningkatnya nilai TPAK pada Tahun 2020 karena penambahan angkatan kerja sebesar 6,79 persen. Pada Tahun 2023 TPAK Laki-laki cenderung mengalami penurunan sedangkan TPAK perempuan meningkat. Pada Tahun 2024 TPAK laki laki meningkat menjadi 80.68 persen dan TPAK perempuan menjadi 49.62 persen. Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2.107. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Aceh dan Nasional, 2019-2024

TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Secara umum selama Tahun 2019-2024 TPAK Aceh baik laki-laki maupun perempuan masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini juga tercermin dengan perbandingan TPT Aceh dan nasional, dimana Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Pada Agustus 2021 TPAK tercatat sebesar 63,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 48,36 persen dan 79,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan untuk TPAK laki-laki dan TPAK Perempuan yaitu, sebesar 2,07 persen dan 0,57 persen. Menurunnya TPAK laki-laki dan perempuan disebabkan karena turunnya tingkat angkatan kerja baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan. Mereka beralih dari penduduk angkatan kerja menjadi

penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

H. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

(menggunakan Proporsi UMKM terhadap Angkatan Kerja sebagai proxy pengganti)

Proporsi PDRB ekonomi kreatif adalah suatu indikator yang dimaksudkan untuk mengukur capaian persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif. Nilai PDRB ekonomi kreatif merupakan perhitungan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit dalam sektor ekonomi kreatif. Terdapat 17 subsektor yang termasuk kedalam aktivitas ekonomi kreatif, yaitu: fesyen, kuliner, kriya, film, animasi dan video, pengembang permainan, aplikasi, musik, seni pertunjukan, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, seni rupa, desain produk, periklanan, penerbitan, arsitektur, dan desain interior.

Sampai saat ini, nilai proporsi ekonomi kreatif terhadap PDRB untuk Aceh belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik maupun Kementerian terkait. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu perlu menggunakan proxy yang mendekati untuk mengetahui gambaran perkembangan ekonomi kreatif di Aceh. Melihat aktivitas dari 17 sektor ekonomi kreatif tersebut dan perkiraan pelaku usaha pada bidang tersebut merupakan UMKM, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menerangkan usaha dengan kepemilikan modal sampai dengan Rp. 10 Milyar masih termasuk dalam usaha menengah. Selain itu, ketersedian lini data juga menjadi pertimbangan digunakannya Proporsi UMKM terhadap Angkatan Kerja sebagai proxy pengganti indikator Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif.

Indikator ini diharapkan dapat menggambarkan proporsi jumlah UMKM terhadap total angkatan kerja. Dimana, semakin tinggi persentase proporsi jumlah UMKM terhadap total angkatan kerja mengindikasikan semakin tingginya aktivitas pelaku UMKM yang secara dominan bergerak di sektor kreatif dibandingkan dengan angkatan kerja yang beraktivitas pada sektor lain. Di Aceh sendiri, sektor UMKM yang paling dominan bergerak dibidang kuliner, fesyen dan kriya. Aktivitas pada sektor-sektor ini yang kemudian memberikan kontribusi pada ekonomi kreatif yang dalam PDRB lapangan usaha tersebar di beberapa kelompok. Adapun gambaran proporsi UMKM terhadap angkatan kerja dapat dilihat pada **Tabel 2.107**.

Tabel 2.107.
Perkembangan Proporsi UMKM Terhadap Angkatan Kerja Tahun 2020 – 2025)
(sebagai proxy Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif)

Indikator	Tahun				
	2020*	2021*	2022**	2023	2024
Proporsi UMKM terhadap Angkatan Kerja	10,28	10,31	8,80	16,31	23,47

Sumber : Kemenkopukm, 2024: Diskopukm, 2025; KemenUMKM, 2025; Badan Pusat Statistik, 2025.
** Tidak dilakukan sensus, data menggunakan tahun sebelumnya*
*** Sensus hanya dilakukan pada 7 kabupaten*
- 2024 Data KemenUMKM merupakan sandingan SIDT dan Regsosek

Tabel 2.107 dapat disimpulkan bahwa proporsi UMKM terhadap angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Kondisi tersebut tersebut menggambarkan kondisi yang berfluktuasi yang disebabkan oleh keterbatasan data UMKM sebagai data dasar perhitungan proporsi UMKM terhadap angkatan kerja, dimana pada Tahun 2020 dan 2021 KemenkopUKM tidak melakukan sensus, sehingga data UMKM mengunakan data Tahun 2019. Pada Tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM hanya melakukan sensus di 7 Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Tamiang, dan Kota Banda Aceh.

Pada Tahun 2024 proporsi UMKM terhadap angkatan kerja mencapai 23,47 persen, menunjukkan geliat perekonomian pada sektor UMKM yang aktivitas utamanya diketahui sebagai ekonomi kratif terutama pada sub sektor kuliner, kriya, dan fesyen memiliki bagian yang cukup besar dibanding dengan aktivitas angkatan kerja pada sektor lain. Hal ini mengindikasikan peran aktivitas ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit dalam sektor ekonomi kreatif yang cukup signifikan dalam membentuk PDRB di Aceh.

I. Riset dan Inovasi Daerah

I.1. Riset Daerah

I.1.1. Sumber Daya Manusia Iptek Aceh

Kemampuan Aceh dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya iptek yang memadai, sebagaimana diamanatkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yang mencakup sumber daya manusia, pendanaan, serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia Iptek secara keseluruhan disebut sebagai periset, yang terdiri dari peneliti, perekayasa, dosen, dan SDM iptek lainnya. Saat ini terdapat 11 jabatan fungsional di bawah binaan BRIN, yaitu Peneliti, Perekayasa, Analis Perkebunrayaan, Analis Pemanfaatan Iptek, Kurator Koleksi Hayati, Penata Penerbitan Ilmiah, Analis Data Ilmiah, Pengembang Teknologi Nuklir, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Pranata Nuklir, serta Teknisi Perkebunrayaan.

Di Aceh, kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (LITBANJIRAP) dilakukan secara rutin setiap tahun oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swasta, maupun unit penelitian pusat yang ada di daerah. Fokus riset meliputi berbagai bidang seperti pemerintahan, hukum, sosial-budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, peternakan, UMKM, industri, perdagangan, infrastruktur, sumber daya alam, serta isu strategis daerah lainnya. Riset dan inovasi dilaksanakan di berbagai bidang, seperti pemerintahan, otonomi daerah, hukum, sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, peternakan, UMKM, perindustrian dan perdagangan, infrastruktur wilayah, sumber daya alam, serta isu-isu lain sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data pada akhir Tahun 2023, sumber daya manusia iptek pada lembaga pemerintah di Aceh 37 orang fungsional peneliti dengan berbagai Institusi, kepakaran dan unit kerja, 1 orang perekayasa dan 100 orang fungsional perencanaan.

Selain itu untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi Aceh juga telah memiliki 11 perguruan tinggi negeri dan 79 perguruan tinggi swasta dengan jumlah tenaga dosen 6.968 orang yang terdiri dari 110 orang professor, 1.200 orang S3 dan 2.100 orang S2.

I.1.2. Kelembagaan Iptek Aceh

Selain Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RISDA) Bappeda Aceh, beberapa lembaga lain berupa balai penelitian seperti: Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Aceh, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, BKKBN Perwakilan Aceh, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh, Puslatbang KHAN, Balai Bahasa Aceh, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Disamping itu juga terdapat beberapa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang ada di perguruan tinggi ikut menjadi bagian dari ekosistem penelilitan dan inovasi Aceh.

1.1.3. Infrastruktur Riset dan Inovasi Aceh

Faktor pendukung terwujudnya ekosistem riset dan inovasi yang berkualitas ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya ketersediaan infrastruktur riset dan inovasi yang mendukung kinerja organisasi riset dan inovasi di daerah. Berbagai isu dan permasalahan Pembangunan daerah yang harusnya dapat disimulasi dan dianalisis dengan tepat dalam rangkaian kegiatan riset yang komprehensif melalui tahapan LITBANGJIRAP yang sangat membutuhkan fasilitasi komponen ini. Tersedianya infrastruktur riset dan inovasi yang memadai dapat meningkatkan kapasitas lembaga riset dan inovasi di daerah, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah, dalam menghasilkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tersedianya informasi yang valid dan komprehensif merupakan salah satu komponen infrastruktur riset dan inovasi yang berperan penting dalam menyediakan data yang valid, handal, dan komprehensif. Hal ini mendukung proses riset dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dalam konteks yang lebih luas, tersedianya komponen ini dapat mendorong hilirisasi riset yang akan menjadi katalisator antara riset dengan kebutuhan industri dan masyarakat, mulai dari riset dasar hingga komersialisasi produk. Demikian juga halnya dengan pembangunan ekosistem riset yang memerlukan kolaborasi multipihak, termasuk akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan pemerintah. Infrastruktur riset dan inovasi yang memadai dapat memfasilitasi kolaborasi ini, baik melalui forum riset daerah maupun kemitraan antar lembaga.

Kondisi saat ini terkait dengan penjelasan di atas, Aceh masih menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan rangkaian LITBANGJIRAP yang ideal. Pelaksanaan riset di Aceh belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang mencukupi dan masih mengandalkan kolaborasi dengan institusi teknis yang telah memiliki infrastruktur riset, seperti fasilitas laboratorium, pusat-pusat unggulan Iptek, maupun unit pelaksana teknis di SKPA yang memfasilitasi proses pengujian materi riset. Selama ini, pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Aceh masih dilakukan dengan dukungan SDM dan fasilitasi dari unsur akademisi dan institusi riset lainnya yang ada di Aceh.

Sedangkan kegiatan riset dan inovasi yang selama ini telah berjalan secara umum didukung oleh institusi teknis yang memiliki fasilitas seperti laboratorium pengujian di SKPA teknis dan Pusat Unggulan Iptek yang dikelola oleh Universitas Negeri maupun Swasta di Aceh. Demikian juga halnya dalam penyediaan data untuk kebutuhan riset dan inovasi selama ini tersedia di SKPA dan instansi vertikal, termasuk dari universitas. Hingga saat ini kemitraan riset dan inovasi di lingkup Pemerintah Aceh telah berjalan melalui berbagai pola, salah satunya melalui Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SiDA), juga melalui forum-forum khusus yang dibentuk untuk penyelesaian produk-produk riset dan kebijakan yang dibutuhkan pimpinan

I.2. Inovasi Daerah

Pemerintah Aceh menyadari bahwa tantangan pembangunan saat ini menuntut adanya perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Keterbatasan sumber daya, tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, serta perubahan sosial dan teknologi yang cepat harus dijawab dengan **inovasi** yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Salah satu ukuran keberhasilan daerah dalam melakukan inovasi adalah **Indeks Inovasi Daerah (IID)** yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). IID menjadi instrumen strategis untuk menilai kapasitas daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mendokumentasikan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penerapan IID mengacu pada beberapa regulasi penting:

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah,
- **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017** tentang Inovasi Daerah,
- **Permendagri Nomor 104 Tahun 2018** tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Berikut adalah capaian nilai Indeks Inovasi Daerah Aceh selama empat tahun terakhir:

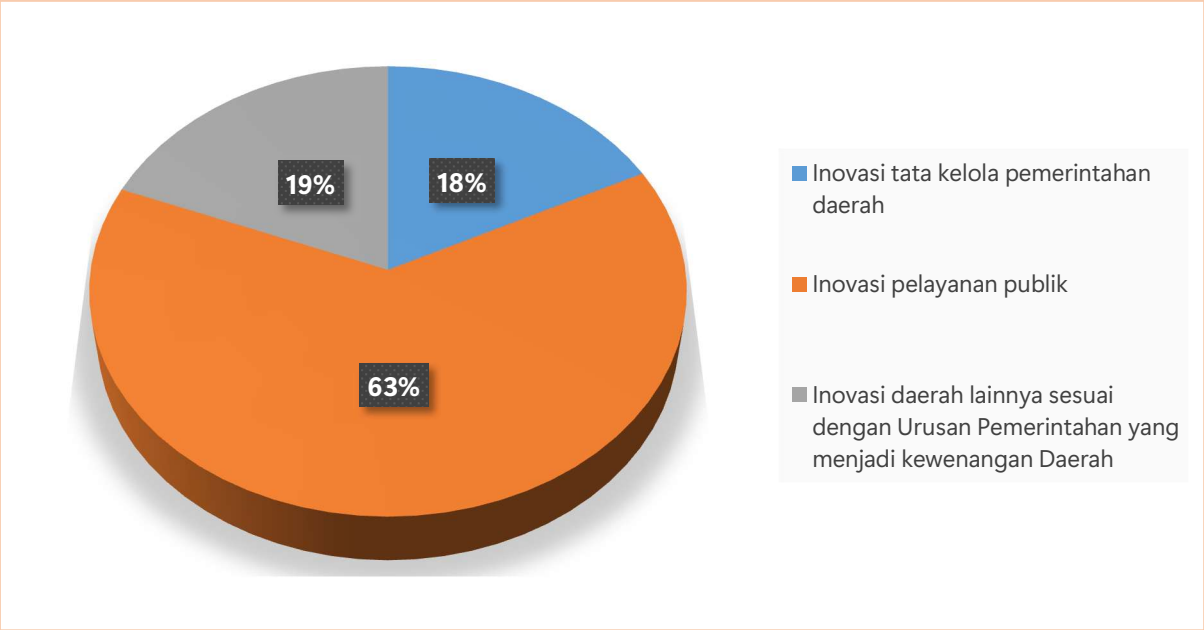
Tabel 2.108.
Capaian Indeks Inovasi Daerah Aceh (2021–2024)

Tahun	Nilai IID	Kategori	Keterangan
2021	46,40	Inovatif	Minim dokumentasi dan pelaporan
2022	51,67	Inovatif	Adanya peningkatan jumlah inovasi
2023	55,38	Inovatif	Adanya peningkatan jumlah inovasi dan dokumentasi
2024	55,87	Inovatif	Adanya peningkatan jumlah inovasi, kualitas profil Inovasi dan dokumentasi data dukung indikator

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, namun masih dibutuhkan kerja sistematis dan kolaboratif lintas perangkat daerah untuk mendorong perbaikan nilai IID secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan

penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh. Peraturan ini menjadi acuan bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah di lingkup Pemerintahan Aceh, dalam membangun ekosistem inovasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka memperkuat kebijakan pengelolaan inovasi daerah, Pemerintah Aceh telah menetapkan Inovasi Aceh dalam Keputusan Gubernur Aceh nomor 050/1329/2023 tanggal tentang penetapan Inovasi Aceh Tahun 2023 dan sebanyak 74 Inovasi daerah telah dilaksanakan oleh SKPA. Komposisi inovasi yang ditetapkan tersebut terbagi atas 3 bentuk inovasi, sebagaimana diperlihatkan pada **Gambar 2.108**.



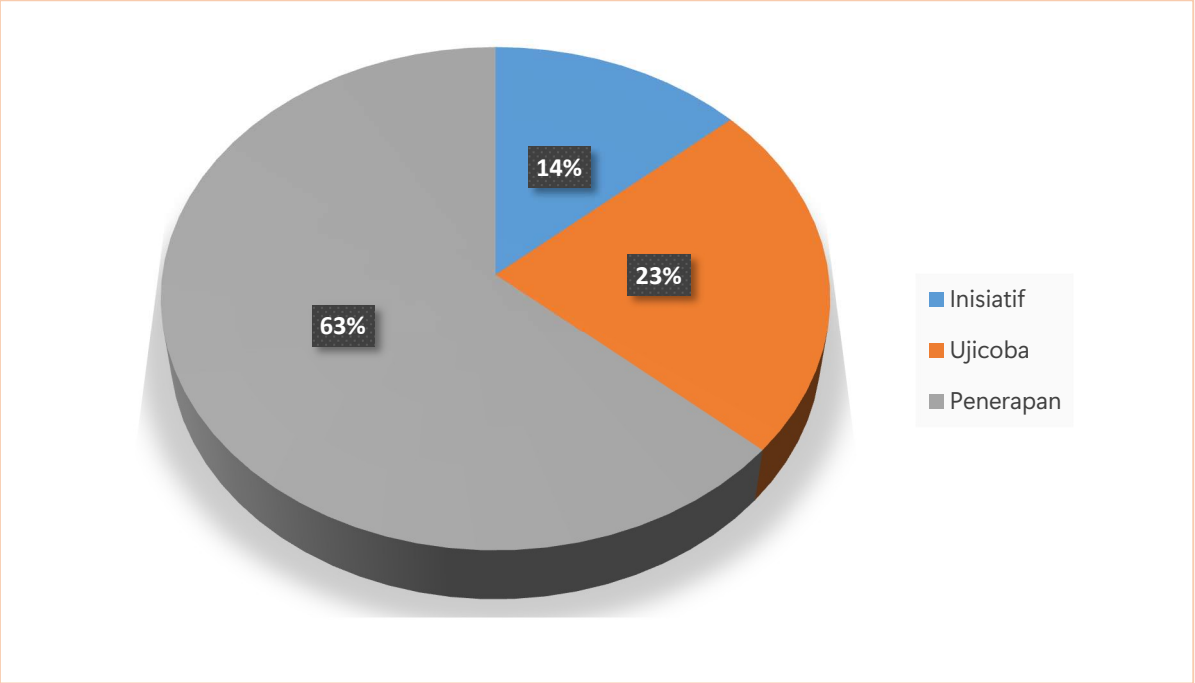
Gambar 2.108. Komposisi Bentuk Inovasi Aceh

Gambar 2.108, menunjukkan bahwa bentuk inovasi yang dominan dilaksanakan oleh SKPA adalah inovasi pelayanan publik dengan persentase sebesar 63 persen, dan selanjutnya bentuk Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan persentase 19 persen, serta bentuk inovasi tata Kelola pemerintahan dengan persentase sebesar 18 persen.

Pada Tahun 2024, melalui sistem penilaian mandiri, telah dilakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah Aceh telah dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain bimtek penilaian indeks inovasi daerah Aceh; desk pembahasan inovasi skpa; rapat pembahasan indikator satuan pemerintah daerah (SPD).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Aceh berhasil meraih nilai IID sebesar 55,87, meningkat dari 55,38 pada Tahun 2023. Peningkatan ini menempatkan Aceh dalam kategori "inovatif", mencerminkan adanya komitmen dan upaya yang berkesinambungan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa kapasitas birokrasi daerah dalam menciptakan dan mengelola inovasi publik terus mengalami peningkatan.

Selain itu, makna nilai ini menggambarkan bahwa berbagai program dan kebijakan inovatif di Aceh telah bergerak secara progresif, yaitu tidak hanya fokus pada gagasan, tetapi juga menindaklanjuti dan mengembangkan inovasi tersebut hingga ke tahap implementasi, dengan porsi penerapan yang dominan sebagai indikator keberhasilan transformasi inovasi dari ide menjadi aksi nyata. Komposisi tahapan, yaitu tahap penerapan sebesar 63 persen, tahap inisiatif sebesar 14 persen; dan tahap uji coba sebesar 23 persen, seperti yang tersaji pada **Gambar 2.109**.

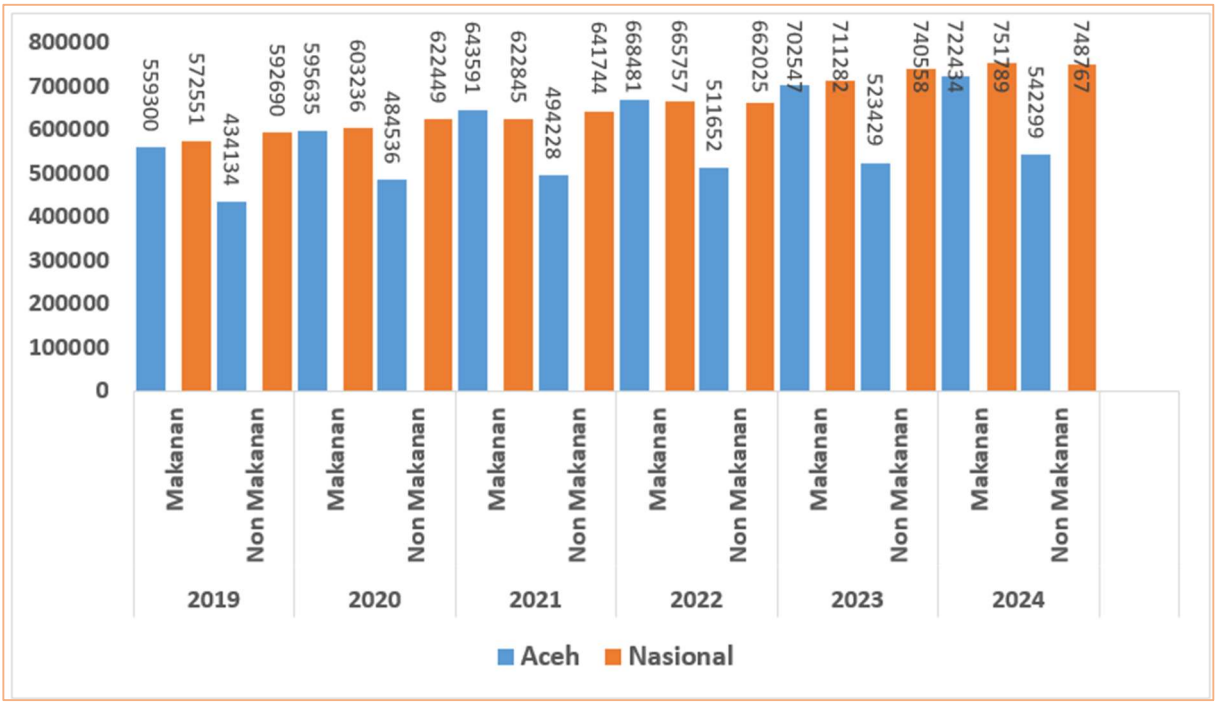


Gambar 2.109. Komposisi Tahapan Inovasi Aceh

J. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum pola konsumsi penduduk Aceh didominasi oleh makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Selama periode 5 (lima) tahun terakhir 2019-2023 pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita perbulan makanan dan nonmakanan baik Aceh maupun nasional terus mengalami peningkatan, namun kondisi ini masih menggambarkan tingkat kesejahteraan Aceh yang diukur dengan indikator pengeluaran rumah tangga perkapita perbulan masih di bawah rata-rata nasional.

Pada Tahun 2024 pengeluaran konsumsi per kapita perbulan Aceh sebesar Rp.722.434, dan nasional adalah sebesar Rp.751.789. Sedangkan pengeluaran konsumsi per kapita perbulan untuk non makanan Aceh sebesar Rp.542.299 dan nasional relatif lebih baik, yaitu sebesar Rp. 748.767. Dari nilai pengeluaran tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Aceh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terkahir mengalami peningkatan. Besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2.110**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

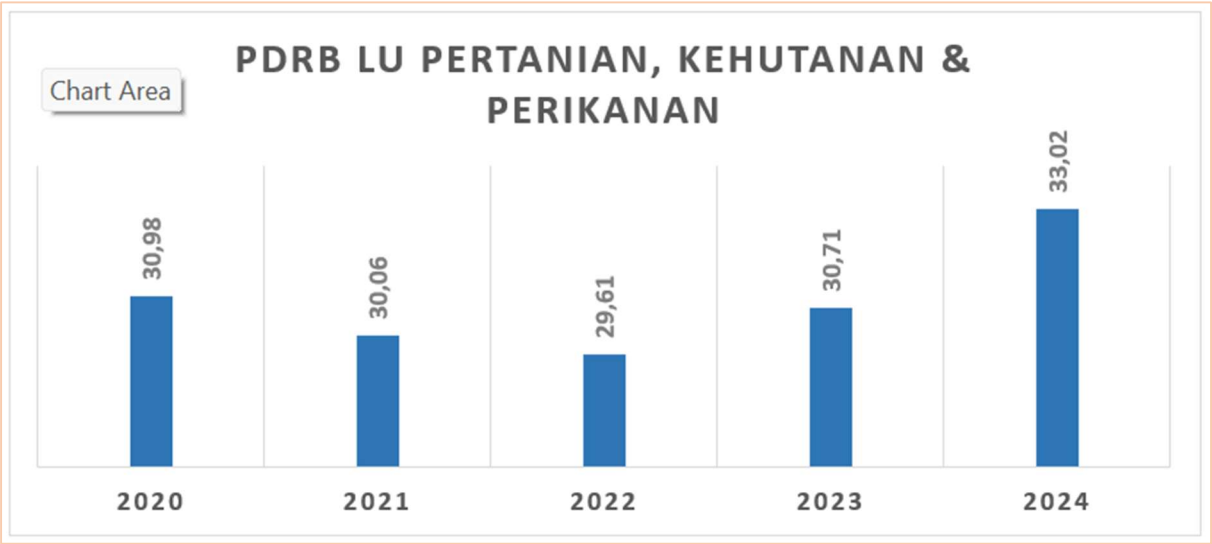
Gambar 2.110. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Makanan dan Non Makanan) Tahun 2019-2024

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menguraikan Indikator terkait: Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer, indikator lain sesuai konteks daerah.

A. Pertanian

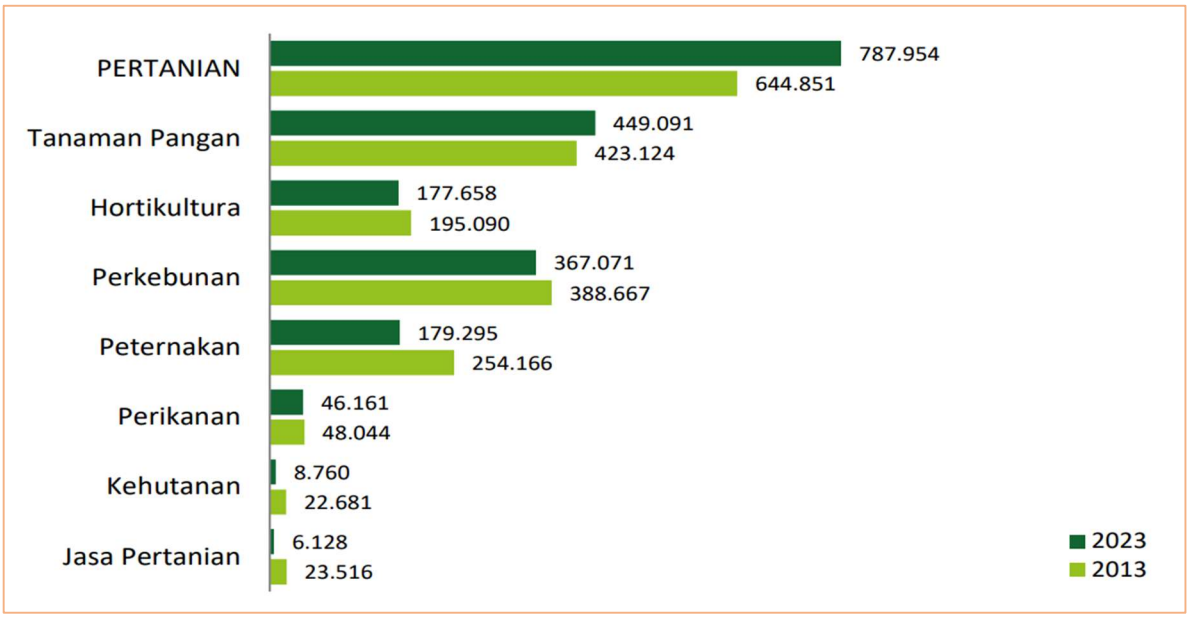
Pertanian masih menjadi sektor unggulan dan tulang punggung perekonomian Aceh dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Lapangan Usaha Pertanian secara umum (termasuk Kehutanan dan Perikanan) sedikit mengalami fluktuasi pada saat terjadinya pandemic covid-19 dengan kecenderungan menurun hingga Tahun 2022, namun kembali mengalami peningkatan sejak Tahun 2023. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap menjadi lapangan usaha terbesar berdasarkan PDRB Aceh. Perkembangan PRDB Aceh berdasarkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Gambar 2.111**.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Gambar 2.111. PDRB ADHB Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB tidak terlepas dari besarnya jumlah rumah tangga yang berusaha atau menggeluti lapangan usaha ini. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor di Aceh (rumah tangga) Tahun 2013 dan 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah Rumah Tangga yang bekerja pada sektor Pertanian bertambah secara signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya. Jika dilakukan pemilahan berdasarkan sub sektor, maka tanaman pangan menjadi sub sektor terbesar, diikuti oleh Perkebunan, Horrtikultura, dan Peternakan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2022

Gambar 2.112. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Subsektor pada Sektor Pertanian di Aceh (rumah tangga), Tahun 2013 dan 2023

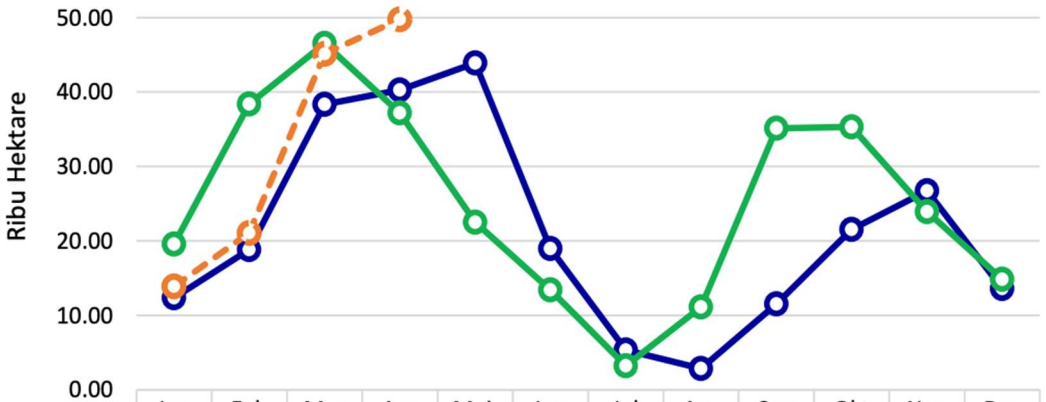
Sementara itu jumlah Usaha Pertanian Perorangan pada sub sektor tanaman pangan menempati urutan pertama, diikuti oleh sub sector perkebunan, sementara Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum terdapat pada sub sektor perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian lainnya.

Tabel 2.109.
Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor dan Jenis Usaha di Aceh (unit)

Subsektor	Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	Usaha Pertanian Lainnya (UTL)
Tanaman Pangan	465.507	0	33
Hortikultura	180.047	0	129
Perkebunan	372.452	85	52
Peternakan	181.726	1	43
Perikanan	47.242	3	45
Kehutanan	8.804	2	0
Jasa Pertanian	6.210	1	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024

Pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura, terdapat empat komoditas unggulan yang menjadi andalan Aceh, yaitu padi, jagung, cabai besar, dan bawang merah. Keempat komoditas ini memiliki nilai strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, serta penguatan struktur perekonomian daerah. Dari keempat komoditas tersebut, padi menempati posisi utama sebagai tanaman pangan dengan luas lahan dan tingkat produksi terbesar di Aceh. Komoditas ini menjadi penopang utama kebutuhan pangan masyarakat serta berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan pokok.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2023	12.35	18.82	38.36	40.26	43.88	18.97	5.33	2.85	11.55	21.56	26.75	13.61
2024	19.59	38.37	46.54	37.19	22.52	13.43	3.22	11.13	35.13	35.30	23.95	14.84
2025	13.87	21.07	45.15	49.79								

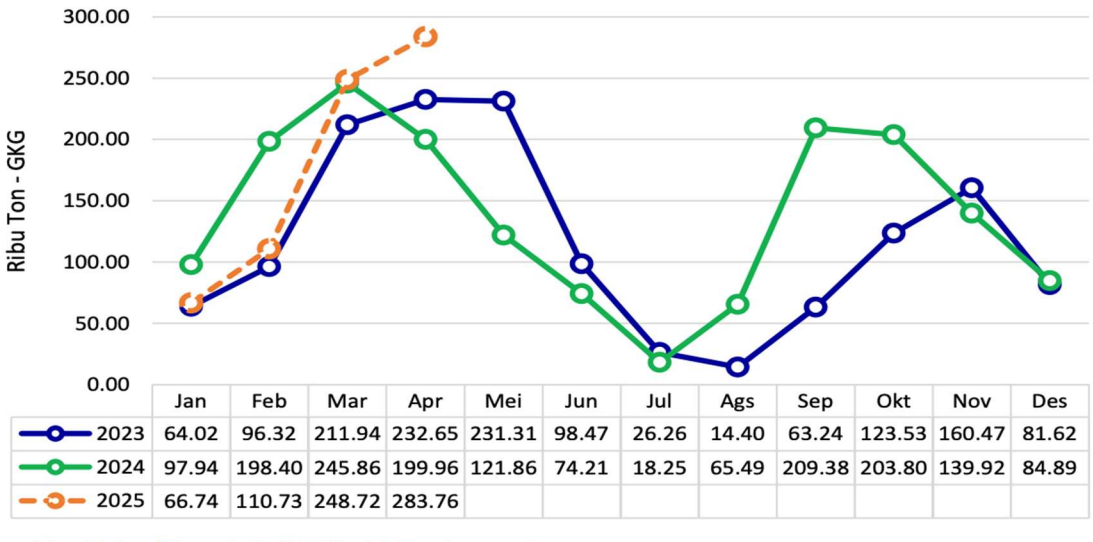
Keterangan: ¹ Luas panen Februari–April 2025 adalah angka potensi
Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Gambar 2.113. Perkembangan Luas Panen Padi di Aceh (Ribu Hektare), Tahun 2023–2025*

Perkembangan Luas Panen Padi di Aceh Tahun 2023-2025 seperti pada **Gambar 2.113**. Luas lahan baku sawah di Aceh pada Tahun 2018 sebesar 260.428 Ha. Pada Tahun 2019, sesuai dengan SK Menteri ATR BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019, berkurang menjadi 213.997 Ha. Hal ini terjadi akibat dari alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, tegalan, permukiman dan sarana infrastruktur lainnya. Berkurangnya luas lahan baku sawah telah menyebabkan berkurangnya luas panen padi di Aceh. Disamping akibat dari degradasi lahan, Aceh juga memiliki permasalahan tidak berfungsinya lahan sawah akibat tidak adanya jaringan irigasi yang memadai, sehingga usaha pertanian sangat tergantung pada curah hujan. Di sisi lain luas Panen Padi mengalami fluktuasi akibat seringnya terjadi bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Aceh.

Realisasi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 301,20 ribu hektare, atau mengalami peningkatan sebesar 46,91 ribu hektare (18,45 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 254,29 ribu hektare. Puncak panen padi pada 2024 mengalami pergeseran ke Bulan Maret, dari sebelumnya terjadi pada Mei 2023. Luas panen padi pada Maret 2024 adalah sebesar 46,54 ribu hektare, sedangkan pada Mei 2023 luas panen padi mencapai 43,88 ribu hektare.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2023	64.02	96.32	211.94	232.65	231.31	98.47	26.26	14.40	63.24	123.53	160.47	81.62
2024	97.94	198.40	245.86	199.96	121.86	74.21	18.25	65.49	209.38	203.80	139.92	84.89
2025	66.74	110.73	248.72	283.76								

Keterangan: [1] Produksi padi Januari–April 2025 adalah angka sementara
Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Gambar 2.114. Perkembangan Produksi Padi di Aceh (Ribu Ton-GKG), 2023–2025*

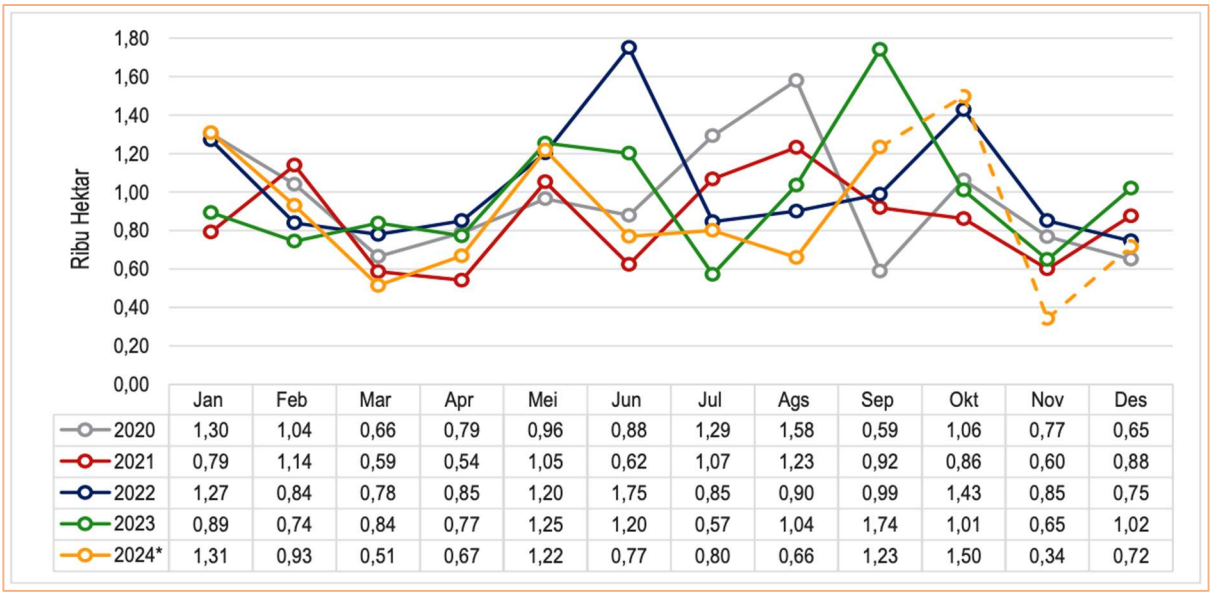
Luas panen padi pada Januari 2025 mencapai 13,87 hektare, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2025 diperkirakan seluas 116,01 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 129,87 ribu hektare, atau mengalami penurunan sekitar 11,82 ribu hektare (8,34 persen) dibandingkan luas panen padi pada *Subround* Januari–April 2024 yang sebesar 141,69 ribu hektare. Produksi padi di Aceh sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai sekitar 1,66 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau mengalami peningkatan sebanyak 0,26 juta ton GKG (18,21 persen) dibandingkan 2023 yang sebesar 1,40 juta ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2024 terjadi pada Bulan Maret, yaitu sebesar 245,86 ribu ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada Bulan Juli, yaitu sekitar 18,25 ribu

ton GKG. Sementara itu, pada Januari 2025, produksi padi sebesar 66,74 ribu ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari hingga April 2025 mencapai 643,20 ribu ton GKG. Total potensi produksi padi pada Subround Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 709,95 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 32,21 ribu ton GKG (4,34 persen) dibandingkan 2024 yang sebesar 742,16 ribu ton GKG.

Peningkatan produksi padi pada 2024 terjadi di beberapa wilayah potensi penghasil padi seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Besar. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/ kota yang mengalami penurunan produksi padi, misalnya Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2024 adalah Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah, yaitu Bener Meriah, Subussalam, dan Banda Aceh.

Komoditi pangan lainnya yang menjadi unggulan aceh adalah jagung pipil yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan pangan, pakan ternak, bahan baku berbagai macam industry, dan juga dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. realisasi panen jagung pipilan sepanjang JanuariSeptember 2024 sebesar 8,10 ribu hektare atau mengalami penurunan sekitar 0,95 ribu hektare (10,49 persen) dibandingkan Januari-September 2023 yang mencapai 9,05 ribu hektare. Sementara itu, potensi luas panen jagung pipilan pada Oktober-Desember 2024 diperkirakan sekitar 2,56 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan pada 2024 diperkirakan sebesar 10,66 ribu hektare atau mengalami penurunan sebesar 1,07 ribu hektare (9,14 persen) dibanding 2023 yang sebesar 11,73 ribu hektare.Terjadinya penurunan luas panen disebabkan oleh kekeringan dan dampak fenomena El-nino, tak terkecuali di Aceh.

Puncak panen jagung pipilan pada 2024 terjadi di bulan Oktober, dengan luas panen sebesar 1,50 ribu hektare. Sementara puncak panen pada 2023 terjadi di bulan September, dengan luas panen sebesar 1,74 ribu hektare. Perkembangan Luas Panen dan produktivitas Jagung Aceh Tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilipat pada **Gambar 2.115**.

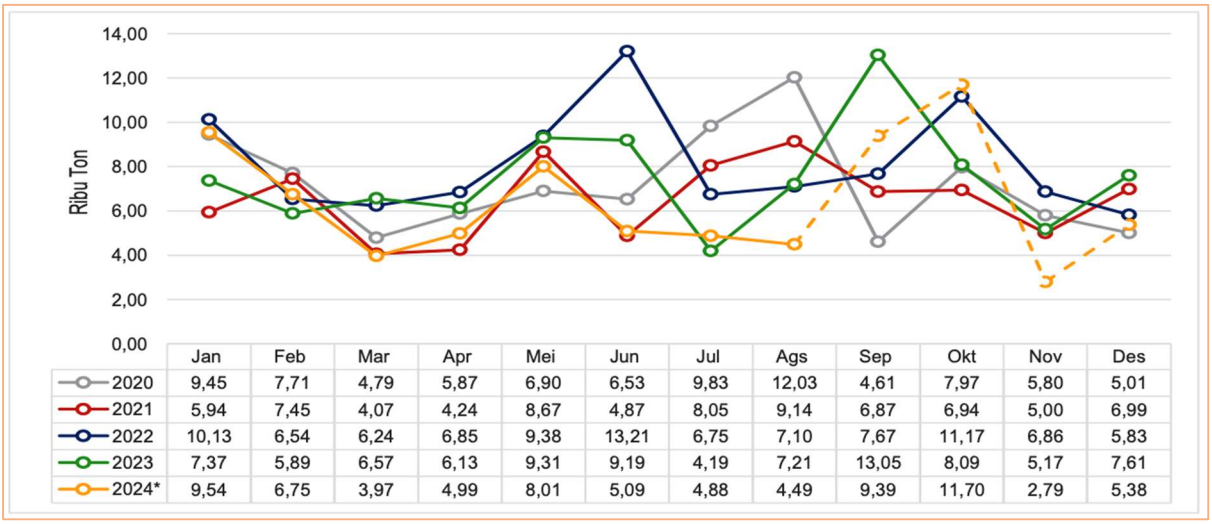


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2020	1,30	1,04	0,66	0,79	0,96	0,88	1,29	1,58	0,59	1,06	0,77	0,65
2021	0,79	1,14	0,59	0,54	1,05	0,62	1,07	1,23	0,92	0,86	0,60	0,88
2022	1,27	0,84	0,78	0,85	1,20	1,75	0,85	0,90	0,99	1,43	0,85	0,75
2023	0,89	0,74	0,84	0,77	1,25	1,20	0,57	1,04	1,74	1,01	0,65	1,02
2024*	1,31	0,93	0,51	0,67	1,22	0,77	0,80	0,66	1,23	1,50	0,34	0,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Gambar 2.115. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2020–2024

Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28 persen (JPK-KA28%) Januari hingga Desember 2024 (angka sementara) diperkirakan sebesar 76,96 ribu ton, mengalami penurunan sebesar 12,81 ribu ton atau 14,27 persen dibanding 2023 yang sebesar 89,77 ribu ton (Gambar 2). Produksi JPK-KA28% tertinggi pada 2024 diperkirakan terjadi di bulan Oktober, yaitu sebesar 11,70 ribu ton, sementara pada 2023 terjadi di bulan September, yaitu sebesar 13,05 ribu ton.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2020	9,45	7,71	4,79	5,87	6,90	6,53	9,83	12,03	4,61	7,97	5,80	5,01
2021	5,94	7,45	4,07	4,24	8,67	4,87	8,05	9,14	6,87	6,94	5,00	6,99
2022	10,13	6,54	6,24	6,85	9,38	13,21	6,75	7,10	7,67	11,17	6,86	5,83
2023	7,37	5,89	6,57	6,13	9,31	9,19	4,19	7,21	13,05	8,09	5,17	7,61
2024*	9,54	6,75	3,97	4,99	8,01	5,09	4,88	4,49	9,39	11,70	2,79	5,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2.116. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2020–2024

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, kontribusi produksi jagung Aceh terhadap produksi nasional masih relatif kecil apabila disejajarkan dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Barat. Meskipun demikian, Aceh memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas jagung melalui pemanfaatan lahan budidaya yang luas dan dukungan agroklimat yang mendukung. Berdasarkan data luas budidaya dan luas panen, Aceh menempati posisi kelima dari sepuluh provinsi di Sumatera, yang menunjukkan adanya daya saing yang dapat terus diperkuat dalam rangka mendukung kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Tabel 2.110.
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung Sumatera 2020-2024

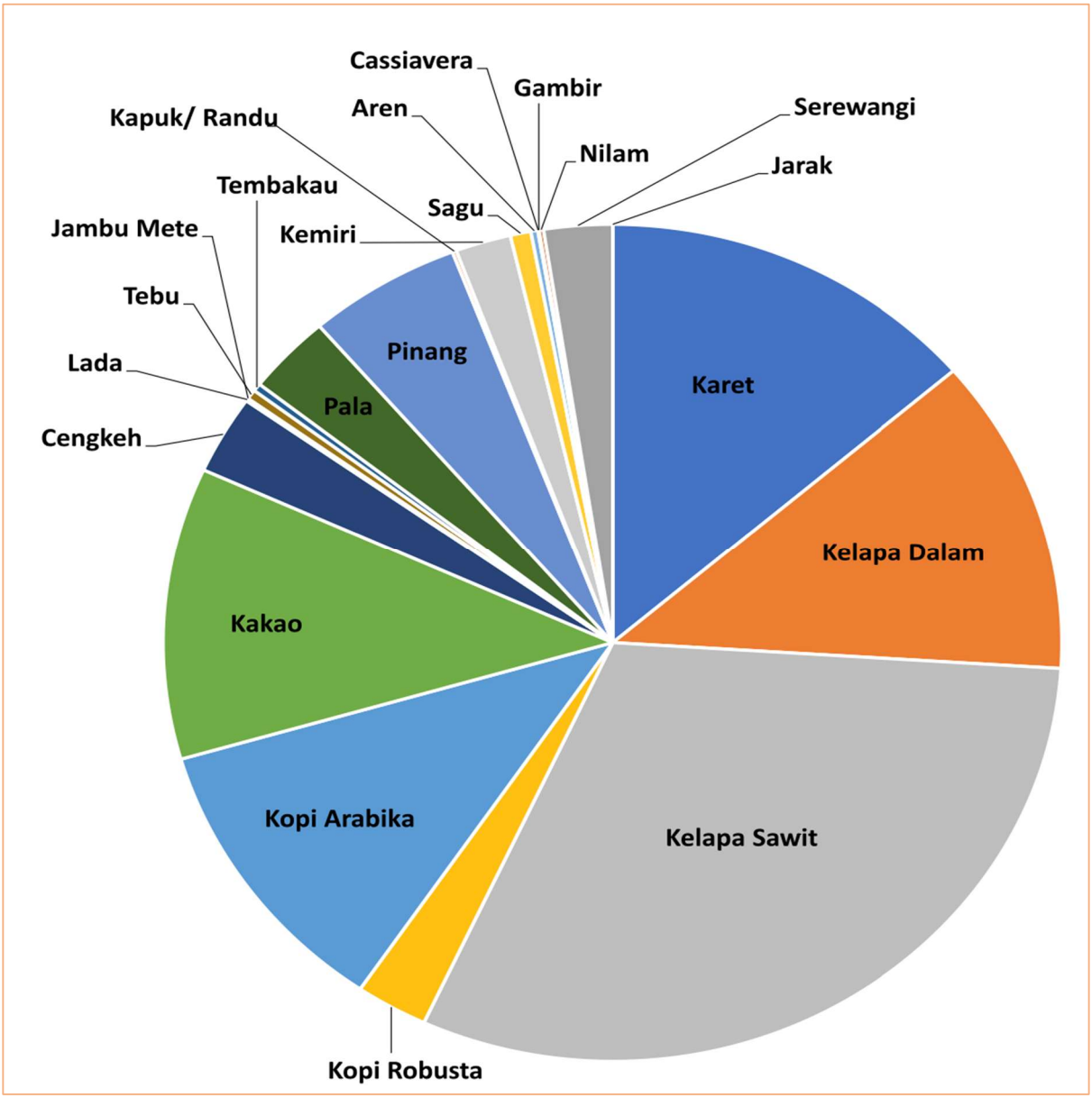
Provinsi	Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Menurut Provinsi														
	Luas Panen (ha)					Produktivitas (ku/ha)					Produksi (ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	11.581	10.290	12.454	11.728	10.090	55,22	56,21	58,01	56,58	51,78	63.951	57.836	72.242	66.364	52.249
Sumatera Utara	135.334	153.632	207.757	211.105	210.586	57,87	62,29	62,93	63,63	65,24	783.127	956.939	1.307.477	1.343.291	1.373.900
Sumatera Barat	65.756	67.159	84.565	79.631	83.918	64,64	65,19	67,34	62,19	61,76	425.025	437.814	569.450	495.224	518.316
Riau	138,92	306,22	217,27	216,35	327,17	34,03	32,32	34,64	31,83	34,83	472,78	989,61	752,62	689	1.139
Jambi	1.111	1.666	1.892	781	1.514	68,45	58,34	55,37	60,46	69,56	7.604	9.719	10.477	4.725	10.531
Sumatera Selatan	35.074	51.691	60.187	46.248	53.171	60,37	61,23	76,48	61,55	63,76	211.736	316.506	460.321	284.643	338.999
Bengkulu	4.146	5.983	10.417	7.901	9.861	56,48	61,73	68,89	63,82	63,76	23.416	36.935	71.756	50.421	62.877
Langpung	156.655	172.108	223.860	166.215	170.017	62,04	65,6	64,46	66,4	65,15	971.957	1.129.112	1.443.096	1.103.640	1.107.739
Kep. Bangka Belitung	28,73	97,31	62,8	23,25	0	44,09	35,85	41,08	47,87	57,16	126,66	348,85	257,95	111,3	0
Kep. Riau	2,75	2,62	2,45	2,07	2,49	55,4	48,95	51,31	50,48	48,19	15,22	12,84	12,59	10,45	12
Sumatera	**409.828**	**462.935**	**601.414**	**526.643**		**559**	**548**	**581**	**564**		**2.487.430**	**2.946.212**	**3.935.842**	**3.350.786**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Dari sisi produksi dan produktivitas, Aceh juga masih berada di bawah Provinsi Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara mampu menghasilkan 6 -. 7 ton jagung per hektar, sementara Aceh hanya mampu pada kisaran 5 -. 6 ton per hektar.

B. Perkebunan

Aceh memiliki total luas wilayah yang mencapai 5.677.081 ha. Dari luasan tersebut, 1.078.728 ha atau sekitar 19 persen dari luas total merupakan areal perkebunan dengan melibatkan 834.525 KK, dan perkebunan besar seluas 233.147,97 Ha melibatkan 56 perusahaan yang di klasifikasikan meniadi 3 jenis kepemilikan lahan, yaitu: Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perkebunan Besar Swasta Asing (PBSA), (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2023

Gambar 2.117. Proporsi Komoditi paad sub Sektor Perkebunan

Aceh sangat kaya akan berbagai komoditi perkebunan, disebabkan Aceh memiliki kesuburan tanah dan kesesuaian agroklimat yang baik untuk berbagai jenis tanaman perkebunan. Sub Sektor Perkebunan menyumbangkan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB sektor Pertanian setelah sub sektor tanaman pangan. Peningkatan persentase kontribusi sub sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas dari beberapa komoditas perkebunan, diantaranya Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao dan Kelapa.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023) kondisi luasan areal tanaman perkebunan rakyat belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana pada Tahun 2018 luas areal perkebunan sebesar 838.538 Ha, pada Tahun 2021 menjadi 845.580 ha, namun pada Tahun 2023 kembali menurun menjadi 835.192 Ha. Hal ini diperkirakan akibat dari banyaknya lahan pruntukan perkebunan yang belum dimanfaatkan serta banyaknya tanaman-tanaman tua sehingga produksi dan produktivitasnya menurun.

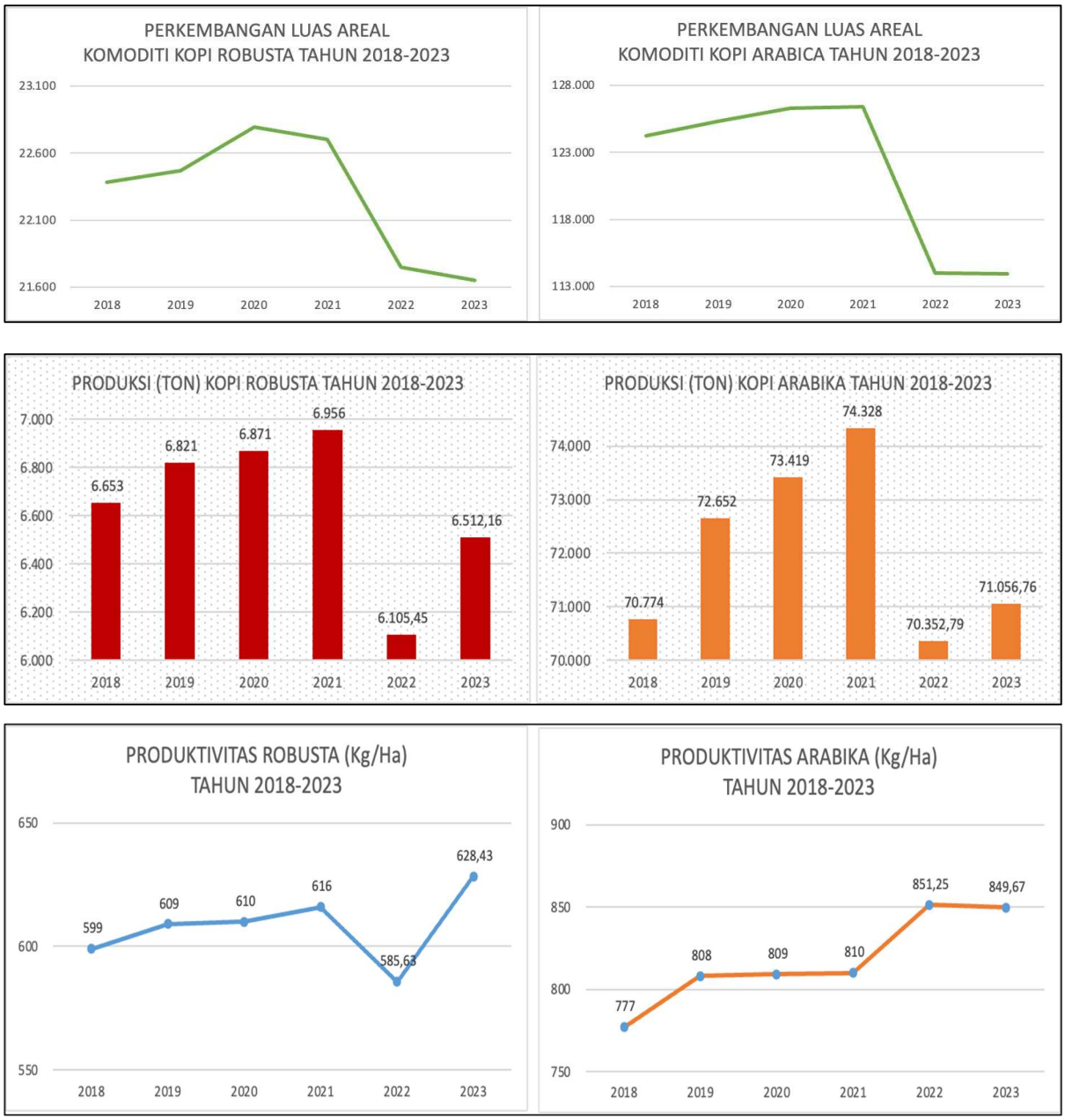
Tabel 2.111 menunjukkan Luas Lahan, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani dari komoditi perkebunan yang dihasilkan oleh 23 kabupaten/kota di Aceh pada Tahun 2023 berdasarkan Statistik Perkebunan Provinsi Aceh.

Tabel 2.111.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani pada Sub sektor Perkebunan Tahun 2023

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)			Jumlah	Produksi	Rata-Rata Produktivitas	Jumlah Petani	Wujud Produksi
		TBM	TM	TR	(Ha)	(Ton)	(Kg/Ha)	(KK)	
	Nasional								
1.	Karet	21.356,01	72.891,52	18.603,97	112.851,50	61.845,12	848,45	89.865	K3
2.	Kelapa Dalam	11.441,77	75.139,63	16.019,36	102.600,76	63.070,71	839,38	145.316	Kopra
3.	Kelapa Sawit	65.635,20	175.944,22	21.521,68	263.101,10	474.492,71	2.696,84	146.102	CPO
4.	Kopi Robusta	4.732,25	10.362,52	6.558,52	21.653,29	6.517,22	628,92	24.689	Biji Kering
	Arabika	7.493,54	75.964,00	8.857,00	92.314,54	64.566,60	849,96	81.191	Biji Kering
5.	Kakao	23.322,52	51.793,53	18.314,38	93.430,43	36.598,79	706,63	119.776	Biji Kering
6.	Cengkeh	6.001,10	9.871,65	9.551,60	25.424,35	5.916,65	599,36	23.645	Bunga Kering
7.	Lada	228,67	409,27	265,25	903,19	257,57	629,34	2.254	Lada Hitam
8.	Jambu Mete	-	-	-	-	-	-	-	Biji Kering
9.	Tebu	2.775,90	1.217,90	-	2.775,90	6.745,01	5.538,23	3.320	Gula Merah
10.	Tembakau	2.528,76	2.306,46	-	2.528,76	2.206,34	956,59	4.114	Daun Kering
	Daerah								
11.	Pala	7.406,75	10.477,94	6.045,75	23.930,44	6.660,64	635,68	28.878	Biji Kering
12.	Pinang	10.052,24	32.360,08	3.639,31	46.051,63	12.532,02	387,27	83.478	Biji Kering
13.	Kapuk / Randu	51,56	779,15	395,00	1.225,71	268,87	345,08	5.806	Serat Kering
14.	Kemiri	1.353,97	12.611,15	2.660,60	16.625,72	8.544,35	677,52	21.068	Biji Kering
15.	Sagu	1.903,22	3.455,76	844,55	6.203,53	1.649,89	477,43	12.427	Tepung
16.	Aren	388,90	1.445,46	250,51	2.084,87	914,74	632,84	5.460	Gula Merah
17.	Cassiavera	53,30	102,00	80,70	236,00	48,23	472,84	1.331	Kulit Kering
18.	Gambir	13,00	91,00	11,00	115,00	57,72	634,29	216	Getah Bening
19.	Nilam	1.018,00	808,70	-	1.018,00	147,34	182,19	2.759	Minyak
20.	Sereh Wangi	20.634,40	17.127,80	-	20.634,40	2.875,83	167,90	19.952	Minyak
21.	Jarak	2,70	5,50	4,00	12,20	7,10	1.290,91	15	Biji Kering
	Jumlah	188.393,76	555.165,24	113.623,18	835.721,32	755.923,45	1.361,62	821.662	

Sumber: Statistik Perkebunan Aceh 2023 (diolah)
Ket: Tanaman Belum Menghasilkan (TBM); TM (Tanaman Menghasilakan); TR (Tanaman Rusak)

Kopi merupakan komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi cukup baik dan menjadi salah satu komoditi ekspor Aceh. Aceh memiliki 2 jenis kopi andalan, yaitu: Robusta dan Arabika. Kopi Robusta terdapat di hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh, sementara itu, Kopi Arabika hanya dibudidayakan di 5 (lima) kabupaten, yaitu: Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues dan Pidie.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2.118. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta dan Arabika

Luas tanaman kopi di Aceh secara keseluruhan pada Tahun 2021 seluas 113,967 ha dengan melibatkan petani sebanyak 105.880 KK. Untuk perkebunan rakyat komoditi kopi terdiri dati Jenis 2 (dua), yaitu: arabika 103.706 Ha dengan petani 80.760 KK dan robusta 21.653 Ha dengan petani 24.689 KK. Sebaran Kopi berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat dalam **Tabel 2.112**.

Tabel 2.112.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kopi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

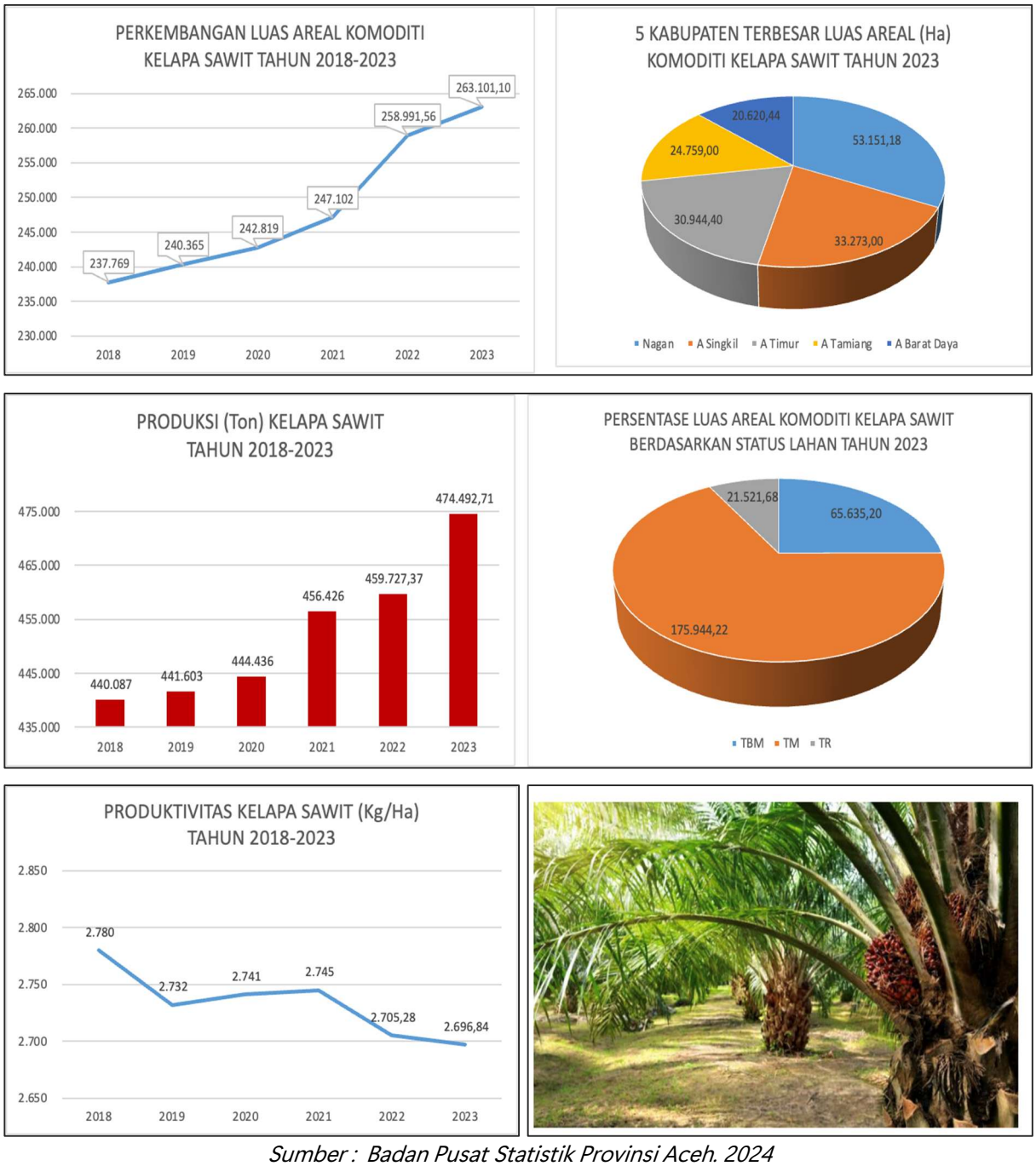
No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	Simeulue								Wujud Produksi
2	Aceh Singkil		10,00	63,00	73,00	5,20	520,00	156	Biji Kering
3	Aceh Selatan	135,00	969,00	325,00	1.429,00	361,00	372,55	3.579	
4	Aceh Tenggara	349,00	140,00	22,00	511,00	103,00	735,71	792	
5	Aceh Timur	14,00	384,00	89,25	487,25	145,37	378,57	777	
6	Aceh Tengah (R)	74,90	908,80	136,90	1.120,60	486,20	534,99	1.462	
7	Aceh Barat	16,60	428,85	133,85	579,30	85,77	200,00	1.060	
8	Aceh Besar	73,20	450,20	133,00	656,40	200,83	446,09	836	
9	Pidie (R)	2.278,00	4.050,00	4.214,00	10.542,00	2.542,00	627,65	6.604	
10	Bireuen		2,50	1,00	3,50	1,40	560,00	35	
11	Aceh Utara (R)	86,00	370,00	157,00	613,00	170,00	459,46	1.778	
12	Aceh Barat Daya	346,00	247,20	107,80	701,00	150,05	607,00	1.610	
13	Gayo Lues (R)	144,25	294,37	211,62	650,24	176,62	599,99	999	
14	Aceh Tamiang	64,00	18,00	2,00	84,00	5,22	290,00	184	
15	Nagan Raya	99,00	157,30	78,10	334,40	82,78	526,26	629	
16	Aceh Jaya	774,00	851,00	599,00	2.224,00	754,60	886,72	2.598	
17	Bener Meriah (R)	180,00	1.038,00	246,00	1.464,oo	1.232,00	1.186,90	1.252	
18	Pidie Jaya	98,30	37,30	34,00	169,60	12,40	332,44	295	
19	Banda Aceh								
20	Sabang								
21	Langsa								
22	Lhokseumawe			1,00	1,00			10	
23	Subulussalam		6,00	4,00	10,00	2,78	463,33	33	
	Aceh	4.732,25	10.362,52	6.558,52	21.653,29	6.517,22	628,92	24.689	
	Kopi Arabika								
1	Aceh Tengah	598,00	45.603,00	3.873,00	50.074,00	37.258,00	817,01	38.239	
2	Aceh Utara	530,00	1.515,00	203,00	2.248,00	780,00	514,85	2.887	
3	Bener Meriah	3.033,00	26.817,00	4.672,00	34.522,00	25.118,00	936,64	32.095	
4	Gayo Lues	3.328,54	1.988,00	97,00	5.413,54	1.391,60	700,00	7.905	
5	Pidie	4,00	41,00	12,00	57,00	19,00	463,41	65	
	Aceh	7.493,54	75.964,00	8.857,00	92.314,54	64.566,60	849,96	81.191	
	Robusta + Arabika	12.225,79	86.326,52	15.415,52	113.967,83	71.083,82	823,43	105.880	

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, (2023)

Secara keseluruhan pada Tahun 2023, produksi kopi sebesar 71.083 Ton, yang terdiri dari; Kopi Robusta 6.517 ton dan Kopi Arabika 64.566 ton. Produktivitas rata-rata sebesar 823 Kg/Ha per tahun (kopi arabika 823 Kg/Ha dan kopi robusta 628 Kg/Ha per tahun).

Komoditi andalan ekspor lainnya adalah Kelapa Sawit, terutama untuk produk *Crude Palm Oil* (CPO). Luas lahan kelapa Sawit di Aceh mencapai 565.135 Ha, yang terdiri atas: Perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara dan Perkebunan Swasta. Sebanyak 52 persen dari total lahan merupakan perkebunan milik rakyat dengan jumlah petani swadaya mencapai 279.000 kepala keluarga

Aceh, merupakan daerah pertama di Indonesia yang mengembangkan Kelapa Sawit dalam skala besar. Saat ini Kelapa Sawit dibudidayakan di 15 kabupaten/kota di Aceh. Antusiasme masyarakat terhadap Kelapa Sawit masih tinggi, yang ditunjukkan dari semakin meningkatnya luas lahan budidaya kelapa sawit. Namun demikian, secara individu rata-rata kepemilikan kebun rakyat relatif rendah sebesar 1,76 ha dengan rentang 0,67-2,9 ha.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2.119. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit

Permasalahan utama yang dihadapi petani Kelapa Sawit Aceh adalah produktivitas cukup yang rendah, hanya sebesar 15,25-ton TBS/ha/tahun atau 0,64-ton TBS/panen.

Bahkan jika dilihat dalam kurun waktu 5 tahun, terlihat adanya kecenderungan penurunan produktivitas yang signifikan. Sebaran luas, produksi, produktivitas dan jumlah petani Kelapa Sawit berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat dalam **Tabel 2.113**.

Tabel 2.113.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (HS)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	Simeulue	4.440,00	2.698,00	1.233,00	8.371,00	2.477,00	918,09	3.291	Wujud Produksi
2	Aceh Singkil	6.673,00	23.374,00	3.226,00	33.273,00	80.778,82	3.455,93	11.253	CPO
3	Aceh Selatan	1.166,00	10.117,00	238	11.521,00	26.178,00	2.587,53	8.913	
4	Aceh Tenggara	1.075,00	2.650,00	288	4.013,00	7.155,00	2.700,00	1.492	
5	Aceh Timur	13.453,45	15.073,37	2.417,58	30.944,40	35.521,29	2.356,56	17.380	
6	Aceh Tengah								
7	Aceh Barat	5.385,26	4.747,60	523,12	10.655,98	16.692,56	3.516,00	8.663	
8	Aceh Besar	301,5	922	297,5	1.521,00	555,79	602,81	756	
9	Pidie	35	186	47	268	152	817,2	194	
10	Bireuen	1.066,00	4.491,90	477,5	6.035,40	9.500,40	2.115,01	4.164	
11	Aceh Utara	1.295,00	15.930,00	960	18.185,00	62.398,00	3.917,01	10.794	
12	Aceh Barat Daya	2.630,94	17.511,50	478	20.620,44	24.718,73	1.411,57	11.890	
13	Gayo Lues								
14	Aceh Tamiang	4.026,00	20.075,00	658	24.759,00	53.198,90	2.650,01	11.732	
15	Nagan Raya	8.472,55	37.746,75	6.931,88	53.151,18	100.217,64	2.655,00	27.006	
16	Aceh Jaya	5.540,00	8.152,00	2.992,00	16.684,00	23.353,70	2.864,78	11.559	
17	Bener Meriah	575	333	392	1.300,00	402	1.207,21	1.040	
18	Pidie Jaya	1.195,50	370,5	10,5	1.576,50	885,3	2.389,47	1.845	
19	Banda Aceh								
20	Sabang								
21	Langsa	58	537,6	113,6	709,2	1.189,78	2.213,13	130	
22	Lhokseumawe	78	129	2	209	317,8	2.463,57	13.614	
23	Subulussalam	8.169,00	10.899,00	236	19.304,00	28.800,00	2.642,44		
	ACEH	**65.635,20**	**175.944,22**	**21.521,68**	**263.101,10**	**474.492,71**	**2.696,84**	**146.102**	
	2022	65.772,25	169.936,95	23282,36	258.991,56	459727,37	2705,28	144.871	
	2021	59.363	166.279	21459	247.102	456.426	2.745	140.658	
	2020	63.023	162.159	17.638	242.819	444.436	2.741	139.153	
	2019	61.460	161.629	17.277	240.365	441.603	2.732	138.305	
	2018	60.508	158291	18.969	237.769	440.087	2.780	137.063	

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2024)

Hasil produksi Kelapa Sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) kemudian diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO). Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2023), jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh sebanyak 60 pabrik yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota, dengan kapasitas olah sebesar 11,8 juta ton TBS/tahun. Bila asumsi tingkat operasional 80 persen, maka kapasitas yang terpasang saat ini terindikasi melebihi jumlah pasokan TBS yang ada. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas perkebunan sawit yang sebagian besar dikelola oleh petani kecil *(smallholder)* jauh lebih rendah dari rata-rata produktivitas nasional, yaitu sebesar 2,838-ton CPO/Ha/Tahun, sedangkan rata rata-rata produktivitas nasional sebesar 3,745-ton CPO/Ha/Tahun.

Sementara itu, Kakao juga menjadi komoditi unggulan perkebunan di Aceh. Komoditi Kakao tersebar di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota dengan total luas lahan perkebunan Kakao di seluruh wilayah Aceh mencapai 93 ribu hektar lebih. Wilayah utama penghasil kakao di Aceh adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Aceh Utara, Pide, Aceh Timur dan Kabuten Aceh Besar.

Produksi kakao Aceh pada Tahun 2023 tercatat sebesar 36.596 ton dengan tingkat produktifitas mencapai 706,63 Kg/Ha/tahun. Capaian ini dihasilkan dari luas areal tanaman kakao seluas 93.430 Hektar yang tersebar di 14 (empat belas) kabupaten/kota penghasil utama kakao di Aceh.

Sebaran luas areal, produksi dan produktivitas kakao menurut kabupaten/kota menunjukkan peranan penting komoditas ini dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya dalam penyedaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan petani. Informasi lebih lanjut terkait distribusi wilayah penghasil kakao di Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.114**.

Tabel 2.114.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kakao Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (HS)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	Simeulue	893,00	572,00	641,00	2.106,00	142,40	248,95	1.400	Wujud Produksi Biji Kering
2	Aceh Singkil	24,00	74,00	187,00	285,00	64,23	867,97	773	
3	Aceh Selatan	134,00	700,00	520	1.354,00	346,00	494,29	2.410	
4	Aceh Tenggara	7.929,00	11.638,00	1.982,00	21.549,00	10.533,00	905,05	20.651	
5	Aceh Timur	2.669,00	9.178,50	1.725,00	13.572,50	6.057,81	660,00	12.145	
6	Aceh Tengah	8,1	221,9	82,5	312,5	135	608,38	651	
7	Aceh Barat		633,50	337,5	971,00	407,30	642,94	1.415	
8	Aceh Besar	1.202,60	870,5	931,05	3.004,15	484,21	556,24	3.055	
9	Pidie	1.050,00	4.865,00	3.657,00	9.572,00	2.099,00	431,45	11.646	
10	Bireuen	77,7	4.388,80	614,7	5.081,20	2.690,30	612,99	8.331	
11	Aceh Utara	3.219,00	5.747,00	437	9.403,00	3.816,00	664,00	18.763	
12	Aceh Barat Daya	29,00	721,20	420	1.170,20	413,42	573,24	2.498	
13	Gayo Lues	851,62	2.387,09	293,1	3.531,81	1.909,67	800	4.355	
14	Aceh Tamiang	184	724,00	166	1.074,00	348,00	480,66	2.670	
15	Nagan Raya	3,00	133,47	1.588,53	1.725,00	66,40	497,49	6.650	
16	Aceh Jaya	56,00	155,10	431,00	642,10	65,20	420,37	256	
17	Bener Meriah	22,00	1.234,00	122	1.378,00	1.026,00	831,44	1.825	
18	Pidie Jaya	4.663,00	6.911,00	3.640,00	15.214,00	5.528,80	800,00	17.920	
19	Banda Aceh								
20	Sabang	61,00	144	450	655	142,2	987,5	969	
21	Langsa	0,5	15,97	8	24,47	8,35	522,86	170	
22	Lhokseumawe	42	89,5	81	131,5	80,50	899,44	151	
23	Subulussalam	204	389		674	235	604,11	1.072	

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (HS)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
	ACEH	**23.322,52**	**51.793,53**	**18.314,38**	**93.430,43**	**36.598,79**	**706,63**	**119.776**	
	2022	23.511,05	52.147,64	18.971,83	94.630,52	36.595,64	701,77	120.493	
	2021	26.823	56.664	13.668	97.155	40.724	719	124.868	
	2020	27.597	57.825	13.973	99.395	41.648	720	127.072	
	2019	27.987	57.618	13.662	99.267	41.093	713	126.880	
	2018	30.085	54,756	14.500	99.341	39.295	718	127.951	

Sumber: Distanbun (2023)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir *trend* produksi kakao terus mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan oleh banyaknya tanaman yang tidak produktif dan sudah tua, kurangnya perawatan, serangan hama penyakit, gangguan satwa liar (gajah) serta adanya konversi dan alih fungsi lahan. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan berbagai pemangku kepentingan, apalagi saat ini permintaan Kakao di pasar global terus meningkat. Pemerintah Aceh dengan dukungan dari berbagai mitra pembangunan, saat ini sedang membangkitkan kembali Kakao Aceh yang dimulai dengan membangun pusat-pusat pelatihan, pusat pembibitan, dan melatih Cocoa Doctor yang memiliki ketrampilan dan keahlian dalam penanganan budidaya Kakao.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi kakao di Aceh menunjukkan tren yang bervariasi. Permintaan kakao yang terus meningkat, baik di pasar domestik maupun global, menjadikan komoditas ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu produk unggulan daerah.

Pemerintah Aceh bersama para pemangku kepentingan dan mitra pembangunan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam membangkitkan kembali kejayaan kakao Aceh. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan pusat-pusat pelatihan, pengembangan pusat pembibitan, serta pelatihan tenaga ahli *Cocoa Doctor* yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam budidaya kakao. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani, meningkatkan produktivitas, serta mendorong terciptanya nilai tambah pada sektor perkebunan kakao Aceh secara berkelanjutan.

Karet yang merupakan salah satu komoditi perkebunan yang terus bertahan di Aceh, meskipun perkembangannya tidak signifikan. Karet yang ada saat ini merupakan tanaman karet yang telah lama dikembangkan. Tanaman karet tersebar di 20 kabupaten/kota, dimana kabupaten penghasil Karet tersebar adalah Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Jaya.

Tabel 2.115.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Karet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (HS)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	Simeulue	2.495,00	735,00	577,00	3.807,00	983,00	1.337,41	4.325	Wujud Produksi K3
2	Aceh Singkil	247,00	1.473,00	807,00	2.527,00	1.330,12	903,00	2.756	
3	Aceh Selatan	50,00	299,00	572,00	921,00	134,00	448,16	1.319	
4	Aceh Tenggara	1.520,00	3.756,00	664,00	5.940,00	3.219,00	857,03	8.642	

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (HS)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
5	Aceh Timur	3.385,85	17.383,20	2.776,05	23.545,10	15.724,32	904,57	12.702	
6	Aceh Tengah								
7	Aceh Barat	6.926,02	14.762,95	2.968,50	24.657,47	14.762,95	1.000,00	22.588	
8	Aceh Besar	30,00	145,50	140,00	315,50	42,99	295,46	333	
9	Pidie		14,00	126,00	140,00			132	
10	Bireuen	34,20	2.698,10	371,40	3.103,70	2.388,00	885,07	2.676	
11	Aceh Utara	592,00	7.002,00	1.185,00	8.779,00	4.971,00	709,94	8.816	
12	Aceh Barat Daya	17,50	320,00	167,00	504,50	181,06	565,81	1.001	
13	Gayo Lues		20,00	27,00	47,00	10,00	500,00	41	
14	Aceh Tamiang	1.474,00	11.742,00	1.154,00	14.370,00	8.219,40	700,00	10.941	
15	Nagan Raya	129,84	5.046,69	1.333,02	6.509,55	4.138,28	820,00	4.052	
16	Aceh Jaya	3.861,00	4.780,00	4.990,00	13.631,00	4.075,10	852,53	5.494	
17	Bener Meriah								
18	Pidie Jaya	304,00	10,00	78,00	392,00	6,80	680,00	190	
19	Banda Aceh								
20	Sabang								
21	Langsa	3,60	167,58	10,50	181,68	100,70	600,91	201	
22	Lhokseumawe		5,50	7,50	13,00	340,00	618,18	17	
23	Subulussalam	286,00	2.531,00	650,00	3.467,00	1.555,00	614,38	3.639	
	ACEH	**21.356,01**	**72.891,52**	**18.603,97**	**112.851,50**	**61.845,12**	**848,45**	**89.865**	
	2022	22.609,46	72.362,52	19.940,02	114.912,00	61.596,76	851,22	91.187	
	2021	25.376	73.195	18.503	117.074	63.736	871	92.285	
	2020	27.538	74.348	19.664	121.551	63.854	859	96.019	
	2019	29.437	74.922	18.762	123.121	65.652	876	96.701	
	2018	32.792	74.611	21.625	129.028	64.926	870	100.205	

Sumber: Distanbun, ATAP 2024

Untuk meningkatkan nilai tambah produksi Karet di Aceh, telah dibangun sebuah perusahaan pengolahan karet yang berlokasi di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Pabrik ini direncanakan mampu memproduksi hingga 2.500 ton rubber crumb atau karet remah per bulan. kehadiran pabrik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani karet di Aceh.

Aceh juga memiliki potensi Kelapa yang cukup besar. Potensi kelapa rakyat dapat dilihat dari keadaan luas tanam, luas panen, produksi dan potensi peningkatan produksi tanaman. Pada Tahun 2022 luas areal tercatat seluas 102.779,69 Ha, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan areal sebesar 1,93 persen. Penurunan areal ini disebabkan adanya konversi lahan perkebunan Kelapa ke komoditi lainnya serta alih fungsi lahan.

Pada Tahun 2023, luas perkebunan kelapa tercatat seluas 102.600 Ha, menurun cukup signifikan dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 104.800 Ha. Sebaran komoditi Kelapa dapat dilihat dalam Statistik Perkebunan Aceh Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, produksi tanaman kelapa rakyat di Aceh mencapai 63.070 Ton dengan produktivitas rata-rata 839 Kg/Ha/Thn. Dari table di atas dapat dilihat adanya penurunan produksi dan produktivitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurunnya produksi dan produktivitas Kelapa disinyalir akibat dari menurunnya luas areal perkebunan dan juga usia tanaman yang sudah tua namun tidak adanya penggantian (*replanting*). Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.116**.

Tabel 2.116.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (HS)			Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		TBM	TM	TR					
1	Simeulue	2.874,30	4.017,70	1.295,00	8.187,00	4.138,00	1.029,94	3.736	Wujud Produksi Kopra
2	Aceh Singkil	333,00	1.249,30	2.171,00	3.753,30	1.124,37	900,00	8.537	
3	Aceh Selatan	434,00	5.508,00	1.045,oo	6.987,00	3.330,00	604,58	11.763	
4	Aceh Tenggara	412,00	1.131,00	48,00	1.591,00	849,00	750,66	8.371	
5	Aceh Timur	875,95	6.475,70	224,00	7.575,65	6.522,65	1.007,25	10.808	
6	Aceh Tengah	1,55	42,05	8,40	52,00	6,80	161,71	131	
7	Aceh Barat	409,75	2.586,15	357,50	3.353,40	1.293,00	499,97	3.168	
8	Aceh Besar	2.106,97	7.127,30	3.296,01	12.530,28	5.462,38	766,40	10.720	
9	Pidie	658,00	7.285,00	794,00	8.737,00	5.901,00	810,02	19.361	
10	Bireuen	764,50	15.207,00	445,00	16.416,50	17.107,00	1.124,94	21.041	
11	Aceh Utara	272,00	13.820,00	981,00	15.073,00	9.950,00	719,97	20.757	
12	Aceh Barat Daya	102,00	1.672,00	191,00	1.965,00	903,36	540,29	1.473	
13	Gayo Lues	113,00	294,00	23,00	407,00	118,00	401,36	1.712	
14	Aceh Tamiang	272,00	472,00	1.044,60	767,00	249,77	529,17	4.281	
15	Nagan Raya	516,05	1.080,25	2.458,00	2.640,90	271,01	250,88	4.497	
16	Aceh Jaya	408,00	2.341,00	4,00	5.207,00	2.052,00	876,55	3.866	
17	Bener Meriah		9,00	278,50	13,00	3,70	411,11	10	
18	Pidie Jaya	710,00	2.850,50		3.839,00	2.517,00	883,00	7.193	
19	Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	
20	Sabang	65,00	943,00	1.072,00	2.080,00	580,00	615,06	1.840	
21	Langsa	2,70	39,18	1,35	43,23	20,17	514,80	204	
22	Lhokseumawe	22,00	571,50	8,00	601,50	372,50	651,79	805	
23	Subulussalam	89,00	418,00	274,00	781,00	299,00	715,31	1.042	
	ACEH	**11.441,77**	**75.139,63**	**16.019,36**	**102.600,76**	**63.070,71**	**839,38**	**145.316**	
	2022	11.744,17	74.901,77	16.133,75	102.779,69	62.787,78	838,27	145.420	
	2021	11.426	77.360	16.014	104.800	66.434	859	149.441	
	2020	13.154	74.839	15.576	103.568	63.769	852	148.413	
	2019	12.688	74.847	15.413	102.947	63.772	852	149.573	
	2018	12.452	74.391	15.359	102.203	63.500	854	148.818	

Sumber: Statistik Perkebunan Aceh (2024)

Komoditi yang juga menjadi incaran dunia internasional adalah Nilam. Minyak Nilam merupakan salah satu produksi atsiri terbesar yang diekspor oleh Indonesia. Minyak nilam Aceh diekspor ke berbagai negara seperti Perancis, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, India, Spanyol dan Belanda. Aceh pernah menjadi penyumbang terbesar (80 persen) dari ekspor Nilam Indonesia, namun saat ini hanya mampu menyumbang 20 persen.

Keberadaan minyak nilam Aceh sangatlah istimewa. Nilam Aceh merupakan nilam terbaik dunia yang dapat menghasilkan rendemen minyak mentah nilam (*Patchouli Oil*) di atas 3 persen dan kandungan Patchouli Alkohol (PA) di atas 30%. Keistimewaan minyak nilam Aceh kemudian diformalisasi dengan Sertifikasi Indikasi Geografis (IG) Nilam Aceh dari Menkumham RI (IG 00 2012 000004/10 September 2013).

Aceh memiliki agroklimat yang sangat sesuai untuk tanaman nilam, 16 dari 23 kabupaten/kota di Aceh merupakan wilayah penghasil Nilam. Produksi tertinggi adalah Kabupaten Aceh Selatan dengan angka mencapai 62 Ton/Tahun, kemudian Kabupaten Aceh Jaya di peringkat kedua dengan produksi mencapai 207 Ton/Tahun serta Aceh Tamiang dengan produksi mencapai 20 Ton/Tahun pada peringkat ketiga. Produktifitas minyak nilam di Aceh sangat tergantung pada kesuburan lahannya. Namun rata-rata produktifitas minyak nilam di Aceh berkisar antara 120 – 150 Kg/Ha.

Tabel 2.117.
Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Petani Kelapa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)		Produksi (Ton)	Rata -Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		Tanam	Panen				
1	Simeulue						Wujud Produksi Minyak
2	Aceh Singkil	6				8	
3	Aceh Selatan	411	321	62	193,15	1.516	
4	Aceh Tenggara	26	16	2,2	137,5	34	
5	Aceh Timur						
6	Aceh Tengah						
7	Aceh Barat	162	117	22,82	195,04	286	
8	Aceh Besar	48,5	44	8,7	197,73	69	
9	Pidie						
10	Bireuen	10	4,5	0,75	166,67	25	
11	Aceh Utara	3	1	0,2	200	25	
12	Aceh Barat Daya	55,5	48,5	5,91	121,86	135	
13	Gayo Lues	118	85	14,45	170	292	
14	Aceh Tamiang	5	2	0,16	80	29	
15	Nagan Raya						
16	Aceh Jaya	162	162	28,7	177,16	271	
17	Bener Meriah						
18	Pidie Jaya	10	7	1,4	200	49	
19	Banda Aeeh						
20	Sabang	1	0,7	0,05	70	20	
21	Langsa						
22	Lhokseumawe						

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Areal (Ha)		Produksi (Ton)	Rata -Rata Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ket.
		Tanam	Panen				
23	Subulussalam						
	ACEH	**1.018,00**	**808,7**	**147,34**	**182,19**	**2.759**	
	2022	1.321,00	1.015,00	181,4	17872	3.301	
	2021	1.212	871	159	182	3.179	
	2020	1.228	1.022	178	174	3.300	
	2019	1.219	864	225	261	3.166	
	2018	1.210	780	178	228	3.318	

Sumber: BPS, 2024

Selain komoditi yang telah diuraikan di atas, beberapa komoditi lainnya yang dibudidayakan dalam luasan yang besar di Aceh diantaranya: Pala, Pinang, Kemiri, dan Tembakau.

C. Peternakan

Komoditas peternakan masih menjadi andalan tersendiri Pemerintah Aceh, sektor peternakan berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan bagi masyarakat Aceh, dan mampu meningkatkan peningkatan perekonomian masyarakat disamping sektor lainnya. Populasi ternak di Aceh Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.118**.

Tabel 2.118.
Populasi Ternak di Aceh Tahun 2020-2024

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah Populasi (Ekor)/Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	435.376	455.177	533.593	229.295	270.224
2	Sapi Perah	19	28	19	21	11
3	Kerbau	103.866	112.402	124.161	40.969	58.456
4	Kambing Potong	634.073	649.511	657.012	190.057	200.873
5	Kambing Perah	686	451	631	1.129	546
6	Domba	102.000	100.760	118.914	16.531 2	20.233
7	Babi	1.361	1.631	2.086	4.279	2.415
8	Kuda	2.996	3.310	1.802	1.811	1297
9	Ayam Ras Pedaging	31.232.588	34.047.386	14.498.541	35.758.787	35.891.791
10	Itik	1.721.992	1.714.738	2.381.401	501.024	540.230
11	Itik Manila	613.828	465.571	540.562	540.580	N/A
12	Puyuh	95.181	80.202	92.946	92.992	N/A

Sumber: Dinas Peternakan Aceh (2025)

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan populasi ternak yang sangat signifikan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dan 2024. Sebagai contoh populasi Sapi Potong dari 533.590 pada Tahun 2022 menjadi hanya 229.295 ekor pada Tahun 2023 dan 270.224 pada Tahun 2024. Sementara itu ternak kerbau yang pada Tahun 2022 sejumlah 124.161 ekor, menjadi hanya 40.969 ekor Tahun 2023 dan 200.873 ekor pada Tahun 2024.

Dalam upaya Pemerintah mencapai swasembada daging dari hewan ruminansia dan non ruminansia Provinsi Aceh membutuhkan berbagai upaya terutama menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pemerintah Aceh terus menerus berupaya meningkatkan sektor peternakan, berbagai langkah dilakukan melalui Dinas Peterkanan dan Kesehatan Hewan melalui revitalisasi peternakan sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Produksi daging dan telur berdasarkan menurut kabupaten/kota Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.119**.

Tabel 2.119.
Produksi Daging dan Telur Berdasarkan Kab/Kota di Aceh Tahun 2020-2024

No	Jenis Daging	Jumlah Produksi (Ton)/Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	435.376	455.177	533.593	11.011	11.006
2	Sapi Perah	19	28	19	21	N/A
3	Kerbau	103.866	112.402	124.161	1.916	1.945
4	Kambing Potong	634.073	649.511	657.012	1.361	1.342
5	Kambing Perah	686	451	631	648	N/A
6	Domba	102.000	100.760	118.914	118.958	389.415
7	Babi	1.361	1.631	2.086	2.093	5.813
8	Kuda	2.996	3.310	1.802	1.811	N/A
9	Ayam Ras Pedaging	31.232.588	34.047.386	14.498.541	14.498.562	43.729.453
10	Itik	1.721.992	1.714.738	2.381.401	2.381.428	351.132
11	Itik Manila	613.828	465.571	540.562	540.580	88.115
12	Puyuh	95.181	80.202	92.946	92.992	5.034

Sumber: Dinas Peternakan Aceh (2025)

Perkembangan populasi dan produksi ternak di Aceh dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, ekonomi, serta kebijakan pengelolaan sumber daya peternakan. Dinamika ini menggambarkan pentingnya penguatan tata kelola sektor peternakan yang lebih terarah dan berkesinambungan agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin optimal.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan hewani, Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan program revitalisasi peternakan yang berfokus pada peningkatan kemampuan peternak dan dukungan kelembagaan. Upaya ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan akses terhadap teknologi modern, serta penguatan peran peternak dalam sistem agribisnis peternakan.

Dengan berbagai upaya penguatan pada subsektor peternakan, Aceh menempatkan pembangunan peternakan sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Pengelolaan subsektor ini yang dilakukan secara terintegrasi antara produksi, pengolahan, hingga pemasaran akan mendorong terciptanya nilai tambah yang berkelanjutan. Langkah strategis ini sekaligus menjadi bagian dari

komitmen Pemerintah Aceh untuk mewujudkan Aceh Maju, melalui pembangunan sektor peternakan yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut padang penggembalaan ini umumnya dikelola secara tradisional oleh peternak/kelompok petani ternak. Sebaran padang penggembalaan di seluruh Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.120**.

Tabel 2.120.
Sebaran Padang Pengembalaan Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/Kota

Rekap Pendataan Padang Penggembalaan Bidang Pakan di Kabupaten/Kota 2022	Kabupaten							
	Pidie	Pidie Jaya	Bireuen	Bener Meriah	Aceh Timur	Aceh Utara	Aceh Jaya	Nagan Raya
Luas Padang Penggembalaa n (Hektar)	1000	700	1694	4166	45917,51	556	6438	Umum: 444 Kebun sawit: 194287,49
Status Kepemilikan Padang Penggembala	Milik masyarakat: Geumpang, Padang Tiji, Laweung	Belum ditetapkan	Tanah masyarakat	Penetapan oleh Pemda	Dinas / Masyarakat	Milik Pemerintah	Pribadi (pinjam pakai)	Milik Desa dan Perusahaan
Luas HPT (Hektar)	50	22	901		50	160	173,75	25
Produksi Jerami	10% dari total produksi dimanfaatkan oleh peternak sebagai pakan	700-800 Kg	Tidak ada		Tidak ada	96.042 Ton		11.684
Jenis Rumput Dibudidayakan	King Grass, Odot dan Bracharia Humidicola (BH)	King Grass, Odot dan Bracharia Humidicola (BH)	Gajah	Odot, Gajah mini	Odot, Gajah mini	Odot, rumput Gajah, rumput Mexico	King Grass, Pakchong, Sorgum, Rumput Gajah	Rumput Gajah, rumput Raja, rumput Lampung, Odot, Gajah Thailand, BH, Indigofera, BD, Guetemala
Bantuan Yang Pernah Diterima dari Pusat	Belum ada	Tidak ada	Tidak ada	Lahan HMT 2017	Lahan HMT 2017	Tidak ada		2,5 Ha
Data Kelompok Terdaftar Pada SIMLUHTAN	Ada, Keputusan Bupati ND.520/786/Kep. 30/2020 Tanggal 7 Desember 2020	Ada	Ada	Ada sekitar seratusan, terekap di Dinas 40-50 kelompok	Ada	150 Kelompok	748 Kelompok	98 Kelompok
Data Kelompok Yang Telah Ditetapkan Kepala Daerah	Ada, Keputusan Bupati ND.520/786/Kep. 30/2020 Tanggal 7 Desember 2020	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada, harus ambil ke Kesbangpol	739 Kelompok	212 Kelompok
Jumlah Poultry Shop	7 unit	38 unit	1 unit	45 unit	48 unit	64 unit	23 unit	61 unit
Jumlah Fungsional Wastukan	Tidak ada	Tidak ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada, sedang penyetaraan fungsional	1 orang	Tidak ada
Jumlah Pabrik Pakan Mini	Tidak ada	Tidak ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Tidak ada
Jumlah Peternak Memberi Pakan Tambahan	40%	10%	70%	Tidak ada	4-5 Kelompok	Ada tergantung pada kelompok ternak dan pribadi kelompok tani ternak		94 orang

Sumber : Dinas Peternakan Aceh. 2025

Untuk memastikan keberlanjutan produksi peternakan, dibutuhkan pakan yang memadai. Saat ini umumnya masyarakat memberikan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang diperoleh dari padang penggembalaan. Jumlah HPT di Aceh sebesar 3.192 ha, yang terdapat pada 265.413 padang penggembalaan. Revitalisasi peternakan juga mencakup pengembangan Kawasan Peternakan Terintegrasi di Aceh Besar, Bener Meriah, Aceh

Jaya dan Simeulue. Keempat daerah ini fokus pada pengembangan ternak besar (Sapi dan Kerbau) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan hewani, dan juga mewujudkan swasembada daging di Aceh. Selain untuk kebutuhan dalam daerah, hasil dari Kawasan ini juga digunakan untuk ekspor dalam rangka memperkuat perekonomian Aceh.

D. Kehutanan

Luas kawasan hutan Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh adalah seluas 3.550.390.23 Ha. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi, Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK 6616/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Aceh. Kawasan hutan Aceh berdasarkan luas dan fungsi dapat dilihat pada **Tabel 2.121**.

Tabel 2.121.
Kawasan Hutan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsinya

Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase
Hutan Konservasi	1.058.364,40	29.81
Hutan Lindung	1.781.677,92	50.18
Hutan Produksi Tetap (HP)	549.794,88	15.49
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	145.178,34	4.09
Hutan Produksi Konversi	15.374,88	0.43
Jumlah	**3.550.390,23**	**100,00**

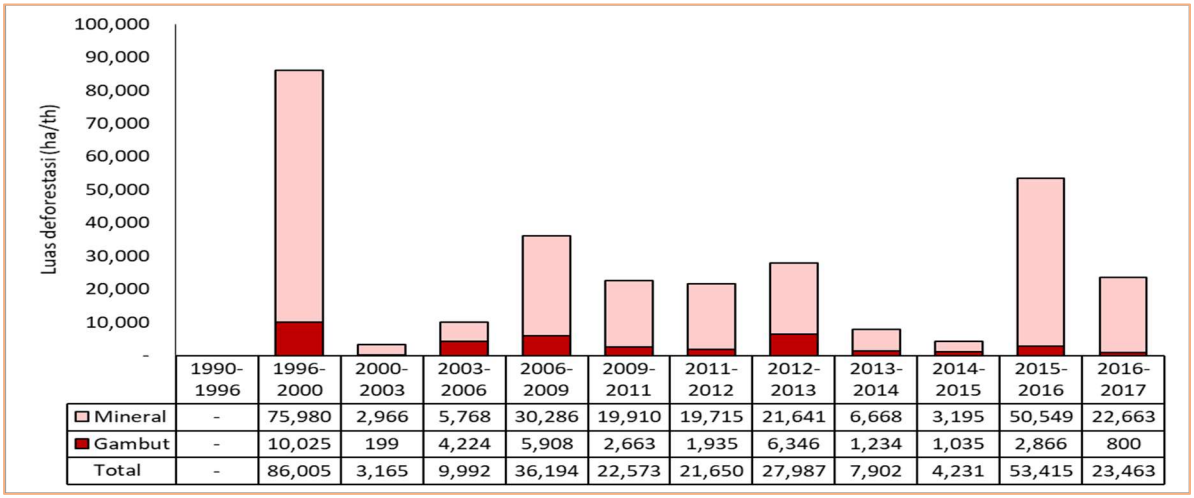
Sumber: SK Menteri LHK Nomor SK.580/MenLHK/Setjen/Set.1/12/2018

Tabel 2.121 memberikan informasi kawasan hutan Aceh didominasi oleh hutan lindung seluas 1.781.677,92 Ha atau 50.18 persen dan hutan konservasi seluas 1.058.364,40 Ha atau 29.81 persen dari total luas kawasan hutan. Luas kawasan hutan Aceh sebesar 62,55 persen dari luas total daratan sebesar 5.675.840,82 Ha. Ditinjau dari peran hutan dalam mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan maka kondisi hutan Aceh perlu dijaga dengan baik.

D1. Deforestasi

Pendekatan analisis kerusakan hutan dan lahan dilakukan menggunakan analisis perubahan tutupan lahan pada periode tertentu yang dikelompokan dan dikalkulasi dengan metodelogi tertentu menjadi nilai kehilangan tutupan hutan (*deforestasi*). Berdasarkan baseline emisi aceh menggunakan data series selama 27 tahun terakhir (1990–2017), Total Deforestasi mencapai ± 675.864 hektar, atau rata-rata 25.032 hektar per tahun (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Berbeda dengan situasi provinsi lain di Pulau Sumatera, pada periode 1990-1996 deforestasi belum terjadi di Aceh mengingat pada saat tersebut konflik bersenjata sedang terjadi sehingga aktifitas dalam sektor berbasis lahan masih sangat terbatas. Deforestasi Aceh baru dimulai pada periode 1996 -2000

dengan luas mencapai 86,000. Setelah periode tersebut luas deforestasi tahunan cenderung menurun. Luas deforetasi meningkat kembali pada periode 2006-2013 pasca peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh, sejalan dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan kondisi lahannya, rata-rata deforestasi lebih banyak terjadi di tanah mineral yang mencapai luas 21.675 ha per tahun (87%) dan dalam jumlah sedikit di tanah gambut mencapai luas 3.356 hektar per tahun (13%). sebagaimana yang tersaji pada **Gambar 2.120**.



	1990-1996	1996-2000	2000-2003	2003-2006	2006-2009	2009-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Mineral	-	75,980	2,966	5,768	30,286	19,910	19,715	21,641	6,668	3,195	50,549	22,663
Gambut	-	10,025	199	4,224	5,908	2,663	1,935	6,346	1,234	1,035	2,866	800
Total	-	86,005	3,165	9,992	36,194	22,573	21,650	27,987	7,902	4,231	53,415	23,463

ILEDSA, Bappeda Aceh Tahun 2020

Gambar 2.120. Luas deforestasi di Aceh pada periode 1990–2017

Baseline deforestasi yang terjadi di Aceh selama periode 1990 -2012 sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan negara (APL) mencapai 406.500 hektar (73 % dari luas keseluruhan), sedangkan deforestasi yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 152.366 hektar atau 27% (ILEDSA, Bappeda Aceh 2020). Deforestasi yang tinggi di luar kawasan hutan sebagian besar adalah deforestasi terencana (deforestasi plan) untuk tujuan pengembangan wilayah dan kegiatan budidaya berbasis lahan khususnya pada kawasan yang telah dibebani izin.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan terhadap perubahan kelas tutupan lahan berhutan menjadi kelas tutupan lahan tidak berhutan di Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2020, diperoleh hasil bahwa selama Tahun 2019 - 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau terdeforestasi. Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.122**.

Tabel 2.122.
Deforestasi Aceh Tahun 2013-2024

Tahun	Luas (Ha)	Luas Kawasan Hutan SK.580/MENLHK/SETJENSET.1/12/2018	Persentase
2019	15.140	3.550.390,23	0,43
2020	14.759	3.550.390,23	0,42
2021	8.617	3.550.390,23	0,24
2022	9.383	3.550.390,23	0,26

Tahun	Luas (Ha)	Luas Kawasan Hutan SK.580/MENLHK/SETJENSET.1/12/2018	Persentase
2023	8.906	3.550.390,23	0,25
2024	6.780,35	3.550.390,23	0,19

Sumber: DLHK Aceh, 2025

Tabel 2.123.
Hutan Rusak (Deforestasi) Provinsi Aceh Periode Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/ Kota	Fungsi Kawasan Hutan					Tubuh Air	APL	Jumlah (ha)
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK			
1	Aceh Barat		276,69		27,95		0,51	158,28	463,43
2	Aceh Barat Daya		14,43	16,77				35,73	66,92
3	Aceh Besar		27,62		55,70			2,11	85,43
4	Aceh Jaya		44,88	21,75	60,82		1,77	412,62	541,83
5	Aceh Selatan	542,54	54,81	94,95	6,83			606,01	1305,15
6	Aceh Singkil	2,66	1,37		52,15	4,49		67,51	128,17
7	Aceh Tamiang				31,40			70,72	102,12
8	Aceh Tengah	36,70	211,97		45,50		0,01	84,10	378,27
9	Aceh Tenggara	34,01	9,01					28,48	71 ,50
10	Aceh Timur		61,05		286,22		7,91	293,31	648,50
11	Aceh Utara		9,70		128,60			404,36	542,66
12	Bener Meriah		80,59		256,19			75,96	412,73
13	Bireuen		33,84		235,62			49,51	318,97
14	Gayo Lues	6,77	39,72	13,07	2,09			21,06	82,71
15	Subulussalam	38,30	39,44		11,67			248,99	338,39
16	Nagan Raya		110,24	48,81	69,79		0,28	133,00	362,12
17	Pidie		77,63		12,53			11,83	102,00
18	Pidie Jaya		48,17	12,66				364,85	425,68
19	Simeulue		7,28		59.69			336.81	403,78
Jumlah		**660,98**	**1148,44**	**208,01**	**1342,74**	**4,49**	**10,48**	**3405,21**	**6780,35**

Catatan:

1. *Perhitungan luas deforestasi (dalam hektar) menggunakan proyeksi Cylindrical Equal Area (World)*
2. *Data didapatkan dengan analisa spasial identity (data administrasi permendagri, data fungsi kawasan hutan SK. 6616/2021 dan penutupan lahan Tahun 2022 dan 2023*
3. *Sumber daya BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2024*

Aktifitas deforestasi tersebut terbesar terjadi di dalam Kawasan Hutan yakni seluas ± 3.375,14 hektar dan seluas ± 3.405,21 hektar lainnya terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL). Kerusakan hutan yang menjadi penyebab deforestasi di Aceh masih didominasi oleh kegiatan illegal berupa: pengembangan komoditi non kehutanan meliputi; pertanian, perkebunan, pertambangan, infrastruktur serta kebakaran hutan dan lahan.

Menurut data KLHK, Aceh memiliki tren deforestasi yang menurun. Hal tersebut menyebutkan Aceh memiliki tren persentase tutupan hutan di Aceh masih menjadi yang terbaik di Sumatera dan menduduki peringkat ke-9 di Indonesia pada 2022, karena luas hutan lahan mineral dan rawa gambut yang tersebar di bagian barat Aceh Selatan. "Sebanyak 55,00 persen hutan Aceh masih luas dibanding rata-rata hutan di Indonesia, luas hutan kita masih di atas rata-rata nasional," Kabupaten dengan dugaan kehilangan tutupan hutan terbesar adalah kabupaten Aceh Selatan dengan luas 1.883 Ha, diikuti Aceh Jaya 776 Ha dan Aceh Timur 753 Ha. Sekitar 56% dugaan hilangnya tutupan hutan terjadi di Kawasan Hutan. Taman

Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGL Aceh) yang merupakan kawasan konservasi ternyata memiliki tren kehilangan tutupan hutannya yang terus menurun.

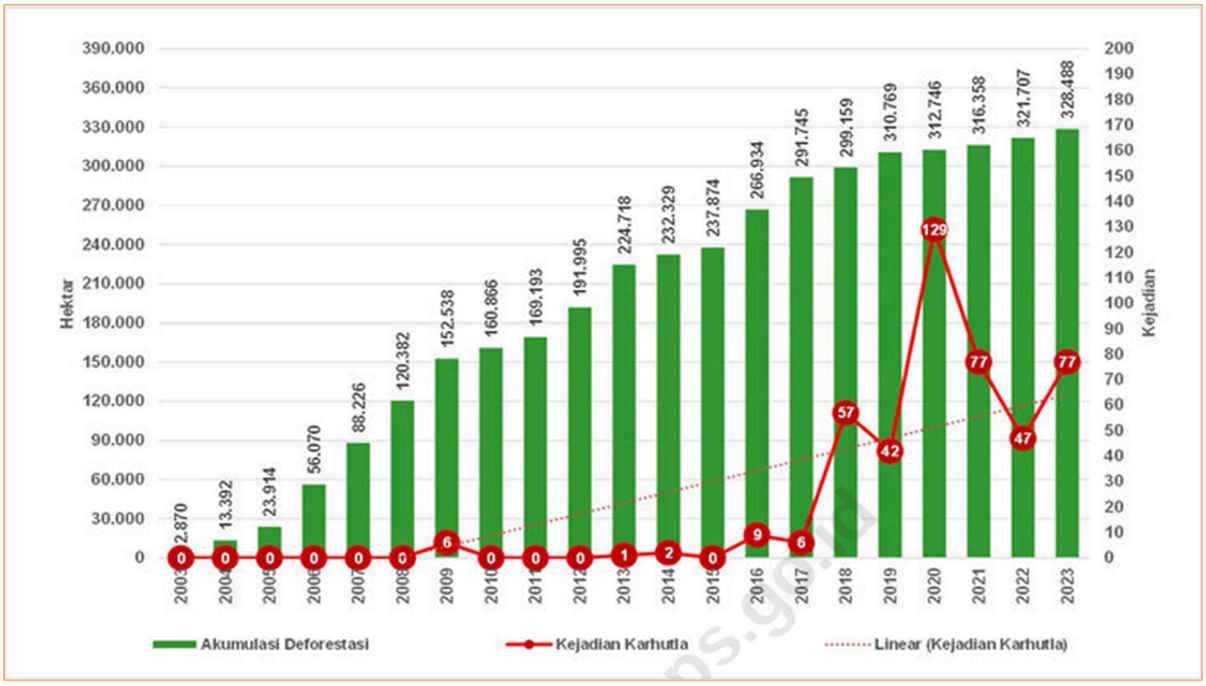
Pada Tahun 2022, kehilangan tutupan hutan di TNGL Aceh hanya tercatat seluas 179 hektare, yang merupakan angka terendah dalam delapan tahun terakhir.Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika tutupan hutan. Kebakaran umumnya terjadi pada lahan mineral dan gambut yang dipicu oleh pembukaan lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar kebakaran di Aceh merupakan tipe kebakaran bawah, terutama pada lahan gambut, yang berdampak pada munculnya asap, hilangnya vegetasi, serta berkurangnya komoditas yang dibudidayakan di atasnya. Kebakaran tipe ini memerlukan penanganan yang lebih intensif, baik dari segi waktu, teknologi, maupun biaya. Pada Tahun 2023, tercatat sebanyak 63 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total area yang terdampak seluas 214 hektare.

Lahan gambut Aceh tersebar di wilayah Barat-Selatan Aceh meliputi; Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dengan luas mencapai ± 338.164 Ha. Dari luas tersebut, sekitar ± 256.362 Ha (75,8 %) berada di APL, dengan fungsi budidaya ± 159.651 Ha. Trend kebakaran hutan dan lahan selama kurun waktu Tahun 2015-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.124**.

Tabel 2.124.
Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh Tahun 2015 -. 2024.

Provinsi	Tahun									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	1.025	9,158,45	3,865,16	1,284,70	730,00	1,078,00	788,00	175,00	1.642,65	214,00

Sumber: DLHK Aceh Tahun 2025



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.121. Kebakaran Hutan dan Lahan Aceh Tahun 2003-2023

Berdasarkan luasan, kebakaran hutan dan lahan di Aceh terjadi penurunan. Upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui peningkatan patroli oleh tenaga pengamanan hutan (PAMHUT), Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) pada masing-masing wilayah KPH. Sosisalisasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan bersama-sama TNI, POLRI dan melibatkan masyarakat terutama kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Deforestasi di Aceh Tahun 2015 sampai 2024 menurun. Deforestasi tertinggi pada Tahun 2015 mencapai 23.072 ha atau 0,648 persen dari total luas kawasan hutan. Persentase deforestasi di Aceh disajikan pada **Tabel 2.125**.

Tabel 2.125.
Persentase Deforestasi di Aceh Tahun 2015-2024

Tahun	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Persentase
2015 - 2016	23.072	3.557.928,00	0,648
2016 - 2017	15.515	3.557.928,00	0,435
2017 - 2018	7.502	3.563.813,00	0,211
2018 - 2019	11.608	3,550,390.23	0,327
2019 - 2020	1.956	3,550,390.23	0,055
2020-2021	1.956	3,550,390.23	0,055
2021-2022	1.956,83	3,550,390.23	0,055
2023-2024	6.780,35	3,550,390.23	0,190

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2025

Berdasarkan data pada **Tabel 2.125**.di atas, terlihat bahwa kerusakan kawasan hutan di Aceh dalam kurun waktu 2015 hingga 2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada periode 2015–2016, luas kerusakan kawasan hutan tercatat sebesar 23.072 hektare atau sekitar 0,648 persen dari total luas kawasan hutan sebesar 3.557.928 hektare. Pada periode berikutnya, yaitu Tahun 2016–2017, angka kerusakan mengalami penurunan signifikan menjadi 15.515 hektare atau 0,435 persen.

Periode 2017–2018 mencatat penurunan yang lebih tajam dengan luas kerusakan sebesar 7.502 hektare atau 0,211 persen, menunjukkan peningkatan efektivitas dalam upaya pengelolaan dan perlindungan hutan. Pada 2018–2019, luas kerusakan tercatat sebesar 11.608 hektare atau 0,327 persen, sebelum kembali menurun signifikan pada periode 2019–2020 menjadi 1.956 hektare atau 0,055 persen.

Tren penurunan ini berlanjut hingga periode 2020–2021 dan 2021–2022, di mana luas kerusakan tetap stabil pada angka 1.956,83 hektare atau 0,055 persen. Pada periode 2023–2024, luas kerusakan tercatat sebesar 6.780,35 hektare atau 0,190 persen. Dinamika ini mencerminkan adanya aktivitas pembangunan, seperti pembukaan lahan untuk pemukiman, perladangan, serta aktivitas ekonomi lain termasuk pemanfaatan kayu dan pemeliharaan kawasan melalui pengendalian kebakaran hutan, yang dikelola sesuai ketentuan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan di Aceh telah memperlihatkan perkembangan positif dengan tren penurunan luas kerusakan hutan dibandingkan periode awal. Stabilitas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan penguatan kebijakan pelestarian hutan, pengendalian pemanfaatan lahan, serta pengelolaan sumber daya alam.

D2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Aceh cenderung meningkat dari Tahun 2013 sampai 2017. Lahan kritis yang direhabilitasi pada Tahun 2017 seluas 23.876 ha atau 24.10 persen dari total luas hutan dan lahan kritis. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Aceh Tahun 2016 sampai 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.126**.

Tabel 2.126.
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh Tahun 2016-2024

Tahun	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	Persentase
2016	23.876	99.052.00	24.10
2017	23.876	99.052.00	24.10
2018	3.144	95,884.00	12.87
2019	12.520	94.949,00	15.89
2020	4.009	82.429,00	4,86
2021	2.456	56.753,26	4,32
2022	2.194	56.753,00	3,86
2023	3.157	164.110,00	1,92
2024	3.437	164.110,00	2,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. 2025

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih penting untuk dilakukan karena luas hutan dan lahan kritis masih tergolong tinggi. Untuk meningkatkan efektifitas rehabilitasi hutan dan lahan tersebut memerlukan beberapa strategi kunci diantaranya adalah: 1) identifikasi dan validasi serta menetapkan prioritas penanganan pemulihan lahan pada kawasan yang memiliki dampak penting; 2) melakukan analisis kesesuaian lahan dan syarat tumbuh komoditi yang akan digunakan; 3) keterlibatan masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaannya; 4) mempertimbangkan karakterisitik sosial budaya masyarakat setempat; dan 5) memberikan jaminan tidak adanya gangguan bagi lahan yang telah direhabilitasi.

Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, satwa liar yang berkonflik dengan manusia meliputi; Gajah Sumatera (Elephas masximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) Orangutan Sumatera (Pongo abelii). Dari 3 species satwa liar tersebut yang paling dominan berkonflik dengan manusia adalah gajah terutama di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Birueun, Aceh Besar, dan Aceh Selatan. Secara rinci penjelasan data konflik antara manusia dan satwa liar di aceh Tahun 2024 dan konflik satwa liar di Aceh Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.127** dan **Gambar 2.122**.

Tabel 2.127.
Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh Tahun 2024

No.	Jenis Satwa Liar	Jumlah Konflik	Kabupaten/Kota
1.	Gajah Sumatera	583	Kabupaten Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang (8 Lokasi, 5 CRU)
2.	Harimau Sumatera	113	Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Subulussalam.
3.	Orangutan Sumatera	91	Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Langsa, Pidie, Subulussalam.

Sumber: BKSDA Aceh Tahun 2024

Mengingat keberadaan habitat gajah sebagian besar berada diluar kawasan konservasi, maka penanganan konflik yang dilakukan dilaksanakan melalui pembentukan CRU (Conservation Response Unit) yang menjadi unit mitigasi konflik gajah. Aceh memiliki 7 unit CRU, yaitu: CRU Trumon di Kabupaten Aceh Selatan, CRU Alue Kuyun di Kabupaten Aceh Barat, CRU Sampoiniet di Kabupaten Aceh Jaya, CRU Mila di Kabupaten Pidie, CRU DAS Peusangan di Kabupaten Bener Meriah, CRU Cot Girek di Kabupaten Aceh Utara, dan CRU Serbajadi di Aceh Timur. Namun, dari 7 unit CRU hanya 2 unit CRU yang masih aktif, yaitu: CRU DAS Peusangan di Kabupaten Bener Meriah dan CRU Trumon di Kabupaten Aceh Selatan yang dana operasionalnya didukung oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Mitra lainnya. Penanggulangan konflik satwa liar dilakukan dengan beberapa pendekatan kegiatan seperti: penggiringan gajah/mitigasi konflik dengan menggunakan mercon, pembangunan pagar kejut (*electric fence*), penanaman tanaman yang tidak disukai gajah/komoditi berkesusaian, dan membentuk kelompok Masyarakat Peduli Konflik Gajah (MPKG). Selain itu, penting pula ke depan mengembangkan strategi yang berbasis pada kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) sehingga membuka akses dan jaminan partisipasi bermakna kepada semua individu yang terdampak dari konflik satwa tersebut.

Selain unit CRU dan beberapa kegiatan tersebut di atas sebagai upaya penanggulangan konflik manusia dan satwa liar jangka pendek dan menengah, pemerintah Aceh bersama pihak terkait telah melakukan pendekatan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang melalui inisiatif koridor hidupan liar. Inisiatif pendekatan koridor hidupan liar ini didasarkan kepada kebutuhan peran dan dukungan para pihak. Sebagaimana diketahui, intensitas kejadian konflik manusia-satwa liar (terutama gajah) terjadi pada kawasan atau areal yang berbeda kewenangan dengan areal/kawasan konservasi. Intensitas kejadian konflik ini terjadi di 19 kabupaten/kota yang disebabkan oleh beberapa penyebab, diantaranya deforestasi, kegiatan pembangunan termasuk di dalamnya permukiman, jalan raya, dan penambangan.

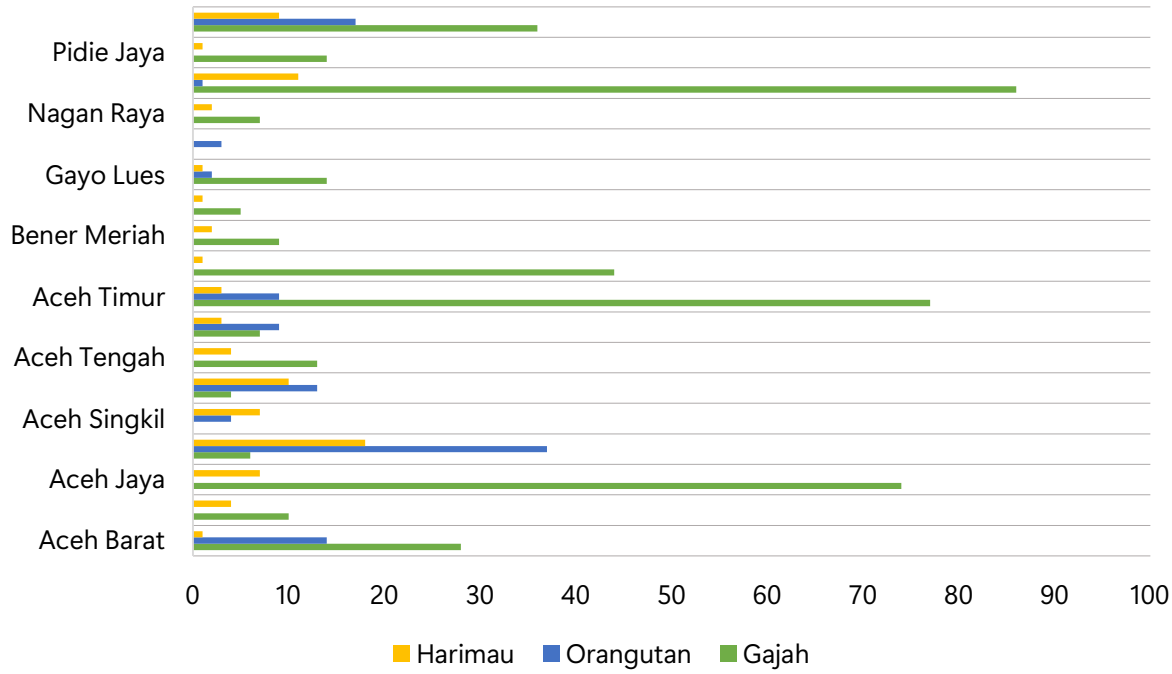
Salah satu amanah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Pemerintah Aceh diwajibkan menyusun Pergub tentang Strategi Rencana Aksi Pengelolaan (SRAP) satwa liar, salah satu rencana aksi yang akan dilaksanakan, yaitu penetapan Koridor hidupan liar.

Pengelolaan koridor hidupan liar sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengawetan satwa liar di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Disamping itu, pengelolaan koridor satwa liar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kehilangan habitat dan fragmentasi habitat satwa liar. Saat ini, pemerintah Aceh bersama mitra pembangunan telah menginisiasi kegiatan yang mendukung koridor hidupan liar.

Koridor hidupan liar meliputi Kawasan tertentu yang tinggi keragaman hayati dan merupakan ruang atau jalur gerak mamalia besar di dalam Kawasan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan koridor hidupan liar dimaksudkan untuk mengurangi konflik manusia-satwa. Penetapan koridor perlu didiskusikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan pemangku kepentingan setempat. Penetapan koridor tidak merubah status dan fungsi pokok Kawasan, tidak mengurangi akses penghubung masyarakat, serta tidak mengurangi hak masyarakat yang sudah ada. Ketentuan khusus koridor mengikuti ketentuan pada pola ruang utama.

Penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar diutamakan pada ekosistem yang merupakan habitat dari beberapa spesies kunci yang merupakan jenis satwa prioritas terancam punah yang dilindungi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 180/IV/KKH/2015.



Sumber: DLHK Aceh,2025

Gambar 2.122. Konflik Satwa Liar di Aceh Tahun 2017-2024

Pengelolaan koridor hidupan liar sangat diperlukan dalam upaya perlindungan dan pengawetan satwa liar di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Disamping itu, pengelolaan koridor satwa liar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kehilangan habitat dan fragmentasi habitat satwa liar.

Kawasan koridor merupakan areal yang dapat berfungsi sebagai jembatan bagi pergerakan satwa-satwa yang melintas dari satu kawasan habitat ke habitat lainnya atau sebagai tempat mereka bermigrasi (sebagai pengguna koridor atau user), dapat berupa jalan

yang dapat dilalui baik oleh satwa arboreal maupun terestrial. Untuk satwa terestrial yang perlu diperhatikan adalah kawasan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber pakan dan air untuk mereka makan dan minum maupun dapat digunakan sebagai tempat istirahat saat mereka melintas menuju hutan fragmen atau blok hutan lainnya, Bagi satwa arboreal diperlukan kesinambungan tajuk untuk menjamin keamanan pergerakan mereka dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya.

Pengelolaan koridor hidupan liar sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang adalah untuk meningkatkan kualitas habitat dan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati (*population viability*) melalui upaya mengurangi ancaman dan gangguan sehingga memungkinkan pergerakan satwa liar dalam suatu bentang alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Koridor Hidupan Liar.

D3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

PDRB Aceh beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. PDRB ADHB mengalami peningkatan dari Tahun 2020 senilai Rp.166.372,32 (Milyar) menjadi Rp.243.202,09 (Milyar) pada Tahun 2024. PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari Tahun 2020 senilai Rp.131.580,97 (Milyar) menjadi Rp.153.780,44 (Milyar) pada Tahun 2024. PDRB Aceh dan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Aceh Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.128**.

Tabel 2.128.
PDRB Aceh dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Aceh Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha/industri	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB (Milyar Rp)	166.372,32	184.979,88	209.698,36	227.018,20	243.202,09
2	PDRB ADHK (Milyar Rp)	131.580,97	135.274,04	140.971,72	146,932,42	153.780,44
3	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (Miliar Rp)	2.074,44	1.768,15	1.959,68	2.144,53	1.989,33
4	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHK (Miliar Rp)	1.667,01	1.382,88	1.412,75	1.434,46	1.338,76
5	Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB (%)	1,25	0,96	0,93	0,94	0,82
6	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	-0,67	-17,04	2,16	1,54	-6,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Tabel 2.128, memberikan informasi kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB mengalami penurunan. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHB dari Tahun 2020 senilai Rp.2.074,44 (Milyar) menjadi Rp.1.989,33 (Milyar) pada Tahun 2024. Distribusi persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB dari Tahun 2020 sebesar 1,25 persen menjadi 0,82 persen pada Tahun 2024. Selanjutnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHK juga mengalami penurunan dari Tahun 2020 senilai Rp.1.667,01 (Milyar) menjadi Rp.1.338,76 (Milyar) pada Tahun 2024. Kontribusi sektor kehutanan terhadap laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar -0,67 persen menjadi -6,67 persen.

D4. Rasio Luas Kawasan Lindung

Pada Tahun 2015, Kementerian Kehutanan mencatat bahwa luas Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil hanya tersisa 81.338 hektar, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 103/MenLHK-II/2015. Artinya, dalam waktu 18 tahun (1997-2015), kawasan tersebut telah mengalami penyusutan sebesar 21.162 hektar akibat aktivitas perambahan.

Data dari Januari hingga Juli 2022 menunjukkan tutupan hutan SM Rawa Singkil berkurang sebanyak 338 hektar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya: 165 hektar di Tahun 2021, 43 hektar di 2020, dan hanya 28 hektar di 2019.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (SK No: SK 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021) tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Aceh, SM Rawa Singkil kini memiliki luas 82.188 hektar. Kawasan ini terbagi di tiga daerah: Kabupaten Aceh Selatan (58.112 hektar), Kabupaten Aceh Singkil (20.867 hektar), dan Kota Subulussalam (3.206 hektar). Kawasan ini mencakup beberapa kecamatan, yaitu Trumon, Trumon Tengah, Trumon Timur, Kuala Baru, Singkil, Kota Baharu, Rundeng, dan Longkib, sebagaimana yang tersaji **Tabel 2.129**.

Tabel 2.129.
Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan 2016-2024

Tahun	Luas kawasan lindung (ha)	Total luas kawasan hutan (ha)	Rasio
2016	1.788.265.00	3.557.928.00	0.5
2017	1.794.350.00	3.563.813.00	0.5
2018	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18
2019	1,781,677.92	3,550,390.23	50.18
2020 2021	2.840.042,32	3,550,390.23	79,99
2022	2.840.042,32	3,550,390.23	79,99
2023	2.642.964,03	3.333.973.89	79,27
2024	2.642.964,03	3.333.973.89	79,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025

Tabel 2.129 memberikan informasi perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap total kawasan hutan di Aceh dari Tahun 2016 hingga 2024. Pada Tahun 2016, sekitar 50 persen dari total kawasan hutan di Aceh telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Angka ini meningkat signifikan pada Tahun 2021, mencapai hampir 80 persen, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan terhadap kawasan hutan. Meskipun luas kawasan lindung tetap stabil sekitar 2,8 juta hektar pada Tahun 2021 hingga 2024, rasio perlindungan tetap di kisaran 79 persen, menunjukkan bahwa mayoritas kawasan hutan di Aceh kini telah dilindungi dengan baik.

D5. Penyelesaian Konflik Tenurial

Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengunaan kawasan hutan. Jenis konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan Aceh seperti batas kawasan, pemilikan, dan

penguasaan lahan, perizinan, akibat tumpang tindih kebijakan, pemanfaatan dan pengelolaaan sumber daya hutan oleh masyarakat hukum adat dan perhutanan sosial. Pencegahan konflik tenurial dalam kawasan hutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melalui UPTD KPH dengan upaya pemetaan potensi konflik, sosialisasi penyuluhan, pemantapan batas kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, salah satu skema penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menindaklanjuti peraturan diatas Gubernur membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada Tahun 2017 dan berlanjut hingga Tahun 2019 melalui SK Nomor 522.12/1351/2019. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sebagai ketua Tim Inver.

Tujuan dari skema TORA didalam Kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat didalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa konflik dalam kawasan hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK /SETJEN/PLA.2/9/2021 tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdapat seluas 95.387 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota yang terdiri dari beberapa kriteria penguasaan lahan seperti yang tersaji dalam **Tabel 2.130**.

Tabel 2.130.
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh, 2024

Kabupaten	Kawasan HPK tidak produktif	Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan dan Tambak	Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi	Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Ket-
Aceh Barat				121	121
Aceh Barat Daya		113		0	113
Aceh Besar	1.276	7.524		128	8.928
Aceh Jaya		939		479	1.418
Aceh Selatan		522		36	558
Aceh Singkil	2.704	10.070	2.446	36	15.256
Aceh Tamiang		5.427	940	38	6.405
Aceh Tengah		20.969		93	21.062
Aceh Tenggara		3.056		55	3.111
Aceh Timur		11.340	1.813	174	13.327
Aceh Utara		186		4	190
Bener Meriah		2.641		53	2.694

Kabupaten	Kawasan HPK tidak produktif	Lahan Garapan Pertanian, Perkebunan dan Tambak	Permukiman Transmigrasi Beserta Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi	Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Ket-
Bireuen		370			370
Gayo Lues	654	1.285	544	508	2.991
Kota Langsa		813		2	815
Kota Sabang		46		22	68
Subulussalam	2.460	940	3.644	8	7.052
Nagan Raya		159	2.896		3.055
Pidie		3.135	3.672	182	6.989
Simeulue		423		441	864
Grand Total	7.094	69.958	15.955	2.380	95.387

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025

Penanganan konflik tenurial melalui skema TORA yang dimulai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan Gubernur untuk dilanjutkan proses penyelesaiannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 1.579,47 Ha diselesaikan melalui perubahan batas dan 319,18 Ha diselesaikan melalui skema Perhutanan Sosial, dan hingga Tahun 2021 baru satu Kabupaten yang telah terbit SK dari Menteri LHK dengan rincian yang tersaji pada **Tabel 2.131**.

Tabel 2.131.
Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh

No	Kab/Kota	Surat Rekom Gubernur	Pertimbangan Tim Percepatan PPTKH (Ha)		Persetujuan MenLHK (Ha)		Keputusan MenLHK Atas Penataan Batas Perubahan Batas		
			Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	Perubahan Batas	Perhutanan Sosial	SK	Tangga	Luas (Ha)
1	Aceh Tamiang	522.12/4433 tanggal 19 Maret 2019	1.326,99	47,54	1.326,99	47,54	SK.188/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/4/2020	13 April 2020	1.365,546
2	Aceh Timur	522.12/4434 tanggal 19 Maret 2019	139,03	178,06	139,03	178,06			
3	Langsa	522.12/4435 tanggal 19 Maret 2019	7,51	0.00	7,51	0.00			
4	Aceh Utara	522/1614 tanggal 30 Januari 2020	78,77	88,77	78,77	88,77			
5	Sabang	522.12/21064 tanggal 3 Desember 2019	27,17	4,81	27,17	4,81			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025

D6. Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan program strategis pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian, penyuluh kehutanan berperan sebagai peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaaan hutan. Dalam perannya sebagai fasilitator, terdapat 55 (lima puluh lima) izin yang sudah dikeluarkan oleh kementerian LHK, 10 izin telah didampingi oleh penyuluh, dan 25 izin didampingi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan 15 izin lagi belum dapat didampingi dikarenakan keterbatasan tenaga penyuluh. Untuk hal tersebut, DLHK Aceh akan bermitra dengan PKSM dalam rangka memfasilitasi kelompok binaannya. Selain itu, Penyuluh kehutanan juga berfungsi sebagai pendamping dalam penyusunan Rencana Kegiatan Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu **Tabel 2.132** secara rinci memberikan penjelasan capaian izin perhutanan sosial aceh Tahun 2017-2024.

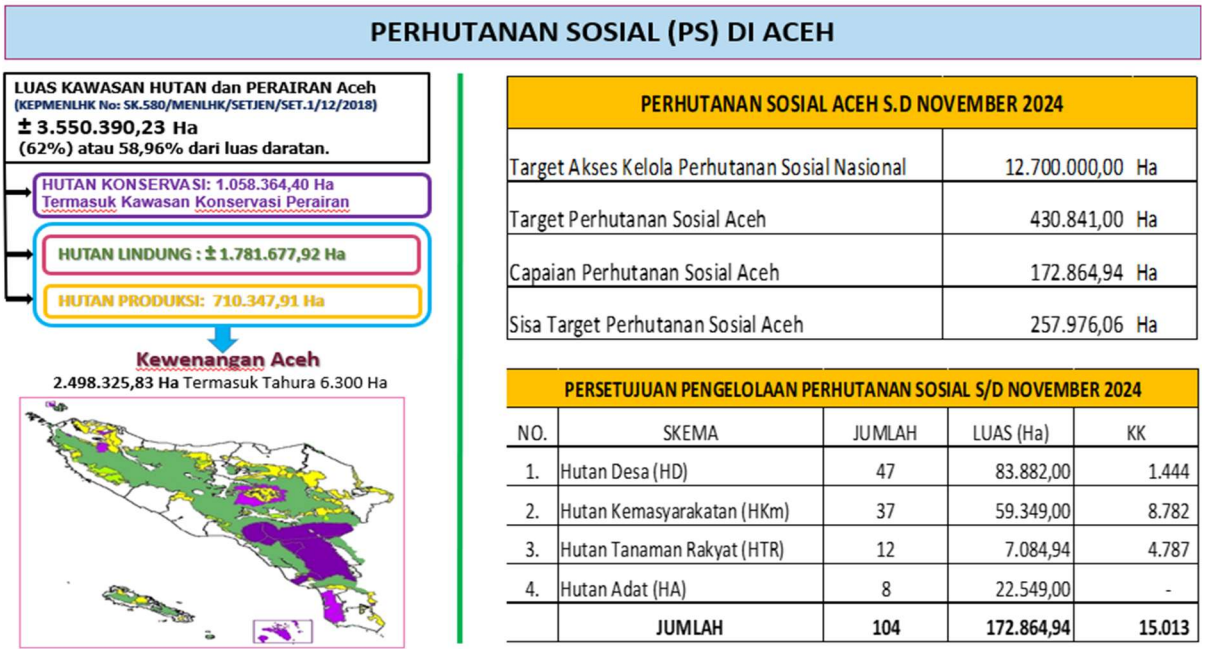
Tabel 2.132.
Capaian Izin Perhutanan Sosia Aceh Tahun 2017 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Izin	Luasan (Ha)	Jumlah KK
1	2017	28	38.065	8.833
2	2018	22	72.717	5.535
3	2019	3	2.281	234
4	2021	11	14.659	1.400
5	2022	21	42.693,13	2.033
6	2023	25	28.000	2.800
7	2024	27	30.000	3.500
Jumlah		**137**	**228.415,13**	**24.335**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 2025

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dan menuju kelestarian hutan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menunjukkan bahwa dari Target akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional dengan luas 12.700.000 Ha,Target Perhutanan Sosial Aceh seluas 430.841,00 Ha capaian Program Perhutanan Sosial sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 104 izin dengan luasan 172.864,94 Ha yang terbagi dalam Hutan Desa (HD) 47 izin dengan luas 83.882 Ha, Hutan Kemasyarakatan (HKm) 37 izin dengan luas 59.960,9 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 12 izin dengan luas 7.085 Ha. Dengan capaian outcome penerimaan manfaat dari Kelompok Tani Hutan berjumlah 15.013 KK, Aceh memiliki potensi perluasan dan capaian Perhutanan Sosial pada skema Hutan Adat, berdasarkan data dari Go KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) diakses pada bulan Desember 2024 menunjukkan bahwa ada sekitar 112.610,98 Ha luasan indikatif Hutan Adat di Aceh sebagaimana yang tersaji dalam **Gambar 2.123**.



PERHUTANAN SOSIAL ACEH S.D NOVEMBER 2024	
Target Akses Kelola Perhutanan Sosial Nasional	12.700.000,00 Ha
Target Perhutanan Sosial Aceh	430.841,00 Ha
Capaian Perhutanan Sosial Aceh	172.864,94 Ha
Sisa Target Perhutanan Sosial Aceh	257.976,06 Ha

PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL S/D NOVEMBER 2024				
NO.	SKEMA	JUMLAH	LUAS (Ha)	KK
1.	Hutan Desa (HD)	47	83.882,00	1.444
2.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	37	59.349,00	8.782
3.	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	12	7.084,94	4.787
4.	Hutan Adat (HA)	8	22.549,00	-
	JUMLAH	**104**	**172.864,94**	**15.013**

Gambar 2.123. Capaian Perhutanan Sosial Aceh sd. 2024

D7. Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Wilayah Aceh ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Aceh nomor 01 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan kerja perangkat aceh, cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah sebagai perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018. Peraturan Gubernur ini menetapkan:

1. UPTD Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan; merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2. UPTD Balai Penanganan Sampah Regional Blang Bintang; merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
3. UPTD KPH Wilayah I; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Banda Aceh, dengan wilayah kerja meliputi Unit I KPHP dan Unit XV KPHL mencakup wilayah administratif Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar.
4. UPTD KPH Wilayah II; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Pidie dengan wilayah kerja meliputi Unit II KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.
5. UPTD KPH Wilayah III; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Jaya dengan wilayah kerja meliputi Unit X KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Jaya.
6. UPTD KPH Wilayah IV; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Barat, dengan wilayah kerja meliputi Unit XI KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya

7. UPTD KPH Wilayah V; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Utara, dengan wilayah kerja meliputi Unit III KPHP mencakup wilayah administratif Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
8. UPTD KPH Wilayah VI; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Bener Meriah, dengan wilayah kerja meliputi Unit VI KPHL dan Unit VII KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.
9. UPTD KPH Wilayah VII; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Langsa dengan wilayah kerja meliputi Unit IV KPHL dan Unit V KPHL mencakup wilayah administratif Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang
10. UPTD KPH Wilayah VIII; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Gayo Lues dengan wilayah kerja meliputi Unit VIII KPHL dan Unit IX KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara.
11. UPTD KPH Wilayah IX; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Selatan dengan wilayah kerja meliputi Unit XII KPHL dan Unit XIII KPHP mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
12. UPTD KPH Wilayah X; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Simeulue dengan wilayah kerja meliputi Unit XIV KPHL mencakup wilayah administratif Kabupaten Simeulue
13. UPTD KPHK Tahura PMI; merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Saree Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Hutan Seulawah Agam dan Kelompok Hutan Seulawah Inong di Kabupaten Aceh Besar, Kelompok Hutan Seulawah Inong di Kabupaten Pidie dan kawasan penyangganya.

UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah I sampai dengan UPTD Kawasan Pengelolaan Hutan Wilayah X mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan hutan meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pengolahan hasil hutan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan kehutanan, peredaran serta pemasaran hasil hutan.

E. Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Kelautan dan perikanan berkontribusi besar dalam penyediaan bahan pangan, penyumbang devisa, peningkatan pendapatan, pembuka lapangan pekerjaan, dan sumber potensi wisata yang sangat besar. Pada saat krisis ekonomi seperti halnya akibat pandemi covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, peranan sub sektor kelautan dan perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. Hal ini dikarenakan laut dan pantai menyimpan potensi

sumber daya alam baik berupa perikanan maupun lainnya dalam jumlah yang melimpah. Sektor kelautan dan perikanan telah menjadi prioritas Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota.

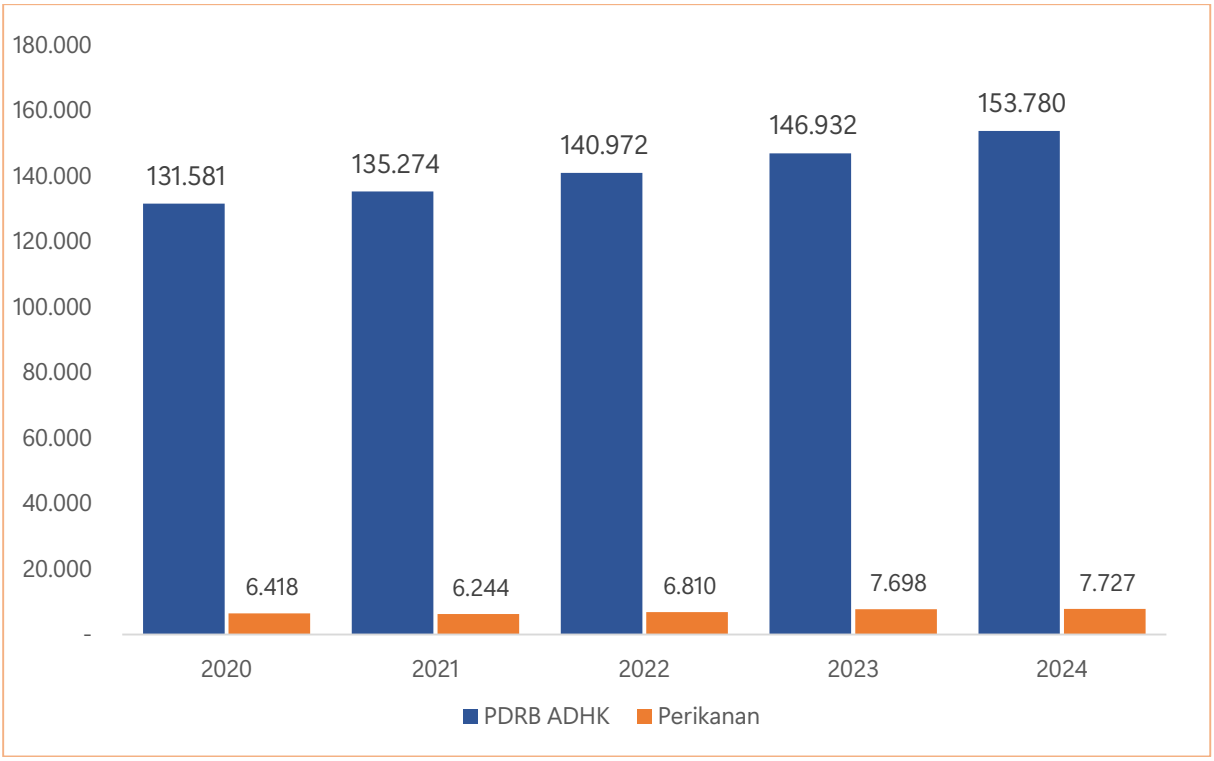
Kebijakan Ekonomi Biru di Aceh bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan sambil menjaga kelestarian ekosistem. Beberapa kebijakan yang diterapkan meliputi penangkapan ikan terukur, perluasan kawasan konservasi, dan pemanfaatan energi laut terbarukan.

Adapun beberapa kebijakan Pemerintah Aceh :

1. Penangkapan Ikan Terukur (PIT): Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur penangkapan ikan secara lebih terukur dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengaturan kuota penangkapan ikan dan sosialisasi kepada nelayan serta pihak terkait.
2. Perluasan Kawasan Konservasi Laut: Upaya untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut yang sehat, sehingga berbagai jenis kehidupan laut dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pemanfaatan Energi Laut Terbarukan: Aceh memiliki potensi energi laut yang besar, seperti energi angin dan energi laut, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil
4. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan Universitas Syiah Kuala (USK) untuk memastikan implementasi ekonomi biru berjalan dengan baik dan efektif
5. Hukum Adat Laut: Aceh juga memiliki aturan hukum adat laut (hukom adat laot) yang mengatur pemanfaatan laut, termasuk hari pantang melaut untuk memberi kesempatan bagi ikan untuk berkembang.

Aceh memiliki luas wilayah laut mencapai 295.000 km^2 dengan panjang garis pantai mencapai 2.666 km. Bentangan geografis ini menjadikan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Kelautan dan perikanan menjadi salah satu sub sektor penting dalam sektor pertanian yang memiliki peranan krusial dalam pembangunan perekonomian Aceh bahkan nasional. Sub sektor ini menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk di Aceh, terutama masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir utara timur dan barat selatan Aceh. Sub sektor ini memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Aceh saat ini.

Besarnya peranan sektor tersebut tergambar dari nilainya yang terus mengalami perkembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan sebesar 6,418 Triliun (4,88 persen) dari total PDRB yang mencapai 131,58 Triliun. Kontribusi sub sector perikanan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7,27 Triliun (5,02 persen) dari total nilai PDRB Aceh Tahun 2024 yang mencapai 153,78 Triliun. Besarnya pencapaian nilai sub sektor perikanan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada **Gambar 2.124**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Gambar 2.124. Perkembangan Nilai PDRB ADHK Sub Sektor Perikanan dan Nilai PDRB Aceh Tahun 2020-2024 (Rp Triliun)

Peningkatan kontribusi sub sector perikanan terhadap total PDRB Aceh disebabkan adanya peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap didominasi oleh beberapa jenis ikan, diantaranya; Tuna, Tongkol, Cakalang, Kakap, Kerapu, Bawal, Kuwe, Teri, dan Cumi. Diantara berbagai jenis ikan tersebut, kelompok terbesar didominasi oleh Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC). Besarnya produksi TTC pada Tahun 2024 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada **Tabel 2.133**.

Tabel 2.133.
Produksi Ikan Tuna/Tongkol/Cakalang Menurut Kabupaten/Kota Di Aceh

Kabupaten/Kota	Produksi (Kg)	Persentase Produksi (%)	Nilai Produksi (Rp)
Aceh Selatan	7.155.459	16,7	9.093.927.000
Bireuen	6.144.995	14,35	8.065.998.000
Aceh Timur	5.543.885	12,94	5.408.722.000
Pidie Jaya	5.441.702	12,7	14.860.934.000
Pidie	3.781.234	8,83	7.581.110.000
Simeulue	3.727.144	8,7	6.087.851.000
Kota Banda Aceh	2.251.280	5,26	3.290.520.000
Kota Lhokseumawe	1.519.075	3,55	9.466.316.000
Aceh Tamiang	1.242.461	2,9	10.565.474.000
Aceh Jaya	1.220.020	2,85	12.538.482.000
Aceh Barat	1.078.080	2,52	6.732.574.000
Kota Sabang	906.194	2,12	7.704.536.000

Kabupaten/Kota	Produksi (Kg)	Persentase Produksi (%)	Nilai Produksi (Rp)
Aceh Barat Daya	902.576	2,11	11.122.537.000
Aceh Utara	692.859	1,62	6.634.846.000
Aceh Besar	514.368	1,2	288.275.000
Aceh Singkil	458.568	1,07	2.362.251.000
Kota Langsa	242.950	0,57	11.525.508.000
Nagan Raya	12.295	0,03	14.581.412.000
Total	**42.835.145**	**100**	**147.911.273.000**

Sumber: Statistik KKP, data diolah, 2024

Dari kelompok TTC, Ikan Tuna Sirip Kuning merupakan komoditi ekspor andalan Aceh yang saat ini telah dipasarkan hingga ke Jepang dan Amerika Serikat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah produksi ikan tuna sirip kuning terjadi pada Tahun 2024 dengan jumlah produksi 42.832 ton, sementara itu jumlah produksi terendah terjadi pada Tahun 2020 dengan jumlah produksi 14.264 ton. **Tabel 2.134** menunjukkan jumlah produksi (Ton) untuk ikan tuna sirip kuning pada Tahun 2020 hingga 2024

Tabel 2.134.
Jumlah Produksi Ikan Tuna Sirip Kuning di Aceh Tahun 2020 – 2024

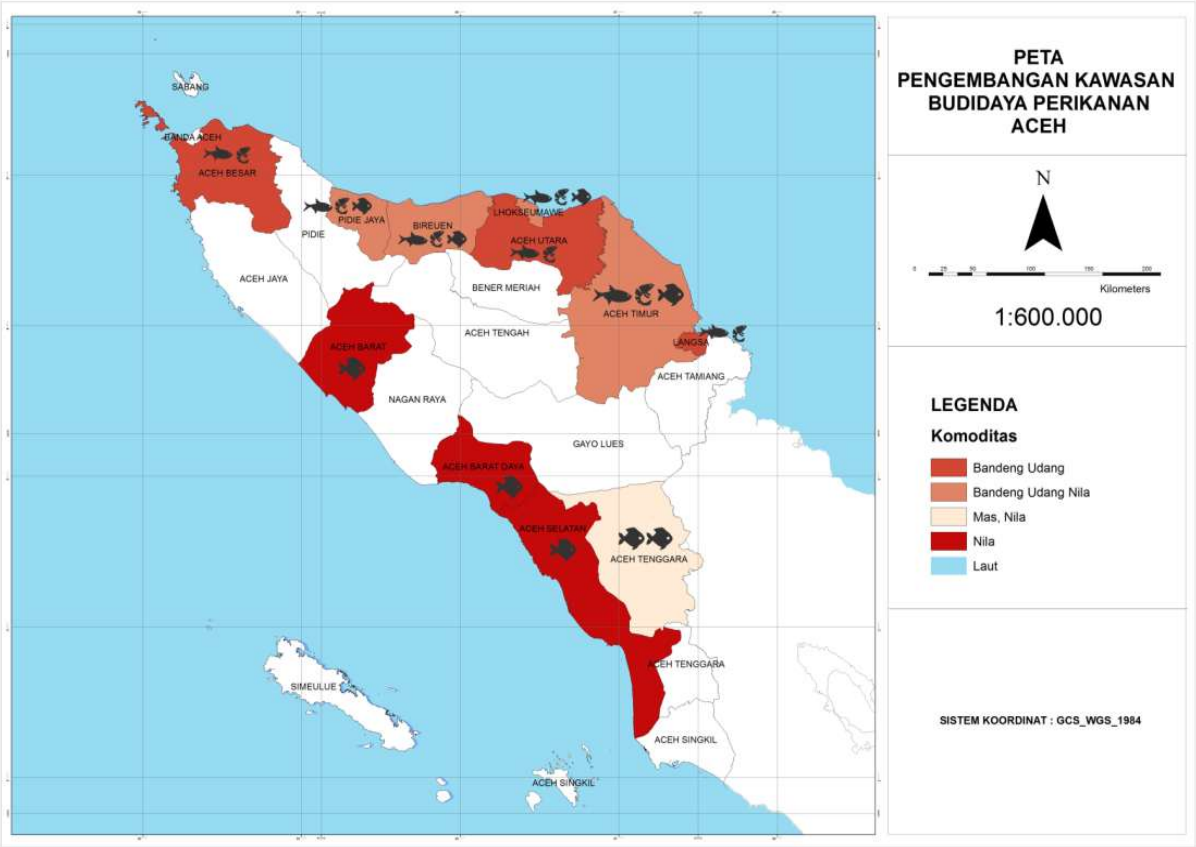
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Tuna (Ton)	14.264	15.343	16.275	18.392	42.832

Sumber: DKP Aceh (2025)

Jumlah produksi ikan tuna, terutama tuna sirip kuning dinilai masih rendah dibandingkan dengan potensi pada Maximum Sustainable Yield (MSY) atau produksi maksimum lestari. Besarnya potensi sumber daya ikan tuna yang diestimasi dalam bentuk MSY mengacu pada RFMO termasuk WPP 571 dan WPP 572 untuk ikan tuna sirip kuning (Thunnus albacares) diperkirakan sebanyak 344.000 ton/tahun dan sebanyak 132.000 ton/tahun untuk ikan tuna mata besar (*Thunnus obesus*).

Kawasan budidaya di pesisir timur banyak didominasi oleh komoditas ikan bandeng. ikan nila. dan udang. Di wilayah pesisir timur ini terdiri dari Kemukiman Glee Bruek. Jambo Aye. Jangka. Julok Cut. Lampanah Leungah. Lancok. Seunebok Antara. Muara Satu. dan Musa. Sedangkan wilayah pesisir barat selatan terdiri dari Kemukinan Pasie. Krueng Batee. dan Indra Damai dengan komoditas ikan nila. Pengembangan kawasan berbasis mukim tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2.125**.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan adalah dengan usaha perikanan budidaya, yakni; dengan pengembangan kawasan perikanan berbasis mukim. Pengembangannya dilakukan di berbagai kabupaten/kota yang memiliki komoditas perikanan budidaya unggulan. Adapun sebaran wilayah yang menjadi klaster pengembangannya tersebar di sepanjang wilayah pesisir timur dan sebagian lainnya berada di pesisir barat dan selatan Aceh.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (diolah)

Gambar 2.125. Peta Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Berbasis Mukim

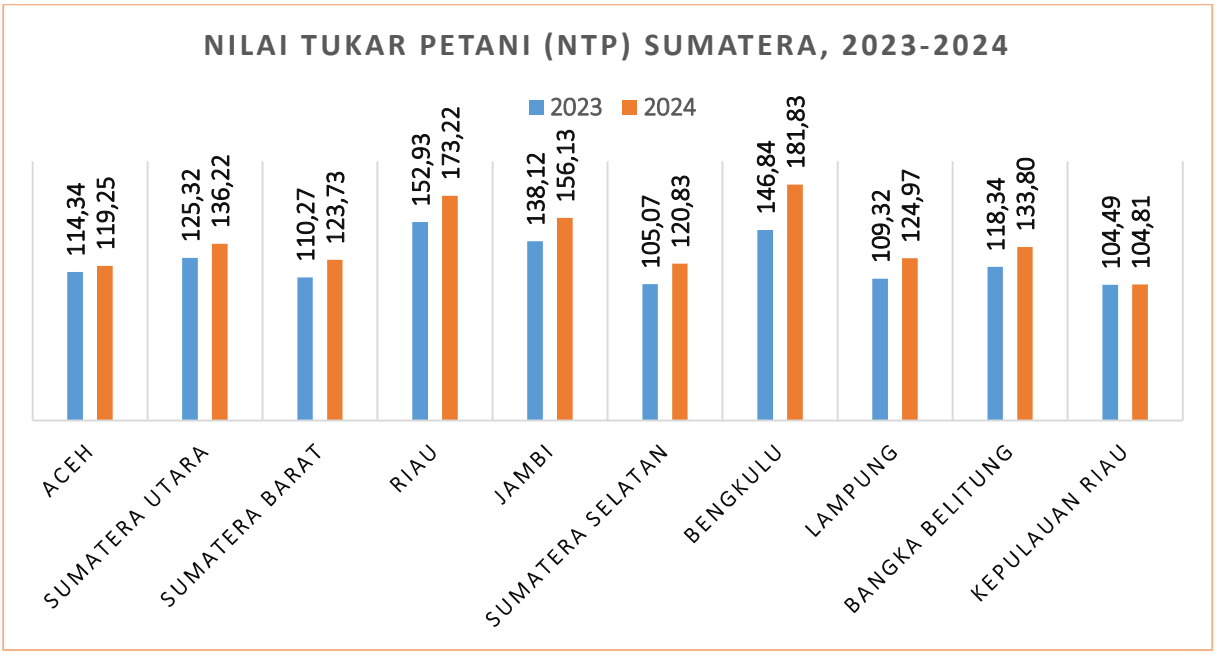
Secara umum peningkatan produksi perikanan juga akan berdampak terhadap angka konsumsi ikan. Peningkatan tersebut terlihat dari angka konsumsi yang terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2022 angka konsumsi ikan di Aceh sebesar 65,93 Kg/Kapita/tahun dan terus meningkat menjadi 58,97 Kg/Kapita/tahun di Tahun 2019. Angka tersebut telah melewati angka yang ditargetkan nasional sebesar 47 Kg/Kapita/tahun

F. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan alah satu indikator yang penting bagi daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian seperti halnya Aceh. NTP mencerminkan tingkat kemampuan petani dalam memperoleh barang dan jasa dari hasil penjualan produk pertaniannya. Pada dasarnya nilai NTP juga merupakan gambaran tentang pendapatan yang diperoleh petani dari hasil berproduksi dan yang dikeluarkannya untuk kebutuhan konsumsi. Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi/diproduksi oleh petani.

Secara umum, NTP di Sumatera Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. NTP tertinggi dialami oleh Provinsi Bengkulu, dari 146,84

pada Tahun 2023 menjadi 181,83 pada Tahun 2024. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh Provinsi Riau, yaitu: dari 152,93 pada Tahun 2023 menjadi 172,93 pada Tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Gambar 2.126. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sumatera, 2023-2024

Sementara itu, NTP terendah dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: 104,49 pada Tahun 2023, naik sedikit menjadi 104,81 pada Tahun 2024. Aceh menempati posisi terendah kedua atau urutan ke 9 dari 10 provinsi di Sumatera, dengan NTP sebesar 114,34 pada Tahun 2023 dan meningkat menjadi 119,25 pada Tahun 2024.

NTP Aceh terus mengalami perbaikan yang terlihat dari grafik perkembangan yang terus mengalami kenaikan dalam 5 Tahun terakhir. Pada Tahun 2020, NTP Aceh berada pada angka 92,29 dan meningkat menjadi 107,45 pada Tahun 2022. NTP Aceh terus mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2024 menjadi 119,25. Meskipun terjadi peningkatan, perkembangan NTP Aceh dinilai lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan NTP provinsi lainnya di Sumatera.

Perlambatan kenaikan NTP utamanya disebabkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) lebih cepat dibandingkan dengan Indeks Harga yang Diterima Petani (It). Kenaikan Indeks Harga Konsuman (IHK), yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok, diperkirakan memengaruhi daya beli petani secara keseluruhan.

Perkembangan NTP dipengaruhi oleh harga-harga komoditas pertanian yang fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya: iklim, harga dan kualitas. Harga komoditas akan mengalami kenaikan pada saat terjadinya kelangkaan akibat adanya musim kemarau, musim angin barat, gelombang laut tinggi, serta produksi menurun. Sebaliknya, harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen. Hal ini mengakibatkan pendapatan petani tidak tetap, sehingga diperlukan alternatif program yang menjaga kestabilan angka yang diterima oleh Petani serta menekan pengeluaran.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025 (diolah)

Gambar 2.127. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Aceh Tahun 2020-2024

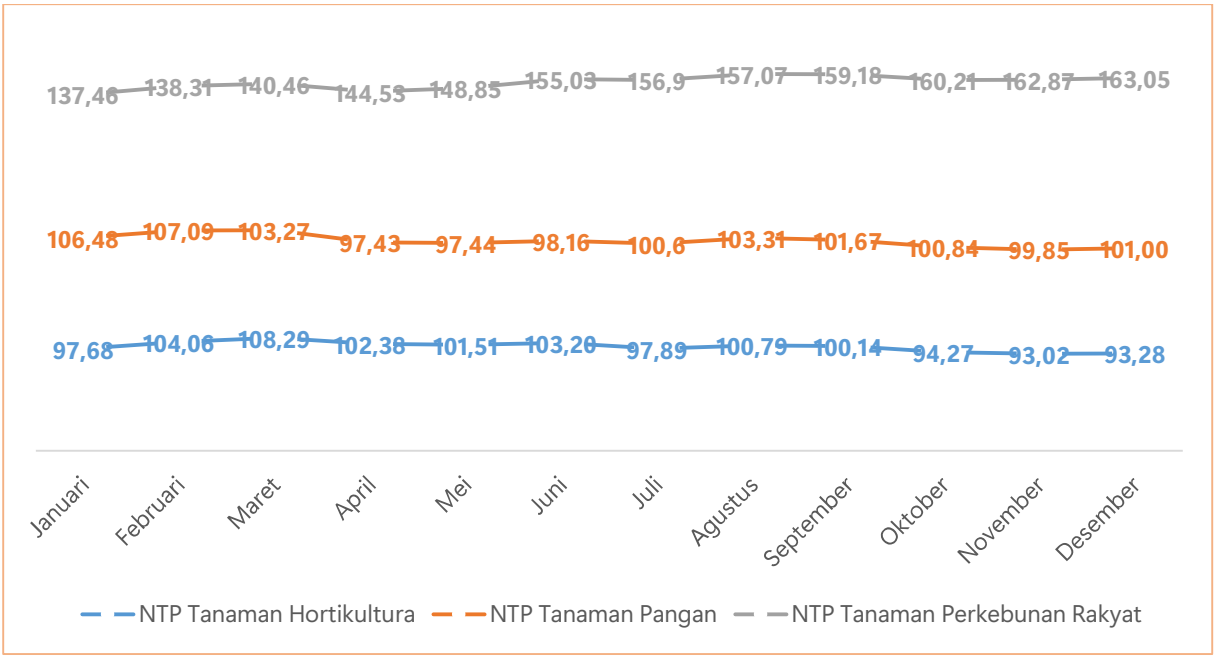
Secara umum NTP terbentuk dari 5 sub sektor, yaitu: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Apabila dilihat lebih dalam berdasarkan sub sektor, pembentukan NTP Aceh utamanya disumbangkan oleh sub sektor Perkebunan, diantaranya kelapa sawit dan kopi yang merupakan komoditi unggulan ekspor Aceh. Perkembangan NTP Aceh berdasarkan sub sektor dapat dilihat pada **Tabel 2.135**.

Tabel 2.135.
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Berdasarkan Sub Sektor, Tahun 2020-2024

Sub Sektor	Nilai Tukar Petani (NTP)/Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan	99,08	97,13	98,21	104,17	101,43
Tanaman Hortikultura	94,94	95,32	99,58	99,13	99,71
Tanaman Perkebunan Rakyat	99,17	109,17	123,37	133,89	151,99
Peternakan	97,27	97,08	95,34	96,26	97,14
Perikanan	96,63	104,50	109,5	111,01	104,71

Sumber: BPS (2025)

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa NTP tertinggi disumbangkan oleh sub sector Perkebunan. Hasil pemantauan harga-harga pada beberapa daerah di Aceh, dihasilkan NTP Januari sampai dengan Desember 2024 untuk 3 (tiga) sub sektor, yaitu: NTP Tanaman Hortikultura, NTP Tanaman Pangan, dan NTP Tanaman Perkebunan, sebagaimana tersajikan pada **Gambar 2.128**.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

Gambar 2.128. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 3 Sub Sektor Tahun 2024

Khusus NTP untuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, terjadi peningkatan yang cukup baik pada komponen Nilai Tukar Usaha Pertanian, terutama pada komoditi Padi, Jagung, Cabai dan Bawang Merah. Keempat komoditi tersebut merupakan bahan pangan pokok yang permintaannya terus meningkat, sehingga intervensi terhadap keempat komoditi ini menjadi fokus Pemerintah Aceh dalam menjaga dan mengendalikan ketersediaan bahan pangan pokok yang berpengaruh terhadap inflasi dan Garis Kemiskinan.

Tabel 2.136.
Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

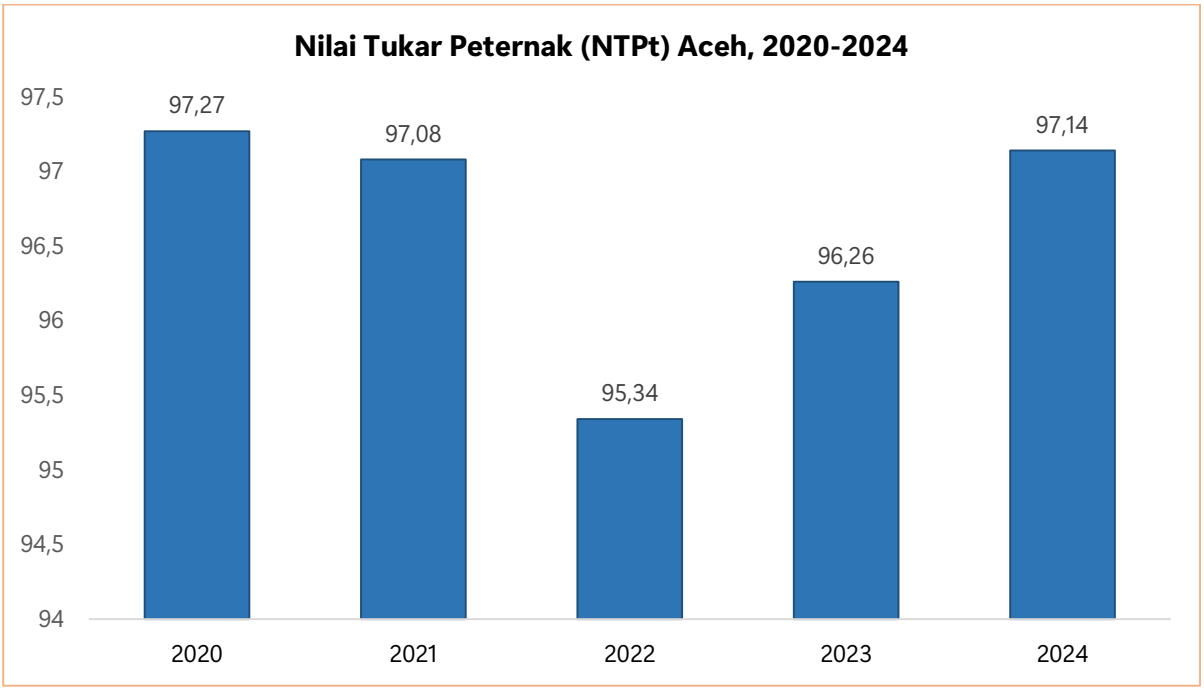
Subsektor/Rincian	Bulan		Perubahan (%)
	Okt'24	Nov'24	
1. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	110,86	108,89	-1,78
a. Indeks yang Diterima Petani (It)	134,09	132,28	-1,35
b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	120,96	121,49	0,44
2. Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	108,57	112,32	3,46
a. Indeks yang Diterima Petani (It)	130,69	135,72	3,85
b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	120,37	120,83	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2025

G. Nilai Tukar Peternakan

Pada sub sektor peternakan juga terjadi peningkatan taraf hidup para peternak yang ditandai dengan NTP Peternak sebagai dampak positif dari pembangunan peternakan. Perkembangan Nilai Tukar Peternakan (NTPt) sebagaimana pada tabel di atas dari Tahun 2020-2024 menggambarkan kondisi yang cenderung menurun. NTPt yang tertinggi, yaitu pada Tahun 2020 sebesar 97,27 dan yang terendah terjadi pada Tahun 2022 sebesar 93.96. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 97,14.04 (meningkat 2,12

poin dari Tahun sebelumnya). Secara umum NTPt selama lima Tahun kurang menggembirakan dan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di sektor peternakan relatif lebih rendah. Perkembangan nilai tukar peternak (NTPt) Tahun 2023-2024 **Gambar 2.129**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024

Gambar 2.129. Perkembangan Nilai Tukar Peternak (NTPt), 2023–2024

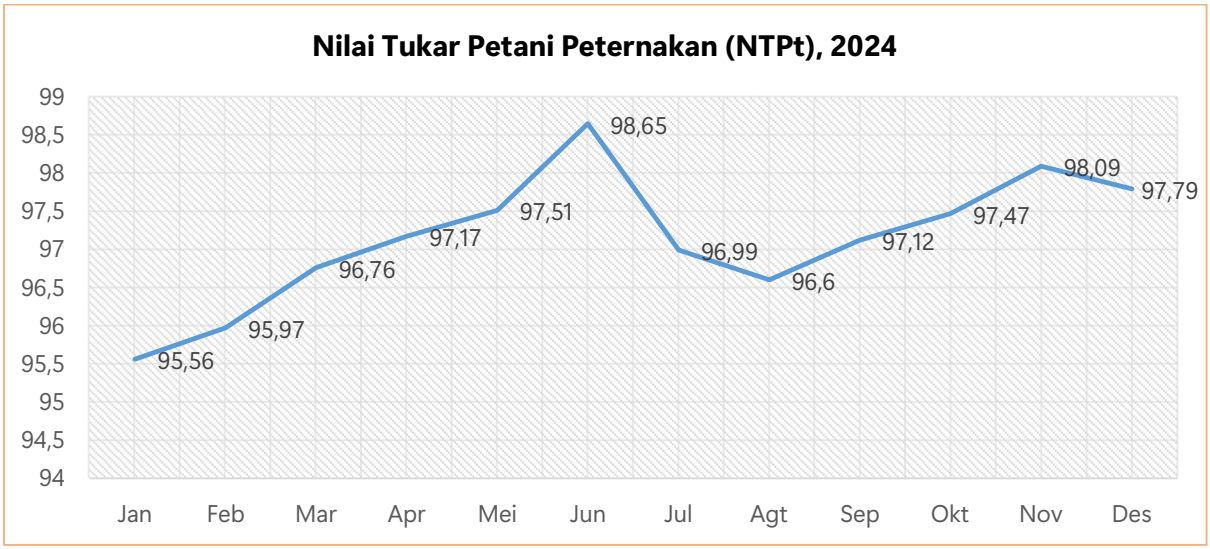
Fluktuasi Nilai Tukar Peternak (NTPt) dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adanya wabah penyakit ternak yang berdampak pada dinamika produksi dan produktivitas sektor peternakan di Aceh. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan sistem kesehatan hewan melalui peningkatan pengendalian penyakit dan optimalisasi pola pemeliharaan ternak.

Peningkatan kapasitas sektor peternakan dilakukan melalui pengembangan teknologi peternakan yang lebih modern, peningkatan ketersediaan sarana produksi seperti obat-obatan dan pakan, serta penerapan pola peternakan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Gambar 2.130 menunjukkan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPt) sepanjang Tahun 2024 menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan pada pertengahan tahun. Pada awal tahun, NTPt berada pada angka 95,56 pada bulan Januari dan meningkat bertahap hingga mencapai 97,51 pada bulan Mei. Puncak tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan nilai 98,65, yang mencerminkan kondisi usaha peternakan yang paling menguntungkan sepanjang tahun.

Memasuki bulan Juli, NTPt mengalami sedikit penurunan menjadi 96,99 dan mencapai titik terendah setelah Juni pada bulan Agustus sebesar 96,60. Selanjutnya, nilai ini kembali menunjukkan tren positif dengan kenaikan bertahap hingga 98,09 pada bulan November, sebelum sedikit menurun menjadi 97,79 pada bulan Desember.

Secara keseluruhan, perkembangan NTPt Tahun 2024 menggambarkan kondisi yang stabil dan terkendali, dengan capaian yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan peternak di beberapa periode. Stabilitas ini diharapkan dapat terus diperkuat melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha peternakan, serta penguatan sistem pemasaran dan distribusi hasil ternak.



Sumber: BPS (2025)

Gambar 2.130. Nilai Tukar Petani Peternak (NTPt), 2024

Tabel 2.137.
Perkembangan NTP Peternakan Tahun 2024

Subsektor/Rincian	Bulan		Perubahan (%)
	Okt'24	Nov'24	
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPt)	102,23	102,06	-0,16
a. Indeks yang Diterima Petani (It)	122,59	122,65	0,05
- Ternak Besar	124,57	124,24	-0,27
- Ternak Kecil	123,52	123,25	-0,22
- Unggas	118,97	119,79	0,69
- Hasil Ternak/Unggas	123,90	123,85	-0,05
b. Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	119,91	120,17	0,21
- Indeks KRT	122,72	123,44	0,58
- Indeks BPPBM	117,64	117,57	-0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024

Perkembangan Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPt) pada bulan Oktober hingga November 2024 menunjukkan dinamika yang relatif stabil. Pada bulan Oktober 2024, NTPt tercatat sebesar 102,23, kemudian sedikit mengalami penurunan pada bulan November 2024 menjadi 102,06, atau turun sebesar 0,16 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran peternak pada periode tersebut.

Dari sisi Indeks yang Diterima Petani (It), terjadi peningkatan tipis dari 122,59 pada bulan Oktober menjadi 122,65 pada bulan November, atau naik sebesar 0,05 persen.

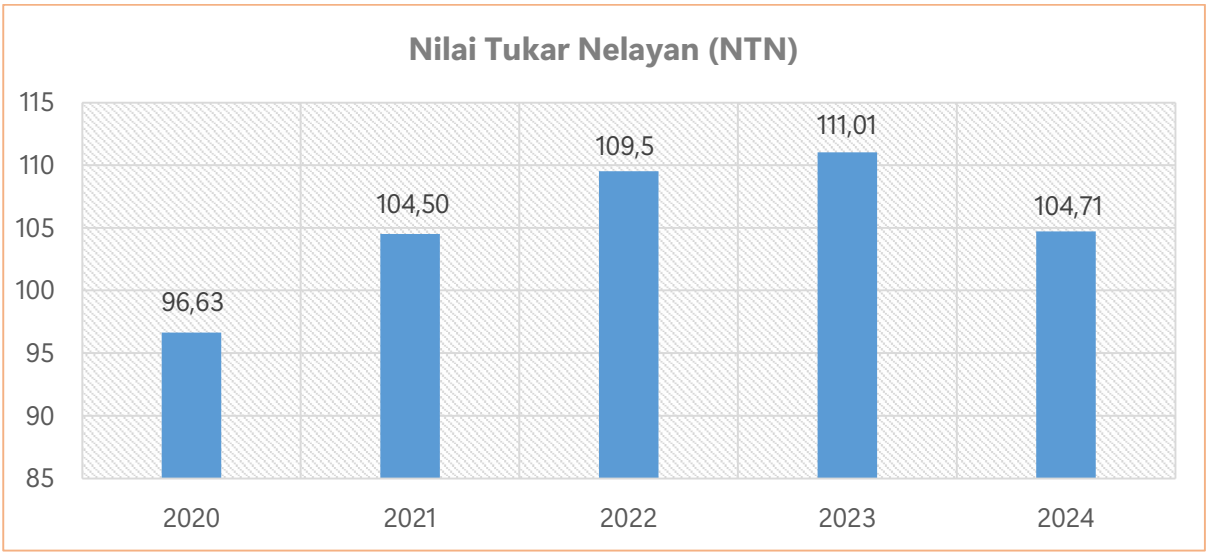
Kenaikan ini didorong oleh peningkatan pada subsektor unggas yang naik 0,69 persen, dari 118,97 menjadi 119,79. Sementara itu, beberapa subsektor lain mengalami penurunan, yaitu ternak besar turun 0,27 persen, ternak kecil turun 0,22 persen, dan hasil ternak/unggas turun 0,05 persen.

Dari sisi Indeks yang Dibayar Petani (Ib), terjadi peningkatan dari 119,91 pada Oktober menjadi 120,17 pada November, atau naik 0,21 persen. Peningkatan ini terutama dipicu oleh naiknya Indeks Konsumsi Rumah Tangga (KRT) sebesar 0,58 persen, dari 122,72 menjadi 123,44. Sementara itu, Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sedikit menurun sebesar 0,06 persen, dari 117,64 menjadi 117,57.

H. Nilai Tukar Nelayan

Pada sektor Perikanan, kesejahteraan nelayan diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Persentase tingkat capaian NTN Tahun 2020 adalah 96,63 persen, kemudian meningkat menjadi 104,50 pada 2021, serta yang paling tinggi pada Tahun 2023, yaitu: 111,01. Realisasi NTN selama lima tahun terakhir, mulai dari Tahun 2020-2024 berfluktuatif antara bidang.

Dari **Gambar 2.131** dapat dilihat bahwa secara umum NTN semakin membaik dari Tahun 2020 sampai dengan 2023. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan meningkat. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya.



Sumber : BPS Aceh, 2025 (diolah DKP Aceh)

Gambar 2.131. Perkembangan NTP Nelayan 2020-2024

Keberhasilan pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan tangkap yang dinikmati oleh nelayan. Indeks yang diterima petani (It) dan Indeks yang dibayar petani (Ib) sektor perikanan (tangkap dan budidaya) menunjukkan perubahan yang positif kecuali pada indeks yang diterima petani pada subsektor budidaya (sebesar 12,19%). Secara lebih

jelas dapat dilihat Perkembangan Indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar nelayan Tahun 2024 pada **Tabel 2.138**.

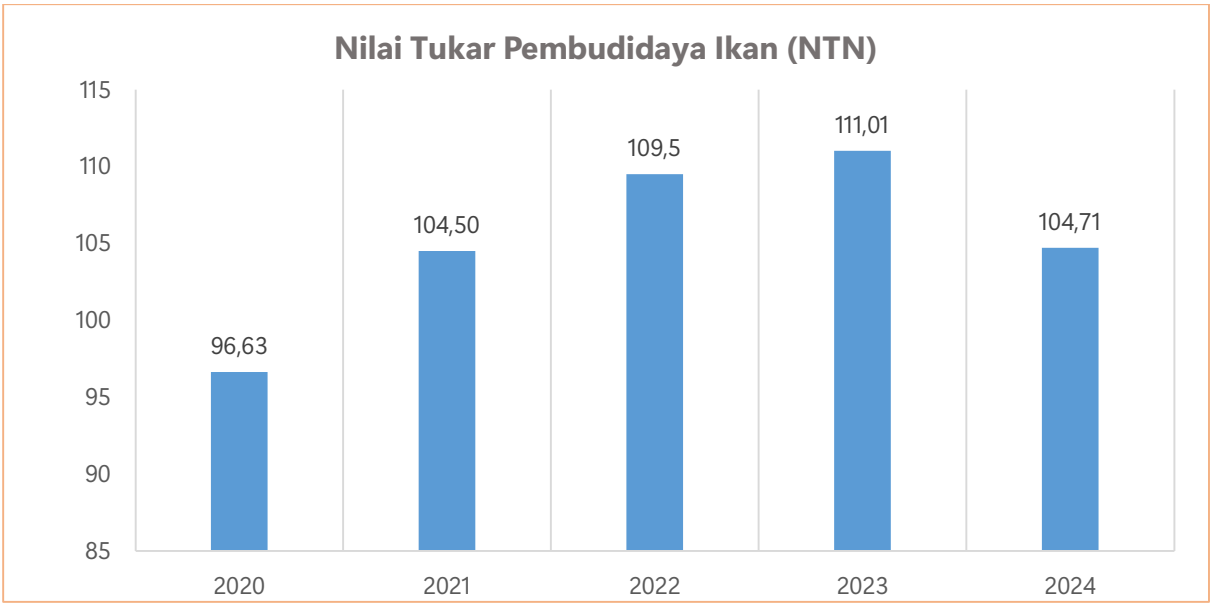
Tabel 2.138.
Perkembangan Indeks Yang Diterima Nelayan dan Indeks Yang Dibayar Nelayan Tahun 2024

No	Subsektor/Rincian	Bulan		Perubahan (%)
		Okt-24	Nov-24	
1.	Perikanan			
a.	Indeks yang diterima Nelayan (It)	121,40	121,39	-0,01
	- Penangkapan	116,26	119,20	2,53
	- Budidaya	121,16	118,50	-2,19
b.	Indeks yang dibayar Nelayan (Ib)	118,63	118,92	0,24
	- Indeks KRT	121,41	121,92	0,42
	- Indeks BPPBM	115,75	115,82	0,07
1a.	Perikanan (Penangkapan)			
a.	Indeks yang diterima Nelayan (It)	121,07	120,99	-0,07
	- Panangkapan di Perairan Umum	118,20	118,54	0,29
	- Penangkapan di Laut	121,24	121,10	-0,12
b.	Indeks yang dibayar Nelayan (Ib)	118,66	118,96	0,25
	- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	121,71	122,21	0,41
	- Indeks BPPBM	115,30	115,38	0,07
1b.	Perikanan (Budidaya)			
a.	Indeks yang diterima Petani (It)	121,94	122,03	0,07
	- Budidaya Air Tawar	116,40	116,31	-0,08
	- Budidaya Air Payau	123,40	121,66	-0,05
b.	Indeks dibayar Petani (Ib)	118,87	118,85	0,23
	- Indeks KRT	120,93	121,46	0,43
	- Indeks BPPBM	116,45	116,53	0,06

Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi) selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik, namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan secara signifikan.

Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTN) di Aceh menunjukkan tren yang positif sepanjang periode 2020–2024. Pada Tahun 2020, NTN tercatat sebesar 96,63, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2021 menjadi 104,50, yang mencerminkan penguatan kinerja subsektor perikanan budidaya.

Kenaikan terus berlanjut pada Tahun 2022 dengan capaian 109,50, dan mencapai titik tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 111,01. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan yang sejalan dengan penguatan produktivitas dan nilai tambah di subsektor perikanan budidaya. Pada Tahun 2024, NTN tercatat sebesar 104,71, yang tetap menunjukkan posisi yang stabil dan kuat dibandingkan dengan tahun-tahun awal periode pengamatan. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan program pembangunan sektor perikanan budidaya yang terarah dan berkelanjutan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.128 tentang perkembangan NTPi Tahun 2020-2024.

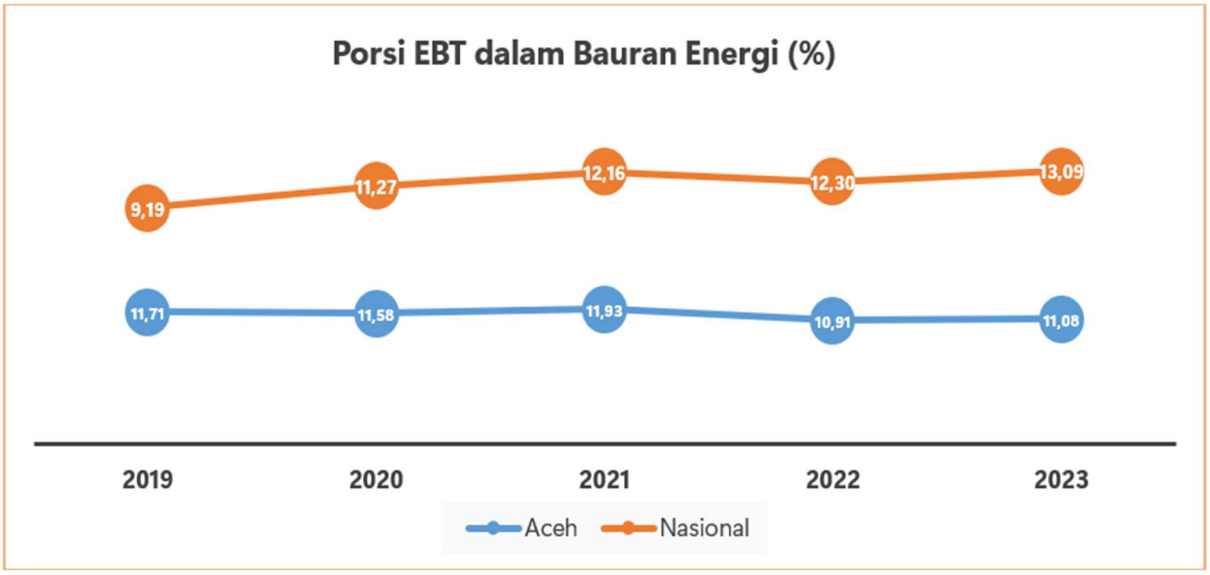


Sumber : BPS Aceh, 2025 (diolah DKP Aceh)

Gambar 2.132. Perkembangan NTPi Tahun 2020-2024

I. Porsi EBT dalam Bauran Energi

Energi baru dan terbarukan (EBT) adalah salah satu bentuk pengelolaan alam yang berkelanjutan dan dikembangkan menjadi energi alternatif. Secara umum, energi baru terbarukan adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan tanpa batas dan diperbarui secara alami. Itulah mengapa EBT termasuk energi yang ramah lingkungan sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi pemanasan global. Porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer di Aceh masih dalam proses peningkatan. Demikian pula halnya terhadap porsi energi baru terbarukan (EBT) secara nasional. Adapun perkembangan porsi energi baru terbarukan (EBT) baik secara nasional maupun Aceh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Gambar 2.133**.



Sumber : Dinas ESDM Aceh dan Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 2.133. Porsi EBT dalam Bauran Energi Aceh (%)

Aceh memiliki potensi besar dalam energi baru terbarukan, meliputi panas bumi di wilayah Seulawah Agam, Aceh Besar, Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Potensi ini membutuhkan Kebijakan dalam pengembangannya, baik secara wewenang dan kapasitas fiskal.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Disajikan indikator antara lain, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi dan indikator lain sesuai konteks daerah.

A. Persandian

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu untuk mengamankan informasi. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Sektor persandian perlu mendapat pengembangan serius ke depan terkait pengamanan informasi pemerintah. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (ayat 2) bahwa Persandian sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

B. Statistik

B.1. Statistik Sektoral Daerah

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Untuk itu Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya

dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh juga telah mengatur Satu Data di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data.

B.2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor. Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial.

Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

Adapun data dan informasi Geospasial yang selama ini tersedia dan di produksi oleh Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) serta disebarluaskan oleh Dinas Komunikasi,

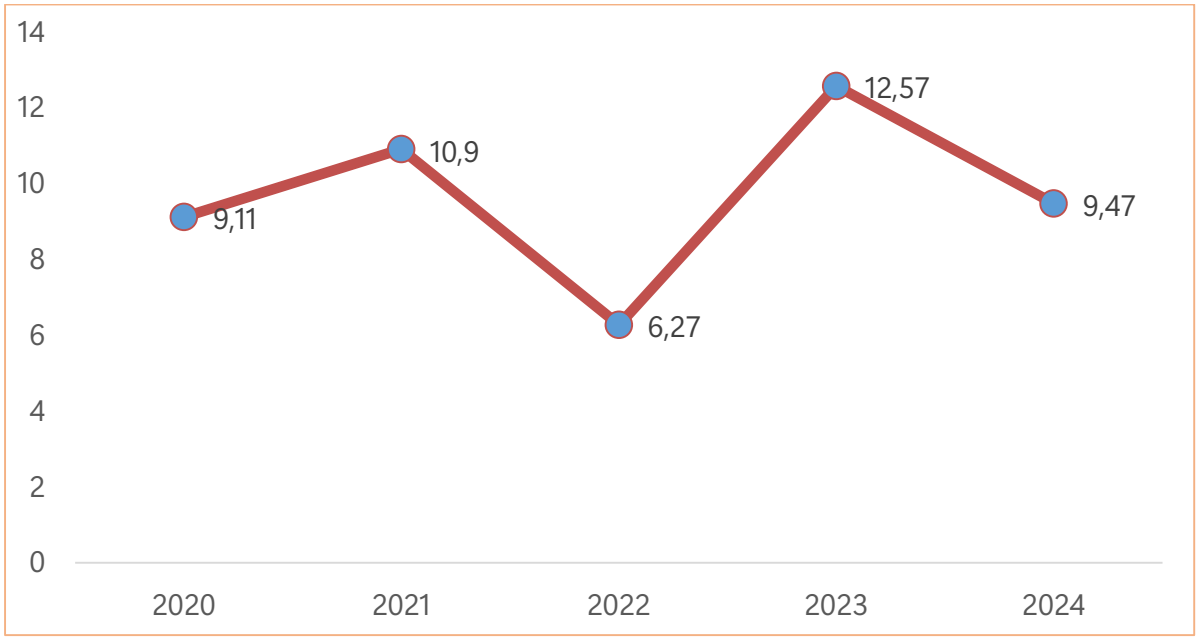
Informatika dan Persandian Aceh sebagai wali data ke Geoportal Aceh (https://geoportal.acehprov.go.id). Jumlah data dan informasi geospasial yang tersedia di Geoportal Aceh adalah 320 peta.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Disajikan indikator antara lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa dan indikator lain sesuai konteks daerah

A. Penanaman Modal

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah sangat dibutuhkan peran investasi. Perkembangan investasi di Aceh masih menunjukkan kondisi yang belum cukup baik dengan realisasi yang sangat berfluktuasi dalam periode 5 (lima) tahun terakhir. Tercatat bahwa pada Tahun 2020 realisasi nilai investasi sebesar 9,11 triliun. Pada tahun berikutnya nilai investasi sedikit meningkat mencapai 10,9 triliun, dan kembali turun drastis mencapai 6,27 triliun. Pada Tahun 2024 nilai realisasi investasi tercatat sebesar 9,47 triliun yang merupakan gabungan antara Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan nilai realisasi investasi Aceh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada **Gambar 2.7**.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh, 2025

Gambar 2.134. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi di Aceh Tahun 2020-2024

Keberhasilan peruntukan investasi tidak terlepas dari indikator serapan tenaga kerja yang mempekerjakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kriteria keterampilan pada sektor yang dimiliki. Dari total nilai realisasi investasi di Tahun 2024, tenaga kerja yang terserap pada PMDN dan PMA sebanyak 13.727 orang dengan jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 13.681 orang serta tenaga kerja asing sebanyak 46 orang. Adapun rasio daya serap tenaga kerja tersebut sebesar 14,87 atau 1:15 orang.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Perkembangan ekspor dan impor Aceh menunjukkan dinamika yang fluktuatif seiring dengan perubahan kondisi ekonomi regional, nasional, dan global. Hal ini mencerminkan keterkaitan ekonomi Aceh dengan faktor eksternal, termasuk tingginya kebutuhan pasokan barang dari luar daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat serta kelancaran aktivitas perekonomian.

Selain itu, dinamika perdagangan juga dipengaruhi oleh peran sektor industri dan produksi lokal yang terus ditingkatkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Upaya penguatan produksi dalam negeri melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi Aceh. Dengan demikian, perkembangan ekspor dan impor diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung pencapaian visi Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.

Tabel 2.139.
Neraca Perdagangan Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Ekspor			Impor			Neraca (USD)	Neraca (%)
	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)	Volume (Kg)	Nilai (USD)	Pertumbuhan (%)		
2020	8.118.173.063	300.417.274	-5,44	109.695.439	25.776.718	-80,36	274.640.556	47,29
2021	9.658.678.737	536.923.577	78,73	72.354.765	119.048.308	361,84	417.875.269	52,15
2022	8.900.165.533	745.801.580	38,90	100.488.223	113.741.363	-4,46	632.059.944	51,26
2023	7.900.445.913	609.246.201	-18,31	350.596.488	148.020.520	30,14	461.225.536	-27,03
2024	11.243.254.894	674.855.855	10,77	843.863.572	454.421.658	207,00	220.434.197	-52,21

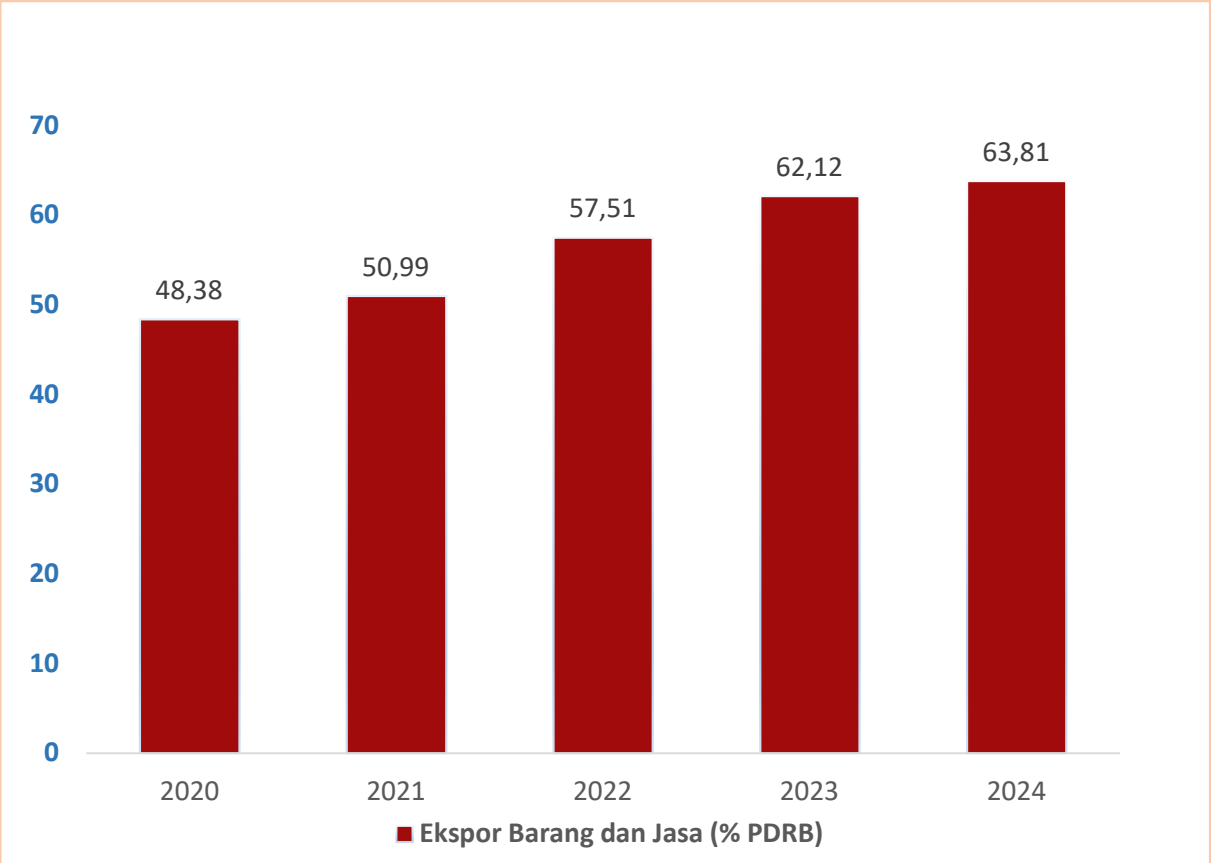
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Perkembangan ekspor Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir meskipun berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 ekspor dari Aceh sebesar 300.417.274 USD atau berkontraksi sebesar 5,44 persen sebagai dampak dari pandemi covid-19. Pada Tahun 2021, seiring upaya pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi global, nilai ekspor dari Aceh meningkat tajam menjadi 536.923.577 USD atau tumbuh sebesar 78,73 persen. Nilai ekspor tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan nilai sebesar 745.801.580 USD atau tumbuh sebesar 38,90 persen. Pada Tahun 2023 nilai ekspor Aceh cukup baik, yaitu sebesar 609.351.386, namun jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18,31 persen, hal ini disebabkan karena berkurangnya nilai ekspor pada kelompok non migas terutama akibat turunnya harga CPO di pasar global. Pada Tahun 2024, nilai ekspor Aceh kembali tumbuh sebesar 10,77 persen atau senilai 674.855.855 USD. Hal ini selain akibat perubahan harga-harga di pasar dunia, juga dikarenakan meningkatnya volume ekspor Aceh.

Perkembangan impor Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat cukup stabil, dimana nilai impor terendah Aceh terjadi pada Tahun 2020, yaitu senilai 25.776.718 USD, sedangkan impor teritinggi terjadi pada Tahun 2024, yaitu senilai 454.421.658 USD atau tumbuh sebesar 207 persen dibanding tahun sebelumnya. Pembentuk impor Aceh pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh kelompok komoditas adalah bahan bakar mineral, beras, belerang dan kapur.

Sedangkan neraca ekspor dan impor Aceh dalam 5 tahun terakhir, meskipun berfluktuasi namun tetap mengalami surplus, yang menandai nilai ekspor Aceh lebih besar daripada nilai impor. Surplus terbesar terjadi pada Tahun 2022 dengan nilai sebesar 632.056.844 USD, sedangkan surplus terkecil terjadi pada Tahun 2024 sebesar 220.434.197USD.

Negara tujuan utama ekspor Aceh adalah India, Amerika Serikat, Thailand, Jepang dan Belgia dengan jenis komoditas utama diantaranya bahan bakar mineral, buah-buahna, dan kelompok kopi, teh, rempah-rempah. Sedangkan negara asal impor utama adalah Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, Vietnam, dan Thailand dengan komoditas paling dominan berupa bahan bakar mineral, beras, belerang dan kapur.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025 (diolah)

Gambar 2.135. Persentase Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB Aceh Tahun 2020-2024

Nilai total ekspor Aceh dengan menghitung ekspor luar negeri maupun ekspor antar daerah terus mengalami peningkatan, sebagaimana digambarkan dengan persentase ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Aceh seperti disajikan pada **Gambar 2.135** menunjukkan kondisi perkembangan share ekspor barang dan jasa Aceh terhadap PDRB yang terus meningkat. Dimana pada Tahun 2020 sebesar 48,38 persen dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 61,81 persen pada Tahun 2024. Capaian ekspor barang dan jasa tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap PDRB Aceh. Selain itu, ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk lokal di pasar domestik maupun di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka

peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya persentase ekspor barang dan jasa, juga mempengaruhi rasio perdagangan antar wilayah yang juga terus membaik. Pada Tahun 2024 capaian Aceh terhadap rasio perdagangan antar wilayah sebesar minus 0,05, yang mana jauh lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2020 seebsar minus 0,20. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan Aceh terhahap barang dan jasa dari luar masih cukup tinggi, terutama dari provinsi lain di dalam negeri.

C. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Perkembangan Nilai PMTB dan Perubahan Inventori (ADHB) Tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2019 nilai PMTB Aceh sekitar 60,70 Trilyun Rupiah dan pada 2024 menjadi 79,43 Trilyun Rupiah. Nilai perubahan inventori dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan, pada Tahun 2019 sebesar 15,13 Milyar Rupiah. Bila dilihat nilai PMTB dan Perubahan Inventori berdasarkan atas ADHK, nilai ini secara umum mengalami kenaikan, kecuali pada Tahun 2022 sebesar 45,10 Trilyun Rupiah, selanjutnya pada Tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi masing-masing sebesar (47,75 dan 49,98 Trilyun Rupiah). Sedangkan nilai perubahan inventori ADHK relative sama dengan pergerakan nilai perubahan inventori ADHB. Pada Tahun 2020 mengalami minus sebesar (239,13) Milyar Rupiah akibat dari pandemi.

Tabel 2.140.
Nilai PMTB dan Perubahan Inventori (ADHB dan ADHK) Tahun 2019-2024
(Milyar Rupiah)

Komponen	Tahun											
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pembentukan Modal Tetap Bruto	60.700,30	43.513,91	63.218,09	45.045,62	65.451,34	45.438,25	66.941,19	45.103,70	73.733,30	47.746,95	79.431,79	49.982,89
Perubahan Inventori	15,13	8,77	40,30	- 239,13	166,77	87,31	267,76	152,44	455,77	260,65	412,52	218,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Disajikan indikator antara lain, Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lain sesuai konteks daerah.

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

A1. Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan peritungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan yang merupakan jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Aceh, berdasarkan status jalan, meliputi:

1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 2.112,07 km (Kepmen PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember 2022) tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 1.897,91 km (Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/603/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Di Aceh.
3. Jaringan Jalan kabupaten/kota sepanjang 19.679,91 km.

A2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Mantap

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi disajikan pada **Tabel 2.141**.

Tabel 2.141.
Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap			Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		
		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi		Baik (B) (Km)	Sedang (S) (Km)	Proporsi
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.111,39	1.210,51	821,74	0,96
2021	1.781,72	1.157,10	206,83	0,77	2.102,07	954,84	1.109,10	0,98
2022	1.781,72	1.391,21	112,72	0,84	2.102,07	983,54	1.090,25	0,98
2023	1.781,72	1.439,46	95,15	0,86	2.112,07	887,426	1176,975	0,98
2024	1.897,91	1.228,57	304,90	0,81	2.112,07	756,72	1.269,22	0,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh 2025 dan Satker P2JN Aceh 2025

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan provinsi dalam keadaan mantap, dari 0,79 di Tahun 2020 menjadi 0,81 di Tahun 2024. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 0,96.

Untuk dapat mempertahankan dan mempercepat peningkatan proporsi kondisi mantap jalan provinsi perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik agar tetap dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana melalui kegiatan peningkatan, rekonstruksi dan pemeliharaan rutin maupun berkala berdasarkan data hasil survey lapangan (*Integrated Road Management System*/IRMS).

A3. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Aceh yang semakin bertambah tanpa diiringi penambahan panjang jalan menyebabkan menurunnya rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik atau semakin tinggi pula jumlah masyarakat atau penduduk yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk memberikan informasi tingkat penggunaan jalan atau mencerminkan tingkat kepadatan penggunaan jalan yang ada. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan Tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada **Tabel 2.142**.

Tabel 2.142.
Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang Jalan (km)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (Jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan		
2020	2.111,39	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.274.871	223,04
2021	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.333.733	225,53

Tahun	Panjang Jalan (km)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (Jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan		
2022	2.102,08	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.407.855	228,66
2023	2.112,07	1.781,72	19,766,26	23.650,05	5.482.527	231,72
2024	2.112,07	1.897,91	19,679,91	23.689,89	5.554.815	234,48

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2025

Dari informasi **Tabel 2.142** Aceh pada Tahun 2024, 1 (satu) km jalan melayani 233 penduduk. Sementara pada Tahun 2020, 1 km jalan melayani 223 penduduk. Kondisi rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk per panjang jalan Sumatera sebesar 300 jiwa/km, Sulawesi sebesar 250 jiwa/km dan Kalimantan sebesar 260 jiwa/km. Sementara itu, rasio jumlah penduduk per panjang jalan di Jawa sebesar 1.360 jiwa/km. Dengan demikian, panjang jalan di Aceh masih mampu melayani aksessibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.

A4. Persentase jalan provinsi dalam kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai *international roughness index/IRI*) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *road condition index/RCI*). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap antara Tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 dan 2023 kondisi mantap jalan mengalami peningkatan, yaitu 84,41 persen Tahun 2022 dan 86,13 persen Tahun 2023. Sedangkan pada Tahun 2024 capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 80,80 persen. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada **Tabel 2.143**.

Tabel 2.143.
Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024

Tahun	Jalan Provinsi	Kondisi				Mantap	
		Baik (B) (km)	% Baik	Sedang (S) (km)	% Sedang	Km	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)=(3)/(2)*100*	*(5)*	*(6)=(5)/(2)*100*	*(7)=(3)/(5)*	*(8)=(7)/(2)*100*
2020	1.781,72	1.321,82	74,19	92,14	5,17	1.413,96	79,36
2021	1.781,72	1.157,10	64,94	206,83	11,61	1.363,93	76,55
2022	1.781,72	1.391,21	78,08	112,72	6,32	1.503,93	84,41
2023	1.781,72	1.439,46	80,79	95,15	5,34	1.534,61	86,13
2024	1.897,91	1.228,57	64,73	304,90	16.07	1.533,47	80,80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.143**, kondisi mantap jalan provinsi Aceh pada Tahun 2024 berada pada angka 80,80 persen, menyesuaikan dengan adanya perubahan panjang ruas jalan provinsi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/603/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Aceh. Panjang ruas jalan provinsi mengalami peningkatan dari 1.781,72 km menjadi 1.897,91 km, yang mencakup berbagai kategori kondisi jalan.

Ke depan, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas di seluruh wilayah Aceh. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan akses yang merata di seluruh kabupaten/kota. Dengan sinergi yang optimal, pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mampu mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Aceh yang maju.

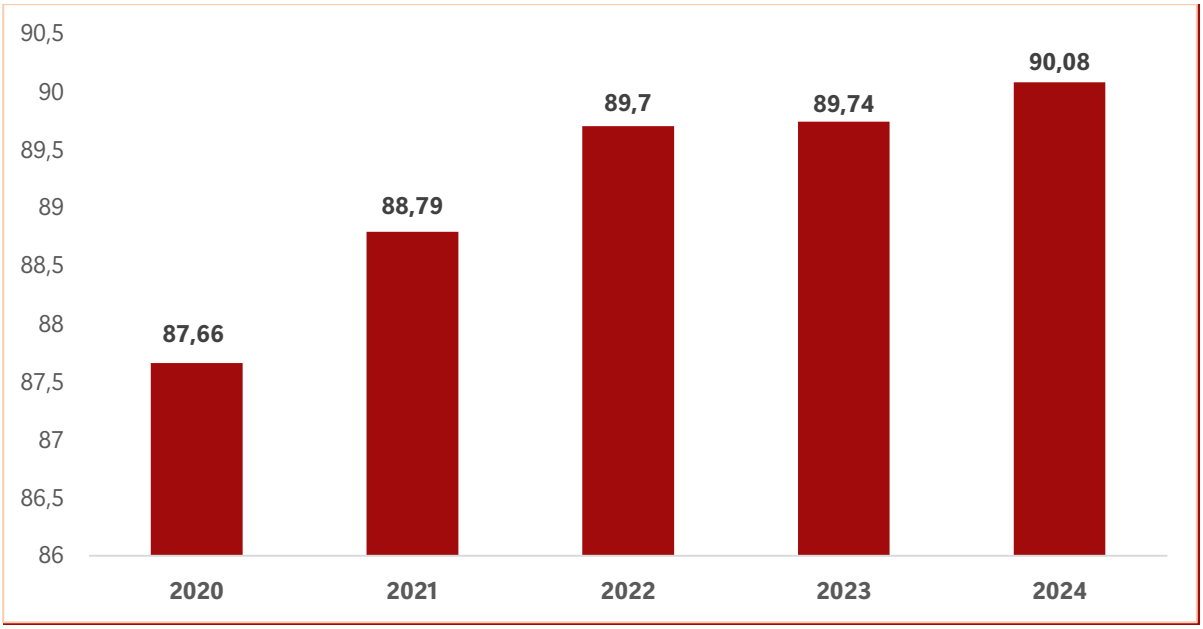
B. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Selanjutnya Air minum merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang pemenuhannya bukan sekadar akan meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup, tetapi pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan akses air minum merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal (PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti permukaan sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Gambar 2.136 menjelaskan bahwa, persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak Aceh sampai dengan 2024 adalah 90,08 persen, sedangkan capaian nasional adalah 92,64 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2.136. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aceh 2020-2024

Persentase Rumah Tangga terhadap akses air minum layak menurut Kabupaten/Kota sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024, Kota Banda Aceh masih mendominasi tingkat Rumah Tangga dengan Akses terhadap air minum layak tertinggi dan yang terendah adalah Kota Subulussalam. Secara rinci Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024 disajikan pada **Tabel 2.144**. **Error! Reference source not found.**

Tabel 2.144.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2020–2024

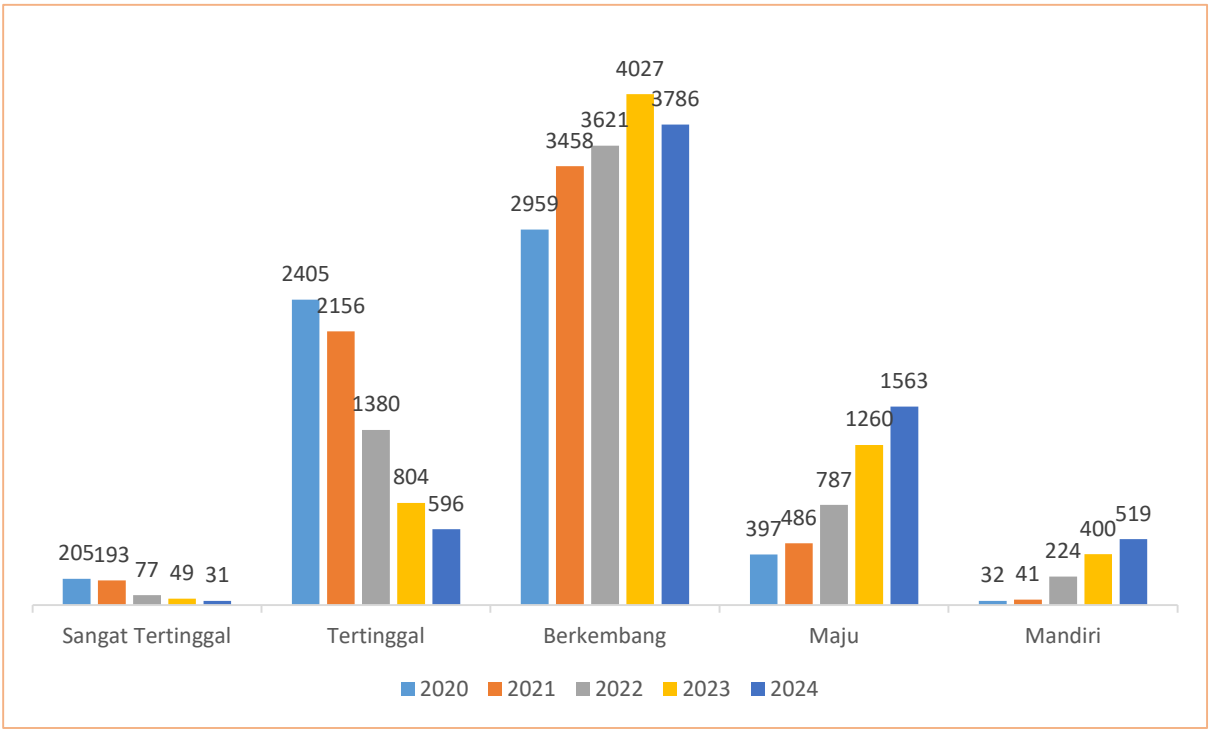
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	79,79	87,45	83,69	83,10	82,79
Aceh Singkil	72,72	78,58	84,37	83,99	79,60
Aceh Selatan	80,44	79,65	77,45	82,44	85,87
Aceh Tenggara	90,92	86,71	93,80	88,04	91,40
Aceh Timur	74,67	83,16	82,85	82,46	84,43
Aceh Tengah	89,38	90,10	97,10	91,02	88,27
Aceh Barat	94,03	94,22	95,49	97,09	96,52
Aceh Besar	88,59	82,36	90,38	92,63	90,68
Pidie	90,35	89,24	89,22	87,60	87,57
Bireuen	91,32	93,53	94,79	92,62	90,06
Aceh Utara	86,25	91,09	91,25	92,47	94,56
Aceh Barat Daya	93,87	95,34	89,11	92,69	95,12
Gayo Lues	71,76	84,68	86,19	79,64	80,93
Aceh Tamiang	78,73	83,12	83,82	87,50	89,02
Nagan raya	93,32	90,13	90,49	93,28	90,75
Aceh Jaya	89,89	86,36	83,10	87,87	87,15

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bener Meriah	89,50	89,71	88,48	85,16	84,98
Pidie Jaya	93,18	93,46	90,38	90,26	94,54
Banda Aceh	98,85	99,37	95,66	98,63	99,05
Sabang	97,04	96,18	92,55	92,67	89,92
Langsa	99,13	97,14	98,46	99,11	98,06
Lhokseumawe	93,92	94,44	98,69	98,31	97,41
Subulussalam	64,28	60,87	56,02	55,58	57,25
Aceh	**87,66**	**88,79**	**89,7**	**89,74**	**90,08**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

C. Persentase Desa mandiri

Dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, Kementerian Desa PDTT meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM. Perkembangan status desa di Aceh pada Tahun 2019-2024 dapat kita lihat dalam **Gambar 2.137**.



Sumber : DPMG Aceh, 2025

Gambar 2.137. Status Desa di Aceh Tahun 2019 – 2024

Gambar 2.137, dapat dilihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan tertinggal di Aceh terus menurun dari Tahun 2020 sampai ke Tahun 2024. Sedangkan status desa berkembang, maju, dan mandiri menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada Tahun 2020, desa maju di Aceh berjumlah 397 desa meningkat menjadi 1.563 desa di Tahun 2024 dan desa mandiri di Tahun 2020 berjumlah 32 desa meningkat menjadi 519 desa di Tahun 2024.

Tabel 2.145.
Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Status Desa (Persen)				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Aceh Selatan	5.00	14.23	61.15	18.85	0.77
2	Aceh Tenggara	1.30	38.44	56.10	3.38	0.78
3	Aceh Timur	5.26	34.50	54.19	5.65	0.39
4	Aceh Tengah	16.95	24.07	50.17	8.81	0.00
5	Aceh Barat	6.52	17.70	58.39	16.77	0.31
6	Aceh Besar	7.28	32.45	58.61	1.49	0.00
7	Pidie	1.92	15.62	79.59	2.88	0.00
8	Aceh Utara	0.94	11.74	63.62	22.18	1.41
9	Simeulue	2.90	13.04	65.22	18.84	0.00
10	Aceh Singkil	12.93	25.86	34.48	22.41	4.31
11	Bireuen	3.45	22.82	65.52	8.21	0.00
12	Aceh Barat Daya	4.61	19.74	73.68	1.97	0.00
13	Gayo Lues	3.68	24.26	58.82	13.24	0.00
14	Aceh Jaya	6.98	17.44	67.44	6.98	0.58
15	Nagan Raya	7.66	29.73	53.60	9.01	0.00
16	Aceh Tamiang	18.06	32.41	41.20	7.41	0.46
17	Bener Meriah	20.69	26.29	42.24	10.34	0.43
18	Pidie Jaya	6.31	41.89	49.10	1.80	0.90
19	Banda Aceh	93.33	6.67	0.00	0.00	0.00
20	Sabang	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Lhokseumawe	36.76	42.65	20.59	0.00	0.00
22	Langsa	21.21	37.88	39.39	1.52	0.00
23	Subulussalam	28.05	29.27	34.15	7.32	1.22

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, 2025

Dari **Tabel 2.145** menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar desa di Aceh sudah berkembang, beberapa Kabupaten/Kota masih memiliki desa sangat tertinggal dengan persentase kecil, yaitu Kabupaten Aceh Singkil (4,31%), Aceh Utara (1,41%), dan Kota Subulussalam (1,22%). Sementara itu, hampir semua Kabupaten/Kota lainnya memiliki desa yang sudah berkembang, kecuali Kota Sabang dan Banda Aceh, yang seluruh desanya sudah maju dan mandiri.

Tabel 2.146
Alokasi Dana Desa Tahun 2019 – 2024

No	Kabu/Kota	Jlh Desa	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Provinsi Aceh	6.497	4.980.088.180.000	4.986.622.278.000	4.669.371.747.000	4.761.060.876.000	4.958.897.983.000
1	Aceh Selatan	260	205.268.050.000	205.268.050.000	194.090.688.000	195.811.103.000	196.339.440.000
2	Aceh Tenggara	385	284.561.253.000	284.561.253.000	265.902.419.000	270.051.986.000	281.372.115.000
3	Aceh Timur	513	387.787.938.000	387.787.938.000	373.119.830.000	376.847.461.000	395.019.867.000
4	Aceh Tengah	295	223.350.548.000	223.350.548.000	209.831.057.000	212.942.662.000	222.523.597.000
5	Aceh Barat	321	250.632.328.000	250.632.328.000	234.408.383.000	224.045.853.000	236.111.096.000
6	Aceh Besar	603	437.555.848.000	437.555.848.000	415.515.724.000	422.285.475.000	440.931.838.000
7	Pidie	730	524.715.756.000	524.715.756.000	494.424.865.000	525.206.131.000	538.343.872.000

No	Kabu/Kota	Jlh Desa	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Aceh Utara	852	626.338.212.000	626.338.212.000	607.509.747.000	620.592.204.000	650.152.994.000
9	Simeulue	138	119.684.330.000	119.684.330.000	107.641.709.000	101.844.034.000	106.573.474.000
10	Aceh Singkil	116	108.080.283.000	108.080.283.000	96.138.732.000	92.832.222.000	96.528.106.000
11	Bireuen	609	455.523.085.000	455.523.085.000	442.297.899.000	446.168.583.000	462.263.930.000
12	Aceh Barat Daya	152	119.823.288.000	119.823.288.000	111.846.686.000	113.155.818.000	118.693.008.000
13	Gayo Lues	136	114.193.644.000	114.381.709.000	101.044.300.000	105.937.563.000	110.597.264.000
14	Aceh Jaya	172	135.065.795.000	135.065.795.000	118.845.057.000	121.957.443.000	128.024.164.000
15	Nagan Raya	222	175.871.395.000	175.871.395.000	161.264.111.000	165.760.447.000	172.968.346.000
16	Aceh Tamiang	215	171.672.967.000	171.672.967.000	163.372.347.000	166.158.308.000	177.156.461.000
17	Bener Meriah	232	182.834.539.000	182.834.539.000	167.049.012.000	164.707.235.000	173.100.709.000
18	Pidie Jaya	222	165.862.465.000	165.862.465.000	151.746.896.000	163.021.845.000	169.168.059.000
19	Banda Aceh	90	75.977.398.000	77.702.442.000	70.100.703.000	73.484.769.000	77.088.372.000
20	Sabang	18	25.156.301.000	26.798.027.000	14.179.325.000	15.014.733.000	15.636.770.000
21	Lhokseumawe	68	60.285.819.000	61.983.149.000	53.928.333.000	56.545.740.000	62.402.165.000
22	Langsa	66	59.424.404.000	60.706.341.000	53.156.136.000	59.732.506.000	58.843.788.000
23	Subulussalam	82	70.422.534.000	70.422.530.000	61.957.788.000	66.956.755.000	69.058.548.000

Sumber: DPMG Aceh, 2025

Tabel 2.146 menunjukkan bahwa alokasi dana desa untuk Aceh terus meningkat antara 2020 hingga 2024, meskipun sempat turun pada 2022 dan kembali naik pada 2023. Kabupaten Aceh Utara dan Pidie mendapatkan dana desa terbesar karena keduanya memiliki jumlah desa terbanyak di Aceh. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap tahun seluruh desa memperoleh alokasi dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat desa yang lebih sejahtera.

D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. ketaatan terhadap RTRW. luas wilayah produktif. luas wilayah industri. luas wilayah kebanjiran. luas wilayah kekeringan. luas wilayah perkotaan. jenis dan jumlah bank dan cabang. jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. jenis. kelas. dan jumlah restoran. jenis. kelas. dan jumlah penginapan/hotel. persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih. rasio ketersediaan daya listrik. persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

E. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah

dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas kabupaten/kota di Aceh disajikan secara lengkap pada **Tabel 2.147**.

Tabel 2.147.
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk	Panjang Jalan (Km)	Indeks Aksesibilitas (Km/Km^2)	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)
Simelue	1.821,75	98.633	795,37	0,44	8,06
Aceh Singkil	1.852,82	135.684	556,76	0,30	4,10
Aceh Selatan	4.175,37	241.994	1.232,35	0,30	5,09
Aceh Tenggara	4.179,12	234.430	1.253,58	0,30	5,35
Aceh Timur	5.432,63	443.638	1.766,57	0,33	3,98
Aceh Tengah	4.521,70	226.744	1.159,75	0,26	5,11
Aceh Barat	2.818,17	206.822	867,41	0,31	4,19
Aceh Besar	2.882,83	428.254	1.644,63	0,57	3,84
Pidie	3.133,93	452.547	1.288,84	0,41	2,85
Bireuen	1.793,27	459.073	1.352,21	0,75	2,95
Aceh Utara	2.711,15	631.984	2.223,13	0,82	3,52
Aceh Barat Daya	1.882,28	159.187	844,36	0,45	5,30
Gayo Lues	5.541,28	106.791	1.109,87	0,20	10,39
Aceh Tamiang	2.184,40	309.039	1.082,24	0,50	3,50
Nagan Raya	3.416,32	176.429	1.147,02	0,34	6,50
Aceh Jaya	3.893,05	99.200	710,73	0,18	7,16
Bener Meriah	1.930,75	172.036	1.479,10	0,77	8,60
Pidie Jaya	953,12	166.467	580,56	0,61	3,49
Banda Aceh	55,85	265.019	676,06	12,10	2,55
Sabang	122,04	43.470	209,97	1,72	4,83
Langsa	217,17	197.909	657,87	3,03	3,32
Lhokseumawe	136,49	200.403	447,25	3,28	2,23
Subulussalam	1.183,60	99.062	604,72	0,51	6,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025, diolah

Tabel 2.147, memberikan informasi bahwa indeks aksesibilitas tertinggi ditemukan di Kota Banda Aceh (12,10 km/km^2), sedangkan indeks aksesibilitas terendah di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues (0,20 km/Km^2). Dengan demikian, pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang memiliki indeks aksesibilitas rendah sangat diperlukan. Selanjutnya, Kabupaten Gayo Lues memiliki indeks mobilitas tertinggi (10,39 km per 1.000 penduduk), sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki nilai indeks mobilitas terendah (2,23 km per 1.000 penduduk). Kota-kota di Aceh (kecuali Subulussalam mencapai 6.1) pada umumnya memiliki indeks mobilitas yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya.

F. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh

diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang mengambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

F1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA

Pola ruang Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Pola ruang berdasarkan RTRW Aceh secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.148**.

Tabel 2.148.
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh 2013-2033

Kawasan Lindung	Luas (ha)	Kawasan Budidaya	Luas (ha)
Hutan Lindung	1.790.626	Permukiman Perkotaan	64.164,14
Cagar Alam Serbajadi	300	Permukiman Perdesaan	89.847,78
SM. Rawa Singkil	81.837	Bandar Udara	835,06
SM. Pinus Jantho	15.375	Hutan Produksi Terbatas	141.876,42
TNGL Aceh	624.651	Hutan Produksi	555.948,52
TWA Pulau Weh Darat	1.250	Hutan Produksi Konversi	15.578,28
TWA P. Weh Laut	5.280	Hutan Pendidikan	230,36
TWA Pinus Jantho	2.614	Kawasan Konservasi	4.764,08
TWA P. Banyak Darat	24.693	Pertanian Lahan Basah	252.063,34
TWA P. Banyak Laut	205.725	Pertanian Lahan Kering	436.004,66
TWA Kuta Malaka	1.549	Hortikultura	24.131,38
Tahura PMI	6.218,34	Perkebunan Besar	392.713,78
Tahura Teupah Selatan	919,58	Perkebunan Rakyat	761.099,36
Tahura Gunung Kapor	1.484,95	Hutan Rakyat	11.711,78
Taman Buru Lingga Isaq	86.319,80	Kawasan Peternakan	12.930,99
Kawasan Lindung Mangrove	1.122,50	Budidaya Perikanan	45.223,43
Kawasan Lindung Resapan Air	2.910	Kawasan Pertambangan	27.776,62
Kawasan Lindung Sempadan Danau	1.504,23	Kawasan Transmigrasi	69.354,01
Kawasan Lindung Sempadan Pantai	9.865,06	Kawasan Industri	6.838,58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai	72.780,35	Pelabuhan	264,18
Kawasan Lindung Sempadan Waduk	27,86	Kawasan Pariwisata	1.909,77
Kawasan Lindung Cagar Budaya	64,55	Cagar Budaya	510,26
Kawasan Lindung Geologi	1.141,87	Pertahanan Keamanan	567,04
Kawasan Lindung Laut	319,88	Aset Sumber Daya Air	180,64
		TPA	20,44
		Tubuh Air	32.961,93
Jumlah	**2.938.579,68**	**Jumlah**	**2.949.506,83**

Sumber: Qanun Nomor 19/2013 Tentang RTRW Aceh 2013-2033

Pola ruang yang diuraikan di dalam **Tabel 2.148** menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan polar uang terhadap RTRWA. Hasil peninjauan kembali terhadap RTRWA yang dituangkan ke dalam rumusan rekomendasi pada Tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRWA, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRWA mendapatkan nilai sebesar 53,10 dan dinyatakan buruk. Hal ini berbanding dengan passing grade senilai 85 sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRWA.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang pada pasal 245 poin (b) mengamanatkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Sesuai dengan amanat tersebut, dokumen dan muatan teknis RZWP3K 2020-2040 harus diintegrasikan ke dalam revisi RTRWA 2013-2033 dan menjadi produk tata ruang. Untuk menciptakan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRWA, hal utama yang harus dilakukan adalah merevisi RTRWA 2013-2033 dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Aceh. Senada dengan itu, pada pasal 60-84 PP Nomor 21 Tahun 2021, maka jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRWA dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRWA.

F2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Ketersediaan RTH publik di Aceh sampai dengan Tahun 2019 telah mencapai sebesar 33.23 persen, hal ini disebabkan karena meningkatnya beberapa Kawasan RTH terutama di Kota Subulussalam sebesar 1806,64 Ha. Meskipun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang harus memenuhi kebutuhan RTH Publik.

Tabel 2.149.
Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan (%)	3,82	12,19	83,13	14,61	46,87	46,86
2	Luasan dalam Ha	516,19	1.013,70	78.527,13	1.211,76	9.928,85	19.432,11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, (SIPSN KLHK 2025)

G. Pengairan

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan : perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air. Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

G1. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi meliputi bangunan saluran dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu jaringan primer, skunder dan tersier. Sedangkan ditinjau dari sisi kewenangan jaringan dibedakan menjadi jaringan irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota.

G1.1. Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh adalah 390.518 Ha yang terdiri dari 1.499 Daerah Irigasi (DI), terdiri dari Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi utuh Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.150**.

Tabel 2.150.
Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya

No	Kewenangan	Lintas Kabupaten/ Kota (Ha)	Utuh Kabupaten/ Kota (Ha)	Total			
1	Pemerintah	26.397,00	82.225	108.622	Ha	13	DI
2	Pemerintah Provinsi	2.144,00	76.324	78.468	Ha	47	DI
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	203.428	203.428	Ha	1.439	DI
Total		**28.541**	**361.977**	**390.518**	**Ha**	**1.499**	**DI**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Penjabaran total Daerah Irigasi dan luasannya berdasarkan kewenangan, terdiri dari Irigasi Permukaan seluas 363.292 Ha yang mencangkup 1.400 D.I; Irigasi Air Tanah seluas 1.858 Ha yang mencangkup 66 D.I; Irigasi Rawa seluas 5.724 Ha yang mencangkup 3 D.I; dan Irigasi Tambak seluas 19.644 Ha yang mencangkup 30 D.I. Irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.151**.

Tabel 2.151.
Jenis Irigasi dan Luasannya

No	Daerah Irigasi	Kewenangan					
		Pemerintah		Aceh		Kabupaten/Kota	
		D.I	Ha	D.I	Ha	D.I	Ha
1	Permukaan	12	101.622	38	65.409	1.350	196.261
2	Air Tanah	-	-	-	-	66	1.858
3	Rawa	-	-	3	5.724	-	-
4	Tambak	1	7.000	6	7.335	23	5.309
Total		**13**	**108.622**	**47**	**78.468**	**1.439**	**203.428**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Tabel 2.151, menunjukkan bahwa irigasi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 13 D.I dengan luas 108.622 Ha, kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 47 D.I dengan luas 78.468 Ha, dan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sebanyak 1.439 DI dengan luas 203.428 Ha. Jumlah dan Luasan Daerah Irigasi tersebut seluruhnya berada di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.152**.

Tabel 2.152
Luasan Daerah Irigasi Wilayah Aceh Berdasarkan Kewenangan Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
1	Simeulue	-	-	-	-	52	5,343
2	Aceh Singkil	1	7,000	1	1,300	11	698
3	Aceh Selatan	-	-	6	10,630	131	13,655
4	Aceh Tenggara	1	15,000	6	8,169	83	15,028
5	Aceh Timur	-	-	6	10,179	73	7,578
6	Aceh Tengah	-	-	-	-	126	16,010
7	Aceh Barat	-	-	1	1,000	97	15,660
8	Aceh Besar	2	12,040	-	-	131	21,070
9	Pi d i e	2	19,118	1	1,100	121	12,232
10	Bireuen	2	9,683	5	8,380	74	13,045
11	Aceh Utara	3	32,539	5	7,834	132	22,040
12	Aceh Barat Daya	1	5,793	2	3,234	30	3,040
13	Gayo Lues	-	-	2	4,675	116	10,011
14	Aceh Tamiang	-	-	1	2,000	41	7,115
15	Nagan Raya	1	7,449	-	-	37	6,931
16	Aceh Jaya	-	-	7	13,859	58	10,669
17	Bener Meriah	-	-	1	1,270	72	14,617

No.	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota	
		D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)	D.I	Luasan (Ha)
18	Pidie Jaya	-	-	3	4,838	58	6,258
19	Banda Aceh	-	-	-	-	2	655
20	Sabang	-	-	-	-	-	-
21	Langsa	-	-	-	-	2	1,773
22	Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-
23	Subulussalam	-	-	-	-	-	-
Total		**13**	**108,622**	**47**	**78,468**	**1,439**	**203.428**

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada Daerah Irigasi disajikan pada **Tabel 2.153**.

Tabel 2.153.
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan

2022										
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Km)	Kondisi Saluran					
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		(Ha)	(Ha)		(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
1	Pusat	101,622	90.544	1.011	817	68,36	351	29,40	27	2,24
2	Provinsi	65,409	38.462	532.51	416.68	78.25	41.38	7.77	35.02	6.58
3	Kab/Kota	196,261	104,018	2,770	1,395.72	50.38	716.02	25.85	658.48	23.77

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2023

Daerah irigasi memiliki luas layanan, fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Berdasarkan data Tahun 2025, Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota, memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan panjang jaringan sepanjang 2.668,97 km, jumlah bangunan sebanyak 10.234 unit dan luas layanan fungsional 68.941 Ha, selanjutnya daerah irigasi kewenangan pusat dengan panjang jaringan sepanjang 1.189,46 km, jumlah bangunan 1011 unit dengan luas layanan fungsional 67.689 Ha, sedangkan daerah irigasi kewenangan provinsi berdasarkan data yang ada pada Tahun 2025, memiliki panjang jaringan 537,34 km, jumlah bangunan 1.117 unit dengan luas layanan fungsional 23.254 Ha. Terjadinya penurunan panjang saluran pembawa dan luas layanan jaringan irigasi kewenangan provinsi jika dibandingkan dengan data tahun–tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya upaya updating data inventarisasi jaringan dan luasan irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.154**.

Tabel 2.154.
Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan

2022								
No	Kewenangan	Luas		Kuantitas (Unit)	Kondisi Bangunan			
		Baku	Fungsional		Baik		Rusak	
		(Ha)	(Ha)		(Unit)	(%)	(Unit)	(%)
1	Pusat	101,622	90.544	1011	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Provinsi	65.409	38.462	1,117	928	83.08	189	16.92
3	Kab/Kota	196.261	104.018	10,943	5,023	45.90	5,920	54.10

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2023

Ditinjau dari kondisi jaringan terdapat kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Pada Tahun 2025 kondisi jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam keadaan baik mencapai 78.25 dalam kondisi rusak sedang 7.77 % dan dalam kondisi rusak berat 13.98 %. Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun.

G1.2. Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik

Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik memiliki Indikator untuk mengukur kinerja suatu Daerah Irigasi yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik. Melalui serangkaian kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik mencapai 72,98 persen. Angka capaian ini melampaui angka yang ditargetkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026 yang sebesar 72,65 persen dengan persentase capaian mencapai 100,45 persen. Perkembangan Persentase Irigasi Aceh Dalam Kondisi Baik dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 di sajikan dalam **Tabel 2.155**.

Tabel 2.155
Hasil Capaian Persentase Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2024

Keterangan	Satuan	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik	%	67,37	71,16	74,20	78,79	79,55	82,56	71,21	72,98

Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2024

Hasil Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2017-2024 menargetkan luas lahan budidaya seluas 65.409 Ha dengan hasil luas lahan fungsional seluas 38.462 Ha. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan satu peta yang merupakan target pemerintah untuk memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan. Maka dari hasil pemetaan Informasi Geospasial Tematik (IGT), dihasilkan luas lahan budidaya yang ditargetkan di Tahun 2024 masih digunakan luasan 38.462 Ha dengan realisasi luasan lahan fungsional mencapai 23.254 Ha. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan realisasi terhadap Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik.

G2. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar datau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem. Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan. Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

G3. Pantai

Fenomena kerusakan pantai sampai saat ini masih terus terjadi, dimana abrasi paling dominan yang terjadi disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim arah angin Barat dan Timur. Panjang garis pantai Aceh sepanjang 2.442 Km dengan total panjang pantai dalam kondisi kritis yang telah teridentifikasi pada Tahun 2024 adalah sepanjang 226.53 Km. Berdasarkan Tabel 2.25, total panjang pantai kritis pada Tahun 2017 adalah sepanjang 233,94 km, dimana 16,54 persen diantaranya berada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan kondisi pantai kritis pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 226,53 km. Hal ini menunjukkan penanganan terhadap pantai kritis ini telah dilakukan sepanjang 7,41 km selama rentang waktu 2017 hingga 2024. Pada Tahun 2024 total pantai yang masih kritis terbesar masih berada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu sepanjang 38,52 km atau 17 persen. Kerusakan pantai karena abrasi di Aceh, berdasarkan data pada Tahun 2024 diperkirakan sepanjang 226,53 km. Panjang Pantai dalam kondisi kritis Tahun 2017-2024 disajikan dalam **Tabel 2.156**.

Tabel 2.156.
Panjang Pantai Dalam Kondisi Kritis Tahun 2017-2024

No.	Kabupaten/ Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sabang	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3.57	3.57
2	Banda Aceh	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5.86	5.86
3	Aceh Besar	38,69	38,62	38.52	38.52	38.52	38.52	38.52	38.52
4	Aceh Jaya	35.03	34.76	34,49	33.22	33.22	32.98	32.98	32.98
5	Aceh Barat	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90
6	Nagan Raya	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
7	Aceh Barat Daya	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70
8	Aceh Selatan	18.30	18.30	18.30	17.84	17.56	17.56	16.83	16.83
9	Aceh Singkil	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
10	Pidie	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02

No.	Kabupaten/ Kota	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	Pidie Jaya	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.83
12	Bireuen	3.66	3.66	3.52	3.20	3.20	3.20	2.35	2.35
13	Lhokseumawe	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
14	Aceh Utara	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	15.07	14.89	14.89
15	Aceh Timur	9.12	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.11
16	Langsa	5.11	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15
17	Simeulue	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54
Jumlah		**233,94**	**231,94**	**231.43**	**229.38**	**229.10**	**228.71**	**226.95**	**226.62**

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2023

G4. Sungai

Dalam rangka pengelolaan DAS secara menyeluruh, dilakukan upaya penanganan terpadu yang melibatkan wilayah hulu, tengah, dan hilir. Pada wilayah hulu, fokus diarahkan pada rehabilitasi lahan melalui kegiatan reboisasi untuk memperkuat fungsi ekosistem DAS. Pada wilayah tengah, dilakukan pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan sungai yang terencana, termasuk pembangunan tanggul untuk perlindungan fasilitas publik. Sementara itu, pada wilayah hilir dilakukan pengerukan di daerah yang mengalami sedimentasi untuk mendukung kelancaran aktivitas pelayaran dan kegiatan perekonomian. Pembangian Wilayah Sungai Aceh sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.138**.



Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015

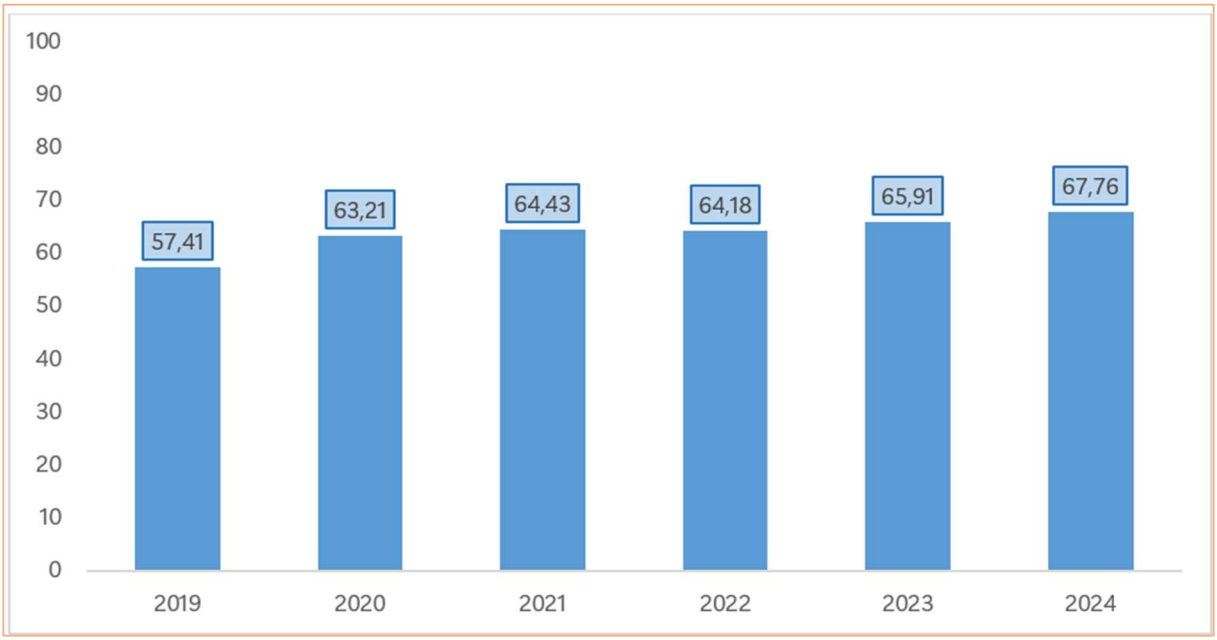
Gambar 2.138. Pembagian Wilayah Sungai Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 DAS berada dalam Daerah Strategis Nasional, yang terdiri atas WS Aceh–Meureudu dengan 30 DAS, WS Woyla–Bateue dengan 13 DAS, dan WS Jambo Aye dengan 13 DAS. Pada wilayah lintas provinsi, terdapat WS Alas–Singkil yang memiliki 8 DAS. Sementara itu, pada wilayah lintas kabupaten/kota terdapat 62 DAS, yang mencakup WS Teunom–Lambeso dengan 14 DAS, WS Pase–Peusangan dengan 10 DAS, WS Tamiang–Langsa dengan 17 DAS, dan WS Baru–Kluet dengan 21 DAS. Adapun dalam lingkup pemerintahan kabupaten/kota, WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Beberapa sungai yang menjadi prioritas pemeliharaan meliputi Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa, dan Krueng Teunom. Selain itu, pada beberapa lokasi sungai tersebut dilakukan upaya penataan dan pengelolaan sempadan sungai guna memperkuat perlindungan aset pemerintah dan memastikan keberlanjutan fungsi sungai bagi kesejahteraan masyarakat

H. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Persen seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 2.139**.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

Gambar 2.139. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, capaian persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di Aceh sampai dengan Tahun 2024 adalah 67,76 persen, diatas capaian nasional, yaitu 65,25 persen.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Sementara itu, luas kawasan kumuh pada Tahun 2020 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 6646,01 ha. Total luasan ini mengalami peningkatan menjadi 6141,62 ha pada Tahun 2021. Kemudian pada Tahun 2022 luas kawasan kumuh meningkat lagi menjadi 7315,46 ha, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 7526,51 ha. Sehingga Total Luasan kawasan kumuh Aceh di awal Tahun 2024 adalah sebesar 7627,54 ha. Secara lebih rinci luas kawasan kumuh di Aceh dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (awal) dapat dilihat pada **Tabel 2.157**.

Tabel 2.157
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2020 dan 2024

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/ Walikota 2020		SK Bupati/ Walikota 2021		SK Bupati/Walikota 2022		SK Bupati/ Walikota 2023		SK Bupati/ Walikota 2024	
	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh	473	6646,01	547	6141,62	613	7315,46	669	7526,51	582	7627,545
Banda Aceh	20	451,40	26	451,4	26	451,4	26	451,4	26	451,4
Aceh Barat	12	152,29	12	152,29	9	194,67	9	194,67	9	185,35
Sabang	4	123,71	4	123,713	4	123,71	16	100,277	16	100,277
Aceh Besar	7	185,37	13	152,28	13	152,28	13	152,28	13	152,28
Langsa	18	359,40	18	359,40	18	359,40	56	359,40	56	359,40
Simeulue	1	29,55	1	29,55	1	29,55	1	29,55	1	29,55
Aceh Tamiang	41	348,12	41	348,12	34	307,55	34	307,55	34	307,55
Aceh Timur	20	538,85	20	538,85	20	538,85	20	538,85	20	538,85
Bireuen	29	1031,72	38	588,90	38	588,90	38	588,90	38	588,90
Aceh Tenggara	52	563,89	51	284,35	51	284,35	51	284,35	51	284,35
Bener Meriah	10	337,25	10	337,25	12	87,05	12	87,05	12	87,05
Aceh Utara	7	62,97	7	62,97	7	62,97	13	297,45	13	297,45
Aceh Singkil	9	108,86	9	108,86	9	108,86	9	108,86	9	108,86
Aceh Barat Daya	33	832,51	33	832,51	33	832,51	33	832,51	33	832,51

Kabupaten/ Kota	SK Bupati/ Walikota 2020		SK Bupati/ Walikota 2021		SK Bupati/Walikota 2022		SK Bupati/ Walikota 2023		SK Bupati/ Walikota 2024	
	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Nagan Raya	43	108,33	43	108,33	43	108,33	43	108,33	34	260,93
Gayo Lues	30	69,34	30	69,34	30	69,34	30	69,34	30	69,34
Pidie Jaya	12	206,10	66	457,16	66	457,16	66	457,16	42	1015,43
Lhokseumawe	17	78,10	17	78,1	17	78,1	17	78,1	17	78,1
Subulussalam	12	320,17	12	320,17	12	320,17	12	320,17	12	320,17
Aceh Tengah	14	187,39	14	187,39	14	187,39	14	187,39	6	161,61
Pidie	66	294,30	66	294,3	66	294,3	66	294,3	66	294,3
Aceh Selatan	8	120,10	8	120,1	82	1542,33	82	1542,33	36	967,6
Aceh Jaya	8	136,29	8	136,29	8	136,29	8	136,29	8	136,29

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, 2024

Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, dilakukan upaya penguatan perencanaan dan pengelolaan sarana pelayanan publik agar dapat digunakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

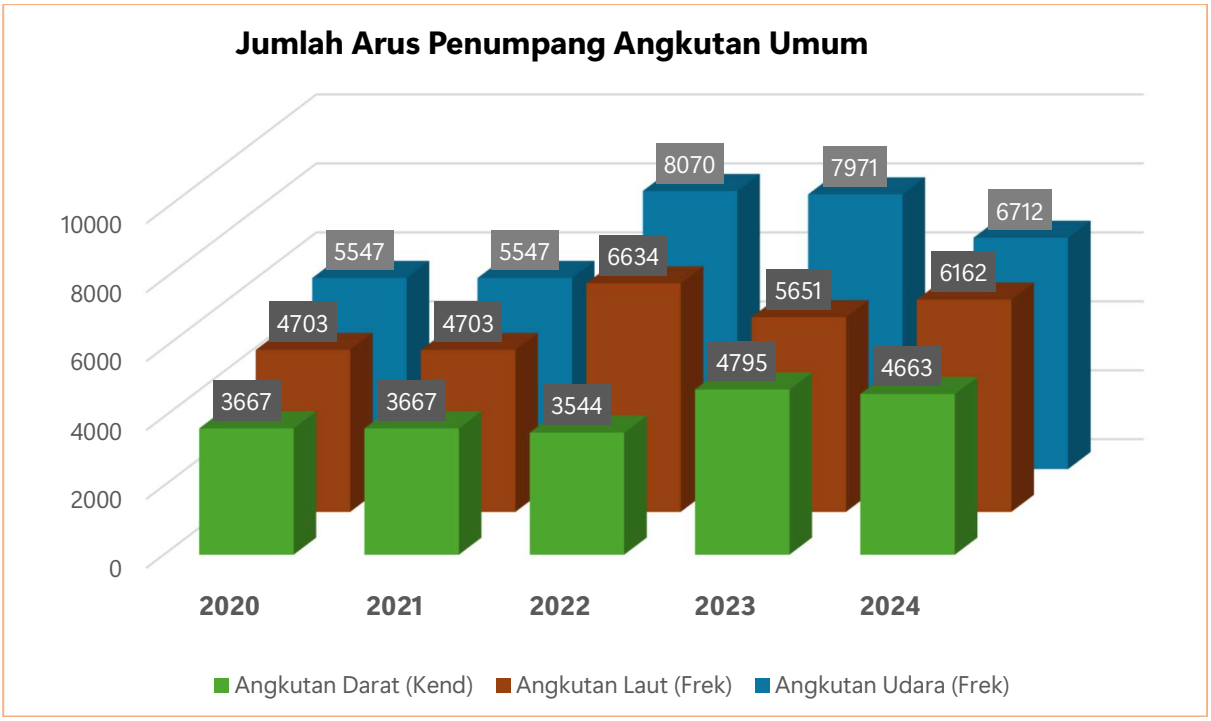
Langkah strategis yang ditempuh meliputi rehabilitasi dan penyesuaian infrastruktur pelayanan publik yang telah ada sehingga memenuhi standar ramah disabilitas. Selain itu, pada tahap perencanaan dan penyusunan desain (DED) pembangunan infrastruktur, dilakukan pelibatan aktif organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan rancangan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Upaya ini dilakukan secara terpadu oleh perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya fasilitas pelayanan publik yang inklusif, sejalan dengan visi Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati layanan publik dengan nyaman

I. Perhubungan

I1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum berupa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara pada Tahun 2024 secara keseluruhan mengalami tren peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya pada arus penumpang angkutan laut, sedangkan jumlah arus penumpang yang menggunakan transportasi udara dan darat cenderung menurun meski tidak signifikan. Tren peningkatan jumlah arus penumpang yang menggunakan angkutan umum di Aceh seiring dengan peningkatan frekuensi penyediaan jasa layanan angkutan serta peningkatan dalam pemenuhan aspek standar pelayanan minimal sebagaimana yang tersaji pada **Gambar 2.140.**

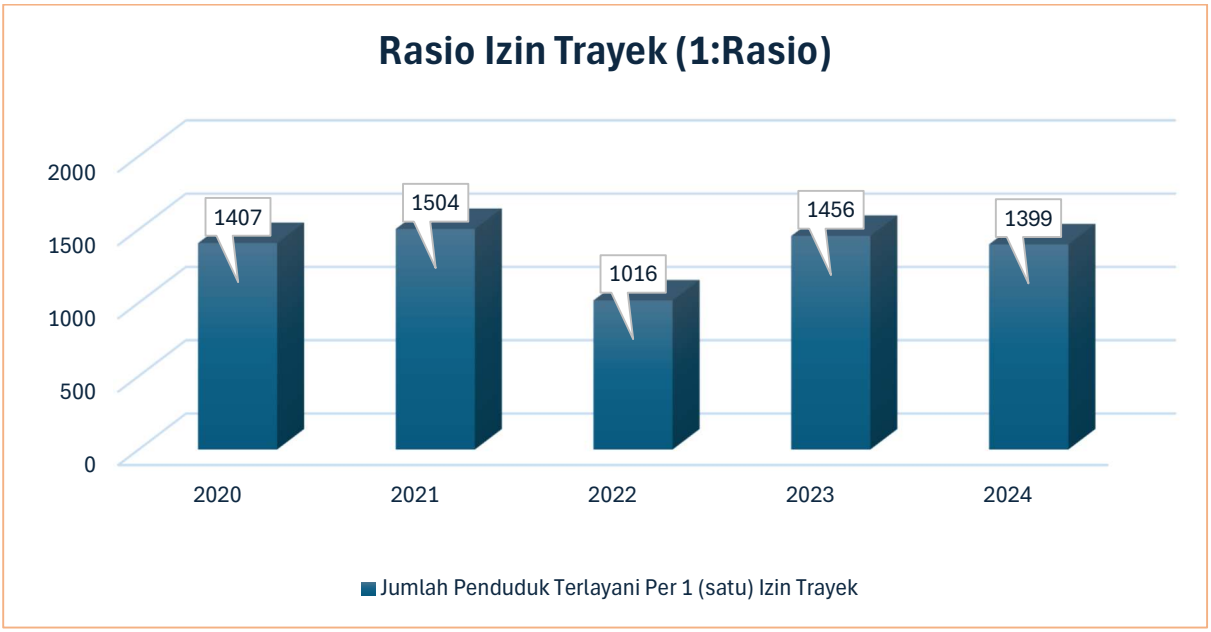


Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

Gambar 2.140. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2025

I2. Rasio izin trayek

Seluruh angkutan umum yang melayani trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan. Rasio izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada Tahun 2024 sebanyak 1 : 1399 izin/jumlah penduduk sebagaimana yang tersaji pada **Gambar 2.141**.



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

Gambar 2.141. Rasio Izin Trayek di Aceh Tahun 2020-2024

Hal ini dimaksudkan untuk dilakukannya penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga dapat meminimalisir adanya trayek ilegal (tidak berizin) yang dilakukan para penyedia jasa (operator) angkutan umum.

I3. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Sarana perhubungan tersebar di 7 zona sebagai pusat kegiatan, yaitu :

a. Zona 1 Pusat Kegiatan di Sabang;
b. Zona 2 Pusat Kegiatan di Banda Aceh (Aceh Besar dan Aceh Jaya);
c. Zona 3 Pusat Kegiatan di Lhokseumawe (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara);
d. Zona 4 Pusat Kegiatan di Takengon (Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara);
e. Zona 5 Pusat Kegiatan di Blang Pidie (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan);
f. Zona 6 Pusat Kegiatan di Singkil (Subulussalam dan Simeulue);
g. Zona 7 Pusat Kegiatan di Langsa (Aceh Timur dan Aceh Tamiang).

Fasilitas dan Prasarana Transportasi di Aceh secara garis besar dibedakan menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kemenhub), Pemerintah Provinsi (Dinas Perhubungan Aceh), dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dishub Kab/Kota). Fasilitas prasarana perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdiri dari 6 pelabuhan penyeberangan, 11 terminal penumpang tipe B dengan 9 diantaranya fungsional, dan 1 fasilitas penerbangan berupa gedung penumpang VIP yang tersebar di beberapa kabupaten/ kota yang ada di Aceh. Berikut visualisasi peta sebaran prasarana perhubungan kewenangan pemerintah provinsi.

Sampai Tahun 2018 Aceh memiliki 12 bandara, 11 pelabuhan laut dan 8 pelabuhan penyeberangan serta 36 terminal yang terdiri dari 4 tipe A, 11 tipe B dan 20 tipe C. Di Tahun 2019 terdapat 1 penambahan status terminal tipe A baru, yaitu Terminal Tipe A Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sehingga jumlah terminal tipe A menjadi 5 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 22 terminal.

Kemudian di Tahun 2022 terdapat penambahan status terminal tipe B Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga jumlah terminal tipe B menjadi 10 terminal, sedangkan terminal tipe C berkurang menjadi 20 terminal. Selanjutnya, pada Tahun 2023 terdapat pengurangan jumlah terminal Tipe B, yaitu Terminal Tipe B Nagan Raya dikarenakan belum termasuk dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh, kondisi ini tetap bertahan hingga Tahun 2024. Di Tahun 2024, status Air Strip di Langsa dihapuskan dari data bandar udara nasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2014 Tatanan Kebandarudaraan Nasional sehingga jumlah bandara turun menjadi 11 bandara, meskipun di dalam KM tersebut terdapat rencana pembangunan Bandara Bireuen yang belum terbangun sampai dengan saat ini, sehingga jumlah bandara tetap menjadi 12 unit. Jumlah pelabuhan, bandara dan terminal di Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.158**.

Tabel 2.158
Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024

Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	8	8	8	8	8
Jumlah Bandar Udara	12	12	12	12	12
Jumlah Terminal Tipe A	5	5	5	5	5
Jumlah Terminal Tipe B	9	10	11	9	9
Jumlah Terminal Tipe C	22	21	20	20	20

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

I4. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Layanan angkatan darat cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun-tahun. Hal ini menujukkan minat masyarakat terhadap angkutan darat semakin menurun. Faktor penyebab utama adalah jarak tempuh dari Banda Aceh ke Medan lebih lama dibandingkan dengan angkutan udara dan pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu untuk menggunakan angkutan udara. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2.159**.

Tabel 2.159
Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase layanan angkutan darat	Aceh	47	10	71.43	32.28	38.07
	Nasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Aceh	27	64	66	60	54
	Nasional	27	27	30	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

I5. Pemasangan Rambu-rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu – Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan, Delineator, Guard Rail (Pagar Pengaman Jalan), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Cermin Tikungan, Speed Bump, Alat Penerangan Jalan dan Marka Jalan.

Persentase fasilitas perlengkapan jalan di Provinsi Aceh terus diarahkan untuk ditingkatkan melalui strategi pembangunan yang terintegrasi. Fokus penanganan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada jalan nasional sebagai jalur utama konektivitas, disertai peningkatan dan rehabilitasi jalan provinsi untuk memperkuat jaringan transportasi daerah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan meningkatnya volume lalu lintas, pengembangan fasilitas perlengkapan jalan juga diarahkan pada penguatan pengamanan di daerah rawan kecelakaan. Hal ini dilakukan melalui perencanaan yang terukur dan penyediaan

perlengkapan jalan yang sesuai standar, sehingga mampu mendukung kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor perhubungan. Secara rinci penjelasan persentase pemasangan rambu-rambu di Aceh Tahun 2020-2024 tersaji pada **Gambar 2.142.**



Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

Gambar 2.142. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Aceh Tahun 2020-2024

I6. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan semakin menurun pada periode 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas dijalan maupun jumlah kepemilikan kendaraan, namun total panjang jalan yang cenderung tetap. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Aceh Tahun 2020-2024 di sajikan pada **Tabel 2.160**.

Tabel 2.160
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Aceh Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Panjang Jalan (km)	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.650,05	23.766,24
Total Jumlah Kendaraan (unit)	3.058.000	3.544.000	2.611.882	2.842.966	2.623.223
Rasio Jumlah Kendaraan per Panjang Jalan (%)	129,30	149,85	110,44	120,21	110,38
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (%)	0,77%	0,67%	0,91%	0,83%	0,91%

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

I7. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2024 didominasi oleh angkutan darat, yaitu 2.317.048 orang (62.63%). Sementara jumlah orang yang terangkut angkutan laut, yaitu 960.338 orang (25.96%) dan angkutan udara sebesar 422.361 orang (11.42%). Kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana Angkutan laut mendominasi mobilasi orang dari pada angkutan umum lainnya karena adanya pandemi. Seperti, pada Tahun 2022 proporsi jumlah orang terangkut angkutan umum pada moda Angkutan Laut sebesar 69.35 persen diikuti angkutan laut, yaitu 25.34 persen dan angkutan udara sebanyak 5.30 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa angkutan darat yang terdiri dari AKAP, AKDP, dan Angkutan Perkotaan/Perdesaan masih menjadi moda primadona utama, yang dibarengi dengan peningkatan drastis di banding dua tahun sebelumnya, meskipun kemudian terdapat tren penurunan pada Tahun 2023 karena beberapa faktor yang menyebabkan pendataan jumlah penumpang menjadi tidak optimal namun pada Tahun 2024 jumlah orang yang terangkut angkutan umum darat mengalami peningkatan cukup signifikan. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Aceh Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2.161**.

Tabel 2.161
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh Tahun 2020-2024

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkutan Darat	633.082	612.980	2,964,869	602.784	2.317.048
Angkutan Laut	566.099	729.669	1,083,553	869.381	960.338
Angkutan Udara	219.111	157.975	226,687	324.524	422.361
Jumlah	**1.418.292**	**1.500.624**	**4.275.109**	**1.796.689**	**3.699.747**

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh, 2025

I8. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Faktor aksesibiltas daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan. Jumlah orang melalui terminal lebih tinggi dibandingkan jumlah orang melalui bandara dan dermaga.

Selanjutnya persentase jumlah orang melalui terminal, pelabuhan dan bandara pada Tahun 2024 mengalami sebaran antar moda yang cukup berimbang, seperti pada jumlah orang melalui terminal, yaitu sebesar 51.69 persen cenderung mengalami peningkatan positif dibandingkan dengan persentase jumlah orang melalui terminal pada Tahun 2023, yaitu sebesar 42.44 persen. Pada kedua jenis moda tranportasi lain, yaitu angkutan udara dan laut, juga terdapat tren positif kenaikan dari periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi efisien dan efektif sisi waktu tempuh dan pelayanan dengan jangkauan pelayanan yang lebih membuat hampir semua moda transportasi kini lebih nyaman untuk digunakan. Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal di Aceh Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.162**.

Tabel 2.162
Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh Tahun 2020-2024

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkutan Darat	633.082	612.980	2,964,869	602.784	2.317.048
Angkutan Laut	566.099	729.669	1,083,553	869.381	960.338
Angkutan Udara	219.111	157.975	226,687	324.524	422.361
Jumlah	**1.418.292**	**1.500.624**	**4.275.109**	**1.796.689**	**3.699.747**

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh. 2025

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak terhadap PDRB tercatat masih sangat minim, di mana pada Tahun 2024 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 0,79 persen. Persentase ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023, dimana rasio pajak hanya sebesar 0,78 persen. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak. Pada **Tabel 2.163** menggambarkan perkembangan Rasio Pajak Asli Aceh (PAA) berfluktuasi dan cenderung menurun. Rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0,89 persen, dan pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalamai penurunan masing-masing sebesar (0,83%, 0,81%,0,78% dan 0,79%). Penurunan Rasio Pajak Asli Aceh terhadap PDRB dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan yang bersumber dari Otsus sebesar 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejak Tahun 2023, dan semakin meningkatnya nilai PDRB sebagai pembanding. Namun secara nominal PAD terus mengalami peningkatan seiring membaik perekonomian Aceh.

Tabel 2.163
Rasio Pajak Asli Aceh (PAA) terhadap PDRB Tahun 2019-2024 (Persen)

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (ADHB) (Trilyun Rupiah)	164,17	166,37	184,98	209,70	227,02	243,20
Pendapatan Pajak Aceh (Trilyun Rupiah)	1,41	1,478	1,53	1,72	1,79	1,93
Rasio Pajak Terhadap PDRB (persen)	0,86	0,89	0,83	0,81	0,78	0,79

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2025

B. Rasio Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB

Ekonomi dan Keuangan Syariah telah dimuat dalam UU 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Arah kebijakan jangka Panjang ekonomi dan keuangan syariah yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 telah mengakomodasi keseluruhan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi dilakukan melalui antara lain :

1. Peningkatan posisi keuangan syariah
2. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi
3. Penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetika dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal.

Pengembangan ekonomi syariah dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) menjadi Prioritas Nasional (PN) 2 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Adapun sasaran untuk terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan. Indikator sasarannya, yaitu peringkat ekonomi syariah Indonesia di tingkat dunia. Selanjut program prioritas ekonomi syariah serta sasaran menguatnya peran ekonomi dan keuangan syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi. Indikator sasaran program prioritaas adalah Kontribusi PDB Syariah (%) Tahun 2022 sebesar 45,66.

Pengarusutamaan ekonomi syariah dalam pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah. Aceh merupakan salah satu provinsi basis dalam pelaksanaan syariah islam, meningkatnya kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi daerah menjadi tujuan dalam pelaksanaannya. Adapun dalam pelaksaanaannya memiliki lima sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya peran keuangan syariah dalam mendukung perekonomian
2. Meningkatnya peran dana sosial syariah mendukung perlindungan sosial
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri halal
4. Meningkatnya ekspor produk halal dan menguatnya Kerjasama ekonomi syariah internasional
5. Meningkatnya indeks literasi ekonomi syariah

Visi Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan dan penerapan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan Aceh yang saling terintegrasi dan berkesinambungan.

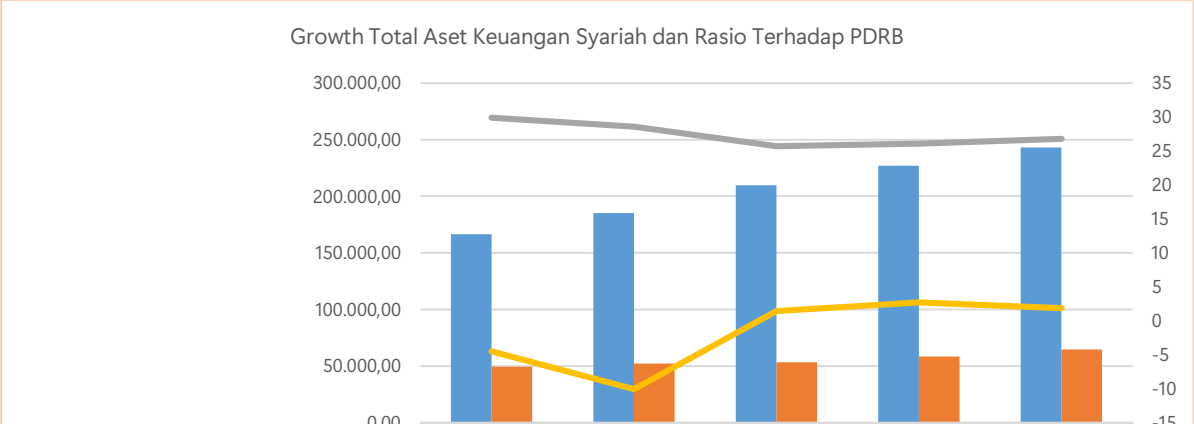
Dalam konteks pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah, terdapat keterkaitan yang terjalin dengan beberapa misi. Misi pertama, yaitu mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah, menjadi landasan pendukung karena

prinsip-prinsip syariah merupakan fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya, misi kedua, yaitu mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA, menjadi kerangka normatif dan legal yang memperkuat penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh.

Secara khusus, strategis, dan utama, keterkaitan pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah tercermin dalam misi ketiga, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas. Melalui misi ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Aceh, mendorong pertumbuhan industri halal, pariwisata berbasis syariah, serta transformasi digital yang mendukung penciptaan ekosistem ekonomi modern, inklusif, dan berdaya saing.

Perkembangan posisi aset keuangan syariah di Aceh dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif. Adapun rasio asset perbankan syariah di Aceh terhadap PDRB juga mengalami peningkatan dan mencapai 26,78 persen pada Tahun 2024. Penguatan keuangan syariah dilakukan dengan beberapa strategi utama, yaitu struktur dan ketahanan industri berdasarkan karakteristik dan kekhasan keuangan syariah, peran keuangan syariah dalam ekosistem syariah dan peran keuangan syariah dalam perekonomian daerah.

Secara lebih rinci kondisi pertumbuhan dan perkembangan asset keuangan syariah dan rasio terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini.



	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ACEH	166.372,32	184.979,88	209.698,36	227.018,20	243.202,09
Total aset bank syariah & BPR syariah	49.370,43	52.159,73	53.295,82	58.264,95	64.521,91
Rasio Aset Perbankan syariah /PDRB	29,94	28,59	25,71	26,07	26,78
Growth AKS (YoY)	-4,51	-10,07	1,40	2,72	1,83

Gambar 2.143. Growth Total Aset Keuangan Syariah dan Rasio Terhadap PDRB

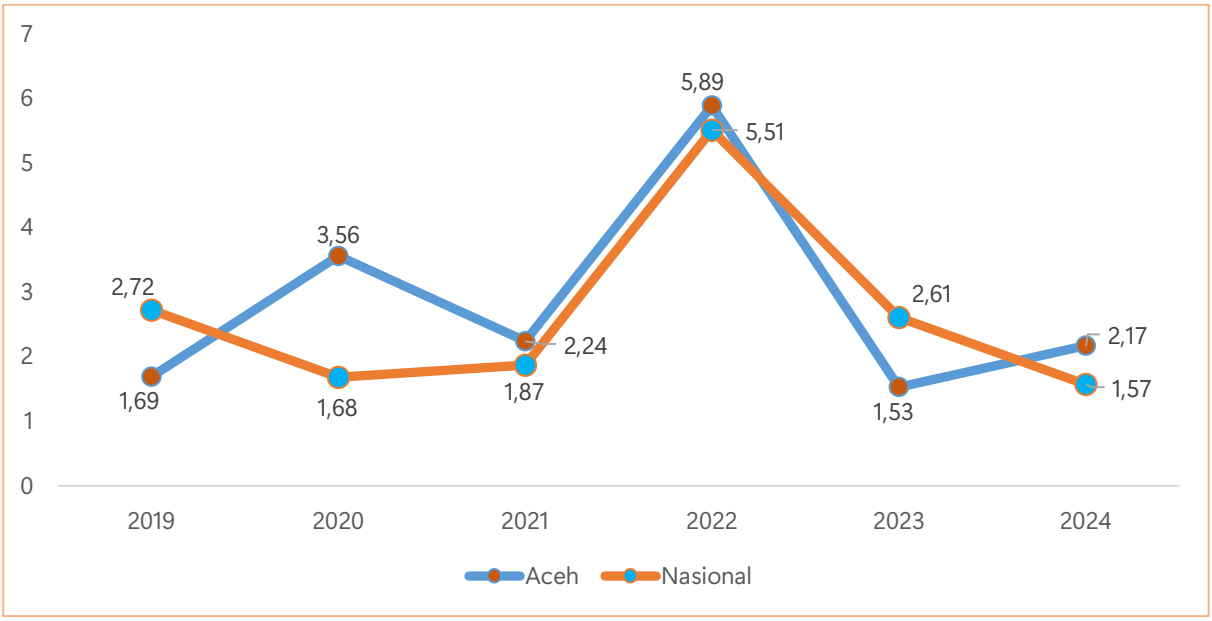
C. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang

dikonsumsi masyarakat. Terjadinya inflasi karena ketidakseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam perekonomian. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu: *cost push inflation*, *demand pull inflation* dan *expected inflation*. Faktor-faktor ini mengakibatkan perubahan nilai tukar yang fluktuatif dan secara tidak langsung menyebabkan kecendrungan kenaikan perubahan struktur harga.

Bank Indonesia, menyatakan bahwa tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan harga secara kontinu dalam periode waktu tertentu. Adapun, pertumbuhan harga yang dimaksud, yaitu kenaikan harga dari beberapa barang yang juga akan berdampak pada kenaikan harga barang lainnya. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu Inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi kurang dari 10 persen per tahun, Inflasi sedang, di antara 10 persen – 30 persen per tahun, Inflasi berat, berkisar antara 30 persen – 100 persen per tahun dan Hiperinflasi, yaitu mencapai lebih dari 100 persen per tahun.

Perkembangan inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (*y-on-y*) relatif mengalami fluktuasi dengan pergerakan yang sama, hal ini terlihat pada **Gambar 2.144** Inflasi Aceh pada Tahun 2019 dapat dikendalikan sebesar 1.69 persen dan nasional sebesar 2.72 persen. Pada Tahun 2020 inflasi Aceh meningkat sebesar 3.56 persen dan nasional relative lebih, yaitu sebesar 1.68 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2022, yaitu Aceh sebesar 5.89 persen dan Nasional sebesar 5.51 persen, kondisi ini meningkat disebabkan oleh kenaikan harga BBM. Secara umum penyebab inflasi di Aceh adalah naiknya harga komoditas *volatile food* dan *administrerad prices*. Kemudian pada Tahun 2023 inflasi Aceh kembali dapat dikendalikan sebesar 1.53 persen dan Nasional sebesar 2.61 persen atau masih berada dibawah rata-rata nasional.



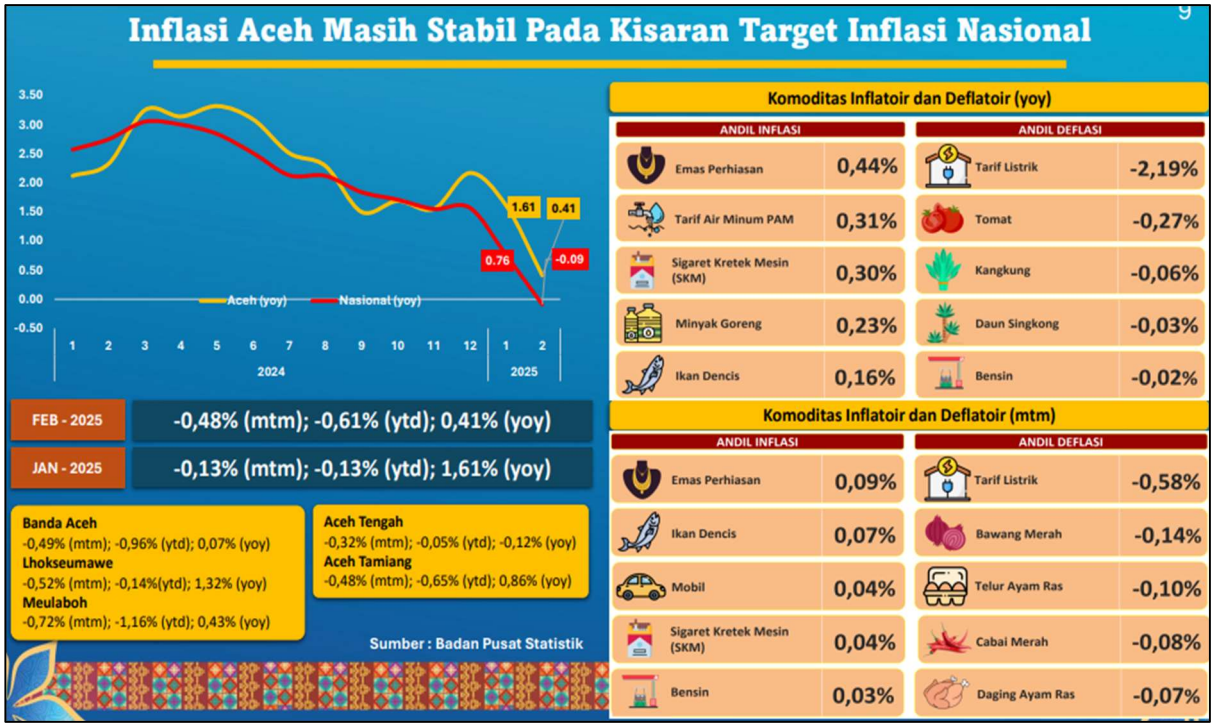
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2.144. Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2019-2024 (y-on-y) (Persen)

Selama periode 2019 - 2024 inflasi Provinsi Aceh relatif stabil dan terkendali. Inflasi terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 1.69 persen, sedangkan inflasi tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 5.89 persen akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi Tahun 2021 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021 dan mengalami inflasi selama 7 bulan dan 5 bulan deflasi. Pada Tahun 2024 inflasi (y-on-y) Aceh terkendali sebesar 2,17 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata nasional yang mampu dikendalikan sebesar 1.57 persen.

Pengaruh inflasi sepanjang Tahun 2024 - Februari 2025 (y-on-y) karena adanya beberapa komoditas inflator yang mengalami kenaikan atau memberi andil inflasi seperti, Emas Perhiasan sebesar 0.44 persen, Tarif Air Minum PAM sebesar 0.31 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0.23 persen, Minyak Goreng sebesar 0,23 persen dan Ikan Dencis sebesar 0,16 persen. Sedangkan komoditas inflator dan deflator (m-to-m) masih disumbangkan oleh perhiasan emas dan Ikan Dencis, masing-masing sebesar (0.09 % dan 0.07%). Andil deflator terjadi pada Trif Listrik sebesar -0.58 persen, Bawang Merah sebesar -0.14 persen dan Telur Ayanm Ras sebesar -0.10 persen.

Kabupaten dan Kota penyumbang inflasi tertinggi selama Tahun 2024 (y-on-y), yaitu kota Lhokseumawe dan Aceh Tamiang masing-masing sebesar (1.32% dan 0.86%). Secara (m-to-m) penyumbang deflator terdapat di Kabupaten Meulaboh dan Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Tengah secara berturut-turut sebagai berikut (-0.72 %, -0.52%, -0.49), untuk lebih jelasnya sebagai mana pada **Gambar 2.145**.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional, 2025

Gambar 2.145. Laju Inflasi Aceh dan Nasional (m-to-m) Tahun 2024- Februari 2025 (Persen)

Inflasi (Gabungan 3 Kota) di Aceh (kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh), selama Tahun 2019-2023 relatif dapat dikendalikan atau berada dibawah 6 persen. Pada Tahun 2019 inflasi terjadi ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama Tahun 2019 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,14 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,68 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Aceh dan Nasional pada periode 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi. IHK Aceh tertinggi terjadi pada Tahun 2019 dimana IHK Bulan Desember berada pada level 131,87 namun masih di bawah rerata nasional, yaitu pada level 139,07. Pada Tahun 2022 IHK Aceh per Desember berada pada level 115,35, IHK tersebut lebih tinggi dari IHK nasional yang berada pada level 113,59. Penyumbang kenaikan IHK tertinggi adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau, Kelompok Sandang dan kelompok Kesehatan, serta kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Tabel 2.164.
Perkembangan Inflasi Umum Aceh, 2019-2024 (Persen)

Bulan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jan	0,4	0,66	0,79	1,04	1,04	1,69
Feb	-0,6	0,44	-0,65	-0,6	-0,6	0,71
Maret	-0,34	0,6	-0,37	0,68	0,68	0,52
April	0,42	-0,15	0,51	1,23	1,23	0,25
Mai	1,27	0,26	0,25	1	1	0,15
Juni	-0,47	-0,15	-0,06	0,75	0,75	0,03
Juli	-0,04	-0,31	-0,07	0,86	0,86	0,11
Agust	-0,1	0,46	0,08	-0,51	-0,51	0,10
Sept	-0,32	-0,1	-0,2	0,77	0,77	0,16
Okt	0,22	0,65	0,43	-0,25	-0,25	-0,03
Nov	-0,12	0,19	0,8	-0,12	-0,12	0,37
Des	0,42	0,99	0,71	0,93	0,93	0,57
Inflasi	**1,69**	**3,59**	**2,24**	**5,89**	**1,53**	**2,17**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2025

Inflasi (Gabungan 3 Kota) pada Tahun 2023 mengalami inflasi *year on year* sebesar 1,53 persen. Inflasi Tahun 2023 dimulai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 115,35 pada bulan November 2023 menjadi 117,11 pada bulan Desember 2023. Sepanjang Tahun 2023, IHK gabungan 3 kota di Aceh mengalami inflasi *year on year* yang cukup stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Diawali dengan bulan januari hingga april 2023 terjadi inflasi *y-on-y* berada diatas target inflasi nasional (inflasi y-on-y Januari sebesar 5,52 persen) dan mencapai puncak inflasi *y-on-y* tertinggi (6,71 persen) pada bulan

februari 2023. Sedangkan inflasi *y-on-y* bulan desember 2023 berada dibawah target inflasi nasional, yaitu sebesar 1,53 persen.

Inflasi (m-to-m) selama bulan Januari-Desember 2023 diatas 5 persen terjadi pada bulan Januari-Maret. Selama April -Desember inflasi mampu dikendalikan di bawah 5 persen dan terkecil sebesar 1.53 persen. Dalam kurun waktu 12 bulan juga terjadi deflasi (m-to-m) selama 4 bulan (Maret, April, Agustus dan Oktober) dan deflasi cukup dalam terjadi pada bulan maret 2023 (deflasi m-to-m 0,51 persen).

Pada Tahun 2023 seluruh kelompok mengalami inflasi, kecuali kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi *y-on-y* di bulan Desember sebesar 0,03 persen. Kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi *y-on-y* selama Tahun 2023 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,72 persen, kemudian kelompok perawatan pribadi dan lainnya dengan andil sebesar 0,25 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi *y-on-y* antara lain Beras dengan andil 0,66 persen, Rokok Kretek Filter dengan andil sebesar 0,26 persen, Cabai Merah dengan andil sebesar 0,24 persen, Emas Perhiasan dengan andil sebesar 0,23 persen, Nasi dengan Lauk dengan andil 0,09 persen, serta Mobil dengan andil sebesar 0,08 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil negatif antara lain Ikan Tongkol/Ambu-Ambu dengan andil -0,32 persen, Daging Ayam Ras dengan andil sebesar -0,08 persen, juga Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar -0,04 persen.

Selama lima tahun terakhir, komoditas yang secara konsisten menjadi penyumbang utama terhadap inflasi di Aceh, berdasarkan perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), antara lain beras, rokok/tembakau, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, angkutan udara, ikan dencis, telur ayam ras, ikan kembung, dan minyak goreng. Komoditas-komoditas tersebut memiliki peran penting dalam dinamika inflasi daerah dan menjadi faktor yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ekonomi Aceh, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

D. Inklusi Keuangan

Stabilitas ekonomi makro memiliki hubungan signifikan dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada kondisi di mana individu dan bisnis memiliki akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup akses ke rekening bank, kredit, asuransi, dan layanan keuangan lainnya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan.

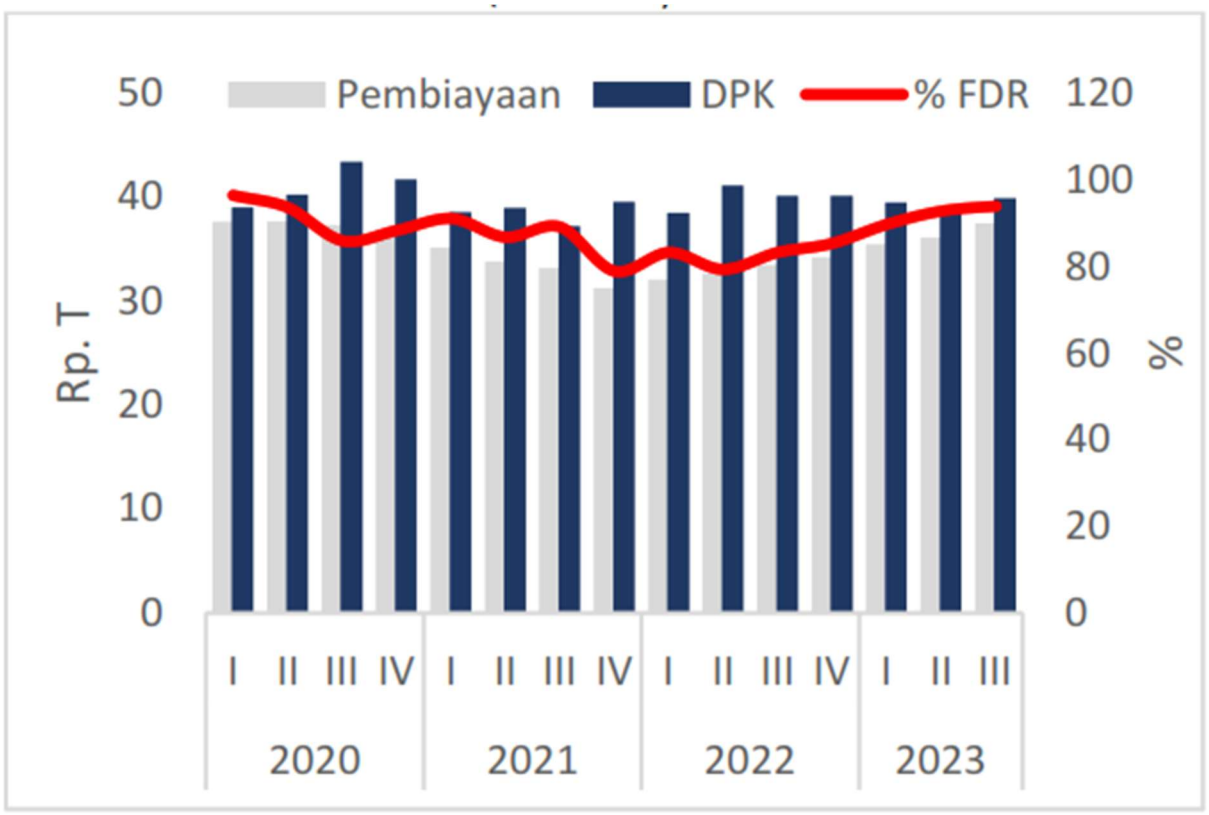
Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang tidak memiliki rekening bank, dapat mengakses layanan keuangan. Inkusi keuangan memungkinkan lebih banyak orang dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengakses layanan keuangan formal. Melalui akses keuangan yang lebih luas, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan , sehingga mengurangi tekanan pada stabilitas ekonomi makro. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi yang lebih merata dengan memberikan akses ke produk keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan dan investasi.

E. Pendalaman/Intermediasi SektorKeuangan

E.1. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan kondisi yang terjaga. Aktivitas perbankan di Aceh pada triwulan III 2023 terpantau mengalami perbaikan. Hal Ini tercermin dari ketahanan dan kualitas kredit/ pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang ada di Aceh.



Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2024

Gambar 2.146. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokBank)

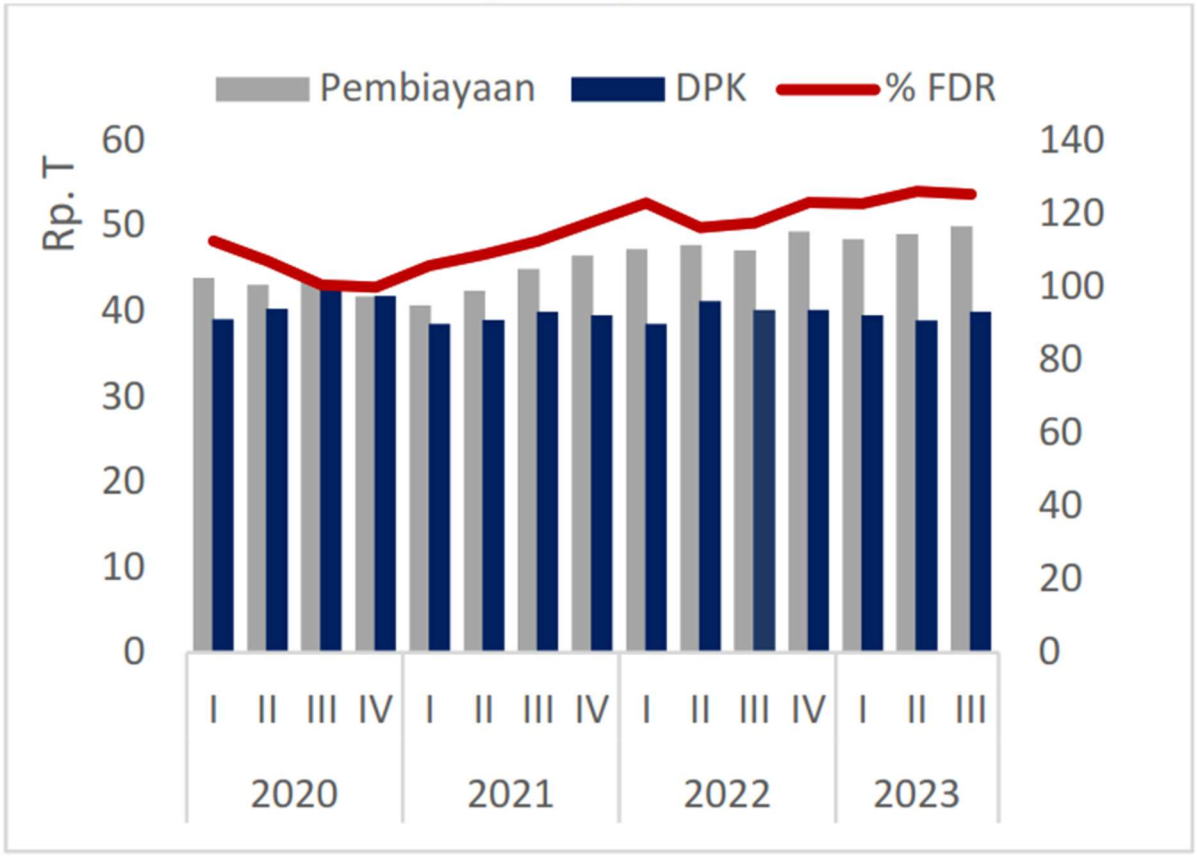
Berdasarkan lokasi bank, penyaluran Pembiayaan di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan sebesar 12,01 persen (yoy). Sementara penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek meningkat sebesar 2,91 persen (yoy). Sementara itu, jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar 0,41 persen (yoy).

Beberapa indikator utama seperti penyaluran pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta rasio jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap jumlah dana yang dihimpun atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terus dipantau untuk melihat bagaimana kondisi sektor keuangan.

Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp.37,48 Trilliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp.33,45 Trilliun, atau naik sebesar Rp.4,05 Trilliun. Penigkatan penyaluran pembiayaan mendorong peningkatan FDR di triwulan laporan menjadi

sebesar 94,02 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 92,90 persen.

Sementara itu, berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp.49,88 Trilliun, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp.47,09 Trilliun, atau naik sebesar 2,78 T. Selanjutnya FDR di triwulan III sebesar 125,15 persen. Nilai FDR triwulan II 2023 sebesar 125,02, sehingga dapat dikatakan nilai FDR triwulan III memiliki angka yang lebih kecil. Penyebabnya adalah nilai DPK pada triwulan III lebih tinggi pada triwulan II. Sehingga meskipun penyaluran pembiayaan meningkat, namun terkoreksi dengan nilai DPPK yang juga meningkat dari triwulan sebelumnya.

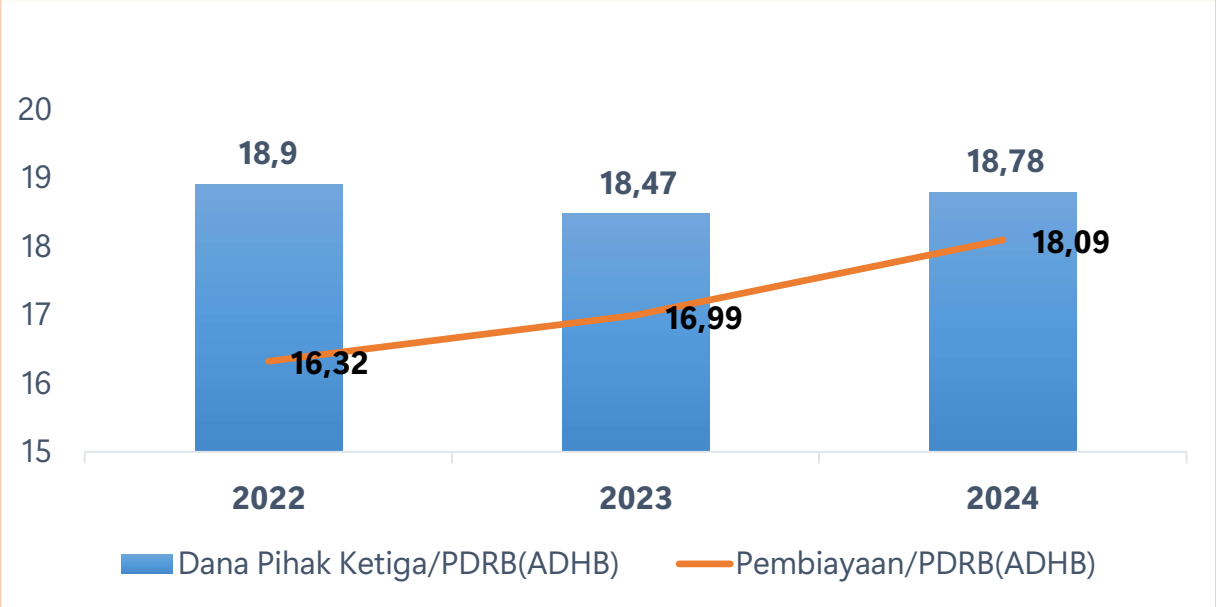


Sumber : Bank Indonesia Cabang Aceh. 2024

Gambar 2.147. Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (LokPro)

Pada triwulan III 2023, DPK di Aceh tercatat sebesar Rp.39,86 Trilliun, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp.38,86 Trilliun. Terjadi kenaikan sebesar 1 Trilliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara umum, DPK di Aceh mengalami tren penurunan sejak triwulan II 2022. Namun, pada triwulan III 2023, terlihat terdapat kenaikan sebesar 0,41 persen (yoy). Nilai DPK di Aceh ke depan diharapkan kembali tinggi dengan penerapan system perbankan syariah.

Adapun perkembangan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan jika di bandingkan dengan PDRB Aceh selama tiga tahun terakhir dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.148**.



Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2025 (diolah)

Gambar 2.148. Perkembangan DPK/PDRB dan Pembiayaan/PDRB Aceh Tahun 2022-2024

Kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK) jika dibandingkan dengan PDRB secara umum mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dalam tiga tahun terakhir menunjukkan besaran di angka 18-19 persen. Dari sisi pembiayaan jika dibandingkan dengan PDRB menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Perbandingan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga yang berada pada kisaran 80-100 persen menunjukkan kondisi dan fungsi intermediasi perbankan yang sehat.

E.2. Return on Asset (ROA)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi. BUMD merupakan salah satu wujud nyata pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Adanya kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi serta saling keterkaitan satu daerah dengan daerah lainnya membuat berbagai alternatif dalam permodalan BUMD.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang dibentuk. BUMD terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, pendirian BUMD ditujukan untuk:

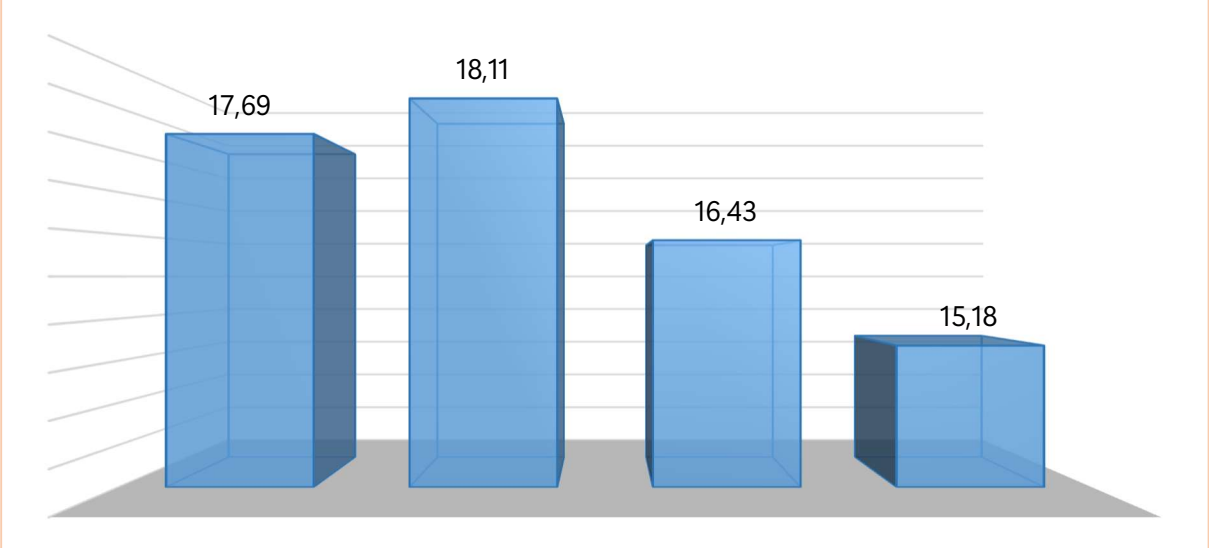
a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, BUMD telah dikembangkan agar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Di antara lima sumber utama PAD, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber andalan PAD. Namun demikian, BUMD memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan.

Otonomi daerah memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan. Tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif tersebut dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan PAD.

Selain peningkatan PAD, tumbuhnya BUMD diharapkan memiliki dampak bagi perekomomian masyarakat di daerah. Munculnya peluang bisnis, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut, misal di sektor jasa (perusahaan transportasi) atau sektor perdagangan (perusahaan ekspor impor). Pertumbuhan ekonomi di daerah diharapkan mampu mendorong *multiplier effect* yang lebih besar. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Aceh Tahun 2023 tersebar di 20 Kabupaten/Kota. Tidak ada BUMD yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya dan Subulussalam. Sebanyak 40 unit usaha merupakan BUMD Kabupaten/Kota dan terdapat 3 BUMD Provinsi.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, BUMD di Kabupaten/Kota umumnya bergerak dalam sektor listrik, gas, dan air yang merupakan perusahaan PDAM (65 persen). PDAM tersebut terdapat pada 21 Kabupaten/Kota. Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh sudah memiliki PDAM untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakatnya. Selain itu, terdapat sebanyak 16 persen perusahaan bergerak pada sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Ini merupakan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Aceh Syariah. Adapun perkembangan rata-rata pengembalian asset pada BUMD Provinsi Aceh dalam periode empat tahun terakhir dapat dilihat pada **Gambar 2.149**.



Sumber : BUMD Provinsi Aceh, 2025 (diolah)

Gambar 2.149. Perkembangan ROA BUMD Aceh Tahun 2021-2024

Perkembangan rasio menghasilkan laba dari asset yang dimiliki menunjukkan terjadinya fluktuasi dan sedikit penurunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh margin laba, efisiensi dan pengelolaan asset, biaya operasional pendapatan serta struktur asset itu sendiri. Sehingga dibutuhkan kemampuan dan strategi pengelolaan yang terbaik sehingga Perusahaan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien namun tetap mampu memberikan hasil yang maksimal.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Komunikasi dan Informatika

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini maka telekomunikasi wajib dikembangkan agar menjadi wahana yang dapat diandalkan. Hal ini sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan website milik Pemerintah Aceh diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kondisi kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak beralih dari telepon rumah ke telepon selular.

Selain daripada itu, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang transparan dan akuntabel serta keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan, maka implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan terus ditingkatkan dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Provinsi Aceh.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tidak terlepas dari ketersediaan berbagai Aplikasi yang ada pada setiap OPD. Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2024 telah mengembangkan sebanyak 136 aplikasi baik berbasis web maupun berbasis mobile. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Pemerintah pada Tahun 2024, Pemerintah Aceh mendapatkan predikat Sangat Baik (nilai indeks 3,64). Capaian tersebut telah melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 2,60.

Tabel 2.165.
Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	3,00	3,19	2,76	3,62	3,64

Sumber: Hasil evaluasi SPBE oleh Pemerintah Pusat

Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, kewenangan dalam mengatur distribusi guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh tersebut berada di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar pendistribusian guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh dilakukan secara tersistem dan terintegrasi.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Tujuan dari IP-ASN adalah untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Capaian IP ASN di Aceh periode Tahun 2020-2024 pada **Tabel 2.166**.

Tabel 2.166.
Data Kesesuaian Jabatan dengan Keahlian Pejabat/Angka IPP Tahun 2019 – 2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)	64,20	61,63	86,1	86,1	57,59	76,76

Sumber : Badan Kepegawaian Aceh. Tahun 2025

Dari **Tabel 2.166** terlihat bahwa IP-ASN Aceh mengalami fluktuasi peningkatan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022, yaitu dari 61,63 menjadi 86,1 dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi menjadi 57,59. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5 dapat direalisasikan sebesar 57,59 dengan persentase tingkat capaian 74,30 persen. Adapun penyebab tidak tercapainya target terhadap indikator ini dikarenakan belum optimalnya pengintegrasian dan sinkronisasi database pegawai ASN Aceh melalui aplikasi E-Keurani dengan aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menyebabkan proses sinkronisasi data tidak dapat terupdate secara menyeluruh. Untuk nilai IP ASN Tahun 2024 belum keluar data realnya hingga saat ini, namun pencapaian sementara hingga januari 2025 nilai Indeks Profesionalitas ASN sebanyak 76,76 dari target 79,8 sehingga capaian kinerja yang di dapat sebanyak 96,19. Data mengenai kegiatan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Aparatur Pemerintah Aceh pada **Tabel 2.167**.

Tabel 2.167.
Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh Tahun 2019 – 2024

No.	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		
		Jlh PNS Aceh	Jlh Peserta Diklat	%
1	2019	22.685	813	3.58
2	2020	21.690	207	0,95

No.	Tahun	Diklat Teknis Fungsional		
		Jlh PNS Aceh	Jlh Peserta Diklat	%
3	2021	21.830	333	1,53
4	2022	22.851	540	2,36
5	2023	22.640	565	2,50
6	2024	19.194		

Sumber : BPSDMA / BKA. Tahun 2025

Tabel 2.167 dapat diketahui bahwa persentase aparatur Pemerintah Aceh yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional pada Tahun 2020 sebesar 0,95 persen dikarenakan refocusing anggaran karena pandemi covid-19 serta penerapan protokol. IP-ASN Aceh mengalami fluktuasi peningkatan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022, yaitu dari 61,63 menjadi 86,1 dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi menjadi 57,59. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,5 dapat direalisasikan sebesar 57,59 dengan persentase tingkat capaian 74,30 persen. Adapun penyebab tidak tercapainya target terhadap indikator ini dikarenakan belum optimalnya pengintegrasian dan sinkronisasi database pegawai ASN Aceh melalui aplikasi E-Keurani dengan aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menyebabkan proses sinkronisasi data tidak dapat terupdate secara menyeluruh. Untuk nilai IP ASN Tahun 2024 belum keluar data realnya hingga saat ini, namun pencapaian sementara hingga januari 2025 nilai Indeks Profesionalitas ASN sebanyak 76,76 dari target 79,8 sehingga capaian kinerja yang di dapat sebanyak 96,19.

B. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka untuk mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup rakyat. Pelayanan perpustakaan yang diberikan dapat diakses melalui 2 (dua) cara, yaitu akses layanan perpustakaan berkunjung langsung ke gedung perpustakaan dan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui aplikasi *playstore* i-pustaka, dimana masyarakat dapat memperoleh bahan bacaan dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke gedung layanan perpustakaan. Layanan i-pustaka merupakan salah satu inovasi bidang kearsipan yang diluncurkan Tahun 2019. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh Tahun 2019-2024 disajikan pada **Tabel 2.168**.

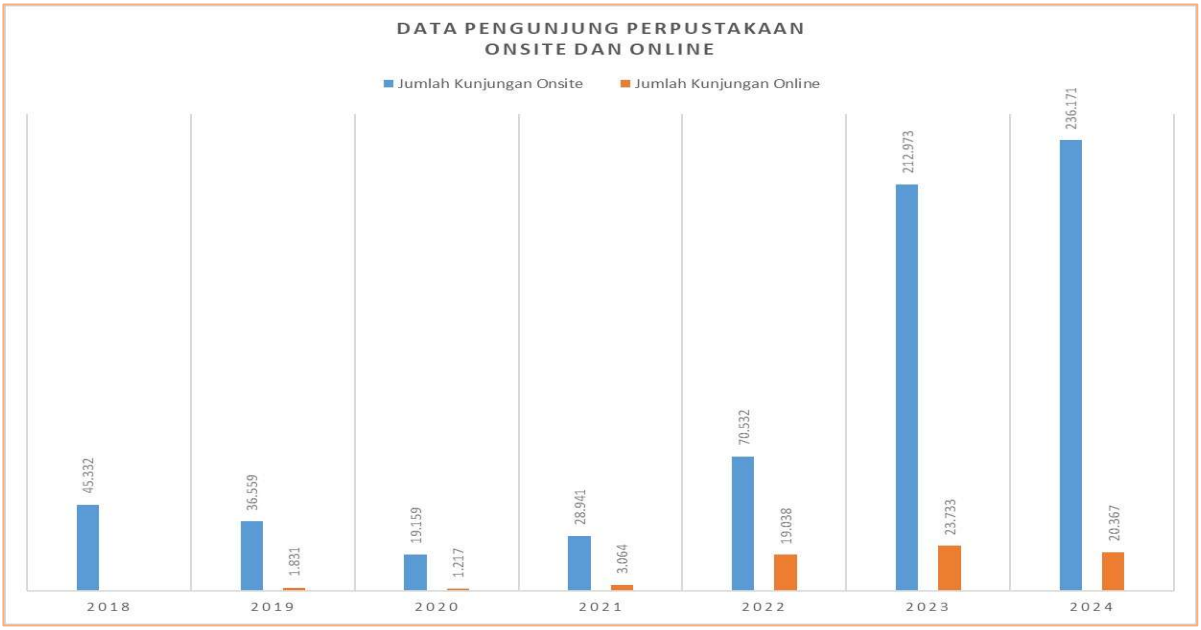
Tabel 2.168.
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Aceh Tahun 2019 – 2024

No.	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Jumlah Judul Buku**						
	- Buku cetak	65.208	65.278	66.004	63.071	72.342	79.640
	Buku digital	6.024	7.699	11.766	12.354	12.510	16.227
2	**Jumlah Eksamplar Buku**						
	- Buku cetak	278.554	278.628	285.890	286.485	347.331	365.127
	- Buku digital	43.310	46.045	86.709	123.989	127.084	153.630

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Pemerintah Aceh berupaya meningkatkan layanan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki daya akselerasi dalam rangka mendukung upaya perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu informasi ilmu pengetahuan masyarakat melalui minat baca masyarakat. Pada Tahun 2024, jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan, yaitu jumlah judul buku cetak sebanyak 79.640 judul dan jumlah buku sebanyak 365.127 Eksemplar, sedangkan koleksi buku digital sebanyak 16.227 judul dan 153.630 Eksemplar. Hal ini terus meningkat dari tahun sebelumnya.

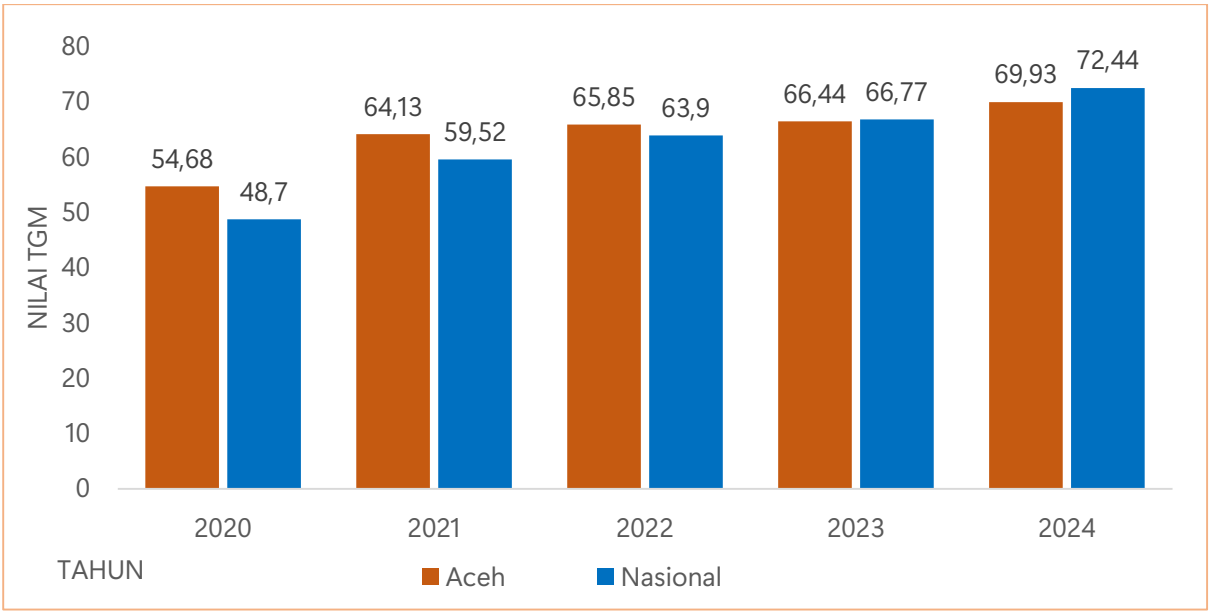
Berdasarkan **Tabel 2.168**, diketahui bahwa jumlah koleksi buku perpustakaan di Aceh setiap tahunnya terus meningkat sehingga berdampak positif kepada jumlah pemustaka baik secara offline maupun online dengan kondisi setiap tahunnya juga terus terjadi peningakatan. Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan Tahun 2018-2024 dapat pada **Gambar 2.150**.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Gambar 2.150. Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018 – 2024

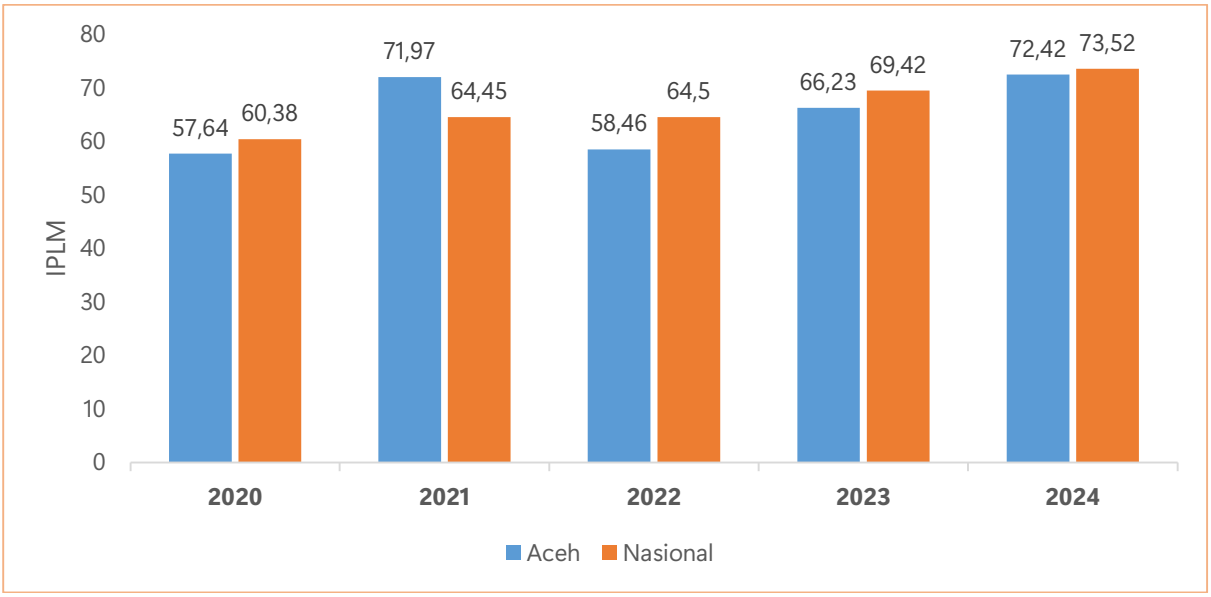
Berdasarkan **Gambar 2.150** diatas, jumlah pemustaka *offline*, pemustaka yang berkunjung langsung ke gedung layanan perpustakaan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan, ini dikarenakan pandemi covid-19, dimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melakukan pembatasan layanan perpustakaan untuk menghindari kerumunan dan juga kebijakan menutup layanan perpustakaan. Tahun 2021 ke Tahun 2022 layanan perpustakaan kembali meningkat sebesar 41.591 pengunjung menjadi 70.532 pengunjung, Tahun 2024 pemustakaan offline meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 236.171 pengunjung, terdiri dari pengunjung *offline* sebesar 236.171 pengunjung, sedangkan pengunjung perpustakaan secara online 20.367 pengunjung.



Sumber : Perpustakaan Nasional, 2025

Gambar 2.151. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Aceh Tahun 2020-2024*

Gambar 2.151 memperlihatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Aceh Tahun 2020-2024. Hal ini merupakan meningkatnya jumlah kunjungan ke pustaka, sangat berpengaruh dengan tingkat kegemaran membaca di Aceh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kembali melakukan pembukaan layanan dengan tetap menjalankan protap pencegahan covid-19. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan juga dipengaruhi oleh peresmian dan pembukaan gedung layanan perpustakaan baru yang berada di jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh. Meningkatnya jumlah kunjungan ke pustaka, sangat berpengaruh dengan tingkat kegemaran membaca di Aceh.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Gambar 2.152. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2020-2024

Dari **Gambar 2.151** diatas terlihat bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Aceh dibandingkan dengan nasional, dimana kebiasaan membaca masyarakat Aceh meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai TGM ini didapat dari hasil survei Perpustakaan Nasional yang dilakukan secara berkala. Data menunjukkan bahwa Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Aceh Tahun 2024, yaitu sebesar 69,93 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, namun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian nilai IPLM Aceh Vs IPLM Nasional dapat dilihat pada **Gambar 2.69**.

Selain tingkat kegemaran membaca, Perpustakaan Nasional menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai indikator kinerja pada RPJMN 2020-2024. Terdapat 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu: (1) Pemerataan layanan perpustakaan; (2) Ketercukupan koleksi; (3) Ketercukupan tenaga perpustakaan; (4) Tingkat kunjungan masyarakat per hari; (5) Jumlah perpustakaan ber-SNP; (6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi; dan (7) Anggota perpustakaan.

Pencapaian IPLM Provinsi Aceh Tahun 2024 sebesar 72,42 dan masuk dalam kategori sedang. Angka ini meningkat dari Tahun 2023 yang hanya 66,23. Jika dibandingkan dengan angka nasional, IPLM Aceh masih berada dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diharapkan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah. Ketersediaan layanan perpustakaan menjadi hal dasar dalam pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah sehingga hal tersebut menjadi ukuran dasar bagi pembangunan literasi masyarakat. Demikian juga, terhadap capaian UPLM Provinsi Aceh dan Nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.169.**

Tabel 2.169.
Rekapan UPLM Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No.	Unsur IPLM	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Aceh	Nas	Aceh	Nas	Aceh	Nas	Aceh	Nas	Aceh	Nas
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,0015	0,00095	0,00102	0,00069	0,0033	0,0030	0,2841	0,4361	0,3212	0,4531
2	Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	0,0929	0,08325	0,10789	0,08946	0,9208	1,5311	0,2736	0,3203	0,3815	0,3793
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,0001	0,00001	0,00012	0,00006	0,0032	0,0033	1,0000	0,6508	1,0000	0,7811
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat (UPLM4)	0,0002	0,00135	0,00013	0,00073	0,4386	0,4144	0,0785	0,4520	0,3666	0,5327
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	0,0002	0,00012	0,00047	0,00017	1,7031	1,6833	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
6	Keterlibatan Masyarakat di Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	0,0046	0,01424	0,00750	0,01413	0,2481	0,3050	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	0,0216	0,02938	0,03407	0,03020	0,6852	0,5733	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
IPLM Skala (0-100)		**57,64**	**61,55**	**71,97**	**64,45**	**58,46**	**64,48**	**66,23**	**69,42**	**72,42**	**73,52**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Tabel 2.169 menunjukkan bahwa, Pertama nilai pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1) meningkat dari 0,0015 pada 2020 menjadi 0,3212 pada 2024, yang menunjukkan perbaikan signifikan. Namun, dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai

0,4531 pada 2024, Aceh masih tertinggal dalam hal pemerataan layanan; Kedua, nilai ketercukupan koleksi (UPLM2) pada Tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup besar dengan nilai 0,9208, meskipun pada 2024 turun sedikit ke 0,3815. Sebagai perbandingan, koleksi di tingkat nasional terus lebih tinggi, mencapai 1,5311 pada 2022 dan tetap stabil pada 0,3793 pada 2024, yang menandakan koleksi perpustakaan di Aceh masih kurang dibandingkan dengan nasional; Ketiga, nilai ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3) pada 2024, Aceh mendapatkan nilai maksimal, yaitu 1,0000, yang menunjukkan bahwa tenaga perpustakaan di Aceh sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dibandingkan dengan nilai nasional yang lebih rendah (0,7811), Aceh menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal jumlah tenaga kerja.

Lebih lanjut; Keempat, nilai tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4) menunjukkan fluktuasi, dengan angka yang cukup tinggi pada 2022 (0,4386), namun turun menjadi 0,3666 pada 2024. Dibandingkan dengan angka nasional yang lebih tinggi pada 2024 (0,5327), tingkat kunjungan di Aceh cenderung lebih rendah, meskipun masih menunjukkan adanya peningkatan dalam partisipasi masyarakat; Kelima, jumlah perpustakaan ber-SNP (UPLM5) menunjukkan nilai mencapai 1,0000 pada 2024, yang berarti semua perpustakaan yang terdaftar telah memenuhi standar nasional. Nilai ini sama dengan tingkat nasional, yang juga menunjukkan 1,0000, mencerminkan kualitas layanan yang baik dan terstandarisasi; Keenam, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi (UPLM6) di Aceh mendapatkan nilai 1,0000 pada 2024, yang menunjukkan partisipasi masyarakat yang sangat baik dalam kegiatan tersebut. Ini sejalan dengan tingkat nasional yang juga mencapai nilai 1,0000, menunjukkan keberhasilan perpustakaan dalam melibatkan masyarakat.

Terakhir, Ketujuh, anggota perpustakaan (UPLM7) menunjukkan bahwa pada 2024, Aceh dan nasional keduanya menunjukkan nilai maksimal 1,0000, yang berarti jumlah anggota perpustakaan sudah optimal dan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Mengenai perkembangan koleksi buku dan karya cetak di Aceh, ini menjadi bagian penting dalam memperkaya layanan perpustakaan seperti yang tersaji pada pada **Tabel 2.170**.

Tabel 2.170.
Koleksi Buku Deposit, Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) Aceh Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Jumlah Judul/Naskah			Jumlah Eksamplar			Ket
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Koleksi Buku Deposit dan KCKR	3.001	3.150	5.269	3.754	3.850	6.010	
2	Koleksi Buku Muatan Lokal	902	950	1.413	1.009	1.100	1.671	
3	Jumlah Naskah Kuno/Manuskrip yang telah ganti rugi	241	286	306	-	-	-	Naskah
4	Jumlah Digitalisasi Naskah Kuno/Manuskrip/Alih Media	74	74	125	-	-	-	Naskah

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Pada **Tabel 2.170** diatas menyajikan data koleksi deposit sampai dengan akhir Tahun 2024. Selain itu juga, agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan pustakawan yang profesional. Adapun data rinci mengenai jumlah fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2024 disajikan pada **Tabel 2.171**.

Tabel 2.171.
Jumlah Fungsional Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2022-2024

No.	Jabatan	2022										2023	2024
		Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Pendidikan						
		L	P	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2	S3		
1	Kabid/Koordinator												
2	Pustakawan Ahli Muda/Sub. Koordinator	3	5		7	1			7	1		8	8
3	Pustakawan Ahli Utama	1				1			1			1	1
4	Pustakawan Ahli Madya	5	8		4	9			11	2		15	14
5	Pustakawan Ahli Muda	7	10		17				17			24	14
6	Pustakawan Ahli Pertama	1			1				1			1	2
7	Pustakawan Penyelia		5		5		1	3	1			5	4
8	Pustakawan Mahir	1			1			1				1	1
	Jumlah	**18**	**28**	**0**	**35**	**11**	**1**	**4**	**38**	**3**	**0**	**46**	**44**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.171** diatas dijelaskan bahwa Sampai dengan Tahun 2024, jumlah pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebanyak 44 orang dengan berbagai tingkat jabatan dan golongan. Jumlah tersebut tentu masih kurang apabila dibandingkan dengan tugas utama yang harus dijalankan, yaitu meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Dari jumlah 44 orang fungsional pustakawan, yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi adalah sebanyak 4 (empat) orang.

C. Kearsipan

Bidang kearsipan di Aceh terus diperkuat melalui upaya pelacakan dan pengumpulan naskah-naskah penting yang memiliki nilai guna tinggi. Naskah-naskah tersebut tersebar di berbagai daerah di Aceh, di luar Aceh, bahkan hingga ke luar negeri. Arsip dipandang sebagai memori kolektif bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjaga identitas dan sejarah daerah. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memperkuat pengelolaan arsip, pemerintah merencanakan pembangunan Depot Arsip (DEPO) di beberapa wilayah strategis di Aceh. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung program penyelamatan arsip dan memastikan kelestarian dokumen bersejarah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan generasi mendatang. Pengolahan arsip dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang

signifikan. Pada Tahun 2024, jumlah arsip yang diolah mencapai 6.982 berkas. Jika dirata-ratakan selama lima tahun terakhir, jumlah arsip yang berhasil diolah setiap tahunnya adalah sebanyak 7.474 berkas. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem kearsipan yang terintegrasi dan modern, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu ditingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang telah mengelola arsip secara baku sebanyak 21 SKPA dari 46 SKPA atau sebesar 45,65 persen. Adapun yang dinilai diantaranya Daftar Arsip Aktif dan In Aktif, sarana dan prasana (record center, lemari, filling cabinet, dll), SDM (Arsiparis/Pengelola Arsip). Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD pengelola arsip secara baku Tahun 2019-2024 disajikan pada **Tabel 2.172**.

Tabel 2.172.
Jumlah Koleksi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan OPD Pengelola Arsip Secara Baku Tahun 2019 – 2024

No.	Uraian	Tahun						Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Arsip	5.698	5.781	6.065	7.201	9.775	9.954	Berkas
2	Jumlah Arsip Terolah	8.045	8.178	9.034	10.032	13.086	6.982	Berkas
3	Jumlah Arsip Belum Terolah	3.871	2.100	1.874	1.061	8.490	2.972	Boks
4	Jumlah Arsip yang telah Alih Media	1.217	3.931	10.333	14.000	6.830	7.000	Lembar
5	Jumlah OPD yang telah mengelola	3	4	4	5	15	21	SKPA

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional. Secara umum, arsip yang telah diproses digitalisasi dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan kemudian diakses oleh publik secara online melalui website JIKN. Saat ini, sudah tersedia informasi arsip dinamis dan statis, yang dapat diakses publik. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi arsip pada JIKN Tahun 2019-2024 yang disajikan pada **Tabel 2.173**.

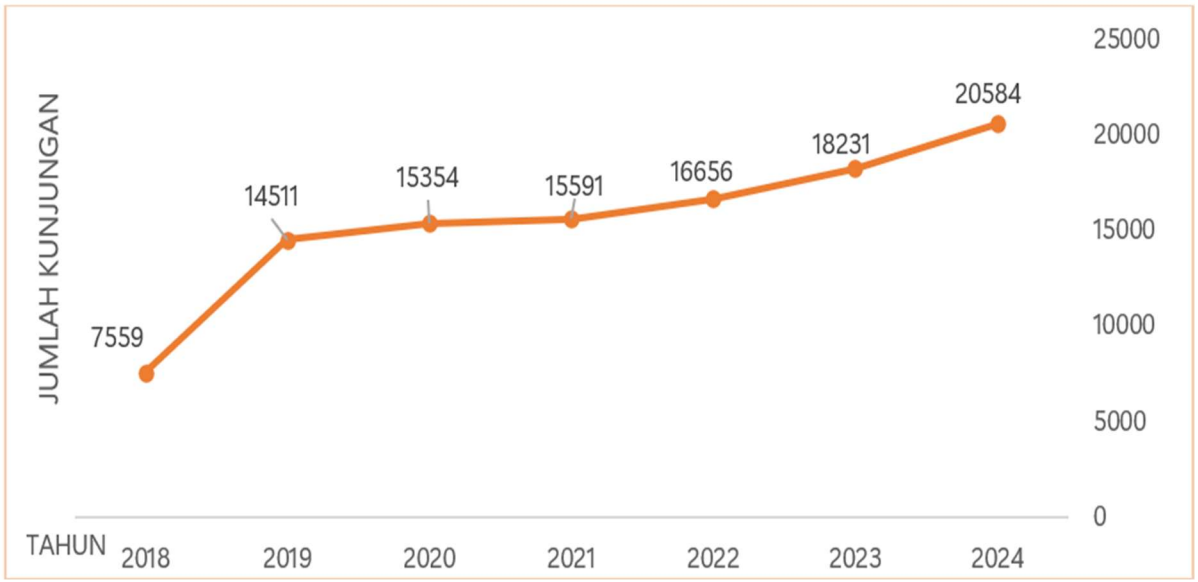
Tabel 2.173.
Jumlah Koleksi Arsip pada JIKN Tahun 2019 – 2024

No.	Uraian	Tahun						Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Arsip yang diinput pada Sistem JIKN	5.000	5.000	5.000	5.500	5.733	4.405	Berkas
2	Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN	2	2	2	7	8	21	Simpul JIKN Kab/Kota

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2025

Jumlah arsip yang sudah terinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2022 adalah sebanyak 5.500 berkas. Adapun Kabupaten/Kota yang telah menjalankan JIKN sampai akhir 2024 sebanyak 21 Kabupaten/Kota. Semua Kabupaten/ Kota di Aceh sudah menerapkan aplikasi JIKN kecuali Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Sabang. Jumlah pengunjung pada Layanan Arsip/JIKN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari grafik diatas bahwa kunjungan layanan arsip/JIKN terus terjadi peningkatan dan di Tahun 2024 meningkat menjadi 20.584 pengunjung.

Selain itu juga, agar memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, maka dibutuhkan arsiparis yang profesional. Pejabat fungsional arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2024, diberbagai jenjang keahlian, mulai dari arsiparis ahli pertama, muda dan madya adalah sebanyak 18 orang. Sedangkan total Fungsional Arsiparis yang tersebar di 40 SKPA terdata sebanyak 108 Arsiparis yang terdiri dari berbagai jenjang keahlian. Jenjang Arsiparis didominasi oleh Arsiparis Ahli Muda sebanyak 61 Arsiparis, selanjutnya di ikuti oleh Arsiparis Ahli Madya sebanyak 19 Arsiparis dan Arsiparis Ahli Pertama sebanyak 15 Arsiparis. Pada jenjang keterampilan, fungsional arsiparis sebanyak 5 orang pada jenjang arsiparis penyelia dan 8 orang pada jenjang arsiparis mahir.

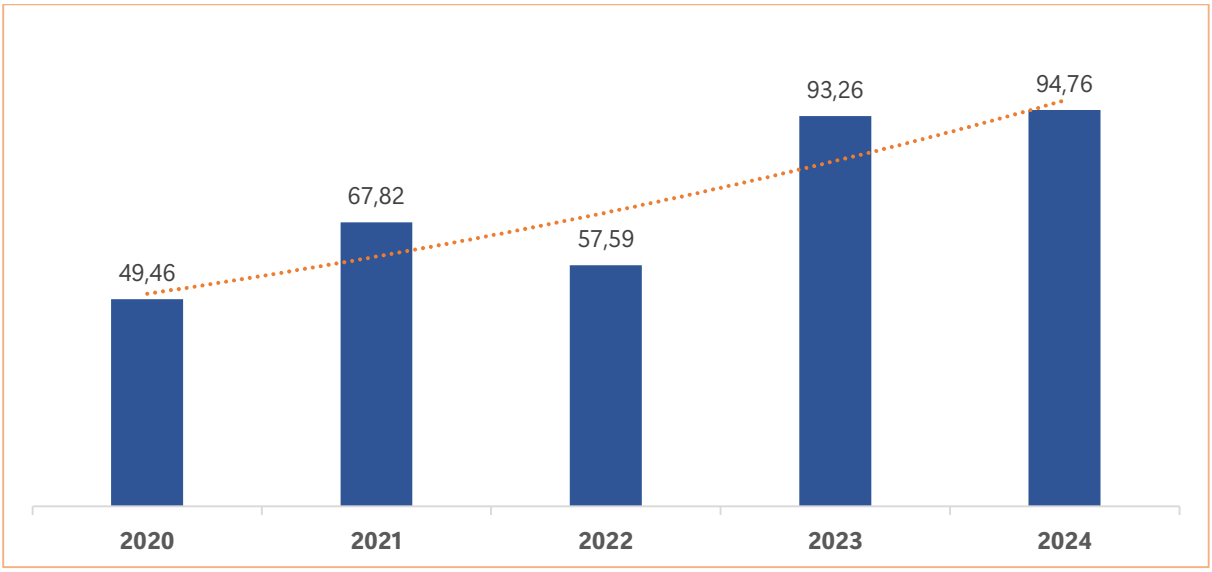


Gambar 2.153. Jumlah Pengunjung Pada Layanan Arsip/JIKN Pada Tahun 2018-2014

D. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Keberhasilan pencapaian target SPM tidak hanya diwujudkan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menangani tugas dan fungsi urusan pemerintahan wajib tersebut, namun juga didukung oleh semua pihak, baik dari berbagai unsur Pemerintahan sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan dukungan semua pihak diharapkan target SPM yang telah ditetapkan dapat tercapai seluruhnya. Karena pencapaian target SPM merupakan* komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pencapaian target SPM juga dapat turut

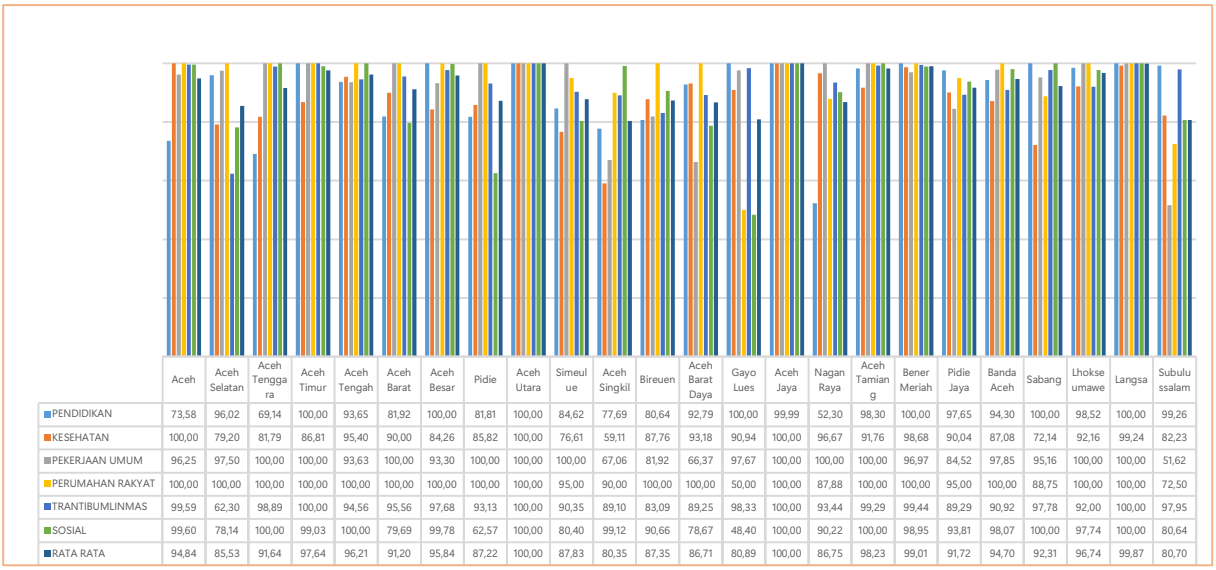
menyumbang upaya Pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya.



Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri,2025 (data diolah)

Gambar 2.154. Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2020-2024

Gambar 2.154 dapat dilihat capaian SPM mengalami fluktuasi baik itu di bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU); Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pera); Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) maupun Sosial. Pada Tahun 2020 capaian SPM Provinsi Aceh berada pada angka 49,46 persen dan meningkat pada Tahun 2021, yaitu 67,82 persen. Pada Tahun 2022 Kembali turun diangka 57,59 persen dan Tahun 2023 naik menjadi 93,26 persen dan terus meningkat pada Tahun 2024 sebesar 94,76 persen. Capaian SPM Provinsi Aceh Tahun 2020-2024. Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2024 dapat dilihat pada **Gambar 2.155**.



	Aceh	Aceh Selatan	Aceh Tenggara	Aceh Timur	Aceh Tengah	Aceh Barat	Aceh Besar	Pidie	Aceh Utara	Simeulue	Aceh Singkil	Bireuen	Aceh Barat Daya	Gayo Lues	Aceh Jaya	Nagan Raya	Aceh Tamiang	Bener Meriah	Pidie Jaya	Banda Aceh	Sabang	Lhokseumawe	Langsa	Subulussalam
PENDIDIKAN	73,58	96,02	69,14	100,00	93,65	81,92	100,00	81,81	100,00	84,62	77,69	80,64	92,79	100,00	99,99	52,30	98,30	100,00	97,65	94,30	100,00	98,52	100,00	99,26
KESEHATAN	100,00	79,20	81,79	86,81	95,40	90,00	84,26	85,82	100,00	76,61	59,11	87,76	93,18	90,94	100,00	96,67	91,76	98,68	90,04	87,08	72,14	92,16	99,24	82,23
PEKERJAAN UMUM	96,25	97,50	100,00	100,00	93,63	100,00	93,30	100,00	100,00	100,00	67,06	81,92	66,37	97,67	100,00	100,00	100,00	96,97	84,52	97,85	95,16	100,00	100,00	51,62
PERUMAHAN RAKYAT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	90,00	100,00	100,00	50,00	100,00	87,88	100,00	100,00	95,00	100,00	88,75	100,00	100,00	72,50
TRANTIBUMLINMAS	99,59	62,30	98,89	100,00	94,56	95,56	97,68	93,13	100,00	90,35	89,10	83,09	89,25	98,33	100,00	93,44	99,29	99,44	89,29	90,92	97,78	92,00	100,00	97,95
SOSIAL	99,60	78,14	100,00	99,03	100,00	79,69	99,78	62,57	100,00	80,40	99,12	90,66	78,67	48,40	100,00	90,22	100,00	98,95	93,81	98,07	100,00	97,74	100,00	80,64
RATA RATA	94,84	85,53	91,64	97,64	96,21	91,20	95,84	87,22	100,00	87,83	80,35	87,35	86,71	80,89	100,00	86,75	98,23	99,01	91,72	94,70	92,31	96,74	99,87	80,70

Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, 2025 (data diolah)

Gambar 2.155. Capaian SPM Seluruh Bidang Se-Aceh e-SPM Tahun 2024

Capaian terbaik SPM terdapat pada bidang Kesehatan dimana telah mencapai 100 persen di Tahun 2024, walaupun sempat mengalami penurunan Tahun 2021 pada angka 48,12 persen. Diikuti dengan bidang sosial yang juga mengalami fluktuasi, dan pada Tahun 2024 berada pada angka 99,60 persen. Sedangkan, capaian SPM terendah pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU), dimana mendapat nilai terendah dalam empat tahun terakhir, namun mengalami kenaikan secara signifikan di angka 100 persen pada Tahun 2023 dan kembali turun pada Tahun 2024 di angka 96,34 persen.

Berdasarkan capaian SPM Se-Aceh berbasis aplikasi hanya 1 (satu) Kabupaten yang telah melakukan pelaporan capaian SPM Triwulan IV Tahun 2024 dengan baik (Progres sudah mencapai 100%), yaitu Kabupaten Aceh Utara, sementara Kab/Kota lainnya telah melakukan pelaporan walaupun setiap bidangnya masih belum terlaksana 100 persen.

E. Kepuasan Pelayanan Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggunakan Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (IKPK) sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (IKPK) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna layanan.

Dasar hukum penyusunan IKPK adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Jenis Layanan Keuangan yang dinilai adalah jenis layanan yang diselenggarakan oleh BPKA umumnya meliputi:

1. Pelayanan Penyusunan Anggaran SKPA
2. Pelayanan Penyusunan Anggaran Kabupaten/Kota
3. Penerbitan SP2D dan Pencairan Dana
4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

Unsur-Unsur yang Dinilai dalam IKPK Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur pelayanan yang menjadi standar evaluasi, yaitu:

1. Persyaratan: Kejelasan dan kemudahan persyaratan layanan
2. Prosedur: Kejelasan alur atau tata cara pelayanan
3. Waktu Penyelesaian: Ketepatan waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif: Kesesuaian dan kewajaran biaya layanan
5. Produk Layanan: Kualitas dan kesesuaian hasil layanan
6. Kompetensi Pelaksana: Kemampuan dan keahlian petugas
7. Perilaku Pelaksana: Sopan santun dan keramahan petugas
8. Sarana dan Prasarana: Fasilitas dan kemudahan akses
9. Penanganan Pengaduan: Mekanisme dan efektivitas penyelesaian keluhan

Metode dan Perhitungan IKPK meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan Kuesioner: Berbasis skala Likert 5 poin
2. Pengumpulan Data Responden: Responden adalah pengguna jasa BKPA.

3. Perhitungan Nilai IKPK: IKPK (1-5) = $Jumlah\ total\ skor\ Jumlah\ unsur \times Jumlah\ responden$ Interpretasi Nilai IKPK: Skor IKPK Mutu Pelayanan 5 Sangat Baik 4 Baik 3 Cukup Baik 2 Kurang Baik 1 Tidak Baik.

Pelaksanaan survei IKPK secara berkala pada BPKA bertujuan untuk memastikan pelayanan keuangan publik menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Hasil survei menjadi dasar untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam peningkatan mutu layanan keuangan daerah

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substantial

Disajikan indikator antara lain, Persentase Penegakan Perda, persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Ketentraman dan Ketertiban dan indikator lain sesuai konteks daerah.

A. Indeks Reformasi Hukum

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum melalui Kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh melaksanakan program reviu terhadap peraturan perundang-undangan melalui instrumen Indek Reformasi Hukum yang merupakan instrumen pengukuran reformasi hukum meliputi identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi Aceh.

B. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Pada Tahun 2021 untuk terakhir kalinya angka IDI yang dikeluarkan oleh BPS merupakan angka IDI yang penghitungannya menggunakan metode lama untuk IDI 2020.

Tabel 2.174.
Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2019 – 2023

Aspek	Tahun		Aspek	Tahun		
	2019	2020		2021	2022	2023
Aspek kebebasan sipil	93,28	84,49	Aspek Kebebasan	85,5	84,66	77,48
Aspek hak-hak politik	65,22	64,94	Aspek Kesetaraan	81,41	80,1	83,74
Aspek lembaga demokrasi	79,08	74,91	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,82	77,9	76,46
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	**78**	**73,93**	**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh**	**80,92**	**80,82**	**77,53**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024 (Data termutakhir)

Berdasarkan **Tabel 2.174** Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 Provinsi Aceh mencapai angka 77,53 dalam skala 0 sampai 100. Klasifikasi tingkat Kinerja demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni tinggi (indeks > 80), sedang (indeks 60 –

80), dan rendah (indeks < 60). Hal ini berarti Indeks demokrasi Provinsi Aceh termasuk dalam kategori kinerja demokrasi sedang. IDI Tahun 2021 merupakan tahun pertama yang dihitung menggunakan metode baru sehingga angkanya tidak dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya (2013-2020). Kinerja Demokrasi Aceh menempati peringkat 18 Nasional dari 34 Provinsi di Indonesia meskipun nilai rata-rata IDI Aceh turun dari Tahun 2022 sebesar 80,82 menjadi 77,53 pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2022 IDI dihitung menggunakan metode baru untuk IDI 2021 mencakup tiga aspek, yaitu Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. IDI menggunakan metode kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain, yaitu: 1. media review (analisis isi berita surat kabar) 2. document review (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah) 3. *focused group discussion* (FGD).

C. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan MAsyarakat

C1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 yang berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, dengan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK Kemenkumham Oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.175**.

Tabel 2.175.
Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM danYayasan/Perkumpulan yang Telah Terdaftar pada Badan Kesbangpol Aceh 2019 – 2024

No.	Ormas/LSM/Yayasan/ Perkumpulan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	14	10	25	7	6	29
2	Yayasan / Perkumpulan	37	119	42	39	45	11
Jumlah		51	129	67	46	51	43

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.175** diatas bahwa Ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol Aceh selama bulan Januari s/d Desember 2024 dengan target penyelesaian Surat Tanda Lapor untuk Yayasan/ Perkumpulan dan Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas/LSM.

Proses verifikasi berkas permohonan (Proposal) selambat-lambatnya terhitung 3 hari kerja akan di keluar surat Tanda Lapor, sedangkan Ormas/LSM proses penginputan melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) pada web ULA

Kemendagri membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan terverifikasi lengkap untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Politik Pemerintahan Umum yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Pada Tahun 2024 sebanyak 29 Ormas/LSM yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017. Sementara Yayasan/Perkumpulan yang melaporkan keberadaan kepada Kesbangpol Aceh sebanyak 45 Yayasan/Perkumpulan yang memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Surat Tanda Lapor.

C2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Provinsi sejak Tahun 2018-2022 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan untuk setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu Periode berikutnya. Jumlah bantuan keuangan diterima Partai Politik setiap tahunnya dihitung secara Proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Provinsi hasil Pemilu sebelumnya.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun 2022 diberikan dalam 1 tahap dan mendapat kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) menjadi Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dihitung berdasarkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Periode 2019-2024. Hak Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan diatur sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang berbunyi "Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

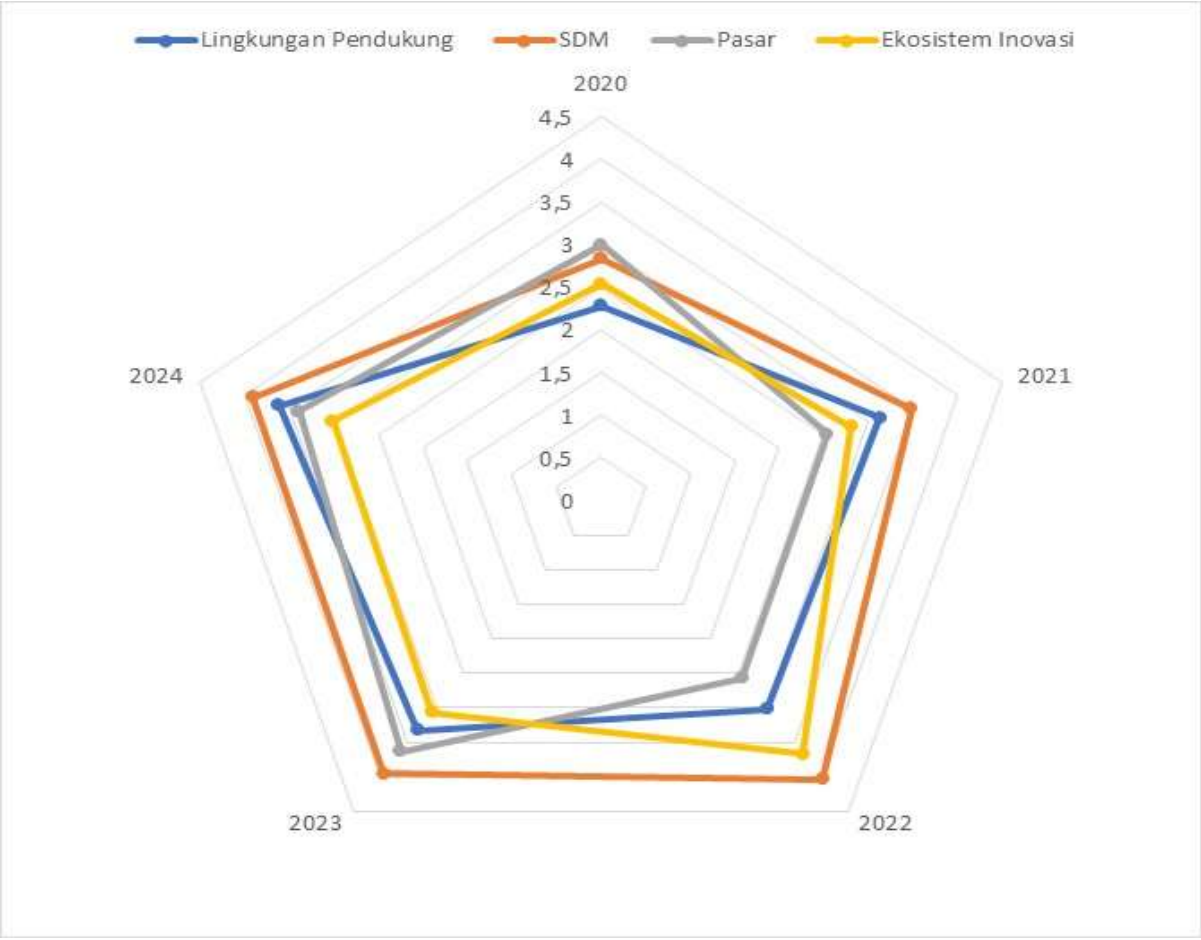
Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Periode 2019-2024 sampai dengan Tahun 2022 seluruhnya berjumlah Rp. 16.660.150.000,- (enam belas milyar enam ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pengukuran IDSD ini melibatkan empat aspek utama, yaitu Ekosistem Inovasi, Pasar/Market, Sumber Daya Manusia (SDM)/Human Capital, dan Penguat/Enabling Environment. Secara keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator yang digunakan untuk menilai keempat aspek tersebut.

Berdasarkan nilai IDSD yang dirilis oleh Kemenristek, Aceh termasuk dalam kategori daerah dengan daya saing tinggi, dengan nilai 2,66 pada Tahun 2020 dan 2,99 pada Tahun 2021. Namun, pada Tahun 2022, nilai IDSD yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak lagi menggunakan kategori seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai gantinya, pendekatan yang digunakan lebih berbasis pada perbandingan antar daerah secara objektif dan terukur, dengan menggunakan indikator yang lebih spesifik.



Gambar 2.156. Perbandingan Nilai Aspek IDSD Aceh Tahun 2020-2024

Nilai IDSD Aceh pada Tahun 2022 mencapai 3,15, mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena meredanya kondisi covid-19 di Aceh, yang memungkinkan aktivitas ekonomi kembali berjalan, serta berkat dampak dari diterbitkannya Keppres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi covid-19 di Indonesia.

Aspek IDSD di Tahun 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan. Peningkatan terjadi pada aspek komponen SDM, ekosistem inovasi dan pasar. Penurunan signifikan terjadi pada penilaian aspek komponen lingkungan pendukung, dimana kontributor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah pada pilar perekomian daerah. Pada Tahun 2023 dan 2024 aspek ekosistem inovasi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pertama, kurangnya keanekaragaman sektor dan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah yang membatasi potensi inovasi; kedua, keterbatasan dana riset dan fasilitas penelitian, serta tantangan dalam komersialisasi inovasi yang menyebabkan banyak produk inovatif gagal mencapai pasar.

Lebih lanjut untuk aspek lingkungan pendukung, pasar dan SDM mengalami peningkatan. Hal ini sangat ditentukan oleh berbagai hal, seperti perbaikan infrastruktur, transparansi pemerintahan, kemajuan sektor pendidikan dan pelatihan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pemerintah Aceh dan sektor swasta diharapkan terus memperbaiki berbagai aspek ini, menciptakan iklim yang lebih baik untuk investasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperbaiki konektivitas serta pelayanan publik, yang pada gilirannya mendukung perkembangan pasar dan ekosistem inovasi di daerah tersebut. Aspek yang memiliki rata-rata nilai IDSD tertinggi adalah aspek SDM sebesar 3,95 (2023) dan 3,92 (2024) sedangkan aspek yang memiliki rata-rata nilai IDSD terendah adalah aspek ekosistem inovasi sebesar 3,06 (2023) dan 3,01 (2024).

2.1.4.4. Kinerja Pembangunan Masa Lalu

Untuk melihat capaian kinerja Bidang Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan, berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun terakhir berdasarkan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) disajikan pada **Tabel 2.176**.

Tabel 2.176.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.a.1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	68,357	28,72	101,27	104,05	87,45	Dinas Pendidikan Aceh	
1.a.2		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	96,89	974.023	58,71	45	52,60	Dinas Pendidikan Aceh	
1.b.1	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,59	0,18	1,93	1,80 /1000 penduduk	1,92	Dinas Kesehatan Aceh	
1.b.2		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100,00	100,00	6,94	94,52	9,88	Dinas Kesehatan Aceh	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.b.3		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	7,098	2,315	0,00	27,56	4,00	Dinas Kesehatan Aceh	
1.b.4		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	0,154	0,08	0,00	31,77	82,86	Dinas Kesehatan Aceh	
1.c.1.1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	32,87	20,00	19,91	65,98	100	Dinas Pengairan Aceh	
1.c.1.2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	4,89	4,99	4,99	57,37	100	Dinas Pengairan Aceh	
1.c.2		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	78,79	39,13	82,56	58,80	46,32	Dinas Pengairan Aceh	
1.c.3		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota		0				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
1.c.4		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional		0				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
1.c.5		Rasio kemantapan Jalan	79,81	76,55	89,26	86,13	80,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
1.c.6		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		0	100	0	100	Dinas Nakermobdu k Aceh	
1.d.1	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh	
1.d.2		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh	
1.d.3		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	4,046	11,25	38,88	23,92	9,73	Dinas Perumahan Rakyat dan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
								Permukiman Aceh	
1.d.4		Persentase satuan pemukiman yang sudah dilengkapi PSU		0,00	0,00	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh	
1.e.1	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	87,50	100	100	100	100	Satuan Polisi PP dan WH Aceh	
1.e.2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	35	37,5	62,50	87,50	14,55	Satuan Polisi PP dan WH Aceh	
1.e.3		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100	100	0	100	Badan Pengendalian Bencana Aceh	
1.e.4		Persentase penanganan pra bencana	13,04	60,87	39	43,48		Badan Pengendalian Bencana Aceh	
1.e.5		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	60,87	100	100	100	100	Badan Pengendalian Bencana Aceh	
1.f.1	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,0	100,0	100,00	0,247	Dinas Sosial Aceh	
1.f.2		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,0	67	100,00	100	Dinas Sosial Aceh	
1.f.3		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100	100,00	100	Dinas Sosial Aceh	
1.f.4		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100	100,00	100	Dinas Sosial Aceh	
1.f.5		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Dinas Sosial Aceh	
2.a.1.1	TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100	100	83		0	Dinas Nakermobduk Aceh	
2.a.1.2		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,020	0,370	0,001	0,10	0,490	Dinas Nakermobduk Aceh	
2.a.2		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,00016	357,756	569,945	5.938.454.937,9021	3.546.326.810,3473	Dinas Nakermobduk Aceh	
2.a.3		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	85,43	94,774	19,016	100,00	40,74	Dinas Nakermobduk Aceh	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.a.4		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5,91	38,182	28,199	50,30	35,22	Dinas Nakermobduk Aceh	
2.a.5		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan	85,42	89,376	12,388	100	10,35	Dinas Nakermobduk Aceh	
2.b.1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,0	31,7430	17,6440	8,49	8,1	Dinas PP dan PA Aceh	
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	11,255	2,4481	0,1780	0,66	0,4356	Dinas PP dan PA Aceh	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak termaksud TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,39	17,16	16,87	24,95	24,55	Dinas PP dan PA Aceh	
2.c.1	PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	73,79	87,87	77,64	101,59	96,71	Dinas Pangan Aceh	
2.d.1	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		0	0	100	0	Dinas Pertanahan Aceh	
2.d.2		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	4,947	100	0	100	Dinas Pertanahan Aceh	
2.d.3		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota		0	0	0	0	Dinas Pertanahan Aceh	
2.e.1	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	78,99	75,54	78.29	78,53	79,66	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
2.e.2		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	75	57,143	12,281	100	35,90	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
2.f.1.1	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	100	100	99,20		Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
2.f.1.2		Pemanfaatan data kependudukan	113,04	39,13	74,468	74,47	14,29	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.g.1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	95,84	22,552		58,67	73,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
2.g.2		Persentase peningkatan status desa mandiri	105,78	1,132		41,14	31,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
2.h.1	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	100660	8642		2,34	2,32	Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.h.2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	42,302	39,535		65,33	63,85	Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.h.3		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0	0		8,05	21,21	Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.i.1	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas provinsi	77,45			0,66	0,82	Dinas Perhubungan Aceh	
2.i.2		V/C Ratio di Jalan Provinsi	53,83	39,78	0,46	0,5	0,52	Dinas Perhubungan Aceh	
2.j.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100		Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh	
2.j.2		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	8,602	100		60	100	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh	
2.j.3		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	0	4,239		81	67,63	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh	
2.k.1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	7,750	57,609		8,79	14,29	Dinas Koperasi & UKM Aceh	
2.k.2		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	1,189	100,00		39,05	38,05	Dinas Koperasi & UKM Aceh	
2.l	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di provinsi	85,917	19,631		668,29	- 45,118736	DPMPTSP Aceh	
2.m.1	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,164	1,185		0,140	0,130	Dispora Aceh	
2.m.2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,2	0,204		6,31	8,97	Dispora Aceh	
2.m.3		Peningkatan Prestasi Olahraga	3	29		108 Medali	261	Dispora Aceh	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
2.n.1	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100			Bappeda Aceh	
2.n.2		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100			Bappeda Aceh	
2.o	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	10,540	48,936	54,20	48,530	54,109	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh	
2.p	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	0,25	2,22	140,32	100	91,39	Disbudpar Aceh	
2.q.1	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	59,89	3,57	64,13	66,64	69,93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
2.q.2		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	34,37	34,37	56,5	66,23	72,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
2.r.1	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	56,25	79	77	27132	96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
2.r.2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	47,50	13223	2476	1401	67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
3.a.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	319594,46	417947,05	95,24	102,66	100,53	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	10,30	60	69,00	68,57	78	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
3.b.1	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-25,294	-91,802	229.062	1,036	1,608	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
3.b.2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-25,294	9,136	17,28	25,66	25,68	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
3.b.3		Tingkat hunian akomodasi	0,00	0,00	3794,09	0,00	0,08	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
3.b.4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	11,122	26,331	8,25	1,670	1,737	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
3.c.1	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	567,21	560,303	554,24	0	0.070565	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
3.c.2		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	0	4,027	45,04	57,23	-13.2089126	Dinas Peternakan Aceh	
3.d.1	KEHUTANAN	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam	2,866	4,56	100,00	80,00	51,79	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
3.d.2		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	0,01	8,869	0,055	0,08	0,20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
3.d.3		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	0,147	1,088	0,257	0,24	2,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
3.e.1	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	96,10	100	100	100	100	Dinas ESDM Aceh	
3.e.2		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100	100	100	100	100	Dinas ESDM Aceh	
3.f.1	PERDAGANGAN	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	-99,098	67,417	37,462	13,3	10,13	Disperindag Aceh	
3.f.2		Persentase penangananpengaduan konsumen	100	50	100	40	83,72	Disperindag Aceh	
3.f.3		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	52,406	89,513	94,332	88,89	92,90	Disperindag Aceh	
3.f.4		Tertib Usaha	100	0	0	0	0	Disperindag Aceh	
3.f.5		Persentase kinerja realisasi pupuk	0,024	87,575	97959	70	52,67	Distanbun	
3.f.6		Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	90,9	98,118	3,859	6,98	21,09	Disperindag Aceh	
3.f.7		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	11,49	11,51	324,034	8,60	92,66	Disperindag Aceh	
3.g.1	PERINDUSTRIAN	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	175	61,364	10,345	6,25	1,47	Disperindag Aceh	
3.g.2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	10	0	267,44	164,08	112,23	Disperindag Aceh	
3.g.3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	100	0	0,00	Disperindag Aceh	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
3.g.4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0,00	Disperindag Aceh	
3.g.5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0,00	Disperindag Aceh	
3.g.6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	43	1	1	50	120	Disperindag Aceh	
32	TRANSMIGRASI	-					100,00	Disnakermobduk	
4.a.1	Perencanaan Dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,648	5,389	13,206	12,57	21,00	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
4.a.2		Rasio PAD	5,187	1852,783	21,752	28,41	28,66	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
4.a.3		Rasio Belanja Pemerintahan (dikurangi expenditures)	74,763	83,927	54,738	59,98	62,60	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
4.a.4		Opini Keuangan		6	7	8	10	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
4.a.5		Maturitas Sistem Ingindalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	2	3	3	3	Inspektorat Aceh	
4.a.6		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	3	3	3	3	Inspektorat Aceh	
4.i.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	5,085	0	0	0	0	Biro PBJ Setda Aceh	
4.i.2		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	30,207	1710,256	7034,831	99,8	87,22	Biro PBJ Setda Aceh	
4.i.3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,68	89,144	99,777	35,90	17,89	Biro PBJ Setda Aceh	
4.i.4		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Milik Daerah				51,11	-23,1648921	Biro PBJ Setda Aceh	
4.j.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	13,975	292,105	333,172	77,35	79,82	Badan Kepegawaian Aceh	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS	5,314	84,414	12,19	12,83	19,15	Badan Kepegawaian Aceh	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					Sumber Data	Ket
			2020	2021	2022	2023	2024		
		tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,462	14,083	100	16,79	74,97	Badan Kepegawaian Aceh	
4.k.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	16,326	18,3727	2,4554	2,2	0,8979	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
4.k.2		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	15,068	4,3511	13,614	4,60	8,8836	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
4.k.3		Assets management	4	4	4	4	4	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
4.k.4		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	34,342	29,977	9,5336	31,65	4,2663	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
4.1.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	110,679	107,958	100	99,87	93,35	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh	
4.1.2		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	126,31	978,623	33,333	100	100	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh	

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh, 2021-2025

Selanjutnya, selain capaian kinerja Bidang Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan selama 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024, Pemerintah Aceh juga memiliki capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2020-2024 dari indikator tujuan dan sasaran *(Impact/Benefit* dan *Outcome*) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.177**.

Tabel 2.177.
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2020-2024

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	**Indeks**	**73,93**	**80,92**	**80,82**	**74,26**	**77,53 *)**	**104,46%**	**77,53 *)**	**104,40%**	**H**		
Skor aspek hak-hak politik	**Skor**	**64,94**	**80,28**	**80,10**	**65,90**	**74,47 *)**	**113,69%**	**74,47 *)**	**113,00%**	**H**		
Skor aspek lembaga demokrasi	**Skor**	**74,91**	**75,82**	**77,90**	**76,00**	**73,12 *)**	**96,85%**	**73,12 *)**	**96,21%**	**H**		
Indeks Reformasi Birokrasi	**Indeks**	**62,58**	**63,36**	**64,09**	**68**	**80,36**	**112,95%**	**80,36**	**97,06%**	**H**		
Opini BKP	**WTP/WDP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**100,00%**	**WTP**	**100,00%**	**H**		
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	**Skor**	**-**	**2,55/ Rendah**	**2,9618/ Sedang**	**2,9500/ Tinggi**	**2,8734/ Sedang**	**101,75%**	**2,8734/ Sedang**	**98,31%**	**H**		
Level Maturitas SPIP Terintegrasi	**Level**	**2**	**2**	**3**	**Level 3**	**3**	**100,00%**	**3**	**100,00%**	**H**		
Nilai SAKIP	**Nilai**	**63,21**	**64, 17**	**64,8**	**71**	**67,02**	**101,55%**	**67,02%**	**94,39%**	**H**		
Indeks Profesionalitas ASN	**Indeks**	**85,66**	**61,63/ 86,10**	**31,53**	**84,55**	**76,76**	**96,19%**	**76,76%**	**90,79%**	**H**		
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	**Indeks**	**3**	**3,19**	**2,76**	**3,55**	**3,64**	**107,06%**	**36,4%**	**102,54%**	**H**		
Pertumbuhan ekonomi	%	-0,37	2,79	4,21	4,25	4,15	111%	4,15	97,65%	**H**		
Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	%	35	35	50	91	96,24	155%	96,24	105,76%	**H**		
Meningkatkan Kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk	%	n/a	65,00	90,00	99,00	99,88	102%	99,88	100,89%	**H**		
Meningkatkan Kebijakan dibidang Pencatatan Sipil	%	n/a	65,00	90,00	99,00	98,96	102%	98,96	99,96%	**H**		

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Profil Perkembangan Kependudukan	Database	n/a	1	1	1	1	100%	1	100,00%	H		
Indeks pengendalian kegiatan pembangunan	Indeks	n/a	n/a	n/a	0,9	1	111%	1	111,11%	H		
Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	Indeks	n/a	0,95	0,95	0,95	0,95	100%	0,95	100,00%	H		
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	n/a	100	84	90	60	75%	60	66,67%			M
Persentase Pembahasan Qanun yang terfasilitasi	%	n/a	30,77	33,33	90	90,91	114%	90,91	101,01%	H		
Indeks Pembangunan Syariat Islam	**Indeks**	**32**	**81,84**	**81,84**	**89**	**83,9**	**98,71%**	**83,9**	**94,27%**	H		
Angka Melek Alqur'an	**%**	**83**	**82**	**82**	**90**	**83,25**	**97,94%**	**83,25%**	**92,50%**	H		
Persentase Dayah yang Mandiri	**%**	**n/a**	**31,72**	**34,32**	**47**	**39**	**95,12%**	**39,00%**	**82,98%**		K	
Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal	**%**	**n/a**	**42**	**44,25**	**60,00**	**39,71**	**77,86%**	**39,71%**	**66,18%**		K	
Persentase Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	**%**	**76**	**69**	**77,79**	**90**	**96,54**	**120,68%**	**96,54%**	**107,27%**	H		
Rasio Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	**Rasio**	**n/a**	**0,005**	**0,089**	0,065	**0,054**	**85,71%**	**5%**	**83,08%**		K	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Indeks**	**71,99**	**72,18**	**72,8**	**73,18**	**75,36**	**103,54%**	**75,36**	**102,98%**	H		
Angka Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**14,31**	**14,36**	**14,37**	**14,57**	**14,39**	**99,10%**	**14,39%**	**98,76%**	H		
Angka Rata-rata Lama Sekolah	**Tahun**	**9,33**	**9,37**	**9,44**	**10,03**	**9,64**	**98,17%**	**9,64%**	**96,11%**	H		

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Meningkatnya Sekolah dengan Akreditasi A	**%**	**94,00**	**27,95**	**27,57**	**96,2**	**95,81**	**100,00%**	**95,81%**	**99,59%**	**H**		
Persentase SMA dan SMK yang menerapkan kurikulum pengembangan bahasa dan sastra	%	95	95	97,5	100	100	100%	100,00	100,00%	**H**		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**Indeks**	**92,07**	**92,23**	**92,24**	**93,58**	**93,28**	**100,32%**	**93,28%**	**99,68%**	**H**		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**Indeks**	**63,47**	**63,24**	**63,92**	**68,51**	**67,5**	**101,52%**	**67,50%**	**98,53%**	**H**		
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif	%	100	100	100	100	100	100%	100,00	100,00%	**H**		
Persentase kab/kota yang difasilitasi penguatan 5 dimensi penguatan kualitas keluarga	%	0	56,5	60,5	72,5	72,5	112%	72,50	100,00%	**H**		
Persentase SIGA/SDGA yang digunakan dalam dokumen perencanaan	%	0	9,62	19,23	48,08	48,08	167%	48,08	100,00%	**H**		
Persentase Kab/kota menuju layak anak (KLA)	%	0	26	28	34	34	113%	34,00	100,00%	**H**		
Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	80	78,8	80	80	80	100%	80,00	100,00%	**H**		
Persentase Wanita berumur 15 s/d 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Mengunakan /Memakai alat KB	%	0	43,38	43,88	45,38	45,38	102%	45,38	100,00%	**H**		

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Persentase Pemuda Berpretasi	**%**	**0,5**	**7,43**	**2,97**	**4,66**	**4,2**	**100,72%**	**42,0%**	**90,13%**	**H**		
Persentase Atlet yang Berprestasi	**%**	**2**	**17,35**	**49,32**	**80**	**50**	**58,82%**	**50**	**62,50%**			**M**
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**Indeks**	**12,11**	**15,12**	**12,28**	**19,91**	**15,21**	**86,86%**	**15,21**	**76,39%**		**K**	
Rasio naskah kuno yang ada di aceh	Rasio	0,0227	0,0227	0,041	0,001	0,0510	8160%	0,051	8160,00%	**H**		
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	7,41	7,41	9,26	97	50	66%	50,00	51,55%		**K**	
Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	0,099	0,09	0,27	0,1	0,05	50%	0,05	50,00%			**M**
Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,04	0,009	0,025	0,015	0,035	308%	0,04	230,78%	**H**		
Angka Usia Harapan Hidup	**Tahun**	**72,69**	**72,71**	**72,92**	**70,1**	**73,2**	**104,34%**	**73,2**	**104,22%**	**H**		
Persentase Balita Stunting	**%**	**19**	**33,2**	**31,2**	**25**	**27**	**98,64%**	**27**	**85,03%**		**K**	
Angka Kematian Bayi	**/1000 LH**	**10**	**11**	**10**	**7**	**8**	**69,23%**	**8**	**53,85%**			**M**
Angka Kematian Ibu	**/100.000 LH**	**172**	**223**	**141**	**175**	**98**	**72,13%**	**98**	**75,43%**		**K**	
Persentase Rumah Sakit Regional yang fungsional	**%**	**45**	**45,4**	**45,4**	**100**	**20**	**100%**	**20**	**20,00%**			**M**
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Jiwa	**Indeks**	**81,89**	**85,1**	**85,53**	**86,4**	**86,1**	**100,47%**	**86,10%**	**99,65%**	**H**		
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Zaenal Abidin	**Indeks**	**96,5**	**91,1**	**80,63**	**92,5**	**83,82**	**91,34%**	**83,82%**	**90,62%**	**H**		
Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Rumah Sakit Ibu Anak	**Indeks**	**82,5**	**81,4**	**84,00**	**86,25**	**81**	**96,72%**	**81,00%**	**93,91%**	**H**		

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Persentase Penduduk Miskin	**%**	**14,99**	**15,53**	**14,64**	**13,53**	**12,64**	**86,99%**	**12,64**	**107,04%**	**H**		
Nilai Tukar Petani (NTP)	**Indeks**	**98,74**	**101,19**	**107,45**	**101,8**	**122,11**	**120,32%**	**122,11%**	**119,95%**	**H**		
Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Persen		23,81	23,81	38,09	28,5225	100%	28,52	74,88%		**K**	
Persentase Keberhasilan Panen	Persen	n/a	95	95	95,3	71,485	75%	71,49	75,01%		**K**	
Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	Persen		70	90	76	58	79%	58,00	76,32%		**K**	
Rasio jumlah ternak yang diasuransikan/polis yang diajukan terhadap populasi ternak besar	Rasio	0	0	0	0,36	0	0%	0,00	0,00%			**M**
Persentase jumlah izin usaha peternakan yang dikeluarkan terhadap total unit pelaku usaha peternakan	Persen	0	0	0	0,35	0	0%	0,00	0%			**M**
Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	102,65	104,21	104,7	106,43	114,21	108%	114,21	107,31%	**H**		
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	**NTN**	**97,48**	**105,07**	**111,83**	**104**	**105,94**	**102,85%**	**105,94%**	**101,87%**	**H**		
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	**%**	**n/a**	**65,18**	**68,98**	**87,68**	**100**	**131,41%**	**100,00%**	**114,05%**	**H**		
Persentase pemulihan kondisi fisik, psikologis dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	98	98	98,00	98	100	102%	100,00	102,04%	**H**		
Persentase (%) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meningkat keberfungsian sosialnya.	%	49	55	57,00	68	94	152%	94,00	138,24%	**H**		

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Persentase Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Yang Terawat	%	100	100	100	100	100	100%	100,00	100,00%	H		
Laju inflasi	**%**	**3,59**	**2,24**	**5,89**	**2,09**	**2,17**	**99,08%**	**21,7%**	**96,31%**	H		
Terbangunnya pusat distribusi perdagangan Aceh	%	n/a	2	2	2	2	100%	2,00	100,00%	H		
Persentase ketersediaan informasi yang dibutuhkan	Dokumen	n/a	2	2	2	2	100%	2,00	100,00%	H		
Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	% IKK	n/a	43,1	54,93	43,1	58,77	136%	58,77	136,36%	H		
Pengendalian inflasi daerah	%	3,59	2,24	5,89	2,09	2,17	101%	2,17	103,83%	H		
Indeks Desa Membangun	**Indeks**	**0,6129**	**0,62**	**0,6483**	**0,68**	**0,685**	**105,38%**	**69%**	**100,74%**	H		
Rasio gampong yang melakukan kerjasama	Rasio	n/a	0,58	0,3	0,63	0,6	98%	0,60	95,24%	H		
Rasio desa berkembang	Rasio	n/a	0,01	0,06	0,09	0,25	500%	0,25	277,78%	H		
Rasio UMKM yang diberdayakan	**Rasio**	n/a	**0,008**	**36,33**	**0,019**	**0,014**	**93,33%**	**1%**	**73,68%**		K	
Rasio Koperasi Modern	Rasio	n/a	0,01	36,33	0,0625	0,001	4%	0,00	1,60%			M
Pertumbuhan PDRB	**%**	**-0,37**	**2,79**	**4,21**	**4,25**	**4,15**	**110,67%**	**4,15**	**97,65%**	H		
Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	**%**	**30,98**	**30,06**	**29,71**	**31,48**	**30,97**	**99,17%**	**30,97%**	**98,38%**	H		
Persentase Kawasan konservasi yang dikelola (%)	%	n/a	30	36,33	65	48,92	98%	48,92	75,26%		K	
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perudang-udangan yang berlaku (%)	%	n/a	60	61,69	70	69	110%	69,00	98,57%	H		

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	5,57	5,15	5,23	5,45	5,32	99%	5,32	97,61%	H		
Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	**%**	**4,45**	**6,65**	**9,99**	**4,6**	**7,05**	**163,95%**	**70,5%**	**153,26%**	**H**		
Usulan penetapan warisan geologi	%	n/a	n/a	n/a	50	21,88	88%	21,88	43,76%			M
Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	%	3,15	5,65	5,35	0,22	5,87	32,63%	5,87	26,98%	H		
Rasio Elektrifikasi	%	n/a	99,81	99,13	99,9	99,2	100%	99,20	99,30%	H		
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	**%**	**4,56**	**5,04**	**5,19**	**6**	**4,71**	**94,20%**	**47,1%**	**78,50%**		**K**	
Tingkat kepuasan pelaku usaha yang mengajukan izin	Kegiatan	n/a	1	1	1	1	100%	1,00	100,00%	H		
Indeks Keberdayaan Konsumen	IKK	n/a	43,1	54,93	43,1	58,77	136%	58,77	136,36%	H		
Pertumbuhan ekspor non migas	**%**		**67,42**	**29,81**	**5**	**6,4**	**106,67%**	**640%**	**128,00%**	**H**		
Nilai realisasi Investasi (PMDN/PMA)	**Rp.Miliar**	**9.111**	**10.900**	**6.266**	**12,86**	**9.470**	**85,35%**	**94,70%**	**73,63%**	**H**		
Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan	Indeks	0	0	0	4	3,25	100%	3,25	81,25%		**K**	
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,82	87,34	88,04	89,50	90,13	103%	90,13	100,70%	H		
Indeks SPBE	Indeks	3	3,19	2,76	4	4,18	129%	4,18	104,50%	H		
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	**%**	**1,59**	**1,37**	**1,69**	**2**	**1,72**	**95,56%**	**1,72**	**86,00%**		**K**	
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	0	44	72	60	27	52%	27,00	45,00%			M

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	0	44	72	60	27	52%	27,00	45,00%			M
Literasi sejarah	Dokumen	4	5	7	3	2	67%	2,00	66,67%			M
Pemugaran Cagar Budaya	Objek	2	18	14	4	17	42,5%	17,00	42,5%	H		
Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan	Dokumen	0	5	2	8	1	20%	1,00	12,50%			M
Penyerapan tenaga kerja	Orang	114.219	122.315	118.313	3000	141.645	7082%	141.645	47,50%	H		
Rasio pengunjung museum terhadap jumlah wisatawan	Rasio	74,06	78,85	179,15	140,6	140,62	106%	140,62	100,02%	H		
Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	**%**	**-48,21**	**4,61**	**144,91**	**10**	**28,58**	**285,80%**	**28,58%**	**28,80%**	H		
Indeks Ketahanan Pangan	**Indeks**	**70,92**	**71,63**	**70,16**	**78,23**	**73,94**	**97,82%**	**73,94%**	**94,52%**	H		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**%**	**6,59**	**6,3**	**6,17**	**5,12**	**5,75**	**107,28%**	**5,75**	**89,04%**		K	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	**%**	**65,1**	**63,78**	**63,5**	**64,79**	**65,11**	**100,87%**	**65,11%**	**100,49%**	H		
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah	Perusahaan	n/a	19	23	50	50	100%	50,00	100%	H		
Rasio penduduk yang bekerja	**%**	**93,41**	**93,70**	**44,29**	**98,79**	**94,25**	**95,22%**	**94,25%**	**95,40%**	H		
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	n/a	867	995	1558	436	28%	43,0	27,98%			M

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	**Indeks**	**0,360**	**0,491**	**0,398**	**0,400**	**0,394 *)**	**96,10%**	**0,394 *)**	**98,50%**	**H**		
Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	**%**	**79,36**	**76,55**	**84,41**	**95,3**	**80,8**	**90,62%**	**80,8**	**84,78%**		**K**	
Rasio Konektivitas Daerah	**Rasio**	**n/a**	**0,71**	**0,73**	**0,77**	**0,76**	**104,11%**	**0,76**	**98,70%**	**H**		
Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	**%**	**97,2**	**60**	**98,47**	**95**	**79,5**	**99,38%**	**79,5**	**83,68%**	**H**		
Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	%	n/a	30	89,40	87	85	144%	85,00	97,70%	**H**		
Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin	Persil	150	1000	62,60	1000	850	85%	850,00	85,00%		**K**	
Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	n/a	n/a	100	87	75	100%	75,00	86,21%		**K**	
Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan	%	0	40	40	85	65	100%	65,00	76,47%		**K**	
Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan	%	10	9	10	56	22	100%	22,00	39,29%			**M**
Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	**%**	**78,79**	**79,55**	**54,11**	**60,11**	**56,45**	**100,39%**	**56,45**	**93,91%**	**H**		
Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan	**%**	**n/a**	**n/a**	**n/a**	**53,91**	**30,35**	**64,68%**	**30,35**	**56,30%**			**M**

Indikator Tujuan / Sasaran (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan			Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2026)	Capaian Target Rpa Melalui Pelaksanaan Rkpa Dan Apba Tahun Ke-	Tingkat Capaian Target Rpa Hasil Pelaksanaan Rkpd Dan Apba Provinsi Tahun Ke- (%)	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026	Rasio Capaian Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2026 (%)	Status Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2026		
		2020	2021	2022		2024	s.d 2024			H	K	M
		K	K	K	K	K	K	K	K	4	1	3
2	*3*		*4*		*5a*	*11a*	13a	14a	15			
permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni												
Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak	**%**	**87,66**	**77,06**	**77,48**	**80**	**81,10**	**103,31%**	**81,1**	**101,38%**	**H**		
Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	**%**	**88,20**	**87,66**	**89,70**	**88,8**	**90,08**	**102,13%**	**90,08**	**101,44%**	**H**		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Indeks**	**78,99**	**75,54**	**78,29**	**76,91**	**79,66**	**104,16%**	**79,66**	**103,58%**	**H**		
Indeks kualitas lahan (IKL)	**Indeks**	**60,59**	**76,52**	**89,2**	**77,09**	**76,66**	**99,32%**	**76,66**	**99,25%**	**H**		
Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB)	**Indeks**	**153,58/ Tinggi**	**149,99/ Tinggi**	**149,1/ Sedang**	**139/ Sedang**	**144,29 / Tinggi**	**99,11%**	**144,29 / Tinggi**	**96,33%**	**H**		
Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	%	68	70	100	83	99	127%	99,00	119,28%	**H**		
Skor Aspek Kebebasan Sipil	**Skor**	**84,49**	**85,5**	**84,66**	**85,25**	**85,71 *)**	**100,72%**	**85,71 *)**	**100,54%**	**H**		
Pencegahan dan Mitigasi Konflik	**Rasio**	**0**	**0,571**	**0,571**	**0,857**	**0,143**	**16,69%**	**14%**	**16,69%**			**M**

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Aceh 2020-2024, Tahun 2025

2.2. Gambaran Keuangan Aceh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam kondisi ketika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), maka selisih tersebut dapat ditutup melalui sumber pembiayaan yang sah, antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 9tahun sebelumnya, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan kembali atas pemberian pinjaman atau penerimaan piutang daerah. Sebaliknya, apabila pendapatan daerah melebihi belanja daerah (anggaran surplus), maka surplus anggaran dimanfaatkan terutama untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman daerah, serta pendanaan belanja yang bersifat strategis, termasuk peningkatan jaminan sosial.

Dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh, maka dalam bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai perkembangan APBA dalam periode Tahun 2018 - 2024 yang mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018 s.d 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/*Audited*. Sementara itu, untuk Tahun 2024 data yang disajikan masih bersifat *Unaudited*. Namun demikian, untuk mendukung perencanaan keuangan daerah kedepan, proyeksi anggaran pada periode Tahun 2025-2029 dalam dokumen ini disusun berdasarakan capaian kinerja masa lalu serta pendekatan dan metode Perencanaan lainnya yang relevan, dengan mempertimbangkan tren realisasi keuangan yang telah diaudit.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) selama beberapa tahun terakhir mencerminkan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung Penyelenggaraan pembangunan. Kinerja APBA dievaluasi berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang menjadi indikator efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Stabilitas keuangan daerah dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta sejauh mana optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) dapat diwujudkan. Oleh karena itu, analisis terhadap tren pendapatan dan belanja menjadi penting dalam merumuskan strategi keuangan yang lebih berkelanjutan pada periode 2025-2029.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, Belanja Daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Sementara itu, Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang mencakup antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta penerimaan pembiayaan lainnya. adapun pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah dan bentuk pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dengan memahami struktur APBD secara utuh, Pemerintah Aceh dapat melakukan evaluasi atas efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta merumuskan langkah langkah strategis guna meningkatkan kemandirian fiskal dan optimalisasi alokasi belanja untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator pengukuran kinerja keuangan pada bab ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal pasal 7 ayat (4) huruf c, menjelaskan penilaian kinerja daerah dilaksanakan melalui penentuan dan penilaian indikator kinerja. Selanjutnya pasal 8 menjelaskan bahwa Penilaian kinerja Daerah berdasarkan indikator kinerja yang mencerminkan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Indikator kinerja dimaksud berupa: (a) pengelolaan Keuangan Daerah; (b) pelayanan umum pemerintahan; dan (c) pelayanan dasar, Seluruhnya mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Salah satu indikator kriteria utama penilaian capaian kinerja keuangan daerah antara lain adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan selama periode Tahun 2019 s.d 2023, Pemerintah Aceh dinyatakan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, sehingga memperoleh opini WTP. Adapun kinerja keuangan daerah Tahun 2024 masih dalam proses pelaporan dan pemeriksaan oleh BPK. WTP Pemerintah Aceh Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.178**.

Tabel 2.178.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2019-2023

Tahun	Capaian	Nomor Laporan	Tanggal Laporan
2019	WTP	9.B/LHP/XVIII.BAC/05/2019	20 Mei 2019
2020	WTP	23.B/LHP/XVIII.BAC/05/2021	03 Mei 2021
2021	WTP	21.B/LHP/XVIII.BAC/04/2022	27 April 2022
2022	WTP	2.B/LHP/XVIII.BAC/04/2023	12 April 2023

Tahun	Capaian	Nomor Laporan	Tanggal Laporan
2023	WTP	22.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024	22 Mei 2024
2024	WTP	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2024

Secara umum, indeks kapasitas fiskal Aceh menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, apabila merujuk pada rasio kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Aceh diklasifikasikan dalam katagori sangat rendah, dengan rasio kapasitas fiskal sebesar 0,849. Sebagai perbandingan, pada Tahun 2023 rasio kapasitas fiskal Aceh tercatat sebesar 1,049 dan masih berada dalam kategori rendah.

Kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh yang sangat signitifikan terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dari tahun ke tahun, khususnya dalam proses penetapan APBA yang harus disepakati secara bersama. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Namun demikian, Selama periode Tahun 2019 hingga 2023, penetapan APBA secara tepat waktu hanya terjadi pada APBA Tahun Anggaran 2020, yang telah disahkan pada pada tanggal 23 Oktober 2019. Sebaliknya, Penetapan APBA pada Tahun 2019, serta Tahun 2021 hingga 2023, dilaksanakan melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku. Lebih jelas mengenai penetapan APBA Tahun 2019 - 2023 dapat dlihat pada **Tabel 2.179**.

Tabel 2.179.
Penetapan APBA Tahun 2019-2024

Tahun	Nomor Qanun/Pergub	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp.)
2019	Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018	31 Desember 2018	17.104.324.024.413
2020	Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019	23 Oktober 2019	17.279.528.340.753
2021	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021	31 Januari 2021	17.070.469.972.136
2022	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022	11 Januari 2022	16.766.150.661.277
2023	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022	30 Desember 2022	11.193.859.700.979
2024	Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024	18 Maret 2024	11.497.052.017.694

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2023

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan (LRA) *Audited* periode Tahun 2018 hingga 2024, diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2018, yakni sebesar 81,59 persen, atau sebesar Rp. 12.306.306.187.481 dari total anggaran Rp.15.084.003.946.127, dengan SILPA sebesar Rp. 2.954.457.964.943. Sebaliknya, Realisasi

keuangan APBA tertinggi tercatat pada Tahun 2023 yang mencapai sebesar 97,70 persen (Rp. 11.354.450.553.133) dari anggaran sebesar Rp. 11.621.219.098.956 dengan SILPA sebesar Rp. 1.304.607.179.450. Lebih jelas mengenai anggaran dan realisasi APBA Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.180**.

Tabel 2.180.
Anggaran dan Realisasi APBA Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		SILPA
		Rp.	%	
2018	15.084.003.946.127	12.306.306.187.481	81,59	2.954.457.964.943
2019	17.328.154.517.122	15.787.883.385.490	91,11	2.846.141.906.063
2020	15.827.709.393.003	13.242.212.801.895	83,66	3.969.617.354.782
2021	16.482.338.309.498	13.683.582.127.432	83,02	3.933.680.612.390
2022	16.763.157.517.180	15.773.078.722.046	94,09	1.304.678.718.450
2023	11.621.219.098.956	11.354.450.553.133	97,70	1.304.607.179.450
2024	11.672.120.348.557	11.287.148.887.852	96,70	421.372.974.556

Sumber: LRA Tahun 2018 – 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)

Mengacu pada Pasal 27 s.d Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) tahun anggaran. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1(satu) tahun anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dari **Tabel 2.181** diketahui realisasi APBA selama periode Tahun 2018 hingga 2023 menunjukan tren yang bervariasi pada masing masing komponen anggaran, realisasi pendapatan daerah mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 3,23 persen, sementara belanja daerah juga tercatat tumbuh rata-rata sebesar 0,36 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Tahun 2023 sebesar 1 persen dari DAU Nasional, sehingga pendapatan DOKA Tahun 2023 menurun sebesar 47,62 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dan sangat berdampak pada pembangunan di Aceh.

Adapun pembiayaan daerah yang menunjukkan pertumbuhan yan signifikan, yaitu sebesar 66,54 persen. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan realisasi masing masing komponen struktur APBA Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.181**.

Tabel 2.181.
Rata Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 – 2024

Kode	Uraian	Tahun (Rupiah)							Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	PENDAPATAN DAERAH	14.427.783.075.799	15.752.800.901.652	14.439.920.557.022	13.948.388.273.436	13.713.584.703.596	10.572.492.903.656	11.396.038.068.930	(3,23)
4.1	PENDAPATAN ASLI ACEH	2.359.385.393.646	2.698.912.471.144	2.570.775.877.184	2.505.887.909.031	2.917.145.003.052	2.987.188.692.204	3.225.685.925.856	5,65
4.1.1	Pendapatan Pajak Aceh	1.309.081.813.533	1.409.251.915.061	1.477.991.066.970	1.529.610.318.108	1.717.834.522.320	1.791.227.845.430	1.930.621.844.261	6,73
4.1.2	Pendapatan Retribusi Aceh	20.762.789.454	17.087.692.809	8.159.969.910	8.307.103.680	15.000.911.792	16.462.009.498	790.959.745.325	787,82
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	181.654.111.575	182.385.550.448	181.700.799.036	152.434.096.229	179.862.545.156	252.723.801.693	267.660.903.349	8,06
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	847.886.679.084	1.090.187.312.826	902.924.041.268	815.536.391.014	1.004.447.023.784	926.775.035.583	236.443.432.921	(9,56)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	12.065.901.692.555	13.049.675.124.487	11.826.017.687.067	11.431.169.265.498	10.775.168.990.686	7.580.381.361.583	8.167.778.560.238	(5,37)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	12.065.901.692.555	13.049.675.124.487	11.826.017.687.067	11.431.169.265.498	10.775.168.990.686	7.580.381.361.583	8.167.778.560.238	(5,37)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.495.989.598	4.213.306.021	43.126.992.771	11.331.098.907	21.270.709.858	4.922.849.869	2.573.582.836	146,97
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.495.989.598	4.213.306.021	43.126.992.771	9.815.653.425	21.164.409.858	4.922.849.869	2.573.582.836	151,05
4.3.3	Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	1.515.445.482	106.300.000	-	-	
5	BELANJA	12.306.306.187.481	15.787.883.385.491	13.242.212.801.895	13.683.582.127.430	15.773.078.722.046	11.354.800.577.744	11.287.148.887.851	0,36

Kode	Uraian	Tahun (Rupiah)							Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1	BELANJA OPERASI	9.054.782.711.093	9.282.694.398.477	7.985.982.044.904	8.649.317.139.857	9.853.395.736.247	7.920.985.964.478	8.209.331.872.526	(0,87)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.274.436.642.148	2.461.315.744.896	2.483.284.443.746	2.631.227.115.328	2.672.636.562.975	2.777.232.840.075	3.371.730.786.947	6,99
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.396.750.243.456	4.514.524.421.392	3.702.404.761.737	5.125.955.152.315	5.961.654.335.730	4.023.048.182.624	3.726.959.739.159	4,97
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	13.225.283.500	18.244.902.500	6.386.180.000	(13,52)
5.1.5	Belanja Hibah	3.146.293.151.466	1.946.365.153.670	1.422.789.246.409	758.581.422.107	1.026.826.661.463	909.872.227.035	1.017.004.886.267	(12,66)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	237.302.674.023	360.489.078.519	377.503.593.012	133.553.450.107	179.052.892.579	192.587.812.244	87.250.280.153	(3,51)
5.2	BELANJA MODAL	2.503.941.129.737	3.162.088.165.983	1.755.472.079.287	2.199.333.370.928	2.868.705.757.386	1.676.030.003.504	1.244.417.671.176	(4,97)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	12.431.133.469	86.773.892.473	71.123.465.326	24.732.040.448	45.923.196.963	7.431.814.316	-	103,33
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294.027.634.090	841.812.882.309	421.332.296.913	259.171.614.346	345.149.313.315	485.458.694.474	409.877.240.494	26,02
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	731.613.352.208	820.034.893.479	567.190.383.203	734.555.768.110	827.643.754.162	519.361.756.751	325.817.680.306	(8,51)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.405.078.708.994	1.320.184.310.775	572.579.779.265	1.055.849.598.983	1.519.021.873.143	551.432.860.935	402.230.663.576	(4,19)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.790.300.976	93.282.186.947	123.246.154.580	125.024.349.041	130.967.619.803	112.344.877.028	83.856.301.999	8,70
5.2.6	belanja Modal Aset Lainnya							22.635.784.801	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	48.704.400	4.838.896.611	158.460.075.459	412.071.890	4.335.030.000	34.500.000	19.848.398	2.286,76
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	48.704.400	4.838.896.611	158.460.075.459	412.071.890	4.335.030.000	34.500.000	19.848.398,45	2.286,76
5.4	BELANJA TRANSFER	747.533.642.251	3.338.261.924.420	3.342.298.602.245	2.834.519.544.755	3.046.642.198.413	1.757.750.109.762	1.833.379.495.751	50,16
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	642.408.224.651	691.068.684.916	802.937.015.414	715.264.216.632	764.976.522.259	892.314.580.120	881.118.949.469	5,86
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	105.125.417.600	2.647.193.239.504	2.539.361.586.831	2.119.255.328.123	2.281.665.676.154	865.435.529.642	952.260.546.282	392,19

Kode	Uraian	Tahun (Rupiah)							Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6	PEMBIAYAAN	832.981.076.625	2.881.224.389.902	2.771.909.599.655	3.668.874.466.385	3.364.172.736.899	1.255.603.592.331	421.372.974.556	22,84
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	907.571.981.763	2.956.538.853.604	2.848.097.021.013	3.970.103.175.594	3.934.600.250.977	1.305.536.023.919	474.004.949.183	21,68
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	907.571.981.763	2.954.457.964.943	2.846.141.906.063	3.969.606.675.281	3.933.596.612.390	1.304.607.179.450	473.295.918.242	21,65
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.080.888.661	1.955.114.950	496.500.313	1.003.638.587	928.844.469	709.030.941	(1,92)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	74.590.905.138	75.314.463.702	76.187.421.358	301.228.709.209	570.427.514.078	49.932.431.588	52.631.974.627	50,17
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	74.590.905.138	75.314.463.702	76.187.421.358	59.791.509.209	50.427.514.078	49.351.316.199	52.631.974.627	(5,09)
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh	-	-	-	241.437.200.000	520.000.000.000	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						581.115.389	-	-

Sumber: LRA Tahun 2018 – 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)

2.2.1.1. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan Pendapatan Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Aceh (PAA), yang terdiri atas pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan lain-lain PAA yang sah.
2. Pendapatan Transfer, yang meliputi transfer Pemerintah Pusat, dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah, yang berasal dari hibah dan dana darurat serta pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan LRA Tahun 2018 hingga 2023 Audited, diketahui bahwa pencapaian realisasi pendapatan Aceh mengalami tren penurunan atau pertumbuhan negatif. Pada Tahun 2018, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp. 14.427.783.075.799, sementara pada Tahun 2023 realisasi pendapatan menurun menjadi sebesar Rp. 10.572.492.903.656. Adapun untuk Tahun 2024, berdasarkan LRA *unaudited,* realisasi pendapatan mencapai Rp. 11.396.038.068.930. Perkembangan lebih rinci mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan Aceh selama peroide Tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.182**.

Tabel 2.182.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	14.622.475.324.280	14.427.783.075.799	98,67	-
2019	15.692.775.230.941	15.752.800.901.652	100,38	9,18
2020	14.005.401.514.224	14.439.920.557.021	103,1	-8,33
2021	13.864.978.453.942	13.948.388.273.436	100,6	-3,40
2022	13.413.980.404.477	13.713.584.703.596	102,23	-1,68
2023	10.369.121.496.506	10.572.492.903.656	101,96	-22,90
2024	11.262.824.430.316	11.396.038.068.930	101,18	-7,79

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)

Secara terperinci kondisi pendapatan Aceh dapat dijelaskan berdasarkan kelompok pendapatan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Pendapatan Asli Aceh (PAA) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemunguutan berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAA bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi daerah yang

dimiliki, sebagai perwujudan prinsip desentralisasi. Selain itu, penguatan PAA juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, sekaligus sebagai solusi dalam mengantisipasi berahirnya dana Otonomi Khusus. Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, realisasi PAA menunjukkan tren peningkatan yang positif. Realisasi tertinggi pada Tahun 2024, dengan capaian sebesar Rp. 3.225.685.925.856. Meskipun nilai nominal terbesar terjadi pada Tahun 2024, pertumbuhan persentase tertinggi dicapai pada Tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 16,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran dan realisasi PAA Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat **Tabel 2.183**.

Tabel 2.183.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	2.324.662.431.200	2.359.385.393.646	101,49	-
2019	2.589.284.044.683	2.698.912.471.144	104,23	14,39
2020	2.184.607.197.048	2.570.775.877.183	117,68	-4,75
2021	2.401.682.455.965	2.505.887.909.031	104,34	-2,52
2022	2.572.750.100.699	2.917.145.003.052	113,39	16,41
2023	2.853.177.437.034	2.987.188.692.204	104,7	2,40
2024	3.019.019.705.316	3.225.685.925.856	106,84	7,98

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)

Pencapaian realisasi PAA selama periode Tahun 2018 - 2024 menunjukkan bahwa pendapatan pajak Aceh merupakan sumber utama PAA, dengan kontribusi sebesar 57,03 persen dari total realisasi PAA. Komponen lain-lain PAA yang sah menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 35,71 persen. Selanjutnya, Pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 6,73 persen, menempati urutan ketiga dalam struktur PAA. Sementara itu, retribusi Aceh tercatat sebagai sumber pendapatan terkecil, dengan kontribusi sebesar 0,53 persen terhadap total PAA. Secara umum, kontribusi masing masing komponen terhadap total realisasi PAA selama periode 2018-2024 dapat dirincikan sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Pajak Aceh

Pajak Aceh merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Aceh tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan dari sektor pajak Aceh terdiri atas: a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), d) pajak air permukaan, dan e) pajak rokok.

Selama kurun waktu Tahun 2018-2024, pendapatan dari sektor pajak Aceh menunjukkan tren peningkatan. Meskipun demikian, Pemerintah Aceh perlu terus melakukan berbagai upaya yang komprehensif dan keberlanjutan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan dari sektor ini, mengingat pajak aceh menjadi komponen utama dalam PAA. Perkembangan anggaran dan realisasi pajak Aceh Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.184**.

Tabel 2.184.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	1.371.597.749.941	1.309.081.813.533	95,44	-
2019	1.453.552.654.141	1.409.251.915.061	96,95	7,65
2020	1.275.366.715.499	1.477.991.066.970	115,89	4,88
2021	1.374.555.532.889	1.529.610.318.108	111,28	3,49
2022	1.574.358.019.378	1.717.834.522.320	109,11	12,31
2023	1.789.594.976.388	1.791.227.845.430	100,09	4,27
2024	1.877.493.725.719	1.930.621.844.261	102,83	-7,78

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)

A.2. Pendapatan Retribusi Aceh

Retribusi Aceh merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik dalam bentuk pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Selama periode Tahun 2018 hingga 2024, pendapatan restribusi Aceh menunjukkan tren yang dinamis dengan lonjakan peningkatan pertumbuhan yang tinggi pada Tahun 2022, yaitu sebesar 80,58 persen dan pada Tahun 2024 peningkatan pertumbuhannya sangat singnifikan karena meningkatnya realisasi retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi jasa usaha. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan restribusi daerah, meskipun kedepan diperlukan strategi untuk menjaga kesinambuingan peningkatan tersebut. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan retribusi Aceh Tahun 2018 s,d 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.185**.

Tabel 2.185.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Aceh Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	17.799.646.000	20.762.789.454	116,65	-
2019	28.864.400.000	17.087.692.809	59,20	-17,70
2020	12.133.554.700	8.159.969.910	67,25	-52,25
2021	12.133.554.700	8.307.103.680	68,46	1,80
2022	9.458.309.000	15.000.911.792	158,6	80,58

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2023	14.277.225.253	16.462.009.498	115,3	9,73
2024	693.832.792.144	790.959.745.325	114,0	4.705,76

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2022 (Audited), 2023 (Unaudited),

A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya dari hasil penyertaan modal Pemerintah Aceh selama periode 2018 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pendapatan ini bersumber bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Realisasi tertinggi tercatat pada Tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 226.689.202.474, sedangkan realisasi terendah terjadi pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp. 132.444.587.380.

Tabel 2.186.
Deviden Pemerintah dari BUMD Tahun 2019-2023

Tahun	Bank Aceh	BPR Mustaqim	PT Pembangunan Aceh	Jumlah
2019	158.314.541.101	1.098.799.023	-	159.413.340.124
2020	158.284.954.748	-	-	158.284.954.748
2021	132.444.587.380	-	-	132.444.587.380
2022	136.504.728.222	825.560.175	21.659.933.276	158.990.221.673
2023	201.137.939.392	1.249.085.766	24.302.177.316	226.689.202.474

Adapun secara rinci anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.187**.

Tabel 2.187.
Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	192.982.069.855	181.654.111.575	94,13	-
2019	196.934.994.855	182.385.550.448	92,61	0,40
2020	202.386.465.655	181.700.799.036	89,78	-0,38
2021	182.385.550.448	152.434.096.229	83,58	-16,11
2022	179.862.545.155	179.862.545.156	100	17,99
2023	252.723.801.693	252.723.801.693	100	40,51
2024	265.530.274.530	267.660.903.349	100,80	5,91

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)

A.4. Lain-Lain PAA yang Sah

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAA yang sah selama periode Tahun 2018 - 2023 mencapai sebesar Rp. 5.587.747.995.507. Pendapatan ini diperoleh dari

berbagai sumber, antara lain hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan zakat, pendapatan BLUD dan lain-lain pendapatan sah lainnya. Selain itu, terdapat pula pendapatan BLUD pada UPTD Pengelola Mesjid Raya Baiturrahman yang bersumber dari kas tunai dalam bentuk mata uang asing. Perkembangan anggaran dan realisasi lain lain pendapatan Asli Aceh yang sah untuk periode Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.188**.

Tabel 2.188.
Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAA yang Sah Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	742.282.965.404	847.886.679.084	114,23	-
2019	909.931.995.687	1.090.187.312.826	119,81	28,58
2020	694.720.461.194	902.924.041.268	129,97	-17,18
2021	832.607.817.928	815.536.391.014	97,95	-9,68
2022	809.071.227.166	1.004.447.023.784	124,15	23,16
2023	796.581.433.700	926.775.035.583	116,34	-7,73
2024	182.162.912.923	236.443.432.921	129,80	-74,49

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)

B. Pendapatan Transfer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendapatan transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Insentif Daerah (DID). Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.189**.

Tabel 2.189.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	12.274.206.245.080	12.065.901.692.555	98,3	-
2019	13.077.284.732.062	13.049.675.124.487	99,79	8,15
2020	11.818.700.337.176	11.826.017.687.067	100,06	-9,38

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2021	11.435.885.996.400	11.431.169.265.498	99,96	-3,34
2022	10.821.625.873.000	10.775.168.990.686	99,57	-5,74
2023	7.512.362.697.472	7.580.381.361.583	100,91	-29,65
2024	8.241.836.725.000	8.167.778.560.238	99,10	

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

Secara umum, komponen terbesar dari pendapatan transfer Aceh berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus), dengan kontribusi sebesar 65,98 persen terhadap total pendapatan transfer. Komponen terbesar kedua adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi sebesar 17,28 persen. Diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai komponen terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 13,05 persen. Secara garis besar, komposisi masing-masing jenis pendapatan transfer tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam subbagian berikut.

B.1. Transfer Dana Pusat-Dana Perimbangan

B.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan/atau berdasarkan kinerja tertentu. DBH dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah pusat dan Daerah serta kepada daerah non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak mencakup pendapatan dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta cukai hasil tembakau. Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam melipuiti hasil dari sektor kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi serta perikanan. Berdasarkan perkembangan realisasi DBH, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 76,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan anggaran dan realisasi DBH Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.190**.

Tabel 2.190.
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	227.967.248.000	191.892.691.947	84,18	-
2019	285.842.184.062	211.948.683.718	74,15	10,45
2020	206.211.622.869	167.139.992.425	81,05	-21,14
2021	153.487.130.400	202.310.251.468	131,81	21,04
2022	237.377.250.000	275.867.239.481	116,21	36,36
2023	394.572.348.472	486.170.016.772	123,21	76,23
2024	386.970.913.000	384.647.924.000	99,40	-20,88

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

B.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan serta meningkatkan kualitas layanan public antar daerah. DAU diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Penggunaan DAU terdiri atas dua bagian, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang uandangan. Berdasarkan data realisasi, peningkatan DAU tertinggi terjadi pada Tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 12,72 persen, sedangkan Penurunan realisasi tertinggi tercatat pada Tahun 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar minus 15,75 persen. Perkembangan anggaran dan realisasi DAU Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.191**.

Tabel 2.191.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	2.060.263.235.000	2.060.263.235.000	100	-
2019	2.126.619.991.000	2.322.266.506.000	109,2	12,72
2020	1.961.334.010.000	1.956.492.796.000	99,75	-15,75
2021	1.945.980.616.000	1.945.980.616.000	100	-0,54
2022	1.947.783.847.000	1.941.752.249.876	99,69	-0,22
2023	2.015.956.282.000	2.015.956.282.000	100	3,82
2024	2.333.567.650.000	2.310.752.304.717	99,02	14,62

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

B.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta membantu operasionalisasi layanan publik di daerah, dengan penggunaannya yang telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu : (a) mencapai prioritas nasional, (b) mempercepat pembangunan daerah,(c) mengurangi kesenjangan layanan public,(d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah , dan/atau (e) mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK terdiri atas tiga bentuk, yaitu : (a)DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, (b) DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah, dan (c) Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perkembangan anggaran dan realisasi DAK Tahun 2018 - 2024 disajikan pada **Tabel 2.192**.

Tabel 2.192.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	1.576.403.565.000	1.483.635.794.660	94,12	-
2019	1.826.271.773.000	1.744.873.155.047	95,54	17,61
2020	1.730.846.802.924	1.808.564.320.066	104,49	3,65
2021	1.773.862.244.000	1.720.322.392.030	96,98	-4,88
2022	1.044.584.607.000	965.669.332.329	92,45	-43,87
2023	1.131.385.358.000	1.107.806.353.811	97,92	14,72
2024	1.226.455.645.000	1.177.535.814.521	95,56	6,29

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

B.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

B.2.1. Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

Dana Otonomi Khusus (OTSUS) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 10 ditegaskan bahwa dana otonomi khusus diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, social, kesehatan, serta pembiayaan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh.

Tabel 2.193.
Anggaran dan Realisasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	8.029.791.592.980	8.029.791.593.000	100	
2019	8.357.471.654.000	8.357.471.654.000	100	4,08
2020	7.555.278.348.000	7.555.278.348.000	100	-9,6
2021	7.555.827.806.000	7.555.827.806.000	100	0,01
2022	7.560.000.000.000	7.560.000.000.000	100	0,06
2023	3.960.000.000.000	3.960.000.000.000	100	-47,62
2024	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000	100	8,00
Total	**47.295.362.435.980**	**47.295.362.436.000**		

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

Tabel 2.193 menguraikan secara detail perkembangan anggaran dan realisasi Dana OTSUS Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024. Realisasi Dana OTSUS Tahun 2018 s.d 2024 mencapai sebesar Rp. 47.295.362.436.000. Sejalan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , alokasi dana Otsus mulai Tahun 2023 hingga 2027 ditetapkan sebesar 1 persen dari DAU nasional, dan pada Tahun 2028 tidak terdapat lagi alokasi dana otsus. Terhadap keberlanjutan dana otsus pasca 2027, saat ini masih dalam tahapan kajian serta pembahasan dampaknya terhadap perekonomian Aceh dalam Proses Lageslasi Nasional.

B.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian selama periode Tahun 2018 - 2023 mencapai sebesar Rp. 1.098.269.652.746 atau sebesar 98,69 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Namun demikian, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Pemerintah Aceh tidak menerima lagi dana penyesuaian, seiring dengan perubahan regulasi yang mengintegrasikan dana penyesuaian ke dalam kelompok dana transfer. Lebih detail perkembangan anggaran dan realisasi dana penyesuaian Tahun 2018 s,d 2023 dapat dilihat pada **Tabel 2.194**.

Tabel 2.194.
Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2018-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	379.780.604.100	300.318.377.948	79,08	-
2019	481.079.130.000	413.115.125.722	85,87	37,56
2020	252.012.084.307	384.836.149.076	152,71	-6,85
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	
Total	1.112.871.818.407	1.098.269.652.746	98,69	

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2022 (Audited) 2023 (Unaudited)

B.2.3. Dana Insentif Daerah (DID)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), DID merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). DID dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu sebagai bentuk penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di berbagai bidang, seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Selama periode Tahun 2018 - 2024, Pemerintah Aceh mendapatkan alokasi DID pada Tahun 2021 dan 2022. Pada Tahun 2021, alokasi DID yang diteriima berjumlah Rp. 6.728.200.000 yang diperoleh dari penilaian kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah pada indikator kualitas belanja modal kesehatan. Perkembangan anggaran dan realisasi DID Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.195**.

Tabel 2.195.
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2018-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	6.728.200.000	6.728.200.000	100	-
2022	31.880.169.000	31.880.169.000	100	373,83
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
Total	38.608.369.000	38.608.369.000	100	

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

Pada Tahun 2022, Pemerintah Aceh kembali mendapatkan alokasi DID dengan total sebesar Rp. 31.880.169.000, yang pengalokasiannya dilakukan dalam dua periode. Periode pertama sesuai dengan PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022, serta Pengunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dengan alokasi sebesar Rp. 8.965.706.000. Periode kedua sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Tahun 2022, dengan alokasi sebesar Rp. 22.914.463.000.

C. Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah

Pencapaian realisasi lain-lain pendapatan Aceh yang sah selama periode Tahun 2018 - 2024 mencapai Rp. 89.934.529.859. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2020, dengan peningkatan signifikan sebesar 923 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pada Tahun 2023, realisasi lain-lain pendapatan Aceh yang sah mengalami penurunan yang sangat drastic, dengan tingkat penurunan mencapai minus 76 persen. Perkembangan lebih rinci terkait anggaran dan realisasi lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah Tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.196**.

Tabel 2.196.
Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Aceh Yang Sah Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	23.606.648.000	2.495.989.598	10,57	-
2019	26.206.454.196	4.213.306.021	16,08	68,8
2020	2.093.980.000	43.126.992.771	2059,57	923,59
2021	27.410.001.577	11.331.098.907	41,34	-73,73
2022	19.604.430.778	21.270.709.858	108,5	87,72
2023	3.581.362.000	4.922.849.869	130,77	-76,49
2024	1.968.000.000	2.573.582.836	130,77	-47,72
Total	**104.470.876.551**	**89.934.529.859**		

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

C.1. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, maupun badan usaha dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat, untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah ini merupakan bagian komponen dari lain-lain pendapatan Aceh yang sah. Realisasi pendapatan hibah tertinggi tercatat pada Tahun 2020, dengan capaian sebesar Rp. 43.126.992.771, sedangkan realisasi terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.495.989.598. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendaapatan hibah Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.197**.

Tabel 2.197.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2018-2023

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	23.606.648.000	2.495.989.598	10,57	-
2019	26.206.454.196	4.213.306.021	16,08	68,80
2020	2.093.980.000	43.126.992.771	2059,57	923,59
2021	27.410.001.577	9.815.653.425	35,81	-77,24
2022	19.604.430.778	21.164.409.858	107,96	115,62
2023	3.581.362.000	4.922.849.869	137,46	-76,38
2024	1.968.000.000	2.573.582.836	130,77	-47,72
Total	**104.470.876.551**	**88.312.784.378**		

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

C.2. Pendapatan Lainnya

Realisasi pendapatan lainnya selama periode Tahun 2018 - 2024 berjumlah sebesar Rp. 3.231.745.482. Pendapatan lainnya ini berasal dari Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pendapatan lainnya ini hanya diperoleh pada Tahun 2021 dan 2022. Perkembangan realisasi pendapatan lainnya Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada **Tabel 2.198**.

Tabel 2.198.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	1.515.445.482	-	-
2022	-	106.300.000	-	-92,99
2023	-	-		
2024	-	-		
Total	**-**	**3.231.745.482**		

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

2.2.1.2. Belanja Aceh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Aceh yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBA untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer, yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara umum, belanja pemerintah Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi belanja ini menjadi peluang strategis bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, yang dampaknya diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Selama periode Tahun 2018 - 2024, realisasi belanja Aceh mencapai Rp. 93.435.012.689.941 atau 89,70 persen dari total anggaran sebesar Rp. 104.778.703.130.443, dengan tren yang bersifat fluktuatif. Realisasi tertinggi tercatat pada Tahun 2023 dengan capaian 97,70 persen yaitu sebesar Rp. 11.354.800.577.745 dari total anggaran Rp. 11.621.219.098.956. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja Aceh Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.199**.

Tabel 2.199.
Anggaran dan Realisasi Belanja Aceh Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	15.084.003.946.127	12.306.306.187.481	81,59
2019	17.328.154.517.122	15.787.883.385.490	91,11
2020	15.827.709.393.003	13.242.212.801.895	83,66
2021	16.482.338.309.498	13.683.582.127.432	83,02
2022	16.763.157.517.180	15.773.078.722.046	94,09
2023	11.621.219.098.956	11.354.800.577.745	97,71
2024	11.672.120.348.557	11.287.148.887.852	96,70
Total	**104.778.703.130.443**	**93.435.012.689.941**	**89,70**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

A. Belanja Operasi

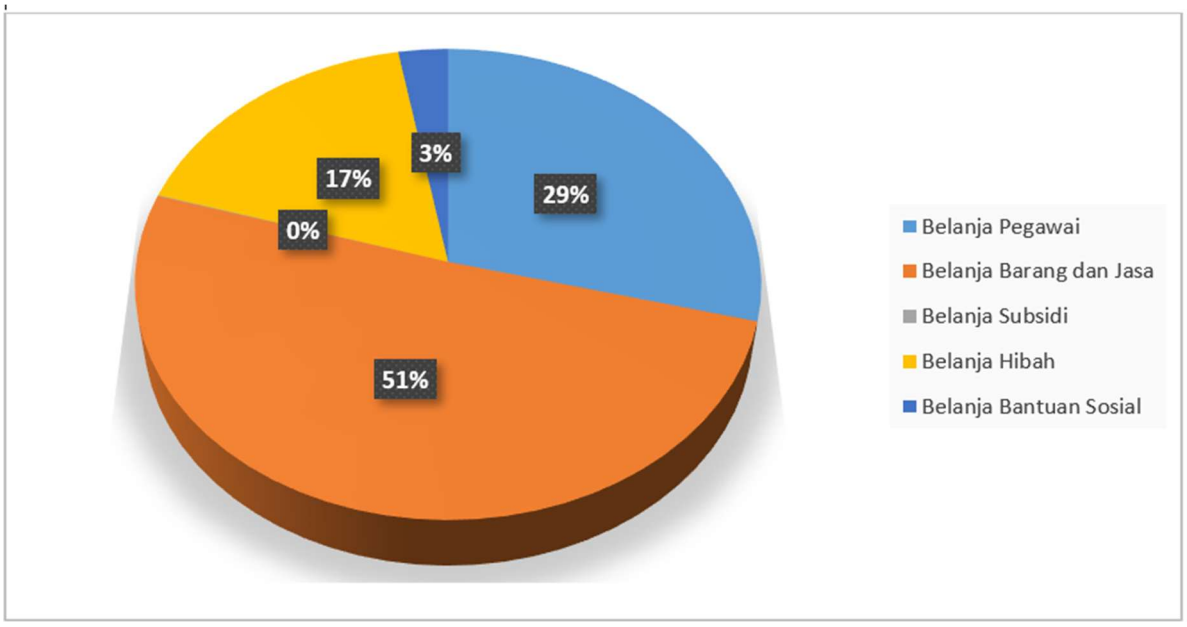
Realisasi belanja operasi Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 - 2024 adalah sebesar Rp. 60.956.483.867.584 atau 87,20 persen dari total anggaran Rp. 59.923.241.685.546. Capaian realisasi belanja operasi menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi tertinggi tercatat pada Tahun 2023 sebesar 97,95 persen, sedangkan realisasi terendah tercatat pada Tahun 2018 dengan capaian sebesar 82,44 persen (**Tabel 2.200**).

Tabel 2.200.
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	10.983.996.927.963	9.054.782.711.093	82,44
2019	10.221.501.126.868	9.282.694.398.477	90,82
2020	9.665.729.666.500	7.985.982.044.904	82,62
2021	10.058.436.337.426	8.649.311.139.858	85,99
2022	10.474.623.803.456	9.853.395.736.247	94,07
2023	8,094,074,034,684	7.920.985.964.479	97,95
2024	8.518.953.823.333	8.209.331.872.526	96,37
Total	**59.923.241.685.546**	**60.956.483.867.584**	**87,2**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

Komponen belanja operasi Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 - 2024 terdiri dari beberapa pos pengeluaran utama. dari total realisasi belanja operasi, belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar dengan kontribusi sebesar 50,64 persen, diikuti belanja pegawai sebesar 29,01 persen, belanja hibah sebesar 17,46 persen. Sementara itu, belanja subsidi dan belanja bantuan sosial masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,06 persen dan 2,87 persen terhadap total belanja operasi. Lebih jelas lihat **Gambar 2.157**.

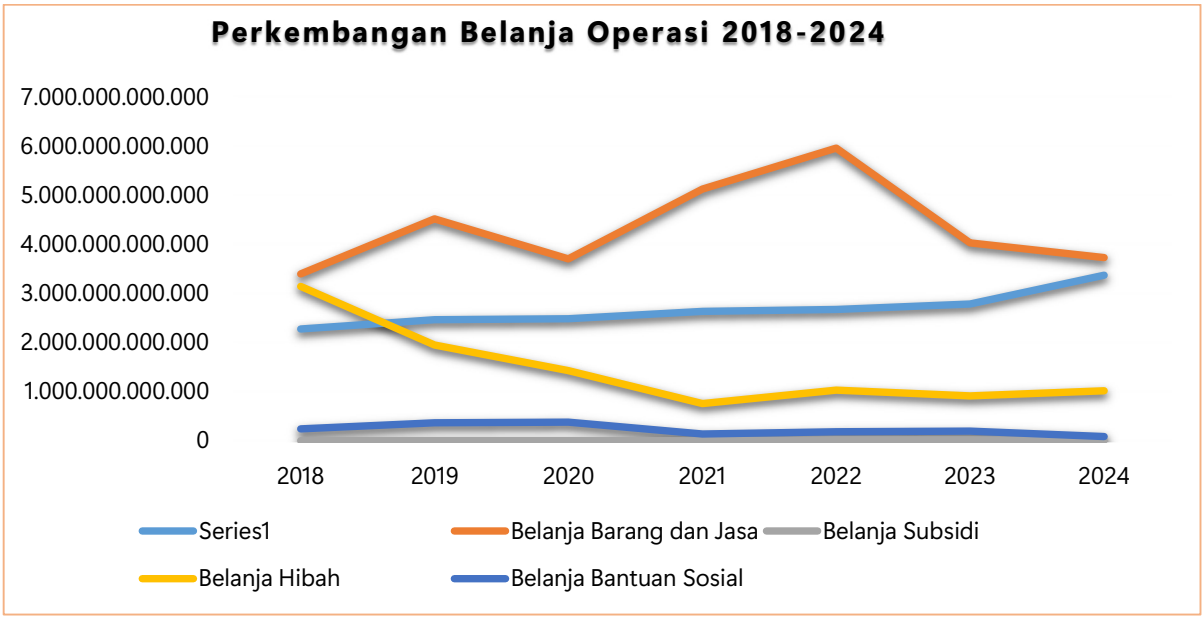


Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

Gambar 2.157. Kontribusi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 - 2024

Perkembangan realisasi belanja operasi Pemerintah Aceh mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari seluruh komponen belanja operasi, belanja barang dan jasa menjadi kontributor terbesar, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2022, realisasi belanja barang dan jasa mencapai nilai tertinggi. Peningkatan ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

terutama melalui: belanja pendidikan dan kesehatan guna membangun SDM unggul dan produktif, penguatan hilirisasi industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan kemiskinan ekstrem dan Pengurangan kesenjangan sosial di Aceh.



Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

Gambar 2.158. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi, 2018-2024

A.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen pengeluaran anggaran yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pegawai honorer di lingkungan pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi organisasi Pemerintah. Selama periode Tahun 2018 hingga 2024 realisasi belanja Pegawai Pemerintah Aceh mencapai angka Rp. 18.671.864.136.115 atau sebesar 93,39 persen dari total anggaran sebesar Rp. 19.835.877.305.723 (**Tabel 2.201**).

Tabel 2.201.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018-2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	2.452.195.185.618	2.274.436.642.148	92,75
2019	2.599.175.938.705	2.461.315.744.896	94,7
2020	2.886.272.033.465	2.483.284.443.746	86,04
2021	2.829.428.312.694	2.631.227.115.328	93
2022	2.806.337.723.413	2.672.636.562.975	95,24
2023	2.810.065.283.664	2.777.232.840.075	98,83
2024	3.452.402.828.164	3.371.730.786.947	97,66
Total	**19.835.877.305.723**	**18.671.864.136.115**	**93,39**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited))

A.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Selama periode Tahun 2018 hingga Tahun 2024, realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Aceh tercatat sebesar Rp. 30.451.296.836.413 atau mencapai 91,87 persen dari total anggaran yang telah dialokasikan dengan nilai Rp. 32.830.898.517.073. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut menunjukkan tren yang fluktuaktif dari tahun ke tahun (**Tabel 2.202**).

Tabel 2.202.
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	4.091.203.458.789	3.396.750.243.456	83,03
2019	4.968.430.836.893	4.514.524.421.392	90,86
2020	3.907.674.602.124	3.702.404.761.737	94,75
2021	5.936.917.132.917	5.125.955.152.315	86,34
2022	6.191.098.137.082	5.961.654.335.730	96,29
2023	4.000.024.822.724	4.023.048.182.624	100,58
2024	3.735.549.526.544	3.726.959.739.159	99,77
Total	**32.830.898.517.073**	**30.451.296.836.413**	**91,85**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

A.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran anggaran pemerintah Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat,khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi. Subsidi ini digunakan untuk operasi pasar murah, menjaga stabilitas harga serta menutupi kerugian yang dialami oleh masyarakat dan perusahaan, terutama akibat dampak pandemi covid-19. Belanja subsidi terbagi dalam 2 (dua) jenis peruntukan, yaitu kepada BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta. Pada triode Tahun 2022 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah merealisasikan belanja subsidi sebesar Rp.37.856.366.000 yang setara dengan 70,81 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.203.
Anggaran dan Realisasi Belanja Susidi Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	26.194.608.000	13.225.283.500	50,49

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2023	18.247.410.999	18.244.902.500	99,99
2024	6.387.680.000	6.386.180.000	99,98
Total	**50.829.698.999**	**37.856.366.000**	**70,81**

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

A.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pihak lain, baik lembaga/organisasi, maupun pemerintah daerah. Hibah ini bersifiat sukarela, tidak mengikat dan tidak wajib untuk dibayar kembali. Proses pemberian hibah dilakukan melalui naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak dilakukan secara terus menerus. Realisasi belanja Hibah Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 - 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan realisasi sebesar Rp. 10.227.732.748.417 yang setara dengan 90,39 persen dari nilai total anggaran sejumlah Rp. 11.275.033.833.225. (**Tabel 2.204**).

Tabel 2.204.
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	3.844.422.125.578	3.146.293.151.466	81,84
2019	2.096.940.221.820	1.946.365.153.670	92,82
2020	1.376.016.275.582	1.422.789.246.409	103,4
2021	907.787.487.926	758.581.422.107	83,56
2022	1.049.661.826.280	1.026.826.661.463	97,82
2023	914.818.537.702	909.872.227.035	99,46
2024	1.085.387.358.337	1.017.004.886.267	93,70
Total	**11.275.033.833.225**	**10.227.732.748.417**	**90,39**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

A.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa kepada masyarakat. Tujuan utama dari belanja ini adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada periode Tahun 2018 - 2024, Pemerintah Aceh telah merealisasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 1.567.739.780.637, yang setara dengan 39,11 persen dari total anggaran Rp. 4.024.676.365.210 dan menunjukkan tren yang fluktuaktif (**Tabel 2.205**)

Tabel 2.205.
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	596.176.157.978	237.302.674.023	39,8
2019	556.954.129.450	360.489.078.519	64,73
2020	1.495.766.755.329	377.503.593.012	25,24
2021	384.303.403.889	133.553.450.107	34,75
2022	401.331.508.681	179.052.892.579	44,61
2023	350.917.979.595	192.587.812.244	54,88
2024	239.226.430.288	87.250.280.153	36,47
Total	**4.024.676.365.210**	**1.567.739.780.637**	**39,11**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

B. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada periode Tahun 2018 - 2024, Pemerintah Aceh telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp. 15.409.988.178.000 atau setara dengan 81,67 persen dari anggaran Rp. 18.619.944.805.430 dan menunjukkan tren yang fluktuaktif (**Tabel 2.206**).

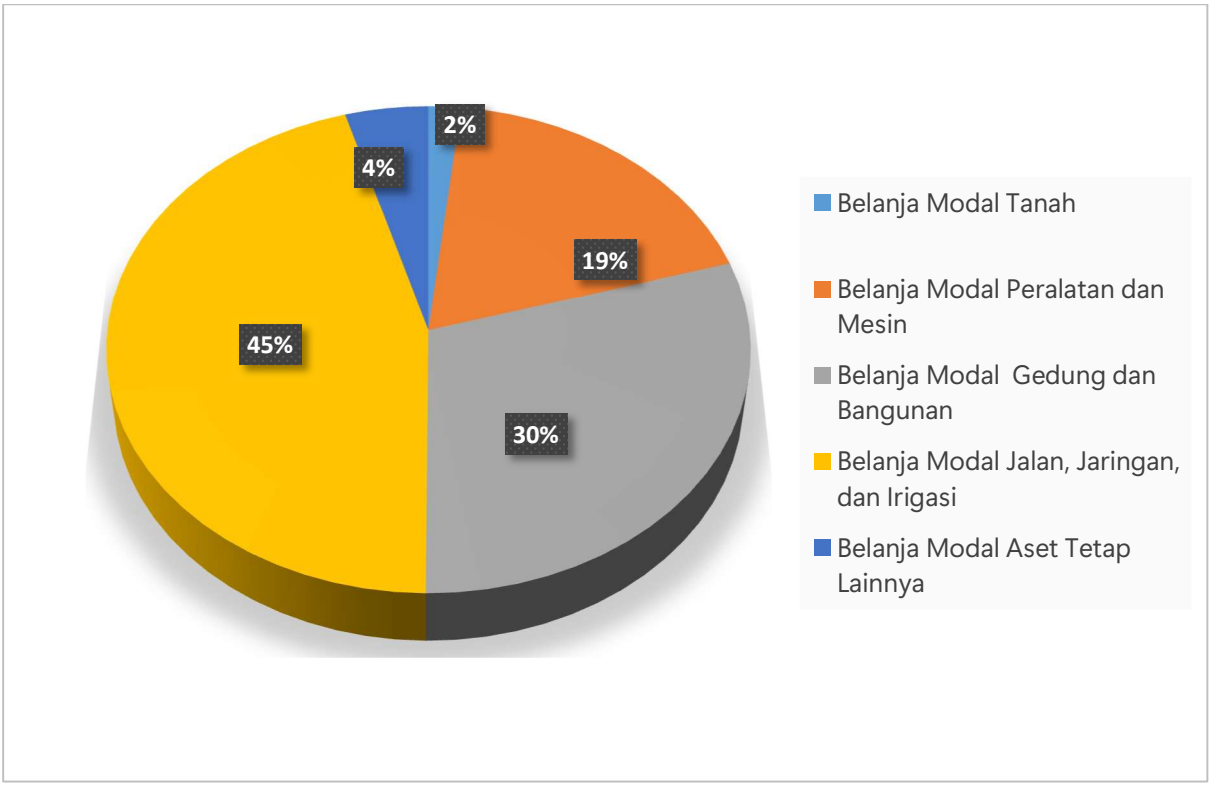
Tabel 2.206.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	3.301.299.641.247	2.503.941.129.737	75,85
2019	3.670.230.927.927	3.162.088.165.983	86,16
2020	2.094.518.027.289	1.755.472.079.286	83,81
2021	3.315.459.457.224	2.199.333.370.928	66,34
2022	3.214.492.236.095	2.868.705.757.385	89,24
2023	1.740.133.476.500	1.676.030.003.504	96,32
2024	1.283.811.039.148	1.244.417.671.176	96,93
Total	**18.619.944.805.430**	**15.409.988.178.000**	**81,67**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

Dari **Gambar 2.159** dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar dalam belanja modal selama periode Tahun 2018 hingga 2024 bersumber dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai Rp. 6.424.147.132.094 atau 45,37 persen dari total belanja modal sebesar Rp. 14.158.452.270.853, selanjutnya kontribusi terbesar kedua adalah dari belanja modal gedung dan bangunan yang mencapai 29,67 persen (Rp. 4.200.399.907.911), diikuti

oleh belanja modal peralatan dan mesin yang berkontribusi sebesar 18,70 persen (Rp. 2.646.952.435.445). Sementara belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal tanah masing-masing memberikan berkontribusi sebesar Rp. 638.537.252.408 atau 4,51 persen dan Rp. 248.415.542.995 yang setara dengan 1,75 persen.



Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

Gambar 2.159. Kontribusi Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 - 2024

Perkembangan realisasi belanja modal menjunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Komponen belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan yang terbesar, terutama dalam lima tahun terakhir, dengan Tahun 2022 mencatatkan nilai tertinggi. Mengingat bahwa wilayah Aceh memiliki potensi besar di sektor pertanian, investasi pada jalan, jaringan dan irigasi menjadi sangat krusial. Infrasrtuktur ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan, serta memastikan distribusi hasil pertanian yang lebih efesien dan merata keseluruh daerah.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk keperluan darurat atau situasi mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selama periode Tahun 2018 - 2024 Pemerintah Aceh telah meealisasikan belanja tidak terduga sebesar Rp. 168.149.126.758. Realisasi terendah tercata pada Tahun 2024, yang hanya mencapai Rp. 19.848.398, mencerminkan kebuutuhan darurat yang relatih lebih rendah pada tahun tersebut. (**Tabel 2.207)**.

Tabel 2.207.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	40.000.000.000	48.704.400	0,12
2019	97.712.075.877	4.838.896.611	4,95
2020	439.760.468.964	158.460.075.459	36,03
2021	147.985.369.115	412.071.890	0,28
2022	16.828.950.631	4.335.030.000	25,76
2023	29.261.478.010	34.500.000	0,12
2024	8.595.194.981	19.848.398	0,23
Total	**780.143.537.578**	**168.149.126.758**	**21,79**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) , 2024 (unaudited)

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja transfer Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 - 2024 berjumlah sebesar Rp. 13.309.255.912.084 atau sebesar 96,85 persen dari anggaran sebesar Rp. 16.901.385.517.597 dan menunjukkan tren yang fluktuaktif dengan rata rata pertumbuhan sebesar 84,75 persen (**Tabel 2.208**).

Tabel 2.208.
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
2018	758.707.376.917	747.533.642.251	98,53
2019	3.338.710.386.450	3.338.261.924.420	99,99
2020	3.627.701.230.250	3.342.298.602.245	92,13
2021	2.960.457.145.733	2.834.519.544.755	95,75
2022	3.057.212.526.998	3.046.642.198.413	99,65
2023	1.758.750.109.762	1.758.750.109.762	100
2024	1.860.760.291.095	1.833.379.495.751	98,5285157
Total	**17.362.299.067.205**	**16.901.385.517.597**	**97,2**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (unaudited)

2.2.1.3. Pembiayaan Aceh

Pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Aceh meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh terdiri dari: Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh, yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2.209.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	767.354.993.296	832.981.076.625	108,55	-
2019	2.882.457.964.942	2.881.224.389.901	99,96	245,89
2020	1.822.307.878.779	2.771.909.599.656	152,11	-3,79
2021	2.617.359.855.556	3.668.874.466.386	140,17	32,36
2022	3.349.177.112.703	3.364.172.736.900	100,45	-8,31
2023	1.252.097.602.450	1.255.603.592.331	100,28	-62,67
2024	409.295.918.241	421.372.974.556	102,95	-66,44

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2022 (Audited), 2023 (Unaudited)

Realisasi pembiayaan Pemerintah Aceh menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2021, realisasi pembiayaan tercatat mencapai angka tertinggi, yaitu sebesar Rp. 3.668.874.466.386. Sebaliknya, Tahun 2024 mencatatkan realisasi pembiayaan terendah sebesar Rp. 421.372.974.556. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan, yang salah satu komponennya adalah SilPA. Selaiin itu, pengeluaran pembiayaan juga sangat tergantung pada besarnya dana yang dialokasikan untuk dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMA. Gambaran lebih jelas tentang capaian pembiayaan keuangan ini dapat dilihat pada perkembangan pembiayaan sebagai berikut:

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Aceh mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA), penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi penerimaan pembiayaan tercatat pada Tahun 2021, dengan jumlah sebesar Rp. 3.970.103.175.595. Sebaliknya, penerimaan pembiayaan

terendah terjadi pada Tahun 2024, yang hanya mencapai Rp. 1.305.536.023.919. Sebagian besar penerimaan pembiayaan ini berasal dari SiLPA daerah, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efesien pada tahun-tahun sebelumnya. anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.210.**

Tabel 2.210.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	832.354.993.296	907.571.981.763	109,04	-
2019	2.954.457.964.942	2.956.538.853.604	100,07	225,76
2020	1.822.307.878.779	2.848.097.021.013	156,29	-3,67
2021	2.924.359.855.556	3.970.103.175.595	135,76	39,39
2022	3.934.177.112.703	3.934.600.250.977	100,01	-0,89
2023	1.304.678.718.450	1.305.536.023.919	100,07	-66,82
2024	473.295.918.241	474.004.949.183	100,15	

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited) 2024 (Unaudited)

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Pemerintahan Aceh mencakup pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembentukan Dana Cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi pengeluaran pembiayaan terendah tercatat pada Tahun 2023 sebesar Rp. 49.932.431.588, yang mencerminkan pengelolaan pembiayaan yang lebih terkendali pada tahun tersebut. Lebih jelas mengenai perkembangan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada (**Tabel 2.211**).

Tabel 2.211.
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018-2024

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
		Rp.	%	Pertumbuhan (%)
2018	65.000.000.000	74.590.905.138	114,76	-
2019	72.000.000.000	75.314.463.702	104,6	0,97
2020	-	76.187.421.358	0	1,16
2021	307.000.000.000	301.228.709.209	98,12	295,38
2022	585.000.000.000	570.427.514.078	97,51	89,37
2023	52.581.116.000	49.932.431.588	94,96	-91,25
2024	64.000.000.000	52.631.974.627	82,24	

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2022 (Audited) 2023 (unaudited)

2.2.2. Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Berdasarkan Neraca Pemerintah Aceh, Selama periode Tahun 2018 - 2023, nilai aset menunjukkan tren peningkatan dengan rata rata pertumbuhan sebesar 9,22 persen. Pertumbuhan aset ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu aset lancar dan asset tidak lancar. Asset lancar mengalami pertumbuhan negatif sebesar 12,22 persen, penurunan terbesar terjadi pada komponen persediaan sebesar minus 16,58 persen dan bagian lancar tagihan penjualan angsuran netto yang mengalami pertumbuhan minus 14,38 persen. Sementara komponen asset lancar yang mengalami pertumbuhan tertinggi terdapat pada komponen belanja dibayar dimuka dengan pertumbuhan sebesar 66,94 persen, diikuti komponen piutang dengan pertumbuhan sebesar 18,96 persen. Pertumbuhan asset tidak lancar mencatat pertumbuhan positif sebesar 13,46 persen selama periode tersebut. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada komponen investasi jangka Panjang yang mencapai 16,20 persen, diikuti asset tetap sebesar 14,44 persen dan asset lainnya sebesar 12,70 persen. Sebaliknya, pertumbuhan asset tidak lancar dari komponen dana cadangan hanya tumbuh sebesar 5,52 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan kewajiban keuangan selama periode Tahun 2018 - 2023, Pemerintah Aceh mencatat tren penurunan, dengan rata rata pertumbuhan negatif sebesar minus 19,08 persen. Sementara itu, ekuitas dana menunjukkan tren peningkatan dengan rata rata pertumbuhan sebesar 13,04 persen, yang mencerminkan peninghkatan kapasitas keuangan daerah dari tahun ke tahun (**Tabel 2.212**).

Tabel 2.212.
Rata Rata Pertumbuhan Necara Aceh Tahun 2018 - 2023

URAIAN	Tahun							Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ASET	**24.072.598.327.197,20**	**28.454.501.537.454,90**	**30.293.837.027.323,30**	**31.850.790.344.624,20**	**34.101.352.240.031,80**	**33.009.930.661.798,30**	**32.358.324.259.837,10**	9,22
Aset Lancar	**4.536.491.179.707,18**	**4.086.981.599.830,59**	**4.703.174.170.476,42**	**4.845.944.935.312,66**	**2.079.249.759.476,71**	**1.233.402.766.814,97**	**976.878.114.514,54**	-12,22
Kas	3.054.343.798.585,65	2.846.680.593.730,38	3.973.124.797.499,29	3.933.680.612.390,39	1.304.678.718.450,03	474.275.855.060,60	530.516.388.440,59	-8,76
Piutang	216.025.651.452,37	283.060.783.057,38	124.273.733.844,27	288.429.359.335,71	198.465.968.369,34	199.391.244.619,11	175.660.702.325,39	18,96
Belanja Dibayar Dimuka	5.256.175.317,67	20.953.960.335,92	3.440.814.702,92	6.151.108.897,29	4.547.580.828,82	3.581.215.818,02	1.823.037.616,89	66,94
Persediaan	1.260.826.427.453,15	936.254.444.823,39	602.280.998.808,15	617.647.953.016,98	571.548.406.004,65	556.146.603.309,67	268.877.986.131,67	-16,58
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	39.126.898,34	31.817.883,52	53.825.621,79	35.901.672,29	9.085.823,87	7.848.007,57	0,00	-14,38
Aset Tidak Lancar	**19.536.107.147.490,10**	**24.367.519.937.624,30**	**25.590.662.856.846,90**	**27.004.845.409.311,60**	**32.022.102.480.555,10**	**31.776.527.894.983,40**	**31.381.446.145.322,60**	13,46
Investasi Jangka Panjang	1.458.208.640.023,48	1.588.251.026.918,74	1.592.869.162.510,55	1.965.004.767.319,77	2.598.499.040.602,32	2.684.124.948.748,24	2.850.546.791.638,60	16,2
Aset Tetap	14.287.441.839.867,30	17.207.374.062.909,60	18.446.505.002.719,90	19.299.133.970.277,70	24.221.176.113.243,50	24.227.737.588.183,1	23.706.212.478.516,80	14,44
Dana Cadangan	1.092.859.104.220,88	1.168.173.567.923,20	1.244.360.989.281,02	1.304.152.498.489,66	1.354.580.012.567,35	1.403.931.328.766,30	1.456.563.303.393,21	5,52
Aset Lainnya	2.697.597.563.378,41	4.403.721.279.872,80	4.306.927.702.335,42	4.436.554.173.224,45	3.847.847.314.141,96	3.460.734.029.285,72	3.135.287.407.498,34	12,7
KEWAJIBAN	**3.379.737.047.419,80**	**2.745.018.328.614,29**	**3.037.487.998.856,06**	**519.675.649.403,62**	**595.981.306.943,91**	**934.364,190.146,39**	232.836.164.275,65	-19,08
Kewajiban Jangka Pendek	3.355.903.121.371,58	2.721.184.402.566,07	3.037.487.998.856,06	519.675.649.403,62	595.981.306.943,91	934.364,190.146,39	**849.438.902.560,39**	-18,87
Kewajiban jangka Panjang	23.833.926.048,22	23.833.926.048,22	-	-	-	-	849.438.902.560,39	-
EKUITAS DANA	**20.692.861.279.778,40**	**25.709.483.208.840,60**	**27.256.349.028.467,20**	**31.331.114.695.220,60**	**33.505.370.933.088,00**	**32.308.546.824.458,70**		13,04
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKUITAS DANA	**24.072.598.327.198,20**	**28.454.501.537.454,90**	**30.293.837.027.323,30**	**31.850.790.344.624,20**	**34.101.352.240.031,90**	**33.242.911.014.605,10**	**31.508.885.357.276,70**	9,22

Sumber; LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited)

Salah satu alat penting untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Neraca yang telah disusun. Hasil dari analisis rasio keuangan ini digunakan untuk tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelengggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendaptan dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Terdapat 2 (dua) analisis rasio keuangan yang digunakan, yaitu:

1. Rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek secara tepat pada waktu. Rasio likuiditas terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).
2. Rasio solvabilitas, digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Tabel 2.213.
***Balance Sheet Ratio* Tahun 2012-2017 Pemerintah Aceh**

Rasio	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Rasio Likuiditas							
Current Ratio	1,35	1,50	1,55	9,32	3,49	1,32	1,15
Quick Ratio	0,98	1,16	1,35	8,14	2,53	0,72	0,83
B. Rasio Solvabilitas							
Debt to Assets Ratio	0,14	0,10	0,10	0,02	0,02	0,03	0,03
Debt to Equity Ratio	0,16	0,11	0,11	0,02	0,02	0,03	0,03

Tabel **Tabel 2.213** dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selama periode Tahun 2018-2024 current ratio menunjukkan rasio di atas 1 (satu) artinya aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar, selama periode tersebut Pemerintah Aceh mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap tahun.
2. *Quick ratio* menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh untuk memenuhi kewajiban lancarnya tanpa harus bergantung pada penjualan persediaan. Selama periode tahun 2018-2024 *quick ratio* tercatat berfluktuatif. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan bahwa Rasio Tinggi (di atas 1) sedangkan Tahun 2018, 2023 dan 2024 menujukkan Rasio Rendah (di bawah 1) mengindikasikan bahwa potensi masalah keuangan karena kemungkinan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cepat.

3. *Debt to Assets Ratio* merupakan rasio keuangan yang mengukur persentase aset pemerintah yang dibiayai oleh total kewajiban. Selama periode Tahun 2018-2024 menunjukkan rasio yang rendah atau memiliki leverage yang rendah. Hal ini mengindikasikan penggunaan utang yang lebih rendah dan ketergantungan yang lebih kecil pada utang untuk membiayai aset. Selama periode ini rasio menunjukkan tren yang menurun, sampai dengan Tahun 2024 tingkat rasionya tercatat sebesar 0,03. Rasio yang mendekati 0 umumnya dianggap lebih aman dan menandakan posisi keuangan yang lebih stabil.
4. *Debt to Equity Ratio*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan daerah mengembalikan pinjaman terhadap ekuitas pemerintah daerah. Selama kurun waktu 2018-2024 menunjukkan penurunan, karena jumlah kewajiban menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Rasio yang mendekati 0 umumnya dianggap lebih aman dan menandakan posisi keuangan yang lebih stabil.

2.2.2.1. Aset

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini mencakup benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh melalui hibah/sumbangan atau yang sejenis, hasil pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, perolehan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut :

1. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar terdiri dari: (a) kas, (b) piutang, (c) belanja dibayar di muka, (d) persediaan, dan (e) bagian lancar tagihan penjualan angsuran netto. Berdasarkan Tabel 2.212 total aset lancar Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 hingga 2024 tercatat mencapai Rp.976.878.114.514,54, dengan kontribusi terbesar berasal dari kas sebesar

Rp.530.516.388.440,59 atau 54,31 persen diikuti oleh persediaan sebesar Rp. 268.877.986.131,67 atau 27,52 persen **Tabel 2.214** memberikan gambaran masing-masing akun terhadap kontribusinya sebagai aset lancar Pemerintah Aceh.

Tabel 2.214.
Kontribusi Aset Lancar Tahun 2023

Uraian	Dalam (Rp.)	Persentase (%)
Kas	530.516.388.440,59	54,31
Piutang	175.660.702.325,39	17,98
Belanja Dibayar Dimuka	1.823.037.616,89	0,19
Persediaan	268.877.986.131,67	27,52
Total Aset Lancar	976.878.114.514,54	100,00

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2022 (Audited)

B. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar mencakup asset yang bersifat jangka Panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Selama periode Tahun 2018 hingga 2024, total aset tidak lancar Pemerintah Aceh Tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 31.381.446.145.322,60 sebagian besar asset tidak lancar ini berasal dari asset tetap yang mencapai Rp. 23.706.212.478.516,80 atau sekitar 75,54 persen dari total asset tidak lancar. Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan aset tetap Pemerintah Aceh sebahagian besar bersumber dari dana APBA, selain itu juga berasal dari Pendapatan BLUD, hibah/donasi, pengalihan aset tetap kepada Pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, serta penyesuaian nilai asset tetap yang telah dilakukan. Untuk rincian lebih lengkap mengenai kontribusi masing-masing komponen aset tidak lancar Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2024 dapat dilihat pada**Tabel 2.215.**

Tabel 2.215.
Kontribusi Aset Tidak Lancar Tahun 2024

Uraian	Dalam (Rp.)	Persentase (%)
Investasi Jangka Panjang	2.850.546.791.638,60	9,08
Aset Tetap	23.706.212.478.516,80	75,54
Dana Cadangan	1.456.563.303.393,21	4,64
Aset Lainnya	3.135.287.407.498,34	9,99
Properti Investasi Netto	232.836.164.275,65	0,74
Total Aset Tidak Lancar	**31.381.446.145.322,60**	**100,00**

Sumber: LRA Tahun 2024 (Audited)

2.2.2.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang atau beban yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan tugas atau tanggungjawab masa lalu. Kewajiban ini dapat muncul dari penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari Lembaga keuangan, entitias

pemerintah lain atau Lembaga internasional. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua katagori, yaitu:

1. Kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka Panjang dan utang jangka pendek lainnya;
2. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Total kewajiban Pemerintah Aceh Tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 849.438.902.560,39, Sebagian besar bersumber dari kewajiban jangka pendek. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.216.**

Tabel 2.216.
Kontribusi Kewajiban Tahun 2024

Uraian	Dalam (Rp.)	Persentase (%)
Kewajiban Jangka Pendek	849.438.902.560,39	100
Kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00
Total	**849.438.902.560,39**	**2,71**

Sumber: LRA Tahun 2024 (Audited)

A. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Aceh selama periode T31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 849.438.902.560,39, Dari jumlah tersebut, sekitar Rp. 635.382.703.305,50 atau 74,80 persen berasal dari Utang belanja dan sebesar 23,90 persen berasal dari Utang jangka pendek lainnya yang tercatat sebesar Rp 203.020.796.000,00, Sementara itu, Pendapatan diterima dimuka tercatat sebesar Rp. 10.780.453.344,89 dengan kontribusi sebesar 1,27 persen yang terdiri dari pendapatan diterima dimuka dari SKPA serta pendapatan diterima dimuka dari BLUD. Lebih jelas mengenai kewajiban jangka pendek Tahun 2018 - 2023 disajikan pada **Tabel 2.217.**

Tabel 2.217.
Kontribusi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024

Uraian	Dalam (Rp.)	Persentase (Rp.)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	254.949.910,00	0,03
Pendapatan Diterima Dimuka	10.780.453.344,89	1,27
Utang Belanja	635.382.703.305,50	74,80
Utang Transfer bagi Hasil Pajak	00,00	00,00
Utang Transfer Dana OTSUS	00,00	00,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	203.020.796.000,00	23,90
Utang Dana Sertifikasi	00,00	00,00
Utang Dana BOS	00,00	00,00
Total	**849.438.902.560,39**	**100,00**

Sumber: LRA Tahun 2024 (Audited)

B. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang Pemerintah Aceh Tahun 2018 - 2022 tercatat sebesar Rp.47.667.852.096 (lihat **Tabel 2.218**). Kewajiban jangka panjang ini berasal dari utang dalam negeri Pemerintah Pusat yang bersumber dari rekening dana investasi, yaitu hak tagih pemerintah/posisi piutang pinjaman per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 23.833.926.048. Kewajiban ini timbul dalam rangka pembiayaan tambahan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PT. Bank BPD Aceh pada Tahun 1999, berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor RDI-352/DP3/1999 tanggal 7 Mei 1999. Pinjaman tersebut berasal dari rekening dana investasi sebesar Rp. 16.915.000.000. Selanjutnya, terhadap perjanjian pinjaman tersebut telah dilakukan amandemen melalui naskah amandemen nomor AMA-171/RDI-352/DSMI/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

Tabel 2.218.
Kontribusi Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2018 - 2022

Uraian	Dalam (Rp.)	Persentase (Rp.)
Utang Dalam Negeri- Setor Perbankan	47.667.852.096	100,00
Total	**47.667.852.096**	**100,00**

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2022 (Audited)

2.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban yang dimiliki Pemerintah Daerah. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Aceh yang berasal dari akumulasi surplus atau deficit anggaran, koreksi-koreksi terhadap laporan keuangan, serta investasi pemerintah daerah dalam bentuk aset. Selama periode Tahun 2018 - 2023 jumlah ekuitas Pemerintah Aceh tercatat sebesar Rp. 170.803.725.969.854. Peningkatan nilai ekuitas ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya keuangan efektif, mempertahankan nilai kekayaan daerah, serta menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.

2.2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat 2 (dua) aspek penting yang harus berjalan beriringan, yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan (*revenue policy*) dan kebijakan di bidang belanja (*expenditure policy*). Kedua aspek ini memiliki peran yang sama penting dan harus saling bersinergi. Secara ideal, *expenditure policy* disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatkan pendapatan daerah. Sementara *revenue policy* diharapkan mampu menunjang kebijakan anggaran, khususnya pada sisi pengeluaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh tercermin dalam strategi pengelolaan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBA.

Arah dan Strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir antara lain dilakukan melalui :

a. Peningkatan pendataan objek dan subjek pajak yang lebih intensif dan akurat.
b. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja dan pembentukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) baru secara bertahap di setiap Kabupaten/Kota.

c. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut pajak.
d. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak.
e. Menggali sumber-sumber pendapatan baru (termasuk zakat/infaq/shadaqah), sesuai dengan peluang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Adapun kebijakan umum dan strategi peningkatan penerimaan dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) meliputi:

a. Optimalisasi tugas Tim advokasi Migas untuk secara proaktif melakukan verifikasi perhitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta memastikan ketepatan penyalurannya, termasuk pembentukan Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA).
b. Percepatan proses pencairan anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, dengan membentuk sistem pencairan keuangan yang lebih efisien dan efektif melalui kesepakatan dan rencana aksi bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
c. Penataan prosedur dan mekanisme pembagian dana otonomi khusus antara Pemerintah Aceh dengan Kabupaten/Kota secara adil dan merata, mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Di sisi belanja, kebijakan diarahakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib dareah, khususnya dalam melindungi dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mendukung pengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Arah kebijakan pada pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun 2023-2026, difokuskan pada:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Aceh Tahun 2018- 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Prioritas belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Pemberian stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi;
6. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kumendesakan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi; dan
7. Efisiensi belanja pegawai untuk mengantisipasi berakhirnya dana Otsus 2028.

2.2.3.1. Proporsi Pengunaan Anggaran

Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah (belanja + pembiayaan pengeluaran). Kualitas belanja daerah dinilai semakin membaik apabila porsi belanja pegawai dalam APBD menunjukkan tren penurunan. Semakin kecil porsi belanja aparatur, semakin besar pula ruang fiscal untuk belanja yang lebih produktif seperti belanja modal yang secara langsung mendorong pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi daerah. Diketahui, rata rata persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran Pemerintah Aceh selama periode Tahun 2018 hingga 2024 adalah sebesar 18,37 persen, yaitu senilai Rp. 15.300.133.349.167 dari total pengeluaran sebesar Rp. 83.295.545.247.155. capaian ini menunjukkan bahwa komposisi belanja Aceh selama periode tersebut tergolong sehat dan ideal, karena proporsi belanja aparatur tetap dibawah 50 persen, dengan dapat disimpulkan bahwa proporsi belanja publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dominan daripada belanja aparatur. Lebih jelas mengenai proporsi belanja pemenuhan aparatur Tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.219**.

Tabel 2.219.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2018 - 2024

Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
2018	2.274.436.642.148	12.380.897.092.619	18,37
2019	2.461.315.744.896	15.863.197.849.193	15,52
2020	2.483.284.443.746	13.318.400.223.253	18,65
2021	2.631.227.115.328	13.984.810.836.638	18,81
2022	2.672.636.562.974	16.343.506.236.119	16,35
2023	2.777.232.840.075	11.404.733.009.333	24,35
2024	3.371.730.786.947	11.339.780.862.479	-0,57

Sumber: LRA Tahun 2018 - 2023 (Audited), 2024 (Unaudited)

2.2.3.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit anggaran daerah, yang selanjutnya menjadi bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasa depan guna mendukung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode

Tahun 2015-2021, diketahui bahwa defisit anggaran terjadi pada Tahun 2015, 2019, dan 2021. Defisit tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah belanja dengan jumlah pendapatan Aceh. Adanya defisit anggaran pada ketiga tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan belanja pembangunan di Aceh namun belum diikuti dengan peningkatan sumber pendapatan Aceh, sehingga ke depan diharapkan Pemerintah Aceh dapat mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) seperti pajak Aceh, retribusi Aceh, Zakat/Infaq dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya, serta mencari alternative sumber pendanaan lainnya.

Dalam hal terjadi defisit APBA, maka pembiayaan ditetapkan untuk menutupi kekurangan tersebut, yang dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berdasarkan data pada tabel 3.26, diketahui bahwa SiLPA tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 3.969.617.354.782,29, sedangkan SiLPA terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar Rp. 286,676,554,172.33. Secara keseluruhan, tren SiLPA selama periode Tahun 2015-2021 menunjukkan kecenderungan meningkat.

2.2.4. Kerangka Pendanaan

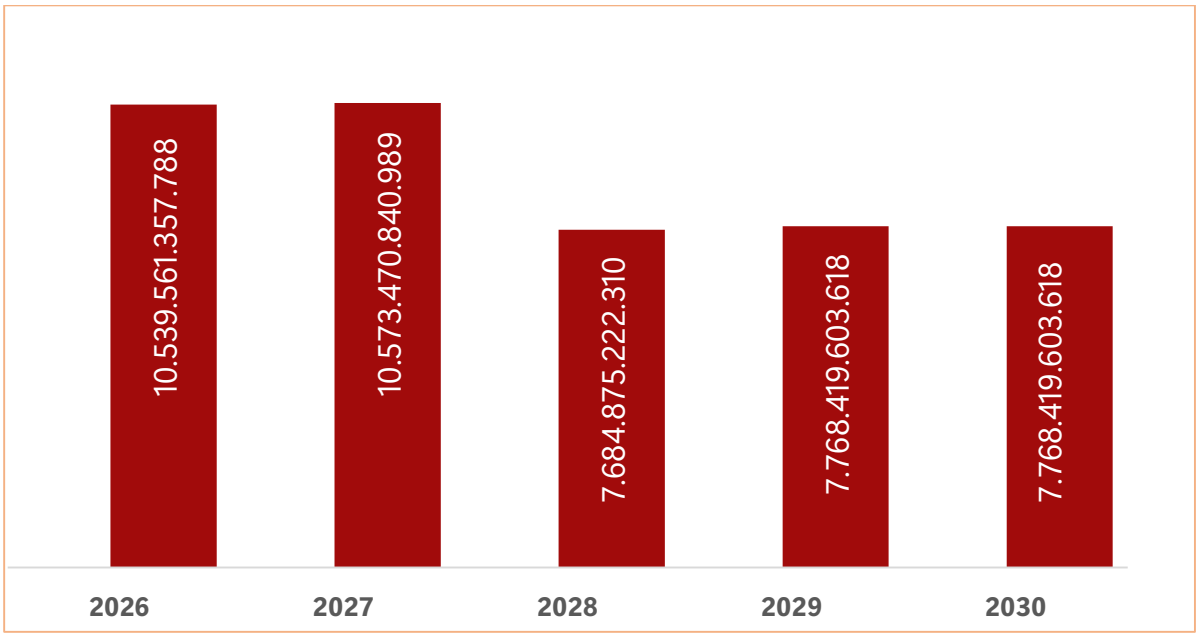
Kerangka pendanaan menggambarkan kondisi umum keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup tiga komponen utama APBA, yaitu : 1) Pendapatan; 2) Belanja; dan 3) Pembiayaan. Untuk menganalisis kerangka pendanaan, perlu dipahami terlebih dahulu jenis-jenis objek pendapatan, belanja, pembiayaan berdasarkan kewenangan dan susunan/struktur APBA serta didukung dengan data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah. Data ini akan menjadi dasar dalam memproyeksikan kerangka pendanaan APBA untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam periode RPJMA 2025-2029. Proyeksi dilakukan menggunakan pendekatan yakni *Smoothing exponential* dan *Least Square Method* yang disesuaikan dengan tren, perkembangan historis, serta asumsi dalam setiap komponen APBA tersebut. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan bahwa kerangka keuangan daerah diproyeksikan hingga Tahun 2030.

2.2.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Aceh

A. Pendapatan

Pendapatan Aceh pada periode 2026-2030 diproyeksikan mengalami trend penurunan. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya Otsus, yang selama ini menjadi bagian signifikan dari komponen pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya untuk mengantisipasi penurunan tersebut dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) melalui optimalisasi sector pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan sah lainnya, sebagai bagian dari *exit strategy* menghadapi berakhirnya dana otsus pada Tahun 2027.

Untuk melihat perkembangan pendapatan Aceh dalam kerangka proyeksi 2026-2030 dapat dilihat pada **Gambar 2.160.**



Gambar 2.160. Proyeksi Pendapatan Aceh 2025-2029 (Rupiah)

Pada Tahun 2026 pendapatan Aceh diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 10,8 triliun. Sebuah penurunan dibandingkan dengan pendapatan Aceh pada Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp. 11,02 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Perubahan kebijakan terkait pajak kendaraan bermotor.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai Tahun 2025 kebijakan Opsen PKB, Opsen BBNKB diterapkan, yang sebelumnya merupakan bagi hasil, serta penghapusan jenis Pajak BBNKB kedua. Namun demikian, Pendapatan Aceh diproyeksikan akan mengalami pemulihan secara perlahan mulai Tahun 2027, meskipun masih ada penurunan yang signifikan pada Tahun 2028 dan 2029, yang diperkirakan mencapai kontraksi sebesar minus 27 persen. Penurunan tajam ini dipengaruhi oleh hilangnya pendapatan dari dana Otsus yang berahir di Tahun 2027. di tahun dengan asumsi hilangnya pendapatan transfer Dana Otonomi Khusus. Proyeksi pergerakan pendapatan ini disesuaikan dengan tren dan asumsi perkembangan setiap komponen pendapatan Aceh, termasuk pendapatandari pajak, retribusi, serta sumber-sumber pendapatan lainnya. Pemetaan ini memberikan gambaran realistis terkait potensi pendapatan daerah dan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pendanaan pembangunan di masa depan.

A.1. Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Pendapatan Asli Aceh (PAA) pada periode 2026-2030 diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan, didorong oleh beberapa komponen pembentuknya, seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah. Dalam memproyeksikan pendapatan dari sektor pajak, digunakan metode *least square method*. Pendekatan ini dipakai karena melihat tren perkembangan

yang stabil selama 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023), yang menunjukkan adanya kenaikan yang cukup konsisten. Berdasarkan proyeksi ini, penerimaan pajak Aceh diperkirakan akan terus meningkat hingga Tahun 2030. Akselerasi inovasi dalam digitalisasi keuangan di Aceh diharapkan memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pembayaran pajak dan retribusi. Pemerintah Aceh telah membentuk TP2DD (Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah) sebagai katalis di daerah untuk mendorong perluasan elektronifikasi sarana/fasilitas umum termasuk pendapatan daerah baik pajak dan retribusi.

Penerimaan dari sektor pajak juga diperkirakan meningkat, seiring dengan upaya kebijakan pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlakukan oleh Pemerintah Aceh selama beberapa tahun terakhir. Pada saat ini pemberlakukan pemutihan pajak kendaraan tersebut telah diberlakukan dari Maret hingga 31 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. proyeksi penerimaan pajak kendaraan menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,11 persen (**Tabel 2.220**).

Selain pajak kendaraan, pajak rokok juga diproyeksikan meningkat hingga beberapa tahun mendatang. Kebijakan atas naiknya tarif cukai tembakau sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2022, menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai berada pada kisaran 10 persen. Kenaikan tarif ini diprediksi akan menyebabkan terjadinya lonjakan pendapatan dari sektor pajak rokok yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,65 persen (**Tabel 2.220**). Namun asumsi realisasi penerimaan pajak rokok dimaksud sangat bergantung pada penganggaran belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terafiliasi BPJS Kesehatan bila tidak menganggarkan total 37,5% dari pajak rokok untuk premi JKN maka dikenakan potongan pendapatan atas hak Pemerintah Aceh dari pajak rokok sebesar kekurangan penganggaran JKN dimaksud, seperti yang telah terjadi pada Tahun 2024 ini. Mulai Tahun 2025, jenis pajak baru akan diterapkan, yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.

Untuk jenis opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki kecenderungan terjadi penurunan disebabkan mekanisme pemungutannya self asesssment, metode dan formula pemungutan antara pemerintah aceh dengan kabupaten kota masiih dalam adaptasi sehingga diperkirakan akan meningkat pada Tahun 2029 nanti, sedangkan pajak alat berat mekanisme pemungutan pajak alat berat yang mempunyai pola yang berbeda dibandingkan pada Tahun 2019 lalu yang memungut pajak kendaraan bermotor beserta bea balik nama kendaraan bermotornya sehingga perlu pengembangan pola pemungutan dan diproyeksikan terus meningkat hingga 2030 nanti.

PAA dari sektor retribusi belum menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Terjadi ketimpangan penerimaan retribusi antar

waktu dari tahun ke tahun. Dalam memproyeksikan retribusi yang demikian sehingga dilakukan peramalan dengan menggunakan smoothing exponential yang mengikuti trend yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui penetapan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh diharapkan retribusi Aceh dapat dikelola menjadi lebih baik. Dalam qanun ini juga telah diatur mekanisme pengaturan tarif retribusi khususnya pada layanan BLUD seperti BLUD SMK pada Dinas Pendidikan Aceh, BLUD Balai ternak Non Ruminansia (BTNR) di bawah Dinas Peternakan Aceh, RSUZA, RSIA, RSJ, Mekanisasi Pertanian, serta Masjid Raya Baiturrahman pada objek retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan objek perizinan usaha lainnya. Secara umum retribusi Aceh ditargetkan meningkat hingga Tahun 2030, dengan jumlah retribusi sebesar 14,4 miliar (**Tabel 2.221**).

Pendapatan Aceh pada kelompok hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan juga diproyeksikan mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan 13 persen. Proyeksi ini juga mencerminkan besarnya *sharing return profit* dari Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), seperti Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim, dan Perusahaan-perusahaan Pemerintah Aceh lainnya. Besar kecilnya nilai pendapatan sektor ini juga dipengaruhi oleh kapasitas penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Aceh, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh (**Tabel 2.222**).

Lain-lain PAA yang sah juga diproyeksikan mengalami peningkatan hingga Tahun 2029, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen. Salah satu komponen yang diproyeksikan meningkat yakni pendapatan Ziswaf. Besarnya proyeksi pendapatan ziswaf ini merupakan target yang akan dicapai oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Selain zakat, optimalisasi pemanfaatan wakaf sektor produktif juga akan dikembangkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh. Selanjutnya, selain pemanfaatan dari sektor ziswaf, upaya optimalisasi pendapatan Aceh juga diupayakan melalui penjualan aset, pemanfaatan aset idle, pendapatan dari jasa giro, bunga deposito, serta pengelolaan BLUD di Aceh diantaranya RSUZA, RSIA, RSJ, khususnya terkait pendapatan dari hasil kerjasama. Beberapa dari BLUD tersebut memberikan pendapatan yang besar bila dikelola dengan baik dan berkesinambungan di masa mendatang.

Tabel 2.220.
Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	438.355.922.508	461.518.369.147	486.496.447.554	513.385.083.495	513.385.083.495	5,11
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	342.559.825.068	345.013.676.743	347.428.772.480	349.860.773.887	349.860.773.887	0,7
Pajak Bahan Baka3r Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	516.950.000.000	545.382.250.000	575.378.273.750	607.024.078.806	607.024.078.806	5,5
Pajak Air Permukaan (PAP)	2.908.025.410	2.922.565.537	2.937.178.364	2.951.864.256	2.951.864.256	0,5
Pajak Rokok	464.458.521.672	482.433.066.461	501.103.226.133	520.495.920.984	520.495.920.984	3,87
Pajak Alat Berat	570.284.220	587.392.747	605.014.529	623.164.965	623.164.965	3
Opsen MBLB	9.993.230.760	9.943.264.606	9.893.548.283	9.943.016.025	9.943.016.025	0,5
Jumlah	**1.775.795.809.637**	**1.847.800.585.240**	**1.923.842.461.093**	**2.004.283.902.418**	**2.004.283.902.418**	2,74

Tabel 2.221.
Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
Retribusi Jasa Umum	687.583.637.094	698.928.767.106	710.461.091.763	722.183.699.777	722.183.699.777	1,65
Retribusi Jasa Usaha	24.024.340.928	24.194.913.748	24.366.697.636	24.539.701.189	24.539.701.189	0,71
Retribusi Perizinan Tertentu	200.340.000	200.680.578	201.021.735	201.363.472	201.363.472	0,17
Retribusi Aceh	711.808.318.022	723.324.361.432	735.028.811.134	746.924.764.438	746.924.764.438	2,53

Tabel 2.222.
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan (Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim, PT. PEMA)	238.612.933.900	247.722.190.241	356.831.446.582	356.831.446.582	356.831.446.582	13

Tabel 2.223.
Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
Lain-Lain Pendapatan Sah	1.049.251.820.973	1.074.701.152.923	1.295.695.933.040	1.295.695.933.040	1.295.695.933.040	6

Tabel 2.224.
Bagian dari Komponen Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
Pendapatan BLUD	889.477.121.528	945.935.138.961	1.002.393.156.394	1.058.851.173.827	1.115.309.191.259	6
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	102.887.798.773	105.799.839.938	108.711.881.104	111.623.922.270	114.535.963.435	3

Secara umum pendapatan dari lain-lain PAA yang sah terdiri atas beberapa komponen utama yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli Aceh. Kedua komponen tersebut adalah pendapatan BLUD dan Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Peran BLUD memberi solusi konkret terhadap keterbatasan fiskal daerah karena tidak sepenuhnya tergantung pada APBA dan mampu menyumbangkan pendapatan melalui skema yang sah dan transparan. Terdapat beberapa unit BLUD yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Aceh, diantaranya: a) Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin; b) UPTD balai Penanganan Sampah Regional; c) UPTD Balai Ternak Non-Ruminansia (BTNR) Blang Bintang; dll. Optimalisasi pengelolaan semua unit BLUD ini dapat menjadi salah satu *exit strategy* peningkatan pendapatan sebagai salah satu langkah strategis berhentinya dana otsus di Tahun 2027.

Selain pemanfaatan BLUD, pendapatan Ziswaf juga menjadi salah satu tulang punggung bagi peningkatan PAA saat ini dan masa mendatang. Pengelolaan dan pemanfaatan dana ziswaf tersebut juga telah diperkuat melalui Undang-Undang No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh. Penghimpunan dan pendistribusian dana Ziswaf tersebut juga menjadi langkah konkret bagi Pemerintah Aceh untuk menggerakkan sektor riil dan sebagai antisipatif bila berakhirnya dana Otsus. Meskipun secara pemanfaatan dana zakat memiliki skema khusus yang diperuntukkan berdasarkan senifnya, namun pendistribusiannya cukup memberikan dampak bagi penurunan jumlah penduduk miskin di Aceh. Untuk meningkatkan pengumpulan dana ziswaf, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh diantaranya: 1) Pemanfaatan teknologi digital; 2) Edukasi dan sosialisasi; 3) Kemitraan strategis; dan 4) Penguatan regulasi dan kebijakan.

Bila dilihat dari optimalisasi kedua komponen pendapatan yakni BLUD dan dana Ziswaf tersebut, menjadi sebuah keniscayaan bahwa pengelolaan dan pemanfataannya secara berkelanjutan dan intensif akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal Aceh pada masa periode RPJM 2025-2029. Adapun proyeksi kedua komponen lain-lain PAA yang sah dapat dilihat pada **Tabel 2.224**.

A.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Besaran pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Aceh disesuaikan dengan alokasi fiskal negara, yang mencerminkan proporsi dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan transfer, terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : 1) dana perimbangan; 2) dana otonomi khusus dan tambahan infrastruktur; 3) Insentif fiskal; dan 4) dana insentif daerah (DID). Dalam memproyeksikan dana perimbangan, digunakan metode *smoothing exponential,* mengingat fluktuasi yang terjadi pada pendapatan yang diterima Aceh, Metode ini diharapkan dapat menggambarkan dengan lebih akurat tren perubahan pendapatan perimbangan di masa depan, berdasarkan kondisi yang terjadi selama ini.

Secara keseluruhan, dana perimbangan Aceh diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar minus 0,27 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik, sebagai komponen

pendapatan terbesar,diperkirakan mangalami penurunan dengan rata-rata minus 1,19 persen hingga Tahun 2029. Penurunan terhadap DAK-NF tersebut didasari oleh penurunan alokasi dana tersebut dalam beberapa tahun terakhir. DAK fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga diproyeksikan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar minus 0,68 persen dan minus 0,11 persen. Penurunan terhadap DAU dan sejumlah transfer lainnya ini diperkirakan akibat pengalokasian dana APBN yang akan berkurang ke daerah, karena lebih difokuskan untuk proyek-proyek strategis lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pada periode pemerintahan berikutnya. Namun demikian, dalam memproyeksikan DAU Tahun 2025-2029, telah diperhitungkan kenaikan sebesar 8 (delapan) persen kenaikan gaji pokok ASN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil proyeksi, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai komponen perimbangan diperkirakan mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,29 persen. Meskipun proyeksi ini menunjukkan pertumbuhan positif, namun besaran peningkatannya secara nominal tidak diperkirakan akan signifikan. Secara umum, perkembangan proyeksi dana perimbangan untuk periode Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Tabel 2.225**.

Dana Otonomi khusus sebagai bagian dari pendapatan transfer, diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada Tahun 2025 diprediksi bahwa dana otsus yang akan diterima Aceh akan berkurang di bandingkan dengan Tahun 2024. Berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024, alokasi dana Otsus untuk Aceh Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 3,3 triliun. Berdasarkan pendapatan otsus yang diterima Tahun 2024 tersebut alokasi dana otsus Tahun 2025 hingga 2027 juga diproyeksi mendapatkan tetap sebesar Rp. 3,3 triliun. Namun, mulai Tahun 2028 dan seterusnya, Pemerintah Aceh tidak akan menerima alokasi dana Otsus lagi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa alokasi dana otsus diberikan selama 20 tahun. Proyeksi Penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh dapat dilihat pada **Tabel 2.226**.

Tabel 2.225.
Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
Dana Perimbangan	3.739.743.636.328	3.745.693.097.642	3.768.639.287.546	3.800.586.277.955	3.800.586.277.955	0,52
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	292.274.666.820	295.197.413.488	298.149.387.623	299.640.134.561	299.640.134.561	1,13
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.231.805.658.730	2.242.964.687.024	2.254.179.510.459	2.276.721.305.563	2.276.721.305.563	0,75
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	365.847.223.658	366.213.070.882	366.579.283.953	370.245.076.792	370.245.076.792	0,13
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	849.816.087.120	841.317.926.249	849.731.105.511	853.979.761.039	853.979.761.039	-0,13

Tabel 2.226.
Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2026-2030

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	3.300.000.000.000	3.300.000.000.000	-	-	-	0
Otonomi Khusus	3.300.000.000.000	3.300.000.000.000	-	-	-	0

A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

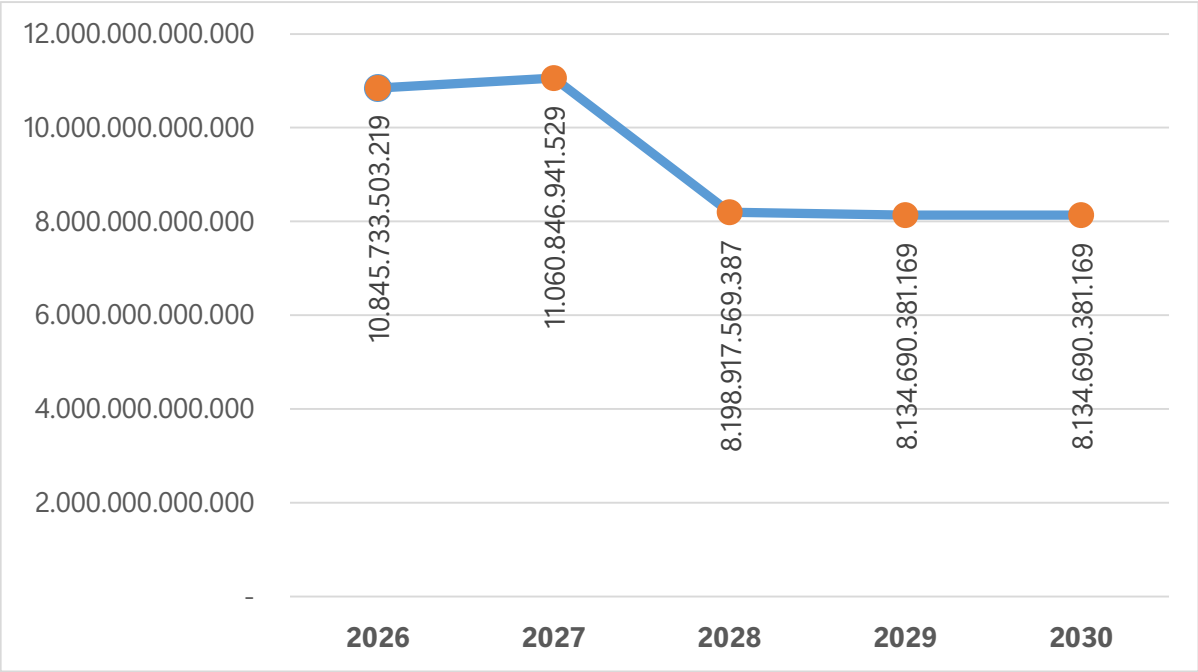
Pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan dari dana hibah pemerintah pusat diproyeksikan akan mengalami fluktuasi sebagaimana tren yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir. Meskipun demikian, pendapatan hibah yang diproyeksikan akan diterima oleh Pemerintah Aceh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,6 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan, diperkirakan tidak akan diterima dalam periode 2025-2029. Hal ini didasari oleh fakta bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Pemerintah Aceh hanya menerima dana tersebut sebanyak 2 kali, yaitu Tahun 2021 sebesar Rp. 1,4 miliar dan Tahun 2022 sebesar Rp. 106 juta. Oleh karena itu, pendapatan dari sumber ini tidak dapat dijasikan sebagai bagian dari pendapatan yang diharapkan akan diperoleh pada tahun-tahun mendatang, seperti yang dapat dilihat pada (**Tabel 2.227**).

Tabel 2.227.
Proyeksi Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025-2029

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.980.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	0
Hibah	1.980.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	

B. Belanja

Belanja Aceh dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 diproyeksikan akan mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan diperkirakan terjadi pada Tahun 2027, seiring dengan berakhirnya alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus), Hal ini berpotensi mengurangi kapasitas fiskal Aceh, yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi besaran alokasi belanja yang juga harus dikurangi terutama pada Tahun 2028 dan 2029. Secara umum proyeksi belanja Aceh pada Tahun 2025 dan 2026 berada di atas Rp. 10,5 triliun. Sedangkan pada Tahun 2027, belanja Aceh diperkirakan akan melebihi Rp. 11 triliun. Proyeksi ini disesuaikan dengan perkembangan tren belanja sebelumnya, yang juga menunjukkan fluktuasi. Proyeksi belanja Aceh Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Gambar 2.161**.



Gambar 2.161. Proyeksi Belanja Aceh Tahun 2025-2029 (Rupiah)

Belanja operasi Aceh diproyeksikan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,26 persen. Penurunan ini terjadi pada semua komponen Pembentuk belanja operasi. Belanja barang dan jasa mencatatkan penurunan terbesar, dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan sebesar minus 8,18 persen. Sementara itu, belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga diproyeksikan mengalami penurunan, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan minus 7,06 persen dan minus 6,61 persen. Adapun belanja pegawai diperkirakan akan mengalami penurunan rata-rata sebesar minus 0,65 persen, meskipun proyeksi ini telah mempertimbangkan kenaikan gaji pegawai sebesar 8 persen yang berlaku dari Tahun 2024 hingga 2029.

Pada kelompok belanja transfer, diproyeksikan akan terjadi penurunan alokasi yang cukup signifikan pada Tahun 2028 dan 2029. Penurunan ini disebabkan oleh berakhirnya dana Otsus, yang juga akan mempengaruhi belanja bantuan keuangan, termasuk alokasi dana Otonomi Khusus (DOKA) untuk Kabupaten/Kota. Selain itu,

belanja transfer untuk kelompok bagi hasil diperkirakan akan terus menurun dengan rata-rata pertumbuhan minus 2,82 persen.

Pada kelompok Belanja Tidak Terduga (BTT) diproyeksikan akan dialokasikan sebesar 50 miliar setiap tahunnya hingga Tahun 2029. Alokasi BTT ini digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat atau mendesak, yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Termasuk dalam anggaran ini adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun –tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Selain kelompok belanja di atas, juga terdapat kelompok belanja modal yang peruntukan bersifat tidak mengikat. Alokasi belanja modal ini diprediksi akan mengalami fluktuasi secara nominal. Secara umum fluktuasi pada belanja modal tersebut dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal Aceh yang terus mengecil seiring dengan asumsi pendapatan Aceh yang mengalami perlambatan. Untuk melihat besarnya proyeksi belanja Aceh secara umum dapat dilihat pada **Tabel 2.228**.

Tabel 2.228.
Proyeksi Belanja Tahun 2025-2029

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2026	2027	2028	2029	2030	
TOTAL BELANJA ACEH						
BELANJA OPERASI	**7.907.481.233.667**	**8.141.306.750.848**	**6.291.758.135.222**	**6.255.221.043.640**	**6.255.221.043.640**	(5,26)
Belanja Pegawai	3.002.763.153.498	2.937.393.160.566	2.946.517.614.479	2.983.082.076.613	2.983.082.076.613	(0,65)
Belanja Barang dan Jasa	3.772.558.439.348	4.063.147.168.769	2.522.300.689.221	2.451.490.376.861	2.451.490.376.861	(8,18)
Belanja Subsidi	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-
Belanja Hibah	950.000.000.000	960.867.512.820	700.850.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	(7,06)
Belanja Bantuan Sosial	174.159.640.821	171.898.908.692	114.089.831.523	112.648.590.167	112.648.590.167	(6,61)
BELANJA MODAL	**1.220.969.113.181**	**1.222.739.932.474**	**1.157.159.434.165**	**1.129.469.337.529**	**1.129.469.337.529**	1,61
BELANJA TIDAK TERDUGA	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	0,00
BELANJA TRANSFER	**1.667.283.156.371**	**1.646.800.258.207**	**700.000.000.000**	**700.000.000.000**	**700.000.000.000**	(14,27)
Belanja Bagi Hasil	817.283.156.371	796.800.258.207	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	(2,82)
Belanja Bantuan Keuangan	850.000.000.000	850.000.000.000				

C. Pembiayaan

Pembiayaan Aceh diproyeksikan mengalami penurunan antara Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Aceh. Penerimaan silpa diperkirakan akan menurun seiring dengan target realisasi belanja yang lebih maksimal, yang diharapkan dapat mencapai lebih dari 95 persen setiap tahunnya, sebagai dampaknya, SiLPA yang terjadi setiap tahunnya diperkirakan berkisar antara 4,9 sampai 5 persen. Meskipun demikian, proyeksi untuk Tahun 2024 menunjukkan bahwa silpa yang tersisa di prediksi mencapai 5,44 persen atau sebesar Rp. 622 miliar.

Dalam upaya memperkecil terjadinya SiLPA tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dalam proses tender pekerjaan Pemerintah Aceh di Tahun 2024 pasca penetapan APBA 2024, optimalisasi ini juga dapat dilakukan lebih awal setelah penetapan APBA di masa mendatang.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, alokasi untuk Pembentukan Dana Cadangan diproyeksikan akan dialokasikan sebesar 51 miliar pada Tahun 2025 dan 2026, namun, pada Tahun 2028 dan 2029, alokasi dana cadangan ini akan dialokasikan sebesar 40 miliar, mengingat kapasitas fiskal Aceh yang terus mengalami penurunan. Dana cadangan ini diperuntukkan bagi dana Abadi Pendidikan seperti beasiswa dan program pendidikan lainnya yang telah berjalan sejak Tahun 2002 dan terus berlanjut hingga saat ini. Untuk memberikan fleksibilitas fiskal yang lebih besar, penggunaan dana yang tersimpan dalam bentuk deposito ini dapat dimanfaatkan, meskipun harus melalui proses revisi qanun.

Selain itu, Pada pengeluaran pembiayaan juga diproyeksikan adanya penyertaan modal Pemerintah Aceh untuk sektor BUMA seperti Bank Aceh Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim, PT. Pembangunan Aceh (PEMA) dan Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah Milik Aceh sebagai upaya mewujudkan ruang fiskal Aceh yang lebih besar dari deviden pembiayaan tersebut sebagaimana Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Aceh. Untuk melihat proyeksi pembiayaan Aceh dari Tahun 2025 hingga 2029 dapat dilihat pada **Tabel 2.229**.

Tabel 2.229.
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026-2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan (%)
III. PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**537.172.145.432**	**538.376.100.540**	**554.042.347.076**	**406.270.777.551**	**406.270.777.551**	-5,88
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	536.172.145.432	537.376.100.540	553.042.347.076	405.270.777.551	405.270.777.551	-5,89
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**231.000.000.000**	**231.000.000.000**	**51.000.000.000**	**40.000.000.000**	**40.000.000.000**	-24,87
Pembentukan Dana Cadangan	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	-5,39
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	180.000.000.000					
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
PENGELUARAN NETTO	**306.172.145.432**	**487.376.100.540**	**514.042.347.076**	**366.270.777.551**	**366.270.777.551**	8,98
SILPA	536.172.145.432	537.376.100.540	553.042.347.076	405.270.777.551		

Tabel 2.230.
Proyeksi Kerangka Pendanaan/Struktur APBA Tahun 2026-2030

URAIAN	Proyeksi (Rp)				
	2026	2027	2028	2029	2030
I. PENDAPATAN	**10.539.561.357.788**	**10.573.470.840.989**	**7.684.875.222.310**	**7.768.419.603.618**	**7.768.419.603.618**
A. PENDAPATAN ASLI ACEH	**3.372.836.140.191**	**3.504.182.444.811**	**3.931.916.533.936**	**4.028.903.199.035**	**4.028.903.199.035**
Pajak Aceh	2.071.540.518.186	2.168.339.677.893	2.265.138.837.600	2.361.937.997.308	2.361.937.997.308
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	695.322.003.359	731.675.174.819	768.028.346.279	804.381.517.738	804.381.517.738
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	382.301.904.385	393.483.731.719	404.665.559.053	415.847.386.387	415.847.386.387
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	544.299.877.093	575.772.940.744	607.246.004.395	638.719.068.047	638.719.068.047
Pajak Air Permukaan (PAP)	3.380.063.144	3.615.651.121	3.851.239.097	4.086.827.074	4.086.827.074
Pajak Rokok	446.236.670.205	463.792.179.491	481.347.688.776	498.903.198.062	498.903.198.062
Retribusi Aceh	13.430.867.132	13.419.423.754	14.250.316.715	14.437.822.106	14.437.822.106
Retribusi Jasa Umum	3.700.582.503	3.727.887.659	4.107.323.420	3.804.215.774	3.804.215.774
Retribusi Jasa Usaha	8.956.536.580	8.906.625.294	9.346.919.742	9.826.370.028	9.826.370.028
Retribusi Perizinan Tertentu	773.748.050	784.910.801	796.073.552	807.236.304	807.236.304
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	238.612.933.900	247.722.190.241	356.831.446.582	356.831.446.582	356.831.446.582
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan (Bank Aceh Syariah, BPR Mustaqim)	238.612.933.900	247.722.190.241	356.831.446.582	356.831.446.582	356.831.446.582
Lain-Lain Pendapatan Sah	1.049.251.820.973	1.074.701.152.923	1.295.695.933.040	1.295.695.933.040	1.295.695.933.040
B. PENDAPATAN TRANSFER	**7.151.725.217.597**	**7.056.147.637.070**	**3.740.958.688.374**	**3.727.638.040.157**	**3.727.638.040.157**
Dana Perimbangan	3.851.725.217.597	3.756.147.637.070	3.740.958.688.374	3.727.638.040.157	3.727.638.040.157
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	388.182.190.732	299.243.218.277	318.525.741.343	321.648.365.649	321.648.365.649

URAIAN	Proyeksi (Rp)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.203.834.209.063	2.201.669.956.251	2.201.603.888.030	2.195.911.454.907	2.195.911.454.907
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	314.890.055.536	314.039.507.812	314.021.967.320	313.460.560.823	313.460.560.823
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	944.818.762.265	941.194.954.730	906.807.091.681	896.617.658.778	896.617.658.778
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	3.300.000.000.000	3.300.000.000.000	-	-	-
Otonomi Khusus	3.300.000.000.000	3.300.000.000.000	-	-	-
Insentif Fiskal					
Dana Insentif Daerah (DID)					
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**15.000.000.000**	**13.140.759.108**	**12.000.000.000**	**11.878.364.426**	**11.878.364.426**
Hibah	15.000.000.000	13.140.759.108	12.000.000.000	11.878.364.426	11.878.364.426
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
II. BELANJA	**10.845.733.503.219**	**11.060.846.941.529**	**8.198.917.569.387**	**8.134.690.381.169**	**8.134.690.381.169**
A. BELANJA OPERASI	**7.907.481.233.667**	**8.141.306.750.848**	**6.291.758.135.222**	**6.255.221.043.640**	**6.255.221.043.640**
Belanja Pegawai	3.002.763.153.498	2.937.393.160.566	2.946.517.614.479	2.983.082.076.613	2.983.082.076.613
Belanja Barang dan Jasa	3.772.558.439.348	4.063.147.168.769	2.522.300.689.221	2.451.490.376.861	2.451.490.376.861
Belanja Subsidi	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Belanja Hibah	950.000.000.000	960.867.512.820	700.850.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	174.159.640.821	171.898.908.692	114.089.831.523	112.648.590.167	112.648.590.167
B. BELANJA MODAL	**1.220.969.113.181**	**1.222.739.932.474**	**1.157.159.434.165**	**1.129.469.337.529**	**1.129.469.337.529**
C. BELANJA TIDAK TERDUGA	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**

URAIAN	Proyeksi (Rp)				
	2026	2027	2028	2029	2030
D. BELANJA TRANSFER	**1.667.283.156.371**	**1.646.800.258.207**	**700.000.000.000**	**700.000.000.000**	**700.000.000.000**
Belanja Bagi Hasil	817.283.156.371	796.800.258.207	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	850.000.000.000	850.000.000.000			
III. PEMBIAYAAN					
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	537.172.145.432	538.376.100.540	554.042.347.076	406.270.777.551	406.270.777.551
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	536.172.145.432	537.376.100.540	553.042.347.076	405.270.777.551	405.270.777.551
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	231.000.000.000	51.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	51.000.000.000	51.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	180.000.000.000				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
PEMBIAYAAN NETTO	**306.172.145.432**	**487.376.100.540**	**514.042.347.076**	**366.270.777.551**	**366.270.777.551**
SiLPA	537.376.100.540	553.042.347.076	405.270.777.551		

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Aceh

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan ini dibuat. Adapun yang menjadi Permasalahan pembangunan di Aceh adalah :

2.3.1.1. Implementasi Keistimewaan Aceh Belum Optimal terutama pelaksanaan otonomi khusus Aceh, Syariat Islam, Korban Konflik serta perdamaian.

1. **Implementasi Dinul Islam Aceh belum optimal**, hal ditandai dengan Indeks Pembangunan Syariat Aceh Tahun 2024 masih sekitar sebesar 87,01 dengan rincian dimensi, yaitu aqidah 87,01, akhlak 82,50, melek Al-Qur'an 83,25, manajemen masjid 83,47, ZIS 84,03, hukum jinayat 83,51 dan Lembaga Keuangan Syariah 83,58.
2. **Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pelestarian dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan** yang terdiri dari Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, dan Cagar Budaya. Pudarnya pelaksanaan adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Aceh Tahun 2023, yaitu sebesar 55,33 dan nasional 57,13 dan berada pada peringkat 22 Nasional. Disamping itu, masih adanya potensi konflik antara agama terutama di perbatasan dan pertentangan aliran dalam agama Islam.
3. **Belum optimalnya Aspek pendapatan dan Pendistribusian Baitul Mal**, hal ini ditandai dengan besarnya SiLPA dari Ziswaf pada Tahun 2024 ini hampir mencapai Rp. 95,54 Milyar (meningkat 7 persen dibandingkan dengan Tahun 2023). Jumlah ini jika dibandingkan dengan potensi Ziswaf masih tergolong rendah yang disebabkan oleh masih kecilnya pembayaran zakat oleh muzzaki dibandingkan mereka yang sudah mencapai masa nisab. Disamping itu, masih terdapat kendala dalam dengan regulasi dalam penyaluran dan belum optimalnya dalam proses pendistribusian. Selanjutnya, beberapa masalah utama berkenaan dengan pengelolaan aset wakaf seperti tanah wakaf yang tidak produktif, adanya sengketa tanah wakaf, terbatasnya tanah wakaf yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait, dan permasalahan lainnya dalam pengelolaan oleh Baitul Mal di Aceh dan Kabupaten/Kota.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan implementasi Keistimewaan Aceh belum optimal, antara lain, belum optimalnya kesepakatan politik yang kuat antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh. Ketidaksepakatan politik atau konflik kepentingan antara kedua belah pihak dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan stagnasi, sumber daya manusia yang memadai, keuangan, dan infrastruktur yang tidak

memadai. Kurangnya sumber daya dan kapasitas di tingkat pemerintah daerah Aceh dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keistimewaan. Ketidakjelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait dengan keistimewaan Aceh dapat mempersulit implementasi. Kurangnya panduan yang jelas dan konsisten dari pemerintah pusat mengenai otonomi khusus Aceh dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat lokal. Implementasi Keistimewaan Aceh mungkin menghadapi resistensi atau penolakan dari pihak-pihak eksternal, termasuk kelompok-kelompok kepentingan di luar Aceh. Faktor-faktor ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tertentu yang diusulkan atau dijalankan oleh pemerintah Aceh. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk di tingkat lokal dapat menghambat implementasi kebijakan dan program-program yang terkait dengan keistimewaan Aceh. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan anggaran. Beberapa kebijakan atau program yang terkait dengan keistimewaan Aceh mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Ketidaksesuaian ini dapat mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.

Untuk meningkatkan implementasi Keistimewaan Aceh, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk dengan memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperjelas regulasi dan kebijakan terkait. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses implementasi juga merupakan kunci keberhasilan.

Jika implementasi Keistimewaan Aceh, termasuk pelaksanaan otonomi khusus, penerapan syariat Islam, dan penanganan korban konflik, belum optimal, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: Ketidakpuasan Masyarakat di kalangan masyarakat Aceh. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak mampu memenuhi harapan atau kebutuhan masyarakat, hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Implementasi yang tidak optimal dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan kebijakan di Aceh. Kurangnya kejelasan dalam regulasi dan kebijakan terkait syariat Islam atau otonomi khusus Aceh dapat menghambat kepastian hukum dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Daerah yang mendapatkan manfaat lebih besar dari kebijakan-kebijakan tersebut mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih cepat, sementara daerah lain dapat tertinggal. Kurangnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Penegakan syariat Islam yang tidak memenuhi standar hak asasi manusia atau perlakuan yang tidak adil terhadap korban konflik dapat menciptakan kerentanan dan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat, Ketidakstabilan Politik dan Sosial Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, ketegangan antar-atau dalam

daerah, dan konflik kepentingan politik dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di wilayah tersebut.

Kerugian Ekonomi dan Pemborosan Sumber Daya, program-program yang tidak efektif atau tidak efisien dapat menyia-nyiakan anggaran publik yang berharga, sementara peluang-peluang pembangunan yang terlewatkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh untuk memastikan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta memperbaiki hambatan-hambatan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Aceh belum maksimal dan fluktuatif:

1) **Perkembangan laju perekonomian Aceh mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan**, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi Aceh Tahun 2024 sebesar 4,66 persen sedangkan nasional 5,03 persen.
2) **Inflasi Aceh masih belum stabil**, hal ini ditandai Tahun 2021 angka inflasi Aceh sebesar 2,24 persen, sementara itu di Tahun 2022 tercatat sebesar 5,89 persen, di Tahun 2023 inflasi yang dapat dikendalikan sebesar 1,53 persen , namun Tahun 2024 meningkat kembali menjadi 2,17 persen.
3) **Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tinggi dan dinamis**, hal ini ditandai dengan rasio gini Tahun 2020 sebesar 0,319 naik menjadi 0,323 pada Tahun 2021, sementara itu pada Tahun 2024 turun menjadi 0,294.
4) **Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro**. Hal ini ditandai Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif lintas kabupaten/kota yang hanya mencapai 63 persen dan diharapkan mencapai 67 persen pada Tahun 2045,
5) **Masih rendahnya rasio kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh,** yaitu sebesar 1,8 persen yang akan ditingkatkan mencapai 1,93 persen,
6) **Masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital,** terutama bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB,
7) **Belum optimalnya *Return On Asset* (ROA) BUMA** yang hanya 2 persen. Walaupun secara Indonesia ini sudah baik, namun angka idealnya adalah 5-20 persen.
8) **Pembangunan koperasi masih lemah**, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang hanya berskisar 1 persen atau Rp. 1.564.088 juta rupiah sedangkan nasional sudah mencapai Rp. 182.352.359 juta rupiah.

9) **Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah**, hal ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sangat rendah dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi yang hanya 1,5 (%) dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi.

   Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2024 baru sekitar 4,71 persen. Rendahnya pertumbuhan investasi di sektor industri, khususnya pengolahan hasil komoditi unggulan dan belum adanya kawasan industri yang representatif dan produktif.

10) **Iklim investasi belum baik**, hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Aceh masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada Tahun 2024 sebesar 9,47 triliun. Masih rendahnya nilai investasi tersebut dikarenakan belum optimalnya Kawasan Peruntukan Investasi (KPI) diantaranya : a) Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong; b) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang; c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun; dan d) Kawasan Industri Perikanan Lampulo.

11) **Daerah rawan pangan masih tinggi**. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase daerah rawan pangan di Aceh Tahun 2024 yang mencapai 11,42 persen.

12) **Belum memadai fasilitas infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan**. Menurut data terakhir, skor PPH ketersediaan dan konsumsi Aceh Tahun 2019 sebesar 66 dan belum mencapai angka 100.

13) **Produktivitas Pertanian semakin menurun**, hal ini ditandai dengan produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar di Tahun 2021 turun menjadi 5,5 ton/ha pada Tahun 2022. Produksi padi juga mengalami penurunan di Tahun 2013 sebanyak 1.937.889,5 ton menjadi 1.533.138,1 ton di Tahun 2022. Dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 20,88 persen dalam kurun waktu 10 Tahun;

    Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu pada Tahun 2013 luas panen padi Aceh sebesar 411.441,51 ha menjadi 276.639,86 pada Tahun 2022 atau terjadi penyusutan sebesar 32,76 persen;

14) **Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan**. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani Aceh dengan nasional pada Tahun 2024, yaitu masing-masing 119,25 dan 120,30 dan belum berjalannya industri pengolahan untuk hasil pertanian.

15) **Kesejahteraan Petani belum maksimal**, hal ini ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Peternak (NTPt) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih sekitar 106,81.

Pengelolaan dan produktivitas kelautan dan perikanan belum maksimal, hal ini ditandai belum optimalnya industrialisasi perikanan dan sarana prasarana pelabuhan yang modern terintegrasi sehingga produksi perikanan tangkap masih dijual dalam bentuk bahan baku.

Potensi Kelautan dan perikanan Aceh rawan terhadap ancaman IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) dan Destructive Fishing, dan belum optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang berkelanjutan.

Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan budidaya, peningkatan sumberdaya manusia dan penerapan teknologi terbaru yang adaptif.

Produksi garam masih dilakukan secara tradisional, belum mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Kandungan garam yang dihasilkan petani garam di Aceh masih mengandung impurities.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah di Aceh dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya sejarah konflik bersenjata di Aceh, yang berlangsung selama beberapa dekade sebelum perdamaian pada Tahun 2005, telah meninggalkan dampak yang signifikan pada infrastruktur, perekonomian, dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun situasinya telah membaik sejak itu, tetapi dampaknya masih terasa dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Aceh terlalu bergantung pada sektor ekonomi seperti pertanian atau perikanan, yang mengalami kendala struktural atau alamiah yang membatasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kurangnya infrastruktur yang memadai, termasuk jaringan transportasi yang baik dan layanan dasar seperti listrik dan air bersih, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kurangnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi ekonomi juga dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi Aceh. Ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk industri kreatif dan teknologi.

Aceh terletak di daerah rawan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Bencana-bencana ini dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kerentanan ekonomi secara keseluruhan. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan perikanan.

Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan menghalangi investasi serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat memiliki sejumlah dampak negatif bagi masyarakat Aceh, antara lain tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang rendah bagi penduduk. Hal ini dapat memperburuk tingkat kemiskinan di Aceh, mengakibatkan kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah cenderung

meningkatkan kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, dengan beberapa bagian masyarakat mungkin mengalami peningkatan pendapatan dan akses ke peluang, sementara yang lain tetap terpinggirkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, pemerintah kesulitan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang terjangkau, dan infrastruktur yang memadai. Ini dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat membatasi investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sumber daya manusia secara umum. Hal ini dapat menghambat kemampuan masyarakat Aceh untuk bersaing dalam pasar kerja global yang semakin kompetitif. Jika pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor-sektor sumber daya alam yang terbatas, seperti pertanian atau perikanan, maka masyarakat akan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan dampak lingkungan yang mungkin merugikan.

Ketidakpuasan ekonomi di kalangan masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan risiko konflik sosial, termasuk protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Aceh untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa masyarakat Aceh dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, pelatihan keterampilan, diversifikasi ekonomi, dan perbaikan tata kelola.

2.3.1.3. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola pemerintahan Aceh:

1) **Reformasi Hukum Aceh masih belum optimal,** hal ini ditandai capaian Indeks Reformasi hukum Aceh adalah 67.8.
2) **Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum optimal, Hal ini ditandai** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Aceh sebesar 3.64 (sangat baik) pada Tahun 2024 sedangkan yang paling tinggi adalah Jawa Barat sebesar 4,73 (memuaskan). Aceh tidak masuk dalam sepuluh besar pemanfaatan IT ini.
3) **Pelayanan publik di Pemerintah Aceh belum optimal,** hal ini ditandai masih Indeks Pelayanan Publik hanya sebesar 4.01 (2022) sedangkan nasional 61,1 persen
4) **Masih belum optimalnya SDM ASN,** hal ini ditandai dengan Indeks Profesionalitas ASN 76,76 (2023).
5) **Masih belum optimalnya Integritas Pemerintah Aceh,** hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Integritas Nasional 72,43 (2021) sedangkan pada Tahun 2023 tercatat menurun menjadi 70,97.

6) **Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal** yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA dan Mulai Tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus.

7) **Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada**. partisipasi pemilih pada pemilu presiden Tahun 2024 sebesar 87,01 persen, pemilu legislatif 86,86 persen, pemilihan kepala daerah 77,5 persen.

8) **Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan**. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan monitoring dan evaluasi belum berjalan.

9) **Kemandirian Fiskal Masih Rendah**. Persentase kemandirian fiskal Tahun 2024 sebesar 28,67 persen (*unaudited*) atau tergolong dalam kriteria rendah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat (dana transfer) sebesar 71,31 persen dari total APBA yang menandakan kapasitas fiskal Aceh masih rendah, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Aceh terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai Tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada Tahun 2028 menjadi 0 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya potensi pembiayaan dan kemitraan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya, diantaranya Pemberdayaan Enonomi Nasional (PEN), Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Civil Cosiety Organisation (CSO), dan Public Private Partnership (PPP).

10) **Pembangunan Sumber daya ASN belum optimal**, hal ini ditandai belum optimalnya pelaksanaan manajemen Kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah dan juga rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan P3K yang mencapai 7300 formasi, rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN, yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen.

11) **Pelaksanaan serta pemanfaatan hasil riset, termasuk inovasi dan invensi sebagai bukti untuk mendukung kebijakan pembangunan Aceh *(evidence-based policy)* masih belum optimal**. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumberdaya manusia, kerjasama, infrastruktur, serta dukungan anggaran agar penelitian dan pengembangan dapat fokus pada peningkatan penyelenggaraan pembangunan daerah.

12) **Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi** melalui penguatan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien.

13) **Belum optimalnya tingkat Inovasi Daerah**. Hal ini ditandai dengan pencapaian nilai indeks inovasi daerah Aceh Tahun 2024 yang baru mencapai sebesar 55,87 pada level "inovatif" sedangkan level tertinggi adalah "sangat inovatif" (nilai indeks 100-60,01). Sementara itu, Sumatera Barat menduduki peringkat pertama Indeks Inovasi Daerah dengan nilai indeks sebesar 88,92 (katagori "Sangat Inovatif").

14) **Pelayanan dasar belum optimal**, hal ini ditandai oleh belum maksimalnya standar pelayanan minimal di Aceh, menurut data terakhir pada Tahun 2023 indeks pemenuhan SPM Aceh baru mencapai 93,26 persen dan berada pada ranking 24 dari 38 provinsi. Pada Tahun 2024 meningkat sebesar 94,76 persen.

15) **Pembangunan di gampong masih belum optimal**, yang ditandai dengan masih rendahnya Indeks Desa **Membangun** (IDM) Aceh Tahun 2024 yang baru mencapai 0,6848 (status: berkembang), sedangkan nasional dengan status yang sama memiliki IDM yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,7034.

16) **Belum tuntasnya rekonsiliasi dan penanganan korban pasca konflik**. Hal ini ditandai belum tersedianya data korban konflik yang akurat, sehingga pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial korban konflik yang dilaksanakan selama ini belum memberikan hasil yang maksimal.

17) **Masih terdapat potensi lahan HPH/HGU yang tidak dimanfaatkan serta memiliki potensi yang besar untuk dialihfungsikan kepada daerah.** Hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan skala ekonomi masyarakat pengembalian lahan tersebut dapat dilakukan melalui kerangka UUPA guna menerbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat (redistribusi).

18) **Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** seperti cakupan akta kelahiran yang masih 96,40 persen pada Tahun 2023, sementara yang diharapkan cakupan kepemilikan tersebut adalah sebesar 100 persen. Demikian pula dengan cakupan akta kematian yang capaiannya masih rendah dan data kependudukan *by name by address* perlu diperbaharui.

Adapun sebab mengapa tatakelola Pemerintah Aceh belum optimal adalah Pemerintah Aceh menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan transformasi tata kelola yang efektif. Kurangnya anggaran dan tenaga kerja terlatih dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menerapkan perubahan yang diperlukan.

Budaya organisasi yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan mungkin menghambat kemampuan pemerintah Aceh untuk mengadopsi praktik tata kelola yang

lebih baik. Resistensi terhadap perubahan dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dapat menghambat transformasi tata kelola.

Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi pemerintah dapat menghambat upaya untuk melakukan transformasi tata kelola. Korupsi dapat mengakibatkan penggunaan yang tidak efisien atau tidak adil dari sumber daya publik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Institusi pemerintah di Aceh belum optimal belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola transformasi tata kelola dengan efektif. Kurangnya kepemimpinan yang kuat, sistem pengawasan yang lemah, dan kurangnya keterampilan manajerial di kalangan pejabat pemerintah dapat menghambat kemampuan institusi untuk melaksanakan perubahan.

Faktor politik, termasuk perubahan kepemimpinan atau perselisihan politik, dapat mengganggu upaya transformasi tata kelola pemerintah. Ketidakstabilan politik dapat mengalihkan perhatian dari reformasi tata kelola dan menghambat implementasi kebijakan yang diperlukan.

Untuk meningkatkan transformasi tata kelola pemerintah, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin politik dan pemerintah, upaya untuk memperkuat kapasitas institusi, pemberantasan korupsi, dan pembangunan budaya organisasi yang responsif dan terbuka terhadap perubahan. Ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reformasi tata kelola yang berkelanjutan.

Jika tata kelola pemerintah di Aceh tidak berjalan dengan optimal, dapat timbul sejumlah akibat negatif, seperti penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran, penundaan proyek-proyek pembangunan, dan penurunan kualitas layanan publik. Ketidakoptimalan dalam tata kelola pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi dapat merugikan masyarakat dengan mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang layak, pemerintah akan gagal merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan potensi konflik sosial atau politik, dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Aceh. Penundaan proyek-proyek pembangunan, kurangnya investasi dalam infrastruktur, dan ketidakstabilan kebijakan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Jika tata kelola pemerintah dianggap tidak efektif atau tidak transparan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan, serta mengganggu stabilitas politik dan sosial secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola pemerintah secara menyeluruh, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memerangi korupsi, memperkuat kapasitas institusi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

2.3.1.4. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah:

1) **Belum optimalnya interkoneksi transportasi di Aceh**, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan Provinsi, yaitu sebesar 80,80 persen (2024). Sedangkan kondisi mantap jalan nasional di wilayah Aceh sudah mencapai sebesar 95,92 persen;

2) **Belum optimalnya pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW**; hal ini ditandai belum optimalnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Hutan Aceh, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

3) **Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah**, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Aceh mengalami peningkatan dari 7.526,51 ha Tahun 2023 menjadi 7.627,54 ha di Tahun 2024, Capaian rumah tangga dengan akses air minum layak Aceh Tahun 2024 sebesar 90,08 persen, masih di bawah capaian nasional sebesar 92,64 persen; dan Rumah tangga dengan akses sanitasi layak Aceh adalah 81,1 persen dan nasional sebesar 83,60 persen pada Tahun 2024;

4) **Infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal**, Kondisi infrastruktur dan pelestarian sumber daya air di Aceh masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan rendahnya infrastruktur SDA dalam kondisi baik (60,39% pada 2022), menurunnya debit air andalan, sebagian daerah irigasi yang tidak berfungsi optimal (hanya 82,56% dari luas 65.409 Ha yang berfungsi baik), serta terbatasnya penanganan banjir yang baru mencakup 38,21% dari potensi genangan.

   Beberapa sungai mengalami degradasi dan sedimentasi, sehingga diperlukan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir: rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis di hulu, pengawasan pemanfaatan sungai serta pembangunan tanggul di bagian tengah, dan pengerukan sedimentasi di hilir yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan perekonomian.

   Permasalahan juga muncul akibat tingginya sedimentasi di muara sungai (antara lain di Krueng Baro, Krueng Ulim, Krueng Pante Raja, Krueng Peudada,

Krueng Samalanga, Krueng Jeunib, Krueng Idi, Krueng Langsa, Krueng Tamiang, Krueng Keureuto, Krueng Pase, Krueng Teunom, Krueng Seunagan, Krueng Tripa, Krueng Singkil, Krueng Labuhan Haji, Krueng Kluet, dan Krueng Sarah), yang menghambat aliran banjir dan lalu lintas kapal nelayan.

Selain itu, pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu karena adanya perbedaan kewenangan BPDAS (BPDAS Krueng Aceh dan BPDAS Sei Wampu). Oleh karena itu, permasalahan utama yang perlu ditangani adalah: 1. Degradasi daerah aliran sungai; 2.Tingginya sedimentasi di muara sungai; 3. Belum terwujudnya pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu hingga hilir

5) **Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan**, baik darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat. Rasio Konektivitas Daerah Aceh pada Tahun 2024 sebesar 0,73, capaiannya masih dalam katagori rendah.

6) **Kawasan transmigrasi belum optimal**, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan.

Ketimpangan antara daerah di Aceh dapat tinggi karena beberapa faktor, diantaranya:

a) Ketidakmerataan Pembangunan Infrastruktur. Beberapa daerah mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi daripada daerah lain. Ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah.

b) Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu, dimana Kabupaten/kota yang tergantung pada sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian atau perikanan, mungkin mengalami ketimpangan ekonomi jika sektor tersebut tidak berkembang dengan merata di seluruh wilayah Aceh. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kualitas tanah, akses pasar, dan perubahan iklim.

c) Alokasi anggaran yang tidak merata dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah. Daerah-daerah yang mendapatkan lebih banyak dana dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program ekonomi, sementara daerah-daerah lain mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

d) Kurangnya Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan. Ketimpangan pendidikan dan kesehatan antara daerah di Aceh juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang baik mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

e) Perbedaan dalam Kebijakan Pembangunan Regional. Perbedaan dalam kebijakan pembangunan regional antara pemerintah daerah dapat memperburuk ketimpangan antar daerah. Daerah-daerah yang menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan pro-poor mungkin dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, sementara daerah-daerah lain yang fokus pada kepentingan kelompok tertentu atau pengembangan infrastruktur yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan.

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, memperkuat infrastruktur, dan mendorong diversifikasi ekonomi di seluruh wilayah Aceh.

Selanjutnya, ketimpangan yang tinggi juga dapat menciptakan ketegangan sosial antara daerah yang berbeda, terutama jika ada persepsi ketidakadilan dalam alokasi sumber daya atau pembangunan oleh pemerintah. Ketegangan sosial ini dapat meningkatkan risiko konflik antar-atau dalam daerah, mengganggu stabilitas politik dan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Aceh. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin tidak mampu berkontribusi sepenuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi potensi pembangunan regional dan nasional secara keseluruhan, dapat mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah-daerah yang miskin ke daerah-daerah yang lebih makmur, menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kerja dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan di daerah tujuan.

Ketika ketimpangan antar daerah di Aceh tinggi, dapat timbul sejumlah akibat yang merugikan, seperti :

a. Peningkatan Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, polarisasi ekonomi dan sosial antara Kabupaten/kota yang kaya dan miskin di Aceh. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang lebih besar, dan memperdalam ketidaksetaraan sosial.

b. Kurangnya Akses Terhadap Layanan Dasar. Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Ketidakmerataan dalam akses terhadap layanan dasar ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan kesehatan antara daerah.

c. Ketergantungan pada Bantuan dan Dana Pemerintah: Daerah-daerah yang miskin atau terpinggirkan mungkin menjadi lebih tergantung pada bantuan pemerintah atau dana pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Ketergantungan ini dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kerentanan ekonomi daerah terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi global.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Aceh untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dengan menerapkan kebijakan dan program yang memperkuat akses terhadap layanan dasar, meningkatkan investasi dalam pembangunan ekonomi lokal, memperkuat infrastruktur, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.

2.3.1.5. Sumber Daya Manusia masih rendah:

1. **Sumber daya manusia masih rendah dan adanya diparitas yang tinggi antar kabupaten/kota**, hal ini ditandai dengan IPM Aceh sebesar 75,36% (2024) dan yang paling tinggi adalah Banda Aceh 88,35 dan yang paling rendah Subulussalam sebesar 70,4.
2. **Mutu guru belum optimal dan merata**. Guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SMK sudah mencapai 60 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA guru yang tersertifikasi belum mencapai 40 persen dan pada SLB guru yang tersertifikasi belum mencapai 30 persen, selain itu masih tingginya guru dengan status bukan PNS, yaitu mencapai 86,9 persen pada tingkatan pendidikan SLB.
3. **Masih rendahnya APS anak usia 4-18 tahun penyandang Disabilitas**. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun di Aceh sudah baik (83,10 persen) dibandingkan Nasional (73,15 tahun) meskipun belum mencapai target 100 persen, namun APS anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dibawah 40 persen.
4. **Masih rendahnya minat baca masyarakat Aceh**, dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh Tahun 2024 masih sebesar 72,42 masih di bawah rata-rata nasional dan masuk dalam katagori Sedang;
5. **Angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar**. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebesar 34,62 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 17,54 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.
6. **Angka ketergantungan penduduk masih tinggi,** hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Aceh Tahun 2024 tercatat mencapai 48,61 persen lebih baik dari nasional 46,80 persen, namun Aceh perlu mengoptimalkan penurunan angka ini agar masyarakat semakin produktif.
7. **Tingkat Pengangguran Terbuka (%) masih tinggi, yaitu sebesar 5,75 persen (2024) sedangkan nasional sebesar** 4,91 persen.

8. **Tingkat Partisipasi** Angkatan Kerja Perempuan Aceh (%) 49,62 sedangkan nasional 55,41 (2024).
9. **Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah**, dayah masih kurangnya inisiatif membekali para santri dengan ilmu kewirausahaan, kurangnya mendapatkan pelatihan-pelatihan ilmu baik dibidang pertanian, perikanan dsb akan tetapi lebih focus pada perbaikan sapras. Dari 1.484 jumlah dayah hanya 44% yang mandiri.
10. **Derajat kesehatan masyarakat belum maksimal**, hal ini ditandai dengan Angka Harapan Hidup Aceh sebesar 73,2 masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 74,15 pada Tahun 2024;
11. **Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil belum optimal**, hal ini ditandai angka Kematian Ibu Tahun 2024 di Aceh 98/100.000 kelahiran hidup, kondisi ini belum memenuhi target.
12. **Masih tingginya prevalensi stunting,** data terakhir Tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 29,40 persen, masih diatas angka Nasional 21,50 persen;
13. **Berkurangnya pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh,** dikarenakan menurunnya pendapatan dari Otsus dari 2% (2018-2022) menjadi 1% (2023-2027) dan pada Tahun 2028 akan berakhir;

    Belum optima Capaian terbaik SPM terdapat pada bidang Kesehatan dimana telah mencapai 100% di Tahun 2024, walaupun sempat mengalami penurunan Tahun 2021 pada angka 48,12 persen. Diikuti dengan bidang sosial yang juga mengalami fluktuasi, dan pada Tahun 2024 berada pada angka 99,60 persen. Sedangkan, capaian SPM terendah pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU), dimana mendapat nilai terendah dalam empat tahun terakhir, namun mengalami kenaikan secara signifikan di angka 100 persen pada Tahun 2023 dan kembali turun pada Tahun 2024 di angka 96,34 persen.
14. **Inya cakupan pelayanan kesehatan rujukan** di tingkat provinsi yang masih bertumpu pada rumah sakit Zainal Abidin,
15. **Penduduk miskin Aceh masih tinggi**, dimana angka kemiskinan Aceh sebesar 14,23 (Maret 2024) sedangkan nasional 9,03%, sedangkan angka kemiskinan ekstrem Aceh sebesar 14,23%. (2023)
16. **Pendapatan perkapita Aceh masih rendah**, hal ini ditandai Tahun 2024 sebesar Rp. 39.16 sedangkan nasional Rp. 71.03, pendapatan perkapita penduduk Aceh setengah dari rata-rata pendapatan **perkapita** penduduk Indonesia.
17. **Ketimpangan Gender dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi**. Hal ini ditandai masih rendahnya partisipasi perempuan

di ruang publik, terutama dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif di tingkat Aceh sebanyak 11 persen sedangkan di tingkat nasional sebanyak 21 persen, masih rendahnya indeks pemberdayaan gender dibandingkan dengan nasional, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh 69,92 sedangkan nasional 76,90. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah lebih baik dibandingkan nasional, dimana Tahun 2024 IPG Aceh 92,64 sedangkan nasional 91,85, Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Tahun 2022 (1.029 kasus) menjadi 1.098 kasus di Tahun 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, trend kekerasan seksual meningkat di Aceh

18. **Pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan, hal ditandai dengan pembangunan indeks pembangunan keluarga yang belum maksimal, demikian juga dengan kepemudaan dan keolahrgaan**, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) belum optimal, yaitu sebesar sebesar 58,01 belum mencapai indeks ideal sebesar 75,00, lemahnya pembinaan atlet berprestasi dan masih rendahnya prestasi olahraga sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 45 tahun, terbatasnya prasarana dan sarana olahraga yang berstandar dan cakupan pembinaan olahraga baru 53,57 persen dari seluruh cabang olahraga yang diakui di Indonesia.
19. **Daya tampung dalam panti masih belum optimal** dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada di Aceh, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Aceh belum terpenuhi.
20. **Penanganan Disabilitas belum maksimal,** hal ini ditandai oleh masih rendahnya persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20 persen dari jumlah 8,361 PPKS.
21. **Kesejahteraan pekerja belum maksimal**, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 20,86 persen. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen.

Penyebab masih rendahnya SDM Aceh adalah adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, meskipun Aceh memiliki banyak sekolah dan lembaga pendidikan, tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Wilayah pedalaman atau terpencil mungkin menghadapi kendala dalam hal infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang berkualifikasi, dan kurangnya dukungan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Konflik bersenjata yang telah lama berlangsung di Aceh telah mengganggu proses pembangunan SDM. Konflik ini dapat mengganggu akses pendidikan, menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan, dan menyebabkan gangguan pada proses belajar-mengajar. Pembangunan SDM memerlukan investasi yang signifikan dari pemerintah dalam hal pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan

pengembangan ekonomi masih belum fokus dan masif. Namun, Aceh mungkin mengalami kurangnya investasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah, yang dapat menghambat kemajuan dalam pembangunan SDM.

Kondisi Kesehatan masyarakat yang buruk, termasuk tingginya angka kematian ibu dan anak, stunting, serta prevalensi penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis, dapat menghambat pembangunan SDM di Aceh. Kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat partisipasi dalam pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan, beberapa komunitas mungkin kurang menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi. Kesadaran akan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu ditingkatkan di Aceh. Untuk meningkatkan pembangunan SDM di Aceh, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat infrastruktur pendidikan, dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Penyebab masih tingginya disparitas adalah karena konflik dan juga bencana alam, akses layanan dasar yang belum merata, terkendalanya dengan infrastruktur dan akses tranportasi yang belum maksimal, Ketidakseimbangan dalam investasi pembangunan manusia antara wilayah-wilayah di Aceh, Faktor-faktor sosial dan budaya seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan tradisi yang membatasi akses perempuan dan kelompok minoritas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga dapat menyebabkan disparitas dalam IPM di Aceh.

2.3.1.6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah;

1) Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana **masih rendah, hal ini ditandai** dengan **masih tingginya indeks Risiko Bencana Aceh mencapai 144,30/tinggi (2024) bandingkan nasional adalah sebesar 128,5.**

2) **Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup.** hal ini ditandai dengan Indeks kualitas lingkungan hidup Aceh Tahun 2024, masih sebesar 79,66 walaupun sedikit lebih tinggi dari nasional (73,53), dengan rincian kualitas air 63,25 persen, tutupan lahan 76,66 persen, indeks kualitas udara 92,81 persen, indeks kualitas air laut sebesar 83,24 persen. disamping itu, selama periode Tahun 2003-2022 peningkatan suhu udara sebesar 0.4°C.

3) **Pembangunan kehutanan belum maksimal**, hal ini ditandai dengan masih tingginya deforestasi hutan di Aceh akibat permukiman liar, perladangan liar, kebakaran hutan, dan pembalakan liar selama Tahun 2019 - 2020 terdapat seluas ± 1.956,83 hektar tutupan hutan yang hilang atau

terdeforestasi, meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia sebanyak 275 kasus pada Tahun 2020-2022 terutama dengan Gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera, Luas lahan kritis di Aceh semakin meningkat dimana pada Tahun 2021 seluas 262.728 ha menjadi 264.922,53 pada Tahun 2022; dan Kurangnya penegakan hukum secara terbuka dan tuntas dalam penanganan kejahatan kehutanan.

4) **Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal**, hal ini ditandai dengan rasio elektrifikasi Aceh Tahun 2024 yang belum mencapai 100 persen (99,99 persen) dari yang diharapkan saat ini. Disamping itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana yang masih rendah di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di kalangan masyarakat dan pengambil keputusan dapat menjadi faktor utama yang menghambat upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan hutan liar, overfishing, atau penambangan yang tidak terkendali, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem. Praktik korupsi dan tata kelola yang buruk dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menghambat upaya untuk melaksanakan kebijakan dan program perlindungan lingkungan hidup serta mendorong praktek-praktek eksploitasi yang merugikan. Ketidakstabilan politik dan konflik di Aceh dapat mengganggu upaya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pengungsi, dan ketidakpastian keamanan, yang semuanya dapat memperburuk kondisi lingkungan hidup. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mitigasi bencana dapat menghambat kemampuan pemerintah dan lembaga terkait untuk bertindak secara efektif. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lainnya di Aceh. Kurangnya perencanaan adaptasi dan mitigasi yang memadai dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar akibat bencana-bencana tersebut.

Jika pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah di Aceh, beberapa akibat yang mungkin timbul antara lain: kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, kerusakan lahan, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ini akan berdampak buruk pada ekosistem dan spesies yang ada di Aceh. krisis kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Ini dapat menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan masalah kesehatan lainnya, yang pada gilirannya akan membebani sistem kesehatan dan menurunkan kualitas hidup

masyarakat.: Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Aceh. Misalnya, banjir, tanah longsor, atau gempa bumi dapat merusak infrastruktur, properti, dan tanaman, serta mengganggu kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketidakmampuan dalam mengelola risiko bencana dan mengadaptasi perubahan iklim dapat meningkatkan kerentanan Aceh terhadap bencana alam dan fenomena ekstrem lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian manusia, kerugian ekonomi, dan memerlukan upaya pemulihan yang mahal. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat mengganggu produksi pangan dan rantai pasokan makanan di Aceh. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian keamanan pangan, peningkatan harga pangan, dan meningkatnya risiko kelaparan dan malnutrisi di kalangan masyarakat. Kerusakan lingkungan dan bencana alam dapat menyebabkan gangguan sosial, termasuk konflik antar-masyarakat, pengungsi, dan migrasi paksa. Ini dapat menciptakan ketegangan sosial, memicu konflik, dan meningkatkan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik di daerah tujuan migrasi.

Oleh karena itu, penting bagi Aceh untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan bencana, dan mengadopsi strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, penegakan hukum lingkungan yang ketat, pendidikan lingkungan yang lebih luas, dan promosi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana di Aceh, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini meliputi peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan, penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan, investasi dalam infrastruktur pengelolaan bencana, dan promosi kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

2.3.2. Isu Strategis Pembangunan

2.3.2.1. Isu Strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan nasional

1. Rendahnya Produktivitas
2. RendahnyaKualitas Sumber Daya Manusia
3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif
5. Krisis Lingkungan
6. Geopolitik dan Geoekonomi
7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

2.3.2.2. Isu Strategis Aceh

1. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat Syariat Islam, dan budaya Aceh dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam dan budaya Aceh. Melakukan

program pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat. Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan dan mendorong promosi dan pelestarian cagar budaya dan objek kemujuan kebudayaan Aceh sebagai bagian dari identitas daerah. mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka. Disamping itu, pengelolaan harta agama terhadap wakaf perlu ditangani secara serius seperti menajemen kelembagaan dan status hukum aset wakaf (sertifikasi tanah wakaf).

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting yang meliputi:

1. Peningkatan Akses Makanan Bergizi dengan upaya meningkatkan akses masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak, ke makanan bergizi seimbang melalui promosi praktik pemberian makanan tambahan, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat termasuk daerah terpencil, terutama ibu hamil dan anak-anak, ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
3. Pendidikan Kesehatan dan Penyuluhan Gizi dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan keluarga dengan anak balita, tentang pentingnya pola makan sehat, praktik pemberian makan yang baik, dan pentingnya nutrisi selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak.
4. Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan dengan mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita yang mengalami stunting.
5. Akses Sanitasi dan Air Bersih dengan meningkatkan akses kepada masyarakat, terutama di pedesaan, ke sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi.
6. Kolaborasi dan Sinergi antara pemerintah daerah berbagai stakeholder termasuk lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya menurunkan stunting.

3. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Pemerintah Aceh dapat mengimplentasikan pemerataan Pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca Masyarakat dengan cara sebagai berikut:

1. Menurunkan Disparitas Indeks Pembanguan Manusia (IPM)

   Untuk menurunkan disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh, diperlukan upaya lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
   - Meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat
   - Mendorong pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
   - Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
   - Pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
   - Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil

2. Memperkuat Pendidikan Vokasi

   Untuk memperkuat pendidikan vokasi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
   - Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi
   - Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
   - Membangun kemitraan dengan industri dan perusahaan lokal
   - Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa
   - Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi

3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

   Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
   - Peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan
   - Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku
   - Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan
   - Pembangunan Keterampila
   - Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait
   - Pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi
   - Membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan

4. Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan peningkatan akses layanan dasar akses masyarakat terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak; pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan

modal usaha, atau pengembangan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya beriktunya dengan memberikan bantuan tunai, pangan, atau pendidikan kepada keluarga miskin; membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan. Disamping itu, perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

5. Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya mendukung peningkatan UMKM terhadap akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UMKM, dan pengembangan produk berseritifikasi halal. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Meningkatkan promosi investasi dan kemitraan dengan sektor swasta, serta menyediakan insentif dan kemudahan perizinan. Optimalisasi potensi pariwisata Aceh, termasuk wisata bahari, agrowisata, wisasta budaya dan sejarah, ekowisata, wisata spiritual, wisata edukasi, wisata minat khusus lainnya serta membangunan membangun infrastruktur wilayah yang mendukung. Disamping itu, pengembangan pariwisata di Aceh perlu dilakukan dalam kerangka dan branding pada wisata halal/*Muslim Friendly* . Mengembangkan sektor-sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

6. Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Digitalisasi

Riset dan Inovasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan sangat penting untuk kemajuan suatu daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk optimalisasi riset dan inovasi dengan cara pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik. membangun infrastruktur penelitian dan inovasi untuk mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintahan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta dengan dikoordinir oleh Bappeda Aceh. Selanjutnya membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yang didukung oleh kebijakan dan regulasi yang pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan melalui anggaran pemerintah dan kerjasama dengan lembaga penelitian.

7. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat.

Permasalahan lapangan kerja di Aceh saat ini masih menjadi permasalahan utama yang didukung oleh beberapa faktor, yaitu masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini tergambar dari rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja yang terbatas, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Aceh yang belum cukup kuat dan terbatasnya investasi juga menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja.

Berbagai upaya pembangunan yang dapat dilakukan dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat antara lain, yaitu: 1) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan penguatan mutu produk UMKM diarahkan pada sertifikasi produk terutama sertifikat halal; 2) memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan teknologi pertanian modern, pelatihan keterampilan, dan akses pasar; 3) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan; 4) menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas; 5) mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, dan industri manufaktur sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif; 6) mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi; 7) mengembangkan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik dan pariwisata berbasis masyarakat; dan 8) mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani.

8. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk memperkuat industri pengolahan dan eksport dengan cara mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan positioning pada Industri Halal sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang Islami. Untuk meningkatkan nilai tambah, Pemerintah Aceh berfokus pada agroindustry terintegrasi terhadap komoditi unggulan dan strategis, terutama: Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, dan Pala), Komoditi Pertanian (Padi dan Jagung), Komoditi Peternakan (Sapi/Kerbau, kambing/domba dan ungags), serta Komoditi Perikanan (Perikanan Tangkap dan Budidaya).

Untuk mendukung pengembangan industri terintegrasi, Pemerintah Aceh membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, jaringan transportasi darat dan laut secara mamadai, serta memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha, teknologi, dan juga standarisasi produk untuk memenuhi persyaratan pasar global, dan mendorong sertifikasi produk halal.

Pemerintrah Aceh membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional. Pemerintah Aceh mengusung paradigma baru yang bervisi global karena memiliki keunggulan geostrategis Aceh.

Posisi geostrategis didadap karena keberadaan Aceh diantara ekosistem ekonomi global, seperti: Indo-Pasifik, IORA *(Indian Ocean Rip Association),* IMT-GT, BRICS, kerjasama Indonesia-India, kerjasama Indonesia-Turkiye, Selat Malaka, posisi yang dekat pasar dan pintu gerbang pariwisata dunia ke Indonesia, Terusan Kra, serta akses langsung Aceh ke berbagai penjuru dunia melalui Selat malaka dan Samudera Hindia.

9. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Pemerintah Aceh dapat mengambil upaya strategis untuk pengembangan produksi dan produktivitas sector pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan melalui skema ekonomi hijau dan ekonomi biru. dengan upaya meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan dukungan kepada petani. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh sarana produksi yang ramah lingkungan dengan mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh.

10. Memperkuat Perkotaan dan Pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pembangunan saat ini juga diarahkan pada peningkatan perkotaan dan pedesaanb sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan, dalam hal ini, Pemerintah Aceh dapat melakukan dengan upaya mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah melalui pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan. Memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, dan promosi pasar. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.

11. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

Tata kelola pemerintahan merupakan cerminan kinerja pemerintahan dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dengan cara melakukan

pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika dan integritas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efektif. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas. Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.

12. Memperkuat Otonomi Khusus

Otonomi Khusus Aceh memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur daerahnya, terutama terkait penerapan hukum Syariah, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Otonomi khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan upaya untuk memperkuat otonomi khusus kedepan di arahkan pada memperkuat implementasi hukum dan peraturan terkait otonomi khusus Aceh. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan dalam mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Menyusuna perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat Aceh. Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional serta membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan dan kebudayaan.

13. Kemandirian dalam Ruang Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada pendanaan pemerintah pusat atau sumber luar lainnya. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam ruang fiskal dengan cara memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat. Menggalakkan promosi investasi dan kebijakan kemudahan berinvestasi seperti memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha serta pengembangan ekonomi lokal. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri. Membangun komitmen yang kuat bersama stakeholder untuk memperkuat kemandirian fiskal di Aceh.

14. Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk penangganan PPKS dan disablitas, memperkuat gender dan keluarga dengan cara mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas, mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh serta pelatihan keterampilan, akses modal usaha bagi PPKS, penyandang disabilitas, dan perempuan. Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dengan melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan kesetaraan gender. Selanjutnya memberikan dukungan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan parenting.

15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk melaksanakan Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan dengan cara: mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor dan mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan. Selanjutnya melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Menerapkan pendanaan insentif kinerja berbasis ekologi dengan skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi, deforestasi, alam dan alih fungsi lahan kawasan hutan lindung, mangrove dan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)/Kawasan Lindung Aceh. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan.

16. Pengurangan Risiko Bencana

Aceh merupakan daerah dengan Indek Risiko Bencana yang tinggi. Beberapa bencana yang sering terjadi di Aceh antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Aceh dalam upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan membuat dan melaksanakan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu. Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan tindakan darurat. Mengendalikan pemanfaatan lahan yang rawan bencana. Pengelolaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna), pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi ancaman perubahan iklim. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, dan shelter. Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.

17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan di Aceh mencakup pembangunan infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perumahan, dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi secara merata, menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dan antar sektor, potensi wilayah tertinggal juga menjadi perhatian dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah terpinggirkan. Pembangunan Aceh ke depan juga berfokus pada peningkatan infrastruktur layanan dasar masyarakat dan pembangunan jalan nasional dan provinsi menjadi prioritas utama dalam menjaga konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah Aceh juga mendorong pemanfaatan lahan transmigrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses layanan kesehatan dan mendorong pengembangan ekonomi lokal di wilayah pinggiran dan terpencil serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Memmperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya penting seperti: 1). mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang komprehensif dan terintegrasi serta alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas; 2). meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara; 3). mengembangkan infrastruktur energi yang handal dan berkelanjutan; 4). memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di seluruh wilayah Aceh; 5) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi; 6) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan 7) mengembangkan infrastruktur pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025-2030 merupakan turunan pelaksanaan Tahapan Pertama (2025-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2025-2045 terhadap sasaran pokok pembangunan dengan target capaian indikator pembangunan yang ditetapkan. Untuk menjaga keselarasan dan kosistensi pembangunan perlu dilakukan analisis dan telahaan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2025-2030 sebagai substansi penting pelaksanaan Tahapan pertama RPJPA tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

3.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Aceh Periode I (2025-2029)

Kebijakan pembangunan Aceh periode 2025-2029 yang tersebut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025-2045 dititik beratkan pada penguatan pondasi transformasi dengan kebijakan pembangunan yaitu penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset, inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penyediaan akses digital, penguatan koordinasi untuk implementasi pembangunan perkotaan dan pusat-pusat penumbuhan utamanya di Basajan, Barsela, Daratan Tinggi Gayo Alas (DTGA), Latimta. Upaya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), implementasi carbon credit. Kemudahan investasi untuk pembangunan industri pengolahan.

Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan penataan regulasi dan lembaga, peningkatan kualitas ASN berbasis merit sistem, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Selanjutnya stabilitas politik lokal dan nasional yang terjaga dan pembaharuan dan penguatan substansi, budaya, kelembagaan, kepastian, keseimbangan, keadilan dan kemanfaatan hukum. Menjaga perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan siber.

Memperkuat lembaga demokrasi, parlemen modern, parpol lokal dan nasional berbasis nilai dan akuntabel. Penguatan stabilitas ekonomi dan fiskal yang adaptif, penguatan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Peningkatan dan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik wilayah yang didukung dengan

peningkatan konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan yang didukung komitmen dan partisipasi para pihak dan Menjaga kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas, ketersediaan pembiayaan dan keterlibatan para pihak.

3.2. Arah Pembangunan Aceh Periode 2025-2030

Berdasarkan Kebijakan pembangunan jangka panjang periode 2025-2029 dapat dirumuskan arah pembangunan jangka menengah untuk tahun 2025-2030 dengan arah kebijakan yaitu: penguatan implementasi Syariat Islam difokuskan kepada penguatan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam. Arah kebijakan penguatan implementasi otonomi khusus difokuskan kepada : (1) Memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh; (2) Stabilitas politik lokal dan nasional yang terjaga; (3) Menjaga perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila;

Arah kebijakan Penguatan ekonomi daerah difokuskan kepada : (1) Hilirisasi sumber daya alam unggulan; (2) Peningkatan kapasitas riset, inovasi dan produktivitas tenaga kerja; (3) Penguatan koordinasi untuk implementasi pembangunan perkotaan dan pusat-pusat penumbuhan utamanya di Basajan, Barsela, Dataran Tinggi Gayo Alas, Latimta; (4) Penguatan stabilitas ekonomi dan fiskal yang adaptif; (5) Kemudahan investasi untuk pembangunan industri pengolahan; (6) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik wilayah yang didukung dengan peningkatan konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya.

Arah kebijakan pemenuhan pelayanan dasar difokuskan kepada : (1) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk manusia produktif; (2) Peningkatan dan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar).

Arah kebijakan penguatan tatakelola pemerintahan difokuskan kepada : (1) Penyediaan akses digital; (2) Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi; (3) Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara berbasis merit sistem; (4) Penyempurnaan penataan regulasi dan lembaga; (5) Kebijakan pembangunan berbasis bukti; (6) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan; (7) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil; (8)Pembaharuan dan penguatan substansi, budaya, kelembagaan, kepastian, keseimbangan, keadilan dan kemanfaatan hukum; (9) Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan siber; (10) Memperkuat lembaga demokrasi, parlemen modern, parpol lokal dan nasional berbasis nilai dan akuntabel;

Arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan energi secara berkelanjutan difokuskan kepada : (1) Upaya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan; (2) Implementasi carbon credit; (3) Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

3.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.3.1. Visi

"ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT, DAN BERKELANJUTAN"

Visi ini mengandung empat frasa kunci sebagai berikut:

1) Islami

Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh menjalankan aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Syariat Islam.

2) Maju

Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh telah mencapai tingkat peradaban dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi

3) Bermartabat

Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seluruh Masyarakat Aceh yang religius, memiliki harga diri, peradaban, pengetahuan, dan kepercayaan yang tinggi sebagai sebuah bangsa.

4) Berkelanjutan

Dimaknai sebagai suatu kondisi dimana proses pembangunan daerah dan aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung harmoni dengan kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari.

3.3.2. Misi

Visi di atas akan dicapai melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah
2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.
4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas.
6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.

3.3.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan, diperlukan tujuan dan sasaran yang jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah, sebagaimana diuraikan berikut.

Misi 1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah.

1.1. Meningkatkan Aqidah, Syariah, Akhlak dan Muamalah dengan sasaran sebagai berikut:
- 1.1.1. Meningkatnya pelaksanaan syariat Islam
- 1.1.2. Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah

1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1.2.1. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam serta kemakmuran mesjid

1.3. Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan
- 1.3.1. Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat
- 1.3.2. Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik.

Misi 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA.

2.1. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh dengan sasaran sebagai berikut:
- 2.1.1. Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- 2.1.2. Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe.
- 2.1.3. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
- 2.1.4. Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat.
- 2.1.5. Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan di bidang Pendidikan.
- 2.1.6. Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Misi 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.

3.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut:
- 3.1.1. Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama.
- 3.1.2. Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.
- 3.1.3. Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan.

3.2. Meningkatkan stabilitas ekonomi makro, dengan sasaran:
- 3.2.1. Meningkatnya penerimaan Aceh.
- 3.2.2. Terbukanya jaringan pasar domestik dan global.

3.2.3. Pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri.
3.2.4. Terwujudnya perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.
3.2.5. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan.

3.3. Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, dengan sasaran:
3.3.1. Pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU.
3.3.2 Terwujudnya lumbung pangan Aceh.
3.3.3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Investasi Daerah.
3.3.4. Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal.

Misi 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.

4.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar, dengan sasaran:
4.1.1. Meningkatnya Ketahanan Air Daerah
4.1.2. Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni.
4.1.3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan.
4.1.4. Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar.
4.1.5. Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang.

4.2. Meningkatkan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang, dengan sasaran:
4.2.1. Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.2.2. Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi.

Misi 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas.

5.1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya Manusia, dengan sasaran:
5.1.1. Meningkatnya akses pendidikan.
5.1.2. Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang merata.
5.1.3. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.
5.1.4. Meningkatnya Kualitas dan Derajat Kesehatan untuk Semua

5.2. Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, dengan sasaran:
5.2.1. Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Disabilitas.
5.2.2. Meningkatnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif

5.3. Peningkatan Prestasi Olah Raga serta Kepemudaan, dengan sasaran:
5.3.1. Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan

Misi 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum.

6.1. Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh, dengan sasaran:
6.1.1. Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*).
6.1.2. Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi.
6.1.3. Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani.
6.1.4. Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik.
6.1.5. Terwujudnya Optimalisasi Peran dan Fungsi APIP dalam Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan.
6.1.6. Terwujudnya Kepatuhan Hukum dalam melayani Publik

6.2. Meningkatkan stabilitas politik, dengan sasaran:
6.2.1. Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis.

Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.;

7.1. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Lestari, dengan sasaran:
7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
7.1.2. Meningkatnya Kelestarian Hutan dan keanekaragaman hayati.
7.1.4. Terwujudnya pengelolaaan sumber energi baru dan terbarukan.

7.2. Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana, dengan sasaran:
7.2.1. Meningkatnya Ketahanan Daerah.

3.4. Keterkaitan Visi dan Misi

Untuk menjelaskan hubungan masing-masing Misi terhadap pencapaian pokok-pokok Visi dapat dilihat uraian keterkaitan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Aceh Tahun 2025-2029

	Misi
Islami	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah
Maju	Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas
	Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan

	Misi
Bermartabat	Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum
	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA
Berkelanjutan	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya

3.5. Penyelarasan dengan Visi dan Misi Aceh dan Nasional

Perencanaan pembanguan perencanaan nasional akan terlaksana dengan baik, sinergi dan terarah apabila didukung oleh perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya adalah terjadinya keselarasan antara Visi dan Misi Daerah dengan Nasional. Wujud dari keselarasan Visi, Misi Aceh dan Nasional dapat dilihat pada penjelasan yang disajikan dalam **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2.
Penyelarasan Visi dan Misi Aceh dan Nasional Tahun 2025-2029

Visi RPJMA 2025-2029: Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan		Visi RPJMN 2025-2029: Bersama Indonsia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
Misi Aceh		**Misi (Asta Cita)**	
1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA		
3	Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		5	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
		3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Visi RPJMA 2025-2029: Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan		Visi RPJMN 2025-2029: Bersama Indonsia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
Misi Aceh		**Misi (Asta Cita)**	
4	Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
5	Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keterangan: Nomor sesuai dengan urutan Misi.

3.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh

Untuk mendukung pencapaian Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan indikator dari tujuan dan sasaran yang disertai dengan target dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Uraian indikator dan target dimaksud dapat dilihat sebagaimana yang disajikan pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh, 2025-2030 Berdasarkan Misi

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Misi - 1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah.								
1.1.	Meningkatkan Aqidah, Syariah, dan Akhlak	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	80,00 - 87,00	80,63 - 87,50	81,25 - 88,00	81,87 - 88,5	82,50 - 89,00	83,13 - 89-50
1.1.1.	Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam	Persentase dayah yang mandiri	%	44	47,19	50,38	53,56	56,75	59,94
1.1.2.	Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah	Indeks Zakat Nasional Aceh	Indeks	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
1.2.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah	Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)	%	27,27	27,72	28,23	29,21	30,13	31,05
1.2.1.	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam serta kemakmuran mesjid	Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam	%	83,5	84	85	86	87	88
1.3.	Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	73,7 - 73,81	74,08 - 74,26	74,46 - 74,71	74,84 - 75,15	75,22-75,60	75,60 - 76,05
1.3.1.	Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat	Persentase dimensi toleransi	%	65,07	65,09	66	66,05	66,09	67
1.3.2.	Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik	Persentase potensi konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Misi - 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA								
2.1.	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh	Persentase kajian Wali Nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA	%	90	90	90	90	90	90
2.1.1.	Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Indeks Reintegrasi Aceh	Indeks	0,08	0,14	0,2	0,26	0,33	0,39
2.1.2.	Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	%	90	90	90	90	90	90
2.1.3.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaraan ketentraman dan ketertiban	Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	52,5	53,75	55	56,25	57,5	58,75
		Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	%	95	95	95	95	95	95

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%	61,17	62,26	63,35	64,43	65,52	66,61
2.1.4.	Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	56,53-56,56	57,11 - 57,15	57,69 - 57,74	58,27 - 58,33	58,85-58,92	59,43 - 59,51
2.1.5.	Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan dibidang pendidikan	Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	%	17,39	34,78	52,17	69,67	78,26	86,96
2.1.6.	Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah	Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	%	20,81	24,34	27,32	29,86	32,07	33,99
	Misi - 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.								
3.1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0	5,4	5,9	6,3	6,6	6,7
3.1.1.	Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	Indeks	117,66	119,74	121,81	123,89	125,96	128,04
3.1.2.	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56	58,5	60	62	64	64

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	3,78	3,87	3,87	3,95	4,03	4,11
		Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat	13	12,6	12,2	11,8	11,4	11
		Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	%	0,5	0,56	0,63	0,69	0,75	0,81
3.1.3.	Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	Ribu Orang	12	13,1	13,3	13,6	14	14,1
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	0,4	0,41	0,42	0,425	0,44	0,45
		Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)	%	16,41	16,48	16,54	16,61	16,67	16,74
		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	4,81	4,93	5,05	5,17	5,3	5,42
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	1,84	1,9	1,97	2,03	2,09	2,16

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,78	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84
3.2.	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro	Inklusi Keuangan	%	94,91	95,24	95,56	95,89	96,21	96,54
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
		Rasio Gini	Indeks	0,290 - 0,293	0,287 - 0,291	0,284 - 0,289	0,281 - 0,287	0,278 - 0,285	0,275 - 0,283
		Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
		Tingkat Kemiskinan	%	12,00-13,00	10,60-12,00	9,00-10,60	7,39-9,00	6,39-7,39	5,39-6,39
3.2.1.	Meningkatnya penerimaan Aceh	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
3.2.2.	Terbukanya jaringan pasar domestik dan global	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	64,13-64,79	64,78-65,44	65,43-66.09	66,08-66,74	66,73-67,39	67,13-67,79
		Indeks Harga Konsumen	%	110	110	109	108	107	106
3.2.3.	Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri	Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri	%	14,28571	14,28	28,57	35,71	40	42,86
3.2.4.	Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase Desa Mandiri	%	0,54	0,95	1,36	1,77	2,18	2,59
3.2.5.	Pendalaman/intermediasi sektor keuangan	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,6
		Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa	Nilai	1443395	1996602,2	2549810	3103017	3656225	4209432,02

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Nilai Rata- rata Tahunan*							
		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	1,92	2,1	2,29	2,47	2,5	2,55
		Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	%	18,88	19,87	20,86	21,84	22,83	23,82
		Total Kredit/PDRB (%)	%	18,1	19,09	20,09	21,08	22,07	23,06
3.3.	Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp Juta	46,8	50,95	55,7	60,45	65,2	69,95
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,60-4,78	4,45-4,60	4,30-4,45	4,15-4,30	4,00-4,15	3,85-4,00
3.3.1.	Meningkatnya pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU	Persentase pemanfaatan lahan terlantar	%	14,53	15,64	17,32	18,99	20,11	26,82
3.3.2.	Terwujudnya lumbung pangan Aceh	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75,14	76,34	77,54	78,74	79,94	81,14
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)	%	8,48	7,99	7,49	7	6,5	6,01
3.3.3.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	% PDRB	32,44 - 32,77	32,77 - 33,10	33,10 - 33,43	33,43 - 33,76	33,76 - 34,09	34,09 - 34,42

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3.4.	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal	Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal	%	42 : 58	43,9 : 56,1	45,8 : 54,2	47,7 : 52,3	49,6 : 50,4	51,5 : 48,5
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	42	44,38	46,75	49,13	51,5	53,88
	Misi - 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.								
4.1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar	Indeks Williamson	Indeks	0,400	0,391	0,389	0,387	0,385	0,383
4.1.1.	Meningkatnya ketahanan air daerah	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	30,47	34,82	39,16	43,51	47,85	52,2
		Indeks Ketahanan Air Daerah	Indeks	3,58	3,61	3,65	3,69	3,72	3,76
4.1.2.	Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	68,5	70,47	72,44	74,41	76,38	78,35
4.1.3.	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	%	5,63	5,7	5,72	5,74	5,76	5,65

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.4.	Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	650,00	714,50	779,00	843,50	908,00	972,50
4.1.5.	Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang	Rasio Konektivitas	Rasio	0,7	0,7	0,71	0,72	0,73	0,76
4.2.	Meningkatkan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuain pembangunan dengan tata ruang	%	NA	72	74	76	78	80
4.2.1.	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tataruang	%	NA	72	74	76	78	80
4.2.2.	Tersedianya jaringan teknologi informatika yang terkoneksi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2
	Misi - 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas								
5.1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57	0,58	0,59	0,59	0,59	0,60
5.1.1.	Meningkatnya akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,66-14,68	14,77 - 14,78	14,88 - 14,89	14,98 - 14,98	15,06 - 15,09	15,16 - 15,19

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.2.	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Kualitas Pendidikan (SPM)	%	70,67	73,17	75,67	78,17	80,67	83,17
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	8,70 – 13,04	9,75 – 14.00	10,50 - 15,00	11,75 - 16,00	13,00 - 17,00	14,00 - 18,00
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	0,00 – 3,00	1,00 - 3,50	2,00 - 4,00	3,00 - 5,20	4,00 - 7,00	5,00 - 8,00
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	58,19	59,24	60,29	61,34	62,39	63,44
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	%	30,00 - 32,00	31,35- 33,50	33,00 - 35,00	34,00 - 36,50	35 - 38	36,00 - 39,00

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		nasional untuk Literasi Membaca							
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	27,00 - 29,00	28,00 - 29,8	28,50 - 30,50	29,25 - 32,00	30,00 - 33,00	31,00 - 34,00
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	13,58	13,66	13,74	13,81	13,89	13,97
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	10,20-10,21	10,37 - 10,39	10,55 - 10,57	10,72 - 10,74	10,89-10,92	11,07 - 11,10
5.1.3.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca	Indeks	73,28	72	73,2	74,5	75,5	77
5.1.4.	Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,7	70,84	71	71,2	71,38	71,42
5.2.	Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	66	66,35	66,7	67	67,35	67,75

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.1.	Meningkatnya keluarga berkualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan kesejahteraan disabilitas	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,44	0,438	0,43	0,425	0,389	0,38
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,85	93,05	93,5	93,7	93,7	93,75
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,7	67,6	68,6	69,5	70,3	71,1
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	68,34	70,34	72,34	74,34	76,34	78,34
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%	22	24,06	24,06	26,13	30,25	28,19
5.2.2.	Meningkatnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0,57	0,572	0,575	0,578	0,581	0,584
5.3.	Peningkatan prestasi olah raga serta kepemudaan	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,487	0,51	0,533	0,556	0,579	0,602
5.3.1.	Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	62	64	66	68	70	72

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Misi - 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik, dan supremasi hukum.								
6.1.	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81	82	83	84	85	86
6.1.1.	Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government)	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,47	4,5	4,53	4,55	4,57	4,6
		Nilai SAKIP	Nilai	67,5	68	68,5	70	70,5	71
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.1.2.	Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	93	94	95	96	97	98
6.1.3.	Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	(blank)	84,55	85	85.5	86	87
6.1.4.	Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik	Indeks Transformasi Digital	Indeks	50,1	50,73	51,36	51,99	52,62	53,25

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1.5.	Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	Indeks	70,2	71,1	72	72,89	73,79	74,69
		Maturitas SPIP terintegrasi	Level	3	3	3	3	3	3
6.1.6.	Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	68,5	71	73,5	76	78,6	81
6.2.	Meningkatkan stabilitas politik	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	77,60-77,65	77,65-77,70	77,70-77,75	77,75-77,80	77,80-77,85	77,85-78,00
6.2.1.	Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	75,9	76	76,1	76,2	76,3	76,4
	Misi - 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.								
7.1.	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	%	63,58	65,06	66,54	68,01	69,49	70,97
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	36,08	41,23	46,31	52,37	53,63	59,598
7.1.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,89	83,06	83,27	83,4	83,56	83,74
		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	%	15	18,75	22,5	26,25	30	33,75

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1.2.	Meningkatnya kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,592	0,596	0,599	0,603	0,606	0,61
7.1.3.	Terwujudnya pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	SBM/Rp milyar	107,25	106,62	106	105,39	104,78	104,17
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	%	9,41	12,07	12,79	12,79	14,9	18,51
7.2.	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	181,05	179,88	178,41	176,51	174,94	173,07
7.2.1.	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55

3.7. Pentahapan Pembangunan Aceh 2026-2030

Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pentahapan ini terdiri atas 5 tahapan pembangunan yang mempertimbangkan kebijakan dan strategi prioritas untuk masing-masing tahapan. Tahap pertama RPJMA dilaksanakan pada tahun 2026 yang difokuskan untuk menurunkan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan dan strategi untuk tahap selanjutnya pada dilihat secara rinci pada **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4.
Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2026 - 2030

Tahap	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
TAHAP I (2026)	Arah kebijakan pembangunan Aceh Tahap I difokuskan pada : 1. Penguatan implementasi Syariat Islam, kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh dengan strategi, yaitu : a. Penguatan perdamaian dan penjaminan stabilitas Aceh-Nasional; b. Pemerataan pembangunan antar kabupaten-kota dan wilayah pedesaan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja; c. Pengawalan keberlanjutan dana Otonomi Khusus sebagai sumber utama pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas dan peran Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal perdamaian Aceh. 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas. Arah kebijakan pembangunan untuk penguatan kekhususan dan keistimewaan, dan perdamaian Aceh dilakukan dengan strategi, yaitu : a. Membangun infrastruktur yang terintegrasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan b. Membangun infrastruktur pendukung investasi sesuai standar negara maju.
TAHAP II (2027)	Arah kebijakan pembangunan Aceh pada Tahap II, disamping melanjutkan pembangunan pada Tahap I difokuskan pada : 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sains dan teknologi dilakukan dengan strategi, yaitu : a. Beasiswa unggulan Aceh yang inklusif; b. Pembangunan sekolah-sekolah unggul; dan c. Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan guru 2. Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah dilakukan dengan strategi, yaitu : a. Penciptaan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, profesional, dan berintegritas; b. Peningkatan kapasitas badan pengelolaan keuangan Aceh; c. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung kemandirian fiskal; dan peningkatan profesionalisme ASN.

Tahap	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
TAHAP III (2028)	Arah kebijakan pembangunan Aceh pada Tahap III di samping melanjutkan pembangunan pada Tahap II, difokuskan pada: 1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritime, dilakukan dengan strategi, yaitu : a. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan hasil laut; b. Penyiapan tenaga kerja terampil yang sesuai dan dibutuhkan oleh usaha hilirisasi dan industrialisasi; c. Penyediaan infrastruktur pendukung hilirisasi dan industrilisasi; dan d. Penyusunan regulasi kemudahan berinvestasi. 2. Transformasi digital yang terintegrasi, dilakukan dengan strategi, yaitu : a. Pembangunan dan penguatan infrastruktur digital pemerintahan; dan b. Peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi informasi yang layak dan mantap
TAHAP IV (2029)	Arah kebijakan pembangunan Aceh pada Tahap IV di samping melanjutkan pembangunan pada Tahap III, difokuskan pada: 1. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat Aceh, dilakukan dengan strategi, yaitu : a. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial yang adaptif; b. Percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin; c. Menciptakan swasembada pangan dan energi; dan d. Mewujudkan ekonomi hijau dan ekonomi biru 2. Penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan, dilakukan dengan strategi, yaitu : a. Peningkatan akses kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan; dan b. Pemenuhan infrastruktur dasar pendukung perekonomian.
TAHAP V (2030)	Arah kebijakan pembangunan Aceh Tahap V yang merupakan tahun transisi, di samping melanjutkan pembangunan tahap sebelumnya, difokus pada : 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan dengan strategi, yaitu : a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dan biru; dan b. Pembentukan dana abadi lingkungan dan dana CSR yang bersumber dari hilirisasi sumber daya alam dan maritim secara berkelanjutan.

3.8. Rumusan Program Prioritas

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari Visi, misi, tujuan dan sasaran sampai dengan *outcome* yang dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas yang disusun diimplementasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. rumusan program prioritas RPJMA Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5.
Rumusan Program Prioritas RPJMA Tahun 2026-2030

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
	Misi - 1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah.			
1.1	Meningkatkan Aqidah, Syariah, dan Akhlak	Meningkatnya Kualitas dan Pemahaman Syariat Islam Masyarakat yang tergambar dari Kuatnya Aqidah, Syariat dan Akhlak		Indeks Pembangunan Syariat
1.1.1	Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam	Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan Dayah dalam Penguatan pelaksanaan Syariat Islam		Persentase dayah yang mandiri
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dayah, kompetensi kurikulum dan tenaga pengajar serta kuantitas sarana belajar mengajar	Program Pendidikan Dayah	Indeks kompetensi kurikulum dayah
			Program Pendidikan Dayah	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)
			Program Pendidikan Dayah	Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar
			Program Pendidikan Dayah	Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah
1.1.2	Meningkatnya penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah	Meningkatnya indeks zakat Aceh		Indeks Zakat Nasional Aceh

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya Pengelolaan Ziswaf untuk penguatan ekonomi ummat	Program Baitul Mal Aceh	Indeks Wakaf Nasional Aceh
			Program Baitul Mal Aceh	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya
1.2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah	Meningkatnya Rasio Aset Perbankan Syariah dan sertifikasi produk halal		Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)
1.2.1	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam serta kemakmuran mesjid	Meningkatnya aktifitas pengajian (beuet) Alquran dan kemakmuran		Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam
		Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Masyarakat melalui pengelolaan mesjid berbasis aktifitas (magrib sampai isya mengaji) dan meningkatnya pemahaman serta ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam.	Program Syariat Islam Aceh	Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya
1.3	Meningkatkan pengawasan kehidupan keagamaan	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat serta kerukunan umat beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
1.3.1	Meningkatnya pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat	Meningkatnya toleransi antar umat beragama		Persentase dimensi toleransi
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka Pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya
1.3.2	Meningkatnya upaya pencegahan potensi konflik	Meningkatnya upaya pencegahan penyebaran aliran sesat dan radikalisme		Persentase potensi konflik yang tertangani
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial
	Misi - 2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA			
2.1	Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh	Meningkatnya tindak lanjut peraturan, keputusan, pertimbangan dan rekomendasi Wali Nanggroe		Persentase kajian Wali Nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA
2.1.1	Terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki	Terlaksananya pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi, jaminan sosial		Indeks Reintegrasi Aceh

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
	dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	dan pendidikan bagi mantan kombatan, tapol/napol Aceh dan masyarakat korban konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat		
		Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Korban Konflik dan Mantan Kombatan	Program Reintegrasi Aceh	Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial
			Program Reintegrasi Aceh	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi
		Terdatanya korban pelanggaran HAM yang mendapatkan rekomendasi KKR Aceh	Program Reintegrasi Aceh	Persentase korban pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh
2.1.2	Menguatnya pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Terpenuhinya kelengkapan perangkat kerja lembaga Wali Nanggroe		Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe
		Meningkatnya Peran Lembaga Wali Nanggroe Dalam Pembangunan	Program Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe
2.1.3	Meningkatnya penyelesaian pelanggaraan	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakatn		Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
	ketentraman dan ketertiban			
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum		Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat		Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan dan penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan peraturan daerah
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban
2.1.4	Terwujudnya pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Aceh		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		Meningkatnya Peran Lembaga Adat Aceh	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Indeks Adat Istiadat Aceh
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan
2.1.5	Terwujudnya pelaksanaan keistimewaan dibidang pendidikan	Meningkatnya pemahaman generasi Aceh terhadap identitas dan keislaman		Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota
		Meningkatnya Peran Majelis Pendidikan Aceh	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Jumlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan.
2.1.6	Terwujudnya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah	Meningkatnya penerapan fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan		Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan
		Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan
	Misi - 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas.			
3.1	Mewujudkan kemandirian ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi
3.1.1	Terwujudnya peningkatan produksi hilirisasi pangan utama	Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan Menigkatnya Nilai Tukar Petani		Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
3.1.2	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif		Indeks Inovasi Daerah
				Peringkat Inovasi Daerah
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah serta fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
3.1.3	Terwujudnya industrialisasi sektor unggulan	Meningkatnya jumlah industri pengolahan secara fokus dan terintegrasi berbasis digital		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri dan sertifikasi produk halal	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah produk tersertifikasi halal
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri
		Meningkatnya kualitas penzinan berusaha sektor perindustrian	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah izin yang dikeluarkan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Proporsi penggunaan produk lokal dalam promosi yang difasilitasi (%)
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Indek Terima Peternak (ITPt)
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Kepariwisataan Terhadap PDRB		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual
		Meningkatnya Populasi UMKM Pada Level Provinsi		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Kewirausahaan
		Meningkatnya daya saing UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil
		Meningkatnya Usaha Berbasis Koperasi Aktif		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kapasitas SDM
		Meningkatnya layanan izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi Berizin

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya
3.2	Meningkatkan stabilitas ekonomi makro	Meningkatnya kontribusi PDRB Provinsi terhadap PDB		Kontribusi PDRB Provinsi (%)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan produk dan layanan keuangan yang mudah diakses		Inklusi Keuangan
		Menurunnya angka kemiskinan Aceh		Tingkat Kemiskinan
		Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat		Rasio Gini
		Terkendalinya tingkat Inflasi Aceh		Tingkat Inflasi
3.2.1	Meningkatnya penerimaan Aceh	Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA)		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kemandirian fiskal Aceh
3.2.2	Terbukanya jaringan pasar domestik dan global	Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan ekspor
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor bersih Aceh

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Terkendalinya harga ditingkat konsumen		Indeks Harga Konsumen
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan	Menjamin ketersediaan stok bapokting dan keterjangkauan harga
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen
3.2.3	Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang berstatus mandiri		Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan
3.2.4	Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya persentase desa mandiri		Persentase Desa Mandiri

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya efektivitas kerja sama gampong	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase pembinaan kerjasama gampong berbasis kawasan perdesaan
		Meningkatnya kapasitas Lembaga bisnis di gampong	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan BUMG Maju
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif
3.3	Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat		PDRB per kapita (Rp Juta)
		Menurunnya angka pengangguran Aceh		Tingkat Pengangguran Terbuka
3.3.1	Meningkatnya pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU	Termanfaatnya lahan dan HGU		Persentase pemanfaatan lahan terlantar
		Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan
		Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah
		Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan	Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh
		Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan
3.3.2	Terwujudnya lumbung pangan Aceh	Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan Menigkatnya Nilai Tukar Petani		Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Keberhasilan Panen
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang sehat		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
3.3.3	Meningkatnya pembangunan infrastruktur investasi daerah	Meningkatnya nilai investasi Aceh		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat di akses
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM
3.3.4	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Sektor Formal dan Informal	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Formal		Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Terlindunginya hak-hak pekerja	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang bekerja
	Misi - 4. Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan.			
4.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar	Meningkatnya pemerataan pembangunan		Indeks Williamson
4.1.1	Meningkatnya ketahanan air daerah	Meningkatnya Ketersediaan Kualitas dan Akses terhadap air		Indeks Ketahanan Air Daerah
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi serta lancarnya distribusi air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kapasitas Air Baku

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi modern
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik
		Terpenuhinya penyelenggaraan drainase perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pemenuhan penyelenggaraan drainase perkotaan
		Meningkatnya rumah tangga yang berakses air minum		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota
4.1.2	Meningkatnya penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni	Meningkatnya akses hunian layak dan terjangkau kepada masyarakat miskin		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)
		Terpenuhinya data identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi dan di lokasi rawan bencana	Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang teridentifikasi di lokasi berpotensi relokasi dan di lokasi rawan bencana
		Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak	Program Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan
		Meningkatnya pelayanan persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Regional
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU
4.1.3	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Konservasi (Ha)
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
		Meningkatnya nilai hasil perikanan yang diterima oleh nelayan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
4.1.4	Tersedianya jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan		Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Terpenuhinya konsumsi listrik masyarakat	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi
4.1.5	Meningkatnya koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		Rasio Konektivitas
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan
4.2	Meningkatkan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang	Meningkatnya keselarasan pembangunan dengan rencana tata ruang		Persentase kesesuain pembangunan dengan tata ruang
4.2.1	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap tataruang		Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tataruang

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA
	Misi - 5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas			
5.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat		Indeks Modal Manusia
5.1.1	Meningkatnya akses pendidikan	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah		Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Akreditasi Sekolah SLB
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Akreditasi Sekolah SMA
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Akreditasi Sekolah SMK
5.1.2	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Ditingkat Menengah dan Luar Biasa		Kualitas Pendidikan (SPM)
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitias, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter.

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SDLB
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMA
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMALB
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMK
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMPLB
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi PTK bersertifikat SDLB
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi PTK bersertifikat SMA
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi PTK bersertifikat SMALB
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi PTK bersertifikat SMK
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi PTK bersertifikat SMPLB
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Iklim Inklusivitas SMK
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Kebhinekaan SMA
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Kebhinekaan SMK
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Inklusivitas SDLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Inklusivitas SMA
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Inklusivitas SMALB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Inklusivitas SMPLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Literasi SDLB

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Literasi SMA
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Literasi SMALB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Literasi SMK
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Literasi SMPLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Numerasi SDLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Numerasi SMA
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Numerasi SMALB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Numerasi SMK
			Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Numerasi SMPLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK
			Program Pengelolaan Pendidikan	Kualitas Pembelajaran SDLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Kualitas Pembelajaran SMA
			Program Pengelolaan Pendidikan	Kualitas Pembelajaran SMALB

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
			Program Pengelolaan Pendidikan	Kualitas Pembelajaran SMK
			Program Pengelolaan Pendidikan	Kualitas Pembelajaran SMPLB
			Program Pengelolaan Pendidikan	Penyerapan Lulusan SMK
5.1.3	Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat		Tingkat Kegemaran Membaca
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
5.1.4	Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan untuk semua	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Balita (AKBa)
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase hipertensi dalam pengendalian
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS Regional yang Fungsional
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup
5.2	Menguatkan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Meningkatnya ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
5.2.1	Meningkatnya keluarga berkualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan kesejahteraan disabilitas	Meningkatnya kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
		Meningkatnya kualitas penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)
		Meningkatnya kualitas perempuan		Indeks Pembangunan Gender

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Perlindungan Anak (IPA)
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA)
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat pemahaman data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif
5.2.2	Meningkatnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
			Program Penanganan Bencana	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya
5.3	Peningkatan prestasi olah raga serta kepemudaan	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga		Indeks Pembangunan Olahraga
5.3.1	Meningkatnya kualitas olahraga dan kepemudaan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Olah Raga dan Kepemudaan		Indeks Pembangunan Pemuda
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase pembinaan olahraga
	Misi - 6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik, dan supremasi hukum.			
6.1	Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi
6.1.1	Terwujudnya tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government)	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks kualitas pelayanan keuangan
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan
		Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah Aceh		Indeks Pelayanan Publik
				Nilai SAKIP
		Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan pembangunan
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai LPPD
			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase kerjasama daerah
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase perumusan bahan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
			Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
		Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan serta penganggaran dan Pengawasan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA
		Meningkatnya pelayanan kepada KDH/WKDH dan masyarakat	Program Pelayanan Penghubung	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
		Meningkatnya segmen daerah yang selesai dievaluasi	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase segmen batas daerah yang dievaluasi
		Meningkatnya tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja	Program Penataan Organisasi	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
6.1.2	Tersedianya database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMA, RKPA) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMA, RKPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perkenomian dan SDA	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMA, RKPA) bidang Perekonomian dan SDA
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Kelitbangan
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
6.1.3	Terwujudnya kompetensi sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani	Meningkatnya profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian; 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN; 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN; 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
6.1.4	Terwujudnya sistem digitalisasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintah Daerah		Indeks Transformasi Digital
		Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
		Meningkatnya Indeks Pemerintahan Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pemerintahan Digital
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip
6.1.5	Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	Meninngkatnya kualitas hasil pengawasan terhadap kinerja pemerintahan		Indeks Integritas Nasional
				Maturitas SPIP terintegrasi
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Aparatur yang memenuhi kompetensi
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
6.1.6	Terwujudnya kepatuhan hukum dalam melayani publik	Meningkatnya indeks reformasi hukum		Indeks Reformasi Hukum
		Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks penyelesaian fasilitas perundang-undangan
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian bantuan hukum
6.2	Meningkatkan stabilitas politik	Meningkatnya nilai demokrasi		Indeks Demokrasi Indonesia
6.2.1	Terwujudnya partisipasi politik secara demokratis	Meningkatnya partisipasi partai politik dalam Pemilu secara demokrasi		Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pendidikan politik
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
	Misi - 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya			
7.1	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Berkurangnya intensitas emisi GRK		Penurunan Intensitas Emisi GRK

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
	dan kehutanan yang lestari			
		Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon		Indeks Ekonomi Hijau Daerah
7.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)
			Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
			Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensi
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Jumlah Limbah B3 yang dikelola
		Meningkatnya pengelolaan sampah secara optimal		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
		Meninngkatnya proporsi rumah tangga yang terlayani penuh pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
7.1.2	Meningkatnya kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati	Meningkatnya keanekaragaman hayati		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rehalibitasi lahan di sempadan sungai
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
		Meningkatnya produktivitas hasil hutan dan kualitas tutupan lahan	Program Pengelolaan Hutan	Indek Tutupan Lahan (IKL)
			Program Pengelolaan Hutan	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan
			Program Pengelolaan Hutan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
		Meningkatnya ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7.1.3	Terwujudnya pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan	Meningkatnya pengelolaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*
				Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
		Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik

No.	Misi/Tujuan/Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Indikator
		Meningkatnya tata kelola kegeologian	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota
		Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
7.2	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana	Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)
7.2.1	Meningkatnya ketahanan daerah	Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana		Indeks Ketahanan Daerah
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana

3.9. Rumusan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMA 2025-2029. Arah kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan 7 misi pembangunan yang secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6.
Rumusan Arah Kebijakan RPJMA Tahun 2025-2029

No.	Misi	Arah Kebijakan
1	Misi 1 - Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	Arah Kebijakan Misi 1 dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah diarahkan pada 1. Peningkatan Aqidah, Syariah, Akhlak, dan Muamalah melalui peningkatan pelaksanaan syariat Islam; peningkatan penyaluran terhadap pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah 2. peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan muamalah melalui peningkatan manajemen mesjid untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam; 3. Peningkatan pengawasan kehidupan keagamaan melalui peningkatan pembinaan akhlak dan kerukunan antar dan sesama ummat; dan peningkatan upaya pencegahan potensi konflik.
2	Misi 2 - Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	Arah Kebijakan Misi 2 dalam mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA diarahkan pada 1. Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh melalui terakomodirnya butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; penguatan pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe; peningkatan penyelesaian pelanggaraan ketentraman dan ketertiban; penguatan pelaksanaan kebudayaan dan adat istiadat; pelaksanaan pendataan, pelestarian dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, penguatan pelaksanaan keistimewaan di bidang pendidikan; dan penguatan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

No.	Misi	Arah Kebijakan
3	Misi 3 - Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	Arah Kebijakan Misi 3 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas diarahkan pada: 1. Kemandirian ekonomi melalui hilirisasi produksi pangan utama, minyak dan gas, peningkatan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, dan industrialisasi sektor unggulan, serta sektor berbasis agro lainnya. 2. Peningkatan stabilitas ekonomi makro melalui peningkatan penerimaan Aceh, pembukaan jaringan pasar domestik dan global; pengembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri; pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal melalui pemanfaatan lahan-lahan terlantar dan HGU; mewujudkan lumbung pangan Aceh, peningkatan pembangunan infrastruktur investasi daerah; dan peningkatan ketersediaan lapangan kerja sektor Formal dan Informal.
4	Misi 4 - Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	Arah Kebijakan Misi 4 dalam mewujudkan mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan diarahkan pada: 1. Peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar melalui peningkatan ketahanan air daerah; peningkatan volume air baku; ketersediaan jaringan air bersih; peningkatan penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman yang layak huni; ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; ketersediaan jaringan listrik yang terkoneksi dan mandiri sampai ke pulau terluar; peningkatan koneksitas wilayah dan pulau terluar untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang. 2. Peningkatan kesesuian pembangunan dengan rencana tata ruang melalui peningkatan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan ketersedian jaringan teknologi informatika yang terkoneksi.
5	Misi 5 - Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	Arah Kebijakan Misi 5 dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas diarahkan pada: 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan; peningkatan pendidikan berkualitas yang merata; peningkatan minat baca masyarakat. 2. Peningkatan derajat kesehatan untuk semua melalui peningkatan kualitas kesehatan. 3. Penguatan kesetaraan gender, hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui, peningkatan partisipasi dan kesetaraan gender dalam pembangunan; peningkatan pelindungan dan keselamatan perempuan dari kekerasan; peningkatan pelindungan dan keselamatan anak; peningkatan pelindungan dan keselamatan anak; peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan disabilitas dalam pembangunan. 4. Peningkatan prestasi olah raga serta kepemudaan melaui peningkatan kualitas olahraga dan kepemudaan.
6	Misi 6 - Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	Arah Kebijakan Misi 6 dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, membina stabilitas politik, dan supremasi hukum diarahkan pada: 1. Penguatan transformasi tata kelola Pemerintah Aceh melalui penguatan tata kelola Pemerintah Aceh yang baik dan bersih (*Good Governance dan Clean Government*); ketersediaan database perencanaan dan penganggaran serta pengawasan yang valid, akurat, dan terintegrasi; penguatan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah Aceh yang berintegritas dan melayani; penguatan sistem digitalisasi dalam pelayanan

No.	Misi	Arah Kebijakan
		publik. 2. Peningkatan stabilitas politik melalui peningkatan partisipasi politik secara demokratis. 3. Penegakkan Implementasi hukum melalui, penguatan kepatuhan hukum dalam melayani publik melalui optimalisasi peran dan fungsi APIP dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.
7	Misi 7 - Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	Arah Kebijakan Misi 7 dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya diarahkan pada: 1. Peningkatan pengelolaan konservasi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati melalui peningkatan kualitas air, peningkatan keanekaragaman hayati; peningkatan kinerja pengelolaan persampahan; peningkatan pengelolaaan sumber energi baru dan terbarukan. 2. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim melalui peningkatan ketahanan daerah; penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

3.10. Prioritas Aceh

Prioritas Aceh di susun untuk pencapaian Visi dan Misi Guberunur dan Wakil Gubernur terpilih. Program prioritas Aceh diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun program dan kegiatan strategis dalam pencepaian Visi dan Misi pembangunan Aceh. Prioritas Aceh secara rinci diuraikan berikut ini:

3.10.1. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (Aqidah, Syariat, Akhlak dan Muamalah).

Pembangunan Aceh dikhususkan pada peningkatan pengamalan nilai aqidah, syariah, akhlak dan muamalah. Prioritas aqidah merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan aqidah Islam dengan benar dan mendalam. Syariah adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan akhlak adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan akhlak yang baik dan mulia dalam berbagai aspek kehidupan. Prioritas muamalah adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip muamalah yang baik dan benar dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Penguatan pelaksanaan syariat islam dilakukan dengan melaksanakan beberapa kebijakan antara lain :

a. Pengelolaan Harta Agama (zakat, infaq, sadaqah dan waqaf). Pendapatan zakat dan infak dan sadaqah selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan nilai yang semakin meningkat seiring dengan perbaikan perekonmian, oleh karena itu pendapatan yang bersumber dari harta agama ini dapat dijadikan andalan untuk membantu ekonomi ummat sesuai dengan golongan yang berhak menerima (senif). Adapun wakaf juga merupakan instrument ekonomi yang sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat Aceh, untuk mendukung sector Pendidikan, social dan keagamaan, terutama dalam penyediaan fasilitas umum seperti sekolah serta masjid, sekolah, serta pusat kesehatan. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Penguatan masjid sebagai rumah Ibadah yang juga memiliki fungsi iradah, imarah dan riayah. Disamping itu penggunaan masjid akan difokuskan pada kegiatan pengajian ba'da magrib (semeubet) bagi generasi muda dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam membaca Al Qur'an (Melek Al Qu'an).

c. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dayah dalam masyarakat merupakan sebuah cita-cita, karena dayah berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan dayah di Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan agama islam.

Pemerintah Aceh juga berkomitmen dalam penguatan Kelembagaan pendidikan dayah yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola dayah yang profesional dan akuntabel, Revitalisasi fungsi dayah sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Peningkatan Kualitas SDM Dayah dengan melakukan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar (teungku/ustadz) dan santri. Disamping itu, mewujudkan digitalisasi dan modernisasi dayah dengan implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan dan proses belajar mengajar dan penyediaan akses internet dan perangkat pembelajaran digital untuk dayah. Selanjutnya perluasan akses dan pemerataan layanan Pendidikan dayah dengan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dayah di daerah terpencil dan menyediakan bantuan beasiswa dan insentif bagi santri kurang mampu.

Lembaga pendidikan dayah akan dilakukan penguatan peran dayah dalam deradikalisasi dan moderasi beragama dengan menerapakan pendidikan karakter dan moderasi beragama dalam kurikulum dayah dan kerja sama dengan lembaga internasional dan nasional untuk pengembangan nilai-nilai Islam serta pengembangan kurikulum terpadu antara ilmu keislaman dan pengetahuan umum.

d. Penguatan peran Ulama. Peran dan fungsi ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) diharapkan akan lebih berpengaruh melalui fatwa dan taushiyah yang ditetapkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan dan masyarakat Aceh. Sertifikat kehalalan produk baik berupa pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dikeluarkan berdasarkan hasil fatwa dari MPU. Kebijakan Pemerintah Aceh selama lima tahun kedepan adalah berupaya untuk memperhatikan dan mempertimbangkan fatwa dan tausyiah ulama untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah maupun sosial budaya. Disamping itu, akan dilakukan juga pelatihan dan pendidikan bagi Kader Ulama (PKU) untuk melahirkan ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Aceh. Memitigasi potensi konflik antar agama terutama di perbatasan dan pertentangan aliran dalam agama Islam.

3.10.2. Penguatan implementasi kekhususan dan keistiwewaan Aceh

Upaya memperkuat perdamaian, kekhususan dan keistimewaan pasca MoU Helsinki bagi Aceh masih terus dilaksanakan. Hal ini merupakan kewajiban dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan serta inklusivitas Masyarakat. Penguatan lembaga kekhususan Aceh sepertia Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga pengawal keberlanjutan perdamaian Aceh, menjamin stabilitas Aceh-nasional melalui komitmen yang telah ditandatangani sehingga mendorong gaya hidup aktif rakyat Aceh dalam memupuk persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan bagi para kombatan GAM, korban konflik, dan perbedaan antar kelompok masyarakat menjadi prioritas pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah

kabupaten/kota dan wilayah pedesaan akan dijembatani dengan penekanan khusus pada pembangunan sosio-ekonomi di Kawasan-kawasan tertentu. Hal ini akan menciptakan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Aceh pada nantinya. Disamping itu, penguatan perdamaian akan digunakan untuk membangun masyarakat yang aktif, sedangkan persatuan dalam keberagaman akan diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dengan menghargai dan mengakui perbedaan. Implementasi inisiatif ini akan berkontribusi pada tujuan membangun Aceh yang inklusif, bersatu dan sejahtera.

Kawasan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan Reintegrasi Aceh yaitu kawasan Reintegrasi Aceh, yang letaknya tersebar di seluruh Aceh kecuali Banda Aceh. Arahan pengembangan Kawasan Reintegrasi Aceh meliputi kegiatan pertanian dan kegiatan penunjang reintegrasi. Koordinasi pengelolaan kawasan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan Reintegrasi Aceh dilakukan oleh Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan perekonomian serta Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Melakukan pendataan, pelestarian dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan seperti Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, dan Cagar Budaya.

3.10.3. Penurunan Angka Kemiskinan

Pemerintah Aceh berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Strategi ini diselenggarakan melalui :

a. Pengunaan data kemiskinan yang akurat dan terpadu untuk merencanakan melaksakan dan evaluasi program program pengantasan kemiskinan;
b. pemberian dukungan modal menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor padat karya;
c. Memberikan dukungan modal pelatihan dan akses pasar bagi UMKM sehingga dapat membantu mereka untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan;
d. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar;
e. Layanan Kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui program jaminan Kesehatan Aceh;
f. Memberikan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pendampingan dibidang kewirausahaan dan manajemen keuangan;
g. Memberikan akses Pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan vokasi untuk dapat meningkatkan peluang ekonomi di masa depan.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Strategi ini dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui program-program pelatihan kerja, pemberdayaan usaha mikro, bantuan sarana produksi, dan pengembangan ekonomi lokal. Strategi ini penting untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan dan memutus rantai kemiskinan.

3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, melalui pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas antar wilayah

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dituangkan dalam Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang sudah ditandai di Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 400.4.2/9839/Bangda, tanggal 12 September 2023. Penandaan tersebut mencakup pemilahan program/kegiatan/sub kegiatan untuk ketiga strategi diatas dan berdasarkan kelompok (langsung, tidak langsung dan penunjang). Agar pelaksanaan program tepat sasaran maka sasaran penerima manfaat harus mengacu data pensasaran yang valid termasuk nantinya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang saat ini masih dalam proses pengajuan hak akses.

Mekanisme penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). RPKD merupakan dokumen 5 tahunan yang digunakan secara bersama-sama oleh perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang di dalamnya memuat mengenai strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. RPKD merupakan dokumen pengejawantahan dari RPJMA dalam penanganan kemiskinan, sehingga target-target, strategi dan arah kebijakan, serta program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPKD merujuk pada RPJMA. Penyusunan RPKD Aceh dan juga sebagian besar daerah di Indonesia untuk saat ini berada pada draft rancangan awal sembari menunggu petunjuk teknis sebagai penanda awal penyusunan yang ditargetkan selesai pada 2026. Selain dokumen RPKD, maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah juga diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Tentu RAT dan LP2KD merupakan jabaran dan evaluasi terhadap RPKD yang akan disusun nantinya. TKPK Aceh juga melibatkan lintas pemerintah daerah, dalam hal ini (terutama) Pemerintah Kabupaten Kota dan juga Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga terkait). Selain itu kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan akademisi juga dijalankan untuk agar pengambilan keputusan intervensi kemiskinan dapat berjalan dengan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, adanya program "Sekolah Rakyat" juga menambah "energi" intervensi langsung terutama di wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Saat ini Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat yang "*ready*" tahap I Adalah di Sentra Darussa'adah (Aceh Besar). Untuk Pembangunan tahap II berlokasi di Aceh besar, Aceh Timur, dan Singkil. Intervensi terkait kemiskinan pada sekolah rakyat ini termasuk intervensi langsung dengan kriteria desil 1 dan desil 2 dari data pensasaran yang valid baik pada jenjang dasar maupun menengah

3.10.4. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumberdaya alam dan maritim

Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan maritim di implementasikan dengan mengembangkan potensi sumberdaya alam dan maritim yang tersedia disertai dengan upaya maksimal untuk meningkatkan nilai tambah. Disamping meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan industrialisasi tersebut juga dimaksudkan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi antara lain:

a. Mengupayakan peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian dan kelautan Aceh menjadi produk turunan sebagai komoditas ekspor. Beberapa produk yang diupayakan untuk peningkatan nilai tambah antara lain: komoditi pertanian dan perkebunan seperti *Crude Palm Oil* (CPO), Kopi, Nilam, Karet dan hasil laut.
b. Hilirisasi produk CPO dan Migas akan dilakukan dan akan ditambah dengan hilirisasi sumber daya alam lainnya, seperti mineral lainnya, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi hijau/biru
c. Pelatihan dan Pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
d. Memberikan kemudahan bagi investor serta melakukan perlindungan bagi industri lokal.
e. Mempermudah perizinan, permodalan, dan mengupayakan akses pasar.
f. Mengembangkan inovasi dan penerapan teknologi dan penerapan hilirisasi.

Pengembangan Hilirisasi Industri Agro Aceh untuk pembangunan kedepan dititikberatkan pada:

(1) Pengembangan Kawasan Agroindustri Kelapa Sawit Wilayah Timur (yang meliputi: Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang), serta Wilayah Barat (yang meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Subulussalam dan Aceh Singkil). Agroindustri Kelapa Sawit dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan rantai pasok yang berkelanjutan dan dapat diterima pasar global, dimulai dengan legalitas lahan, budidaya dengan pola *Good Agriculture Practice (GAP)*, dan pengolahan untuk menghasilkan CPO dan PKO, serta turunannya. Target ini sesuai Pergub Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peta jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023-2045 dan Pergub Nomor 17 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh.

(2) Pengembangan Kawasan Agroindustri Pangan dan hortikultura di wilayah pesisir Utara-Timur dan Barat-Selatan. Lumbung Pangan pesisir Utara-Timur meliputi: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Sementara Kawasan Lumbung Pangan pesisir Barat-Selatan meliputi: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya.

(3) Pengembangan Kawasan Agroindustri Peternakan Terintegrasi di Aceh Besar, Bener Meriah, Aceh Jaya, Simeulue dan Aceh Timur. Semua daerah ini difokuskan pada pengembangan ternak besar dan ternak kecil serta unggas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan hewani, dan juga mewujudkan swasembada daging dan telur di Aceh. Selain untuk kebutuhan dalam daerah, hasil dari Kawasan ini juga digunakan untuk ekspor dalam rangka memperkuat perekonomian Aceh. Pengembangan ternak juga dapat dilakukan di kabupaten lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya pengembangan Agroindustri Kopi antara lain di kabupaten, yaitu: Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Pidie, Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya.

(4) Pengembangan Agroindustri Kakao di 10 (sepuluh) kabupaten/kota penghasil (Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara).

(5) Pengembangan Agroindustri Atsiri dan rempah (Nilam dan atsiri lainnya) di Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues). Agroindustri Nilam dan atsiri Aceh diperkuat dengan dukungan pembangunan Factory Sharing dan perbaikan tata niaga oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Kementerian PPN/Bappenas.

(6) Pengembangan Agroindustri Rempah (Pala, Lada, Cengkeh, dll) di Aceh Besar, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan). Untuk memperkuat agroindustry rempat, akan dibangun Kebun Raya Rempah berbasis perhutanan sosial. Kebun raya rempah dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan Aceh sebagai penghasil rempah dunia. Aceh masuk dalam daftar 20 titik rekonstruksi jalur rempah nusantara (kemendikbud), dan masuk dalam daftar 8 prioritas utama pengembangan wisata tematik rempah (kemenpar).

(7) Pengembangan Kawasan Unggulan Garam Rakyat, meliputi 11 kabupaten, yaitu; Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh selatan, Aceh Singkil dan Simeulue.

3.10.5. Penciptaan lapangan kerja

Upaya penciptaan lapangan kerja dalam rangka perluasan lapangan berusaha akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Mewujudkan Penguatan UMKM Rakyat Aceh.

Penguatan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan merupakan langkah penting ditujukan untuk menumbuhkan wirausahawan baru terutama dikalangan penduduk usia muda. Penguatan program

Kredit Usaha Tani Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat, Nelayan, Pesisir, Industri Hilir UKM, pembiayaan perlu dilakukan untuk mendukung hal tersebut dengan melibatkan peran serta perbankan daerah dan nasional. Disamping itu perlu dilakukan inovasi dan adopsi teknologi guna meningkatkan tingkat kompetensi UMKM sehingga dapat bersaing secara lebih kompetitif dengan dukungan penjaminan dan pembiayaan usaha secara syariah melalui Badan Usaha Milik Aceh.

b. Mewujudkan Industri Pariwisata dan Industri Halal.

Industri pariwisata mencatat pertumbuhan positif, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kelas menengah berpenghasilan tinggi dan menengah di luar Aceh dan manca negara yang berkunjung ke Aceh, lebih banyak konektivitas daerah wisata dan pilihan perjalanan yang terjangkau, serta kondisi perekonomian yang lebih baik. Mengkampanyekan promosi dan acara wisata secara profesional terkait Visit Aceh yang harus semakin banyak dilakukan baik di luar Aceh dan di Luar negeri sesuai standar promosi international. Industri Halal, berbagai inisiatif harus dilaksanakan untuk memastikan pengembangan industri halal lokal secara terintegrasi dan komprehensif. Upaya-upaya yang dilakukan kedepan harus difokuskan pada pengembangan standar dan sertifikasi halal, branding dan promosi serta komersialisasi produk dan layanan halal yang mengikuti standar international. Alam Aceh yang eksotik dan natural akan meningkatkan minat para investor luar dan dalam untuk menginvestasikan dana mereka di Aceh, lapangan kerja baru akan terbuka secara signifikan dengan upah yang layak.

c. **Mewujudkan industri kreatif**

Industri kreatif yang mencakup multimedia serta budaya, seni dan wakaf/warisan menjadi semakin penting di tingkat global. Program Aceh Digital Content akan membantu perusahaan animasi lokal memasarkan produk kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (IP) seperti cerita-cerita rakyat Aceh yang dapat di filmkan yang nantinya akan dapat menembus pasar lokal, nasional dan global. Upaya menggenjot segmen budaya, seni, dan warisan harus mulai dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pemuda/i Aceh dalam mengembangkan bakat dan minat dalam membentuk generasi Aceh unggul.

3.10.6. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas

Pemantapan infrastruktur dasar adalah untuk membangun dan memantapkan infrastruktur dasar yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Prioritas keseimbangan dan inklusi regional Aceh dan koneksitas adalah menekankan pentingnya membangun dan memantapkan keseimbangan dan inklusi regional di Aceh melalui pengembangan infrastruktur dan koneksitas yang memadai.

Langkah yang dilakukan dalam peningkatan infrastruktur yang berkualitas dalam jangka menengah adalah dengan menjamin infrastruktur yang berkualitas. Untuk meningkatkan daya saing Aceh sebagai daerah tujuan Investasi di Indonesia dan global serta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan

kualitas infrastruktur menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Aceh dan pemerintah RI melalui Pembangunan dengan dana APBN.

Berdasarkan data dari *World Economic Forum* (2023), kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan berada pada peringkat ke-51 dari 144 negara yang di survei. Bandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang menduduki peringkat ke-5, Malaysia diperingkat ke-17. Dalam 5 tahun ke depan, kualitas infrastruktur Aceh harus dibenahi dan diperbaiki mengikuti standar negara maju, baik di sistem perencanaan, penganggaran maupun sistem tender terbuka, hal ini akan menjamin Aceh menjamin menjadi daerah yang memiliki infrastruktur yang handal.

Pemerintah Aceh, memfokuskan sejumlah program prioritas yang ditujukan untuk peningkatan konektivitas, integrasi antar wilayah, serta pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Langkah ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dari pinggiran dan penguatan integrasi wilayah nasional. Peningkatan infrastruktur dimaksud antara lain:

1. **Penyeberangan Jalur Laut Lhokseumawe – Penang**

   Program ini dirancang untuk membuka jalur penyeberangan laut internasional yang menghubungkan Lhokseumawe (Aceh) dengan Penang (Malaysia). Selain memperkuat hubungan dagang dan mobilitas masyarakat antarnegara, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk baru investasi, pariwisata, dan perdagangan bagi wilayah utara Aceh.

2. **Pembangunan Terowongan Geureute**

   Terowongan Geureute merupakan solusi jangka panjang atas permasalahan konektivitas lintas barat Aceh yang selama ini rawan longsor dan sulit dilalui saat cuaca ekstrem. Pembangunan terowongan ini akan meningkatkan keamanan, efisiensi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan barat Aceh dan sekitarnya.

3. **Jalan Tol Langsa – Binjai**

   Pembangunan ruas tol Langsa – Binjai merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera yang bertujuan mempercepat arus barang dan orang dari wilayah timur Aceh menuju Sumatera Utara. Tol ini akan membuka akses ekonomi baru, mengurangi biaya logistik, serta mendukung integrasi ekonomi regional di pantai timur Sumatera.

4. **Pembangunan 4 Pulau Terluar Aceh**

   Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan bagian dari wilayah strategis NKRI yang berbatasan langsung dengan perairan internasional. Pembangunan di keempat pulau terluar ini mencakup infrastruktur dasar seperti dermaga, listrik, air bersih, dan fasilitas pertahanan, serta pembangunan mercusuar guna memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah perbatasan.

Selanjutnya dalam upaya menjaga efektifitas penggunaan dana akuntabilitas pemerintah serta pemenuhan hak masyarakat atas manfaat pembangunan baik dari sisi kegiatan strategis dan tata kelola pemerintahan, maka Pemerintah Aceh berkewajiban memprioritaskan penyelesaian kegiatan yang belum selesai (terbengkalai).

Saat ini Pemerintah Aceh memiliki sejumlah kegiatan yang belum tuntas terlaksana baik berupa fasilitas umum maupun sarana dan prasarana pemerintahan yang tersebar di Kabupaten/Kota. Untuk itu, akan dipriortaskan penuntasan kegiatan dimaksud antara lain: fasilitas kesehatan (rumah sakit regional), sarana-prasarana olah raga, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana pendukung transportasi serta pendukung ekonomi, jaringan irigasi, sarana-prasarana pendukung pertanian, perikana dan peternakan, situs sejarah, sarana dan prasarana ibadah, dan ruas jalan provinsi. Penuntasan kegiatan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempetimbangkan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah.

3.10.7. Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi

Penguatan kualitas dan daya saing umber Daya Manusia untuk menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan. Penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak untuk menekankan pentingnya mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam rangka menjawab tantangan Aceh secara global yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Dunia terus berubah sehingga menciptakan generasi masa depan bangsa yang memiliki pengetahuan global dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, Program Beasiswa Unggulan Aceh di bawah BPSDM Aceh sebagai salah satu organisasi sektor publik yang berupaya melaksanakan tujuan tersebut dengan terus memberikan dukungan untuk pengembangan sumber daya manusia Aceh yang unggul, termasuk mengakomodir anak korban konflik. Pemerintah Aceh akan melaksanakan visi misi Bersama Indonesia maju secara maksimal dengan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Untuk itu, kedepan kita akan bekerja dengan penuh kesungguhan serta dedikasi yang tinggi dalam upaya mewujudkan SDM Aceh Unggul Bersama Indonesia Maju.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sains dan teknologi di Bidanbg Pendidikan dilakukan dengan pendekatan pembangunan:

a. Beasiswa unggulan Aceh yang inklusif, fokus ada dua instrumen yaitu:

c1. Bantuan Biaya Pendidikan kepada Anak yatim dan/atau piatu. Eksekusi kegiatan ini sudah berlangsung lama dan Kembali dipertajam melalui Peraturan Gubernur Aceh nomor 11 tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan pendidikan anak yatim dan/atau piatu. Penajaman eksekusi dilaksanakan dengan bantuan bersifat progresif sesuai jenjang Pendidikan siswa. Selain itu terdapat prioritas bagi anak yatim berprestasi.

c2. Skema beasiswa selanjutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan Aceh. Skema ini merupakan dukungan pemerintah aceh dalam sektor Pendidikan khususnya pemberian beasiswa bagi putra-putri aceh di berbagai jenjang terutama pada dalam hal melanjutkan ke Pendidikan tinggi. Saat ini dana abadi Pendidikan sudah merampungkan peraturan daerah dalam Qanun nomor 6 tahun 2025 yang selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan kelembagaan yang akan mengelola dana abadi Pendidikan Aceh ini. Diproyeksikan tahun 2026 pengelolaan dana abadi Pendidikan ini dapat direalisasikan.

b. Pembangunan sekolah-sekolah unggul; dan

Pengembangan Sekolah Unggul Berasrama, Pemerintah Aceh memulai langkah dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor mengenai penetapan 26 sekolah unggul/berasrama jenjang SMA dan SMK berjumlah 26 sekolah unggul yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan kabupaten terbanyak adalah Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 3 Sekolah (SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy, SMA Negeri Modal Bangsa, SMK Negeri Penerbangan Aceh) dan Kota Banda Aceh sebanyak 2 Sekolah (SMA Negeri Modal Bangsa dan SMK Negeri Penerbangan Aceh).

c. Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan guru

Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan dilakukan dengan strategi:

c1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Ditujukan agar terjaminnya hak peserta didik menerima pelayanan pendidikan dari pemerintahan daerah dengan mutu yang optimal, termasuk sarana dan prasarana, kualitas guru dan tenaga kependidikan, dan pembelajaran.

c2. Asessmen Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, Siswa dan Pejabat Dinas Pendidikan

Ditujukan untuk mengukur dan memetakan kompetensi SDM Pendidikan dan kepemimpinan pembelajaran di Sekolah. Asesmen Guru diitujukan untuk memetakan dan mengukur kompetensi pedagogik, profesionalisme, sosial dan kepribadian. Sedangkan Asesmen siswa ditujukan untuk memetakan dan mengukur kompetensi literasi, numerasi, karakter dan keterampilan siswa siswi khusunya pada jenjang Pendidikan menengah dan luar biasa.

c3. **Revitalisasi Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan, dan Komunitas Belajar, serta Teaching Factory** melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Komunitas Belajar. Kerjasama dengan dunia usaha, industri, dan dunia kerja serta dukungan pada Sertifikasi Guru Produktif.

c4. Pembentukan Karakter Islami

Membentuk Satgas Pembentukan Karakter Islami, Implementasi dan Perbaikan Karakter Siswa, merumuskan dan melaksanakan program pembentukan karakter di Satuan Pendidikan disertai dengan monitoring dan evaluasi

c5. Digitalisasi Pendidikan Aceh

Penggunaan Teknologi Pendidikan untuk Kebijakan Pendidikan lebih berbasis bukti dan layanan pendidikan menjadi lebih mudah, seperti pengembangan *Super apps* Pendidikan berbasis *Big Data Analytics*. Membangun bank soal yang berbasis yang berorientasi pada *Higher Order Thinking Skills.*

Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi perlu diupayakan dalam jangka menengah karena kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari APBA dalam 5 tahun. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa. Badan riset dan pengembangan Aceh yang profesional dan mandiri menjadi motor penggerak kemajuan kedepan. Dana abadi Pendidikan perlu terus dimaksimalkan untuk menjamin Pendidikan generasi Aceh unggul.

Renovasi dan Pembangunan Sekolah diupayakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, serta membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang. Hal tersebut diwujudkan melalui komitmen terhadap pendidikan yang bermutu, inovasi dalam sains dan teknologi, serta peningkatan kesehatan publik. Beberapa langkah harus dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian tersebut melalui renovasi dan Pembangunan sekolah-sekolah unggul sampai ke pelosok. Pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan yang merata diperlukan untuk mempersiapkan kualitas SDM menuju bonus demografi dan Indonesia emas.

Akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dapat dicapai melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat termasuk perubahan perilaku. Hal ini dicapai melalui penguatan kebijakan, komitmen kolaborasi pembiayaan dan sumber daya kesehatan, peningkatan kualitas layanan, penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Peningkatan kualitas layanan diwujudkan melalui peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang modern, terstandar, dan ramah pasien, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan profesional, termasuk memperkuat peran Rumah Sakit Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Regional. Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKA) Unggul diwujudkan melalui peningkatan layanan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan diantaranya melakukan layanan kesehatan bergerak.

3.10.8. Transformasi digital yang terintegrasi

Peningkatan digitalisasi dan teknologi maju (*advance technology*) akan diprioritaskan melalui upaya antara lain dengan mengintensifkan ekonomi digital, mengarusutamakan digitalisasi untuk mencapai pembangunan inklusif, mempercepat R&D&C&I serta memanfaatkan potensi teknologi maju. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan negara terutama Aceh, sehingga menjadikan Aceh lebih siap sebagai daerah dengan perekonomian berteknologi tinggi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi dalam penguasaan digitalisasi. Tantangan-tantangan tersebut antara lain kurangnya infrastruktur digital, tata kelola yang tidak terintegrasi, kurangnya kapasitas dan kapabilitas, serta tidak terjangkaunya akses terhadap layanan digital. Tantangan-tantangan ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi digital serta semakin melebarnya kesenjangan digital. Selain itu, rendahnya adopsi teknologi, kurangnya investasi dalam penelitian, pengembangan, komersialisasi dan inovasi dan kurangnya talenta terampil telah menghambat upaya modernisasi perekonomian.

3.10.9. Tata Kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah

Penguatan tata kelola pemerintahan Aceh menekankan pada pentingnya peningkatan kualitas dan efektivitas pemerintahan Aceh melalui reformasi dan inovasi, diantaranya: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Aceh melalui pengembangan sistem informasi dan pengawasan yang efektif; 2. Pengembangan pemerintahan yang berbasis pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui pengembangan mekanisme partisipasi yang efektif; 4. Penguatan kelembagaan pemerintahan Aceh dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan.

Berbagai permasalahan harus terus dilakukan untuk mentransformasi sektor publik agar lebih berpusat pada masyarakat, efisien dan produktif dengan penekanan pada integritas dan transparansi. Pendekatan pemerintah secara keseluruhan harus diadopsi dan beberapa perbaikan perlu dilaksanakan. Perbaikan tersebut mencakup rasionalisasi sektor publik, digitalisasi pemberian layanan publik, penguatan kapasitas dan kapabilitas, peningkatan tata kelola dalam manajemen proyek, dan peningkatan keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Pemerintah Aceh 5 tahun mendatang, akan lebih banyak berfokus pada pengembangan sektor publik yang efektif dan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat yang semakin meningkat akibat kemajuan teknologi serta peningkatan kelompok berpenghasilan menengah dan perubahan demografi di masyarakat. Sektor publik perlu menjadi lebih efisien dengan mempercepat digitalisasi dan mendorong inovasi. Dalam kaitan ini, upaya penguatan penyediaan layanan sektor publik akan fokus pada pengembangan layanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pendekatan pemerintah secara keseluruhan, serta peningkatan anggaran dan manajemen proyek.

Pemerintah Aceh akan memaksimalkan sumber penerimaan Aceh sesuai amanah UUPA pasal 179 secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Diharapkan Badan ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pendapatan/pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Tata Kelola birokrasi pemerintah Aceh harus efektif, efesian, transparan, professional dan berintegritas merupakan unsur penting dalam menggerakkan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat

dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dan terlayani dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem birokrasi yang selama ini dilakukan. Birokrasi yang efektif, efisien, transparan, profesional, dan berintegritas harus menjadi bagian penting bagi setiap ASN dalam melayani rakyat. Korupsi yang massif sekarang ini telah menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan di Aceh dan mengakibatkan rusaknya perekonomian serta sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diperoleh manfaat sosial ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan Aceh Bersama Indonesia. Digitalisasi dengan satu data terintegrasi Aceh Nasional dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta tentunya bagi pembinaan karir bagi ASN. *Reward* dan *punishment* menjadi bagian dari profesionalisme pengelolaan birokrasi Aceh kedepannya.

Menjamin Terwujudnya Pemberantasan Narkoba. Peredaran dan penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup Masyarakat serta generasi Aceh masa depan. Untuk itu, langkah-langkah konkrit untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba yang harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga dan pemerintah beserta aparat penegakan hukum. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, memberantas segera mungkin oknum-oknum dan mafia-mafia yang menjadi sindikat terorganisir yang telah terbentuk kuat di Aceh, menutup dan mengawasi seluruh pintu-pintu masuk narkoba mancanegara ke Aceh dengan melibatkan peran aktif pemerintah Aceh dengan instansi vertikal negara lainnya.

Kemajuan teknologi dan perekonomian global yang terus berubah mengharuskan negara-negara untuk segera mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan proaktif. Hal ini penting untuk menjadikan perekonomian yang berbasis teknologi tinggi. Revolusi Industri Keempat (RI4.0) yang berbasis pada digitalisasi dan teknologi baru mempengaruhi kehidupan manusia dalam situasi yang belum pernah dialami sebelumnya.

Kemandirian fiskal perlu diwujudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan Aceh untuk membiayai kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh akan melakukan beberapa upaya, yaitu: 1. Intensifikasi untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang disertai dengan reformasi kebijakan yang disertai dengan upaya penegakan hukum; 2. Memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dalam mendukung pembanguna Aceh; 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan; 4. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat seperti

dana *Corporate Social Responsibility* (CSR); 5. Meningkatkan upaya pengumpulan dana yang bersumber dari Zakat Infaq dan Sadaqah (ZISWAF) serta Waqaf yang bersifat produktif; 6. Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal; dan 7. Pembentukan lembaga keuangan syariah milik Aceh yang menjamin pembiayaan dan/atau pinjaman melalui program kemitraan.

3.10.10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Penguatan manajemen kelestarian lingkungan dan ekosistemnya adalah untuk menekankan pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan dan ekosistem untuk keberlanjutan hidup manusia dan makhluk lainnya, diantaranya 1. Pengembangan program lingkungan, 2. Pengadaan teknologi lingkungan dan 3. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi hijau dan biru di aceh, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dan biru, pendekatan holistik negara dan Aceh akan diadopsi. Ini adalah pendekatan inklusif agar seluruh pemangku kepentingan berbagi tanggung jawab dan akuntabilitas dalam melaksanakan agenda bersih dan hijau/biru yang tangguh. Pendekatan ini akan mendorong kontribusi Aceh rendah karbon, melindungi kekayaan alam dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Penerapan siklus ekonomi ini mewakili perubahan sistemik akan dipercepat untuk menciptakan bisnis dan investasi yang lebih bertanggung jawab serta memperluas pasar hijau/biru dan menghasilkan peluang perekonomian baru. Apalagi aset alam kita akan terus berlanjut dikelola secara efisien melalui konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, sambil memastikan pembagian manfaat secara adil. Pertumbuhan ekonomi hijau/biru akan diperkuat dengan lingkungan yang mendukung dan mendorong perubahan pikiran dan perilaku masyarakatnya. **Pembentukan Dana Abadi Lingkungan dan Dana CSR** yang bersumber dari setiap hilirisasi sumber daya alam dan maritim perlu segera terwujud untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi Aceh masa depan. Selanjutnya Pemerintah Aceh juga mendukung inisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mewujudkan Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam mengurangi emisi karbon melalui Proyek *Pionir Carbon Capture Storage* (CCS) Arun.

3.11. Pembangunan Kewilayahan Aceh

Pembangunan kewilayahan dirumuskan berdasarkan pengembangan kewilayahan yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2025-2029 yang difokuskan kepada: 1. Kawasan pertumbuhan; 2. Kawasan komoditas unggulan; 3. Kawasan swasembada pengan, air dan energi; 4. Kawasan afirmasi; dan 5. Kawasan konservasi/rawan bencana, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

3.11.1. Kawasan Pertumbuhan

1. Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho

Pengembangan kawasan perkotaan Banda Aceh-Sabang dan Jantho (Basajan) dengan upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak yang dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru dan bersanitasi baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan milenial (dilengkapi dengan fasilitas MCK dan septik tank) untuk mendukung Kawasan perkotaan di Banda Aceh dan Sabang. Pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan.

Pembangunan SPAM Regional Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar (terutama daerah yang mengalami kekeringan berulang, karena daerah tersebut merupakan jalur lintasan layanan SPAM Regional yang akan dibangun). Dengan adanya ketersediaan suplai air bersih dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Di samping itu, juga perlu dilakukan peningkatan ketahanan banjir Kota Banda Aceh untuk menanggulangi banjir genangan pada saat musim hujan.

Peningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan melalui pembangunan jalan *missing link* Jantho–Keumala yang menghubungkan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie dengan penetapan area kerja, pemasangan tata batas dan penetapan lokasi pembebasan lahan.

2. Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe.

Pembangunan SPAM Regional Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Dengan adanya ketersediaan suplai air bersih dapat memberikan dampak signifikan dalam mendukung kawasan industri dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

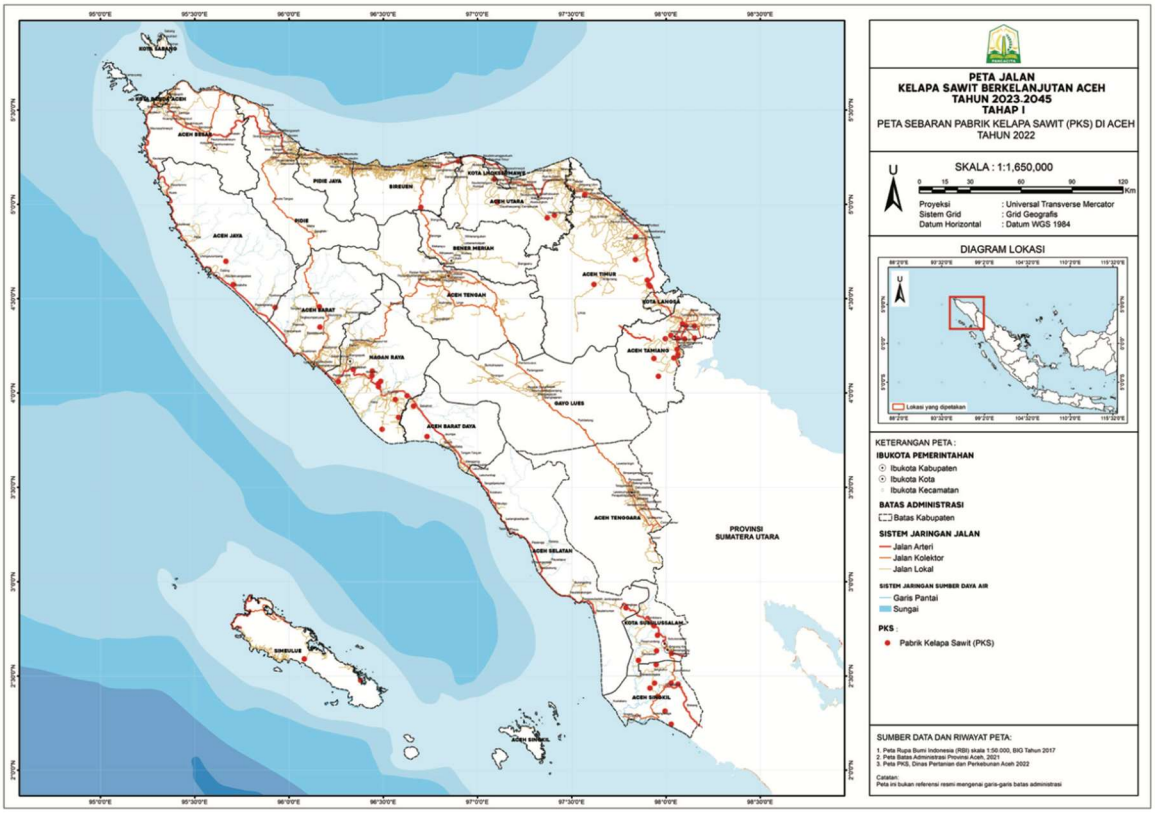
Upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru yang bersanitasi baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan milenial (pembangunan rumah dilengkapi dengan fasilitas MCK dan septik tank) untuk mendukung Kawasan perkotaan di Lhokseumawe. Pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan.

Pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya KEK Arun secara berkelanjutan sebagai dukungan terhadap Rencana PSN untuk mengurangi emisi karbon melalui Proyek Pionir *Carbon Capture Storage* (CCS) Arun. Dalam upaya pengembangan kawasan KEK Arun Lhokseumawe, Pemerintah Aceh dapat memperkuat pengembangan SDM agar kawasan ekonomi tersebut dapat

menyerap tenaga kerja yang berimplikasi terhadap penurunan angka pengangguran di Kawasan Lhokseumawe. Salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor investasi di kawasan KEK Arun melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu fatty acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan. Selanjutnya hilirisasi lanjutan gas bumi, terutama untuk produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti olefin, aromatik, Dimethyl Ether. Sebagai informasi bahwa Aceh memiliki luas lahan Kelapa Sawit yang mencapai 500 ribu hektar, yang terdiri dari Perkebunan Sawit Rakyat (268.311 ha, data tahun 2022) dan Perkebunan Besar (223.188 ha, data Statistik Perkebunan tahun 2024). Secara rata-rata, Aceh menghasilkan rata-rtata 2,5 juta ton TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit per tahun.

Saat ini, pengolahan komoditi Kelapa Sawit di Aceh baru sampai pada tahapan menghasilkan Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*/CPO) yang berkisar pada angka satu juta ton per tahun. Pengolahan TBS menjadi CPO dilakukan oleh 60 (enam puluh) unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota di Aceh. Jumlah Kapasitas Terpasang pada 60 PKS tersebut mencapai 12 (dua belas) juta ton per tahun, namun yang berhasil diolah hanya 2,5 juta ton per tahun.



Secara total kapasitas olah dari 60 PKS yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh masih dapat mengolah tambahan sekitar 9,3 juta ton TBS/tahun, jika semuanya diasumsikan dapat rata-rata beroperasi selama 300 hari per tahun dan 20 jam per hari. Kondisi underutilised tersebut dapat menyebabkan tingginya biaya rata-rata dan rendahnya harga beli rata-rata dari PKS ke produsen TBS.

Pengembangan Kawasan Agroindustri Kelapa Sawit Wilayah Timur (yang meliputi: Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang) direncanakan di kota Lhokseumawe, serta Wilayah Barat (yang meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Subulussalam dan Aceh Singkil). Agroindustri Kelapa Sawit dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan rantai pasok yang berkelanjutan dan dapat diterima pasar global, dimulai dengan legalitas lahan, budidaya dengan pola Good Agriculture Practice (GAP), dan pengolahan untuk menghasilkan CPO dan PKO, serta turunannya. Target ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peta jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023-2045 dan Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh.

Kota Lhokseumawe dalam beberapa dekade yang lalu dikenal sebagai kota industri ekstraktif, terutama minyak dan gas bumi yang dikelola oleh PT Arun LNG. Namun demikian, saat ini cadangan minyak dan gas bumi di kota Lhokseumawe dan sekitarnya telah sangat menipis sehingga perusahaan harus menghentikan operasionalnya. ketergantungan terhadap sektor industri ekstraktif telah menimbulkan ketimpangan antar sektor, seperti sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang seharusnya memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mempertimbangkan potensi wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya (seperti; Bireuen dan Aceh Utara) dalam bidang pertanian, hortikultura, serta kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, konsep agropolitan dipilih sebagai strategi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

Kota Lhokseumawe didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sistem agribisnis dan menjadi hub bagi kabupaten di sekitarnya yang menjadi menyumbang komodti-komoditi unggulannya. Kota agropolitan Lhokseumawe mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan dengan industri pengolahan, perdagangan dan fasilitas perkotaan untuk mendorong pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Pengembangan Lhokseumawe sebagai kota agropolitan dinilai strategis mengingat Lhokseumawe memiliki akses ke jalur laut dan darat yang dikelalo secara terpadu.

Kota Lhokseumawe memiliki posisi sentral sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan jasa di wilayah pesisir timur Aceh. Dengan potensi tersebut, Pemerintah Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh

2025–2029 menetapkan pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah dengan mempersiapkan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.

Pengembangan pelabuhan Krueng Geukueh sebagai salah satu pelabuhan strategis di Provinsi Aceh, pelabuhan ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi pelabuhan ekspor dan impor di lintas Selat Malaka, sebagai salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Pemeritah Aceh telah menunjukkan dukungan penuh untuk pengembangan Pelabuhan Krueng Geukueh, dengan membuka rute pelayaran Krueng Geukueh - Penang, termasuk rencana pembelian kapal Fery Ro-Ro untuk meningkatkan ekspor hasil bumi Aceh.

Pemerintah Aceh mendorong Bandar Udara Malikussaleh menjadi dry port dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan Lhokseumawe. Dibutuhkan pengembangan Bandar Udara Malikussaleh meliputi perpanjangan landasan pacu (*runway*), renovasi terminal, dan perluasan tempat parkir pesawat (apron) agar pesawat berbadan lebar dapat mendarat di bandara ini.

Untuk meningkatkan mobilisasi barang, orang dan jasa Pemerintah Aceh melakukan preservasi, penanganan longsor dan pelaksanaan pemenuhan jalan menuju standar untuk ruas jalan Krueng Geukueh-Batas Bener Meriah, ruas jalan Krueng Mane - Sawang, dan ruas jalan Matangglumpang Dua-Krueng Simpo.

Pengembangan pelabuhan perikanan pangkalan pendaratan ikan pusong lhokseumawe dan mendukung pengembangan Kota Lhokseumawe sebagai Kota Agropolitan.

3. Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan DT Gayo-Danau Laut Tawar

Pengembangan daerah pariwisata DTGA melalui upaya peningkatan penyediaan akses layanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan layak huni) serta sarana pendukung lainnya yang inklusif untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Untuk meningkatkan mobilisasi barang, orang dan jasa Pemerintah Aceh melakukan preservasi, penanganan longsor dan pelaksanaan pemenuhan jalan menuju standar untuk ruas jalan Simpang Krueng Geukueh-Bener Meriah-Sp. Kebayakan. Selanjutnya untuk mendukung penuntasan dan konektivitas jalan Geumpang-Meulaboh serta dilakukan preservasi, penuntasan dan penanganan longsor untuk ruas jalan Jantho Lamno dan Gempang-Pameu. Disisi lain, perlu diprioritaskan pembangunan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan keselamatan jalan, memperlancar transportasi menuju kawasan Dataran Tinggi Gayo melalui koordinasi dalam penentuan lokasi, desain dan pembebasan lahan

Danau Laut Tawar di Takengon, Aceh Tengah, adalah permata alami yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan budaya yang tak ternilai. Untuk mengoptimalkan

potensi tersebut sekaligus menjaga kelestarian lingkungannya, penataan kawasan waterfront Danau Laut Tawar merupakan salah satu program prioritas. Visi utamanya adalah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan, berbasis ekoturisme dan budaya, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan memperkuat identitas Gayo.

Danau Laut Tawar bukan hanya ikon geografis Aceh, tetapi juga pusat dari peradaban Gayo dan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, laju pembangunan yang tidak terencana dan aktivitas yang tidak terkendali telah menimbulkan tekanan signifikan pada ekosistem danau. Pemerintah Aceh menempatkan revitalisasi Danau Laut Tawar sebagai agenda prioritas utama. Program ini dirancang untuk mengembalikan fungsi ekologis danau, mengelola potensi ekonomi secara berkelanjutan, dan menjaga warisan budaya yang melekat padanya.

Takengon merupakan ibukota Kabupaten Aceh Tengah, yang memiliki keunggulan karena keberadaannya di dataran tinggi, tanah subur, serta iklim yang mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan kabupaten Aceh Tengah, terdiri dari: komoditi perkebunan (Kopi Gayo) dan hortikultura (cabe, bawang, tomat, sayuran dan buah-buahan).

Kabupaten Aceh Tengah utamanya dikelilingi oleh 2 kabupaten yang berdekatan (Bener Meriah dan Gayo Lues) yang memiliki karakteristik wilayah dan potensi yang hamper sama. Sementara dari sisi akses dan fasilitas perkotaan, Aceh Tengah masih lebih unggul dibandingkan dengan dua kabupaten yang berdekatan. Hal ini menjadi peluang bagi Takengon untuk menjadi Kota Agropolitan yang berfokus pada pengembangan agroindustri dan agrowisata berbasis kopi dan hotikultura.

4. Kawasan Perkotaan Meulaboh

Upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru yang bersanitasi baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan milenial (pembangunan rumah dilengkapi dengan fasilitas MCK dan septik tank) untuk mendukung Kawasan perkotaan Meulaboh. Pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan.

Untuk Preservasi jalan ruas Takengon–Meulaboh, Meulaboh–Calang, Meulaboh–Sukamakmue–Blangpidie, Pemerintah Aceh mendukung konektivitas dengan pemeliharaan, penanganan longsor dan pembangunan menuju standar jalan Geumpang-Meulaboh dan jalan Kuala Tuha – Lamie. Selanjutnya perlu penanganan daya rusak air Krueng Lamie di 8 titik yang menggerus tebing sungai dan mengancam stabilitas badan jalan Kuala Tuha-Lamie.

5. Kawasan Perkotaan Langsa

Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru yang bersanitasi baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan milenial (pembangunan rumah dilengkapi dengan fasilitas MCK dan septik tank) untuk mendukung Kawasan perkotaan di Langsa. Pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan. Selain daripada itu, juga dilaksanakan upaya peningkatan penyediaan akses layanan dasar (air minum dan sanitasi).

Selanjutnya perlu peningkatan pembangunan ekonomi melalui dukungan pengembangan Kota Langsa menjadi Kota Agropolitan Langsa dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian.

Kota Langsa merupakan sebuah kota administratif yang dikelilingi oleh kabupaten yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. Kota Langsa sendiri berada di pesisir pantai dan memiliki posisi strategis karena diapit oleh kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi agro cukup besar, seperti: Aceh Timur, Aceh Tamiang dan bahkan Gayo Lues. Sebagai kota pesisir, Langsa memiliki Pelabuhan yang memungkinkan adanya kegiatan ekspor dan impor. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Kota Langsa potensial menjadi Kota Agropolitan yang berfungsi sebagai pusat layanan dan logistic ekspor untuk komoditas pertanian dan kelautan di wilayah sekitar.

Untuk penuntasan ruas Jalan tol Binjai-Langsa sudah dilakukan penentuan lokasi dan memperkuat koordinasi penyelesaian pembangunan ruas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan periode perencanaan.

6. Kawasan Perkotaan Subulussalam

Pengembangan wilayah perkotaan Kota Subulussalam dengan upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru yang bersanitasi baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan milenia pembangunan rumah dilengkapi dengan fasilitas MCK dan septik tank) untuk mendukung Kawasan perkotaan di Subulussalam. Pembangunan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan. Selain daripada itu, juga dilaksanakan upaya peningkatan penyediaan akses layanan dasar (air minum dan sanitasi).

Selanjutnya perlu peningkatan pembangunan ekonomi melalui dukungan pengembangan Kota Subulussalam menjadi Kota Agropolitan Subulussalam sesuai dengan karakteristik geografis lahan pertanian. Tindak lanjut implimentasi dukungan tersebut melalui intensifiksi lahan yang tersedia dengan pemanfaatan teknologi, penggunaan pupuk, benih unggul dan teknik pengelolaan yang tepat.

Untuk meningkatkan mobilisasi barang, orang dan jasa Pemerintah Aceh melakukan preservasi, penanganan longsor dan pelaksanaan pemenuhan jalan menuju standar untuk ruas jalan Simpang Lawe Deski-Muara Situlen-Gelombang, ruas jalan Krueng

Luas-Rundeng, ruas jalan Subulussalam-Rundeng dan ruas jalan Lipat Kajang-Telaga Bakti-Singkil.

Subulussalam merupakan sebuah kota administratif yang berlokasi di wilayah Barat Selatan Aceh. Subulussalam memiliki potensi pertanian, perkebunan, Kelautan dan perikanan. serta bila didukung, bisa menjadi kota agropolitan dengan focus pada agro-industri pengolahan hasil pertanian lokal. Subulussalam memiliki Kelapa Sawit yang merupakan komoditas pada subsektor perkebunan yang masih menjadi primadona di Kota Subulussalam. Beberapa komoditas unggulan kota Subulussalam, diantaranya: kelapa sawit, karet, kakao, kopi, serta padi ladang dan jagung.

Selain potensi yang dimiliki oleh Kota Subulussalam, daerah ini juga menjadi lintasan utama bagi kabupaten Aceh Singkil, dan kabupaten-kabupaten wilayah barat selatan yang akan menuju Sumatera Utara. Oleh karena itu, Kota Subulussalam berpotensi menjadi Kota Agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sistem agribisnis, yang mengintegrasikan sektor pertanian dan perkebunan dengan fasilitas perkotaan dan industri pengolahan untuk mendorong, melayani, dan menggerakkan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

7. KPBPB Sabang

Mendukung pertumbuhan ekonomi maritim dan kepariwisataan melalui upaya peningkatan penyediaan akses layanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) serta sarana pendukung lainnya yang inklusif untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Kota Sabang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang nasional di ujung barat Indonesia. Penguatan Sabang sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra menjadi prioritas penting dalam mendukung peningkatan postur TNI, sekaligus memperkuat pengawasan dan pengendalian di wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar, yaitu Pulau Rondo yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Thailand dan Malaysia di perairan sebelah timur, serta dengan Kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar (India) di perairan sebelah utara. TNI Angkatan Laut mengembangkan dan merevitalisasi Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Sabang menjadi basis logistik dan operasi yang mendukung penempatan unsur-unsur tempur dan patroli maritim jangka panjang, guna mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan mencegah aktivitas ilegal di Selat Malaka.

3.11.2. Kawasan Komoditas Unggulan

1. Kopi di DT Gayo (Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah)
   Pengembangan kawasan komoditas unggulan kopi dan hortikultura di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues

2. Sawit dan Karet di Pesisir Timur Laut Aceh (Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang) dan Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam).

   Pengembangan kawasan komoditas unggulan sawit dan karet di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang serta Pesisir Barat-Selatan Aceh (Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, serta Kabupaten Simelue).

3.11.3. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

1. Swasembada Pangan

Pesisir Utara Aceh (Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang).

Pengembangan infrastruktur pengairan untuk mendukung swasembada pangan di pesisir utara (Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Simeulue)

2. Swasembada Air dan Energi

Dataran Tinggi Gayo (Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah) dengan pengembangan waduk dan PLTMH untuk mendukung swasembada air dan energi di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) pada daerah tangkapan air (*catchment area*) Krueng Pasee-Peusangan (kewenangan aceh) dan Jambo Aye (kewenangan pusat) dengan bertujuan untuk memulihkan fungsi hidrologis dan ekosistem di hulu sungai guna mengurangi risiko bencana, seperti banjir dan kekeringan, serta memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan dlam mendukung ketahanan pangan daerah.

3. Swasembada Pangan dan Energi

Pesisir Barat Aceh (Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Barat Daya)

Pengembangan infrastruktur pengairan untuk mendukung swasembada pangan di pesisir barat Aceh dan Energi Baru Terbarukan.

a. Pengembangan pembangkit Listrik energi terbarukan

Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Negara (RUKN) yang terbaru diterbitkan oleh Kementrian ESDM menyebutkan bahwa tidak ada pengembangan khusus untuk

Aceh dalam hal pembangkitan energi Listrik yang bersumber dari energi Sumatra, melainkan Aceh masuk ke dalam kuota Sumatra tersebar sejumlah 400 MW.

Dalam RUPTL PT PLN (Persero), beberapa proyek pengembangan Energi terbarukan yang masih dalam tahap Pembangunan yaitu:

1. PLTP Geureudong (55 MW) masuk dalam potensi panas bumi yang perlu kajian lebih lanjut.
2. PLTP Jaboi Ekspansi (50 MW) masuk dalam potensi panas bumi yang perlu kajian lebih lanjut.
3. PLTP Seulawah Agam (55 MW) masuk dalam potensi panas bumi yang perlu kajian lebih lanjut.
4. Energi bayu tersebar di wilayah Aceh yaitu wilayah Aceh besar.
5. PLTA Peusangan 1-2 (88 MW) dengan target operasi awal tahun 2026.

Pengembangan/progress pembangkit panas bumi di Aceh yang dimiliki oleh Dinas ESDM Aceh adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kerja Panas Bumi Seulawah Agam

   Saat ini PT. Seulawah Geothermal Energi selaku pelaksana pengembangan PLTP Seulawah Agam sedang melakukan proses pembebasan lahan untuk kegiatan eksplorasi yang direncanakan akhir tahun 2025.

2. Wilayah Kerja Panas Bumi Jaboy

   Tahapan Eksploitasi masih belum bisa dimulai karena masih menunggu persetujuan Menteri ESDM atas Studi Kelayakan untuk Tahapan Eksploitasi.

   Stagnasi di lapangan sudah sejak 2019 setelah pengeboran 2 (dua) sumur eksplorasi pada tahun 2018 selesai dilaksanakan.

3. Wilayah Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi Geureudong.

   Perpanjangan Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan PSPE di Wilayah Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Geureudong (Surat Direktur Jenderal Energi baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kemeterian ESDM Nomor T-5124/EK.04/DJE.S/2023 Tanggal 21 November 2023)

b. Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi.

   Dalam RUPTL PT.PLN disebutkan bahwa Aceh termasuk ke dalam perencanaan implementasi Advanced Metering Infrastructure (AMI). Selanjutnya Aceh juga masuk ke dalam perencanaan system transmisi Sumatra sebagai wilayah yang menjadi pemasangan transmisi *backbone* 500KV. Wilayah barat dan Tengah Aceh direncanakan akan dilakukan pemasangan transmisi 150KV. Wilayah utara dan timur akan dilakukan pengembangan jalur transmisi 275KV.

c. Adopsi Teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan Listrik

Dalam skenario yang tertulis dalam RUKN dan RUPTL, tidak menyebutkan wilayah Aceh mendapat pasokan energy storage (penyimpanan energi) dalam jangka waktu 10 tahun kedepan selama periode RUPTL terbaru.

d. Penerapan *Internet of Thing* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time

Menurut RUPTL PT PLN implementasi AMI diterapkan pada periode 2026-2028.

e. Perluasan penggunaan kendaraan Listrik

Sejauh ini PT PLN telah melakukan instalasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada beberapa wilayah Timur dan Barat Aceh sebanyak 17 lokasi. Pemerintah Aceh sendiri telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai stimulus untuk kendaraan listrik, sebagai berikut:

1. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 16/INSTR/2022 tentang Percepatan Penggunaan KBLBB di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2022
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2022

3.11.4. Kawasan Afirmasi

Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) dengan dilakukannya pemenuhan infrastruktur layanan dasar di Kabupaten Aceh Besar (Pulo Aceh), Kabupaten Aceh Singkil (Pulau Banyak) dan Kabupaten Simeulue yang meliputi pendidikan, kesehatan (peningkatan status rumah sakit Daerah), perpanjangan *runway* bandara Lasikin, lanjutan pembangunan irigasi Sigulai, pembangunan SPAM terintegrasi, konektivitas, perumahan dan permukiman, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan). Disamping itu, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi informasi komunikasi dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital perlu dibangun untuk mengerjar ketertinggalan khususnya di daerah afirmasi.

3.11.5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

Peningkatan ekonomi masyarakat dan pengawasan TN Gunung Leuser. Berbagai upaya serius terus dilakukan oleh pemerintah beserta dukungan dari organisasi non-pemerintah di Aceh untuk mencegah kepunahan total, diantaranya : 1) Pembentukan Kawasan Konservasi: Aceh telah menetapkan beberapa kawasan konservasi, baik di darat maupun perairan, seperti Suaka Margasatwa Rawa Singkil dan berbagai kawasan konservasi perairan di sepanjang pesisir Aceh; 2) Penegakan Hukum: Adanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar menjadi landasan hukum

untuk perlindungan spesies dan habitatnya; 3) Mitigasi Konflik: Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurangi konflik antara satwa liar (terutama gajah) dan manusia melalui patroli, pembangunan parit pembatas, dan sosialisasi kepada masyarakat; dan 4) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Program edukasi dan partisipasi masyarakat terus digalakkan, seperti dalam konservasi penyu, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati.

Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan sangatlah vital untuk mendukung bioekonomi di Aceh, yang berfokus pada pembangunan ekonomi menggunakan sumber daya alam terbarukan. Aceh punya potensi besar di sektor-sektor ini, terutama perikanan, pertanian, dan kehutanan. Pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan di Aceh dapat dikembangkan melalui beberapa sektor utama yaitu: 1) Pertanian dan Perkebunan: Aceh memiliki lahan subur yang menghasilkan berbagai komoditas, seperti kopi, kakao, karet, dan nilam. Bioekonomi dapat diterapkan dengan mengembangkan produk turunan bernilai tinggi, misalnya, biofuel dari kelapa sawit atau kosmetik dan aromaterapi dari nilam; 2) Kelautan dan Perikanan: Dengan garis pantai yang panjang, Aceh memiliki kekayaan laut melimpah. Pendekatan bioekonomi dapat diterapkan dengan budidaya perikanan berkelanjutan (akuakultur) dan pengolahan hasil laut yang efisien, misalnya, produk olahan ikan atau rumput laut, untuk mengurangi limbah dan meningkatkan nilai ekonomi; dan 3) Kehutanan dan Jasa Lingkungan Hutan di Aceh tidak hanya menghasilkan kayu dan hasil hutan bukan kayu (seperti rotan dan bambu) tetapi juga menyediakan jasa ekosistem yang tak ternilai. Ini termasuk jasa penyediaan air bersih, penyerapan karbon, dan pencegahan bencana alam. Pemanfaatan jasa ekosistem ini dapat dikembangkan melalui skema imbuh jasa lingkungan (PES - *Payment for Ecosystem Services*) atau ekowisata. "Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik di Aceh sangat penting untuk mendukung bioekonomi. Dengan kekayaan hayati yang melimpah, Aceh punya potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor ini, meskipun masih banyak tantangan.

3.12. Kegiatan Prioritas Utama Aceh

Kegiatan prioritas utama merupakan kegiatan penting dan mendesak untuk dilakukan dalam mendukung kegiatan prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terutama dalam pengembangan komoditi kepala, pengembangan pangan lokal dan nabati, pangan hewani. Menyelesaikan permasalah kesehatan khususnya TBC, pengembangan SPAM dalam mencapai akses air minum perpipaan dan penyediaan perumahan terintegrasi PSU. Berikut dukungan Pemerintah Aceh untuk mensukseskan kegiatan prioritas Utama sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7.
Penyelarasan Kegiatan Priorias Utama Aceh

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Uraian Kegiatan	Program	SKPA
1	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Peremajaan tanaman kelapa dalam Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang .	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tanbun
2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Pengembangan Kawasan Padi (di Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Subulussalam, Aceh Singkil)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
		Pengadaan/Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan Aceh
		Pengembangan Kawasan Jagung (di Aceh Besar, Pidie, Pijay, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
3	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan (PUPM dan Kios Pangan) 23 kab/kota	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan Aceh
		Pembinaan dan Pengembangan Gampong (Desa) B2SA/P2L pada 23 kab/kota	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan Aceh
4	Pengembangan Pangan Hewani	Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Terpadu (di Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Bener Meriah), Pengembangan Kawasan Peternakan Kerbau Terpadu (di Gayo Lues dan Simeulue), Pengembangan Kawasan Peternakan Kambing dan Domba (Pidie dan Bireuen), dan pembinaan peternakan unggas berbasis masyarakat	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan Aceh

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Uraian Kegiatan	Program	SKPA
5	Pengembangan Pangan Akuatik *(Blue Food)*	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap pada 3 Pelabuhan besar (Pelabuhan Perikanan Samudera di Kota Banda Aceh, Pelabuhan Perikanan Nusantara di Aceh Timur, dan Pelabuhan Perikanan Pantai di Aceh Selatan) 18 Pelabuhan Kecil di WPP 571 dan 572. Di samping itu dilakukan pengembangan Perikanan Budidaya di daerah pesisir utara dan timur Aceh.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
		Peningkatan Fasilitas untuk memperbaiki rantai pasok perikanan (fasilitas pelabuhan, kapal, alat tangkap, *cool storage*, *cool box*, garam, dll) serta pengembangan fasilitas perikanan budidaya.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
6	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Lanjutan pembangunan RS Regional dr. Yulidin Away di Aceh Selatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Aceh
		Peningkatan mutu dan pendampingan akreditasi Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Aceh
		Penyediaan sarana dan prasarana di RSUD dr. Zainal Abidin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Aceh
		Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (dokter spesialis)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan Aceh

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Uraian Kegiatan	Program	SKPA
7	Penuntasan TBC	Peningkatan edukasi tentang TBC kepada masyarakat, pelaksanaan penemuan aktif TBC baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun populasi umum dan beresiko, optimalisasi jejaring layanan TBC di semua layanan serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pencegahan, pengobatan dan perawatan kasus di layanan kesehatan. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam penanggulangan ATM terutama di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Aceh / Rumash Sakit Ibu dan Anak/Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin
8	Konservasi Sumber Daya Air	Menjaga ketersediaan air dengan melakukan Pembangunan dan rehabilitasi embung dan tampungan air lainnya serta Pembangunan dan Rehabilitasi Unit Air Baku. Melakukan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air dan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi. Selanjutnya, melakukan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air dan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi, Mendorong Dewan Sumber Daya Air (DSDA) dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber daya Air (TKPSDA) utk menginisiasi lahirnya Kepgub, Pergub ataupun Qanun terkait penetapan Zona Konservasi, Zona Sempadan Sungai dan Zona Sempadan Tampungan Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pengairan Aceh
		Melakukan penguatan tata kelola air melalui konservasi lahan dengan melakukan pembangunan dan rehabilitasi dam serta tampungan air lainnya. Selanjutnya, mengembalikan fungsi ekologis DAS yang mengalami penurunan daya dukung melalui Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu untuk DAS yang dipulihkan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pengairan Aceh

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	Uraian Kegiatan	Program	SKPA
9	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Untuk meningkatkan capaian akses air minum jaringan perpipaan melalui pengembangan SPAM telah masuk dalam Misi 2 RPJMA 2025 - 2029 yaitu Mewujudkan Kemandirian Rakyat melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, melalui Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan yang dituangkan dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum dengan indikator capaian Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Untuk Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU telah masuk dalam dua Misi, yaitu Misi nomor 2 RPJMA 2025 - 2029 yaitu Mewujudkan Kemandirian Rakyat melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, melalui Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang dituangkan dengan Program Kawasan Permukiman dengan Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan . Serta juga tertuang kedalam Misi 9 RPJMA 2025 - 2029 yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteran Rakyat Aceh melalui Meningkatnya Kualitas Permukiman yang dituangkan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Pengelolaan persampahan, dengan indikator capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT ACEH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ACEH

4.1. Program Perangkat Aceh

Rencana program Perangkat Aceh untuk periode tahun 2025 hingga 2030 disusun sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome-based planning*), serta sebagai wujud komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Periode ini merupakan tahapan strategis dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2025–2030 dan sebagai bagian dari kontribusi terhadap capaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh hingga tahun 2045.

Secara eksplisit, program pembangunan yang dirancang untuk tahun 2030 tidak hanya dimaksudkan untuk menuntaskan target-target RPJM periode berjalan, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme transisi dan kesinambungan perencanaan yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030. Dengan demikian, seluruh rencana program tahun 2030 menjadi rujukan bagi kepala daerah terpilih pada periode 2030–2034 dalam menetapkan arah dan prioritas pembangunan pada awal masa pemerintahannya.

Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup seluruh program prioritas dan pendukung yang termuat dalam Bab IV Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh. Ini termasuk program-program utama yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta program penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab sekretariat perangkat daerah, sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan secara menyeluruh.

Dengan penyusunan program yang terstruktur, konsisten, dan berorientasi hasil, Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berkesinambungan. Namun pencapaian IKU dan IKD sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fiskal daerah yang cenderung menurun sampai tahun 2030. Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan Aceh terutama dari dana transfer keuangan daerah yang bersumber dari dana otonomi khusus. Oleh karena itu upaya untuk memperpanjang sumber pendanaan dari Dana Otonomi Khusus menjadi sangat penting untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Aceh ke depan.

Informasi lebih rinci mengenai program perangkat Aceh dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Aceh dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1
Program Perangkat Aceh Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.963.493.899.189		2.981.186.136.076		2.586.943.323.304		2.567.992.140.027		2.566.920.303.519	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.007.907.554.866		1.994.786.258.759		1.982.025.802.578		1.969.142.634.861		1.968.443.207.735	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	1.967.284.202.364	100	1.954.426.958.049	100	1.941.928.837.322	100	1.929.306.299.879	100	1.928.765.808.930	Dinas Pendidikan Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	33.486.881.501	100	33.269.216.771	100	33.052.966.862	100	32.838.122.578	100	32.724.674.781	Dinas Pendidikan Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	95,00	95,00	95,00	7.136.471.001	95,00	7.090.083.939	95,00	7.043.998.394	95,00	6.998.212.404	95,00	6.952.724.024	Dinas Pendidikan Aceh
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					796.114.401.517		812.073.205.695		521.271.471.305		516.042.521.422		515.859.884.397	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Iklim Inklusivitas SMK (Nilai)	57,42	56,00	57,00	796.114.401.517	58,00	812.073.205.695	59,00	521.271.471.305	60,00	516.042.521.422	70,00	515.859.884.397	Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB (Nilai)	78,45	80,00	82,00		83,00		85,00		87,00		89,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA (Nilai)	73,89	73,00	74,00		74,00		75,00		75,00		76,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB (Nilai)	77,68	72,00	78,00		83,00		89,00		94,00		99,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK (Nilai)	71,71	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		83,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB (Nilai)	74,51	75,00	76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB (Nilai)	66,84	71,00	76,00		80,00		84,00		89,00		94,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMA (Nilai)	73,93	74,00	74,00		74,00		74,00		75,00		76,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB (Nilai)	69,39	72,00	74,00		76,00		78,00		80,00		82,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMK (Nilai)	71,96	71,00	72,00		73,00		75,00		76,00		83,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB (Nilai)	67,04	71,00	74,00		78,00		82,00		85,00		88,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Inklusivitas SDLB (Nilai)	65,12	70,00	74,00		79,00		83,00		88,00		92,00		Dinas Pendidikan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Inklusivitas SMA (Nilai)	59,39	61,00	62,00		63,00		65,00		66,00		68,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Inklusivitas SMALB (Nilai)	72,06	69,00	72,00		75,00		79,00		82,00		85,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Inklusivitas SMPLB (Nilai)	68,85	76,00	83,00		91,00		95,00		99,00		100,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Literasi SDLB (Nilai)	83,51	88,00	91,00		94,00		97,00		99,00		100,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Literasi SMA (%)	64,95	69	72		76		80		83		-		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Literasi SMALB (%)	64,62	74,00	83,00		88,00		84,00		90,00		96,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Literasi SMK (%)	59,06	60,66	62,00		63,00		64,00		65,00		66,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Literasi SMPLB (%)	76,62	82,00	86,00		91,00		96,00		99,00		100,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Numerasi SDLB (%)	83,51	81,00	84,00		86,00		89,00		92,00		95,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Numerasi SMA (%)	61,96	68,00	74,00		81,00		87,00		93,00		100		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Numerasi SMALB (%)	63,40	78,00	85,00		88,00		92,00		96,00		100,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Numerasi SMK (%)	57,89	59,00	61,00		62,00		64,00		65,00		66,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Numerasi SMPLB (%)	63,64	82,00	85,00		89,00		95,00		99,00		100,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK (%)	72,31	80,00	87,00		90,00		93,00		97,00		100,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Kualitas Pembelajaran SDLB (Nilai)	71,23	69,00	71,00		74,00		77,00		79,00		81,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Kualitas Pembelajaran SMA (Nilai)	66,14	66,00	66,00		67,00		67,00		68,00		75,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Kualitas Pembelajaran SMALB (Nilai)	69,57	64,00	70,00		75,00		81,00		86,00		91,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Kualitas Pembelajaran SMK (Nilai)	64,84	62,00	65,00		67,00		70,00		73,00		80,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Kualitas Pembelajaran SMPLB (Nilai)	69,31	68,00	69,00		71,00		72,00		74,00		76,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Penyerapan Lulusan SMK (%)	87,19	83,00	87,00		91,00		95,00		99,00		100,00		Dinas Pendidikan Aceh
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					138.000.000		207.000.000		0		0		0	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Karakter Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitias, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter. (Nilai)	57,74	58,14	60,14	138.000.000	64,14	207.000.000	72,14	0	82,14	0	85,14	0	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					428.067.753		435.737.357		323.209.710		319.967.547		319.234.263	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Distribusi Guru SDLB (Nilai)	0,17	0,25	0,33	428.067.753	0,41	435.737.357	0,49	323.209.710	0,57	319.967.547	0,65	319.234.263	Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Distribusi Guru SMA (Nilai)	0,42	0,50	0,58		0,66		0,74		0,82		0,90		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Distribusi Guru SMALB (Nilai)	0,17	0,25	0,33		0,41		0,49		0,57		0,65		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Distribusi Guru SMK (Nilai)	0,44	0,52	0,60		0,68		0,76		0,84		0,92		Dinas Pendidikan Aceh
	Indeks Distribusi Guru SMPLB (Nilai)	0,17	0,25	0,33		0,41		0,49		0,57		0,65		Dinas Pendidikan Aceh
	Proporsi PTK bersertifikat SDLB (%)	23,01	33,00	42,00		51,00		61,00		70,00		73,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Proporsi PTK bersertifikat SMA (%)	32,32	48,00	64,00		80,00		96,00		112,00		114,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Proporsi PTK bersertifikat SMALB (%)	23,01	33,00	42,00		51,00		61,00		70,00		73,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Proporsi PTK bersertifikat SMK (%)	28,57	44,00	59,00		74,00		89,00		104,00		108,00		Dinas Pendidikan Aceh
	Proporsi PTK bersertifikat SMPLB (%)	23,01	33,00	42,00		51,00		61,00		70,00		73,00		Dinas Pendidikan Aceh
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					201.688.870		205.302.489		152.283.840		150.756.259		150.410.764	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Akreditasi Sekolah SLB (%)	78,57	-	80	201.688.870	85	205.302.489	90	152.283.840	95	150.756.259	100	150.410.764	Dinas Pendidikan Aceh
	Akreditasi Sekolah SMA (%)	96,25	-	93		94		96		98		100		Dinas Pendidikan Aceh
	Akreditasi Sekolah SMK (Aduan)	93,33	-	97		98		99		100		100		Dinas Pendidikan Aceh
1.01.07 - PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH					158.135.937.368		172.900.201.762		82.741.503.382		81.911.511.337		81.723.791.174	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dayah, kompetensi kurikulum dan tenaga pengajar serta kuantitas sarana belajar mengajar	Indeks kompetensi kurikulum dayah (Indeks)	65,00	67,00	68,9	158.135.937.368	73,03	172.900.201.762	77,42	82.741.503.382	82,06	81.911.511.337	86,98	81.723.791.174	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA) (Indeks)	39,00	44,12	45,05		55,00		65,05		73,80		83,06		Dinas Pendidikan Dayah Aceh
	Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar (%)	60,00	62,50	64,2		68,69		73,5		78,65		84,15		Dinas Pendidikan Dayah Aceh
	Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah (%)	65,00	66,50	68,25		71,66		75,26		79,01		82,96		Dinas Pendidikan Dayah Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH					568.248.815		578.430.014		429.052.489		424.748.601		423.775.186	
Meningkatnya Peran Majelis Pendidikan Aceh	Jumlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan. (Rasio)	1,33	1,33	1,6	568.248.815	1,6	578.430.014	1,6	429.052.489	1,6	424.748.601	1,33	423.775.186	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.069.533.979.329		2.093.003.488.506		1.613.998.567.417		1.594.691.099.607		1.590.629.754.337	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.193.063.128.956		1.185.308.218.618		1.177.603.715.197		1.169.949.291.049		1.166.344.620.657	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	68.839.963.741	100	68.392.503.977	100	67.947.952.701	100	67.506.291.009	100	67.067.500.117	Dinas Kesehatan Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	112.796.881.791	100	112.063.702.059	100	111.335.287.996	100	110.611.608.624	100	109.892.633.168	Rumah Sakit Ibu dan Anak
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	101.959.871.516	100	101.297.132.351	100	100.638.700.991	100	99.984.549.434	100	99.334.649.863	Rumah Sakit Jiwa Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	909.466.411.908	100	903.554.880.231	100	897.681.773.509	100	891.846.841.982	100	890.049.837.509	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					873.270.153.315		904.437.226.585		433.978.187.189		422.349.385.445		421.898.193.387	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Balita (AKBa) (Per 1.000 Kelahiran)	8,00	8,00	8,00	795.682.084.304	7,00	825.459.027.767	7,00	377.050.661.661	7,00	365.992.908.200	7,00	365.670.870.725	Dinas Kesehatan Aceh
	Prevalensi Stunting (%)	28,60	27,10	25,60		24,00		22,50		21,00		19,00		Dinas Kesehatan Aceh
	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita (%)	11,50	10,00	10,50		9,50		8,50		7,50		6,50		Dinas Kesehatan Aceh
	Persentase RS Regional yang Fungsional (%)	20,00	40,00	40,00		40,00		40,00		80,00		80,00		Dinas Kesehatan Aceh
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	36,70	39,00	41,30		43,60		45,90		48,20		50,50		Dinas Kesehatan Aceh
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Aceh
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Aceh
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	98	87	79		72		65		60		56		Dinas Kesehatan Aceh
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	99,5	99,5	99,5		99,5		99,5		99,5		99,5		Dinas Kesehatan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	NA	71,00	72,50		74,00		75,50		77,00		78,5		Dinas Kesehatan Aceh
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	36	46		55		62		67		70		Dinas Kesehatan Aceh
	Persentase hipertensi dalam pengendalian (%)	-	7	10		13		16		19		20		Dinas Kesehatan Aceh
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	-	77,00	77,50	13.775.649.002	78,00	14.022.464.531	78,50	8.746.382.112	79,00	8.658.645.882	80,00	8.638.802.487	Rumah Sakit Ibu dan Anak
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	-	77	77,5	34.077.256.190	78	34.687.811.526	78,5	25.729.805.694	79	25.471.706.273	80	25.413.331.660	Rumah Sakit Jiwa Aceh
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	-	77	77,5	29.735.163.819	78	30.267.922.761	78,5	22.451.337.722	79	22.226.125.090	80	22.175.188.515	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.772.569.566		2.822.245.137		2.093.410.215		2.072.410.913		2.067.661.479	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar (%)	0	10	26	2.772.569.566	34	2.822.245.137	43	2.093.410.215	53	2.072.410.913	55	2.067.661.479	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					428.127.492		435.798.166		323.254.816		320.012.200		319.278.814	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	50,00	55,00	58,00	428.127.492	60,00	435.798.166	65,00	323.254.816	70,00	320.012.200	75,00	319.278.814	Dinas Kesehatan Aceh
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					505.286.158.053		585.722.148.738		371.137.326.255		372.488.989.930		371.006.254.123	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					126.004.755.577		125.185.724.666		124.372.017.455		123.563.599.341		123.360.435.946	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	100	79.142.746.973	100	78.628.319.118	100	78.117.235.043	100	77.609.473.015	100	77.505.011.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran					46.862.008.604		46.557.405.548		46.254.782.412		45.954.126.326		45.855.424.505	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pengairan Aceh
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					66.223.929.858		67.410.450.672		50.001.937.892		49.500.361.186		49.486.919.062	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Kapasitas Air Baku ((%))	-	19	0,65	66.223.929.858	1,11	67.410.450.672	1,57	50.001.937.892	2,03	49.500.361.186	2,49	49.486.919.062	Dinas Pengairan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase irigasi modern (%)	70,00	70,35	70,77		71,27		71,84		72,48		73,21		Dinas Pengairan Aceh
	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%)	56,44	56,59	56,71		56,83		56,97		57,12		57,28		Dinas Pengairan Aceh
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.200.000.000		1.700.000.000		3.000.000.000		2.500.000.000		1.500.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota (%)	-	-	16,5	1.200.000.000	20,5	1.700.000.000	26,5	3.000.000.000	30,5	2.500.000.000	40,0	1.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		10.500.000.000		10.500.000.000		10.500.000.000		10.500.000.000	
Meningkatnya pelayanan persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Regional (%)	-	-	-	0	100	10.500.000.000	100	10.500.000.000	100	10.500.000.000	100	10.500.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.500.000.000		1.249.360.127		926.717.250		917.421.215		915.318.721	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional (%)	-	-	4,5	1.500.000.000	9,0	1.249.360.127	13,5	926.717.250	18,0	917.421.215	40,0	915.318.721	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) (%)	0	17,19	19,87		22,54		25,22		27,89		30,57		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					0		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	
Terpenuhinya penyelenggaraan drainase perkotaan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan drainase perkotaan (%)	-	-	-	0	20	1.000.000.000	40	1.000.000.000	70	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					200.367.960.715		216.519.608.668		114.838.104.734		114.676.115.872		114.413.307.644	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan (%)	80,50	80,50	81,00	200.367.960.715	81,50	216.519.608.668	82,00	114.838.104.734	83	114.676.115.872	83,50	114.413.307.644	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					109.387.849.860		161.454.208.405		66.074.054.940		65.411.256.493		65.411.000.000	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	80,80	81,01	81,44	109.387.849.860	81,69	161.454.208.405	81,86	66.074.054.940	82,01	65.411.256.493	82,16	65.411.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					197.253.185		291.141.630		119.147.765		117.952.576		117.682.259	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	3,12	197.253.185	3,34	291.141.630	3,56	119.147.765	3,78	117.952.576	4	117.682.259	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					404.408.858		411.654.570		305.346.219		302.283.247		301.590.491	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA (%)	79,50	88	82	404.408.858	85	411.654.570	91	305.346.219	92	302.283.247	94	301.590.491	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					499.591.173.947		565.792.493.056		303.246.185.089		295.706.448.380		296.124.605.739	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					51.002.354.129		63.042.354.129		63.542.354.129		63.042.354.129		63.542.354.129	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	51.002.354.129	100	63.042.354.129	100	63.542.354.129	100	63.042.354.129	100	63.542.354.129	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		0	
Terpenuhinya data identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi dan di lokasi rawan bencana	Persentase perumahan yang teridentifikasi di lokasi berpotensi relokasi dan di lokasi rawan bencana (%)	-	-	-	0	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	-	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					206.653.607.668		278.871.293.165		107.563.954.396		106.484.964.738		106.240.928.526	
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	0,208	0,210	0,211	206.653.607.668	0,213	278.871.293.165	0,214	107.563.954.396	0,216	106.484.964.738	0,218	106.240.928.526	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					241.935.212.150		223.378.845.762		131.639.876.564		125.679.129.513		126.341.323.084	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU (%)	66,38	66,00	67,88	241.935.212.150	69,38	223.378.845.762	70,88	131.639.876.564	72,38	125.679.129.513	73,88	126.341.323.084	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					73.905.551.305		74.134.649.566		68.430.219.966		67.931.086.653		67.553.641.210	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					53.738.659.744		53.389.358.456		53.042.327.625		52.697.552.496		52.355.018.405	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	12.784.433.849	100	12.701.335.029	100	12.618.776.351	100	12.536.754.305	100	12.455.265.402	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	95	95	95	40.954.225.895	95	40.688.023.427	95	40.423.551.274	95	40.160.798.191	95	39.899.753.003	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.330.842.331		1.354.686.765		1.004.843.653		994.763.920		992.484.176	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan dan penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban (%)	81	81	90	1.330.842.331	90	1.354.686.765	90	1.004.843.653	90	994.763.920	90	992.484.176	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					17.008.169.711		17.312.901.662		12.841.905.446		12.713.086.427		12.683.951.295	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	17.008.169.711	100	17.312.901.662	100	12.841.905.446	100	12.713.086.427	100	12.683.951.295	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.827.879.519		2.077.702.683		1.541.143.242		1.525.683.810		1.522.187.334	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	79,47	79,80	80,00	1.827.879.519	81,00	2.077.702.683	82,00	1.541.143.242	83,00	1.525.683.810	84,00	1.522.187.334	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					87.959.636.593		88.662.491.986		69.279.858.038		68.709.532.912		68.404.504.117	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					36.657.353.390		36.441.036.109		35.973.743.816		35.737.517.070		35.508.051.673	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	36.657.353.390	100	36.441.036.109	100	35.973.743.816	100	35.737.517.070	100	35.508.051.673	Dinas Sosial Aceh
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					8.134.668.284		8.280.415.497		6.142.027.197		6.080.415.630		6.066.480.878	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	68,59	68,64	68,65	8.134.668.284	68,7	8.280.415.497	68,76	6.142.027.197	68,81	6.080.415.630	68,89	6.066.480.878	Dinas Sosial Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	68,59	68,64	68,65		68,7		68,76		68,81		68,89		Dinas Sosial Aceh
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (%)	68,59	68,64	68,65		68,7		68,76		68,81		68,89		Dinas Sosial Aceh
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	68,59	68,64	68,65		68,7		68,76		68,81		68,89		Dinas Sosial Aceh
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	68,59	68,64	68,65		68,7		68,76		68,81		68,89		Dinas Sosial Aceh
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					442.621.854		350.000.000		250.000.000		200.000.000		175.000.000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (KTK)Dalam & Luar Negeri yang mendapatkan layanan pemulangan. (%)	100	100	100	442.621.854	100	350.000.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100	175.000.000	Dinas Sosial Aceh
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					22.457.421.057		22.859.786.147		12.354.407.987		12.230.479.125		12.202.450.006	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti (%)	100	100	100	22.457.421.057	100	22.859.786.147	100	12.354.407.987	100	12.230.479.125	100	12.202.450.006	Dinas Sosial Aceh
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial Aceh
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial Aceh
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial Aceh
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4.613.853.844		4.696.519.334		3.483.659.665		3.448.714.569		3.440.811.000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan (%)	29,92	30,92	31,92	4.613.853.844	32,92	4.696.519.334	33,92	3.483.659.665	34,92	3.448.714.569	35,92	3.440.811.000	Dinas Sosial Aceh
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	28,92	29,92	30,92		31,92		32,92		33,92		34,92		Dinas Sosial Aceh
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	27,92	28,92	29,92		30,92		31,92		32,92		33,92		Dinas Sosial Aceh
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					15.009.864.562		15.379.345.503		10.622.978.600		10.563.910.257		10.564.242.138	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	15.009.864.562	100	15.379.345.503	100	10.622.978.600	100	10.563.910.257	100	10.564.242.138	Dinas Sosial Aceh
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial Aceh
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	90,51	91,51	92,51		93,51		94,51		95,51		96,51		Dinas Sosial Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					643.853.602		655.389.396		453.040.773		448.496.261		447.468.422	
Meningkatnya tatakelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang terkelola dengan baik (%)	76,10	87,98	90,53	643.853.602	90,53	655.389.396	90,53	453.040.773	90,53	448.496.261	90,53	447.468.422	Dinas Sosial Aceh
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					39.653.312.303		39.483.677.540		37.574.915.484		37.322.506.823		37.055.295.472	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					36.044.658.777		35.810.368.495		35.577.601.099		35.346.346.692		35.116.595.439	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	36.044.658.777	100	35.810.368.495	100	35.577.601.099	100	35.346.346.692	100	35.116.595.439	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					208.818.470		212.559.828		114.342.243		113.195.259		112.935.845	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase Angkatan Kerja yang bekerja (Persentase)	94,16	94,35	94,56	208.818.470	94,78	212.559.828	95,00	114.342.243	95,22	113.195.259	95,44	112.935.845	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.244.798.548		2.285.018.152		1.029.080.185		1.018.757.332		1.016.422.602	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan (%)	0	87,80	45,45	2.244.798.548	47,30	2.285.018.152	49,75	1.029.080.185	50,55	1.018.757.332	52,15	1.016.422.602	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					156.613.852		159.419.871		100.039.570		99.917.155		67.761.507	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	0	52,80	77,61	156.613.852	78,39	159.419.871	79,08	100.039.570	79,69	99.917.155	80,23	67.761.507	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					520.532.821		529.859.103		393.024.845		389.082.356		388.190.679	
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (Persentase)	0	29,17	32,67	520.532.821	36,17	529.859.103	39,67	393.024.845	43,17	389.082.356	46,67	388.190.679	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah (Perusahaan)	161	50	245		329		413		497		581		Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					477.889.835		486.452.091		360.827.542		355.208.029		353.389.400	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan (Perusahaan)	544	1.558	1.924	477.889.835	2.044	486.452.091	2.044	360.827.542	2.044	355.208.029	2.044	353.389.400	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17.411.220.343		17.363.917.049		16.559.742.671		16.444.911.576		16.346.505.439	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14.713.502.241		14.617.864.476		14.522.848.357		14.428.449.843		14.334.664.919	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	95	95	95	14.713.502.241	95	14.617.864.476	95	14.522.848.357	95	14.428.449.843	95	14.334.664.919	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					590.021.610		600.592.908		445.491.893		441.023.099		440.012.387	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA (%)	8,056	9	10	590.021.610	11	600.592.908	12	445.491.893	13	441.023.099	14	440.012.387	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,62	50.52-52.29	50.70-52.75		50.88-53.22		51.07-53.68		51.44-54.15		51.62-54.61		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					775.681.538		789.579.267		585.673.187		579.798.214		578.469.466	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif (%)	100	100	100	775.681.538	100	789.579.267	100	585.673.187	100	579.798.214	100	578.469.466	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					412.270.746		421.448.998		286.786.820		282.906.708		282.029.184	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	60,5	60,5	70	412.270.746	70,5	421.448.998	80	286.786.820	80,5	282.906.708	90	282.029.184	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan kualitasÂ keluarga (%)	12,90	17,20	21,50		25,80		30,10		34,40		38,70		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					293.920.384		297.394.817		246.418.297		244.949.554		244.617.366	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemahaman data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan (%)	13,02	13,02	13,02	293.920.384	13,02	297.394.817	13,02	246.418.297	13,02	244.949.554	13,02	244.617.366	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					367.634.127		374.220.953		277.579.703		274.795.260		274.165.500	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	65,79	66,47	367.634.127	67,15	374.220.953	67,80	277.579.703	68,50	274.795.260	68,80	274.165.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA) (Persentase)	73,91	78,23	82,6		86,9		91,3		93,6		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					258.189.697		262.815.630		194.944.414		192.988.898		192.546.617	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	75,34	76,15	258.189.697	76,20	262.815.630	76,20	194.944.414	76,30	192.988.898	76,30	192.546.617	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	-	80	80		80		80		80		80		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					26.658.762.315		26.765.780.096		22.739.869.404		22.564.667.100		22.450.315.189	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.178.971.666		15.080.308.350		14.982.286.346		14.884.901.484		14.788.149.625	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	15.178.971.666	100	15.080.308.350	100	14.982.286.346	100	14.884.901.484	100	14.788.149.625	Dinas Pangan Aceh
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					2.190.419.725		2.229.665.034		1.653.861.848		1.637.271.720		1.633.519.513	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/KAP/TH)	156,55	153,14	156,74	2.190.419.725	157,49	2.229.665.034	158,24	1.653.861.848	158,99	1.637.271.720	159,74	1.633.519.513	Dinas Pangan Aceh
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					5.660.243.698		5.761.657.144		3.363.572.830		3.329.832.342		3.322.201.221	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	83,40	83,79	84,29	5.660.243.698	84,79	5.761.657.144	85,29	3.363.572.830	85,79	3.329.832.342	86,29	3.322.201.221	Dinas Pangan Aceh
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					2.140.637.458		2.178.990.829		1.616.274.079		1.600.060.999		1.596.394.070	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan (%)	11,42	10,00	10,38	2.140.637.458	9,68	2.178.990.829	8,99	1.616.274.079	8,3	1.600.060.999	6,92	1.596.394.070	Dinas Pangan Aceh
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					1.488.489.768		1.515.158.739		1.123.874.301		1.112.600.555		1.110.050.760	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100,00	95,00	95,00	1.488.489.768	95,00	1.515.158.739	95,00	1.123.874.301	95,00	1.112.600.555	95,00	1.110.050.760	Dinas Pangan Aceh
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					14.453.133.740		14.412.370.735		13.687.206.001		13.592.690.904		13.510.884.245	
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.275.028.176		12.195.240.493		12.115.971.429		12.037.217.615		11.958.975.701	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	12.275.028.176	100	12.195.240.493	100	12.115.971.429	100	12.037.217.615	100	11.958.975.701	Dinas Pertanahan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10.03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					65.469.654		66.642.661		49.432.427		48.936.563		48.824.413	
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum (Dokumen)	6,00	2,00	2,00	65.469.654	2,00	66.642.661	2,00	49.432.427	2,00	48.936.563	2,00	48.824.413	Dinas Pertanahan Aceh
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					25.583.780		26.042.159		19.316.863		19.123.093		19.079.267	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase legalisasi aset dan penataan akses hasil reforma agraria (%)	30	12	10	25.583.780	11	26.042.159	11	19.316.863	10	19.123.093	10	19.079.267	Dinas Pertanahan Aceh
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					31.644.381		32.211.347		23.892.880		23.653.207		23.599.000	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan (%)	52,63	10,53	10,53	31.644.381	10,53	32.211.347	10,53	23.892.880	10,53	23.653.207	5,26	23.599.000	Dinas Pertanahan Aceh
2.10.12 - PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANA					882.346.733		898.155.562		666.210.034		659.527.184		658.015.717	
Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin (Persil)	1.970	400	400	882.346.733	400	898.155.562	400	666.210.034	400	659.527.184	400	658.015.717	Dinas Pertanahan Aceh
2.10.13 - PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN					95.893.330		97.611.431		72.403.621		71.677.330		71.513.064	
Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan (%)	30,85	11,00	11,00	95.893.330	11,00	97.611.431	11,00	72.403.621	11,00	71.677.330	11,00	71.513.064	Dinas Pertanahan Aceh
2.10.14 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN					217.776.974		221.678.840		164.431.056		162.781.624		162.408.571	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri (%)	75,00	75,00	75,00	217.776.974	75,00	221.678.840	80,00	164.431.056	80,00	162.781.624	80,00	162.408.571	Dinas Pertanahan Aceh
2.10.16 - PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN					575.976.380		586.296.032		434.887.135		430.524.719		429.538.067	
Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan	Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh (%)	21,74	13,04	13,04	575.976.380	13,04	586.296.032	13,04	434.887.135	13,04	430.524.719	13,04	429.538.067	Dinas Pertanahan Aceh
2.10.17 - PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHA					283.414.332		288.492.210		140.660.556		139.249.569		138.930.445	
Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah (%)	80,00	85,00	85,00	283.414.332	85,00	288.492.210	90,00	140.660.556	90,00	139.249.569	100,00	138.930.445	Dinas Pertanahan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					113.644.882.114		113.308.779.672		108.597.802.763		107.851.211.274		107.198.203.043	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					98.344.486.556		97.705.247.394		97.070.163.286		96.439.207.224		95.812.352.377	
Terlaksananya operasional perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	95	95	95	98.344.486.556	95	97.705.247.394	95	97.070.163.286	95	96.439.207.224	95	95.812.352.377	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					185.112.466		188.429.088		139.767.936		138.365.904		138.048.805	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	80	80	80	185.112.466	80	188.429.088	80	139.767.936	80	138.365.904	80	138.048.805	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					9.020.562.788		9.182.182.395		6.810.915.952		6.742.594.665		6.727.142.368	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (Indeks)	83,24	86,86	86,91	9.020.562.788	86,96	9.182.182.395	87,01	6.810.915.952	87,07	6.742.594.665	87,13	6.727.142.368	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
	Indeks Kualitas Air Laut (IKA) (Indeks)	63,25	77,25	77,57		77,77		77,97		78,17		78,37		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
	Indeks Kualitas Udara (IKU) (Indeks)	91,93	92,43	92,93		93,43		93,93		94,43		94,93		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					186.294.675		218.635.094		115.838.105		114.676.116		114.413.308	
Meningkatnya ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	20,00	20,00	20,00	186.294.675	20,00	218.635.094	20,00	115.838.105	20,00	114.676.116	20,00	114.413.308	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					34.679.507		35.300.852		26.184.531		25.921.870		25.862.464	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (Ton)	7.851,20	7.851,20	7.855,00	34.679.507	7.860,00	35.300.852	7.865,00	26.184.531	7.870,00	25.921.870	7.875,00	25.862.464	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					54.996.123		55.981.477		41.524.457		41.107.919		41.013.710	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup (%)	42	35	35	54.996.123	35	55.981.477	35	41.524.457	35	41.107.919	35	41.013.710	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					210.068.373		213.832.126		158.610.729		157.019.681		156.659.832	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	50	50	210.068.373	50	213.832.126	50	158.610.729	50	157.019.681	50	156.659.832	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					96.502.376		98.231.390		72.863.477		72.132.573		71.967.264	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup (Angka)	12	6	6	96.502.376	6	98.231.390	6	72.863.477	6	72.132.573	6	71.967.264	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					36.129.938		36.777.271		27.279.669		27.006.023		26.944.132	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	80,00	80,00	10,00	36.129.938	10,00	36.777.271	10,00	27.279.669	10,00	27.006.023	10,00	26.944.132	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					5.476.049.312		5.574.162.585		4.134.654.621		4.093.179.299		4.083.798.783	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	48	52	55	5.476.049.312	56,5	5.574.162.585	58	4.134.654.621	59	4.093.179.299	61	4.083.798.783	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	-	22	26,88		31,75		36,63		41,5		46,38		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					12.042.739.833		11.982.246.189		11.717.714.824		11.639.607.754		11.566.241.384	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.314.382.081		11.240.838.598		11.167.773.147		11.095.182.621		11.023.063.934	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	97	98	98	11.314.382.081	98	11.240.838.598	98	11.167.773.147	98	11.095.182.621	98	11.023.063.934	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					202.401.366		206.027.750		152.821.805		151.288.828		150.942.112	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	12,05	15,51	22,9	202.401.366	28,02	206.027.750	34,19	152.821.805	41	151.288.828	41	150.942.112	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (Persentase)	53,46	54,00	55,00		60,00		65,00		70,00		73,00		Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					160.267.553		163.139.035		121.008.950		119.795.092		119.520.552	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan (Persentase)	96,65	97,67	98	160.267.553	98,28	163.139.035	98,55	121.008.950	98,79	119.795.092	98,84	119.520.552	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					316.949.824		322.628.550		239.310.857		236.910.295		236.367.358	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	52,81	46,83	59,68	316.949.824	68,89	322.628.550	77,62	239.310.857	86,67	236.910.295	86,67	236.367.358	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					48.739.009		49.612.256		36.800.065		36.430.918		36.347.428	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	48.739.009	100	49.612.256	100	36.800.065	100	36.430.918	100	36.347.428	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					21.051.965.022		21.031.610.074		19.672.404.539		19.531.814.685		19.419.864.024	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.281.363.153		16.175.534.293		16.070.393.320		15.965.935.763		15.862.157.181	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	16.281.363.153	100	16.175.534.293	100	16.070.393.320	100	15.965.935.763	100	15.862.157.181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					308.618.679		314.148.137		233.020.481		230.683.019		230.154.353	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase penataan wilayah Mukim dan Gampong yang difasilitasi (%)	0,00	0,00	0,00	308.618.679	20,00	314.148.137	40,00	233.020.481	60,00	230.683.019	80,00	230.154.353	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					116.758.776		118.850.720		88.157.938		87.273.613		87.073.604	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase pembinaan kerjasama gampong berbasis kawasan perdesaan (%)	0,00	0,00	0,00	116.758.776	20,00	118.850.720	40,00	88.157.938	60,00	87.273.613	80,00	87.073.604	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					834.413.465		849.363.483		630.018.338		623.698.533		622.269.176	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang sudah menggunakan pelayanan administrasi Pemerintahan secara digital melalui SIGAP (%)	41,00	42,00	43,00	834.413.465	46,00	849.363.483	51,00	630.018.338	56,00	623.698.533	61,00	622.269.176	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.510.810.949		3.573.713.441		2.650.814.462		2.624.223.757		2.618.209.710	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Peningkatan BUMG Maju (%)	2	3	4	3.510.810.949	6	3.573.713.441	8	2.650.814.462	10	2.624.223.757	12	2.618.209.710	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
	Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif (%)	46,00	46,50	47,00		47,50		48,00		48,50		49,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					199.129.065		202.696.818		150.350.977		148.842.888		148.501.772	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					79.651.626		81.078.728		60.140.431		59.537.154		59.400.710	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) (%)	2,32	2,31	2,30	79.651.626	2,28	81.078.728	2,27	60.140.431	2,26	59.537.154	2,25	59.400.710	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	62,70	62,90	63,20		63,40		63,70		63,90		64,10		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					79.651.626		81.078.725		60.140.431		59.537.154		59.400.710	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCR) (Persentase)	57,80	57,82	57,84	79.651.626	57,86	81.078.725	57,88	60.140.431	57,90	59.537.154	57,92	59.400.710	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) (Persentase)	16,50	15,80	15,10		14,50		13,90		13,30		12,80		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					39.825.813		40.539.365		30.070.115		29.768.580		29.700.352	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	13,90	13,80	13,62	39.825.813	13,50	40.539.365	13,40	30.070.115	13,20	29.768.580	13,10	29.700.352	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					128.830.760.135		129.764.256.732		91.042.831.393		90.325.805.295		89.936.454.710	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					56.302.966.214		55.936.996.934		55.573.406.453		55.212.179.312		54.853.300.146	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	56.302.966.214	100	55.936.996.934	100	55.573.406.453	100	55.212.179.312	100	54.853.300.146	Dinas Perhubungan Aceh
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					58.426.651.362		59.473.469.907		24.822.451.015		24.573.453.401		24.567.137.352	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan (Indeks)	76,76	84,58	76,96	58.426.651.362	77,16	59.473.469.907	77,36	24.822.451.015	77,56	24.573.453.401	77,96	24.567.137.352	Dinas Perhubungan Aceh
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					13.264.147.567		13.501.798.628		10.015.006.422		9.914.544.437		9.891.822.846	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan (Indeks)	77,34	76,1	78,49	13.264.147.567	79,83	13.501.798.628	81,18	10.015.006.422	82,52	9.914.544.437	83,87	9.891.822.846	Dinas Perhubungan Aceh
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					836.994.992		851.991.263		631.967.503		625.628.145		624.194.366	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Persentase Masyarakat Berkeselamatan di Daerah Perlintasan Sebidang Kereta Api dengan Jalan Provinsi (%)	0	0,58	20	836.994.992	25	851.991.263	30	631.967.503	35	625.628.145	40	624.194.366	Dinas Perhubungan Aceh
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					34.290.375.134		34.353.338.035		31.130.010.575		30.896.452.367		30.862.450.669	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22.583.257.307		22.436.466.135		22.290.629.105		22.145.740.016		22.131.792.706	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	22.583.257.307	100	22.436.466.135	100	22.290.629.105	100	22.145.740.016	100	22.131.792.706	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.280.689.863		4.357.386.121		3.232.106.417		3.199.684.688		3.192.351.831	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) (Indeks)	81,33	79,65	81,2	4.280.689.863	81,5	4.357.386.121	81,7	3.232.106.417	81,8	3.199.684.688	82	3.192.351.831	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					7.426.427.964		7.559.485.779		5.607.275.053		5.551.027.663		5.538.306.132	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,82	1,85	2,06	7.426.427.964	2,25	7.559.485.779	2,5	5.607.275.053	2,75	5.551.027.663	3	5.538.306.132	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					53.384.835.609		53.779.695.820		41.507.133.017		41.170.938.430		41.112.663.913	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					23.001.587.732		22.852.077.411		22.703.538.908		22.555.965.905		22.509.352.127	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	23.001.587.732	100	22.852.077.411	100	22.703.538.908	100	22.555.965.905	100	22.509.352.127	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					1.266.223.753		1.288.910.429		956.053.825		946.463.510		944.294.459	
Meningkatnya layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi Berizin (Persentase)	2,40	2,43	1,11	1.266.223.753	1,31	1.288.910.429	1,45	956.053.825	1,50	946.463.510	1,60	944.294.459	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					1.031.079.855		1.049.553.505		778.509.988		770.700.642		768.934.393	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Sehat (%)	37	38	39	1.031.079.855	40	1.049.553.505	41	778.509.988	42	770.700.642	43	768.934.393	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					948.705.252		965.703.013		716.313.592		709.128.147		707.503.007	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kapasitas SDM (Koperasi)	150	-	200	948.705.252	250	965.703.013	300	716.313.592	350	709.128.147	400	707.503.007	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					2.215.493.579		2.255.188.131		1.672.793.695		1.656.013.658		1.652.218.500	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya (Koperasi)	5	-	6	2.215.493.579	4	2.255.188.131	5	1.672.793.695	5	1.656.013.658	5	1.652.218.500	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					19.401.724.480		19.749.341.270		10.512.067.890		10.406.619.809		10.404.770.508	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan Daerah (Rasio)	3,94	4,00	4,02	19.401.724.480	4,04	19.749.341.270	4,07	10.512.067.890	4,10	10.406.619.809	4,11	10.404.770.508	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.520.020.958		5.618.922.061		4.167.855.119		4.126.046.759		4.125.590.919	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil (Persentase)	25,1	1	1,1	5.520.020.958	1,15	5.618.922.061	1,2	4.167.855.119	1,25	4.126.046.759	1,3	4.125.590.919	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					23.831.446.842		23.711.385.752		23.191.577.330		23.037.027.395		22.891.775.478	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22.404.424.628		22.258.795.868		22.114.113.695		21.970.371.956		21.827.564.538	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	22.404.424.628	100	22.258.795.868	100	22.114.113.695	100	21.970.371.956	100	21.827.564.538	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					182.606.929		185.878.661		137.876.148		136.493.092		136.180.285	
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) (triliun rupiah)	9,47	9,50	9,80	182.606.929	10,00	185.878.661	10,20	137.876.148	10,40	136.493.092	10,60	136.180.285	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					452.767.414		460.879.556		341.859.025		338.429.787		337.654.193	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi (Perusahaan)	100	100	200	452.767.414	300	460.879.556	350	341.859.025	400	338.429.787	450	337.654.193	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					445.664.597		453.649.480		336.496.091		333.120.650		332.357.223	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan (Indeks)	90,13	90,13	90,15	445.664.597	90,2	453.649.480	90,25	336.496.091	90,25	333.120.650	90,25	332.357.223	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					162.987.693		165.907.911		123.062.774		121.828.313		121.549.114	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM (Persentase)	10	10	10	162.987.693	10	165.907.911	10	123.062.774	10	121.828.313	10	121.549.114	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					182.995.581		186.274.276		138.169.597		136.783.597		136.470.125	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat di akses (%)	100	100	100	182.995.581	100	186.274.276	100	138.169.597	100	136.783.597	100	136.470.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					100.234.832.680		105.844.455.568		64.464.920.432		63.910.791.849		63.724.770.383	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					26.547.506.226		26.374.947.436		26.203.510.277		26.033.187.460		25.863.971.742	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	97	100	26.547.506.226	100	26.374.947.436	100	26.203.510.277	100	26.033.187.460	100	25.863.971.742	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.165.876.387		1.186.765.159		880.287.214		871.456.925		869.459.769	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina (%)	0,03	0,03	0,04	1.165.876.387	0,05	1.186.765.159	0,06	880.287.214	0,07	871.456.925	0,08	869.459.769	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					65.751.061.827		71.391.051.050		33.096.601.353		32.764.604.535		32.759.516.470	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase pembinaan olahraga (%)	55,73	55,73	57,57	65.751.061.827	60,6	71.391.051.050	63,63	33.096.601.353	68,18	32.764.604.535	72,72	32.759.516.470	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					6.770.388.240		6.891.691.923		4.284.521.588		4.241.542.929		4.231.822.402	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif (%)	95	95	95	6.770.388.240	96	6.891.691.923	97	4.284.521.588	98	4.241.542.929	100	4.231.822.402	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					299.515.026		304.881.377		226.146.829		223.878.317		223.365.246	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					299.515.026		304.881.377		226.146.829		223.878.317		223.365.246	
Meningkatnya Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,2	2,2	2,25	299.515.026	2,3	304.881.377	2,35	226.146.829	2,4	223.878.317	2,6	223.365.246	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					363.732.895		370.249.824		274.634.104		271.879.209		271.256.132	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					363.732.895		370.249.824		274.634.104		271.879.209		271.256.132	
Meningkatnya Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Indeks)	40	40	45	363.732.895	50	370.249.824	55	274.634.104	60	271.879.209	65	271.256.132	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					72.377.497.834		72.726.807.557		59.573.698.721		59.111.352.477		58.901.564.347	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					38.803.749.202		38.551.524.832		38.300.939.920		38.051.983.811		37.890.458.350	
terlaksananya operasional perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	9.768.491.047	100	9.704.995.855	100	9.641.913.382	100	9.579.240.945	100	9.516.975.879	Sekretariat Majelis Adat Aceh
terlaksananya operasional perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	29.035.258.155	100	28.846.528.977	100	28.659.026.538	100	28.472.742.866	100	28.373.482.471	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3.849.470.997		3.918.441.194		2.906.517.480		2.877.361.781		2.870.767.606	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0,86	0,88	0,9	3.849.470.997	0,91	3.918.441.194	0,96	2.906.517.480	0,98	2.877.361.781	1	2.870.767.606	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					536.439.075		546.050.346		405.034.757		400.971.794		400.052.870	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	14,75	1,64	4,92	536.439.075	6,56	546.050.346	9,84	405.034.757	11,48	400.971.794	12,30	400.052.870	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					1.057.596.640		1.076.545.386		798.531.311		790.521.127		788.709.455	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	persentase masyarakat penerima akses informasi sejarah (Persentase)	0,01	2,19	4,38	1.057.596.640	8,77	1.076.545.386	13,25	798.531.311	17,54	790.521.127	21,92	788.709.455	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					7.612.514.182		7.748.906.066		4.092.948.147		4.051.891.189		4.042.605.295	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	61,49	61,63	61,86	7.612.514.182	62,89	7.748.906.066	63,62	4.092.948.147	64,14	4.051.891.189	64,65	4.042.605.295	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					19.645.590.266		19.997.576.350		12.411.225.507		12.286.726.701		12.258.568.676	
Meningkatnya tata kelola museum	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ke museum (%)	-1,54	0,5	0,5	19.645.590.266	0,5	19.997.576.350	0,5	12.411.225.507	0,5	12.286.726.701	0,5	12.258.568.676	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22.07 - PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)					872.137.472		887.763.383		658.501.599		651.896.074		650.402.095	
Meningkatnya Peran Lembaga Adat Aceh	Indeks Adat Istiadat Aceh (Indeks)	5,80	8	15	872.137.472	30	887.763.383	45	658.501.599	60	651.896.074	65	650.402.095	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					43.205.441.037		43.188.846.893		39.410.453.552		39.127.990.099		39.004.681.583	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					32.383.333.386		32.172.841.719		31.963.718.248		31.755.954.079		31.649.540.377	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	100	32.383.333.386	100	32.172.841.719	100	31.963.718.248	100	31.755.954.079	100	31.649.540.377	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					10.627.309.713		10.817.717.081		7.312.694.069		7.239.339.372		7.222.748.664	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	72,42	0,02	74,25	10.627.309.713	75,50	10.817.717.081	77	7.312.694.069	78,50	7.239.339.372	79	7.222.748.664	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					194.797.938		198.288.093		134.041.235		132.696.648		132.392.542	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rasio Naskah Kuno (Rasio)	0,05	0,02	0,06	194.797.938	0,07	198.288.093	0,08	134.041.235	0,08	132.696.648	0,09	132.392.542	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.798.860.548		1.831.090.371		1.358.217.696		1.344.593.216		1.341.511.754	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.573.289.373		1.601.477.682		1.187.901.680		1.175.985.665		1.173.290.608	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Indeks Pengawasan Kearsipan (Rasio)	75,77	67,00	77,00	1.573.289.373	80,00	1.601.477.682	83,00	1.187.901.680	85,00	1.175.985.665	87,00	1.173.290.608	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					112.100.962		114.109.453		84.641.086		83.792.039		83.600.009	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat Digitalisasi Arsip (Index)	93,54	0,01	94,50	112.100.962	95,00	114.109.453	96,00	84.641.086	97,00	83.792.039	98,00	83.600.009	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					113.470.213		115.503.236		85.674.930		84.815.512		84.621.137	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Rasio arsip yang dimanfaatkan (Rasio)	0,05	0,01	0,50	113.470.213	0,70	115.503.236	0,75	85.674.930	0,80	84.815.512	0,85	84.621.137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					61.235.869.589		61.284.703.598		52.886.772.867		52.505.900.523		52.209.392.542	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					42.934.241.820		42.655.169.249		42.377.910.649		42.102.454.229		41.828.788.277	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	42.934.241.820	100	42.655.169.249	100	42.377.910.649	100	42.102.454.229	100	41.828.788.277	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					199.129.066		202.696.821		150.351.077		148.842.884		148.501.774	
Meningkatnya nilai hasil perikanan yang diterima oleh nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	104,71	105,92	107,13	199.129.066	108,34	202.696.821	109,55	150.351.077	110,76	148.842.884	111,97	148.501.774	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					8.028.606.753		8.172.453.683		4.407.116.076		4.362.907.654		4.352.908.990	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	270.260,17	273.000	274.000	8.028.606.753	276.000	8.172.453.683	278.000	4.407.116.076	280.000	4.362.907.654	282.000	4.352.908.990	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					7.377.576.152		7.509.758.699		3.915.559.750		3.876.282.201		3.867.398.757	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	91.116,55	91.500	92.000	7.377.576.152	92.500	7.509.758.699	93.000	3.915.559.750	93.500	3.876.282.201	94.000	3.867.398.757	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					149.346.799		152.022.616		112.763.308		111.632.163		111.376.330	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	149.691,39	149.691,39	149.691,39	149.346.799	149.691,39	152.022.616	149.691,39	112.763.308	149.691,39	111.632.163	149.691,39	111.376.330	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					2.546.968.999		2.592.602.530		1.923.072.007		1.903.781.392		1.900.418.414	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	65,93	59	59,52	2.546.968.999	59,65	2.592.602.530	59,73	1.923.072.007	59,87	1.903.781.392	59,94	1.900.418.414	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					9.917.997.433		10.095.696.196		7.488.518.013		7.413.399.601		7.396.409.992	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					0		0		0		0		0	
terlaksananya operasional perkantoran					0		0		0		0		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.518.696.115		4.599.656.683		3.411.811.455		3.377.587.079		3.369.846.516	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara (Persentase)	44,41	15	18	4.518.696.115	21	4.599.656.683	24	3.411.811.455	27	3.377.587.079	30	3.369.846.516	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					5.099.735.944		5.191.106.886		3.850.521.714		3.811.896.571		3.803.160.683	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	44,41	55	58	5.099.735.944	61	5.191.106.886	64	3.850.521.714	67	3.811.896.571	70	3.803.160.683	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					52.313.637		53.250.930		39.499.064		39.102.843		39.013.229	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	29,7	30,29	30,9	52.313.637	31,51	53.250.930	32,14	39.499.064	32,79	39.102.843	33,44	39.013.229	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					247.251.737		251.681.697		186.685.780		184.813.108		184.389.564	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	0,03	0,04	0,05	247.251.737	0,06	251.681.697	0,07	186.685.780	0,08	184.813.108	0,09	184.389.564	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					333.173.989.247		335.584.251.242		267.463.821.213		265.288.905.514		264.079.393.087	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					145.766.417.952		144.818.936.236		143.877.613.150		142.942.408.664		142.013.283.008	
terlaksananya operasional perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	108.177.251.000	100	107.474.098.869	100	106.775.517.226	100	106.081.476.364	100	105.391.946.768	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
terlaksananya operasional perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	37.589.166.952	100	37.344.837.367	100	37.102.095.924	100	36.860.932.300	100	36.621.336.240	Dinas Peternakan Aceh
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					110.229.145.038		112.204.098.429		73.666.017.310		72.927.062.785		72.759.932.673	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi) (Ton/Ha)	5,54	5,55	5,56	105.811.200.779	5,57	107.706.998.753	5,58	70.330.277.874	5,59	69.624.784.636	5,6	69.465.222.498	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas) (Ton)	63.011	14,08	12.500	4.417.944.259	12.670	4.497.099.676	12.700	3.335.739.436	12.715	3.302.278.149	12.810	3.294.710.175	Dinas Peternakan Aceh
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					59.944.143.801		61.018.150.953		36.986.276.848		36.615.262.129		36.531.349.346	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (%)	35	37	39	56.957.207.813	43	57.977.698.634	48	34.731.010.691	52	34.382.618.875	56	34.303.822.737	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh) (Ton)	16.984	23,58	344	2.986.935.988	564.655	3.040.452.319	564.655	2.255.266.157	564.655	2.232.643.254	564.655	2.227.526.609	Dinas Peternakan Aceh
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3.225.743.205		3.283.538.197		2.435.575.958		2.411.144.342		2.405.618.618	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak (%)	0,13	0,12	0,11	3.225.743.205	0,1	3.283.538.197	0,09	2.435.575.958	0,08	2.411.144.342	0,07	2.405.618.618	Dinas Peternakan Aceh
	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak (%)	8,74	8,66	7,87		7,08		6,37		5,73		5,16		Dinas Peternakan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak (%)	8,91	7,92	7,2		6,48		5,83		5,25		4,73		Dinas Peternakan Aceh
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					597.387.198		608.090.464		372.336.765		368.601.801		367.757.060	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Keberhasilan Panen (%)	95,2	95	95,3	597.387.198	95,4	608.090.464	95,5	372.336.765	95,6	368.601.801	95,7	367.757.060	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					2.887.984.972		2.939.728.417		2.180.553.850		2.158.680.397		2.153.733.256	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina (%)	80	83	90	2.887.984.972	95	2.939.728.417	97	2.180.553.850	98	2.158.680.397	100	2.153.733.256	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					10.523.167.081		10.711.708.546		7.945.447.332		7.865.745.396		7.847.719.126	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya (Surat Keputusan)	604	11,45	60	7.477.296.424	60	7.611.265.638	60	5.645.682.946	60	5.589.050.280	60	5.576.241.611	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Indek Terima Peternak (ItPt) (Indeks)	105,55	105,11	106,43	3.045.870.657	106,66	3.100.442.908	106,73	2.299.764.386	106,84	2.276.695.116	107	2.271.477.515	Dinas Peternakan Aceh
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					113.177.674.272		127.600.057.815		71.412.817.273		70.696.464.926		70.664.446.771	
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					92.961.042.913		107.021.209.144		57.803.214.262		57.223.381.820		57.222.240.514	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (%)	0,19	0,3	0,3	92.961.042.913	0,3	107.021.209.144	0,3	57.803.214.262	0,3	57.223.381.820	0,3	57.222.240.514	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
	Indek Tutupan Lahan (IKL) (Indeks)	76,6	86,94	87,01		87,08		87,15		87,22		87,22		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (%)	2,5	2,5	0,5		0,7		0,9		1		1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					3.628.179.720		3.693.185.085		2.739.432.972		2.711.953.322		2.705.738.221	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Persentase)	0	0,592	0,60	3.628.179.720	0,60	3.693.185.085	0,60	2.739.432.972	0,60	2.711.953.322	0,61	2.705.738.221	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					16.538.669.373		16.834.989.381		10.832.582.270		10.723.919.063		10.699.342.593	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	15	15	15	16.538.669.373	15	16.834.989.381	15	10.832.582.270	15	10.723.919.063	15	10.699.342.593	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan (%)	10	10	10		10		10		10		10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					49.782.266		50.674.205		37.587.769		37.210.721		37.125.443	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rehalibitasi lahan di sempadan sungai (Hektar)	0	100	15	49.782.266	15	50.674.205	15	37.587.769	15	37.210.721	15	37.125.443	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					126.075.936.056		127.747.000.141		83.889.728.245		83.132.125.895		82.972.261.034	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.125.257.177		27.469.626.272		24.864.935.060		25.088.390.791		25.346.718.520	
Terlaksananya operasional perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	27.125.257.177	100	27.469.626.272	100	24.864.935.060	100	25.088.390.791	100	25.346.718.520	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					1.450.000.000		1.490.000.000		1.634.000.000		1.792.400.000		1.792.400.000	
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (KmÂ²)	3.086	5.002	6.200	1.450.000.000	7.053	1.490.000.000	7.644	1.634.000.000	8.769	1.792.400.000	9.894	1.792.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					1.744.780.000		1.706.080.000		1.695.400.000		2.066.174.000		1.907.394.800	
Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB (%)	7,05	4,6	4,75	1.744.780.000	4,9	1.706.080.000	5,05	1.695.400.000	5,2	2.066.174.000	5,35	1.907.394.800	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					61.538.398.879		71.526.293.869		37.070.393.185		42.490.161.104		47.428.247.714	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik (%)	6,15	13,23	20,86	61.538.398.879	21,38	71.526.293.869	20,39	37.070.393.185	25,55	42.490.161.104	31,47	47.428.247.714	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					34.217.500.000		25.555.000.000		18.625.000.000		11.695.000.000		6.497.500.000	
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) (kWh)	641	650	714,5	34.217.500.000	779	25.555.000.000	843,5	18.625.000.000	908	11.695.000.000	972,5	6.497.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					36.249.830.750		36.243.655.148		33.599.986.252		33.356.531.966		33.169.273.645	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					26.852.681.636		26.678.139.205		26.504.731.300		26.332.450.547		26.161.289.618	
Miningkatnya operasional Kantor	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	26.852.681.636	100	26.678.139.205	100	26.504.731.300	100	26.332.450.547	100	26.161.289.618	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					593.250.474		603.879.623		447.929.825		443.436.576		442.420.333	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan (%)	100	100	100	593.250.474	100	603.879.623	100	447.929.825	100	443.436.576	100	442.420.333	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					691.035.009		703.416.144		521.761.388		516.527.524		515.343.776	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Menjamin ketersediaan stok bapokting dan keterjangkauan harga (%)	10	15	20	691.035.009	25	703.416.144	60	521.761.388	80	516.527.524	100	515.343.776	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					5.469.603.001		5.567.600.777		4.129.787.377		4.088.360.879		4.078.991.405	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi (Persentase)	7,23	7,09	6,95	5.469.603.001	6,81	5.567.600.777	6,67	4.129.787.377	6,53	4.088.360.879	6,39	4.078.991.405	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					521.430.915		530.773.288		393.702.945		389.753.654		388.860.438	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase peningkatan ekspor (Persentase)	10,77	4,00	4,00	0	4,00	0	4,00	0	4,00	0	4,00	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Nilai Ekspor bersih Aceh (USD)	220.434.197	229.251.565	238.421.628	521.430.915	247.958.493	530.773.288	258.203.769	393.702.945	268.531.920	389.753.654	279.273.197	388.860.438	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.884.870.453		1.918.641.297		1.423.158.902		1.408.882.988		1.405.654.190	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	1.884.870.453	100	1.918.641.297	100	1.423.158.902	100	1.408.882.988	100	1.405.654.190	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					236.959.262		241.204.814		178.914.515		177.119.798		176.713.885	
Meningkatnya kualitas penzinan berusaha sektor perindustrian	Proporsi penggunaan produk lokal dalam promosi yang difasilitasi (%) (%)	100	100	100	236.959.262	100	241.204.814	100	178.914.515	100	177.119.798	100	176.713.885	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					8.967.404.181		9.128.071.354		6.658.035.681		6.591.247.957		6.576.142.508	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					8.916.128.436		9.075.876.913		6.619.320.271		6.552.920.907		6.537.903.294	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri dan sertifikasi halal	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	44.577	41.695	42.202	8.916.128.436	42.703	9.075.876.913	43.173	6.619.320.271	43.573	6.552.920.907	43.973	6.537.903.294	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) (%)	0,54	0,56	0,59		0,62		0,65		0,69		0,72		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					25.641.004		26.100.408		19.360.069		19.165.866		19.121.942	
Meningkatnya kualitas penzinan berusaha sektor perindustrian	Persentase jumlah izin yang dikeluarkan (%)	100	100	100	25.641.004	100	26.100.408	100	19.360.069	100	19.165.866	100	19.121.942	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.634.741		26.094.033		19.355.341		19.161.184		19.117.272	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri (%)	70	20	80	25.634.741	90	26.094.033	100	19.355.341	100	19.161.184	100	19.117.272	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					949.531.021		966.543.577		616.897.513		611.828.228		611.182.984	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					89.608.080		91.213.570		67.657.985		66.979.298		66.825.798	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	35,71	35,71	38,17	89.608.080	40,63	91.213.570	43,09	67.657.985	45,55	66.979.298	50,00	66.825.798	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					258.867.786		263.505.868		195.456.400		193.495.749		193.052.306	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	35,71	35,71	38,17	258.867.786	40,63	263.505.868	43,09	195.456.400	45,55	193.495.749	50,00	193.052.306	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					601.055.155		611.824.139		353.783.128		351.353.181		351.304.880	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan (%)	35,71	35,71	38,17	601.055.155	40,63	611.824.139	43,09	353.783.128	45,55	351.353.181	50,00	351.304.880	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					222.740.893.737		221.936.466.906		213.741.441.718		212.281.868.133		210.984.921.866	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					196.390.634.228		195.114.095.106		193.845.853.488		192.585.855.440		191.334.047.380	
Terlaksananya Operasional Perkantoran Sekretariat Daerah	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	100	196.390.634.228	100	195.114.095.106	100	193.845.853.488	100	192.585.855.440	100	191.334.047.380	Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	98		100		100		100		100		Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Aceh
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					751.279.212		764.739.730		567.248.374		561.558.223		560.271.275	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi (%)	86	87	88	751.279.212	89	764.739.730	90	567.248.374	91	561.558.223	92	560.271.275	Sekretariat Daerah Aceh
														Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					2.050.381.334		2.087.117.603		1.548.126.793		1.532.597.308		1.529.084.988	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah					2.050.381.334		2.087.117.603		1.548.126.793		1.532.597.308		1.529.084.988	Sekretariat Daerah Aceh
	Nilai LPPD (Persentase)	-	2,9	2,95		2,955		2,96		2,965		2,97		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase kerjasama daerah (%)	-	20,00	40,00		55,00		70,00		85,00		100,00		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase segmen batas daerah yang dievaluasi (%)	-	16,67	33,33		50		66,67		83,33		100		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.787.446.037		8.944.888.938		6.634.902.699		6.568.347.026		6.553.294.061	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat					8.787.446.037		8.944.888.938		6.634.902.699		6.568.347.026		6.553.294.061	Sekretariat Daerah Aceh
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	-	75	75		75		75		75		75		Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					3.841.424.281		3.910.250.306		2.900.441.860		2.871.347.106		2.864.766.716	
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan					3.841.424.281		3.910.250.306		2.900.441.860		2.871.347.106		2.864.766.716	Sekretariat Daerah Aceh
	Indeks penyelesaian fasilitas perundang-undangan (%)	85	85	85		85		85		85		85		Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase penyelesaian bantuan hukum (Persentase)	85	85	85		85		85		85		85		Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.599.799.204		1.628.462.484		1.207.917.751		1.195.800.953		1.193.060.484	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase perumusan bahan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	100	99	99	1.599.799.204	99	1.628.462.484	99	1.207.917.751	99	1.195.800.953	99	1.193.060.484	Sekretariat Daerah Aceh/ Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					7.972.752.249		8.115.598.445		6.019.773.572		5.959.388.348		5.945.730.959	
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa					7.972.752.249		8.115.598.445		6.019.773.572		5.959.388.348		5.945.730.959	Sekretariat Daerah Aceh
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (%)	81,84	100	82		83,25		84,5		85,15		86,1		Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Aceh
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					1.347.177.192		1.371.314.294		1.017.177.181		1.006.973.729		1.004.666.003	
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan					1.347.177.192		1.371.314.294		1.017.177.181		1.006.973.729		1.004.666.003	Sekretariat Daerah Aceh
	Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan pembangunan (%)	85	86	87		88		89		90		90,5		Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					262.421.537.493		263.104.114.506		233.018.627.747		231.254.903.681		230.045.638.351	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					116.863.974.682		110.647.592.692		111.249.253.301		127.169.253.301		112.709.253.301	
Terlaksananya Opersasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	95	95	95	116.863.974.682	95	110.647.592.692	95	111.249.253.301	95	127.169.253.301	95	112.709.253.301	Sekretariat DPR Aceh
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					145.557.562.811		152.456.521.814		121.769.374.446		104.085.650.380		117.336.385.050	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan serta penganggaran dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA (%)	95	95	95	145.557.562.811	95	152.456.521.814	95	121.769.374.446	95	104.085.650.380	95	117.336.385.050	Sekretariat DPR Aceh
5.01 - PERENCANAAN					52.705.776.582		52.780.974.046		47.225.782.995		46.876.117.513		46.621.797.695	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					35.595.220.078		35.363.851.147		35.133.986.115		34.905.615.205		34.678.728.706	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Persentase Kebutuhan Operasional Perkantoran yang terpenuhi (%)	100	100	100	35.595.220.078	100	35.363.851.147	100	35.133.986.115	100	34.905.615.205	100	34.678.728.706	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					12.605.631.935		12.831.484.504		8.690.383.539		8.603.209.039		8.583.492.692	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan (%)	90	100	100	12.605.631.935	100	12.831.484.504	100	8.690.383.539	100	8.603.209.039	100	8.583.492.692	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4.504.924.569		4.585.638.395		3.401.413.341		3.367.293.269		3.359.576.297	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	4.504.924.569	100	4.585.638.395	100	3.401.413.341	100	3.367.293.269	100	3.359.576.297	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
5.02 - KEUANGAN					2.006.519.147.026		1.966.954.023.322		992.672.980.218		972.838.783.958		971.215.436.564	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					130.224.560.302		129.378.100.660		128.537.143.006		127.701.651.577		126.871.590.841	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	130.224.560.302	100	129.378.100.660	100	128.537.143.006	100	127.701.651.577	100	126.871.590.841	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1.846.364.553.722		1.807.109.639.287		841.537.364.810		822.765.348.539		821.993.332.269	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Penetapan APBA tepat waktu (Indeks kualitas pelayanan keuangan) (Indeks)	-	3	3,2	1.846.364.553.722	3,5	1.807.109.639.287	3,8	841.537.364.810	3,9	822.765.348.539	3,95	821.993.332.269	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					4.412.900.503		4.491.965.552		3.331.931.182		3.298.508.096		3.290.948.762	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan (%)	88,80	88,80	90,80	4.412.900.503	90,82	4.491.965.552	90,84	3.331.931.182	90,86	3.298.508.096	90,88	3.290.948.762	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					25.517.132.499		25.974.317.823		19.266.541.220		19.073.275.746		19.059.564.692	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase kemandirian fiskal Aceh (%)	-	26,8	27,66	25.517.132.499	27,8	25.974.317.823	47,14	19.266.541.220	48,41	19.073.275.746	48,41	19.059.564.692	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.03 - KEPEGAWAIAN					206.808.008.779		205.496.036.738		203.891.177.096		202.563.430.198		201.249.663.421	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					205.863.678.549		204.525.564.638		203.196.148.468		201.875.373.503		200.563.183.575	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	98	98	98	205.863.678.549	98	204.525.564.638	98	203.196.148.468	98	201.875.373.503	98	200.563.183.575	Badan Kepegawaian Aceh
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					944.330.230		970.472.100		695.028.628		688.056.695		686.479.846	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA (%)	98,2	85	98	944.330.230	98	970.472.100	98	695.028.628	98	688.056.695	98	686.479.846	Badan Kepegawaian Aceh
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					80.428.801.244		81.134.746.892		67.711.684.472		67.137.388.273		66.859.289.224	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					30.105.543.227		29.909.857.196		29.715.443.124		29.522.292.744		29.330.397.841	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	95	95	95	30.105.543.227	95	29.909.857.196	95	29.715.443.124	95	29.522.292.744	95	29.330.397.841	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					50.323.258.017		51.224.889.696		37.996.241.348		37.615.095.529		37.528.891.383	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal (Orang)	115	85	150	50.323.258.017	175	51.224.889.696	200	37.996.241.348	210	37.615.095.529	230	37.528.891.383	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0,3	0,85	1,8		3,3		4,8		6,3		8,1		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.039.346.001		2.075.884.553		1.539.794.638		1.524.348.734		1.520.855.318	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.029.346.001		1.055.884.553		779.794.638		769.348.734		770.855.318	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah	Indeks Kematangan Organisasi Kelitbangan (Indeks)	51,81	0	55,00	1.029.346.001	57,00	1.055.884.553	59,00	779.794.638	60,00	769.348.734	62,00	770.855.318	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	0	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.010.000.000		1.020.000.000		760.000.000		755.000.000		750.000.000	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah serta fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	-	-	82	1.010.000.000	85	1.020.000.000	89	760.000.000	92	755.000.000	95	750.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
	Persentase kajian berabasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah (%)	-	-	82		85		89		92		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					35.223.521.933		35.068.934.499		34.060.512.746		33.830.999.152		33.620.677.936	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31.548.521.933		31.393.934.499		30.385.512.746		30.155.999.152		29.945.677.936	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	31.548.521.933	100	31.393.934.499	100	30.385.512.746	100	30.155.999.152	100	29.945.677.936	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					3.675.000.000		3.675.000.000		3.675.000.000		3.675.000.000		3.675.000.000	
Meningkatnya pelayanan kepada KDH/WKDH dan masyarakat	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA (%)	100	95	70	3.675.000.000	75	3.675.000.000	80	3.675.000.000	85	3.675.000.000	90	3.675.000.000	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					51.645.229.669		51.623.062.868		47.997.010.572		47.650.794.716		47.381.455.321	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					38.804.594.950		38.552.365.083		38.301.774.710		38.052.813.174		37.805.469.889	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	100	100	38.804.594.950	100	38.552.365.083	100	38.301.774.710	100	38.052.813.174	100	37.805.469.889	Inspektorat Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.029.851.422		7.155.803.854		5.307.842.572		5.254.598.832		5.242.556.640	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal (%)	75,28	75	80	7.029.851.422	83,5	7.155.803.854	85	5.307.842.572	87,5	5.254.598.832	90	5.242.556.640	Inspektorat Aceh
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					5.810.783.297		5.914.893.931		4.387.393.290		4.343.382.710		4.333.428.792	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Aparatur yang memenuhi kompetensi (Level)	3	3	3	5.810.783.297	3	5.914.893.931	3	4.387.393.290	3	4.343.382.710	3	4.333.428.792	Inspektorat Aceh
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					49.515.103.929		51.871.791.248		40.941.058.581		40.586.199.818		40.567.087.135	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.017.418.964		15.913.305.741		15.809.869.253		15.707.105.103		15.705.008.920	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Persentase Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran (%)	95	95	95	16.017.418.964	95	15.913.305.741	95	15.809.869.253	95	15.707.105.103	95	15.705.008.920	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.375.893.750		2.418.462.160		1.793.902.778		1.775.907.878		1.773.837.953	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan (%)	31	25	42	2.375.893.750	46	2.418.462.160	52	1.793.902.778	57	1.775.907.878	62	1.773.837.953	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					28.636.779.128		31.010.487.800		21.460.994.698		21.245.716.341		21.235.026.612	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pendidikan politik (%)	10	12	17	28.636.779.128	23	31.010.487.800	33	21.460.994.698	43	21.245.716.341	54	21.235.026.612	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					459.567.221		467.801.194		346.993.174		343.512.435		342.725.193	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Jumlah LSM/ORMAS yang terdaftar (Organisasi Masyarakat)	10	12	15	459.567.221	20	467.801.194	26	346.993.174	30	343.512.435	35	342.725.193	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					786.695.803		800.790.873		593.989.435		588.031.041		586.683.424	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka Pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya (%)	44,98	95,00	52,00	786.695.803	55,00	800.790.873	57,00	593.989.435	59,00	588.031.041	61,00	586.683.424	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.238.749.063		1.260.943.480		935.309.243		925.927.020		923.805.033	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase penanganan potensi konflik sosial (%)	75	20	80	1.238.749.063	82	1.260.943.480	84	935.309.243	86	925.927.020	88	923.805.033	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.01 - KEKHUSUSAN ACEH					395.211.864.707		415.628.217.901		271.418.579.947		268.973.635.726		268.028.424.188	
9.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					86.220.533.297		84.504.591.800		83.044.005.071		82.068.087.324		82.296.548.604	
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	95	95	95	35.377.421.678	95	33.978.960.407	95	32.833.790.282	95	32.171.238.931	95	32.711.029.725	Dinas Syariat Islam Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	95	95	95	10.215.808.672	95	10.149.405.915	95	10.083.434.777	95	10.017.892.451	95	9.952.776.150	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	90	95	91	12.618.521.171	92	12.536.500.783	93	12.455.013.528	94	12.374.055.940	95	12.293.624.577	Sekretariat Baitul Mal Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	0	0	95	10.631.112.154	95	10.575.009.925	95	10.519.272.360	95	10.463.897.090	95	10.408.881.759	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
Terlaksananya Operasional Perkantoran	Lancarnya Kebutuhan Operasional perkantoran (%)	100	95	100	17.377.669.622	100	17.264.714.770	100	17.152.494.124	100	17.041.002.912	100	16.930.236.393	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
9.01.02 - PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH					12.570.969.491		14.075.720.392		8.039.814.945		8.399.814.945		7.639.814.945	
Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Masyarakat	Indeks kesadaran masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam (%)	83	83,5	84	12.570.969.491	85	14.075.720.392	86	8.039.814.945	87	8.399.814.945	88	7.639.814.945	Dinas Syariat Islam Aceh
9.01.03 - PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH					6.575.044.519		6.692.848.268		4.964.443.644		4.914.644.589		4.903.381.485	
Meningkatnya Peran Ulama Dalam Pembangunan	Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan (%)	94,11	95	96	6.575.044.519	97	6.692.848.268	98	4.964.443.644	98,5	4.914.644.589	99	4.903.381.485	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
9.01.04 - PROGRAM BAITUL MAL ACEH					251.992.717.886		271.788.426.929		148.934.706.087		147.440.720.406		147.102.824.113	
Meningkatnya Pengelolaan Ziswaf untuk penguatan ekonomi ummat	Indeks Wakaf Nasional Aceh (Indeks)	0,65	0,68	0,71	251.992.717.886	0,71	271.788.426.929	0,77	148.934.706.087	0,80	147.440.720.406	0,83	147.102.824.113	Sekretariat Baitul Mal Aceh
	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya (%)	80	85	90		91		92		93		94		Sekretariat Baitul Mal Aceh
9.01.05 - PROGRAM REINTEGRASI ACEH					22.855.909.067		23.301.247.383		16.767.288.865		16.579.031.463		16.536.453.090	
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi dan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi (%)	6,36	14,05	15,28	22.855.909.067	16,11	23.301.247.383	17,21	16.767.288.865	18,17	16.579.031.463	19,18	16.536.453.090	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
	Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial (%)	12,67	13,63	14,90		15,43		17,57		18,86		19,61		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
	Persentase korban pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh (%)	-	-	19,08		22,49		20,61		15,33		22,49		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
9.01.06 - PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH					14.996.690.447		15.265.383.129		9.668.321.335		9.571.336.999		9.549.401.951	
Meningkatnya Peran Lembaga Wali Nanggroe Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe (Indeks)	85,00	87,00	90,00	14.996.690.447	92,00	15.265.383.129	93,50	9.668.321.335	96,00	9.571.336.999	98,00	9.549.401.951	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
TOTAL KESELURUHAN					10.958.510.304.540		11.155.251.726.580		8.274.150.338.168		8.191.151.133.679		8.172.379.117.410	

4.2. Kinerja Penyelenggara Pemerintah Aceh

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Aceh merupakan cerminan dari kemampuan pemerintahan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik. Penilaian terhadap kinerja tersebut dilakukan secara sistematis melalui penetapan indikator dan target yang terukur serta relevan dengan tujuan pembangunan jangka menengah Aceh.

Salah satu instrumen utama dalam mengukur penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** yang dijabarkan ke dalam **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. IKU merupakan indikator terpilih yang digunakan untuk menggambarkan secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator ini bersifat strategis, terukur, dan relevan dengan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah. Indikator yang digunakan merupakan indikator yang telah diseleksi dan dianggap paling representatif dalam menggambarkan capaian kinerja pembangunan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 4.2.**

Selain IKU, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Aceh juga dievaluasi melalui **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** yang mencerminkan capaian kinerja secara lebih luas dengan mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. IKD berfungsi untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan secara umum dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). IKD disusun berdasarkan dimensi-dimensi kinerja seperti efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD ini berlaku untuk periode perencanaan tahun **2025 hingga tahun 2030**. Tahun 2030 menjadi tahun transisi dalam siklus pembangunan daerah, di mana pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun tersebut akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, perumusan target tahun 2030 tetap disusun secara terukur, realistis, dan mempertimbangkan kesinambungan kebijakan lintas periode. Indikator Kinerja Daerah secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,4	5,9	6,3	6,6	6,7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
2	Rasio Gini	Indeks	0,290 - 0,293	0,287 - 0,291	0,284 - 0,289	0,281 - 0,287	0,278 - 0,285	0,275 - 0,283	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
4	Tingkat Kemiskinan	%	12,00-13,00	10,60-12,00	9,00-10,60	7,39-9,00	6,39-7,39	5,39-6,39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57	0,58	0,59	0,59	0,598	0,603	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
6	Peringkat Inovasi Daerah	Peringkat	13	12,6	12,2	11,8	11,4	11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
7	Indeks Williamson	Indeks	0,4	0,391	0,389	0,387	0,385	0,383	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,60-4,78	4,45-4,60	4,30-4,45	4,15-4,30	4,00-4,15	3,85-4,00	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
9	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	80,00 - 87,00	80,63 - 87,50	81,25 - 88,00	81,87 - 88,5	82,50 - 89,00	83,13 - 89-50	Dinas Syariat Islam Aceh
10	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	77,60-77,65	77,65-77,70	77,70-77,75	77,75-77,80	77,80-77,85	77,85-78,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	73,7 - 73,81	74,08 - 74,26	74,46 - 74,71	74,84 - 75,15	75,22-75,60	75,60 - 76,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	181,05	179,88	178,41	176,51	174,94	173,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
13	Indeks Transformasi Digital	Indeks	50,1	50,73	51,36	51,99	52,62	53,25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
14	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	%	63,58	65,06	66,54	68,01	69,49	70,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
15	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	36,08	41,23	46,31	52,37	53,63	59,598	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
16	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75,14	76,34	77,54	78,74	79,94	81,14	Dinas Pangan Aceh
17	Persentase kesesuain pembangunan dengan tata ruang	%	NA	72	74	76	78	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
18	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,487	0,51	0,533	0,556	0,579	0,602	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
19	Persentase kajian Wali Nanggroe terhadap implementasi MoU Helsinki dan UUPA	%	90	90	90	90	90	90	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
20	Inklusi Keuangan	%	94,91	95,24	95,56	95,89	96,21	96,54	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Ekonomi
21	Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB (ADHB)	%	27,27	27,72	28,23	29,21	30,13	31,05	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Ekonomi
22	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81	82	83	84	85	86	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Organisasi

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
I	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	75,77	67	77	80	83	85	87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
2	Rasio arsip yang dimanfaatkan	Rasio	0,05	0,01	0,5	0,7	0,75	0,8	0,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
3	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	76,76	-	84,55	85	85.5	86	87	Badan Kepegawaian Aceh
4	Indeks Wakaf Nasional Aceh	Indeks	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,8	0,83	Sekretariat Baitul Mal Aceh
5	Indeks Zakat Nasional Aceh	Indeks	0,53	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	Sekretariat Baitul Mal Aceh
6	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	%	100	95	70	75	80	85	90	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
7	Opini BPK	Opini	NA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
8	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	0.03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
9	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	44,41	55	58	61	64	67	70	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
10	Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)	Indeks	39	44,12	45,05	55	65,05	73,8	83,06	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
11	Persentase dayah yang mandiri	%	42,02	44	47,19	50,38	53,56	56,75	59,94	Dinas Pendidikan Dayah Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Jalan	Indeks	76,76	84,58	76,96	77,16	77,36	77,56	77,96	Dinas Perhubungan Aceh
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Angkutan Penyeberangan	Indeks	77,34	76,1	78,49	79,83	81,18	82,52	83,87	Dinas Perhubungan Aceh
14	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprenhensif	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
15	Persentase Desa yang sudah menggunakan pelayanan administrasi Pemerintahan secara digital melalui SIGAP	%	41	42	43	46	51	56	61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
16	Persentase lembaga kemasyarakatan gampong, adat dan lembaga lainnya yang aktif	%	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	90,13	90,13	90,15	90,2	90,25	90,25	90,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
18	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA	%	95	95	95	95	95	95	95	Sekretariat DPR Aceh
19	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	96,65	97,67	98	98,28	98,55	98,79	98,84	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
20	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
21	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
22	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
23	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	52,81	46,83	59,68	68,89	77,62	86,67	86,67	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
24	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	12,05	15,51	22,9	28,02	34,19	41	41	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
25	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	53,46	54	55	60	65	70	73	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
26	Persentase fasilitasi pelaku usaha dalam izin perdagangan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
27	Indeks Integritas Nasional	Indeks	NA	70,2	71,1	72	72,89	73,79	74,69	Inspektorat Aceh
28	Maturitas SPIP terintegrasi	Level	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Aceh
29	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	73,12	75,9	76	76,1	76,2	76,3	76,4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Persentase potensi konflik yang tertangani	%	90	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	40	40	45	50	55	60	65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
32	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	81,33	79,65	81,2	81,5	81,7	81,8	82	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
33	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,2	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
34	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,82	1,85	2,06	2,25	2,5	2,75	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
35	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	NA	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
36	Jumlah kebijakan yang dihasilkan dibandingkan dengan target atau kebutuhan kebijakan.	Rasio	1,33	1,33	1,6	1,6	1,6	1,6	1,33	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
37	Persentase penerapan kurikulum pendidikan islami dan ke-Aceh-an di kabupaten/kota	%	15,12	17,39	34,78	52,17	69,67	78,26	86,96	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
38	Persentase fatwa dan tausiyah yang telah ditetapkan untuk diterapkan	%	19,1	20,81	24,34	27,32	29,86	32,07	33,99	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
39	Persentase Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan	%	94,11	95	96	97	98	98,5	99	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
40	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	Perusahaan	544	1558	1924	2044	2044	2044	2044	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
41	Persentase lapangan kerja Menurut Status Formal dan Informal	%	NA	42 : 58	43,9 : 56,1	45,8 : 54,2	47,7 : 52,3	49,6 : 50,4	51,5 : 48,5	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
42	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17,31	17,19	19,87	22,54	25,22	27,89	30,57	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
43	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	30,47	34,82	39,16	43,51	47,85	52,2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
44	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	%	NA	68,5	70,47	72,44	74,41	76,38	78,35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
45	Persentase kepatuhan pembangunan terhadap rencana tataruang	%	NA	NA	72	74	76	78	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
46	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	79,5	88	82	85	91	92	94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
47	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	%	NA	77	77,5	78	78,5	79	80	Rumah Sakit Ibu dan Anak
48	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan									Rumah Sakit Jiwa Aceh
49	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan									BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
50	Persentase Peningkatan Kualitas Penyeleggaraan pembangunan	%	85	86	87	88	89	90	90,5	Sekretariat Daerah Aceh /Biro Administrasi Pembangunan

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
51	Persentase perumusan bahan kebijakan umum perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	99	99	99	99	99	99	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Ekonomi
52	Indeks penyelesaian fasilitas perundang-undangan	%	85	85	85	85	85	85	85	Sekretariat Daerah Aceh /Biro Hukum
53	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	67,8	68,5	71	73,5	76	78,6	81	Sekretariat Daerah Aceh /Biro Hukum
54	Persentase penyelesaian bantuan hukum	%	85	85	85	85	85	85	85	Sekretariat Daerah Aceh /Biro Hukum
55	Nilai SAKIP	Nilai	NA	67,5	68	68,5	70	70,5	71	Sekretariat Daerah Aceh /Biro Organisasi
56	Persentase OPD yang melakukan penataan organisasi	%	86	87	88	89	90	91	92	Sekretariat Daerah Aceh /Biro Organisasi
57	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks	81,84	100	82	83,25	84,5	85,15	86,1	Sekretariat Daerah Aceh /Biro Pengadaan Barang dan Jasa
58	Nilai LPPD	Skor	NA	2,9	2,95	2,955	2,96	2,965	2,97	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
59	Persentase kerjasama daerah	%	NA	20	40	55	70	85	100	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
60	Persentase segmen batas daerah yang dievaluasi	%	NA	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
61	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,45	4,47	4,5	4,53	4,55	4,57	4,6	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
62	Terintegrasinya sistem informasi pertanahan di kabupaten/kota se Aceh	%	21,74	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	13,04	Dinas Pertanahan Aceh
63	Tersusunnya Mapping/Pemetaan Sengketa dan konflik tanah dan terfasilitasinya sengketa dan konflik tanah	%	80	85	85	85	90	90	100	Dinas Pertanahan Aceh
II	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
64	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,54	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
65	Indeks Reintegrasi Aceh	Indeks	NA	0,08	0,14	0,2	0,26	0,33	0,39	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
66	Indek Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	76,6	86,94	87,01	87,08	87,15	87,22	87,22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
67	Indeks Keanekaragaman Hayati	%	NA	0,592	0,596	0,599	0,603	0,606	0,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
68	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63,25	77,25	77,57	77,77	77,97	78,17	78,37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
69	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	83,24	86,86	86,91	86,96	87,01	87,07	87,13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
70	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	NA	82,89	83,06	83,27	83,4	83,56	83,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
71	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	91,93	92,43	92,93	93,43	93,93	94,43	94,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
72	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	NA	0,592	0,596	0,599	0,603	0,606	0,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
73	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
74	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	%	13,9	13,8	13,62	13,5	13,4	13,2	13,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
75	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	%	2,32	2,31	2,3	2,28	2,27	2,26	2,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
76	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	62,7	62,9	63,2	63,4	63,7	63,9	64,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
77	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,64	92,85	93,05	93,5	93,7	93,7	93,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
78	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,7	66,7	67,6	68,6	69,5	70,3	71,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
79	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	9,3	9,1	8,9	8,7	8,5	8,4	8,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
80	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	83,5	84,2	84,9	85,5	86,1	86,7	87,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
81	Persentase penataan wilayah Mukim dan Gampong yang difasilitasi	%	NA	NA	NA	20	40	60	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
82	Indeks kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam menjalankan syariat islam	%	83	83,5	84	85	86	87	88	Dinas Syariat Islam Aceh
83	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	kWh	641	650	714,5	779	843,5	908	972,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
84	Persentase dimensi toleransi	%	65,05	65,07	65,09	66	66,05	66,09	67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
85	Persentase pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga Wali Nanggroe	%	NA	90	90	90	90	90	90	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
86	Indeks Adat Istiadat Aceh	Indeks	0,058	0,08	0,15	0,3	0,45	0,6	0,65	Sekretariat Majelis Adat Aceh
87	Persentase kawasan transmigrasi berstatus mandiri	%	NA	14,28571	14,28	28,57	35,71	40	42,86	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
88	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	35,71	35,71	38,17	40,63	43,09	45,55	50	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
89	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan Aceh
90	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	11,42	10	10,38	9,68	8,99	8,3	6,92	Dinas Pangan Aceh
91	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	83,4	83,79	84,29	84,79	85,29	85,79	86,29	Dinas Pangan Aceh
92	Kapasitas Air Baku	m3/detik	NA	0,19	0,65	1,11	1,57	2,03	2,49	Dinas Pengairan Aceh
93	Indeks Ketahanan Air Daerah	Indeks	3,54	3,58	3,61	3,65	3,69	3,72	3,76	Dinas Pengairan Aceh
94	Indek Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	51,25	52,5	53,75	55	56,25	57,5	58,75	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
95	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban	%	98	95	95	95	95	95	95	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
96	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	%	61,17	61,17	62,26	63,35	64,43	65,52	66,61	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
97	Persentase legalisasi aset dan penataan akses hasil reforma agraria	%	30	12	10	11	11	10	10	Dinas Pertanahan Aceh
98	Persentase Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Dokumen	6	2	2	2	2	2	2	Dinas Pertanahan Aceh
99	Persentase Meningkatnya peran kelembagaan pertanahan secara mandiri	%	75	75	75	75	80	80	80	Dinas Pertanahan Aceh
III	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
100	Tingkat Kegemaran Membaca	Indeks	69,93	73,28	72	73,2	74,5	75,5	77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
101	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%	NA	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
102	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	%	18,78	18,88	19,87	20,86	21,84	22,83	23,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
103	Persentase korban konflik yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	12,67	13,63	14,9	15,43	17,57	18,86	19,61	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
104	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	%	6,36	14,05	15,28	16,11	17,21	18,17	19,18	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
105	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	1,72	1,84	1,9	1,97	2,03	2,09	2,16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
106	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	55,33	56,53-56,56	57,11 - 57,15	57,69 - 57,74	58,27 - 58,33	58,85-58,92	59,43 - 59,51	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
107	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	NA	92,29	93,21	94,13	95,05	95,97	96,89	Dinas Kesehatan Aceh
108	Angka Kematian Balita (AKBa)	/1.000 LH	8	8	8	7	7	7	7	Dinas Kesehatan Aceh
109	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 LH	98	87	79	72	65	60	56	Dinas Kesehatan Aceh
110	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	36,7	39	41,3	43,6	45,9	48,2	50,5	Dinas Kesehatan Aceh
111	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	Dinas Kesehatan Aceh
112	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	NA	71	72,5	74	75,5	77	78,5	Dinas Kesehatan Aceh
113	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	36	46	55	62	67	70	Dinas Kesehatan Aceh
114	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	NA	7	10	13	16	19	20	Dinas Kesehatan Aceh
115	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Luar Biasa	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Aceh
116	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Aceh
117	Persentase RS Regional yang Fungsional	%	20	40	40	40	40	80	80	Dinas Kesehatan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
118	Prevalensi Stunting	%	28,6	27,1	25,6	24	22,5	21	19	Dinas Kesehatan Aceh
119	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	%	11,5	11	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	Dinas Kesehatan Aceh
120	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	50	55	58	60	65	70	75	Dinas Kesehatan Aceh
121	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	28,92	29,92	30,92	31,92	32,92	33,92	34,92	Dinas Sosial Aceh
122	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	27,92	28,92	29,92	30,92	31,92	32,92	33,92	Dinas Sosial Aceh
123	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	0,57	0,572	0,575	0,578	0,581	0,584	Dinas Sosial Aceh
124	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	NA	58,19	59,24	60,29	61,34	62,39	63,44	Dinas Pendidikan Aceh
125	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	NA	13,58	13,66	13,74	13,81	13,89	13,97	Dinas Pendidikan Aceh
126	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	NA	10,20-10,21	10,37 - 10,39	10,55 - 10,57	10,72 - 10,74	10,89-10,92	11,07 - 11,10	Dinas Pendidikan Aceh
127	Harapan Lama Sekolah	Tahun	NA	14,66-14,68	14,77 - 14,78	14,88 - 14,89	14,98 - 14,98	15,06 - 15,09	15,16 - 15,19	Dinas Pendidikan Aceh
128	Iklim Inklusivitas SMK	Nilai	57,42	56	57	58	59	60	70	Dinas Pendidikan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
129	Indeks Distribusi Guru SDLB	Nilai	0,17	0,25	0,33	0,41	0,49	0,57	0,65	Dinas Pendidikan Aceh
130	Indeks Distribusi Guru SMA	Nilai	0,42	0,5	0,58	0,66	0,74	0,82	0,9	Dinas Pendidikan Aceh
131	Indeks Distribusi Guru SMALB	Nilai	0,17	0,25	0,33	0,41	0,49	0,57	0,65	Dinas Pendidikan Aceh
132	Indeks Distribusi Guru SMK	Nilai	0,44	0,52	0,6	0,68	0,76	0,84	0,92	Dinas Pendidikan Aceh
133	Indeks Distribusi Guru SMPLB	Nilai	0,17	0,25	0,33	0,41	0,49	0,57	0,65	Dinas Pendidikan Aceh
134	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SDLB	Nilai	78,45	80	82	83	85	87	89	Dinas Pendidikan Aceh
135	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMA	Nilai	73,89	73	74	74	75	75	76	Dinas Pendidikan Aceh
136	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMALB	Nilai	77,68	72	78	83	89	94	99	Dinas Pendidikan Aceh
137	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMK	Nilai	71,71	70	72	74	76	78	83	Dinas Pendidikan Aceh
138	Indeks Iklim Keamanan Sekolah SMPLB	Nilai	74,51	75	76	77	78	79	80	Dinas Pendidikan Aceh
139	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	Indeks	66,84	71	76	80	84	89	94	Dinas Pendidikan Aceh
140	Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	Indeks	73,93	74	74	74	74	75	76	Dinas Pendidikan Aceh
141	Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	Indeks	69,39	72	74	76	78	80	82	Dinas Pendidikan Aceh
142	Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	Indeks	71,96	71	72	73	75	76	83	Dinas Pendidikan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
143	Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	Indeks	67,04	71	74	78	82	85	88	Dinas Pendidikan Aceh
144	Indeks Inklusivitas SDLB	Nilai	65,12	70	74	79	83	88	92	Dinas Pendidikan Aceh
145	Indeks Inklusivitas SMA	Nilai	59,39	61	62	63	65	66	68	Dinas Pendidikan Aceh
146	Indeks Inklusivitas SMALB	Nilai	72,06	69	72	75	79	82	85	Dinas Pendidikan Aceh
147	Indeks Inklusivitas SMPLB	Nilai	68,85	76	83	91	95	99	100	Dinas Pendidikan Aceh
148	Indeks Literasi SDLB	%	83,51	88	91	94	97	99	100	Dinas Pendidikan Aceh
149	Indeks Literasi SMA	%	64,95	69	72	76	80	83	87	Dinas Pendidikan Aceh
150	Indeks Literasi SMALB	%	64,62	74	83	88	84	90	96	Dinas Pendidikan Aceh
151	Indeks Literasi SMK	%	59,06	60	62	63	64	65	66	Dinas Pendidikan Aceh
152	Indeks Literasi SMPLB	%	76,62	82	86	91	96	99	100	Dinas Pendidikan Aceh
153	Indeks Numerasi SDLB	%	83,51	81	84	86	89	92	95	Dinas Pendidikan Aceh
154	Indeks Numerasi SMA	%	61,96	68	74	81	87	93	100	Dinas Pendidikan Aceh
155	Indeks Numerasi SMALB	%	63,4	78	85	88	92	96	100	Dinas Pendidikan Aceh
156	Indeks Numerasi SMK	%	57,89	59	61	62	64	65	66	Dinas Pendidikan Aceh
157	Indeks Numerasi SMPLB	%	63,64	82	85	89	95	99	100	Dinas Pendidikan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
158	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan SMK	%	72,31	80	87	90	93	97	100	Dinas Pendidikan Aceh
159	Kualitas Pembelajaran SDLB	Nilai	71,23	69	71	74	77	79	81	Dinas Pendidikan Aceh
160	Kualitas Pembelajaran SMK	Nilai	64,84	62	65	67	70	73	80	Dinas Pendidikan Aceh
161	Kualitas Pendidikan (SPM)	%	69,33	70,67	73,17	75,67	78,17	80,67	83,17	Dinas Pendidikan Aceh
162	Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitias, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter.	Nilai	57,74	58,14	60,14	64,14	72,14	82,14	85,14	Dinas Pendidikan Aceh
163	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	NA	8,70 – 13,04	9,75 – 14.00	10,50 - 15,00	11,75 - 16,00	13,00 - 17,00	14,00 - 18,00	Dinas Pendidikan Aceh
164	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	NA	0,00 – 3,00	1,00 - 3,50	2,00 - 4,00	3,00 - 5,20	4,00 - 7,00	5,00 - 8,00	Dinas Pendidikan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
165	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	NA	30,00 - 32,00	31,35- 33,50	33,00 - 35,00	34,00 - 36,50	35 - 38	36,00 - 39,00	Dinas Pendidikan Aceh
166	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	NA	27,00 - 29,00	28,00 - 29,8	28,50 - 30,50	29,25 - 32,00	30,00 - 33,00	31,00 - 34,00	Dinas Pendidikan Aceh
167	Rasio Konektivitas	Rasio	0,7	0,7	0,7	0,71	0,72	0,73	0,76	Dinas Perhubungan Aceh
168	Indek Terima Peternak (ItPt)	Indeks	105,55	105,11	106,43	106,66	106,73	106,84	107	Dinas Peternakan Aceh
169	Pertumbuhan Produksi daging (Ternak Besar, Kecil dan Unggas)	Ton	63.011	14.080	12.500	12.670	12.700	12.715	12.810	Dinas Peternakan Aceh
170	Pertumbuhan produksi telur (ayam, itik, puyuh)	Ton	169.84	23.580	344.000	564.655	564.655	564.655	564.655	Dinas Peternakan Aceh
171	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	91.117	91.500	92.000	92.500	93.000	93.500	94.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
172	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	270.260	273.000	274.000	276.000	278.000	280.000	282000	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
173	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	%	5,63	5,63	5,7	5,72	5,74	5,76	5,65	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
174	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,459	0,44	0,438	0,43	0,425	0,389	0,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
175	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	NA	65,79	66,47	67,15	67,8	68,5	68,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
176	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,34	68,34	70,34	72,34	74,34	76,34	78,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
177	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	NA	75,34	76,15	76,2	76,2	76,3	76,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
178	Persentase kabupaten kota menuju layak anak (KLA)	%	73,91	78,23	82,6	86,9	91,3	93,6	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
179	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%	NA	22	24,06	24,06	26,13	30,25	28,19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
180	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65,7	66	66,35	66,7	67	67,35	67,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
181	Indeks Harga Konsumen	%	107,21	110	110	109	108	107	106	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
182	Persentase penanganan potensi konflik sosial	%	75	20	80	82	84	86	88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
183	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	%	35,71	35,71	38,17	40,63	43,09	45,55	50	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
184	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	NA	42	44,38	46,75	49,13	51,5	53,88	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
185	Persentase gerakan kepramukaan yang aktif	%	95	95	95	96	97	98	100	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
186	Persentase pembinaan olahraga	%	55,73	55,73	55,57	60,6	63,63	68,18	72,72	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
187	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,57	70,7	70,84	71,00	71,20	71,38	71,42	Rumah Sakit Ibu dan Anak
188	Persentase pemanfaatan lahan terlantar	%	0	14,53	15,64	17,32	18,99	20,11	26,82	Dinas Pertanahan Aceh
189	Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	KEP	604	11,45	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
190	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha	5,54	5,55	5,56	5,57	5,58	5,59	5,6	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
191	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	%	35	37	39	43	48	52	56	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
IV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
192	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,87	56	58,5	60	62	64	64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
193	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	91,77	93	94	95	96	97	98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
194	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	Nilai	NA	1.443.395	1.996.602	2.549.810	3.103.017	3.656.225	4.209.432	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
195	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	NA	-	65	70	75	80	85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
197	Total Kredit/PDRB (%)	%	18,09	18,1	19,09	20,09	21,08	22,07	23,06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
199	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
201	Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA	%	NA	0,5	0,56	0,63	0,69	0,75	0,81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
203	Persentase kemandirian fiskal Aceh	%	NA	26,8	27,66	27,8	47,14	48,41	48,41	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
205	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,79	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
207	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	Ribu Orang	12,6	12	13,1	13,3	13,6	14	14,1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
209	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan ke museum	%	-1,54	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
211	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan mancanegara dan nusantara	%	44,41	15	18	21	24	27	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
213	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	0,86	0,88	0,9	0,91	0,96	0,98	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
215	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp Juta	27,7	46,8	50,95	55,7	60,45	65,2	69,95	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
217	Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Ha	149.691	149.691	149.691	149.691	149.691	149.691	149.691	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
219	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104,71	105,92	107,13	108,34	109,55	110,76	111,97	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
221	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	%	14,62	15	18,75	22,5	26,25	30	33,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
223	Persentase Desa Mandiri	%	NA	0,54	0,95	1,36	1,77	2,18	2,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
225	Persentase pembinaan kerjasama gampong berbasis kawasan perdesaan	%	NA	NA	NA	20	40	60	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
227	Persentase Peningkatan BUMG Maju	%	2	3	4	6	8	10	12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
229	Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA)	Rp Trilliun	9,47	9,5	9,8	10	10,2	10,4	10,6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
231	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	% PDRB	30,19	32,44 - 32,77	32,77 - 33,10	33,10 - 33,43	33,43 - 33,76	33,76 - 34,09	34,09 - 34,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
233	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	SBM/ Rp milyar	108,19	107,25	106,62	106	105,39	104,78	104,17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
235	Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	7,05	4,6	4,75	4,9	5,05	5,2	5,35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
237	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	%	7,08	9,41	12,07	12,79	12,79	14,9	18,51	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
239	Rasio Elektrifikasi	%	99,2	99,45	99,6	99,72	99,83	99,92	99,99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
241	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	63,81	64,13-64,79	64,78-65,44	65,43-66.09	66,08-66,74	66,73-67,39	67,13-67,79	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
243	Jumlah produk tersertifikasi halal	Produk	44577	41695	42202	42703	43173	43573	43973	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
245	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	%	7,23	7,09	6,95	6,81	6,67	6,53	6,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
247	Nilai Ekspor bersih Aceh	USD	29.251.565	238.421.628	247.958.493	258.203.769	268.531.920	279.273.197	229.251.565	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
249	Persentase peningkatan ekspor	%	10,77	4	4	4	4	4	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
251	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	%	0,54	0,56	0,59	0,62	0,65	0,69	0,72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
253	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	4,71	4,81	4,93	5,05	5,17	5,3	5,42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
255	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	3,7	3,78	3,87	3,87	3,95	4,03	4,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
257	Persentase Koperasi Sehat	%	37	38	39	40	41	42	43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
259	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	%	25,1	1	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
261	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	0,34	0,4	0,41	0,42	0,425	0,44	0,45	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
263	Rasio Kewirausahaan	Rasio	3,94	4	4,02	4,04	4,07	4,1	4,11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
265	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,45	0,78	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
267	Proporsi UMKM terhadap jumlah angkatan kerja (%) (sebagai proxy proporsi PDRB ekonomi kreatif)	%	NA	16,41	16,48	16,54	16,61	16,67	16,74	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
269	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)	%	9,1	8,48	7,99	7,49	7	6,5	6,01	Dinas Pangan Aceh
271	Persentase irigasi modern	%	66,47	67,13	67,87	68,69	69,58	70,55	71,61	Dinas Pengairan Aceh
273	Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	56,44	56,59	56,71	56,83	56,97	57,12	57,28	Dinas Pengairan Aceh
275	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	NA	62	64	66	68	70	72	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
277	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	80,8	81,01	81,44	81,69	81,86	82,01	82,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
279	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	1,9	1,92	2,1	2,29	2,47	2,5	2,55	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Ekonomi
281	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	Indeks	119,25	117,66	119,74	121,81	123,89	125,96	128,04	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Akreditasi Sekolah SLB	%	78,57	NA	80	85	90	95	100	Dinas Pendidikan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
2	Akreditasi Sekolah SMA	%	96,25	NA	93	94	96	98	100	Dinas Pendidikan Aceh
3	Akreditasi Sekolah SMK	%	93,33	NA	97	98	99	100	100	Dinas Pendidikan Aceh
4	Kualitas Pembelajaran SMA	Nilai	66,14	66	66	67	67	68	75	Dinas Pendidikan Aceh
5	Kualitas Pembelajaran SMALB	Nilai	69,57	64	70	75	81	86	91	Dinas Pendidikan Aceh
6	Kualitas Pembelajaran SMPLB	Nilai	69,31	68	69	71	72	74	76	Dinas Pendidikan Aceh
7	Penyerapan Lulusan SMK	%	87,19	83	87	91	95	99	100	Dinas Pendidikan Aceh
8	Proporsi PTK bersertifikat SDLB	%	23,01	33	42	51	61	70	73	Dinas Pendidikan Aceh
9	Proporsi PTK bersertifikat SMA	%	32,32	48	64	80	96	112	114	Dinas Pendidikan Aceh
10	Proporsi PTK bersertifikat SMALB	%	23,01	33	42	51	61	70	73	Dinas Pendidikan Aceh
11	Proporsi PTK bersertifikat SMK	%	28,57	44	59	74	89	104	108	Dinas Pendidikan Aceh
12	Proporsi PTK bersertifikat SMPLB	%	23,01	33	42	51	61	70	73	Dinas Pendidikan Aceh
AB	**1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
13	Persentase fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan yang standar	%	NA	10	26	34	43	53	55	Dinas Kesehatan Aceh
AC	**1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
14	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	NA	NA	3,12	3,34	3,56	3,78	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
15	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Regional	%	NA	30	4,5	9	13,5	18	40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
16	Persentase Pemenuhan Layanan Air Minum SPAM Lintas Kab/Kota	%	NA	15	16,5	20,5	26,5	30,5	40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
17	Persentase pemenuhan penyelenggaraan drainase perkotaan	%	NA	NA	NA	20	40	70	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
18	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Regional	%	-	-	-	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
19	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	%	80,5	80,5	81	81,5	82	83	83,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
AD	**1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
20	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	%	66,38	66	67,88	69,38	70,88	72,38	73,88	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
21	Persentase perumahan yang teridentifikasi di lokasi berpotensi relokasi dan di lokasi rawan bencana	%	-	-	-	100	100	100	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
22	Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,208	0,210	0,211	0,213	0,214	0,216	0,218	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
AE	**1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
23	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
24	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
25	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
26	Persentase penegakan peraturan daerah	%	37	37	38	39	40	40	40	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
27	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun syariat islam dan kebijakan kepala daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
28	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	%	81	81	90	90	90	90	90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
29	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	79,47	79,8	80	81	82	83	84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh
AF	**1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
30	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (KTK)Dalam & Luar Negeri yang mendapatkan layanan pemulangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
31	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Aceh
32	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Aceh
33	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dan Kemiskinan	%	29,92	30,92	31,92	32,92	33,92	34,92	35,92	Dinas Sosial Aceh
34	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Aceh
35	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Aceh
36	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Aceh
37	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	68,59	68,64	68,65	68,7	68,76	68,81	68,89	Dinas Sosial Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)
38	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	%	90,51	91,51	92,51	93,51	94,51	95,51	96,51	Dinas Sosial Aceh
39	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	68,59	68,64	68,65	68,7	68,76	68,81	68,89	Dinas Sosial Aceh
40	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	%	68,59	68,64	68,65	68,7	68,76	68,81	68,89	Dinas Sosial Aceh
41	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	%	68,59	68,64	68,65	68,7	68,76	68,81	68,89	Dinas Sosial Aceh
42	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
43	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Aceh
44	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	68,59	68,64	68,65	68,7	68,76	68,81	68,89	Dinas Sosial Aceh
45	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) yang terkelola dengan baik.	%	76,1	87,98	90,53	90,53	90,53	90,53	90,53	Dinas Sosial Aceh
AG	**2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
45	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	NA	52,8	77,61	78,39	79,08	79,69	80,23	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
46	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	%	NA	29,27	32,1	34,94	37,77	40,61	43,44	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
47	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Pemerintah	Perusahaan	161	50	245	329	413	497	581	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
48	Persentase Angkatan Kerja yang bekerja	%	94,16	94,35	94,56	94,78	95	95,22	95,44	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
49	Persentase tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi melalui pelatihan dan pemagangan yang ditempatkan	%	NA	87,8	45,45	47,3	49,75	50,55	52,15	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
AH	**2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
50	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	60,5	60,5	70	70,5	80	80,5	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
51	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	NA	80	80	80	80	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
52	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBA	%	8,056	9	10	11	12	13	14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
53	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan kualitas keluarga	%	12,9	17,2	21,5	25,8	30,1	34,4	38,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	49,62	50,52 - 52,29	50,70 - 52,75	50,88 - 53,22	51,07 - 53,68	51,44 - 54,15	51,62 - 54,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
55	Tingkat pemahaman data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
AI	**2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
56	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	100	95	95	95	95	95	95	Dinas Pangan Aceh
AJ	**2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
57	Meningkatnya Kertesediaan Kepemilikan Lahan Untuk Fasilitas Publik dan Tanah Masyarakat Miskin	Persil	1970	400	400	400	400	400	400	Dinas Pertanahan Aceh
58	Persentase penyelesaian pemetaan pertanahan	%	30,85	11	11	11	11	11	11	Dinas Pertanahan Aceh
59	Persentase Sengketa dan konflik tanah ulayat lintas kab/kota yang diselesaikan	%	52,63	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	5,26	Dinas Pertanahan Aceh
AK	**2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
60	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	48	52	55	56,5	58	59	61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
61	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Ton	7851,2	7851,2	7855	7860	7865	7870	7875	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
62	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	12	6	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
63	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan hidup	%	42	35	35	35	35	35	35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
64	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	80	80	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
65	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensi	%	NA	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
66	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	80	80	80	80	80	80	80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
67	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	% RT	NA	22	26,88	31,75	36,63	41,5	46,38	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
AL	**2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
68	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
AM	**2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
69	Persentase Masyarakat Berkeselamatan di Daerah Perlintasan Sebidang Kereta Api dengan Jalan Provinsi	%	NA	0,58	20	25	30	35	40	Dinas Perhubungan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
AN	**2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
70	Jumlah Koperasi meningkat kapasitas produksinya	Koperasi	5	NA	6	4	5	5	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
71	Jumlah Koperasi yang Meningkat Kapasitas SDM	Koperasi	150	NA	200	250	300	350	400	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
AO	**2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
72	Meningkatnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam Penyampaian LKPM	%	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
73	Pelaku Usaha/Perusahaan yang berminat berinvestasi	Perusahaan	100	100	200	300	350	400	450	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
74	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dapat di akses	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh
AP	**2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
75	Persentase pemuda yang dibina	%	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
AQ	**2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
76	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	14,75	1,64	4,92	6,56	9,84	11,48	12,3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
77	Persentase masyarakat penerima akses informasi sejarah	%	0,01	2,19	4,38	8,77	13,25	17,54	21,92	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
78	persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	61,49	61,63	61,86	62,89	63,62	64,14	64,65	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
AR	**2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
79	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,42	0,02	74,25	75,5	77	78,5	79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
AS	**2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
80	Rasio Naskah Kuno	Rasio	0,05	0,02	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
81	Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	93,54	0,1	94,5	95	96	97	98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
AT	**3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
82	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Kg/Kapita/Tahun	65,93	59	59,52	59,65	59,73	59,87	59,94	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
AU	**3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
83	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	29,7	30.29	30,9	31,51	32,14	32,79	33,44	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
AV	**3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
84	Persentase Keberhasilan Panen	%	95,2	95	95,3	95,4	95,5	95,6	95,7	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
85	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	%	80	83	90	95	97	98	100	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
86	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Bakteri yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	%	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07	Dinas Peternakan Aceh
87	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Parasit yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	%	8,74	8,66	7,87	7,08	6,37	5,73	5,16	Dinas Peternakan Aceh
88	Rasio jumlah penyakit hewan disebabkan Virus yang dilaporkan terhadap jumlah populasi ternak	%	8,91	7,92	7,2	6,48	5,83	5,25	4,73	Dinas Peternakan Aceh
AW	**3.28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**									
89	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
90	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	NA	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
91	Persentase Peningkatan Kelompok Petani Hutan	%	NA	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
92	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	2,5	2,5	0,5	0,7	0,9	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
93	Rehalibitasi lahan di sempadan sungai	Hektare	NA	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
AX	**3.29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**									
94	Luas Wilayah Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Km2	3086	5002	6200	7053	7644	8769	9894	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
95	Rasio ketersediaan energi baru terbarukan atau (EBT) terhadap pemakaian energi listrik	%	6,15	13,23	20,86	21,38	20,39	25,55	31,47	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
AY	**3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
96	Menjamin ketersediaan stok bapokting dan keterjangkauan harga	%	10	15	20	25	60	80	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
97	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
AZ	**3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
98	Persentase jumlah izin yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
99	Persentase kepatuhan pelaporan informasi industri	%	70	2	80	90	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
100	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi Berizin	%	2,4	2,43	1,11	1,31	1,45	1,5	1,6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
101	Proporsi penggunaan produk lokal dalam promosi yang difasilitasi (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
BA	**3.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
102	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	35,71	35,71	38,17	40,63	43,09	45,55	50	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
BB	**4.01. SEKRETARIAT DAERAH**									
103	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	NA	75	75	75	75	75	75	Sekretariat Daerah Aceh/Biro Keistimewaan dan Kesejahteraaan Rakyat
BC	**5.01. PERENCANAAN**									
104	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
105	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
106	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJP,RPJMA,RKPA) bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
107	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	%	90	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
BD	**5.02. KEUANGAN**									
108	Indeks kualitas pelayanan keuangan	Skor	NA	3	3,2	3,5	3,8	3,9	3,95	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
	Persentase Peningkatan kualitas laporan keuangan	%	88,8	88,8	90,8	90.82	90.84	90.86	90.88	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
BE	**5.03. KEPEGAWAIAN**									
109	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada SKPA	%	98.2	85	98	98	98	98	98	Badan Kepegawaian Aceh
BF	**5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
110	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal	Orang	115	85	150	175	200	210	230	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
111	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,3	0,85	1,8	3,3	4,8	6,3	8,1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
BG	**5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
112	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	NA	-	35	40	45	50	55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
113	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	86	-	88	90	92	94	96	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
BH	**6.01. INSPEKTORAT DAERAH**									
114	Aparatur yang memenuhi kompetensi	Level	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Aceh
115	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	%	75,28	75	80	83,5	85	87,5	90	Inspektorat Aceh
BI	**8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
116	Jumlah LSM/ORMAS yang terdaftar	LSM/ ORMAS	10	12	15	20	26	30	35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
117	Persentase masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	%	31	25	42	46	52	57	62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
118	Persentase masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka Pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	44,98	95	52	55	57	59	61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						SKPA PENGAMPU
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(1)*
119	Persentase Masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas pendidikan politik	%	10	12	17	23	33	43	54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BJ	**9.01. KEKHUSUSAN ACEH**									
120	Indeks kompetensi kurikulum dayah	Indeks	65	67	68,9	73,03	77,42	82,06	86,98	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
121	Indeks Pemberdayaan Lembaga Wali Nanggroe	Indeks	85	87	90	92	93,5	96	98	Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
122	Persentase kelengkapan sarana belajar mengajar	%	60	62,5	64,2	68,69	73,5	78,65	84,15	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
123	Persentase kompetensi tenaga pengajar/teungku dayah	%	65	66,5	68,25	71,66	75,26	79,01	82,96	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
124	Persentase korban pelanggaran HAM yang direkomendasikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	%	0	0	19,08	22,49	20,61	15,33	22,49	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
125	Persentase mesjid yang tertata manajemen dan kemakmurannya	%	76	79	82	85	88	91	94	Dinas Syariat Islam Aceh
126	Persentase Penyaluran terhadap Pengumpulan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama Lainnya	%	80	85	90	91	92	93	94	Sekretariat Baitul Mal Aceh

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 memuat latar belakang maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, isu-isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan, visi dan misi pembangunan. Di samping itu, RPJMA ini juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja pembangunan. RPJMA disusun dengan landasan pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.

RPJMA Tahun 2025-2029 ini juga disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMA Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah periode 5 (lima) tahun, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota.

Keberhasilan Pemerintahan Aceh periode 2025-2029 dalam mewujudkan visi "**ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN**" perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.

RPJMA ini adalah komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, pelaksanaan RPJMA ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Semoga program-program dan kebijakan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

5.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, pedoman transisi dirancang untuk menjembatani peralihan dari periode RPJMA sebelumnya ke periode yang baru. Pedoman ini menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program-program prioritas serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Pada masa transisi periode Pemerintahan Aceh Tahun 2025-2029 dan belum ada dasar dokumen perencanaan pada tahun 2030, maka RPJM Aceh ini dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJMA periode berikutnya ditetapkan. Hasil evaluasi target dan capaian program menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan di masa transisi, terutama untuk program-program prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan disusun sebagai panduan normatif yang memastikan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan secara konsisten, akuntabel, dan terarah. Kaidah-kaidah ini mencakup prinsip-prinsip, mekanisme, serta prosedur pelaksanaan yang harus diikuti oleh seluruh pihak terkait dalam mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMA.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan Aceh sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yaitu: 1. Gender dan inklusi sosial; 2. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); 3. Transformasi digital; 4. Pembangunan rendah karbon; dan 5. Pembangunan berketahanan iklim.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, efisien, efektif, partisipatif dan penuh tanggung jawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh agar melaksanakan program-program dalam RPJMA ini dengan sebaik-baiknya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (SKPA) berkewajiban menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berpedoman pada RPJMA yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) di lingkungan Pemerintah Aceh.
3. RPJMA ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMK) dengan RPJMA.
5. Periode RPJMA dan RPJMK mengikuti periode RPJMN yaitu Tahun 2025-2029.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMA ke dalam dokumen Renstra SKPA.
7. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi RPJM Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh berkewajiban melakukan pembinaan

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa konsultasi/fasilitasi dan evaluasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan kabupaten/kota.

Selain itu, kaidah ini menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat. Penetapan prioritas pembangunan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara adil dan merata.

Kaidah pelaksanaan RPJMA ini juga mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi yang berfungsi sebagai alat pengendali untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap proses pembangunan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

GUBERNUR ACEH,

dto

MUZAKIR MANAF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh

Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No.26
Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh